PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 29 TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2026

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 32 Temanggung
Telepon (0293) 491004 Faksimili (0293) 491040 491801

www.temanggungkab.go.id
info.temanggungkab.go.id
bappedatemanggung
bappeda temanggung

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 PROSES PENYUSUNAN I-2
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-5
1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I-7
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN I-7
1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD I-8

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **II-1**
2.1 KONDISI UMUM DAERAH II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1.1 Aspek Geografi II-1
2.1.1.2 Kondisi Demografi II-16
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-25
2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi II-25
2.1.2.2 Struktur Ekonomi II-34
2.1.2.3 PDRB Perkapita II-36
2.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) II-39
2.1.2.5 Tingkat Kemiskinan II-51
2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia II-58
2.1.2.7 Ketimpangan II-67
2.1.2.8 Aspek Seni Budaya dan Olahraga II-74
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-75
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-75
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-163
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan II-253
2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-285
2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-297

2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II-313
2.1.3.7 Unsur Kewilayahan..... II-319
2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum II-326
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah..... II-328
2.1.5 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) II-342
2.1.6 Penyelenggaraan Pemantauan dan Pengendalian Pemerintah Daerah II-343
2.2 EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH II-346
2.2.1 Evaluasi Kinerja Utama II-346
2.2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... II-351
2.2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... II-372
2.2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan..... II-397
2.2.5 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-404
2.2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan..... II-408
2.2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II-415
2.2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan..... II-416
2.2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum II-422
2.2.10 Ringkasan Hasil Evaluasi Kinera Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... II-423
2.2.11 Evaluasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-439
2.2.12 Evaluasi Kinerja Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) II-440
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH II-441
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah..... II-441
2.3.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... II-441
2.3.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II-441
2.3.2 Isu Strategis II-461
2.4 KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH..... II-466
2.4.1 Kinerja Prioritas Nasional (PN) RKP 2025 di Daerah II-466
2.4.2 Intervensi Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Prioritas Tahun 2025 ..... II-471

2.5 INOVASI DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH II-474
2.6 PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN TEMANGGUNG.... II-500

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... III-1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional..... III-1
3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional III-3
3.1.3 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah..... III-5
3.1.4 Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah..... III-6
3.1.5 Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung III-8
3.1.6 Proyeksi dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung..... III-9
3.1.6.1 Pertumbuhan Ekonomi..... III-10
3.1.6.2 Struktur Ekonomi..... III-12
3.1.6.3 PDRB Per Kapita..... III-15
3.1.6.4 Inflasi III-16
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-17
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-20
3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah III-28
3.2.2.1 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah III-34
3.2.2.2 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah III-35
3.2.2.3 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah III-35
3.2.2.4 Persentase Belanja Tidak Terduga..... III-36
3.2.2.5 Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja Seluruh Perangkat Daerah III-36
3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah III-37
3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan..... III-37
3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan..... III-38
3.3 OPINI BPK-RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH..... III-42

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 VISI DAN MISI IV-1
4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN..... IV-7
4.2.1 Tujuan dan Sasaran..... IV-7
4.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan IV-11
4.3 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026..... IV-22

4.3.1 Tema Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-22
4.3.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-24
4.4 DUKUNGAN SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH IV-117
4.4.1 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) IV-117
4.4.2 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2026 ..... IV-122
4.4.3 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan IV-128
4.4.4 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung..... IV-131
4.4.5 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung..... IV-133
4.4.6 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung IV-137
4.4.7 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim..... IV-139
4.4.8 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur..... IV-140
4.4.9 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2026..... IV-142
4.4.10 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2026..... IV-143
4.4.11 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta..... IV-145
4.4.12 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia IV-146
4.4.13 Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah..... IV-148

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 RENCANA KERJA DAERAH V-1
5.1.1 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 Kabupaten Temanggung Terhadap Prioritas Nasional (PN)..... V-2
5.1.2 Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) V-64
5.1.3 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah V-76
5.1.4 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Satu Data Indonesia V-97

5.2 PENDANAAN DAERAH V-97
5.2.1 Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang..... V-98
5.2.2 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang..... V-119

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1
6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH..... VI-1
6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH VI-2
6.3 INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH VI-11

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ..... II-2
Tabel 2.2 Kemiringan Lahan di Kabupaten Temanggung..... II-4
Tabel 2.3 Curah Hujan Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung.. II-5
Tabel 2.4 Jenis Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung II-7
Tabel 2.5 Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian..... II-8
Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 II-8
Tabel 2.7 DAS dan Sub DAS di Kabupaten Temanggung..... II-10
Tabel 2.8 Jenis Geologi Kabupaten Temanggung Tiap Kecamatan.... II-11
Tabel 2.9 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 ..... II-16
Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024 II-17
Tabel 2.11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2024 ..... II-19
Tabel 2.12 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 ..... II-20
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2020-2024 ..... II-22
Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 II-23
Tabel 2.15 Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2024..... II-24
Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2024 ..... II-25
Tabel 2.17 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target Daerah dan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2020-2024 ..... II-26
Tabel 2.18 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024 ..... II-29
Tabel 2.19 Pertumbuhan Lapangan Usaha Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024.... II-30
Tabel 2.20 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024..... II-33
Tabel 2.21 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKP Kewilayahan..... II-34
Tabel 2.22 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-35
Tabel 2.23 Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Persen)..... II-36
Tabel 2.24 Perbandingan PDRB (ADHK) dan PDRB (ADHB) Daerah

dengan Target RKPD Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah) II-37
Tabel 2.25 Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024 ..... II-38
Tabel 2.26 Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung ... II-38
Tabel 2.27 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya II-42
Tabel 2.28 Perbandingan TPT Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 ..... II-43
Tabel 2.29 Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelang-manggung Tahun 2020-2024 ..... II-43
Tabel 2.30 Perbandingan TPT Daerah dengan Target RKP Kewilaya-han II-44
Tabel 2.31 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-45
Tabel 2.32 Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-46
Tabel 2.33 Rata-rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Pengang-gur selama 5 (lima) Tahun..... II-48
Tabel 2.34 Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung II-49
Tabel 2.35 Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024..... II-50
Tabel 2.36 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-50
Tabel 2.37 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Tingkat Ke-miskinan) dengan Target RKPD II-53
Tabel 2.38 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Target RKP Kewilayahan II-54
Tabel 2.39 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capai-an Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-54
Tabel 2.40 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 ..... II-54
Tabel 2.41 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Capaian Nasional ... II-55
Tabel 2.42 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin, Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dengan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-56

Tabel 2.43 Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional II-57
Tabel 2.44 Perbandingan Rasio Perubahan Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Capaian Nasional Tahun 2020-2024..... II-57
Tabel 2.45 Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Perbandingan Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-58
Tabel 2.46 Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-60
Tabel 2.47 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-61
Tabel 2.48 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UHH, RLS, HLS, Pengeluaran per Kapita Daerah dengan Target RKPD II-62
Tabel 2.49 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya II-63
Tabel 2.50 Perbandingan Pertumbuhan IPM Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-63
Tabel 2.51 Perbandingan AHH dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-64
Tabel 2.52 Perbandingan Pertumbuhan AHH Daerah dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-65
Tabel 2.53 Perbandingan HLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-65
Tabel 2.54 Perbandingan Pertumbuhan HLS Daerah dengan Capaian Rata-rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-66
Tabel 2.55 Perbandingan RLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-67
Tabel 2.56 Perbandingan Pertumbuhan RLS Daerah dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-67
Tabel 2.57 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-68
Tabel 2.58 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-69
Tabel 2.59 Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024..... II-71
Tabel 2.60 Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya..... II-71

Tabel 2.61 Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 II-70
Tabel 2.62 Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-73
Tabel 2.63 Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-73
Tabel 2.64 Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Tahun 2020-2024..... II-74
Tabel 2.65 Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini..... II-75
Tabel 2.66 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung..... II-76
Tabel 2.67 Indek Pembangunan Olahraga..... II-77
Tabel 2.68 Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Literasi Membaca SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-82
Tabel 2.69 Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Literasi Membaca SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-83
Tabel 2.70 Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Numerasi SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-83
Tabel 2.71 Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Numerasi SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-84
Tabel 2.72 Gambaran Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-90
Tabel 2.73 Rasio Guru/Siswa PAUD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-97
Tabel 2.74 Rasio Guru/Siswa SD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-98
Tabel 2.75 Rasio Guru/Siswa SMP Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-99
Tabel 2.76 Usia Harapan Hidup Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-100
Tabel 2.77 Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-101
Tabel 2.78 Jumlah Kasus Kematian Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-102
Tabel 2.79 Gambaran Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-107
Tabel 2.80 Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-110
Tabel 2.81 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun

2020-2024 ..... II-111
Tabel 2.82 Angka Kematian Bayi di Kaupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-112
Tabel 2.83 Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-113
Tabel 2.84 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-114
Tabel 2.85 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-115
Tabel 2.86 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 s.d 59 Tahun) Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung II-116
Tabel 2.87 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Warga Usia 60 Tahun Keatas Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-117
Tabel 2.88 Persentase Orang terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-119
Tabel 2.89 Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Menda-Patkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-120
Tabel 2.90 Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-121
Tabel 2.91 Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-122
Tabel 2.92 Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-123
Tabel 2.93 Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-128
Tabel 2.94 Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerja-An Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-128
Tabel 2.95 Rincian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2024 ..... II-130
Tabel 2.96 Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-131
Tabel 2.97 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2020-2024 ..... II-132
Tabel 2.98 Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-132
Tabel 2.99 Persentase Trotoar Kondisi Baik di Kabupaten Temang-Gung Tahun 2020-2024 ..... II-133
Tabel 2.100 Kondisi Trotoar Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ..... II-134
Tabel 2.101 Panjang Jalan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Temanggung Tahun 2024 ..... II-134

Tabel 2.102 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-137
Tabel 2.103 Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-138
Tabel 2.104 Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Temanggung Berda-Sarkan Fungsinya II-138
Tabel 2.105 Jalan Kewenangan Kabupaten dengan Lebar Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ..... II-139
Tabel 2.106 Persentase Jumlah TPS 3R di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-140
Tabel 2.107 Akses Sanitasi Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-141
Tabel 2.108 Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ... II-142
Tabel 2.109 Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Peruma-Han Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-143
Tabel 2.110 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-146
Tabel 2.111 Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-147
Tabel 2.112 Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-148
Tabel 2.113 Persentase Kepemilikan Rumah Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-149
Tabel 2.114 Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-151
Tabel 2.115 Cakupan Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-152
Tabel 2.116 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-153
Tabel 2.117 Gambaran Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-154
Tabel 2.118 Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-156
Tabel 2.119 Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-157
Tabel 2.120 Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-163
Tabel 2.121 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-168
Tabel 2.122 Gambaran Indikator Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-168
Tabel 2.123 Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Kabupaten Temanggung

Tahun 2020 – 2024 ..... II-170
Tabel 2.124 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-171
Tabel 2.125 Perusahaan yang Memenuhi Kewajiban dalam Memberikan Upah Sesuai UMK di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-174
Tabel 2.126 Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Tahun 2020 – 2024 ..... II-175
Tabel 2.127 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-177
Tabel 2.128 Gambaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-179
Tabel 2.129 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-183
Tabel 2.130 Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-184
Tabel 2.131 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-185
Tabel 2.132 Capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 II-189
Tabel 2.133 Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2020-2024 ..... II-192
Tabel 2.134 Gambaran Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-193
Tabel 2.135 Persentase RTH Publik Kabupaten Temanggung yang Terpelihara Tahun 2020-2024..... II-199
Tabel 2.136 Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan Kabupaten Temanggung yang Terpelihara Tahun 2020-2024 ..... II-202
Tabel 2.137 Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-202
Tabel 2.138 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengo-Lahan Sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-203
Tabel 2.139 Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-205
Tabel 2.140 Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-206
Tabel 2.141 Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-207
Tabel 2.142 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024..... II-209
Tabel 2.143 Persentase Kepemilikan KK, KTP Elektronik, dan KIA Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-209
Tabel 2.144 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-210

Tabel 2.145 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-212
Tabel 2.146 Gambaran Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pem-Berdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-213
Tabel 2.147 Total Fertility Rate Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-219
Tabel 2.148 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-219
Tabel 2.149 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-219
Tabel 2.150 Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed) Kabupaten Temangugng Tahun 2020-2024 ..... II-220
Tabel 2.151 Persentase Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Tahun 2020-2024 ..... II-222
Tabel 2.152 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Perhubungan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-224
Tabel 2.153 Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 . II-229
Tabel 2.154 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-230
Tabel 2.155 Ineks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-230
Tabel 2.156 Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-231
Tabel 2.157 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 II-232
Tabel 2.158 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-235
Tabel 2.159 Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-236
Tabel 2.160 Realisasi Investasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-237
Tabel 2.161 Gambaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-241
Tabel 2.162 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-243
Tabel 2.163 Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-244
Tabel 2.164 Gambaran Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-245
Tabel 2.165 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-247
Tabel 2.166 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-247
Tabel 2.167 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-248
Tabel 2.168 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan

Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-249
Tabel 2.169 Indeks Manajemen Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-251
Tabel 2.170 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Kearsipan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-251
Tabel 2.171 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Perikanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-254
Tabel 2.172 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-257
Tabel 2.173 Rasio PDRB Pertanian Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-259
Tabel 2.174 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-259
Tabel 2.175 Produktivitas Padi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-260
Tabel 2.176 Produktivitas Jagung di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-261
Tabel 2.177 Produktivitas Bawa Putih di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-262
Tabel 2.178 Produktivitas Bawang Merah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-263
Tabel 2.179 Produktivitas Cabe Rawit di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-263
Tabel 2.180 Produktivitas Cabe Keriting di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-264
Tabel 2.181 Produktivitas Tembakau di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-265
Tabel 2.182 Produktivitas Kopi Robusta di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-266
Tabel 2.183 Produktivitas Kopi Arabika di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-266
Tabel 2.184 Rasio PDRB Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-276
Tabel 2.185 Disparitas Harga Kabupaten Temanggung Tahun 2024 .... II-278
Tabel 2.186 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-278
Tabel 2.187 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-280
Tabel 2.188 Gambaran Urusan Perindustrian di Kabupaten Temang-Gung Tahun 2020-2024 ..... II-281
Tabel 2.189 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-284
Tabel 2.190 Gambaran Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-287
Tabel 2.191 Gambaran Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-295
Tabel 2.192 Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-297

Tabel 2.193 Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-299
Tabel 2.194 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-299
Tabel 2.195 Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-300
Tabel 2.196 Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-300
Tabel 2.197 Proporsi Besaran SiLPA Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-304
Tabel 2.198 Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-305
Tabel 2.199 Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-306
Tabel 2.200 Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-307
Tabel 2.201 Gambaran Indikator Kinerja unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-308
Tabel 2.202 Kapabilitas Inovasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-309
Tabel 2.203 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-310
Tabel 2.204 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-312
Tabel 2.205 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-313
Tabel 2.206 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-313
Tabel 2.207 Gambaran Indikator Kinerja Unsur Pengawasan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-314
Tabel 2.208 Gambaran Indikator Kinerja pada 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-317
Tabel 2.209 Gambaran Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Tahun 2020-2024 ..... II-318
Tabel 2.210 Capaian Indikator Kinerja Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Tahun 2020-2024 ..... II-319
Tabel 2.211 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penangan Laporan Kejadian, Gangguan KKamtibmas, dan Bencana Alam di Kecamatan Tahun 2020-2024 ..... II-320
Tabel 2.212 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan Tahun 2020-2024 ..... II-321
Tabel 2.213 Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKPDesa Tepat Waktu Tahun 2020-2024 . II-322

Tabel 2.214 Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu Tahun 2020-2024 . II-323
Tabel 2.215 Gambaran Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... II-324
Tabel 2.216 Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita/Tahun (Ribu Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-326
Tabel 2.217 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-327
Tabel 2.218 Perkembangan Pelanggan Listrik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-329
Tabel 2.219 Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024..... II-330
Tabel 2.220 Luas Wilayah Industri di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ..... II-331
Tabel 2.221 Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum II-332
Tabel 2.222 Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2020–2024..... II-333
Tabel 2.223 Angka Kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-334
Tabel 2.224 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024..... II-335
Tabel 2.225 Rasio Lulusan Perguruan Tinggi (S1/S2/S3) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-337
Tabel 2.226 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-338
Tabel 2.227 Nilai Domain dan Indeks SDI Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ..... II-341
Tabel 2.228 Skala Nilai Peringkat Kinerja II-344
Tabel 2.229 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama II-344
Tabel 2.230 Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2024 ..... II-347
Tabel 2.231 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2024 ..... II-349
Tabel 2.232 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024 ..... II-355
Tabel 2.333 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024 ..... II-355
Tabel 2.234 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024..... II-358
Tabel 2.335 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024..... II-359
Tabel 2.236 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 ..... II-360
Tabel 2.237 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 ..... II-360
Tabel 2.238 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024..... II-362

Tabel 2.239 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 ..... II-363
Tabel 2.240 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 BPBD II-365
Tabel 2.241 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2024 ..... II-365
Tabel 2.242 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2024 ..... II-367
Tabel 2.243 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2024 ..... II-367
Tabel 2.244 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2024 ..... II-370
Tabel 2.245 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2024 ..... II-370
Tabel 2.246 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024 . II-372
Tabel 2.247 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024 . II-372
Tabel 2.248 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2024 ..... II-374
Tabel 2.249 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2024 ..... II-374
Tabel 2.250 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2024..... II-375
Tabel 2.251 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024..... II-375
Tabel 2.252 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024 ..... II-377
Tabel 2.253 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024 ..... II-378
Tabel 2.254 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ..... II-379
Tabel 2.255 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ..... II-379
Tabel 2.256 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 ..... II-381
Tabel 2.257 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 ..... II-381
Tabel 2.258 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2024..... II-383
Tabel 2.259 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2024..... II-383
Tabel 2.260 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang

Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ..... II-384
Tabel 2.261 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ..... II-385
Tabel 2.262 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 ..... II-386
Tabel 2.263 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 ..... II-386
Tabel 2.264 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2024 ..... II-388
Tabel 2.265 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2024 ..... II-388
Tabel 2.266 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2024..... II-389
Tabel 2.267 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2024..... II-390
Tabel 2.268 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2024 ..... II-391
Tabel 2.269 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2024 ..... II-391
Tabel 2.270 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2024..... II-392
Tabel 2.271 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2024..... II-392
Tabel 2.272 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2024 ..... II-393
Tabel 2.273 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2024 ..... II-394
Tabel 2.274 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2024 ..... II-394
Tabel 2.275 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2024 ..... II-395
Tabel 2.276 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ..... II-396
Tabel 2.277 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ..... II-396
Tabel 2.278 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2024 ..... II-397
Tabel 2.279 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2024 ..... II-397
Tabel 2.280 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2024..... II-398
Tabel 2.281 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2024..... II-398
Tabel 2.282 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2024..... II-400
Tabel 2.283 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2024..... II-400
Tabel 2.284 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2024 ..... II-401

Tabel 2.285 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2024 ..... II-402
Tabel 2.286 Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ..... II-403
Tabel 2.287 Capaian Kinerja Program Penyelenggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ..... II-403
Tabel 2.288 Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 ..... II-405
Tabel 2.289 Capaian Kinerja Program Penyelenggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 ..... II-406
Tabel 2.290 Capaian Kinerja IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2024 ..... II-407
Tabel 2.291 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan Tahun 2024 ..... II-408
Tabel 2.292 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian Tahun 2024 ..... II-410
Tabel 2.293 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 ..... II-411
Tabel 2.294 Capaian Kinerja IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 II-412
Tabel 2.295 Capaian Kinerja Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 II-412
Tabel 2.296 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2024 ..... II-413
Tabel 2.297 Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Fungsi Kecamatan Tahun 2024 ..... II-414
Tabel 2.298 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2024 ..... II-420
Tabel 2.299 Rata-rata Capaian Kinerja dan Skala Penilaian Kinerja Sasaran..... II-423
Tabel 2.300 Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-424
Tabel 2.301 Rata-rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-426
Tabel 2.302 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-427
Tabel 2.303 Rata-rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-428
Tabel 2.304 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Pilihan II-430
Tabel 2.305 Rata-rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja

Program Urusan Pemerintahan Pilihan..... II-430
Tabel 2.306 Rata-rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Unsur pendukung urusan pemerintahan II-431
Tabel 2.307 Rata-rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Unsur pendukung urusan pemerintahan..... II-432
Tabel 2.308 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-433
Tabel 2.309 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-433
Tabel 2.310 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan..... II-434
Tabel 2.311 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan..... II-435
Tabel 2.312 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Unsur Pemerintahan Umum II-435
Tabel 2.313 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum..... II-435
Tabel 2.314 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Kewilayahan II-436
Tabel 2.315 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Kewilyahan..... II-436
Tabel 2.316 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung Tahun 2024..... II-437
Tabel 2.317 Capaian Indikator SDGs Tahun 2024 ..... II-438
Tabel 2.318 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Daerah dengan Nasional II-464
Tabel 2.319 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru di Daerah dengan Nasional..... II-464
Tabel 2.320 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi di Daerah dengan Nasional..... II-466
Tabel 2.321 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas di Daerah dengan Nasional..... II-466
Tabel 2.322 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai

Tambah di Dalam Negeri pada Nasional dan Daerah II-468
Tabel 2.323 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan di Nasional dan Daerah II-468
Tabel 2.324 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan di Nasional dan Daerah II-468
Tabel 2.325 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur di Nasional dan Daerah II-469
Tabel 2.326 Intervensi Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal..... II-470
Tabel 2.327 Intervensi Daerah dalam Mendukung Penurunan Kemiskinan II-471
Tabel 2.328 Intervensi Daerah dalam Mendukung Peningkatan Sumber Daya Berkualitas..... II-471
Tabel 2.329 Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 ..... II-475
Tabel 2.330 Krenova dan Penjaringan Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 2024 ..... II-476
Tabel 2.331 Jumlah Penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2024 ..... II-498
Tabel 2.332 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ..... II-498
Tabel 2.333 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ..... II-500
Tabel 2.334 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ..... II-502
Tabel 2.335 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ..... II-503
Tabel 2.336 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ..... II-507
Tabel 2.337 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ..... II-513

Tabel 3.1 Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026 III-5
Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 ..... III-7
Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2026 ..... III-11
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK Tahun 2020-2024 ..... III-12

Tabel 3.5 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... III-15
Tabel 3.6 Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional III-16
Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan 2020-2025, dan Proyeksi Pendapatan 2026 Kabupaten Temanggung..... III-24
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Tahun 2022 - 2024, APBD 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 Belanja Daerah Kabupaten Temanggung III-33
Tabel 3.9 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah..... III-34
Tabel 3.10 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah III-35
Tabel 3.11 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah..... III-36
Tabel 3.12 Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah III-36
Tabel 3.13 Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja..... III-37
Tabel 3.14 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung III-40

Tabel 4.1 Sinkronisasi Visi dan Misi RPJP/RPJM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 ..... IV-4
Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026..... IV-10
Tabel 4.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030 ..... IV-13
Tabel 4.4 Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026..... IV-21
Tabel 4.5 Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026..... IV-22
Tabel 4.6 Tema/Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ..... IV-24
Tabel 4.7 Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan/Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ..... IV-34
Tabel 4.8 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2026 ..... IV-50
Tabel 4.9 Persandingan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional RKPD 2026 ..... IV-54
Tabel 4.10 Persandingan antara Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung 2025-2029 ..... IV-65
Tabel 4.11 Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional IV-67
Tabel 4.12 Konsistensi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Temanggung Tahun

2026 ..... IV-83
Tabel 4.13 Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RKP Tahun 2026 ..... IV-92
Tabel 4.14 Persandingan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan Program Nomenklatur.... IV-101
Tabel 4.15 Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2026 IV-118
Tabel 4.16 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung 2026..... IV-123
Tabel 4.17 Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan..... IV-129
Tabel 4.18 Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Penanganan Stunting IV-132
Tabel 4.19 Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 ..... IV-133
Tabel 4.20 Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ..... IV-137
Tabel 4.21 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim..... IV-140
Tabel 4.22 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur..... IV-141
Tabel 4.23 Usulan Progra,/Kegiatan Kawasan Purwomanggung di Lokasi Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019..... IV-142
Tabel 4.24 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019..... IV-143
Tabel 4.25 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur IV-144
Tabel 4.26 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta IV-146

Tabel 5.1 Rekapitulasi Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Arah Kebijakan dalam RKP 2026 ..... V-2
Tabel 5.2 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)..... V-4
Tabel 5.3 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru V-8
Tabel 5.4 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro-Maritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi..... V-20

Tabel 5.5 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.. V-24
Tabel 5.6 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri..... V-34
Tabel 5.7 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 6: Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemis-Kinan V-40
Tabel 5.8 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pembe-Rantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.... V-43
Tabel 5.9 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 8 : Memperkuat Penyelenggaraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Adil dan Makmur..... V-46
Tabel 5.10 Dukungan Program Daerah dalam RKD Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 terha-dap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN RKP Tahun 2026..... V-50
Tabel 5.11 Rekapitulasi dan Penjabaran Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026..... V-51
Tabel 5.12 Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Penguatan Reformasi V-53
Table 5.13 Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Pertumbuhan Ekonomi V-59
Tabel 5.14 Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2026 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)..... V-64
Tabel 5.15 Dukungan Program Kabupaten Temanggung terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung SPM Tahun 2026 Daerah V-75
Tabel 5.16 Dukungan Program Kabupaten Temanggung terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2025 ..... V-75
Tabel 5.17 Program Daerah yang Mendukung Penanganan Kemiski-nan V-77
Tabel 5.18 Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2025 ..... V-81
Tabel 5.19 Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender V-82
Tabel 5.20 Pemetaan Indikator SDGs dalam Dokumen Perencanaan Daerah V-87
Tabel 5.21 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung V-88
Tabel 5.22 Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim..... V-89
Tabel 5.23 Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur Tahun 2026..... V-90
Tabel 5.24 Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 . V-91
Tabel 5.25 Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Pembangunan Infrastruktur Tahun 2026 ..... V-92
Tabel 5.26 Program Daerah yang Mendukung Satu Data Indonesia ... V-93
Tabel 5.27 Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang V-116
Tabel 5.28 Rencana Pembiayaan Per Urusan dan Program V-118

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ..... VI-1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ..... VI-2
Tabel 6.3 Indikator Kinerja Program Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ..... VI-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Tahun 2025 ..... I-2
Gambar 1.2 Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ..... I-3
Gambar 1.3 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.... I-12

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung..... II-2
Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kabupaten Temanggung II-3
Gambar 2.3 Peta Klimatologi Kabupaten Temanggung II-5
Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Temanggung..... II-6
Gambar 2.5 Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2024..... II-9
Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung II-11
Gambar 2.7 Peta Geologi Kabupaten Temanggung II-12
Gambar 2.8 Gambaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ..... II-18
Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-19
Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan atau Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 ..... II-20
Gambar 2.11 Grafik Piramida Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung Tahun 2024..... II-22
Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024..... II-26
Gambar 2.13 Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 Kabupaten Temanggung II-30
Gambar 2.14 Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 ..... II-31
Gambar 2.15 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024..... II-33
Gambar 2.16 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024..... II-38
Gambar 2.17 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-38
Gambar 2.18 Perbandingan TPT dengan Target RKPD Tahun 2020-2024..... ..... II-40
Gambar 2.19 Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... ..... II-40
Gambar 2.20 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024..... II-42
Gambar 2.21 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Daerah dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2020-2024 ..... II-43
Gambar 2.22 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temangung Tahun 2020-2024 ..... II-46
Gambar 2.23 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 ..... II-47
Gambar 2.24 Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung dengan Capaian Nasional II-49
Gambar 2.25 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 .... II-50
Gambar 2.26 Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-53
Gambar 2.27 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia diatas 25 Tahun Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024 ..... II-76
Gambar 2.28 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024 II-77
Gambar 2.29 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024 II-79
Gambar 2.30 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ..... II-79
Gambar 2.31 Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ..... II-79
Gambar 2.32 Skor Literasi Membaca SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-83
Gambar 2.33 Skor Literasi Membaca SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-84
Gambar 2.34 Skor Numerasi SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-84
Gambar 2.35 Skor Numerasi SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-85
Gambar 2.36 Satuan Pendidikan yang Telah Terakreditasi Minimal B pada Jenjang PAUD, SD, SMP, Maupun Pendidikan Nonformal Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 . II-86
Gambar 2.37 Angka Kematian Ibu Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-99
Gambar 2.38 Angka Kematian Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-100
Gambar 2.39 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-101
Gambar 2.40 Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-103
Gambar 2.41 Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-104
Gambar 2.42 Persentase Anemia pada Ibu Hamil Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-116

Gambar 2.43 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-122
Gambar 2.44 Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan STBM Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-123
Gambar 2.45 Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-124
Gambar 2.46 Capaian Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-164
Gambar 2.47 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-165
Gambar 2.48 Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-166
Gambar 2.49 TPAK Perempuan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-172
Gambar 2.50 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-177
Gambar 2.51 Rasio Peningkatan Pelayanan Dampak Kekerasan pada Perempuan dan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-178
Gambar 2.52 Grafik Tren Emisi Gas Rumah Kaca Kab.Temanggung Tahun 2020-2024 ..... II-190
Gambar 2.53 Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-195
Gambar 2.54 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-196
Gambar 2.55 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-197
Gambar 2.56 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-217
Gambar 2.57 Prevalensi Kontrasepsi Modern Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-223
Gambar 2.58 Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-226
Gambar 2.59 Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-239
Gambar 2.60 Hasil Penilaian Mandiri Indek KAMI Tahun 2024 ..... II-245
Gambar 2.61 Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-254
Gambar 2.62 Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-258
Gambar 2.63 Jumlah Produksi Daging Ternak Besar Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-269
Gambar 2.64 Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-270

Gambar 2.65 Jumlah Produksi Daging Ternak Unggas Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-271
Gambar 2.66 Jumlah Produksi Telur Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-272
Gambar 2.67 Persentase Kecukupan Sarana Alat Mesin Pertanian Pangan Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-273
Gambar 2.68 Persentase Penanganan Penyakit Hewan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 ..... II-274
Gambar 2.69 Persentase Pengawasan Produk Hewan dan Bahan Asal Hewan dan Bahan Penunjang yang Memenuhi Syarat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-275
Gambar 2.70 Persentase Fasilitasi Pengendalian Bencana Pertanian Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-276
Gambar 2.71 Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-277
Gambar 2.72 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-287
Gambar 2.73 Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-299
Gambar 2.74 Jumlah Hotel di Kabupaten Temanggung 2020–2024 ... II-336
Gambar 2.75 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 ..... II-339
Gambar 2.76 Pemanfaatan Sistem Montoring Evaluasi dan Pengendalian Pemerintah Dearah di Kabupaten Temanggung II-344
Gambar 2.77 Persentase Skala Penilaian Kinerja Indikator Tujuan, Sasaran, IKUPD dan Program pada periode Semester II Tahun 2024 ..... II-424
Gambar 2.78 Jumlah Skala Penilaian Kinerja pada Indikator Tujuan, Sasaran, IKUPD dan Program pada periode Semester II Tahun 2024 ..... II-424
Gambar 2.79 Jumlah Skala Penilaian Kinerja pada Indikator Tujuan II-425
Gambar 2.80 Jumlah Skala Penilaian Kinerja pada Indikator Sasaran II-426
Gambar 2.81 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-427
Gambar 2.82 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada indikator Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-428
Gambar 2.83 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-430
Gambar 2.84 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-431
Gambar 2.85 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD Urusan Pemerintahan Pilihan II-432

Gambar 2.86 Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator Program Urusan Pemerintahan Pilihan II-433
Gambar 2.87 Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan..... II-434
Gambar 2.88 Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-435
Gambar 2.89 Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan..... II-436

Gambar 3.1 Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... III-13
Gambar 3.2 Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ..... III-14

Gambar 4.1 Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung..... IV-23
Gambar 4.2 Contoh Implementasi Konsep THIS dalam Penentuan Prioritas Pembangunan IV-23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sekaligus penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP nasional.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan terhadap rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dilakukan dengan menerapkan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom-up*, serta holistik-tematik, integratif dan spasial. Penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2026 dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai dengan perencanaan partisipatif yaitu musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2026. Secara lebih jelas alur penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dijelaskan pada gambar 1.1 berikut ini.

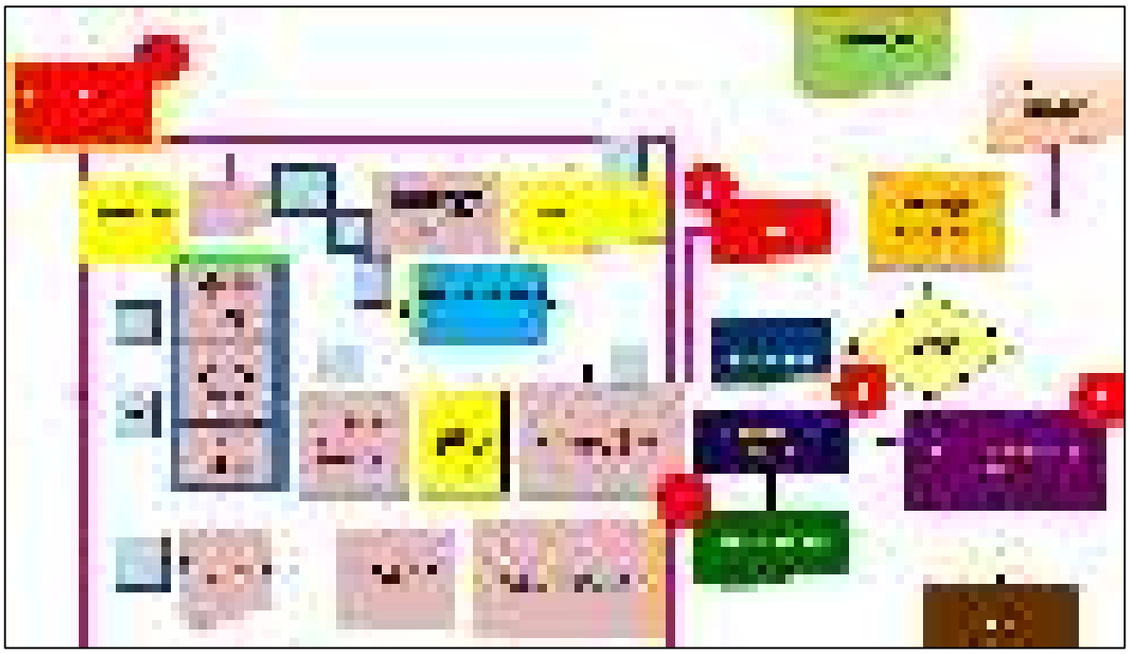

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD Tahun 2026

1.2 PROSES PENYUSUNAN

Secara umum tahapan dan proses penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. **Rancangan Awal RKPD**

   Perumusan dan Penyusunan Rancangan awal RKPD Tahun 2026 dilaksanakan pada bulan September 2024. Rancangan awal RKPD Tahun 2026 berisikan panduan dan koridor perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan pendekatan perencanaan teknokratik.

2. **Musrenbang RKPD di Kelurahan**

   Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 di kelurahan dilaksanakan pada tanggal 21-23 Oktober 2024. Peserta Musrenbang RKPD pada 23 kelurahan rata-rata diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri lurah dan perangkat kelurahan, lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok perempuan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kelurahan, perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan penyandang disabilitas, pengurus partai politik tingkat kelurahan, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan jalannya musrenbang RKPD di kelurahan, Bappeda membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Metode evaluasi yang digunakan dengan pemberian bobot penilaian terhadap beberapa aspek.

3. Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang RKPD di kecamatan berlangsung antara tanggal 20-23 Januari 2025. Peserta Musrenbang RKPD di kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, dan unsur staf kecamatan, pengurus partai politik tingkat kecamatan dan/atau anggota DPRD daerah pemilihan setempat, delegasi dari Desa dan/atau Kelurahan, Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kecamatan, perwakilan kelompok profesi Tingkat Kecamatan, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan penyandang disabilitas, dan perwakilan unsur pendidikan/akademisi.

Sebagaimana Musrenbang RKPD di kelurahan, Bappeda juga mengirimkan Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD di kecamatan. Metode evaluasi yang digunakan dengan pemberikan bobot penilaian terhadap beberapa aspek.

4. Forum Internal Perangkat Daerah

Forum Internal Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 24-28 Februari 2025 dengan peserta internal PD dan *stakeholder* terkait. Forum Internal Perangkat Daerah bertujuan untuk mensinergikan prioritas program dan kegiatan hasil Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, mendiskusikan data dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah, dan menentukan lokasi kegiatan dan penerima manfaat baik kelompok dan/atau individu beserta Rencana Anggaran Biaya.

5. Forum Khusus dengan Perangkat Daerah

Forum Khusus dengan Perangkat Daerah dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Februari 2025. Pelaksanaannya dibagi menjadi 3 forum

yaitu forum khusus anak, forum penanggulangan kemiskinan dan stunting, dan forum ekonomi kreatif. Forum khusus ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari perwakilan anak, rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, penyandang penyakit yang rentan penolakan sosial, pemerhati kemiskinan, komite ekonomi kreatif, PD dan *stakeholder* terkait. Tujuan Forum Khusus dengan Perangkat Daerah adalah untuk memberikan ruang khusus kepada kelompok masyarakat tertentu dalam menyampaikan usulan kebutuhannya.

6. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah (Forum PD) dilaksanakan pada 19 Maret 2025. Forum PD dibagi kedalam 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pembangunan Manusia dan Bidang Pemerintahan dan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur. Forum PD diselenggarakan untuk menyepakati isu strategis dan permasalahan pembangunan, mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Rancangan Renja Perangkat Daerah, menyusun prioritas program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah serta alokasi pagu indikatif dengan mengacu pada dokumen rancangan awal RKPD, dan mempertajam target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

7. Musrenbang RKPD di Kabupaten

Musrenbang RKPD di Kabupaten dilaksanakan pada 27 Maret 2025. Peserta Musrenbang RKPD di Kabupaten terdiri dari Forkompimda, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Delegasi Kecamatan, Kepala Instansi Vertikal, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kabupaten, perwakilan kelompok profesi tingkat kabupaten, perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan antara lain perwakilan perguruan tinggi dan perwakilan sekolah, pengurus partai politik tingkat kabupaten, perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, LSM/Ormas, Tokoh masyarakat, unsur pengusaha/Investor, penyandang disabilitas, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat tertentu. Musrenbang RKPD di Kabupaten diselenggarakan untuk menyampaikan isu strategis dan permasalahan pembangunan, menyampaikan prioritas program dan kegiatan, menyampaikan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD,

mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2026.

8. **Penyusunan Rancangan RKPD pasca Musrenbang**

   Tahapan pasca Musrenbang RKPD untuk memperbaiki rancangan RKPD dengan masukan dan saran yang ada juga untuk memberi kesempatan perangkat daerah untuk memastikan lokasi kegiatan yang direncanakan.

9. **Reviu Inspektorat**

   Dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung. Reviu ini dilaksanakan dengan tujuan untuk sinkronisasi antara Kebijakan Pusat, Provinsi, dan Daerah untuk Perencanaan Tahun 2026 di Kabupaten Temanggung.

10. **Penyusunan Rancangan Akhir RKPD**

    Hasil dari semua proses yang dilakukan kemudian dirangkum menjadi rancangan Akhir RKPD yang berisi narasi lengkap dari Rancangan Peraturan Bupati, pendahuluan sampai dengan penutup termasuk matriks rencana program dan kegiatan beserta anggarannya.

11. **Fasilitasi RKPD dari Provinsi Jawa Tengah**

    Rancangan Akhir RKPD sebelum ditetapkan harus mendapatkan asistensi/fasilitasi oleh Provinsi Jawa Tengah pada Minggu II Bulan Juni 2025 melalui Surat Fasilitasi Rancangan Akhir Perkada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang disampaikan kepada Kabupaten/Kota dengan mengirimkan surat permohonan fasilitasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi beserta kelengkapannya. Asistensi ini bertujuan untuk sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Kabupaten.

12. **Penetapan RKPD**

    Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati pada bulan Juli 2025.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana

Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 berpedoman pada dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah, dokumen perencanaan sektoral yang ada serta merujuk pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan level pemerintahan desa. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 1.3
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Dokumen RKPD dalam kaitannya dengan dokumen sektoral seperti SPM, SDGs, Reformasi Birokrasi dan dokumen sektoral lainnya juga dituangkan dalam penyajian capaian-capaian indikator SPM maupun indikator yang berhubungan dengan SDGs dan Reformasi Birokrasi.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

1. Sebagai Pedoman penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026;
2. Memberikan arah, acuan, dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Menjadi instrumen dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan

1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Proses Penyusunan, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Ringkasan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan dilihat dari kondisi perekonomian global dan nasional, kondisi perekonomian Jawa Tengah, dan kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung, Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi, PDRB Perkapita serta inflasi.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang Indikator Tujuan, Indikator Sasaran per Misi dengan Urusan/Bidang dan prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat: rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat tentang indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dirumuskan dari indikator tujuan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator sasaran yang kemudian disebut sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan manfaat Dokumen RKPD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

A. Letak dan Kondisi Geografis

1. Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung terletak di antara 7^{0}32'14" - 7^{0}32'35" Lintang Selatan dan 110^{0}46'23" - 110^{0}46'30" Bujur Timur.

2. Posisi Geografis

Pada kondisi geografis menguraikan mengenai kondisi fisik Kabupaten Temanggung baik dari batas administrasi, aspek topografi, hidrologi, serta penggunaan lahan yang direpresentasikan secara spasial.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah ± 86.483 Ha dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1) Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Kecamatan Bejen, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Gemawang, dan Kecamatan Candiroto;
2) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo, dan Kecamatan Pringsurat;
3) Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kledung, Kecamatan Ngadirejo, dan Kecamatan Wonoboyo;
4) Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Semarang, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Pringsurat.

Peta wilayah administrasi Kabupaten Temanggung disajikan pada gambar 2.1.

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.506 RW, dan 5.921 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Sebaran jumlah desa, kelurahan, RW dan RT menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan		Total	
					RW	RT	RW	RT	RW	RT
1	Bulu	4.528,08	19	0	84	302	0	0	84	302
2	Tembarak	2.456,95	13	0	67	224	0	0	67	224
3	Temanggung	3.223,04	6	19	20	87	119	541	139	628
4	Pringsurat	5.955,16	14	0	113	364	0	0	113	364
5	Kaloran	6.367,29	14	0	111	416	0	0	111	416
6	Kandangan	7.060,93	16	0	101	378	0	0	101	378
7	Kedu	3.714,43	14	0	108	424	0	0	108	424
8	Parakan	2.355,01	14	2	50	239	27	120	77	359
9	Ngadirejo	3.783,09	19	1	97	396	3	30	100	426
10	Jumo	3.095,19	13	0	60	273	0	0	60	273
11	Tretep	3.533,54	11	0	25	141	0	0	25	141
12	Candiroto	6.320,89	14	0	74	275	0	0	74	275
13	Kranggan	5.316,79	12	1	97	358	7	29	104	387
14	Tlogomulyo	2.644,79	12	0	47	156	0	0	47	156
15	Selopampang	2.240,04	12	0	46	128	0	0	46	128
16	Bansari	2.037,44	13	0	46	189	0	0	46	189
17	Kledung	3.704,70	13	0	38	160	0	0	38	160
18	Bejen	6.608,75	14	0	51	170	0	0	51	170

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan		Total	
					RW	RT	RW	RT	RW	RT
19	Wonoboyo	4.373,40	13	0	53	209	0	0	53	209
20	Gemawang	7.163,90	10	0	62	312	0	0	62	312
Jumlah		**86.483.41**	**266**	**23**	**1.350**	**5.201**	**156**	**720**	**1.506**	**5.921**

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Kecamatan paling luas di Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Gemawang dengan luas 7.163,90 ha atau setara dengan 8,28% dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Bansari dengan luas 2.037 ha (2,35%). Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Temanggung dengan 6 desa dan 19 Kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Gemawang dengan jumlah 10 desa.

3. Topografi / Kemiringan Lahan

Kabupaten Temanggung termasuk ke dalam wilayah dataran tinggi dengan pola topografi secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, dibatasi oleh dua buah gunung yaitu Gunung Sumbing (3.260 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.151 m dpl) di bagian Selatan dan Barat. Bagian Utara Kabupaten Temanggung dibatasi oleh pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Kondisi topografi tersebut menciptakan wilayah Kabupaten Temanggung yang memiliki permukaan sangat beragam ditinjau dari ketinggian yang dapat dilihat pada gambar 2.2.

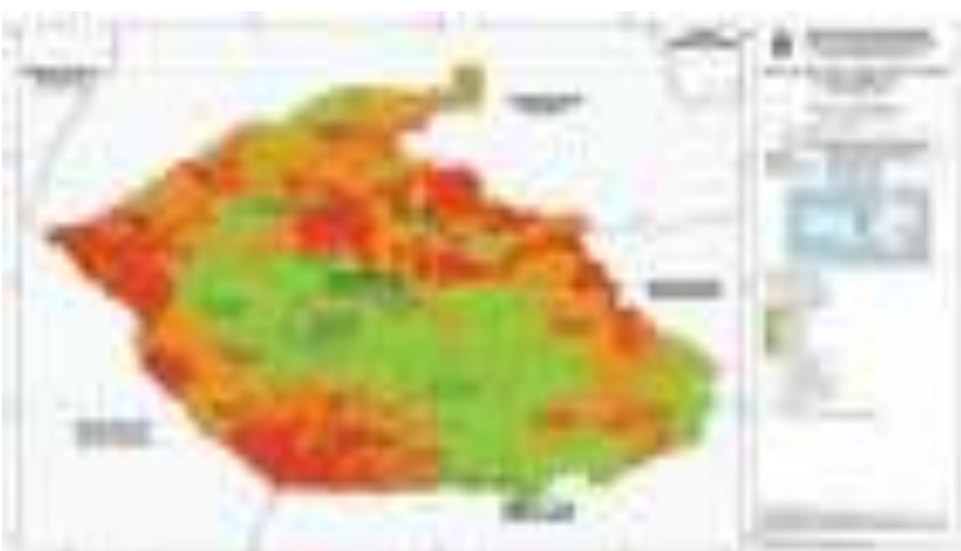

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.2
Peta Ketinggian Kabupaten Temanggung

Perbedaan ketinggian yang sangat beragam menghasilkan variasi kelerengan di Kabupaten Temanggung yang diklasifikasikan menjadi lima kelas yaitu 0-8% (Datar), 8-15% (Landai), 15-25% (Agak curam), 25-40% (Curam), dan >40% (Sangat curam). Kondisi kelerengan pada setiap kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kemiringan Lahan di Kabupaten Temanggung

No	KECAMATAN	KELERENGAN				TOTAL LUAS (Ha)
		> 40 %	0-2 %	15-40 %	2-15 %	
1	Bansari	304,09	-	823,16	910,19	2.037,44
2	Bejen	669,28	18,87	4.137,20	1.783,41	6.608,75
3	Bulu	1.046,67	-	1.741,85	1.732,25	4.520,77
4	Candiroto	1.923,96	32,06	2.824,75	1.539,29	6.320,06
5	Gemawang	3.622,14	-	2.632,92	908,84	7.163,90
6	Jumo	820,46	-	612,34	1.662,39	3.095,19
7	Kaloran	1.043,39	-	3.121,45	2.202,45	6.367,29
8	Kandangan	1.822,74	-	2.770,77	2.467,43	7.060,93
9	Kedu		-	144,02	3.573,04	3.717,05
10	Kledung	1.288,82	-	2.267,73	148,14	3.704,70
11	Kranggan		-	1.857,62	3.459,09	5.316,71
12	Ngadirejo	78,21	-	1.052,97	2.651,91	3.783,09
13	Parakan	235,62	-	371,14	1.745,62	2.352,38
14	Pringsurat	275,45	-	2.150,98	3.528,74	5.955,16
15	Selopampang	713,69	-	568,87	957,56	2.240,12
16	Temanggung		-		3.229,02	3.229,02
17	Tembarak	445,69	-	1.051,71	960	2.457,40
18	Tlogomulyo	1.212,78	-	1.169,41	263,49	2.645,67
19	Tretep	1.461,94	-	2.071,60	-	3.533,54
20	Wonoboyo	1.949,86	-	1.699,07	725,29	4.374,22
Total Luas (Ha)		**18.914,78**	**50,93**	**33.069,55**	**34.448,15**	**86.483,41**

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

4. Klimatologi

Kabupaten Temanggung mempunyai sifat iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Wilayah Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin, terutama di Kecamatan Tretep, Bulu (lereng Gunung Sumbing), Tembarak, Ngadirejo, Candiroto, dan Kledung. Kabupaten Temanggung memiliki suhu udara relatif sejuk yaitu antara 22,0 °C – 23,6 °C, karena berada pada kawasan yang relatif tinggi. Peta klimatologi disajikan pada gambar 2.3.

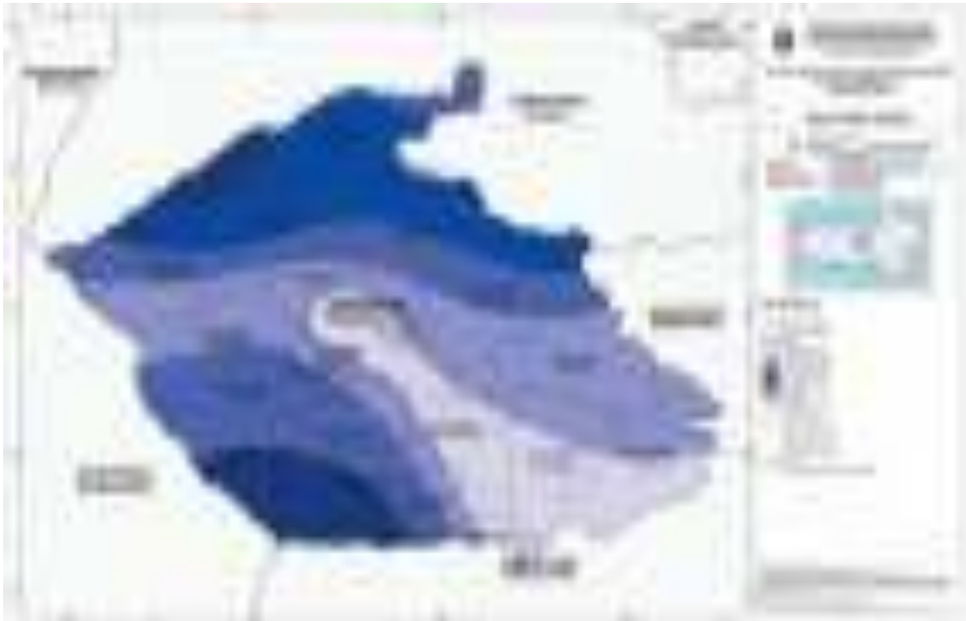

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.3
Peta Klimatologi Kabupaten Temanggung

Rata-rata curah hujan lebih dari 2.000 mm/tahun. Curah hujan tertinggi tercatat pada Stasiun Kledung (3.183 mm/tahun) dan terendah adalah Kranggan (1.863 mm/tahun). Karakteristik penyebaran curah hujan rerata bulanan berdasarkan klasifikasi Oldeman bervariasi dari yang memiliki bulan basah terpanjang dan bulan kering terpendek (B2) seperti Kledung, Tretep, Candiroto dan Pringsurat sampai yang memiliki bulan basah terpendek dan bulan kering terpanjang (D3) seperti Badran dan Kranggan. Sedangkan tipe agroklimat lain yang dijumpai adalah C2 pada stasiun Jumo, Parakan, Ngadirejo, Jumprit, Temanggung, dan Kranggan serta C3 adalah Kandangan. Sifat hujan di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh pola musim, curah hujan tertinggi pada bulan Desember-Januari dan periode kering antara bulan Juni-September, dan sebarannya dipengaruhi oleh sifat lokal (orografis). Curah hujan per kecamatan di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Curah Hujan Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung

NO	KECAMATAN	SKOR HUJAN	CURAH HUJAN (mm/tahun)					
			1500-2000	2000-2500	2500-3000	3000-3500	3500-4000	TOTAL LUAS (Ha)
1	Bansari	70	-	0,36	2037,07	-	-	2037,44
2	Bejen	140	-	-	1209,45	4239,63	1159,68	6608,75
3	Bulu	140	16,27	896,87	2324,73	-	1282,9	4520,77
4	Candiroto	160	-	1647,41	1477,71	3194,95	-	6320,06
5	Gemawang	140	13,29	954,56	2348,52	3847,53	-	7163,9
6	Jumo	90	499,86	1789,71	805,62	-	-	3095,19

NO	KECAMATAN	SKOR HUJAN	CURAH HUJAN (mm/tahun)					
			1500-2000	2000-2500	2500-3000	3000-3500	3500-4000	TOTAL LUAS (Ha)
7	Kaloran	90	164,99	5597,74	604,56	-	-	6367,29
8	Kandangan	140	79,07	2862,1	2619,78	1499,99	-	7060,93
9	Kedu	50	2648,21	1068,84	-	-	-	3717,05
10	Kledung	90	-	-	1815,26	-	1889,44	3704,7
11	Kranggan	50	3327,48	1989,24	-	-	-	5316,71
12	Ngadirejo	70	-	2236,99	1546,09	-	-	3783,09
13	Parakan	140	26,67	811,85	1254,13	-	259,74	2352,38
14	Pringsurat	50	3182,16	2773	-	-	-	5955,16
15	Selopampang	140	591,93	300,29	401,08	-	946,82	2240,12
16	Temanggung	50	2912,6	316,42	-	-	-	3229,02
17	Tembarak	140	466,9	604,96	839,86	-	545,69	2457,4
18	Tlogomulyo	140	17,29	423,03	906,44	-	1298,91	2645,67
19	Tretep	170	-	93,72	1242,27	1220,95	976,61	3533,54
20	Wonoboyo	170	-	1787,51	1440,96	1114,46	31,3	4374,22
	TOTAL LUAS (Ha)	**2230**	**13.946,72**	**26.154,59**	**22.873,52**	**15.117,50**	**8.391,08**	**86.483,41**

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

5. Jenis Tanah

Pada wilayah Kabupaten Temanggung memiliki lahan seluas Lahan seluas 86.483 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi latosol merah kekuningan yakni seluas 31.979,81 Ha (36.98%), latosol coklat seluas 28.915,25 Ha (33,43%), regosol coklat keabuan seluas 12.119,95 Ha (14,01%), latosol coklat kemerahan seluas 8.559,87 Ha (9,90%), regosol kuning seluas 2.856,40 Ha (3,30%) dan andosol seluas 2.052,14 Ha (2,37%) dengan sebaran sebagaimana pada gambar 2.6.

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah Kabupaten Temanggung

Jenis tanah Latosol Coklat membentang dari arah barat laut ke tenggara, Latosol Coklat Kemerahan membentang di bagian timur ke tenggara, sedangkan Latosol Merah Kekuningan membentang di bagian timur dan barat dan termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang agak peka terhadap erosi. Sementara itu, jenis tanah Regosol membentang sebagian di sekitar Kali Progo dan lereng-lereng terjal. Jenis tanah Andosol ditemui pada sebagian wilayah Kecamatan Pringsurat dan jenis tanah ini termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang peka terhadap erosi.

Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran aluvial dan kaki gunung api. Dataran aluvial dan kaki gunung api sendiri memiliki kesuburan tanah yang tinggi karena kaya unsur hara yang berasal dari material erupsi gunung api yang mengandung berbagai mineral. Kemampuan tanah dari dataran ini mampu mengalirkan air dengan baik. Tekstur tanah berupa pasir memiliki ruang antar pori yang menjadi lokasi untuk cadangan air tanah sehingga ketersediaannya tetap terjaga. Tanah aluvium memiliki kemampuan yang baik untuk menyerap dan mengalirkan air. Jenis tanah Kabupaten Temanggung dibedakan menjadi 6 jenis tanah secara rinci disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Jenis Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Andosol	Latosol Coklat	Latosol Coklat Kemerahan	Latosol Merah Kekuningan	Regosol Coklat Kekelabuan	Regosol Kuning	TOTAL (Ha)
Bansari	-	289	-	-	1.748	-	2.037
Bejen	-	2.158	-	4.451	-	-	6.609
Bulu	-	2.153	-	-	2.180	187	4.521
Candiroto	-	1.611	-	3.580	1.129	-	6.320
Gemawang	-	495	-	6.669	-	-	7.164
Jumo	-	2.257	-	838	-	-	3.095
Kaloran	-	162	1.983	4.222	-	-	6.367
Kandangan	-	1.678	436	4.947	-	-	7.061
Kedu	-	3.717	-	-	-	-	3.717
Kledung	-		-	-	3.705	-	3.705
Kranggan	253	2.256	2.808	-		-	5.317
Ngadirejo	-	1.631	-	-	2.152	-	3.783
Parakan	-	1.560	-	-	792	-	2.352
Pringsurat	1.799	822	3.333	-		-	5.955
Selopampang	-	1.551	-	-	88	602	2.240
Temanggung	-	3.229	-	-			3.229
Tembarak	-	1.897	-	-	0	561	2.457
Tlogomulyo	-	813	-	-	326	1.507	2.646
Tretep	-	302	-	3.232	-	-	3.534
Wonoboyo	-	335	-	4.040	-	-	4.374
TOTAL (Ha)	**2.052**	**28.915**	**8.560**	**31.980**	**12.120**	**2.856**	**86.483**

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

6. Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400->1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 wilayah ketinggian sebagaimana disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian

No	Wilayah Ketinggian (meter dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0– 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500– 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonoboyo
3	750– 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000–1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250– 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		**86,483**	**100**	

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2025

7. Penggunaan Lahan

Pola atau distribusi penggunaan lahan di suatu wilayah atau area tertentu menggambarkan bagaimana suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan. Klasifikasi tutupan lahan dan klasifikasi penggunaan lahan adalah upaya pengelompokan berbagai jenis tutupan lahan ke dalam suatu kesamaan sesuai dengan sistem tertentu. Pola penggunaan lahan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total (Ha)
1	Bansari	-	701.99	148.37	153.38	110.47	-	26.83	239.22	445.17	190.71	21.29	2,037.44
2	Bejen	-	529.02	-	-	3,078.88	-	2,156.35	230.28	478.72	55.04	80.46	6,608.75
3	Bulu	-	2,210.56	391.46	-	-	-	48.36	453.74	1,380.42	6.32	29.91	4,520.77
4	Candiroto	-	500.99	413.95	576.70	1,188.10	-	2,184.86	320.82	980.80	123.63	30.22	6,320.06
5	Gemawang	-	-	-	154.00	1,723.60	-	4,443.99	335.12	478.77	15.03	13.41	7,163.91
6	Jumo	-	-	-	-	417.36	-	1,137.52	271.85	1,245.28	7.03	16.16	3,095.19
7	Kaloran	-	-	-	8.12	5.02	-	4,221.13	607.21	1,284.16	197.92	43.73	6,367.29
8	Kandangan	0.38	-	-	381.69	285.51	3.07	4,417.49	538.19	1,407.07	5.61	21.93	7,060.93
9	Kedu	-	-	-	-	-	4.80	901.30	526.62	2,234.98	0.16	49.19	3,717.05

10	Kledung	0.71	2,399.05	660.00	215.25	-	-	4.06	230.38	44.68	145.90	4.68	3,704.70
11	Kranggan	-	8.67	-	-	-	39.05	3,257.70	705.40	1,169.73	93.64	42.52	5,316.72
12	Ngadirejo	-	1,001.47	70.45	236.14	142.26	1.28	87.23	491.63	1,519.90	222.29	10.44	3,783.09
13	Parakan	-	482.68	86.26	-	-	10.12	108.55	440.87	1,146.60	41.86	35.45	2,352.38
14	Pringsurat	1.22	-	-	-	-	71.04	4,536.05	768.57	488.86	76.49	12.94	5,955.17
15	Selopampang	-	666.49	461.90	-	-	-	149.50	179.61	715.91	45.19	21.51	2,240.12
16	Temanggung	-	143.99	-	-	-	6.82	321.51	953.53	1,758.39	-	44.79	3,229.02
17	Tembarak	-	1,238.22	103.47	-	-	1.02	108.66	283.38	713.48	1.88	7.29	2,457.40
18	Tlogomulyo	-	1,642.57	445.71	-	-	-	17.22	204.44	329.27	2.68	3.78	2,645.67
19	Tretep	-	2,620.24	225.44	274.09	191.62	-	11.43	167.81	33.54	4.78	4.59	3,533.54
20	Wonoboyo	-	2,154.81	204.07	974.11	10.08	-	157.68	219.99	619.89	19.67	13.93	4,374.22
TOTAL (Ha)		**2.31**	**16,300.76**	**3,211.08**	**2,973.47**	**7,152.89**	**137.21**	**28,297.41**	**8,168.67**	**18,475.60**	**1,255.82**	**508.21**	**86483.42**
TOTAL (%)		**0.003**	**18.848**	**3.713**	**3.438**	**8.271**	**0.159**	**32.720**	**9.445**	**21.363**	**1.452**	**0.588**	**100,000**

Keterangan			
1	Embung	7	Perkebunan
2	Hortikultura	8	Permukiman
3	Hutan Lindung	9	Sawah Irigasi
4	Hutan Produksi Terbatas	10	Sawah Non Irigasi
5	Hutan Produksi Tetap	11	Sungai
6	Industri		

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.5
Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2.6, penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung menunjukkan dominasi pada sektor perkebunan, sawah irigasi, dan hortikultura, yang masing-masing menyumbang sebesar 32,7%, 21,36%, dan 18,84% dari total luas lahan. Sektor Perkebunan di Kabupaten Temanggung mencakup tanaman seperti kopi dan tembakau, selain itu lahan sawah irigasi mencakup pertanian padi yang menjadi sumber utama pangan

bagi masyarakat. Selain itu, tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan tumbuh dengan baik berkat iklim yang mendukung serta ketersediaan tanah yang memiliki kemampuan menyerap air dengan baik. Secara keseluruhan, pola penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung mencerminkan potensi pertanian yang tinggi, didukung oleh kondisi tanah yang subur yang memungkinkan sektor-sektor ini berkembang dengan baik.

8. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu hamparan wilayah/Kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara yang mengalirkannya ke anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Pada wilayah Kabupaten Temanggung terbagi menjadi empat DAS yaitu DAS Progo, DAS Bodri, DAS Bogowonto, dan DAS Serayu yang disajikan pada tabel dan gambar 2.7.

Tabel 2.7
DAS dan Sub DAS di Kabupaten Temanggung

No	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)
1	DAS Serayu	Sub DAS Begaluh	202.66
2	DAS Bogowonto	Sub DAS Bogowonto	0.291
3	DAS Progo	Sub DAS Jambu	0.231
		Sub DAS Mundu	68.699
		Sub DAS Klegung	1063.526
		Sub DAS Gemilang	1452.229
		Sub DAS Jambe	4981.127
		Sub DAS Mandang	7460.122
		Sub DAS Kuas	6960.7
		Sub DAS Galeh	11118.928
		Sub DAS Progo Hulu	8738.768
		Sub DAS Tingal	9145.62
		Sub DAS Elo	2231.618
		Sub DAS Sempol	505.02
		Sub DAS Groboh	2970.655
4	DAS Bodri	Sub DAS Bodri	6640.63
		Sub DAS Logung	5509.06
		Sub DAS Lutut	11392.1
		Sub DAS Putih	6041.43
Total			**86483.4**

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 2025

Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Temanggung sebagaimana tersaji pada gambar 2.6.

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 2025

Gambar 2.6
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung

9. Geologi

Jenis Geologi Kabupaten Temanggung terdiri dari 11 batuan diantaranya adalah 1) Batuan Gunung Api Gilipetung, 2) Batuan Gunung Api Jembangan, 3) Batuan Gunung Api Merbabu, 4) Batuan Gunung Api Sindoro, 5) Batuan Gunung Api Sindoro Lama, 6) Batuan Gunung Api Sumbing, 7) Endapan Kerucut Gunung Berapi, 8) Formasi Kali Getas, 9) Formasi Kerek, 10) Formasi Pernyataan, 11) lava Gunung Sumbing.

Secara rinci Jenis Geologi kabupaten Temanggung tiap Kecamatan disajikan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Jenis Geologi Kabupaten Temanggung Tiap Kecamatan

KECAMATAN	Batuan Gunung Api Gilipetung	Batuan Gunung Api Jembangan	Batuan Gunung Api Merbabu	Batuan Gunung Api Sindoro	Batuan Gunung Api Sindoro Lama	Batuan Gunung Api Sumbing	Endapan Kerucut Gunung Berapi	Formasi Kali Getas	Formasi Kerek	Formasi Penyataan	Lava Gunung Sumbing	TOTAL LUAS (Ha)
Bansari				2.037								2.037
Bejen								3.087	2.168	1.354		6.609
Bulu				2		4.519						4.521
Candiroto		1.229		1.968				48	871	2.205		6.320
Gemawang				234	40				69	6.821		7.164
Jumo				1.612	52					1.432		3.095
Kaloran				124				1.381	915	3.948		6.367
Kandangan				1.235	276				334	5.216		7.061
Kedu				2.715	815	188						3.717
Kledung				1.817		1.888						3.705
Kranggan							799	3.824		694		5.317
Ngadirejo				3.783								3.783
Parakan				1.105	94	1.154						2.352
Pringsurat	471		271				569	4.644				5.955
Selopampang						2.034		206			0	2.240
Temanggung				1.467	85	1.339		210		128		3.229
Tembarak						2.382		75				2.457
Tlogomulyo						2.621					25	2.646
Tretep		12						3.522				3.534
Wonoboyo		3.116		196				1.063				4.374
TOTAL LUAS (Ha)	**471**	**4.356**	**271**	**18.295**	**1.361**	**16.124**	**1.368**	**18.059**	**4.357**	**21.797**	**25**	**86.483**

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Peta Geologi Kabupaten Temanggung dapat disajikan dalam gambar 2.7.

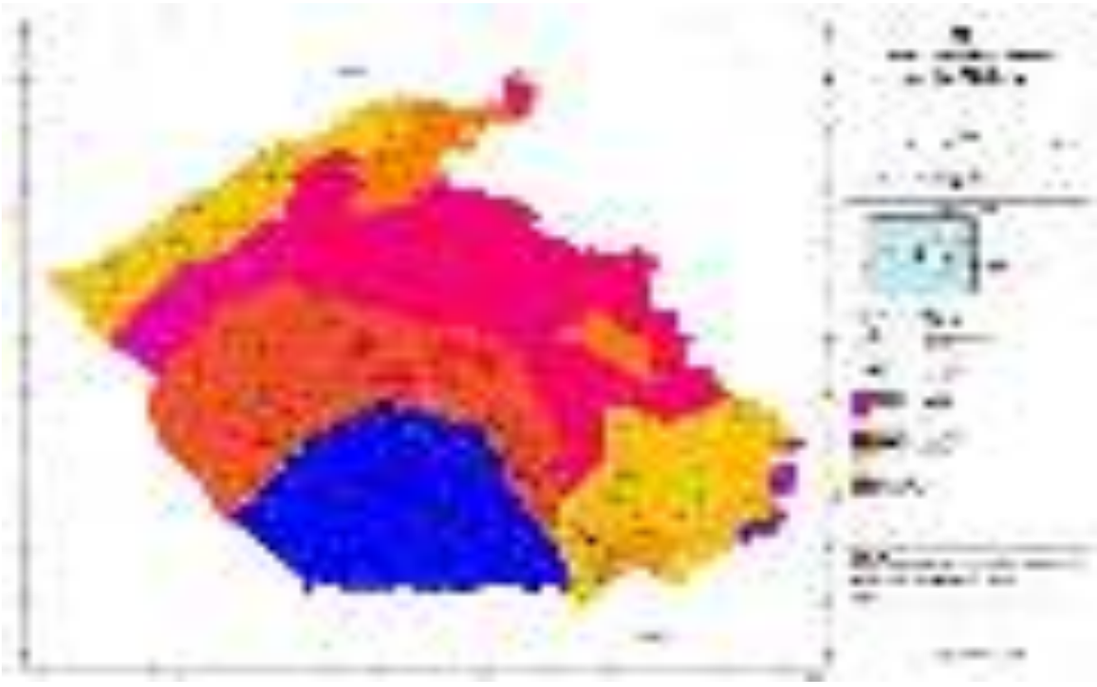

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.7
Peta Geologi Kabupaten Temanggung

B. Karakteristik Wilayah

Kabupaten Temanggung merupakan kabupaten yang terletak di bagian Tengah Provinsi Jawa Tengah dengan keuntungan lokasi strategis yang berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Semarang (77 km), Yogyakarta (64 km) dan Purwokerto (134 km). Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari arah Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Gelangmanggung (Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung) yaitu *Quick-Wins* atau Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan terpadu dengan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan program peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Program unggulan strategis yaitu pengembangan ekonomi kreatif. Sedangkan program unggulan pada sektor peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian seperti kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, susu, telur dan perikanan budidaya.

Iklim di Kabupaten Temanggung cenderung sejuk dan lembab, dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu rata-rata berkisar 20-25°C, yang mendukung pertanian.

Potensi komoditas utama pada Kabupaten Temanggung berasal dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran. Selain tiga sektor tersebut, Kabupaten Temanggung juga memiliki sektor potensial yang juga berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian daerah yaitu sektor pariwisata. Salah satu komoditas utama di Kabupaten Temanggung yaitu sektor pengolahan meliputi industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, industri makanan dan minuman, dan industri pengolahan tembakau.

Produk hortikultura Tahun 2024 yang terdapat di Kabupaten Temanggung adalah cabai rawit dan cabai besar. Cabai rawit luas lahan panen 7.583,5 hektar, total produksi 568.762 kuintal dengan produktivitas 75 kuintal/hektar. Cabai besar dengan luas panen 3.760,50 hektar, total produksi sebesar 285.798 kuintal dengan produktivitas 76 kuintal/hektar.

Produk perkebunan Kabupaten Temanggung yang unggul adalah tembakau dan kopi. Varietas tembakau asli Temanggung yaitu varietas Kemloko 1 sampai dengan varietas Kemloko 8 yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Produk unggulan tembakau Temanggung diantaranya Tembakau Srintil yang merupakan tembakau berkualitas terbaik di dunia ditanam dengan kearifan lokal yang dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan kualitas terbaik yang dihargai mahal dan memiliki kandungan nikotin tinggi. Jenis tembakau Srintil banyak dibudidayakan ditanam dengan ketinggian di atas 800 mdpl dan tidak bisa dihasilkan di daerah lain hanya bisa dihasilkan di desa Legoksari, Losari, Pagergunung, Pagersari, Tlilir, Wonosari, Bansari, Wonotirto, banaran, Gandu, Gedegan dan Kemloko. Selain tembakau Srintil, tembakau Kabupaten Temanggung menjadi salah satu supplier pabrik rokok terbesar di Indonesia. Total produksi tembakau pada Tahun 2024 sebesar 94.389,6 Kuintal/ha dengan luas panen 14.088 kuintal/ha dan produktifitas 6,70 kuintal/ha.

Produk unggulan perkebunan yang lain adalah kopi robusta dan kopi arabika, yang mempunyai citra rasa yang berbeda dengan daerah

lain. Temanggung menjadi produsen kopi terbesar di Jawa Tengah. Total produksi kopi Robusta Tahun 2024 sebesar 83.294,36 Kuintal/ha, luas panen 11.193,97 kuintal/ha dan produktivitas 7,44 kuintal/ha dan untuk Total produksi kopi Arabika pada Tahun 2024 sebesar 6.492,88 kuintal/ha, luas panen 1.177,33 kuintal/ha dan 5,51 kuintal/ha.

Kabupaten Temanggung kaya akan budaya dengan berbagai tradisi seperti Merti Desa, Ruwat Rigen, Ritua Tebal, Suran Traji, Kupat Sewu dan Jamasan Srobong Gobang, sedangkan seni tari tradisional Kabupaten Temanggung sangat banyak ragamnya diantaranya Jaran Kepang (Kuda Lumping), Topeng Ireng, Cengklungan, Prajuritan, Warok, Gatholoco, Wulung Sunu dan kesenian Thethek Bengek. Kebudayaan dan kesenian tersebut telah mendapatkan Sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024. Selain kebudayaan dan kesenian Kabupaten Temanggung juga kaya akan makanan khas diantaranya adalah Buntil, Entho Cothot, Sawut, Sego Jagung, Empis-empis, Sego Gono dan Tempong yang telah mendapatkan Sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Tahun 2022, 2023 dan 2024.

Pada sektor pariwisata, Kabupaten Temanggung memiliki destinasi wisata berupa kawasan Jumprit yang menjadi lokasi pengambilan air suci pada hari raya Waisak dan situs Liyangan yang merupakan situs peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Selain itu, Temanggung juga menjadi daerah perlintasan bagi wisatawan dari arah Semarang dan Yogyakarta yang ingin mengunjungi Borobudur serta kawasan wisata Dieng yang terletak di Wonosobo. Tempat wisata Temanggung diantaranya wisata alam Posong,Pasar Papringan Ngadiprono,Embung Kledung, Embung Bansari, Jembatan Kaca Sigandung *View*, Kledung Park dan Pendakian Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang menjadi tujuan wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

C. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)

Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan berkelanjutan, yang berasal dari alam dan tidak akan habis jika dimanfaatkan secara bijak. Jenis-jenis EBT meliputi energi surya yang dihasilkan dari sinar matahari, energi angin yang

berasal dari hembusan angin, serta energi air seperti pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Selain itu, terdapat pula energi biomassa yang diperoleh dari bahan organik seperti kayu, tanaman, dan limbah, serta energi panas bumi yang dihasilkan dari panas yang tersimpan di dalam perut bumi. Pemanfaatan EBT sangat penting dalam mendukung ketahanan energi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kabupaten Temanggung yaitu:

1. Energi Biomassa Sampah

Kabupaten Temanggung memiliki potensi besar dalam pengembangan energi biomassa berbasis sampah, mengingat setiap harinya menghasilkan timbulan sampah sebesar 130 ton. Jumlah ini merupakan sumber daya yang cukup besar jika dikelola dengan teknologi tepat guna, seperti biogas. Biogas dari sampah organik dihasilkan melalui proses fermentasi anaerobik yang menghasilkan gas metana dan karbondioksida, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Selain menghasilkan energi, pengolahan ini juga membantu mengurangi volume sampah dan dampak lingkungan akibat penumpukan limbah, sehingga mendukung konsep pengelolaan sampah berkelanjutan.

2. Energi Biogas Ternak

Potensi energi biogas dari sektor peternakan di Kabupaten Temanggung juga sangat menjanjikan, seiring tingginya populasi ternak besar seperti sapi dan domba. Limbah kotoran ternak dapat diolah melalui proses anaerobik untuk menghasilkan biogas yang kaya akan metana, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak, penerangan, maupun pembangkit listrik skala kecil. Saat ini, telah terbangun 45 unit instalasi biogas yang memanfaatkan limbah ternak, mencerminkan langkah awal yang konkret dalam pemanfaatan energi bersih dari sektor peternakan. Pengembangan lebih lanjut berpotensi meningkatkan efisiensi energi rumah tangga, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta memberikan manfaat ekonomi bagi peternak.

3. Energi Surya

Energi surya merupakan potensi energi baru terbarukan terbesar di Kabupaten Temanggung karena wilayah ini secara geografis menerima paparan sinar matahari yang melimpah sepanjang hari.

Dengan kondisi iklim yang mendukung, pemanfaatan energi surya sebagai sumber listrik alternatif sangat memungkinkan untuk diterapkan, baik pada skala rumah tangga, fasilitas publik, hingga sektor industri. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat menjadi solusi energi yang ramah lingkungan, bersih, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Optimalisasi potensi ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target energi terbarukan di daerah serta memperkuat ketahanan energi lokal.

2.1.1.2 Kondisi Demografi

A. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Sebaran penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor fisiografis, faktor biologis, dan faktor kebudayaan dan teknologi. Hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 adalah 814.879 jiwa yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan, 266 (dua ratus enam puluh enam) desa, dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan. Jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan Tahun 2024 secara terinci disajikan pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (jiwa/km^2)	Kepadatan penduduk (jiwa/ha)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Bulu	4.528	45,28	50.107	1106,60	11,07
2	Tembarak	2.457	24,57	32.303	1314,73	13,15
3	Temanggung	3.223	32,23	84.781	2630,50	26,30
4	Pringsurat	5.955	59,55	54.112	908,68	9,09
5	Kaloran	6.367	63,67	46.767	734,52	7,35
6	Kandangan	7.061	70,61	54.114	766,38	7,66
7	Kedu	3.714	37,14	60.949	1641,06	16,41
8	Parakan	2.355	23,55	54.456	2312,36	23,12
9	Ngadirejo	3.783	37,83	57.971	1532,41	15,32
10	Jumo	3.095	30,95	30.566	987,59	9,88
11	Tretep	3.534	35,34	21.884	619,24	6,19
12	Candiroto	6.321	63,21	33.345	527,53	5,28
13	Kranggan	5.317	53,17	51.307	964,96	9,65
14	Tlogomulyo	2.645	26,45	23.850	901,70	9,02
15	Selopampang	2.240	22,4	21.093	941,65	9,42
16	Bansari	2.037	20,37	24.682	1211,68	12,12
17	Kledung	3.705	37,05	28.747	775,90	7,76
18	Bejen	6.609	66,09	22.225	336,28	3,36
19	Wonoboyo	4.373	43,73	27.240	622,91	6,23
20	Gemawang	7.164	71,64	34.380	479,90	4,80

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (jiwa/km^2)	Kepadatan penduduk (jiwa/ha)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jumlah		**86.483**	**86.483**	**814.879**	**1.065,83**	**10,66**

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025

Pada Tahun 2024 kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Temanggung. Jumlah penduduk Kecamatan Temanggung sebanyak 84.781 jiwa dimana mencakup 10,40 persen dari jumlah total keseluruhan penduduk Kabupaten Temanggung. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Selopampang dengan jumlah penduduk sebanyak 21.093 jiwa atau 2,59 persen dari total keseluruhan penduduk di Kabupaten Temanggung.

Tiga kecamatan dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kecamatan Temanggung dengan kepadatan 2.630,50 jiwa/km^2, diikuti Kecamatan Parakan dengan kepadatan 2.312,36 jiwa/km^2, Kecamatan Kedu dengan kepadatan 1.641,06 jiwa/km^2 dan rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah 1.065,83 jiwa/km^2. Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 secara terinci disajikan pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020 - 2024

No.	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bulu	48.613	49.005	49.385	49.751	50.107
2.	Tembarak	31.142	31.443	31.737	32.023	32.303
3.	Temanggung	82.704	83.256	83.786	84.294	84.781
4.	Pringsurat	52.067	52.596	53.113	53.618	54.112
5.	Kaloran	44.942	45.413	45.874	46.325	46.767
6.	Kandangan	52.003	52.548	53.081	53.603	54.114
7.	Kedu	58.986	59.499	59.997	60.479	60.949
8.	Parakan	53.177	53.519	53.846	54.158	54.456
9.	Ngadirejo	55.990	56.505	57.007	57.495	57.971
10.	Jumo	29.756	29.971	30.177	30.376	30.566
11.	Tretep	21.171	21.357	21.538	21.714	21.884
12.	Candiroto	32.421	32.665	32.900	33.127	33.345
13.	Kranggan	49.078	49.650	50.212	50.764	51.307
14.	Tlogomulyo	23.207	23.377	23.541	23.698	23.850
15.	Selopampang	20.189	20.421	20.649	20.873	21.093
16.	Bansari	23.908	24.111	24.307	24.498	24.682
17.	Kledung	27.577	27.878	28.174	28.463	28.747
18.	Bejen	21.341	21.569	21.792	22.010	22.225
19.	Wonoboyo	26.329	26.567	26.798	27.022	27.240
20.	Gemawang	33.427	33.679	33.921	34.155	34.380
JUMLAH		**788.028**	**795.029**	**801.835**	**808.446**	**814.879**

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025

Jumlah di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020 dengan jumlah penduduk 788.028 jiwa bertambah menjadi 814.879 jiwa pada Tahun 2024, naik sejumlah 26.851 jiwa. Gambaran penyebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung di 20 kecamatan disajikan pada gambar 2.8.

Sumber : RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.8
Gambaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Jumlah penduduk terbesar pada akhir Tahun 2024 adalah di Kecamatan Temanggung. Hal tersebut dikarenakan pusat perekonomian Kabupaten Temanggung berada di Kecamatan Temanggung.

Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.11.

Tabel 2.11
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2024

Kab/Kota	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk Tahun 2024	Kepadatan Penduduk Tahun 2024 (Jiwa/Km^2)
Kota Magelang	18,12	128.591	7.096,63
Kab. Magelang	1.102,93	1.341.447	1.216,26
Kab. Temanggung	**864,83**	**814.879**	**942,24**
Rata-rata			**3.085,0**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2025

Rata-rata kepadatan penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung adalah 3.085,04 jiwa/km^2. Daerah dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kota Magelang dengan kepadatan mencapai 7.096,63 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kepadatan penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung, dengan kepadatan 942,24 jiwa/km^2.

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dengan faktor penambah jumlah kelahiran dan migrasi masuk serta faktor pengurang jumlah kematian dan migrasi keluar pada suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung tergolong fluktuatif sebagaimana disajikan dalam gambar 2.9.

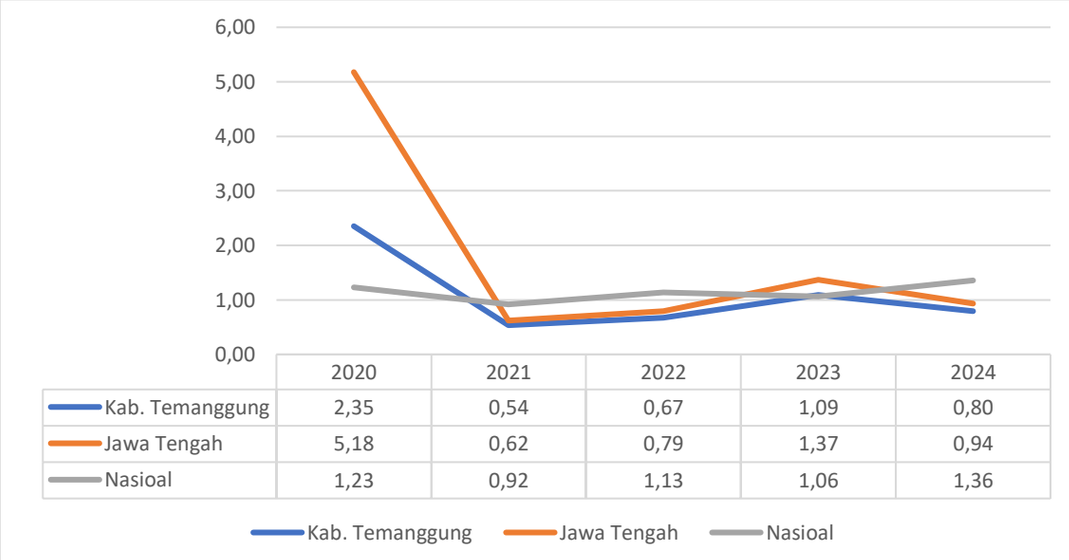

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Temanggung	2,35	0,54	0,67	1,09	0,80
Jawa Tengah	5,18	0,62	0,79	1,37	0,94
Nasioal	1,23	0,92	1,13	1,06	1,36

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2025, SIPD *Kabupaten Temanggung Tahun 2025*

Gambar 2.9
Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, dan pertumbuhan penduduk pada Tahun 2024 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024, secara rinci disajikan pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota. Magelang	121.526	121.610	121.675	122.150	122.431	-0,48	0,07	0,05	0,39	0,23
Kab.Magelang	1.299.859	1.305.512	1.312.573	1.330.656	1.341.447	0,72	0,43	0,54	1,38	0,81
Kab. Temanggung	791.264	794.403	799.764	808.446	814.879	2,35	0,54	0,67	1,09	0,80
Rata-rata	737.186	740.508	744.671	753.751	759.586	0,86	0,35	0,42	0,95	0,61
Rata-rata 5 tahun						**0,64**				

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Data Diolah.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada pengembangan wilayah Gelangmanggung Tahun 2020-2024 adalah 0,64 persen, secara kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung diatas rata-rata jika dibandingkan rata-rata penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung. Laju pertumbuhan penduduk di Kawasan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan dalam gambar 2.10.

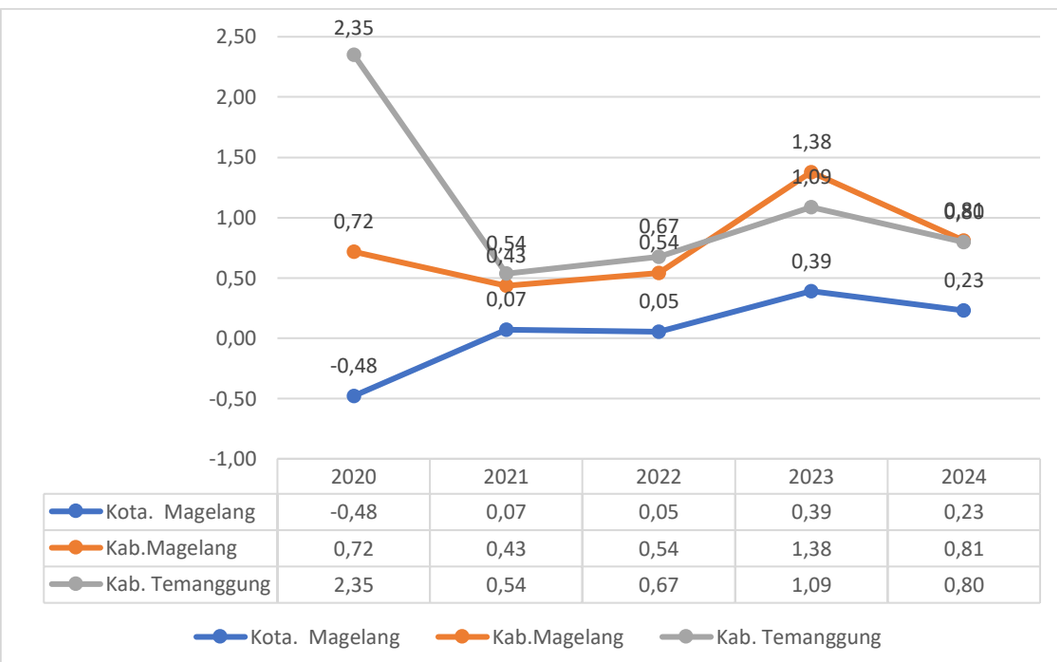

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Gambar 2.10
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Tahun					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bulu	48.613	49.005	49.385	49.751	50.107	-0,35	0,81	0,78	0,74	0,72
2.	Tembarak	31.142	31.443	31.737	32.023	32.303	0,11	0,97	0,94	0,90	0,87
3.	Temanggung	82.704	83.256	83.786	84.294	84.781	-0,54	0,67	0,64	0,61	0,58
4.	Pringsurat	52.067	52.596	53.113	53.618	54.112	-0,11	1,02	0,98	0,95	0,92
5.	Kaloran	44.942	45.413	45.874	46.325	46.767	-1,51	1,05	1,02	0,98	0,95
6.	Kandangan	52.003	52.548	53.081	53.603	54.114	-0,30	1,05	1,01	0,98	0,95
7.	Kedu	58.986	59.499	59.997	60.479	60.949	0,16	0,87	0,84	0,80	0,78
8.	Parakan	53.177	53.519	53.846	54.158	54.456	-0,77	0,64	0,61	0,58	0,55
9.	Ngadirejo	55.990	56.505	57.007	57.495	57.971	-0,43	0,92	0,89	0,86	0,83
10.	Jumo	29.756	29.971	30.177	30.376	30.566	-0,82	0,72	0,69	0,66	0,63
11.	Tretep	21.171	21.357	21.538	21.714	21.884	1,27	0,88	0,85	0,82	0,78
12.	Candiroto	32.421	32.665	32.900	33.127	33.345	-0,61	0,75	0,72	0,69	0,66
13.	Kranggan	49.078	49.650	50.212	50.764	51.307	1,26	1,17	1,13	1,10	1,07
14.	Tlogomulyo	23.207	23.377	23.541	23.698	23.850	2,19	0,73	0,70	0,67	0,64
15.	Selopampang	20.189	20.421	20.649	20.873	21.093	1,02	1,15	1,12	1,08	1,05
16.	Bansari	23.908	24.111	24.307	24.498	24.682	-0,32	0,85	0,81	0,79	0,75
17.	Kledung	27.577	27.878	28.174	28.463	28.747	-0,11	1,09	1,06	1,03	1,00
18.	Bejen	21.341	21.569	21.792	22.010	22.225	0,30	1,07	1,03	1,00	0,98
19.	Wonoboyo	26.329	26.567	26.798	27.022	27.240	0,60	0,90	0,87	0,84	0,81
20.	Gemawang	33.427	33.679	33.921	34.155	34.380	0,46	0,75	0,72	0,69	0,66
JUMLAH		**788.028**	**795.029**	**801.835**	**808.446**	**814.879**	**0,57**	**0,89**	**0,86**	**0,82**	**0,80**

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025, Data Diolah.

Meskipun jumlah penduduk total Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 cenderung bertambah, namun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020-2024 di tiap kecamatan cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk tinggi di Kecamatan Kranggan sebesar 1,07 persen atau bertambah 543 jiwa selama kurun waktu 1 tahun.

B. Struktur Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan dalam gambar 2.11.

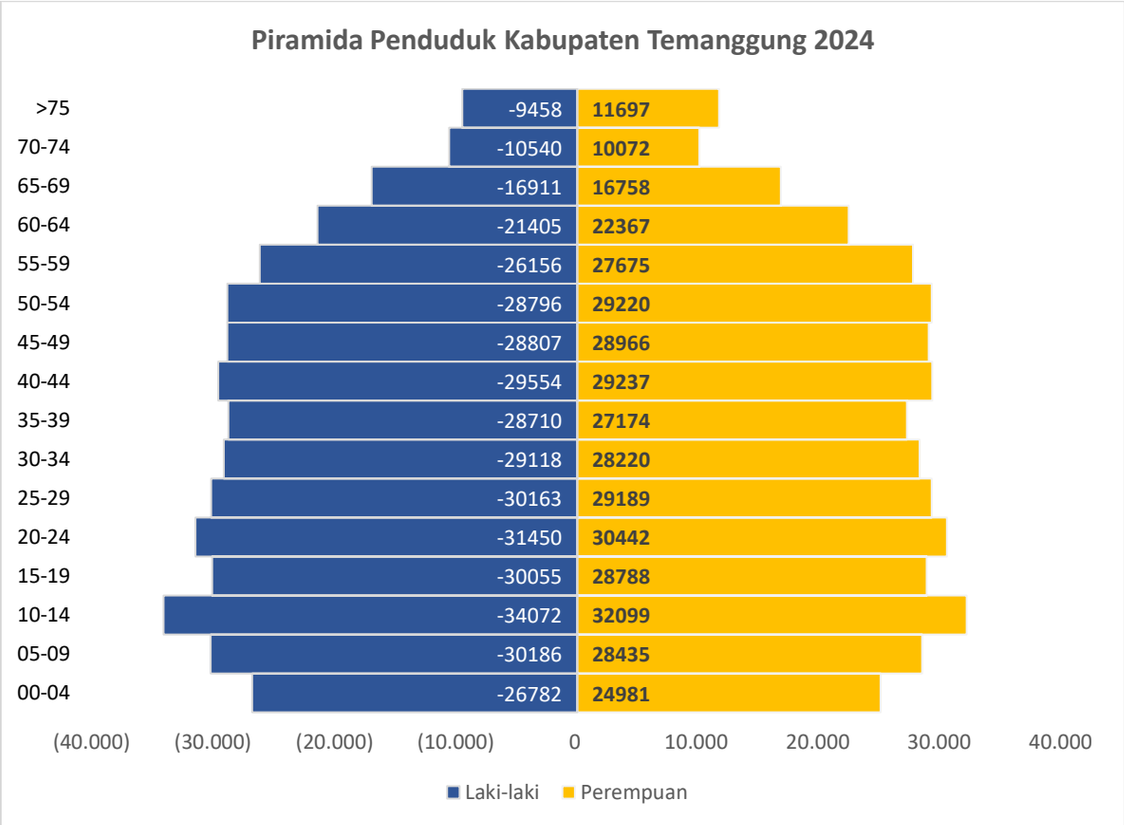

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.11
Grafik Piramida Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.14.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024

No.	Kelompok Usia	Jumlah	%
1	0 – 4	58.182	7,14
2	5 – 9	56.092	6,88
3	10 – 14	58.446	7,17
4	15 – 19	59.528	7,31
5	20 – 24	58.875	7,22
6	25 – 29	58.201	7,14
7	30 – 34	58.465	7,17
8	35 – 39	57.830	7,10
9	40 – 44	55.020	6,75
10	45 – 49	58.213	7,14
11	50 – 54	56.993	6,99
12	55 – 59	53.889	6,61
13	60 – 64	44.068	5,41
14	65 – 69	35.078	4,30
15	70 – 74	24.353	2,99
16	> 75	21.646	2,66
Jumlah		**814.879**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025

Kelompok umur paling terbanyak di Kabupaten Temanggung

adalah penduduk usia 15-19 tahun dengan jumlah 59.528 jiwa atau setara dengan 7,31 persen dari total penduduk Kabupaten Temanggung, berikutnya kelompok usia 20-24 tahun, dengan jumlah 58.875 jiwa atau setara dengan 7,22 persen.

Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan secara rinci disajikan pada tabel 2.15.

Tabel 2.15
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Sebaran		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	% Laki-laki	Perempuan	% Perempuan	Kecamatan	%	
1	Bulu	25.548	50,99	24.559	49,01	50.107	6,15%	104%
2	Tembarak	16.436	50,88	15.867	49,12	32.303	3,96%	104%
3	Temanggung	42.010	49,55	42.771	50,45	84.781	10,40%	98%
4	Pringsurat	26.892	49,70	27.220	50,30	54.112	6,64%	99%
5	Kaloran	23.409	50,05	23.358	49,95	46.767	5,74%	100%
6	Kandangan	27.248	50,35	26.866	49,65	54.114	6,64%	101%
7	Kedu	30.801	50,54	30.148	49,46	60.949	7,48%	102%
8	Parakan	27.263	50,06	27.193	49,94	54.456	6,68%	100%
9	Ngadirejo	29.247	50,45	28.724	49,55	57.971	7,11%	102%
10	Jumo	15.364	50,27	15.202	49,73	30.566	3,75%	101%
11	Tretep	11.140	50,90	10.744	49,10	21.884	2,69%	104%
12	Candiroto	16.699	50,08	16.646	49,92	33.345	4,09%	100%
13	Kranggan	25.368	49,44	25.939	50,56	51.307	6,30%	98%
14	Tlogomulyo	12.127	50,85	11.723	49,15	23.850	2,93%	103%
15	Selopampang	10.288	48,77	10.805	51,23	21.093	2,59%	95%
16	Bansari	12.381	50,16	12.301	49,84	24.682	3,03%	101%
17	Kledung	14.576	50,70	14.171	49,30	28.747	3,53%	103%
18	Bejen	11.130	50,08	11.095	49,92	22.225	2,73%	100%
19	Wonoboyo	13.823	50,75	13.417	49,25	27.240	3,34%	103%
20	Gemawang	17.368	50,52	17.012	49,48	34.380	4,22%	102%
Jumlah		**409.118**	**50,21**	**405.761**	**49,79**	**814.879**	**100%**	**101%**

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung sebanyak 814.879 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 409.118 jiwa (50,21%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 405.761 jiwa (49,79%) di mana jumlah tersebut mengalami kenaikan pada sebesar 1,08% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan rasio 101%.

Kualitas sumber daya manusia dilihat dari keahlian, kemampuannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan diharapkan semakin tinggi kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan per kecamatan masih menggunakan data Tahun 2023 dikarenakan data Tahun 2024 tidak dihitung oleh BPS. Komposisi penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.16.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan										Jumlah
		Strata III	Strata II	DIV/ Strata I	DIII	DI/ DII	SLTA	SLTP	SD	Tidak/ belum tamat SD	Tidak/ Belum sekolah	
1	Bulu	2	58	1.115	409	140	5.006	6.090	9.710	14.667	12.704	49.901
2	Tembarak	6	26	716	171	116	3.446	4.876	6.707	5.295	10.523	31.882
3	Temanggung	11	462	6.320	2.013	637	17.984	10.875	15.177	11.177	19.363	84.019
4	Pringsurat	3	48	1.141	317	169	7.461	10.651	12.045	4.177	17.179	53.191
5	Kaloran	1	24	881	248	197	4.694	7.063	10.127	5.248	18.050	46.533
6	Kandangan	5	38	1.006	313	223	5.132	6.993	10.067	6.701	23.040	53.518
7	Kedu	2	81	1.758	569	290	7.128	7.579	12.173	13.751	16.863	60.194
8	Parakan	11	122	2.190	792	292	8.821	7.119	9.040	9.252	16.525	54.164
9	Ngadirejo	1	33	1.436	515	256	6.939	10.486	15.848	9.926	12.688	58.128
10	Jumo	2	19	694	236	161	2.991	4.361	6.880	5.462	9.929	30.735
11	Tretep	1	6	140	48	43	770	2.856	5.937	4.656	7.281	21.738
12	Candiroto	2	17	827	331	200	3.433	4.427	8.215	9.291	6.937	33.680
13	Kranggan	3	62	1.392	401	212	7.513	9.224	8.592	7.473	15.290	50.162
14	Tlogomulyo	3	10	333	125	46	2.079	3.689	5.817	4.683	6.685	23.470
15	Selopampang	2	10	470	134	73	2.560	3.257	5.576	3.460	5.221	20.763
16	Bansari	0	14	442	141	62	2.234	3.891	5.198	9.062	3.720	24.764
17	Kledung	1	10	246	95	37	1.899	3.826	6.903	4.225	11.160	28.402
18	Bejen	1	14	330	133	86	2.271	3.793	6.121	2.527	6.486	21.762
19	Wonoboyo	2	10	350	105	81	1.898	4.542	8.278	3.671	8.211	27.148
20	Gemawang	1	15	381	131	89	2.162	4.151	7.783	7.237	12.344	34.294
Jumlah		**60**	**1.079**	**22.168**	**7.227**	**3.410**	**96.421**	**119.749**	**176.194**	**141.941**	**240.197**	**808.446**
Persentase (%)		**0,007**	**0,133**	**2,742**	**0,894**	**0,422**	**11,927**	**14,812**	**21,794**	**17,557**	**29,711**	**100,000**

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung 2024, Data diolah

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Temanggung didominasi kategori tidak/belum sekolah sebesar 29,711%, disusul dengan jenjang tamat SD sebesar 21,794%. Untuk tamatan jenjang perguruan tinggi masih relatif kecil yaitu 2,742%. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan adalah karena mahalnya

biaya pendidikan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami perubahan fluktuatif seiring dengan dinamika pembangunan mulai dari Tahun 2020-2024, pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 dan 2022, perkembangan ekonomi sudah semakin membaik pasca pandemi Covid-19, dimana capaian Tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif 5,04 persen, meningkat dari capaian Tahun 2023.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.17.

Tabel 2.17
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target Daerah dan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2020-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung				
	Target	Realisasi	Perubahan	Kinerja Pencapaian Target RKPD	Skala Nilai
2020	5,30	-2,13	-7,18	100%	Sangat Tinggi
2021	2,50	3,34	5,47	100%	Sangat Tinggi
2022	3,50	5,20	1,86	100%	Sangat Tinggi
2023	4,80	5,00	-0,20	100%	Sangat Tinggi
2024	5,27	5,04	0,04	95,64%	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025, Data Diolah.

Pada periode perubahan pertumbuhan ekonomi berada pada posisi negatif (<0) akibat pandemi covid-19 dengan puncak penurunan terendah mencapai -7,18 pada Tahun 2020. Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 mulai terlihat pada Tahun 2021 dengan perubahan

pertumbuhan ekonomi dengan arah positif (>0) mencapai 5,47 menjadi 3,34%. Perubahan pertumbuhan ekonomi juga berlanjut pada kondisi terkini pada Tahun 2022 dengan perubahan positif mencapai 1,86 menjadi 5,20%, dan melambat -0,2 menjadi 5,00%. Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung semakin membaik menjadi 5,04%.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target RKPD pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target belum tercapai 100 persen, belum tercapainya target bisa dianalisis dari data laju pertumbuhan PDRB ADHK seperti sektor pertanian turun dalam 3 tahun terakhir menjadi 1,27 % untuk tahun 2024, sebesar 1,28% di tahun 2023 dan sebesar 2,92% di Tahun 2022. Sektor lain yang mengalami laju pertumbuhan melambat yaitu sektor akomodasi dan makan minum yang turun menjadi 10,16% di Tahun 2024 dari sebelumnya 12,49% di 2023 dan sebesar 15% di Tahun 2022. Sedangkan sektor pengeluaran konsumsi pemerintah laju pertumbuhan menurun menjadi 0,94% Tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,88%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung 5 tahun terakhir jika dibandingkan dengan target secara rinci disajikan dalam gambar 2.12.

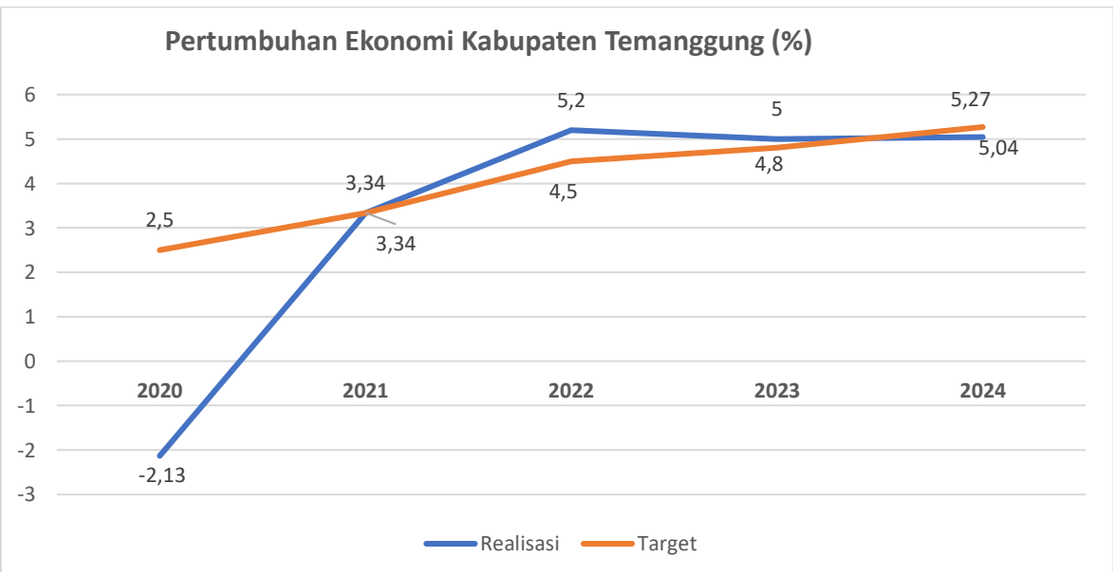

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.12
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024

Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung naik menjadi 5,04 persen yang artinya pertumbuhan sedikit lebih cepat dibandingkan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada kategori PDRB diantaranya

kenaikan yang cukup signifikan pada kategori konstruksi sebesar 13,47 persen, kategori jasa perusahaan sebesar 11,29 persen, kategori jasa pendidikan sebesar 8,50 persen kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 8,26 persen, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,01 persen, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 5,98 persen, selanjutnya kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 4,62 persen. Untuk kategori lain mengalami perlambatan yang masih kecil jika dibandingkan dengan kategori yang mengalami percepatan atau kenaikan.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 16.998,53 miliar rupiah pada Tahun 2023 menjadi 17.855,58 miliar di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama Tahun 2024 perekonomian Kabupaten Temanggung mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen. Peningkatan angka PDRB ini menandakan bahwa ekonomi mulai bergerak membaik seiring dengan penanganan pasca pandemi Covid-19 yang baik dan efektif (BPS, 2024). Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.18.

Tabel 2.18
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)
Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.331,08	3.358,51	3.456,66	3.500,84	3.545,20
B	Pertambangan dan Penggalian	118,76	126.77	121,77	125,57	131,31
C	Industri Pengolahan	3.947,19	4.025,97	4.069,85	4.245,85	4.375,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,10	14,78	15,56	16,47	17,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,00	13,73	13,76	14,36	14,50
F	Konstruksi	749,62	806,12	836,12	901,12	1.023,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.314,95	3.559,94	3.712,94	3.928,94	4.163,86
H	Transportasi dan Pergudangan	533,79	548,56	907,26	978,95	1.035,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	249,09	264,11	303,84	341,79	376,51
J	Informasi dan Komunikasi	378,99	401,67	410,67	456,86	502,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	475,46	491,70	494,23	508,6	532,07

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
L	Real Estate	134,87	137,94	145,94	158,14	170,32
M,N	Jasa Perusahaan	54,68	56,33	59,51	64,76	72,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	396,03	395,00	401,33	421,83	455,64
P	Jasa Pendidikan	668,34	671,96	682,91	730,41	792,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	192,22	193,28	198,27	214,78	232,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	318,57	321,56	356,76	388,26	414,49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**15.214,06**	**15.387,93**	**16.187,37**	**16.997,53**	**17.855,59**

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025

Besarnya peranan berbagai kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap kategori menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap kategori. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Temanggung Tahun 2024 didominasi oleh 4 kategori yaitu (1) Industri Pengolahan mencapai 24,50 persen, (2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 23,32 persen, (3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 19,85 persen, dan (4) Transportasi dan Pergudangan mencapai 5,80 persen (BPS, 2024).

Peningkatan PDRB Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan produksi di sejumlah lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan positif. Adapun 4 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi (1) Konstruksi sebesar 13,47 persen, (2) Jasa Perusahaan mencapai 11,29 persen, (3) Penyediaan Akomodasi dan makan Minum mencapai 10,16 persen, dan (4) Informasi dan Komunikasi mencapai 9,91 persen.

Pertumbuhan lapangan usaha Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.19.

Tabel 2.19
Pertumbuhan Lapangan Usaha Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,86	0,86	2,92	1,28	1,27
B	Pertambangan dan Penggalian	2,11	6,75	-3,94	3,12	4,46
C	Industri Pengolahan	-0,62	2,00	1,09	4,32	3,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,87	4,84	5,26	5,86	8,26

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,02	5,62	0,22	4,36	0,96
F	Konstruksi	-2,01	7,54	3,72	7,89	13,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,79	7,40	4,30	5,82	5,98
H	Transportasi dan Pergudangan	-30,59	2,37	65,39	7,90	5,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,81	6,03	15,04	12,49	10,16
J	Informasi dan Komunikasi	14,14	5,98	2,24	11,25	9,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,01	3,42	0,51	2,91	4,62
L	Real Estate	-0,1	2,32	5,8	8,36	7,7
M,N	Jasa Perusahaan	-6,32	3,01	5,65	8,82	11,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,61	-0,26	1,60	5,11	8,01
P	Jasa Pendidikan	-0,19	0,54	1,63	6,96	8,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,7	0,59	2,59	8,32	8,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	-6,22	0,98	10,95	8,83	6,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**-2,13**	**3,34**	**5,2**	**5,01***	**5,04****

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025
*Keterangan : *)angka samentara, **)angka sangat sementara*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha,setidaknya ada tiga sektor yang mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu:

1. Sektor konstruksi (ada beberapa proyek konstruksi besar yaitu 3 rumah sakit, *city walk* dll)
2. Sektor akomodasi dan makan minum meningkat cukup tajam yang dilatarbelakangi kenaikan pajak rumah makan dan restoran, penambahan kuantitas dan kualitas hotel sehingga tingkat hunian kamar hotel (naik lebih dari 4 poin) atau tingkat aktivitas di hotel meningkat antara lain aktivitas terkait pilkada
3. Sektor perusahan juga meningkat cukup tajam antara lain pajak reklame untuk kampanye pilkada meningkat, kenaikan jasa perusahaan juga didorong oleh kenaikan konstruksi
4. Sektor pendidikan adanya peningkatan pengangkatan guru PPPK Tahun 2022 yang dilantik di Tahun 2024 sehingga belanja di sektor pendidikan meningkat.

Pertumbuhan lapangan Usaha Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut 2.13.

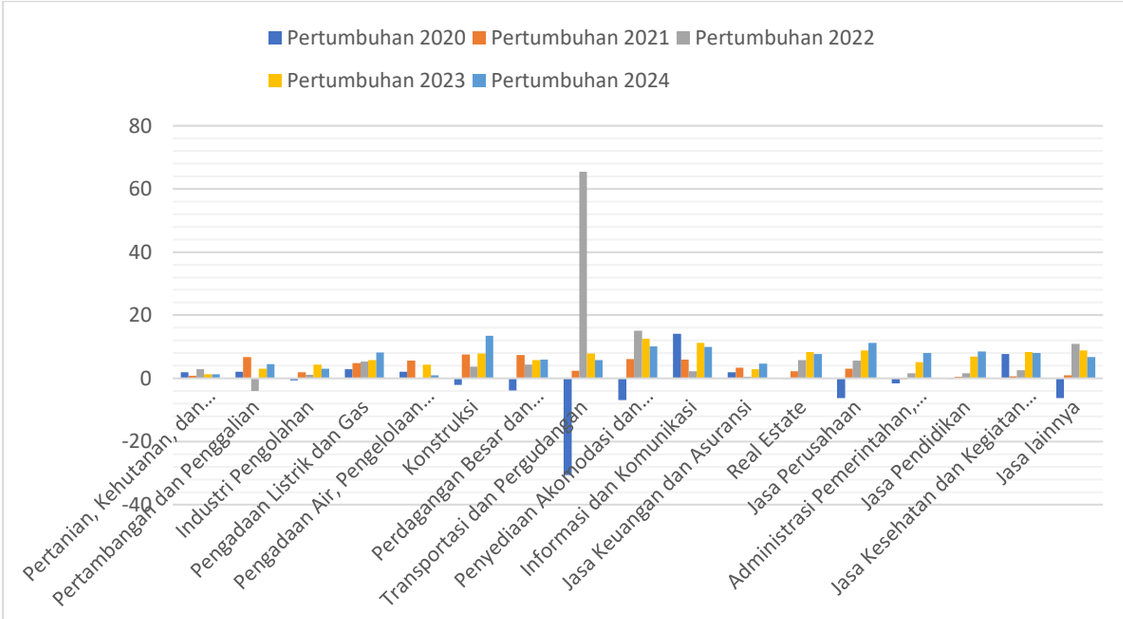

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.13
Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024
Kabupaten Temanggung

Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan daya ungkit sektor pertanian melalui pengembangan industri pengolahan berbasis produk pertanian lokal. Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai target Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melakukan langkah-langkah strategis seperti dengan perbaikan infrastruktur dasar masyarakat yaitu perbaikan jalan di beberapa titik pusat kegiatan ekonomi untuk memperlancar distribusi barang dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan sehingga roda perekonomian dapat terpacu dan biaya pengangkutan lebih efisien. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan penguatan peranan UMKM, peningkatan lapangan kerja dan investasi, serta peningkatan daya saing ekonomi.

Selain Kabupaten Temanggung, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh wilayah setara. Berikut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan nasional disajikan pada gambar 2.14.

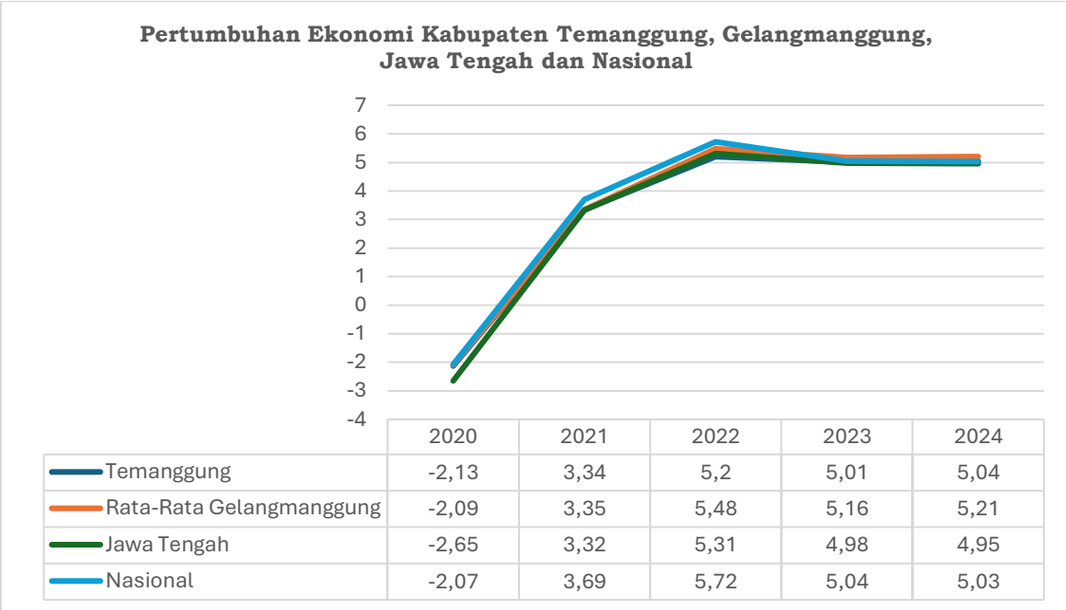

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 2.14
Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian pada wilayah yang setara sebelum pandemi covid-19 dan kondisi terkini pada periode Tahun 2020 s.d. 2024 sangat signifikan. Pada periode sebelum pandemi covid-19, perubahan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung mengalami penurunan drastis pada Tahun 2020 dengan nilai negatif (<0). Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional.

Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung yang selama 5 tahun terakhir secara rinci disajikan pada tabel 2.20.

Tabel 2.20
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.
Kota Magelang	-2,45	-7,89	3,2	5,65	5,77	2,57	5,45	-0,32	5,56	0,11
Kabupaten Magelang	-1,68	-6,98	3,48	5,16	5,46	1,98	5,04	-0,42	5,06	0,02
Kabupaten Temanggung	**-2,13**	**-7,18**	**3,34**	**5,47**	**5,2**	**1,86**	**5,00**	**-0,02**	**5,04**	**0,04**
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	**-2,09**	**-7,35**	**3,35**	**5,43**	**5,48**	**2,14**	**5,16**	**-0,31**	**5,22**	**0,06**
JAWA TENGAH	-2,65	-8,01	3,32	5,97	5,31	1,99	4,98	-0,33	4,95	-0,03
NASIONAL	-2,07	-7,09	3,69	5,76	5,72	2,03	5,04	-0,68	5,03	-0,01

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Data Diolah.

Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian pada wilayah yang setara sebelum pandemi covid-19 dan

kondisi terkini pada periode Tahun 2020-2024 sangat signifikan. Pada periode sebelum pandemi covid-19, perubahan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung mengalami penurunan drastis pada Tahun 2020 dengan nilai negatif (<0) yang mana perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sedikit lebih baik dibandingkan capaian wilayah yang setara yakni -7,18, sedangkan rata-rata wilayah Gelangmanggung mengalami penurunan mencapai -7,35.

Sedangkan pada kondisi terkini, perkembangan perekonomian semakin membaik, ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung maupun wilayah setara yang berada di kawasan Gelangmanggung. Pada kondisi terkini Tahun 2024 perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung lebih bagus dibandingkan Tahun 2023 dengan perubahan 0,04 tetapi melambat jika dibandingkan dengan rata-rata capaian wilayah yang setara pada wilayah Gelangmanggung.

Selain perbandingan dengan wilayah setara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung juga dibandingkan dengan target RKP nasional Tahun 2025. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.21.

Tabel 2.21
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKP Kewilayahan

Indikator	Target RKP Kewilayahan Nasional Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan
Pertumbuhan Ekonomi	5,3 - 5,6	5,04	95,09%

Sumber : Perpres Nomor 109 Tahun 204 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan Perpres 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, target RKP Tahun 2025 yakni 5,3-5,6. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Tahun 2024, perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target RKP Kewilayahan baru mencapai 95,09%.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.15.

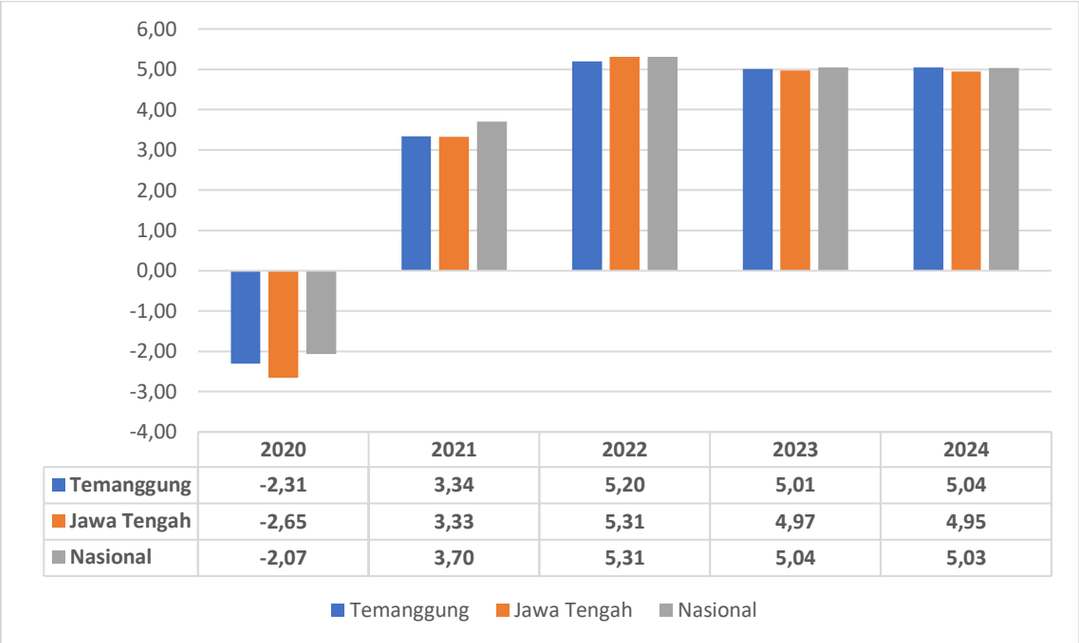

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025

Gambar 2.15
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional maupun Provinsi Jawa Tengah secara umum menunjukkan kondisi yang sama, yang mana terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada Tahun 2020 akibat dampak pandemi covid-19. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, sedangkan untuk capaian Jawa Tengah dan Nasional melambat bila dibandingkan angka Tahun 2023.

Adapun secara lebih rinci, perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional dan provinsi disajikan pada tabel 2.22.

Tabel 2.22
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.
Kabupaten Temanggung	**-2,13**	**-7,18**	**3,34**	**5,47**	**5,20**	**1,86**	**5,00**	**-0,20**	**5,04**	**0,04**
JAWA TENGAH	-2,65	-8,01	3,32	5,97	5,31	1,99	4,98	-0,33	4,95	-0,03
NASIONAL	-2,07	-7,09	3,69	5,76	5,72	2,03	5,04	-0,68	5,03	-0,01

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah.

Berdasarkan perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah yang setara dan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini, capaian nasional maupun Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa kecenderungan

perubahan pertumbuhan ekonomi pada periode Tahun 2019-2020 memiliki persamaan yakni menurun pada posisi <0 sebagai akibat dari pandemi covid-19. Sedangkan setelah pandemi dan kondisi terkini, perubahan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan ke arah positif (>0) yang mana perubahan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 melambat -0,2 dan pada Tahun 2024 tumbuh kembali 0,04, sedangkan pada Tingkat provinsi nasional juga melambat jika dibandingkan Tahun 2023.

Berdasarkan pembagian wilayah di Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong Kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor maka dilakukan percepatan Pembangunan di wilayah pengembangan Gelangmanggung. Prioritas pengembangan wilayah Gelangmanggung untuk Tahun 2025 diarahkan untuk capaian sasaran pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, TPT, dan IPM. Pengembangannya antara lain untuk melestarikan Kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia yang dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi-Merbabu-Telomoyo dan Gunung Sindoro-Sumbing. Kabupaten Temanggung menjadi Kawasan pendukung pengembangan wilayah koridor Borobudur-Dieng.

2.1.2.2 Struktur Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi kategori lapangan usaha PDRB secara keseluruhan. Distribusi kategori lapangan usaha ini juga menunjukkan komposisi atau susunan kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian. Kategori yang dominan atau diandalkan mempunyai nilai persentase yang paling besar dalam struktur tersebut, dan dapat menjadikan ciri khas perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Distribusi ekonomi untuk menggambarkan struktur perekonomian dihitung dari nilai PDRB menurut harga berlaku. Secara lengkap distribusi PDRB yang menggambarkan struktur perekonomian di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel 2.23.

Tabel 2.23
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Persen)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,42	23,91	23,41	22,94	22,47
B	Pertambangan dan Penggalian	0,90	0,93	0,84	0,82	0,80
C	Industri Pengolahan	27,46	27,11	26,19	25,92	25,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	5,06	5,37	5,45	5,63	6,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,14	20,9	20,79	20,95	21,07
H	Transportasi dan Pergudangan	3,15	3,18	5,08	5,49	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,58	1,73	1,77	1,85
J	Informasi dan Komunikasi	1,70	1,72	1,61	1,65	1,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,29	3,40	3,40	3,29	3,22
L	Real Estate	0,77	0,76	0 ,75	0,75	0,76
M,N	Jasa Perusahaan	0,38	0,76	0,38	0,39	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,70	2,54	2,42	2,40	2,48
P	Jasa Pendidikan	5,1	4,94	4,62	4,59	4,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,32	1,27	1,21	1,23	1,28
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,93	1,87	1,98	2,04	2,06
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber:BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 yang paling dominan adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 25,53 persen, diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,47 persen dilanjutkan dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,07 persen.

Perbandingan PDRB (ADHK) dan PDRB (ADHB) Daerah menurut lapangan usaha dengan target RKPD Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.24.

Tabel 2.24
Perbandingan PDRB (ADHK) dan PDRB (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

Tahun	Target PDRB ADHB	Realisasi PDRB ADHB	Target PDRB ADHK*	Realisasi PDRB ADHK
2020	21.700.000	21.557.077,14	14.800.000	18.875.600
2021	22.500.000	22.627.791,48	19.220.000	19.370.430
2022	24.000.000	24.733.342,71	19.710.000	20.190.000
2023	29.570.000	26.912.324,20	20.010.000	21.030.000

Tahun	Target PDRB ADHB	Realisasi PDRB ADHB	Target PDRB ADHK*	Realisasi PDRB ADHK
2024	31.992.800	35.490.000,00	20.327.040	21.910.000

*Sumber: BPS Kab. Temanggung, 2025, *Target Bappeda Kab. Temanggung*

Realisasi PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2020 lebih rendah dari target yang ditetapkan, dimana banyak sektor yang tidak tumbuh secara normal karena terdampak pandemi Covid-19. Namun pada Tahun 2023 dan 2024 realisasi PDRB Kabupaten Temanggung telah melebihi target yang telah ditetapkan karena pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

2.1.2.3 PDRB per Kapita

Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung secara rinci disajikan pada tabel 2.25.

Tabel 2.25
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	21.200.000	27.325.870	-3,01	14.800.000	18.875.600	-4,67
2021	22.000.000	28.484.021	4,24	19.220.000	19.370.430	0,78
2022	23.000.000	30.938.180	8,62	19.710.000	20.190.000	2,44
2023	29.570.000	33.290.000	7,60	20.010.000	21.030.000	5,10
2024	31.992.800	35.490.000	6,61	20.327.040	21.910.000	7,79

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025, Data Diolah.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Temanggung lebih baik daripada target daerah. Walaupun pada Tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB per Kapita baik ADHB maupun ADHK, namun capaian PDRB per Kapita

Kabupaten Temanggung tetap konsisten melampaui target daerah yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita ADHB Kabupaten Temanggung jika dibandingkan rata-rata capaian wilayah yang setara tersaji pada tabel 2.26.

Tabel 2.26
Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung

Kabupaten /Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum -buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum -buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum -buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum-buhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertum -buhan (%)
Kota Magelang	71.702.030,00	-1,03	75.476.930,00	5,26	82.660.000,00	9,52	89.960.000,00	8,83	96.560.000,00	7,34
Kabupaten Magelang	25.297.155,13	-1,15	26.124.724,57	3,27	28.370.000,00	8,59	30.571.677,86	7,76	32.600.000,00	6,63
Kabupaten Temanggung	27.325.870,00	-3,01	28.484.021,00	4,24	30.938.180,00	8,62	33.290.000,00	7,60	35.490.000,00	6,61
Rata-Rata Gelangmanggung	41.344.528,31	-1,73	43.361.891,86	4,88	46.659.071,52	7,60	51.273.892,62	9,89	54.883.333,33	7,04
Jawa Tengah	36.965.000,00	-1,96	38.568.000,00	4,34	41.946.000,00	8,76	45.199.000	7,76	47.900.000	5,98

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid-19 Tahun 2020, pertumbuhan PDRB perkapita ADHK pada wilayah Gelangmanggung mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi dampak yang terjadi di Kabupaten Temanggung dapat dikategorikan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan wilayah yang setara dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Temanggung yang lebih baik dibandingkan rata-rata wilayah setara. Pada kondisi Tahun 2024, pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Temanggung sedikit dibawah rata-rata capaian wilayah setara sebesar 7,04%, akan tetapi jika dibandingkan dengan Kabupaten Magelang masih lebih tinggi capaiannya walaupun dari kota Magelang. Hal ini disebabkan melonjaknya pertumbuhan PDRB per kapita ADHK di Kota Magelang yang merupakan kawasan perkotaan bergerak pada sektor sekunder (non-pertanian), sedangkan Kabupaten Temanggung didominasi oleh kawasan perdesaan bergerak pada sektor primer (pertanian).

Berikut adalah gambar Pertumbuhan PDRB Per kapita ADHK pada wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 sebagaimana gambar 2.16.

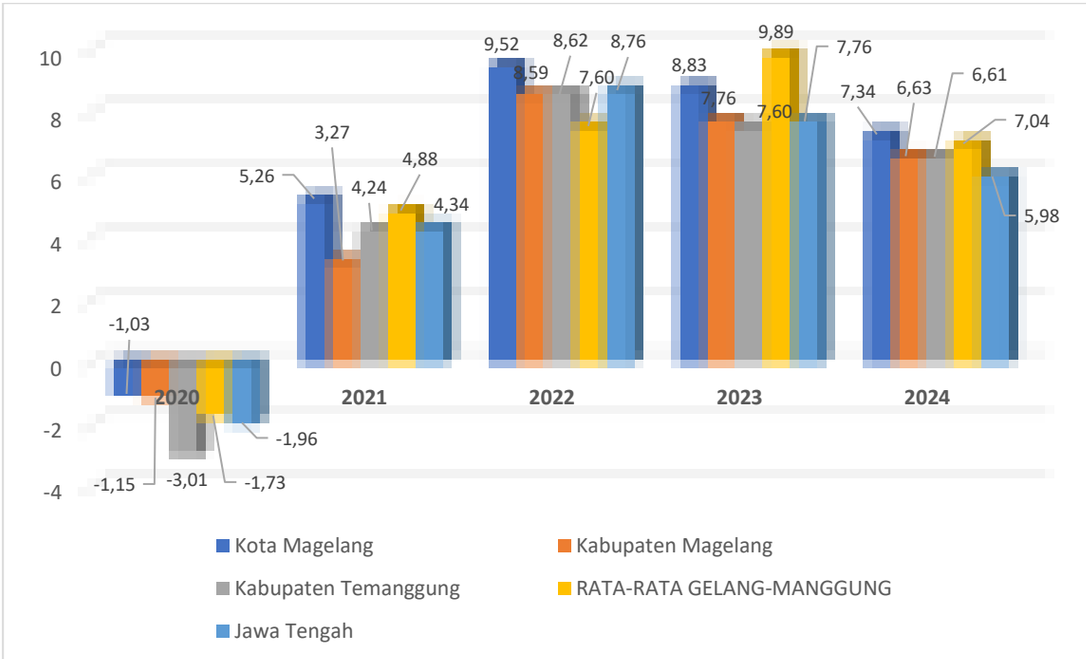

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 2.16
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Nasional Tahun 2020-2024 tersaji pada gambar 2.17.

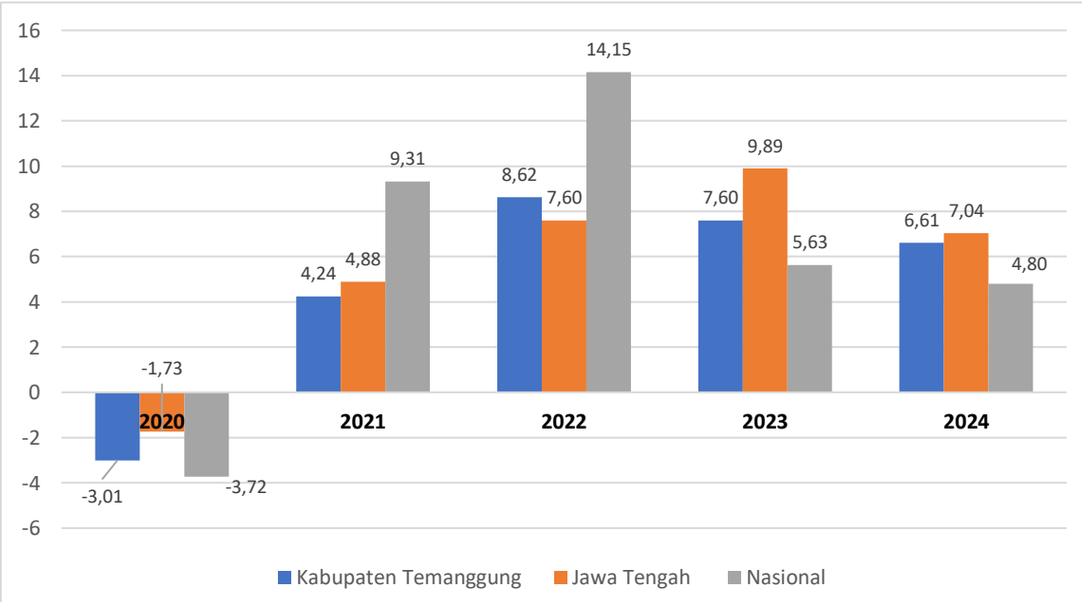

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 2.17
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan PDRB Perkapita antara Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional cenderung bergerak secara fluktuatif. Pada periode Tahun 2020-2023, kondisi pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung masih berada dalam *range*

pertumbuhan provinsi dan nasional dimana Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan nasional namun lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Pada masa pasca pandemi covid-19 Tahun 2021, Kabupaten Temanggung berhasil bangkit yang dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB Perkapita yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Akan tetapi, pada Tahun 2024 pertumbuhan PDRB Perkapita berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Temanggung berupaya untuk meningkatkan distribusi produk barang dan jasa lokal sehingga selain dapat melayani permintaan dan kebutuhan lokal namun juga dapat melayani wilayah sekitarnya, membuka peluang investasi dari berbagai sektor baik dalam maupun luar wilayah, membangun infrastruktur. Selain itu, Kabupaten Temanggung juga untuk mendorong pertumbuhan PDRB Perkapita serta pemerataan kesejahteraan Masyarakat dengan mendorong UMKM agar bertumbuh dan naik kelas.

2.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dengan target RKPD yang telah ditentukan Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.18.

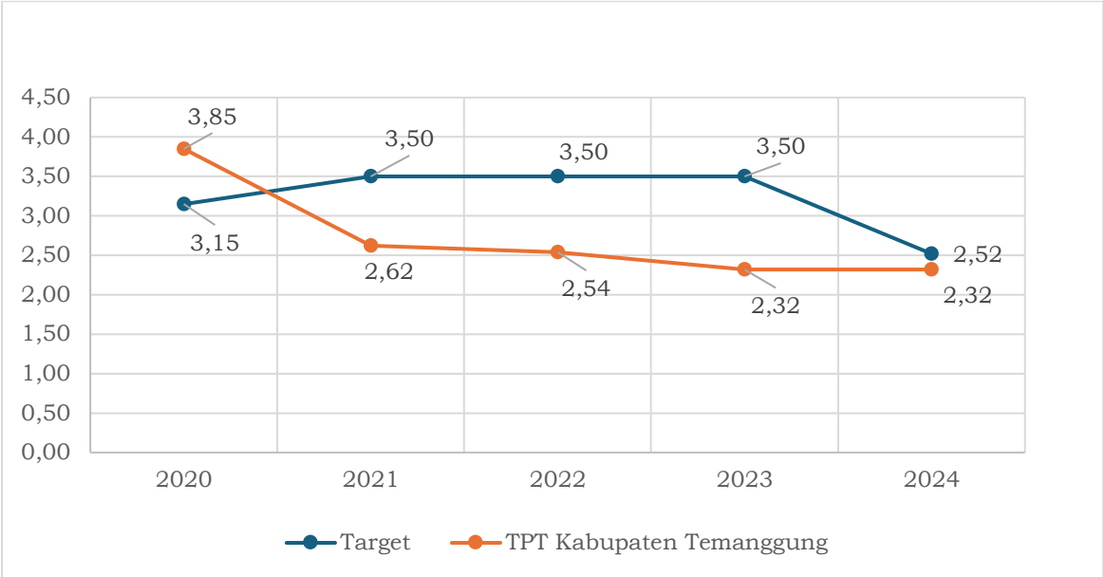

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Gambar 2.18
Perbandingan TPT dengan Target Daerah
RKPD Tahun 2020-2024

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan target RKPD sudah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKPD. Pada Tahun 2020, tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sempat lebih tinggi dibandingkan target yang disebabkan oleh pandemi covid-19, namun pada tahun selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung berangsur membaik yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih rendah dibandingkan target daerah serta tingkat perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ≤0 sebagaimana grafik dan tabel berikut.

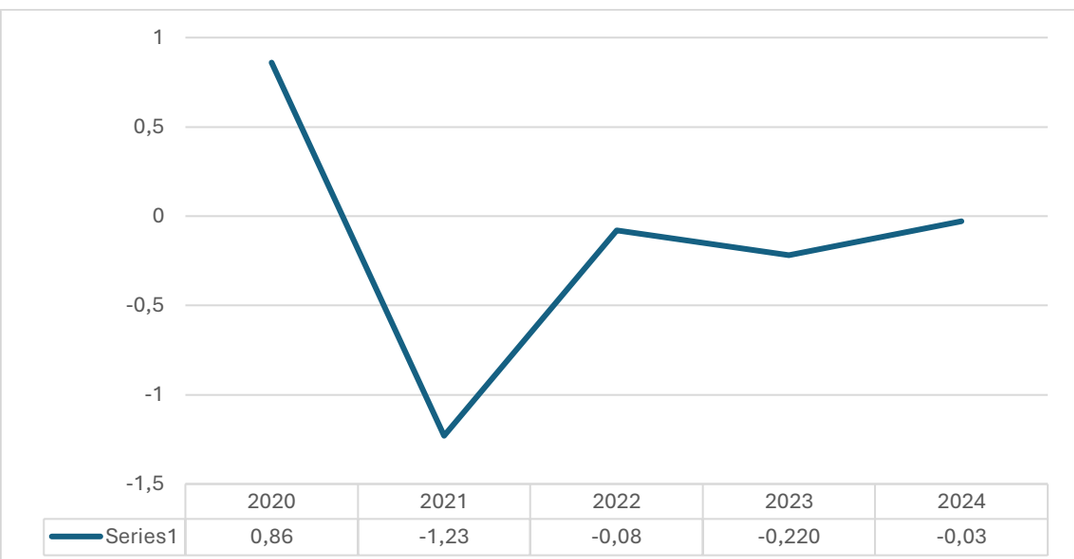

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Gambar 2.19
Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung sebagaimana di sajikan pada tabel 2.27.

Tabel 2.27
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tahun	Target RKPD	TPT Kabupaten Temanggung	Perubahan TPT Kabupaten Temanggung	Kinerja Pencapaian Target RKPD
2020	3,15	3,85	0.86	99,28%
2021	3,50	2,62	-1.23	100%
2022	3,50	2,54	-0.08	100%
2023	3,50	2,32	-0,22	100%
2024	3,52	2,35	-0,03	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TPT mengalami kecenderungan menurun dari Tahun 2020-2023. Sedangkan pada Tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 0,02 dari Tahun 2023. Tingkat perubahan dengan nilai ≤0 yang berarti tenaga kerja yang tidak termanfaatkan semakin berkurang dan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada pada sektor pertanian dan industri padat karya. Tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka (TPT) daerah rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.28.

Tabel 2.28
Perbandingan TPT Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung	
	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT
2020	3,85	0,86	5,57	-0,16
2021	2,62	-1,23	5,46	2,09
2022	2,54	-0,08	4,74	-0,11
2023	2,32	-0,22	4,00	-0,72
2024	2,35	-0,03	3,43	0,56

Sumber: BPS Provinis Jawa Tengah Tahun 2025

Secara umum TPT dan Perubahan Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara Gelangmanggung. Jika ditinjau lebih rinci, TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Gelangmanggung dengan perubahan sebesar -0,03 pada Tahun 2024. Pada Tahun 2020 yang merupakan puncak pandemi covid-19, TPT Kabupaten Temanggung maupun Gelangmanggung menunjukkan kenaikan, namun jika dicermati lebih rinci perubahan TPT Kabupaten Temanggung lebih baik dari rata-rata capaian wilayah

setara (Gelangmanggung). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara yang dibuktikan dengan nilai TPT sebesar<3% sedangkan pada wilayah Gelangmanggung mencapai >4%. Secara rinci, TPT Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Gelangmanggung tersaji pada tabel 2.29.

Tabel 2.29
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	TPT				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	4,27	5,03	4,97	5,25	4,40
Kabupaten Magelang	8,59	8,73	6,71	4,42	3,55
Kabupaten Temanggung	**3,85**	**2,62**	**2,54**	**2,32**	**2,35**
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	5,57	5,46	4,74	4,00	3,43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 tersaji pada gambar 2.20.

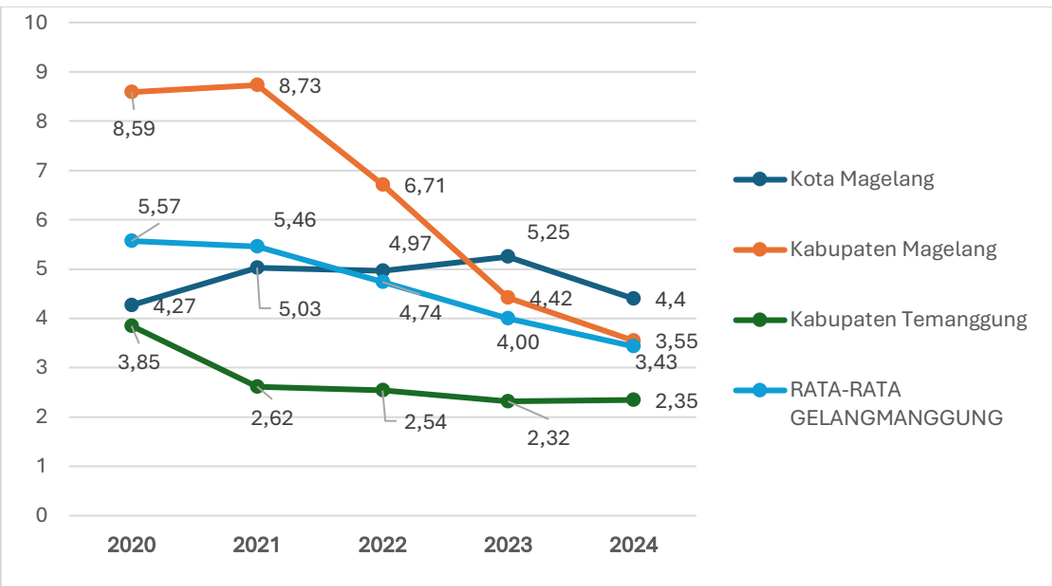

Sumber: BPS Provinis Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 2.20
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Selain dibandingkan dengan rata-rata capaian wilayah setara, perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian nasional juga menunjukkan nilai yang lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dari perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

daerah dengan target RKP Kewilayahan yang telah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKP Kewilayahan sebagaimana tabel 2.30.

Tabel 2.30
Perbandingan TPT Daerah dengan target RKP Kewilayahan

Indikator	Target RKP Kewilayahan Nasional Tahun 2025	Realisasi Capaian Tahun 2024	Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 - 5 %	2,35	100%

Sumber : Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Adapun perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian Nasional Tahun 2020-2024 tersaji pada gambar 2.21.

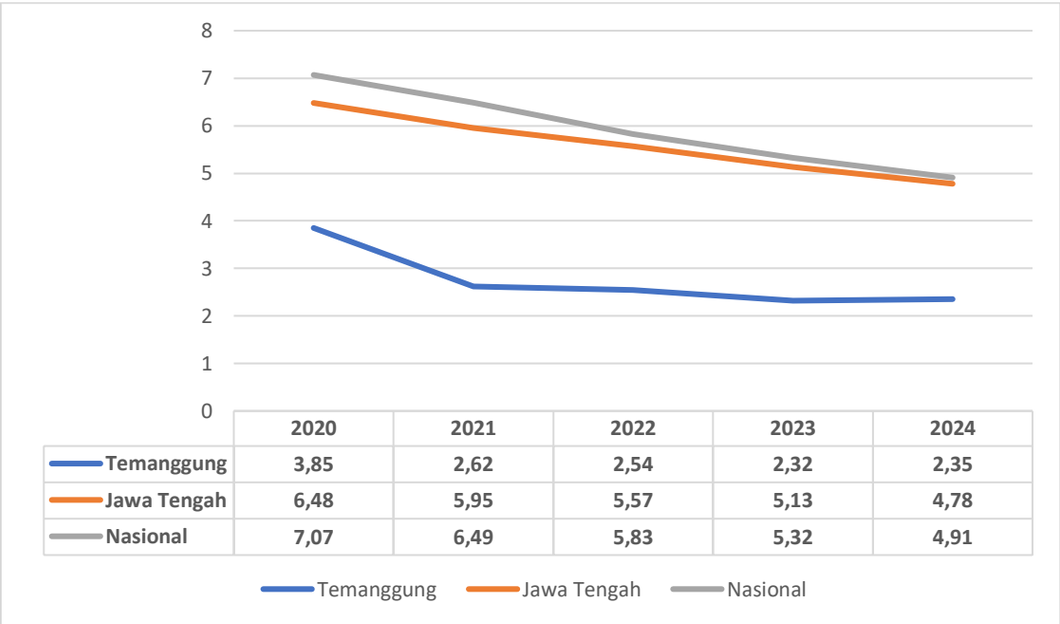

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024

Gambar 2.21
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2020-2024

Tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional secara rinci disajikan pada tabel 2.31.

Tabel 2.31
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung		Jawa Tengah		Nasional	
	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT
2020	3,85	0,86	6,48	1,99	7,07	1,79
2021	2,62	-1,23	5,95	-0,53	6,49	-0,58
2022	2,54	-0,08	5,57	-0,38	5,83	-0,66
2023	2,32	-0,22	5,13	-0,44	5,32	-0,51
2024	2,35	0,33	4,78	-0,35	4,91	-0,41

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025

Secara umum selama 5 (lima) tahun terakhir, perbandingan perubahan TPT daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara dan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini lebih baik dari nasional maupun provinsi. Walaupun pada masa pandemi covid-19 perubahan TPT mengalami peningkatan, namun perubahan TPT di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dengan perubahan sebesar 0,86 pada Tahun 2020. Pada kondisi terkini, perubahan TPT Kabupaten Temanggung juga menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nasional maupun provinsi dengan penurunan sebesar -1,23 pada Tahun 2021 dan -0,22 pada Tahun 2023. Selain dari perubahannya, TPT di Kabupaten Temanggung juga jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional dengan TPT terendah pada Tahun 2023 sebesar 2,32 sedangkan provinsi dan nasional secara berturut-turut mencapai 5,13 dan 5,32. Hal ini karena sektor pertanian terutama pada komoditas tembakau dan industri pengolahan kayu yang padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Pada Tahun 2024 TPT Kabupaten Temangung sebesar 2,35 sedangkan provinsi dan nasional secara berturut-turut mencapai 4,78 dan 4,91. Capaian ini tentu menunjukkan peningkatan kinerja yang baik dari pemerintah daerah dalam penanganan ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung.

Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan penurunan angka TPT menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang telah dilaksanakan daerah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini karena beberapa sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam berproduksi.

Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.23.

Tabel 2.32
Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung			Jawa Tengah			Nasional		
	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE
2020	3,85	0,86	-2,13	6,48	1,99	-2,65	7,07	1,79	-2,07
2021	2,62	-1,23	3,34	5,95	-0.53	3,32	6,49	-0,58	3,69
2022	2,54	-0,08	5,20	5,57	-0.38	5,31	5,83	-0,66	5,72
2023	2,32	-0,22	5,00	5,13	-0,44	4,98	5,83	-0,51	5,04
2024	2,35	-0,33	5,04	4,78	-0,35	4,95	4,91	-0,51	5,03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Pada kondisi pasca pandemi dan terkini pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional sudah menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan dengan penurunan perubahan TPT. Secara umum dampak pandemi terhadap TPT di Kabupaten Temanggung lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Hal tersebut disebabkan dari sisi pertumbuhan jumlah pekerja, dampak covid-19 relatif kecil terjadi di sektor pertanian yang menjadi sektor utama di Kabupaten Temanggung dengan tren yang tumbuh positif, sementara sektor lainnya (non-pertanian, industri, dan jasa) mengalami kontraksi. Adapun faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 selain dikarenakan adanya sumber daya alam yang berlimpah khususnya pada sektor perkebunan seperti kopi maupun industri pengolahan kayu, adalahnya peningkatan yang cukup signifikan dari sektor konstruksi, sektor akomodasi, sektor perusahaan dan sektor jasa pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi secara langsung, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat negatif, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi membawa dampak terhadap penurunan jumlah pengangguran. Adapun tingkat pertumbuhan

jumlah penganggur di Kabupaten Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.22.

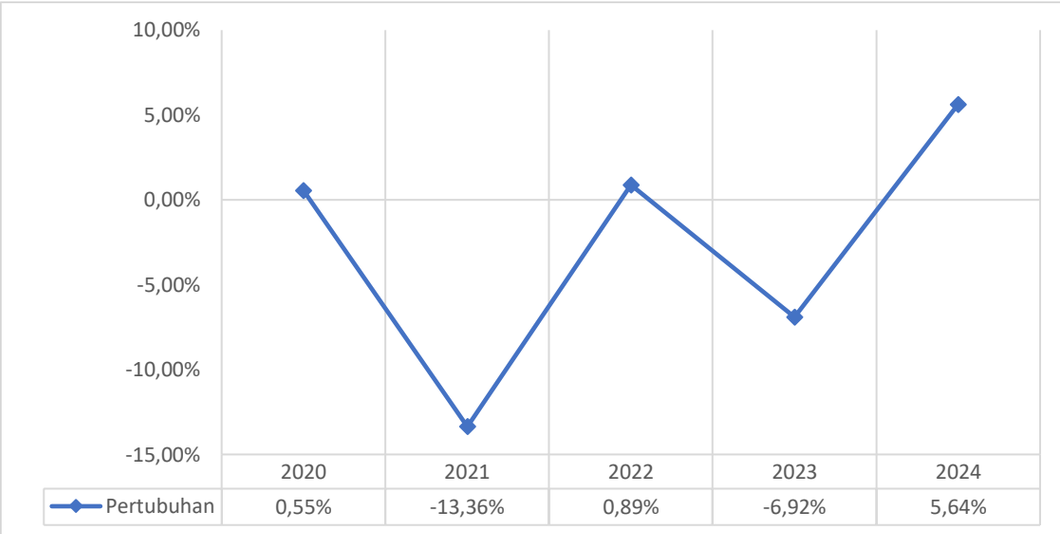

Sumber : Bappeda, data diolah Tahun 2025

Gambar 2.22
Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar diatas, pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 cenderung fluktuatif dengan tren menurun akan tetapi pada Tahun 2024 naik dengan pertumbuhan 5,64 persen. Kenaikan jumlah penganggur dikarenakan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sektor jasa padat karya di Kabupaten Temanggung. Adapun rata-rata pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir <0 dengan nilai sebesar -2,62%. Adapun rincian pertumbuhan dan perubahan jumlah pengangguran di Kabupaten Temanggung secara rinci disajikan pada tabel 2.23.

Tabel 2.33
Rata-rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Penganggur selama 5 Tahun

Tahun	Kabupaten Temanggung		
	Jumlah Penganggur	Pertumbuhan (%)	Perubahan
2020	13.756	0,55	75
2021	11.918	-13,36	-1.838
2022	12.024	0,89	106
2023	11.192	-6,92	-832
2024	11.832	5,72	640
Rata-rata 5 tahun	**12.144**	**-2,62**	**-370**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Rata-rata tingkat perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir <0 dengan pengurangan sebanyak 370 orang. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi meningkatnya jumlah pengangguran diantaranya peningkatan

keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan bakat, memperluas kesempatan kerja dengan mendorong investasi lebih banyak di Kabupaten Temanggung melalui bursa kerja/bursa kerja khusus di lingkungan sekolah-sekolah Vokasi (SMK), memberikan kemudahan berusaha khususnya perusahaan-perusahaan baik PMPN/PA yang padat kerja, dan menumbuhkan potensi ekonomi dengan disertifikasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi lokal.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung jauh lebih baik dari rata-rata capaian wilayah setara yang ditunjukkan dengan persentase pertumbuhan yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara sebagaimana gambar 2.23.

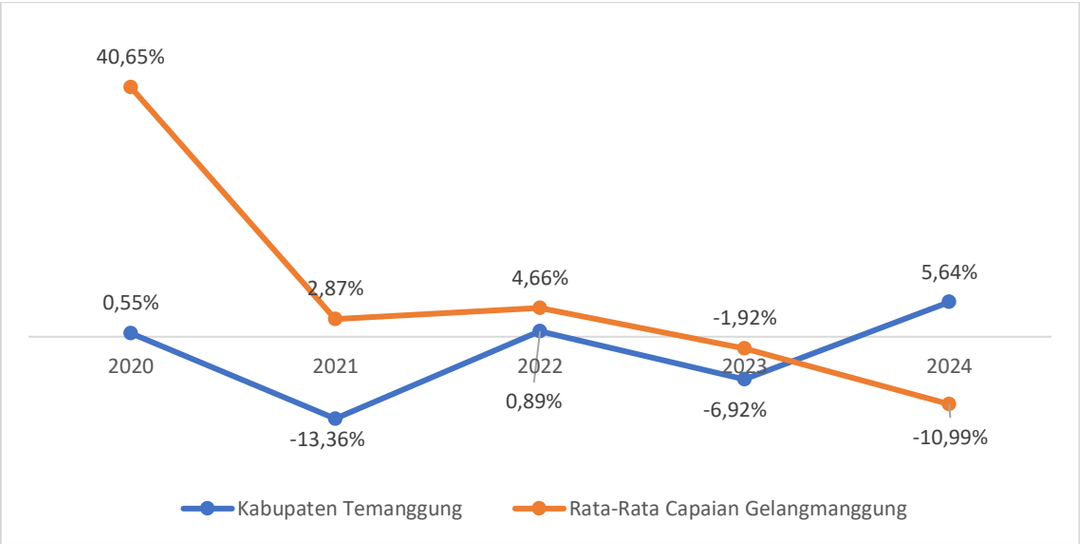

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 2.23
Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Adapun perbandingan perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian wilayah yang setara secara rinci disajikan pada tabel 2.34.

Tabel 2.34
Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung

Tahun	Kabupaten Temanggung	Rata-Rata Capaian Gelangmanggung
2020	0.55%	33,43%
2021	-13.36%	7,86%
2022	0.89%	-6,61%
2023	-6,92%	-9,23%

Tahun	Kabupaten Temanggung	Rata-Rata Capaian Gelangmanggung
2024	5,64%	1,31%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara. Pada Tahun 2021 perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan signifikan mencapai -13,36%, sedangkan kondisi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung masih mengalami peningkatan sebesar 7,86%. Pada Tahun 2024 juga menunjukkan kondisi yang lebih baik dimana perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mencapai 5,64% dan lebih rendah dibandingkan rata-rata wilayah setara yang mencapai 1.31%.

Adapun secara rinci jumlah penganggur Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Pengembangan secara rinci disajikan pada tabel 2.35.

Tabel 2.35
Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	Jumlah Penganggur (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	5.699	5.769	4.487	3.632	2.979
Kabupaten Magelang	33.080	38.976	40.895	36.841	29.240
Kabupaten Temanggung	13.756	11.918	12.024	11.192	11.823
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	**17.512**	**18.888**	**19.135**	**17.222**	**14.681**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Selain dibandingkan dengan wilayah setara, jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung juga dapat dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.36.

Tabel 2.36
Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2020	0,55%	48,40%	37,49%
2021	-13,36%	-7,09%	-6,82%
2022	0,89%	-3,88%	-7,43%
2023	-6,92%	0,00%	-6,72%
2024	5,64%	0,00	-4,96%
Rata-rata	**-2,64%**	**7,49%**	**-2,31%**

Sumber: BPS RI, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari nasional maupun provinsi. Ditinjau dari rata-rata selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung <0 dengan nilai sebesar -2,64 persen lebih besar dari nasional -2,31, sedangkan pada tingkat provinsi mencapai >3%.

Adapun perbandingan perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional disajikan pada gambar 2.24.

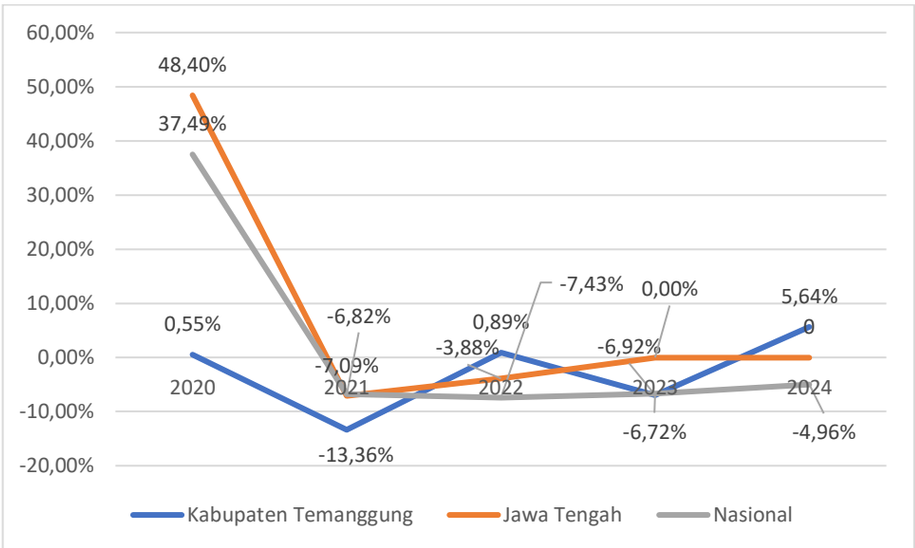

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah

Gambar 2.24
Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung dengan Capaian Nasional

Perbandingan perubahan jumlah penganggur daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara dan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini lebih baik dari nasional maupun provinsi Perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari capaian nasional. Tahun 2020 lebih rendah yakni hanya sebesar 0,55%, sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pertumbuhan jumlah penganggur meningkat secara signifikan mencapai >35% dari kondisi sebelumnya. Adapun pada kondisi pasca pandemi terlihat bahwa pemulihan ekonomi semakin membaik yang salah satunya ditunjukkan dengan penurunan pertumbuhan jumlah penganggur baik pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Pada Tahun 2023 penurunan pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung lebih baik dari nasional dan provinsi dengan pengurungan mencapai -6,92%, sedangkan secara provinsi dan nasional secara berturut-turut hanya mencapai -

4,25% dan -6,77%. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Temanggung.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Penduduk Bekerja (TPAK) memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. TPAK tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Akan tetapi, peningkatan TPAK juga dapat menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah pengangguran pada kondisi dimana rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh penduduk usia kerja yang tidak bekerja.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.

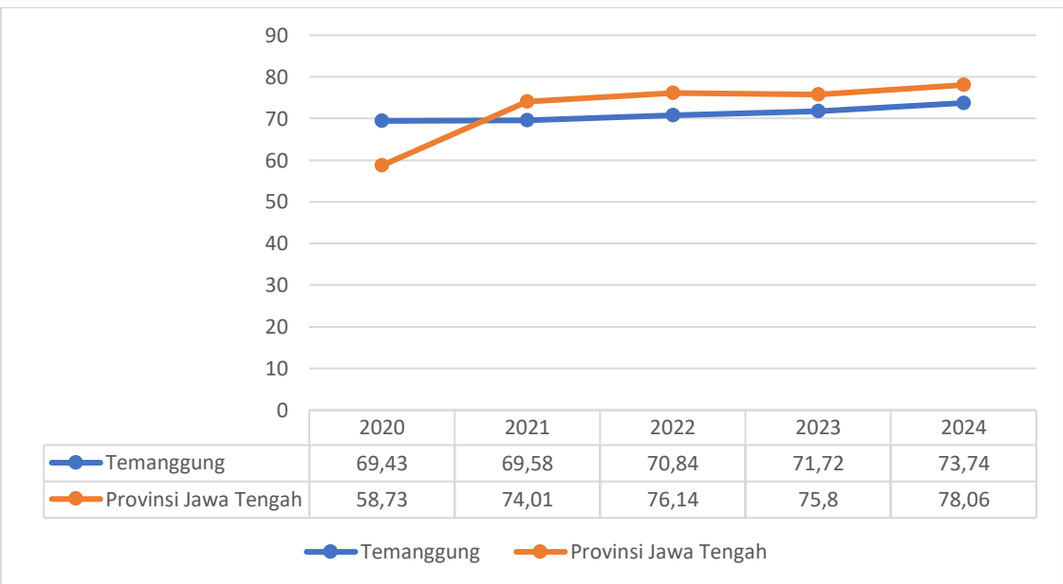

	2020	2021	2022	2023	2024
Temanggung	69,43	69,58	70,84	71,72	73,74
Provinsi Jawa Tengah	58,73	74,01	76,14	75,8	78,06

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 2.25
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Pada periode 5 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah, TPAK Kabupaten Temanggung menunjukkan nilai yang lebih tinggi kecuali pada Tahun 2020 saat pandemi melanda. Tingginya TPAK Kabupaten Temanggung ini menunjukkan bahwa lebih tingginya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam

suatu perekonomian. Di sisi lain, tingginya TPAK tidak selalu menggambarkan penduduk yang aktif bekerja karena adanya peralihan menjadi ibu rumah tangga maupun penambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa.

2.1.2.5 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global dan masih menjadi prioritas pembangunan nasional. Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang mendapat perhatian serius dari pemerintah yang belum dapat teratasi. Terkait masalah kemiskinan tersebut, salah satu aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah penyediaan data yang akurat.

A. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Potret kemiskinan Kabupaten Temanggung dilihat dari tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024. Perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan targer RKPD disajikan pada tabel 2.37.

Tabel 2.37
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Tingkat Kemiskinan) dengan Target RKPD

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2020	8,85	9,96	76.798	77.330
2021	10,36	10,17	72.372	79.100
2022	10,00	9,33	80.126	73.040
2023	9,80	9,26	75.495	72.960
2024	9,25	8,67	67.442	68.770

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025, Data Diolah.

Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 meningkat pada capaian angka 10,17% sebagai dampak adanya pandemi covid-19. Dilihat dari jumlah penduduk, berbanding lurus dengan persentase penduduk miskin yang meningkat, jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan. Namun pada Tahun 2024 tingkat kemiskinan mencapai angka 8,67% lebih rendah daripada capaian sebelum adanya pandemi. Hal tersebut mengindikasikan mulai pulihnya kondisi perekonomian di Temanggung. Perbandingan Tingkat kemiskinan daerah dengan capaian nasional juga menunjukkan nilai yang lebih baik.

Jika dibandingkan dengan target RKP Nasional tahun 2025 baru mencapai 92%, kinerja pencapaian target RKP Kewilayahan sebagaimana disajikan pada tabel 2.38.

Tabel 2.38
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Target RKP Kewilayahan

Indikator	Target RKP Kewilayahan Nasional Tahun 2025	Realisasi Capaian Tahun 2024	Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan
Tingkat Kemiskinan	7 - 8 %	8,67	92%

Sumber : Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencanan Kerja Pemerintah Tahun 2025
BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Perbandingan tingkat kemiskinan daerah dengan capaian sebelumnya Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 secara rinci tersaji pada tabel 2.39.

Tabel 2.39
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Temanggung		Jawa Tengah	Nasional
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi
2020	8,85	9,96	11,41	10,19
2021	10,36	10,17	11,79	9,71
2022	10	9,33	10,93	9,57
2023	9,8	9,26	10,77	9,36
2024	9,25	8,67	10,47	9,03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan nasional, capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 lebih baik dibandingkan provinsi juga capaian nasional. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cukup berhasil menurunkan kemiskinan.

Sedangkan perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.40.

Tabel 2.40
Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	Persentase Penduduk Miskin					Perubahan Penduduk Miskin				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Magelang	11,27	11,91	11,09	10,96	10,83	0.6	0.64	-0.82	-0,13	-0,13
Kota Magelang	7,58	7,75	7,1	6,11	5,94	0.12	0.17	-0.65	-0,99	-0,17
Kabupaten Temanggung	**9,96**	**10,17**	**9,33**	**9,26**	**8,67**	**0.54**	**0.21**	**-0.84**	**-0,77**	**-0,59**

Kabupaten / Kota	Persentase Penduduk Miskin					Perubahan Penduduk Miskin				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	9,6	9,94	9,17	8,78	8,48	0,2	0,21	-0,27	0,4	-0,30
JAWA TENGAH	11,41	11,79	10,93	10,77	10,47	0.61	0.38	-0.86	-0,16	-0,30
NASIONAL	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03	0.97	-0.48	-0.14	-0,21	-0,33

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah.

Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 pada wilayah pengembangan Gelangmanggung menempati posisi kedua setelah Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada wilayah pengembangan Gelangmanggung lebih baik dari kabupaten yang lain. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah posisi relatif Kabupaten Temanggung menempati urutan ke-12 dibandingkan kabupaten/kota lain dapat tersaji pada gambar 2.26.

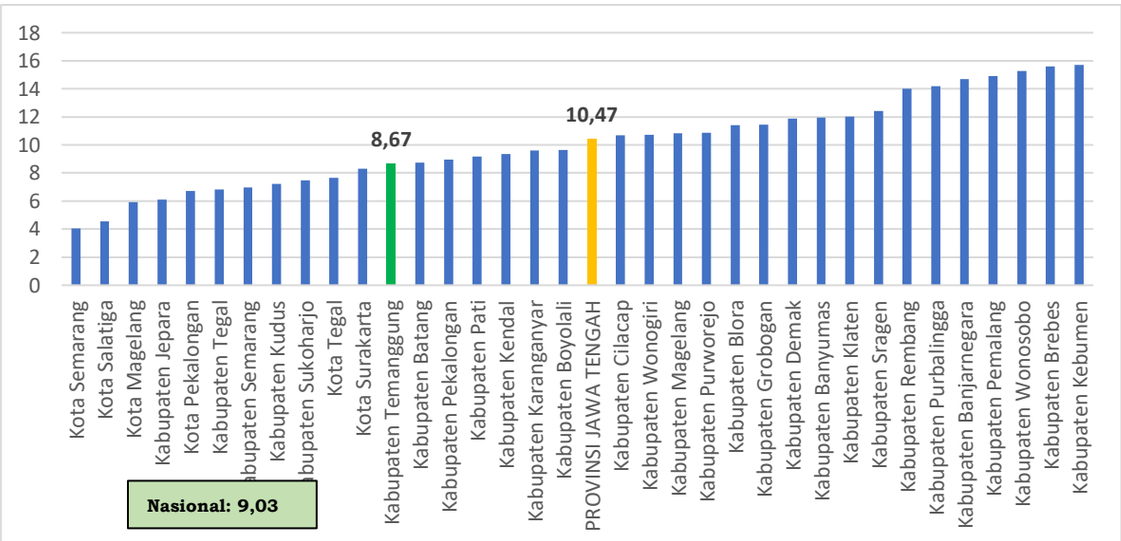

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 2.26
Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambaran kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada kondisi terkini serta perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional dapat disajikan pada tabel 2.41.

Tabel 2.41
Perbandingan Perubahan Pencapaian Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Capaian Nasional

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Jawa Tengah		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2020	9,96	0,54	9,60	0,42	11,41	0,61	10,19	0,97
2021	10,17	0,21	9,94	0,43	11,79	0,38	9,71	-0,48
2022	9,33	-0,84	9,17	-0,77	10,93	-0,86	9,57	-0,14
2023	9,26	-0,07	8,78	-0,40	10,77	-0,16	9,36	-0,21
2024	8,67	-0,59	8,48	-0,30	10,47	-0,30	9,03	-0,33

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah.

Seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional juga berimbas pada progres perbaikan kemiskinan ditunjukkan dengan data pada Tahun 2024, kemiskinan Kabupaten Temanggung maupun rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah serta nasional mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Pembahasan tentang kemiskinan tidak terlepas dari pembahasan mengenai penduduk miskin. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Adapun jumlah penduduk miskin dan pertumbuhannya di Kabupaten Temanggung, wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel 2.42.

Tabel 2.42
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin, Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin dengan Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Magelang	146,34	154,91	145,33	144,49	143,8	6,51	5,86	-6,18	-0,58	-0,48
Kota Magelang	9,27	9,44	8,65	7,45	7,25	1,87	1,83	-8,37	-13,87	-2,68
Kabupaten Temanggung	**77,33**	**79,09**	**73,04**	**72,96**	**68,77**	**6,52**	**2,28**	**-7,65**	**-0,11**	**-5,74**
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	**77,65**	**81,15**	**75,67**	**74,97**	**73,27**	**4,97**	**3,32**	**-7,40**	**-4,85**	**-2,97**
JAWA TENGAH	**3.980,90**	**4.109,75**	**3.831,44**	**3.791,50**	**3704,33**	**6,35**	**3,24**	**-6.77**	**-3,32**	**2,35**
NASIONAL	**27.549,69**	**26.503,65**	**26.363,27**	**25.900,00**	**25219,2**	**11,15**	**-3,80**	**-0,53**	**-4,34**	**-4,60**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah.

Perbandingan perubahan jumlah penduduk miskin daerah dengan rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung sebelum pandemi Covid-19 Kabupaten Temanggung menempati urutan kedua setelah Kota Magelang. Dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dan mengalami peningkatan cukup tinggi pada Tahun 2020-2023. Pada Tahun 2024, penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang lebih dari rata-rata wilayah pengembangan Gelangmanggung, provinsi maupun nasional

Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel 2.43.

Tabel 2.43
Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Jawa Tengah		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2020	77,33	6,52	77,65	6,32	3.980,90	6,35	27.549,69	11,15
2021	79,09	2,28	81,15	4,51	4.109,75	3,24	26.503,65	-3,80
2022	73,04	-7,65	75,67	-6,74	3.831,44	-6,77	26.363,27	-0,53
2023	72,96	-0,11	74,97	-0,93	3.704,33	-1,04	25.900,00	-1,76
2024	68,77	-5,74	73,27	-2,26	3.791,50	-2,30	25.219,20	-2,63

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19 puncaknya di Tahun 2021 yang menyebabkan gangguan pada aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kabupaten Temanggung. Tahun 2024 Kabupaten Temanggung memiliki capaian yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan capaian rata-rata di Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, di mana pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mempengaruhi pada peningkatan kesejahteraan dan berkurangnya kemiskinan. Perbandingan rasio perubahan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian nasional Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.44.

Tabel 2.44
Perbandingan Rasio Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung				Nasional			
	Tingkat Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi		Tingkat Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2020	9,96	0,54	-2,13	-7,18	10,19	0,97	-2,07	-7,09
2021	10,17	0,21	3,34	5,47	9,71	-0,48	3,7	5,77
2022	9,33	-0,84	5,2	1,86	9,57	-0,14	5,31	1,61
2023	9,26	-0,07	5	-0,2	9,36	-0,21	5,04	-0,27
2024	8,67	-0,59	5,04	0,04	9,03	-0,33	5,03	-0,01

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung dan BPS RI Tahun 2025, Data Diolah.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 turun mengindikasikan capaian positif dengan penurunan

sebesar -0,6, kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang baik pada menurunnya angka kemiskinan. Pada tingkat nasional, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga berkorelasi positif terhadap penurunan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian penurunan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung menunjukkan hasil yang lebih baik dari capaian nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan keberhasilan kebijakan dalam percepatan pemulihan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa persentase dan jumlah penduduk miskin, akan tetapi juga memperhatikan tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Semakin kecil P1 maupun P2 semakin baik karena menunjukkan semakin kecilnya kedalaman dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin baik terhadap Garis Kemiskinan maupun di antara penduduk miskin itu sendiri.

B. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat perubahan indeks kedalaman kemiskinan dan perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 jika dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel 2.45.

Tabel 2.45
Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan perbandingan perubahan indeks kedalaman kemiskinan dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	1,12	0,85	0,47	0,74	0,92	0,13	-0,27	-0,38	0,27	0,18

Kabupaten/ Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Magelang	1,23	1,63	1,66	1,73	1,23	0,25	0,4	0,03	0,07	-0,5
Kabupaten Temanggung	**0,86**	**1,57**	**1,06**	**0,99**	**0,97**	**0,35**	**0,71**	**-0,51**	**-0,07**	**-0,02**
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	1,07	1,35	1,06	1,15	1,04	0,24	0,28	-0,29	0,09	-0,11
JAWA TENGAH	1,72	1,91	1,77	1,75	1,64	0,19	0,19	-0,14	-0,02	-0,11
NASIONAL	1,75	1,67	1,56	1,53	1,36	0,25	-0,08	-0,11	-0,03	-0,17

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah.

Perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan daerah dengan capaian nasional menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nasional maupun provinsi. Pada Tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 berfluktuasi dan meningkat cukup tajam pada Tahun 2021, kondisi tersebut terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan kemiskinan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Temanggung. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 berada di bawah angka rata-rata wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini berarti rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas garis kemiskinan di Kabupaten Temanggung lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

C. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, indikator yang juga perlu dilihat adalah Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.46.

Tabel 2.46
Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)					Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	0,23	0,15	0,06	0,12	0,19	0,04	-0,08	-0,09	0,06	0,07
Kabupaten Magelang	0,20	0,35	0,41	0,41	0,23	0,03	0,15	0,06	0	-0,18
Kabupaten Temanggung	0,11	0,39	0,19	0,17	0,18	0,06	0,28	-0.2	-0,02	0,01
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	**0,18**	**0,30**	**0,22**	**0,23**	**0,2**	**0,04**	**0,12**	**-0,01**	**0,01**	**-0,03**
JAWA TENGAH	**0,34**	**0,45**	**0,42**	**0,42**	**0,37**	**0,04**	**0,11**	**-0,03**	**0,00**	**-0,05**
NASIONAL	**0,47**	**0,42**	**0,38**	**0,38**	**0,35**	**0,11**	**-0,05**	**-0,04**	**0,00**	**-0,03**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan pada Tahun 2024 sebesar 0,18, meningkat dari yang sebelumnya sebesar 0,17 pada Tahun 2023. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan meningkat cukup tajam pada Tahun 2021 sama seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan di mana pandemi Covid-19 ikut memperparah kondisi kemiskinan yang terjadi di daerah. Kondisi kemiskinan terus menunjukkan perbaikan pada pasca pandemi ditunjukkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang menurun seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian dan kesehatan. Jika dilihat lebih rinci, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 selalu berada di bawah angka rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini berarti penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Temanggung dapat dikatakan masih lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan

tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.47.

Tabel 2.47
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No.	Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	**69,57**	**69,88**	**70,77**	**71,33**	**71,87**
A	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,58	75,64	75,7	75,77	75,94
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,14	12,08	12,55	12,61	12,62
	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,24	6,94	7,41	7,50	7,53
C	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9.343	9.142	9.773	10.108	10.519

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Status pencapaian IPM dikategorikan dalam empat kategori, yaitu: (a) Sangat Tinggi (IPM ≥80); (b) Tinggi, (IPM 70-80); (c) Sedang, (IPM 60-70); dan (d) Rendah, (IPM <60).

Dalam dimensi IPM Kabupaten Temanggung paling rendah berada pada sektor pendidikan, dimana RLS penduduk usia 25 tahun ke atas Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat sebesar 7,53 tahun. Artinya bahwa penduduk Kabupaten Temanggung baru menempuh pendidikan sampai kelas 1 SMP/sederajat atau putus sekolah di kelas 2 SMP/sederajat. Indikator pendidikan lainnya adalah HLS yang mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun keatas). Pada Tahun 2024, HLS Kabupaten Temanggung sebesar 12,62 tahun artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang sekolah sampai 12,62 tahun atau setara dengan Tingkat I di Perguruan Tinggi jika kondisinya minimal sama seperti sekarang.

Kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada daya saing sumber daya manusia itu sendiri dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Menurut hasil Susenas, mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Temanggung hanya mengenyam pendidikan tinggi hingga tamat SD sederajat (BPS, 2024).

Disisi lain, kesehatan juga merupakan investasi berharga dalam pembangunan. Masyarakat yang sehat akan berdampak pada

meningkatnya produktivitas dan pada akhirnya mendukung membaiknya proses pembangunan ekonomi yang semakin baik. Dimensi kesehatan ini dapat ditunjukkan dengan UHH Kabupaten Temanggung yang semakin membaik, tercatat pada tahun 2024 UHH Kabupaten Temanggung sebesar 75,94 tahun. Pencapaian UHH yang terus membaik dari tahun ke tahun didukung dengan keberhasilan upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung.

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dapat menjadi indikator yang mewakili dimensi standar hidup layak yang dapat mencerminkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung. Capaian pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, tercatat pada Tahun 2024 sebesar Rp 10.519.000. Hal ini didukung oleh beberapa statistik lainnya diantaranya menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka serta stabilnya perekonomian di Kabupaten Temanggung.

Perbandingan target dan realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 2.48.

Tabel 2.48
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UHH, RLS, HLS, Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Target RKPD

No	Variabel	Temanggung			Jawa Tengah	Nasional
		Target	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Realisasi
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	71,77	71,87	100%	73,87	75,02
A	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,71	75,94	100%	74,91	74,15
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,6	12,62	100%	12,86	13,21
C	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,8	7,53	96,54%	8,02	8,85
D	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9.715	10.519	100%	12.276	12.341

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI dan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Capaian IPM Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan capaian nasional juga masih berada di bawah capaian nasional. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah dengan

capaian tahun sebelumnya disajikan pada tabel 2.49.

Tabel 2.49
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Kabupaten/ Kota	IPM					Pertumbuhan IPM (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Temanggung	69,57	69,88	70,77	71,33	71,87	0,01	0,45	1,27	0,79	0,76

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025, Data Diolah.

Apabila melihat nilai capaian IPM Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan capaian IPM atau IPM daerah lebih baik dengan capaian tahun sebelumnya.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan capaian nasional secara rinci disajikan pada tabel 2.50.

Tabel 2.50
Perbandingan Pertumbuhan IPM Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	IPM					Pertumbuhan IPM (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	78,99	79,43	80,39	81,17	82,15	0,24	0,56	1,21	0,97	1,21
Kabupaten Magelang	69,98	70,12	70,85	71,45	72,1	0,16	0,36	1,04	0,85	0,91
Kabupaten Temanggung	**69,57**	**69,88**	**70,77**	**71,33**	**71,87**	**0,01**	**0,45**	**1,27**	**0,79**	**0,76**
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	72,84	73,14	74,00	74,65	75,37	0,14	0,46	1,17	0,87	0,96
JAWA TENGAH	71,87	72,16	72,79	73,39	73,87	0,20	0,40	0,87	0,82	0,65
NASIONAL	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02	0,03	0,49	0,86	2,03	0,85

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah lebih baik dengan capaian tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung selama Tahun 2020-2024 cukup fluktuatif. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan IPM pada wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung tergolong moderat. Pertumbuhan capaian IPM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 menunjukkan progres yang semakin membaik dalam kurun waktu lima tahun terakhir, progres tersebut juga menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Meski menunjukkan progres yang positif, capaian IPM Kabupaten Temanggung, capaian IPM masih berada di bawah capaian rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah maupun nasional, sehingga Kabupaten Temanggung masih memerlukan langkah-langkah

strategis untuk meningkatkan capaian IPM melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi untuk mewujudkan pembangunan manusia yang semakin berkualitas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan standar untuk mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu daerah dari sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sektor kesehatan direpresentasikan dengan indikator usia harapan hidup saat lahir, sektor pendidikan direpresentasikan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta sektor ekonomi direpresentasikan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

Komponen dalam Indek Pembangunan Manusia (IPM) yaitu :

A. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. AHH merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses hingga kualitas kesehatan. Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dibandingkan dengan target RKPD disajikan pada tabel 2.51.

Tabel 2.51
Perbandingan AHH dengan Target RKPD
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	AHH (Angka Harapan Hidup)		
	Target	Realisasi	Kinerja
2020	75,47	75,58	100%
2021	75,49	75,64	100%
2022	75,51	75,70	100%
2023	75,53	75,77	100%
2024	75,71	75,94	100%

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

AHH di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 telah mencapai 75,94 dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan, lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada indikator Capaian dan pertumbuhan AHH Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan kabupaten/kota wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional secara terinci disajikan pada tabel 2.52.

Tabel 2.52
Perbandingan Pertumbuhan AHH Daerah dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)					Pertumbuhan AHH				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	76,85	76,93	77,02	77,22	77,54	0,10	0,08	0,09	0,20	0,32
Kabupaten Magelang	73,97	74,13	74,28	74,44	74,68	0,41	0,16	0,15	0,16	0,24
Kabupaten Temanggung	**75,58**	**75,64**	**75,7**	**75,77**	**75,94**	**0,10**	**0,06**	**0,06**	**0,07**	**0,17**
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	75,47	75,57	75,67	75,81	76,05	0,21	0,10	0,10	0,14	0,24
JAWA TENGAH	74,37	74,47	74,57	74,69	74,91	0,14	0,10	0,10	0,12	0,22
NASIONAL	71,47	71,57	71,85	72,13	73,93	0,13	0,10	0,28	0,28	1,80

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Tren AHH Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020-2024 menunjukkan capaian yang bagus karena terus meningkat. Peningkatan capaian tersebut mengindikasikan perbaikan pembangunan pada bidang kesehatan. Jika dilihat perbandingan capaian Kabupaten Temanggung dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah serta nasional, indikator Usia Harapan Hidup Saat Lahir memiliki capaian yang lebih baik. Namun jika dilihat berdasarkan pertumbuhannya, Kabupaten Temanggung memiliki progres yang tidak cukup baik meskipun mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya.

B. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perbandingan HLS Kabupaten Temanggung dengan target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.53.

Tabel 2.53
Perbandingan HLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)		
	Target	Realisasi	Kinerja
2020	12,28	12,14	98,89%
2021	12,35	12,32	99,76%
2022	12,42	12,55	100%

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)		
	Target	Realisasi	Kinerja
2023	12,49	12,61	100%
2024	12,60	12,62	100%

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mencapai 12,62 yang artinya tingkat anak-anak Temanggung yang pada Tahun 2024 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 12,62 tahun (Diploma I) lebih baik dari capaian Tahun 2023 (12,61). Capaian HLS Temanggung pada Tahun 2024 lebih rendah dari capaian Jawa Tengah (12,86) dan Nasional (13,21).

Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional secara rinci disajikan pada tabel 2.54.

Tabel 2.54
Perbandingan Pertumbuhan HLS Daerah dengan Capaian Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	HLS (Tahun)					Pertumbuhan HLS				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	14,14	14,15	14,31	14,40	14,62	0,33	0,01	0,16	0,09	0,22
Kabupaten Magelang	12,54	12,55	12,58	12,61	12,62	0,01	0,01	0,03	0,03	0,01
Kabupaten Temanggung	**12,14**	**12,32**	**12,55**	**12,61**	**12,62**	**0,01**	**0,18**	**0,23**	**0,06**	**0,01**
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	12,94	13,01	13,15	13,21	13,29	0,12	0,07	0,14	0,06	0,08
JAWA TENGAH	12,7	12,77	12,81	12,85	12,86	0,02	0,07	0,04	0,04	0,01
NASIONAL	12,98	13,08	13,1	13,15	13,21	0,03	0,10	0,02	0,05	0,06

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Capaian HLS Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir terus menunjukkan adanya peningkatan. HLS Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sebesar 12,62, hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun yang masing jenjang pendidikan pada Tahun 2024 diharapkan dapat bersekolah hingga 12,62 tahun atau setara Diploma I. Dilihat berdasarkan pertumbuhannya, progres HLS Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang positif terutama setelah pandemi Covid-19. jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah serta nasional, capaian HLS Kabupaten Temanggung juga masih berada di bawah capaian tersebut, oleh karena itu pembangunan di sektor pendidikan masih perlu untuk terus ditingkatkan.

C. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalami pendidikan formal.

Perbandingan RLS Kabupaten Temanggung dengan target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.55.

Tabel 2.55
Perbandingan RLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)		
	Target	Realisasi	Kinerja
2020	7,35	7,24	98,50%
2021	7,50	7,25	96,67%
2022	7,65	7,41	96,86%
2023	7,80	7,50	96,15%
2024	7,85	7,53	96,54%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2024 mencapai 7,53 naik 0,03 poin dibandingkan capaian Tahun 2023. Ini artinya rata-rata penduduk Temanggung mencapai Pendidikan Dasar sampai kelas 7 (kelas 1 SMP), belum sampai kelas 8. Capaian RLS Temanggung di bawah capaian Jawa Tengah (8,02) dan capaian Nasional (8,85). Dan ini diasumsikan menjadi salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Tahun 2020-2024.

Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional disajikan pada tabel 2.56.

Tabel 2.56
Perbandingan Pertumbuhan RLS Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	RLS (Tahun)					Pertumbuhan RLS				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	10,39	10,62	10,94	11,20	11,43	0,06	0,23	0,32	0,26	0,23
Kabupaten Magelang	7,78	7,79	7,81	7,82	7,83	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Kabupaten Temanggung	**7,24**	**7,25**	**7,41**	**7,50**	**7,53**	**0,09**	**0,01**	**0,16**	**0,09**	**0,03**
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	8,47	8,55	8,72	8,84	8,93	0,05	0,08	0,17	0,12	0,09
JAWA TENGAH	7,69	7,75	7,93	8,01	8,02	0,16	0,06	0,18	0,08	0,01
NASIONAL	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85	0,14	0,06	0,15	0,08	0,08

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Capaian RLS Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik. RLS Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sebesar 7,53, hal ini dapat diartikan bahwa rata-

rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Temanggung telah menempuh pendidikan selama 7,53 tahun atau setara dengan telah mengenyam pendidikan sampai kelas VII (putus sekolah di kelas VIII). Pencapaian tersebut masih harus ditingkatkan karena jika dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional di mana capaian Kabupaten Temanggung termasuk rendah.

Faktor penghambat Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Temanggung di antaranya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kultur sosial budaya masyarakat. Upaya tindak lanjut nya adalah penanganan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dengan menambah dan meningkatkan sarana pelayanan pendidikan dan tenaga pendidik yang berkompetensi untuk meningkatkan capaian RLS sekaligus HLS.

D. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.

Perbandingan pengeluaran per kapita dengan target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.57.

Tabel 2.57
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Pengeluaran Per Kapita		
	Target	Realisasi	Kinerja
2020	9.343.000	9.343.000	100%
2021	9.408.000	9.408.000	100%
2022	9.773.000	9.773.000	100%
2023	10.108.000	10.108.000	100%
2024	10.118.500	10.519.000	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 10.519.000,00,

lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp.12.276.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Nasional adalah sebesar Rp. 12.341.000,00.

Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Pengeluaran per kapita dapat menggambarkan tingkat kemampanan seseorang. Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional disajikan pada tabel 2.58.

Tabel 2.58
Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rp)					Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	12.210	12.349	12.816	13.175	13.619	-2,43	1,14	3,78	2,8	3,37
Kabupaten Magelang	9.301	9.440	10.011	10.493	10.926	-0,92	1,49	6,05	4,81	4,13
Kabupaten Temanggung	**9.343**	**9.408**	**9.773**	**10.108**	**10.519**	**-1,54**	**0,7**	**3,88**	**3,43**	**4,07**
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	10.285	10.399	10.867	11.259	11.688	-1,63	1,11	4,57	3,68	3,81
JAWA TENGAH	10.930	11.034	11.377	11.835	12.276	-1,55	0,95	3,11	4,03	3,73
NASIONAL	11.013	11.156	11.479	11.890	12.341	-2,53	1,3	2,9	3,58	3,79

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sempat mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pada Tahun 2024 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Temanggung telah mencapai 10.159 Ribu Rupiah per tahun. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, capaian Kabupaten Temanggung masih berada di bawah bahkan paling rendah di antara kabupaten/kota yang ada pada wilayah pengembangan Gelangmanggung. Selain itu jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, capaian Kabupaten Temanggung juga masih berada di bawahnya.

2.1.2.7 Ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus

diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, oleh sebab itu Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan tersebut. Ketimpangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui indikator Rasio Gini dan/atau Distribusi Pengeluaran Menurut Bank Dunia.

A. Rasio Gini

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, oleh sebab itu Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan tersebut. Ketimpangan di

Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui indikator indeks gini atau rasio gini.

Indeks gini atau Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1, dimana semakin tinggi nilai Rasio Gini menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Perubahan Rasio Gini juga merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk.

Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Temanggung dengan Target RKPD Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.59

Tabel 2.59
Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Kinerja
2020	NA	0,382	100%
2021	0,382	0,374	100%
2022	0,374	0,370	100%
2023	0,363	0,359	100%
2024	0,357	0,380	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Perkembangan nilai Rasio Gini Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.60.

Tabel 2.60
Perbandingan Rasio Gini pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dengan Capaian Jawa Tengah dan Nasional Tahun Sebelumnya

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	0,405	0,452	0,427	0,419	0,46
Kabupaten Magelang	0,370	0,384	0,363	0,358	0,33
Kabupaten Temanggung	**0,382**	**0,374**	**0,370**	**0,359**	0,38
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	0,386	0,403	0,387	0,379	0,39
JAWA TENGAH	0,362	0,372	0,374	0,369	0,37
NASIONAL	0,385	0,381	0,381	0,388	0,38

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Perkembangan indeks gini Kabupaten Temanggung Tahun 2020 hingga Tahun 2023 menunjukkan penurunan. Nilai indeks gini yang terus menurun mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan dalam periode tersebut, namun mengalami peningkatan di Tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kecenderungan ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Meskipun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata wilayah Gelangmanggung, kenaikan ini menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat menikmati hasil pembangunan secara merata. Faktor-faktor seperti akses yang tidak merata terhadap pendidikan,

pekerjaan, dan peluang ekonomi lainnya dapat menjadi penyebab utama meningkatnya ketimpangan ini.

Indeks gini Kabupaten Temanggung Tahun 2024 lebih tinggi daripada Jawa Tengah hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten temanggung berada di atas rata-rata ketimpangan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan sama dengan nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya inklusif, sehingga sebagian besar manfaat dari pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Indeks gini Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 0,383 yang berada pada kategori sedang/moderat.

Perbandingan nilai Rasio Gini dan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Temanggung dan nasional sebagaimana disajikan pada tabel 2.61.

Tabel 2.61
Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung				Nasional			
	Gini Ratio	Perubahan	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan	Gini Ratio	Perubahan	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan
2020	0,382	n.a	-2,13	-7,18	0,385	n.a	-2,07	-7,09
2021	0,374	-0,008	3,34	5,47	0,381	-0,004	3,70	5,77
2022	0,370	-0,004	5,20	1,86	0,381	0,00	5,31	1,61
2023	0,359	-0,013	5,00	-0,20	0,388	0,007	5,04	-0,27
2024	0,383	0,024	5,04	0,03	0,381	-0,007	5,03	-0,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Ketimpangan pendapatan memiliki kaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang digambarkan menggunakan Rasio Gini, dapat diukur dengan pendapatan per kapita atau pengeluaran per kapita yang mana kedua hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian penduduk di suatu wilayah. Dilihat dari tabel di atas, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung berkorelasi positif terhadap penurunan ketimpangan (Rasio Gini). Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.62.

Tabel 2.62
Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2020	0,382	n.a	0,386	n.a	0,385	n.a
2021	0,374	-0,008	0,403	-0,008	0,381	-0,004
2022	0,370	-0,004	0,387	-0,004	0,381	0,000
2023	0,359	-0,011	0,379	-0,011	0,388	0,007
2024	0,383	0,024	0,393	0,014	0,381	-0,007

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024, Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Rasio Gini Kabupaten Temanggung mencatatkan nilai sebesar 0,383. Setelah tahun 2020 atau pasca pandemi Covid-19, nilai Rasio Gini mengalami penurunan seiring dengan kondisi perekonomian yang berangsur pulih sehingga pemerataan pendapatan juga dapat meningkat. Jika dibandingkan dengan rata-rata Purwomanggung dan nasional, Rasio Gini Kabupaten Temanggung memiliki nilai yang lebih kecil meskipun berada pada kategori yang sama yaitu kategori ketimpangan sedang

B. Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria Bank Dunia

Selain Rasio Gini, ukuran lain yang sering digunakan sebagai alternatif untuk menghitung kesenjangan penduduk adalah "distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia" yaitu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

1. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 20% terendah kurang dari 12%
2. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah antara 12-17%
3. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah lebih dari 17%

Berikut gambaran distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 berdasar kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional dari Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.63.

Tabel 2.63
Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Perubahan
2020	n.a	17,54	-0,85
2021	18,30	18,78	1,24

Tahun	Target	Realisasi	Perubahan
2022	18,50	18,46	-0,32
2023	18,70	19,52	1,06
2024	18,80	17,83	-1,69

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), ketimpangan pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung termasuk kategori rendah (low inequality). Pada Tahun 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 19,52%, kondisi tersebut turun 1,69% jika dibandingkan kondisi Tahun 2024 sebesar 17,83%. Perkembangan distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung menurut kriteria Bank Dunia dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 berfluktuasi dan menurun cukup tajam pada Tahun 2020, kondisi tersebut terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang kemudian juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan. Jika dibandingkan dengan target sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, kondisi Tahun 2024 tidak mencapai target.

Perbandingan Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung, wilayah Pengembangan Gelangmanggung Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.64.

Tabel 2.64
Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia					Perubahan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	16,26	14,9	16,24	16,07	15,26	1,09	-1,36	1,34	-0,17	-0,81
Kabupaten Magelang	18,57	18,01	18,82	19,03	20,21	0,86	-0,56	0,81	0,21	1,18
Kabupaten Temanggung	17,54	18,78	18,46	19,52	17,83	-0,85	1,24	-0,32	1,06	-1,69
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	**17,46**	**17,23**	**17,84**	**18,21**	**17,77**	**0,37**	**-0,23**	**0,61**	**0,37**	**-0,44**
JAWA TENGAH	**18,53**	**18,34**	**18,51**	**18,74**	**18,90**	**-0,18**	**-0,19**	**0,17**	**0,23**	**0,16**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, data diolah

Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024

capaiannya 17,83% jika dibandingkan Tahun 2023 capaiannya 19,52% mengalami perubahan sebadar -1,69 . Jika dibandingkan dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung angka Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 berada di atas sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah masih di bawahnya meskipun kondisi di Kabupaten Temanggung menunjukkan ketimpangan yang rendah atau pemerataannya tinggi.

Perbandingan kondisi Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung kondisi terkini disajikan pada tabel 2.65.

Tabel 2.65
Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		JAWA TENGAH		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2020	17,54	-0,85	17,46	0,37	18,53	-0,81	17,93	0,22
2021	18,78	1,24	17,23	-0,23	18,34	-0,19	18,06	0,13
2022	18,46	-0,32	17,84	0,61	18,51	0,17	18,24	0,18
2023	19,52	1,06	18,21	0,37	18,74	0,23	18,04	-0,2
2024	17,83	-1,69	17,77	-0,44	18,9	0,16	18,41	0,37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, data diolah

Kondisi ketimpangan di Kabupaten temanggung dilihat berdasarkan distribusi pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia pada masa Covid-19 yaitu Tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Gangguan kesehatan serta perekonomian yang terkontraksi membawa pengaruh yang signifikan tidak hanya pada peningkatan kemiskinan tetapi juga berdampak pada ketimpangan yang meningkat. Namun, setelah Tahun 2020, kondisi ketimpangan menunjukkan perbaikan pada Tahun 2021 dengan peningkatan pemerataan yang lebih baik. Jika dibandingkan dengan capaian Nasional, Kabupaten Temanggung masih dibawah Nasional disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah perubahan kebijakan dalam efisiensi anggaran.

Kebijakan percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi terbukti memberikan dampak yang positif terhadap penurunan ketimpangan dan peningkatan pemerataan yang lebih baik.

2.1.2.8 Aspek Seni Budaya dan Olahraga

Indeks Pembangunan Kebudayaan yang ada di Indonesia perlu dilakukan untuk meningkatkan kemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dasar perundangan terkait Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah dengan adanya UU No 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pada UU No 05 Tahun 2017 mendefinisikan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan ini mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO yang menyoroti terkait kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. Namun, implementasi pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan yang ada di Indonesia disesuaikan sesuai dengan konteks kebudayaan Indonesia dan tujuan pemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.

Gambaran capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Temanggung sebagaimana disajikan pada tabel 2.66.

Tabel 2.66
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	n.a.	3,31	3,67	3,67	4,02

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Capaian IPK pada Tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan Tahun 2023 hal ini disebabkan adanya peningkatan pada nilai sub variabel pendidikan, ketahanan soaial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya dan kesetaraan gender.

Sedangkan untuk mengukur kemajuan pembangunan digunakan indek pembangunan olahraga (*Sport Development Index*).

Indek pembangunan olahraga adalah istilah baru dalam olahraga Indonesia. Ini semacam metode pengukuran yang diklaim sebagai alternatif baru untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga yang meliputi sembilan dimensi (variabel) yaitu ruang terbuka olahraga, sumber daya manusia olahraga, partisipasi masyarakat, kebugaran, performa, kesehatan, literasi fisik, perkembangan performa, dan ekonomi. Pembangunan olahraga di suatu daerah tentunya memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga secara umum di Indonesia. Gambaran capaian kinerja keolahragaan di Kabupaten Temanggung sebagaimana disajikan pada tabel 2.67.

Tabel 2.67
Indeks Pembangunan Olahraga

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	n.a	3,31	2,97	2,97	3,61

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Capaian IPO Kabupaten Temanggung Tahun 2024 lebih baik jika dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga yang merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit. Peran olahraga mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik yang baik. Selain bermanfaat untuk jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat. Program yang telah dilaksanakan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk berolahraga salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan Senam PORPI (Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia) Kabupaten Temanggung yang mengambil tempat di Pasar Curug Titang.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang mendukung

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, mengakhiri kemiskinan, dan memastikan semua laki-laki dan perempuan, terutama masyarakat miskin dan rentan, memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap indikator-indikator pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan secara adil, merata, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 25 Tahun

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah, khususnya kelompok usia 25 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk dalam kelompok usia tersebut, sehingga dapat digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia dari sisi capaian pendidikan di masa lalu. Adapun Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia diataas 25 tahun di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.27 berikut ini.

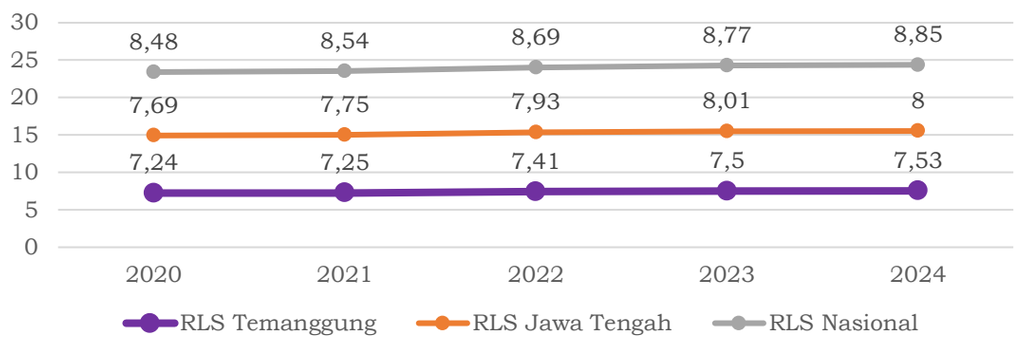

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.27
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia diatas 25 Tahun Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024

Berdasarkan data BPS Kabupaten Temanggung, Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 25 Tahun menunjukkan tren peningkatan dari 7,24 tahun pada 2020 menjadi 7,53 tahun pada 2024. Ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan pada masa lalu, walau secara umum masih berada di bawah standar 9 tahun wajib belajar. Capaian RLS Penduduk Usia di atas 25 tahun Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 7,53 atau rata-rata penduduk Usia di atas 25 tahun Kabupaten

Temanggung mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 1 SMP atau 7,53 tahun. Angka ini berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2024 RLS Nasional menggambarkan rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan hampir kelas 3 SMP atau 8,85 tahun dan di Provinsi Jawa Tengah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 2 SMP atau 8,02 tahun. Rendahnya RLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan kultur/budaya masyarakat, sehingga masih terdapat anak yang putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak sekolah dan masih terdapat lulusan peserta didik tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan di Kabupaten Temanggung, guna mendorong peningkatan RLS.

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan. Adapun Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.27 berikut ini.

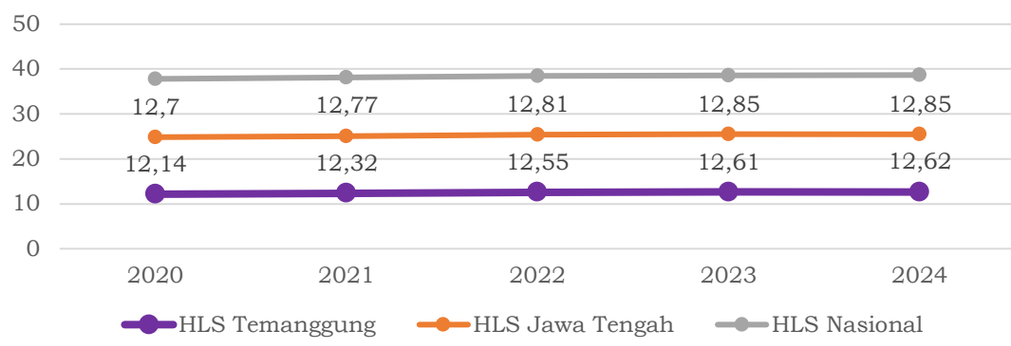

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.28
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024

Berdasarkan data BPS, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 12,14 tahun pada 2020 menjadi 12,62 tahun pada 2024, yang mencerminkan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kelanjutan pendidikan anak-anak

hingga jenjang menengah atas atau bahkan pendidikan tinggi. HLS Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat 12,62 tahun, artinya anak-anak di Kabupaten Temanggung yang berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2024, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,62 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, HLS Kabupaten Temanggung masih berada dibawah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12,86 tahun dan Nasional 13,21 tahun. Meskipun secara capaian absolut HLS Kabupaten Temanggung dibawah provinsi maupun nasional, namun mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,04%. Rendahnya HLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan belum meratanya kualitas pelayanan satuan pendidikan, belum tercukupinya kebutuhan pendidik dan kompetensi Pendidik, masih rendahnya kompetensi peserta didik, serta masih adanya kasus anak yang putus sekolah, lulus tidak melanjutkan maupun sama sekali tidak sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di semua jenjang, serta penguatan dukungan terhadap keberlanjutan sekolah anak-anak, agar harapan lama sekolah di Kabupaten Temanggung dapat terus meningkat.

3) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi bertujuan untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi meliputi: DI s.d. DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3. Tingginya capaian proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Adapun proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Temanggung disajikan pada gambar 2.29 berikut ini.

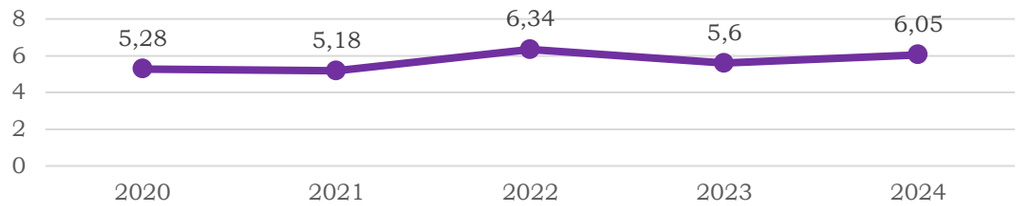

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.29
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024

Apabila dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagai disajikan pada gambar 2.30 berikut ini.

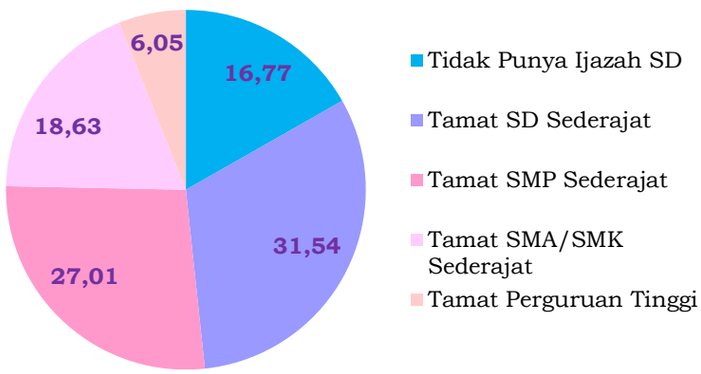

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.30
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

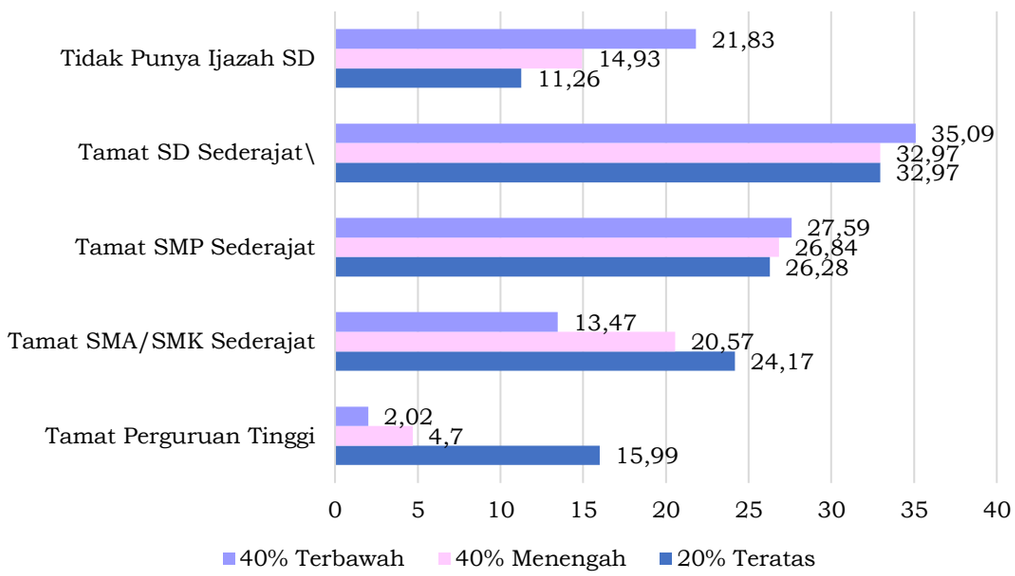

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.31
Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 2.31, dapat diketahui di Kabupaten Temanggung pendidikan tertinggi penduduknya yang berusia 15 tahun ke atas masih di dominasi oleh pendidikan dasar. Sementara itu, tingkat pendidikan apabila dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, proporsi kelompok 20 persen pengeluaran teratas memiliki proporsi tamat perguruan tinggi lebih besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran 40 persen menengah maupun 40 persen terbawah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan belum merata. Kondisi demikian menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih merata untuk semua kalangan masyarakat.

4) Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Literasi Membaca SD/Sederajat

Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap" sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan. Sesuai dengan kewenangan, jenis pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung yaitu SD SMP Umum, SD SMP Keagamaan dan SD SMP Kesetaraan. Adapun persentase pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SD/sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.68.

Tabel 2.68
Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Literasi Membaca SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Umum (%)	NA	NA	68,10	76,96	83,98
2	SD Keagamaan (%)	NA	NA	52,96	65,88	66,04
3	SD Kesetaraan (%)	NA	NA	58,33	50,00	80,00
	Rata-Rata (%)	NA	NA	**59,80**	**64,28**	**76,67**

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung, persentase siswa SD/sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan. Hal ini

menunjukkan sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

5) Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Literasi Membaca SMP/Sederajat

Persentase siswa SMP/sederajat yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) dalam literasi membaca merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan memahami dan menginterpretasi teks secara kritis. Capaian ini mencerminkan kualitas pembelajaran literasi di jenjang menengah pertama serta efektivitas program peningkatan mutu pendidikan yang diterapkan di Kabupaten Temanggung. Adapun persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.69.

Tabel 2.69
Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Literasi Membaca SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP Umum (%)	NA	NA	76,23	80,66	87,65
2	SMP Keagamaan (%)	NA	NA	68,15	77,34	80,40
3	SMP Kesetaraan (%)	NA	NA	61,22	59,44	60,71
	Rata-Rata (%)	NA	NA	**68,53**	**72,48**	**76,25**

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung, persentase siswa SMP/sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi selama kurun waktu tiga tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

6) Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Numerasi SD/Sederajat

Persentase siswa SD/sederajat yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) dalam numerasi merupakan indikator penting untuk mengukur kemampuan dasar berhitung dan berpikir logis siswa pada jenjang pendidikan dasar. Indikator ini mencerminkan sejauh mana peserta didik mampu memahami konsep matematika dasar yang menjadi fondasi bagi pembelajaran di tingkat selanjutnya. Adapun

persentase pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SD/Sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.70

Tabel 2.70
Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Numerasi SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Umum (%)	NA	NA	36,65	59,3	73,56
2	SD Keagamaan (%)	NA	NA	28,35	47,48	54,72
3	SD Kesetaraan (%)	NA	NA	33,33	50,00	80,00
	Rata-Rata (%)	NA	NA	**32,78**	**52,26**	**69,43**

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung sebagaimana pada tabel 2.70, dijelaskan bahwa capaian Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Numerasi selama kurun waktu tiga tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

7) Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) Untuk Numerasi SMP/Sederajat

Persentase siswa SMP/sederajat yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) dalam numerasi mencerminkan kemampuan dasar peserta didik dalam memahami konsep matematika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini penting untuk menilai kualitas pembelajaran numerasi di tingkat menengah serta kesiapan siswa menghadapi tantangan akademik di jenjang pendidikan berikutnya. Adapun persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SMP/sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.71.

Tabel 2.71
Persentase pada Asesmen Pendidikan Nasional (Seluruh Jenjang) untuk Numerasi SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP Umum (%)	NA	NA	53,03	59,60	82,79
2	SMP Keagamaan (%)	NA	NA	44,68	54,54	75,29
3	SMP Kesetaraan (%)	NA	NA	35,85	45,49	55,71

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Rata-Rata (%)	NA	NA	**44,52**	**53,21**	**71,26**

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Persentase siswa SMP/sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi selama kurun waktu tiga tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum, terutama pada jenis pendidikan kesetaraan.

8) Skor Literasi Membaca SD/Sederajat

Skor literasi membaca siswa SD/sederajat merupakan indikator yang mengukur kemampuan siswa dalam memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi teks bacaan sesuai jenjangnya. Adapun skor literasi membaca SD/sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 sebagaimana pada gambar 2.32.

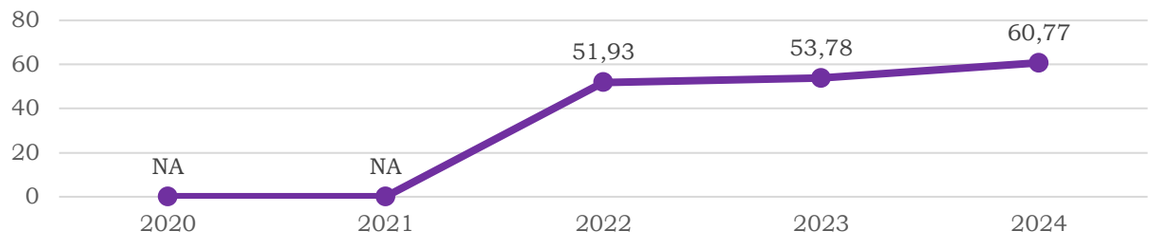

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.32
Skor Literasi Membaca SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung, skor literasi membaca SD/sederajat di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan dari 51,93 pada tahun 2022 menjadi 60,77 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam memahami dan menganalisis bacaan di jenjang sekolah dasar. Capaian ini tidak lepas dari perbaikan mutu pembelajaran, termasuk penguatan program literasi sekolah. Meskipun begitu, peningkatan skor ini perlu terus dijaga agar lebih banyak siswa mencapai tingkat pemahaman bacaan yang optimal.

9) Skor Literasi Membaca SMP/Sederajat

Skor literasi membaca siswa SMP/sederajat memberikan gambaran tentang kemampuan peserta didik dalam memahami bacaan yang lebih kompleks dan bernalar secara kritis. Skor ini juga mencerminkan sejauh mana penguatan literasi pada jenjang sebelumnya berlanjut dan berkembang. Adapun skor literasi membaca SMP/sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 sebagaimana pada gambar

2.33.

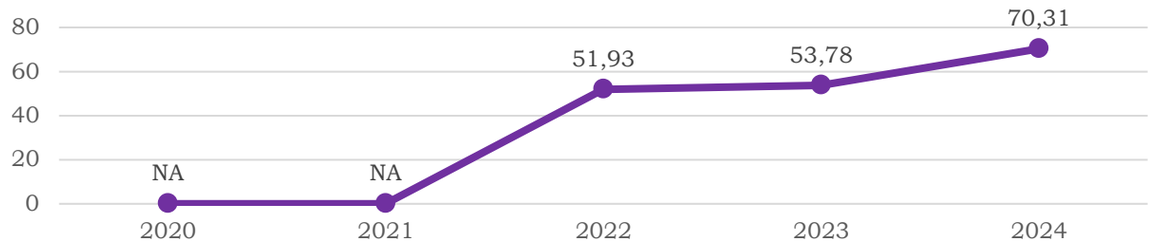

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.33
Skor Literasi Membaca SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung, skor literasi membaca SMP/sederajat mengalami peningkatan signifikan, dari 51,93 pada tahun 2022 menjadi 70,31 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca siswa SMP/sederajat terus membaik, seiring dengan peningkatan kualitas pengajaran dan bahan ajar. Peningkatan ini juga penting untuk mendukung kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa dalam berbagai mata pelajaran.

10) Skor Numerasi SD/Sederajat

Skor numerasi siswa SD/sederajat mengukur kemampuan dasar dalam memahami konsep matematika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini menjadi dasar dalam menilai kesiapan siswa untuk menguasai pelajaran yang bersifat logis dan kuantitatif. Adapun skor numerasi SD/sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 sebagaimana pada gambar 2.34

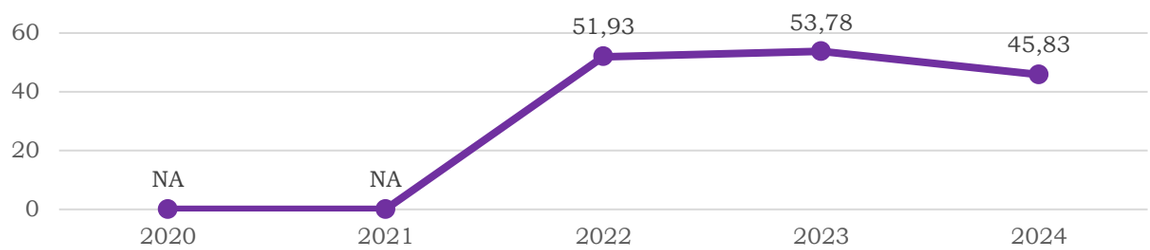

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.34
Skor Numerasi SD/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Skor Numerasi SD mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 53,78 namun menurun menjadi 45,83 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas pembelajaran numerasi di jenjang sekolah dasar. Meskipun persentase siswa yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) numerasi meningkat, penurunan skor ini dapat

mengindikasikan kesenjangan dalam kedalaman pemahaman materi. Hal ini menjadi perhatian penting agar peningkatan akses juga diiringi oleh peningkatan kualitas.

11) Skor Numerasi SMP/Sederajat

Skor numerasi siswa SMP/sederajat merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana siswa mampu berpikir logis, menyelesaikan persoalan matematis, dan menerapkan pengetahuan numerik dalam konteks nyata. Skor ini juga menjadi gambaran keberhasilan program pembelajaran numerasi dan kualitas guru dalam membimbing siswa memahami matematika secara aplikatif. Adapun skor numerasi SMP/sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 sebagaimana pada gambar 2.35

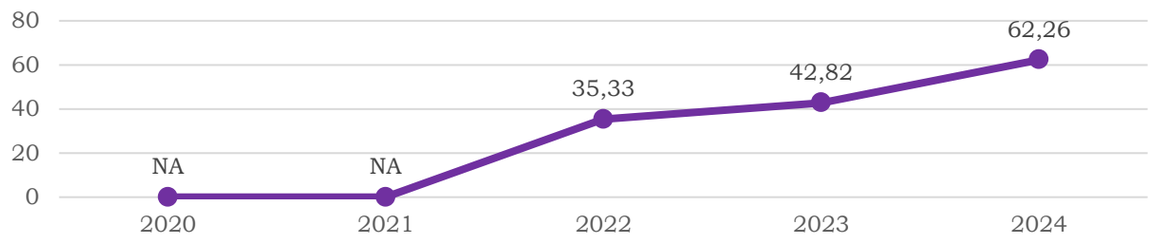

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.35
Skor Numerasi SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Skor numerasi SMP/sederajat menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 35,33 pada tahun 2022 menjadi 62,26 pada tahun 2024. Lonjakan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam kemampuan numerasi siswa jenjang menengah pertama. Hal ini mencerminkan hasil dari berbagai upaya peningkatan mutu pengajaran matematika dan pembelajaran yang lebih kontekstual. Skor yang meningkat ini diharapkan terus ditingkatkan agar siswa mampu berpikir logis dan menyelesaikan masalah secara efektif.

Akreditasi satuan pendidikan merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan, baik dari sisi manajemen, proses pembelajaran, hingga sarana dan prasarana. Di Kabupaten Temanggung, proporsi satuan pendidikan yang telah terakreditasi minimal B pada jenjang PAUD, SD, SMP, maupun pendidikan nonformal menunjukkan sejauh mana kualitas layanan pendidikan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Capaian akreditasi ini tidak hanya menjadi tolok ukur mutu pendidikan, tetapi juga menjadi dasar dalam upaya peningkatan

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan di berbagai jenjang.

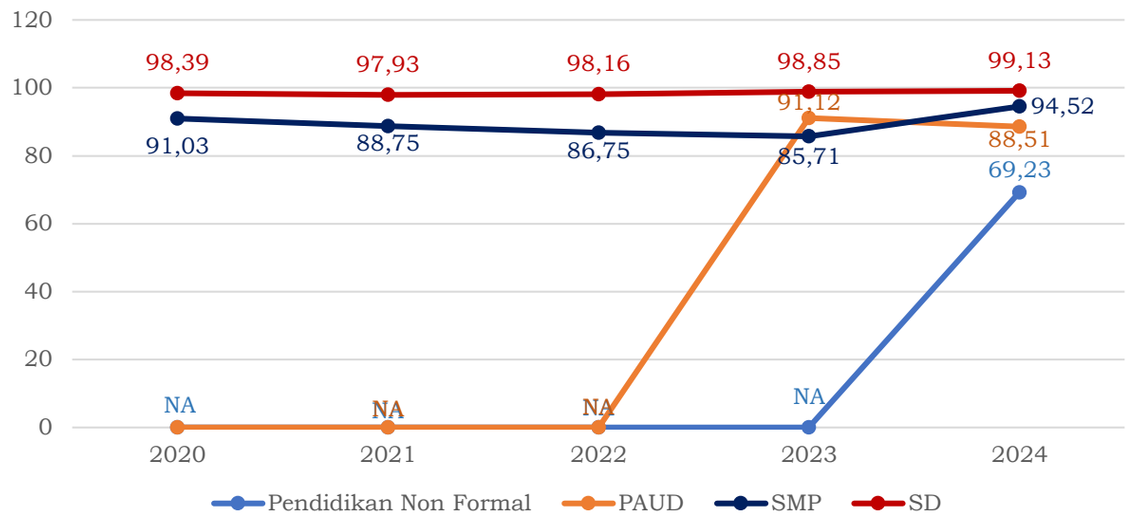

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.36
Satuan Pendidikan yang Telah Terakreditasi Minimal B pada Jenjang PAUD, SD, SMP, Maupun Pendidikan Nonformal Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

12) Proporsi PAUD Terakreditasi Minimal B (SPM)

Pada tahun 2023, tercatat 91,12% satuan PAUD telah terakreditasi minimal B, namun pada 2024 turun menjadi 88,51%. Penurunan ini menjadi catatan penting karena akreditasi mencerminkan kualitas lembaga pendidikan. Meski angkanya masih relatif tinggi, tren penurunan ini harus segera diatasi agar kualitas PAUD tetap terjaga.

13) Persentase SD Terakreditasi Minimal B

Tren akreditasi satuan pendidikan SD terus meningkat dari 98,39% pada 2020 menjadi 99,13% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh SD telah memenuhi standar mutu minimal nasional. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program peningkatan mutu satuan pendidikan dasar berjalan baik. Meski begitu, masih ada sekitar 0,87% sekolah yang belum mencapai akreditasi minimal B dan harus tetap menjadi sasaran perbaikan dan pembinaan.

14) Persentase SMP Terakreditasi Minimal B

Setelah mengalami penurunan dari 91,03% pada 2020 menjadi 85,71% pada 2023, akhirnya terjadi peningkatan signifikan ke 94,52% pada 2024. Hal ini menggambarkan adanya proses pembenahan mutu yang intensif di jenjang SMP. Kenaikan ini merupakan bukti adanya peningkatan kesadaran dan perhatian terhadap standar mutu satuan pendidikan menengah pertama.

15) Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B

Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi minimal B di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 69,23%. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 30% satuan pendidikan non formal (seperti PKBM dan LKP) yang belum mencapai standar minimal mutu. Hal ini bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya, kurangnya pelatihan tenaga pendidik, serta belum maksimalnya pengawasan dan pembinaan. Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu lebih serius dalam mendukung pendidikan non formal karena lembaga ini sangat berperan dalam menjangkau kelompok masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan formal.

16) Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 5-6 tahun merupakan cakupan penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). Angka Partisipasi Sekolah Usia 5–6 Tahun menunjukkan tren peningkatan dari 89,94% pada tahun 2022 menjadi 94,29% pada 2023. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas anak usia dini di Kabupaten Temanggung telah mendapatkan akses pendidikan pada usia emas perkembangan. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan angka partisipasi sekolah usia 5–6 tahun menjadi 93,91%. Penurunan ini disebabkan oleh masih adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya layanan pendidikan anak usia dini dalam membangun kemampuan fondasi yang krusial bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak di tahap awal kehidupan.

17) Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-15 tahun adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah umur 7-15 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia 7-15 tahun yang dinyatakan dalam persentase. Angka partisipasi sekolah usia 7–15 tahun berada pada tingkat yang tinggi atau proporsi peserta didik usia 13-15 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-15 tahun di wilayah Kabupaten Temanggung sangat

tinggi, yaitu 98,88% pada 2022, meningkat menjadi 99,74% pada 2023, dan sedikit menurun menjadi 98,87% pada 2024. Namun belum setiap anak usia 13-15 tahun dapat mengakses layanan pendidikan. Memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan hal penting dalam memastikan siswa ikut mengenyam pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya.

18) Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang sekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007 jalur pendidikan nonformal turut diperhitungkan. APS Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan adalah jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/Ula, B/Wustha, C/Ulya). Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi BPS yang tersaji dalam Rapor Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan sebesar 31,37% (kategori rendah), atau proporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah kurang.

Adapun indikator program kinerja bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.72.

Tabel 2.72
Gambaran Indikator Kinerja Bidang Pendidikana Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	Angka	NA	NA	103,5	97,3	98,47
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	Angka	NA	NA	97,62	109,25	109,75
3	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (5-6)	Angka	NA	NA	77,62	82,75	84,05
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	Angka	NA	NA	95,31	92,02	92.01
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	Angka	NA	NA	77,64	86,58	86,57
6	Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3*	%	NA	NA	NA	NA	19,04
7	Persentase Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	%	NA	NA	NA	49,29	67,81
8	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	NA	NA	NA	90,5	46

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
9	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	NA	NA	NA	90,7	53,21
10	Persentase Pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik*	%	NA	NA	NA	NA	NA
11	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	Angka	NA	NA	NA	NA	320
12	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	Angka	NA	NA	NA	NA	933
13	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	Angka	NA	NA	NA	NA	740
14	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	Angka	NA	NA	NA	NA	2855
15	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	Angka	NA	NA	NA	NA	276
16	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	Angka	NA	NA	NA	NA	305
17	Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD*	%	NA	NA	NA	NA	99,99
18	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik*	%	NA	NA	NA	NA	94,06
19	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik*	%	NA	NA	NA	NA	95,96
20	Rasio Guru/Siswa PAUD	Angka	1:12	1:16	1:16	1:16	NA
21	Rasio Guru/Siswa SD	Angka	1:19	1:17	1:17	1:17	1:14
22	Rasio Guru/Siswa SMP	Angka	1:15	1:17	1:17	1:17	1:17
23	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	NA	NA	NA	NA	100
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Indikator kinerja bidang pendidikan tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.72 memberikan gambaran mengenai capaian, tantangan, dan tren perkembangan dalam aspek partisipasi, kualitas satuan pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, serta kondisi sarana prasarana pendidikan di berbagai jenjang. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada permasalahan krusial seperti angka putus sekolah, anak yang tidak melanjutkan pendidikan, dan anak yang belum pernah bersekolah, yang memerlukan intervensi kebijakan yang tepat. Dengan memahami dinamika ini secara menyeluruh, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

19) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat

Angka Partisipasi Kasar SD menunjukkan fluktuasi signifikan selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, APK mencapai angka 103,5 yang berarti jumlah siswa yang bersekolah di SD melebihi jumlah penduduk usia sekolah dasar. Ini bisa terjadi karena masih

banyak anak yang masuk SD tidak sesuai usia ideal, baik yang terlalu muda maupun terlalu tua. Namun, pada 2023 terjadi penurunan ke angka 97,3, sebelum naik kembali menjadi 98,47 di tahun 2024. Penurunan ini bisa menandakan perbaikan dalam peraturan usia masuk sekolah atau bisa juga menjadi indikasi menurunnya daya tarik atau akses terhadap pendidikan dasar. Meski angka tahun 2024 cukup tinggi, pemerintah perlu terus mendorong pemerataan akses pendidikan agar seluruh anak usia SD mendapatkan hak pendidikan secara tepat waktu dan sesuai usia.

20) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat

Angka Partisipasi Kasar SMP meningkat tajam dari 97,62 pada tahun 2022 menjadi 109,75 pada 2024. Peningkatan ini cukup signifikan dan menunjukkan adanya peningkatan akses serta partisipasi anak-anak di tingkat menengah pertama. Nilai yang melebihi 100% menunjukkan bahwa terdapat siswa yang tidak berada pada rentang usia ideal SMP yang masih bersekolah di jenjang ini. Kondisi ini bisa disebabkan oleh anak-anak yang terlambat masuk sekolah atau yang sebelumnya putus sekolah dan kembali melanjutkan pendidikan. Hal ini juga bisa terjadi apabila banyak siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Temanggung. Selain itu, ini juga bisa menjadi sinyal positif bahwa program kejar paket atau pendidikan kesetaraan berhasil menjangkau peserta didik yang sempat tertinggal.

21) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (5-6)

Angka Partisipasi Murni PAUD mengalami peningkatan dari 77,62% pada 2022 menjadi 84,05% di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Peningkatan ini kemungkinan besar merupakan hasil dari kampanye lembaga pendidikan terkait PAUD serta dorongan dari masyarakat untuk memberikan fondasi pendidikan sejak dini. Meskipun demikian, angka ini belum mencapai 100%, yang berarti masih ada sebagian anak usia 5–6 tahun yang belum mengakses PAUD. Perluasan akses, terutama di daerah tertinggal, serta dukungan finansial bagi keluarga kurang mampu akan membantu menggenjot partisipasi PAUD.

22) Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat

Tren Angka Partisipasi Murni SD justru mengalami penurunan, dari 95,31% di 2022 menjadi 92,01% di 2024. Penurunan ini perlu menjadi perhatian, karena APM mencerminkan jumlah anak usia ideal SD yang

benar-benar bersekolah di jenjang tersebut. Penurunan ini bisa disebabkan oleh meningkatnya angka putus sekolah, anak yang terlambat masuk sekolah, atau hambatan akses di menuju sarana pendidikan. Meski angka masih tergolong tinggi, penurunan berturut-turut selama dua tahun terakhir perlu menjadi dasar evaluasi program wajib belajar dan pemerataan pendidikan dasar.

23) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat

Angka Partisipasi Murni SMP menunjukkan peningkatan dari 77,64% pada 2022 menjadi 86,57% di 2024. Ini merupakan perkembangan yang sangat baik karena APM SMP menunjukkan persentase anak usia 13–15 tahun yang benar-benar mengikuti pendidikan di tingkat SMP. Artinya, semakin banyak anak usia ideal SMP yang masuk sekolah. Ini merupakan indikator keberhasilan program transisi dari SD ke SMP. Meski begitu, angka tersebut masih berada di bawah 100%, yang berarti masih ada anak usia SMP yang belum mengakses pendidikan sesuai jenjangnya, yang bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, atau geografis.

24) Persentase Instruktur LKP yang Memiliki Sertifikat Metodologi Level 3

Pada tahun 2024, hanya 19,04% instruktur di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) yang memiliki sertifikat metodologi level 3. Angka ini sangat rendah, dan mengindikasikan bahwa mayoritas instruktur belum memiliki kompetensi metodologis yang dibutuhkan dalam mengajar secara profesional. Sertifikasi metodologi sangat penting karena menyangkut bagaimana instruktur menyampaikan materi agar efektif dan sesuai standar. Perlu adanya kegiatan peningkatan kapasitas dan akses pelatihan sertifikasi yang lebih merata untuk meningkatkan angka ini.

25) Persentase Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik

Tingkat profesionalitas pendidik PAUD menunjukkan tren positif, dari 49,29% pada 2023 menjadi 67,81% pada 2024. Peningkatan yang sangat signifikan ini mencerminkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik usia dini. Pendidik yang tersertifikasi diharapkan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang mumpuni.

26) Persentase Pendidik SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik

Penurunan drastis persentase PTK SD yang memiliki sertifikat pendidik dari 90,5% pada tahun 2023 menjadi 46% di tahun 2024

tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kualitas atau kompetensi tenaga pendidik, melainkan disebabkan oleh tidak tersedianya data dari berbagai jenis satuan pendidikan, seperti SD umum, SD kesetaraan, dan SD keagamaan. Ketidaktercataan data ini berdampak pada akurasi indikator, sehingga persentase yang tercantum tidak merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius dalam proses evaluasi dan perumusan kebijakan pendidikan, karena data yang tidak lengkap dapat mengganggu validitas pengambilan keputusan.

27) Persentase Pendidik SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik

Seperti halnya pada jenjang SD, PTK SMP juga mengalami penurunan cukup tajam dalam persentase kepemilikan sertifikat pendidik, dari 90,7% pada tahun 2023 menjadi 53,21% di tahun 2024. Penurunan ini juga disebabkan oleh tidak tersedianya data dari satuan pendidikan SMP umum, SMP kesetaraan, dan SMP keagamaan, sehingga angka yang tercatat tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Ketidaktercataan ini menimbulkan tantangan dalam menilai kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistem pendataan yang lebih terpadu dan akurat, serta peningkatan koordinasi lintas satuan pendidikan agar informasi yang dihimpun dapat digunakan secara optimal dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan peningkatan mutu pendidikan menengah pertama.

28) Persentase Pendidik PNF yang Memiliki Sertifikat Pendidik

Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan NonFormal (PNF) yang memiliki sertifikat pendidik merupakan indkator baru pada tahun 2024. Kehadiran indikator ini penting untuk memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kualitas tenaga pendidik di jalur pendidikan nonformal, serta sebagai dasar dalam perencanaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme PTK PNF di masa mendatang. Ke depan, konsistensi pencatatan dan kelengkapan data menjadi hal krusial agar indikator ini dapat digunakan secara maksimal dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi mutu pendidikan nonformal.

29) Angka Putus Sekolah SD Sederajat

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 320 siswa jenjang SD sederajat di Kabupaten Temanggung mengalami putus sekolah. Angka ini menjadi perhatian penting karena mencerminkan adanya tantangan dalam

menjaga keberlanjutan akses pendidikan dasar bagi seluruh anak usia sekolah. Berbagai faktor bisa menjadi penyebab putus sekolah, seperti kondisi ekonomi keluarga, faktor geografis, pernikahan dini, atau kurangnya motivasi belajar. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan strategi pencegahan, seperti program beasiswa, pendampingan sosial, atau penguatan layanan pendidikan alternatif yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa.

30) Angka Putus Sekolah SMP Sederajat

Sebanyak 933 siswa jenjang SMP sederajat tercatat putus sekolah pada tahun 2024 di Kabupaten Temanggung. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang SD, yang mencatat 320 siswa putus sekolah, dan mengindikasikan bahwa transisi dari pendidikan dasar ke menengah pertama masih menghadapi tantangan serius. Tingginya angka putus sekolah di jenjang ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan, seperti kesiapan akademik, dukungan orang tua, kondisi sosial ekonomi, serta aksesibilitas dan kenyamanan lingkungan belajar di tingkat SMP. Upaya strategis seperti program pendampingan transisi, layanan konseling, serta pemberian bantuan biaya pendidikan dan transportasi sangat penting untuk memastikan siswa dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan menengah pertama secara tuntas.

31) Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD Sederajat

Pada tahun 2024, sebanyak 740 siswa yang lulus dari jenjang SD sederajat di Kabupaten Temanggung tercatat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau sederajat. Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) ini menjadi sinyal penting bahwa masih terdapat hambatan dalam keberlanjutan pendidikan, terutama pada masa transisi dari pendidikan dasar ke menengah pertama. Beragam faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya dukungan lingkungan sekitar dapat menjadi penyebab utama siswa tidak melanjutkan pendidikan.

32) Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP Sederajat

Pada tahun 2024, Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) jenjang SMP sederajat di Kabupaten Temanggung mencapai 2.855 siswa. Jumlah ini tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa tantangan keberlanjutan

pendidikan tidak hanya terjadi pada transisi SD ke SMP, tetapi juga semakin nyata pada peralihan dari pendidikan menengah pertama ke jenjang pendidikan menengah atas. Tingginya angka LTM ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan biaya, kebutuhan untuk bekerja membantu keluarga, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan lanjutan, atau kurangnya akses ke sekolah menengah atas, khususnya di daerah terpencil.

33) Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 276 anak usia 7–12 tahun di Kabupaten Temanggung belum pernah mengenyam pendidikan atau belum pernah sekolah sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pemenuhan hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan, khususnya pada usia pendidikan dasar. Faktor penyebabnya bisa beragam, mulai dari kondisi sosial ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, hingga keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan di wilayah tertentu.

34) Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun

Pada tahun 2024, sebanyak 305 anak usia 13–15 tahun atau usia setara jenjang SMP di Kabupaten Temanggung tercatat belum pernah bersekolah. Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) ini menunjukkan bahwa permasalahan akses pendidikan masih cukup signifikan, bahkan pada kelompok usia remaja awal yang seharusnya sudah menempuh pendidikan menengah pertama. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, pernikahan dini, keharusan bekerja membantu keluarga, atau kurangnya dukungan lingkungan terhadap pentingnya pendidikan.

35) Persentase Siswa Kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD

Pada tahun 2024, persentase siswa kelas 1 SD yang berasal dari jenjang TK atau PAUD di Kabupaten Temanggung mencapai 99,99%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar sudah sangat tinggi. Selain itu, angka ini juga mencerminkan keberhasilan program transisi PAUD ke SD yang semakin baik, baik dari segi akses, partisipasi, maupun kesiapan anak dalam menghadapi pembelajaran di tingkat dasar.

36) Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kondisi Baik

Pada tahun 2024, sebanyak 94,06% sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD di Kabupaten Temanggung berada dalam kondisi baik. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas pendukung pembelajaran di tingkat sekolah dasar telah memenuhi standar kelayakan, baik dari segi bangunan, ruang kelas, maupun fasilitas penunjang lainnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Sarana prasarana yang baik akan mendukung kegiatan belajar mengajar yang nyaman dan efisien.

37) Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP Kondisi Baik

Pada tahun 2024, persentase sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Temanggung yang berada dalam kondisi baik mencapai 95,96. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh sekolah menengah pertama di Kabupaten Temanggung telah memiliki fasilitas yang layak untuk mendukung proses pembelajaran. Kondisi sarana prasarana yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran, kenyamanan siswa dan guru, serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Meski angka ini sangat tinggi, tetap diperlukan upaya pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas fasilitas secara berkelanjutan, terutama untuk memastikan pemerataan kondisi yang baik di seluruh satuan pendidikan.

38) Rasio Guru/Siswa PAUD

Pelaksanaan Program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Adapun rasio guru/siswa PAUD di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.73.

Tabel 2.73
Rasio Guru/Siswa PAUD Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	*2024
1	Rasio Guru/Siswa PAUD	Angka	1:12	1:16	1:16	1:16	N.A.

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025
*Keterangan: *tidak dihitung*

Rasio guru/siswa PAUD di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan dari 1:12 pada tahun 2020 menjadi 1:16 pada tahun 2021 hingga 2023. Kenaikan rasio ini berarti satu guru harus menangani

lebih banyak anak, yang berpotensi mengurangi intensitas interaksi dan kualitas pendampingan dalam proses pembelajaran dan pengasuhan, terutama pada usia dini yang membutuhkan perhatian individual lebih besar. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, masih berada di atas batas ideal bagi sebagian kelompok usia. Oleh karena itu, perlu ada upaya penguatan kapasitas dan distribusi pendidik PAUD agar layanan holistik yang mencakup pendidikan, pengasuhan, dan kesehatan dapat diberikan secara optimal.

39) Rasio Guru/Siswa SD

Rasio guru terhadap siswa merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas layanan pendidikan, khususnya dalam hal efektivitas proses pembelajaran di kelas. Rasio yang ideal memungkinkan guru memberikan perhatian yang lebih individual kepada siswa, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Adapun rasio guru/siswa SD Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.74

Tabel 2.74
Rasio Guru/Siswa SD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Guru/Siswa SD	Angka	1:19	1:17	1:17	1:17	1:14

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Rasio guru/siswa SD di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan dari 1:19 pada tahun 2020 menjadi 1:14 pada tahun 2024, mendekati kondisi ideal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, yaitu satu guru untuk setiap 20 siswa. Penurunan rasio ini mencerminkan adanya perbaikan dalam ketersediaan dan distribusi guru di tingkat sekolah dasar, yang memungkinkan peningkatan kualitas pembelajaran melalui interaksi yang lebih intensif antara guru dan siswa. Rasio 1:14 menunjukkan bahwa beban mengajar guru menjadi lebih proporsional, sehingga diharapkan mampu memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan belajar setiap siswa.

40) Rasio Guru/Siswa SMP

Rasio guru terhadap siswa pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pembelajaran dan distribusi tenaga pendidik. Rasio yang ideal memungkinkan guru memberikan perhatian yang lebih personal kepada siswa, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih

optimal. Adapun rasio guru/siswa SMP Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.75

Tabel 2.75
Rasio Guru/Siswa SMP Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Guru/Siswa SMP	Angka	1:15	1:17	1:17	1:17	1:17

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Rasio guru/siswa SMP di Kabupaten Temanggung mengalami sedikit kenaikan dari 1:15 pada tahun 2020 menjadi stabil di angka 1:17 sejak tahun 2021 hingga 2024. Meskipun rasio ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun awal, angkanya masih berada dalam batas ideal dan cukup baik untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Stabilitas rasio 1:17 menunjukkan bahwa jumlah guru relatif seimbang dengan jumlah siswa, meskipun tetap diperlukan upaya dalam menjaga kualitas dan distribusi guru, terutama di wilayah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Pemerintah daerah perlu memastikan agar peningkatan jumlah siswa di masa depan tetap diimbangi dengan penambahan dan pemerataan guru, guna mempertahankan mutu pendidikan jenjang SMP.

41) Persentase Satuan Pendidikan Yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya Dan Mengarusutamakan Kebudayaan

Persentase satuan pendidikan yang memiliki guru yang mengajar muatan lokal (mulok) bahasa daerah dan/atau seni budaya serta mengarusutamakan kebudayaan merupakan indikator penting dalam pelestarian nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan sekolah. Kehadiran guru mulok tidak hanya memperkaya kurikulum dengan konten budaya lokal, tetapi juga memperkuat identitas, karakter, dan kebanggaan peserta didik terhadap warisan budaya daerahnya. Implementasi mulok yang berfokus pada bahasa daerah dan seni budaya menjadi bagian dari upaya strategis Kabupaten Temanggung dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan keberagaman sejak dini. Seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Temanggung telah memiliki guru yang mengampu mulok tersebut, yang menunjukkan komitmen kuat dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Selama periode 2020 hingga 2024, pelaksanaan urusan pemerintahan

bidang kesehatan menunjukkan berbagai capaian yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sektor kesehatan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

1) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian UHH Kabupaten Temanggung selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka yang terus membaik sebesar 75,94 tahun pada Tahun 2024.

Tabel 2.76
Usia Harapan Hidup Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020–2024

Usia Harapan Hidup (UHH)	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Temanggung	75,58	75,64	75,70	75,77	75,94
Jawa Tengah	74,37	74,47	74,54	74,69	74,91
Nasional	71,47	71,57	71,85	73,93	74,15

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Dari Tabel II.X di atas dapat dilihat bahwa pencapaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan. Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, naik dari 75,58 menjadi 75,94 tahun. Pada Tahun 2024, apabila dibandingkan dengan capaian Usia Harapan Hidup di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Usia Harapan Hidup Kabupaten Temanggung lebih tinggi. Pencapaian UHH yang terus membaik dari tahun ke tahun didukung dengan keberhasilan upaya pembangunan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Temanggung yang ditunjukkan dengan peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, jaminan kesehatan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, serta tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan.

2) Angka Kematian Ibu

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama yaitu Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti

kecelakaan atau insidental. Menurut BPS (2021), AKI adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas. Adapun Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.37 dan tabel 2.77

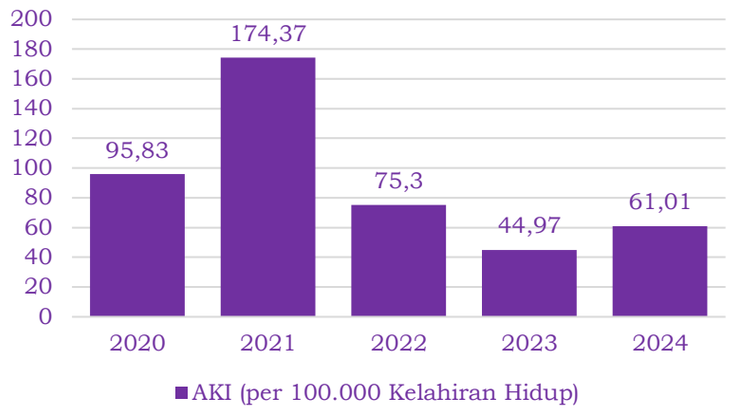

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.37
Angka Kematian Ibu Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Tabel 2.77
Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus kematian ibu	10	17	7	4	5
Jumlah kelahiran hidup	10.435	9.749	9.294	8.897	8.196
AKI (per 100.000 KH)	95,83	174,37	75,3	44,97	61,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif, dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 174,38 per 100.000 kelahiran hidup. Lonjakan tersebut dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, di mana 52,94% kematian ibu tahun itu disebabkan oleh infeksi virus tersebut. Meskipun sempat tinggi, AKI berhasil ditekan hingga mencapai 44,96 pada tahun 2023, sebelum kembali sedikit meningkat menjadi 61,01 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan intervensi Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu, terutama dalam pelayanan antenatal, persalinan, dan pencegahan komplikasi kebidanan. Upaya inovatif seperti pendampingan ibu hamil berisiko tinggi, validasi data, dan pelatihan kader kesehatan turut memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat. Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif dan

berkelanjutan yang dilakukan telah memberi dampak positif dalam menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Temanggung.

3) Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berusia di bawah lima tahun (0-59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam suatu wilayah dan periode tertentu. AKABA digunakan sebagai indikator kesehatan masyarakat, mencerminkan akses terhadap layanan kesehatan, gizi, sanitasi, serta faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup anak. Penurunan AKABA menunjukkan perbaikan dalam sistem kesehatan dan kesejahteraan anak di suatu daerah.

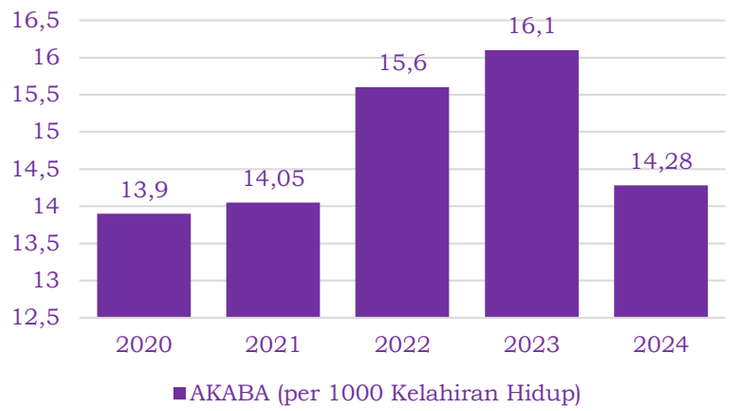

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.38
Angka Kematian Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Tabel 2.78
Jumlah Kasus Kematian Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus kematian balita	145	137	145	143	117
Jumlah kelahiran hidup	10.435	9.749	9.294	8.897	8.196
AKBa (per 1.000 KH)	13,90	14,05	15,6	16,1	14,28

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2020-2024 memiliki angka yang fluktuatif. Hal yang menjadi tantangan terkait penurunan Angka Kematian Balita adalah angka kelahiran hidup di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin turun karena keberhasilan program KB; adanya factor risiko ibu hamil yang tinggi dan infeksi pada bayi/balita. Dinas kesehatan terus berupaya menguatkan upaya-upaya pendukung penurunan angka kematian balita yaitu pedeteksian faktor risiko kehamilan secara rutin dan berkala; peningkatan dan pengelolaan

pendidikan pola asuh terhadap bayi dan balita serta pendidikan/ pelatihan/ pemberdayaan kegiatan deteksi faktor risiko pada bayi dan balita oleh keluarga.

4) Cakupan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Siklus Hidup Sesuai Standar

Cakupan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus sesuai standar pada tahun 2024 tercatat sebesar 83,4%, menandai capaian awal yang cukup baik untuk indikator baru ini. Indikator ini mencerminkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut, sehingga menjadi ukuran penting dalam menilai efektivitas sistem pelayanan kesehatan daerah. Meskipun belum tersedia data historis sebagai pembanding, nilai awal ini dapat dijadikan tolok ukur untuk menetapkan target tahunan ke depan. Capaian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok sasaran telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Ke depan, diperlukan penguatan integrasi antar layanan kesehatan lintas siklus serta pengawasan yang konsisten agar cakupan pelayanan ini dapat terus meningkat dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

5) Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat juga masih cukup tinggi sebesar 27,31 menurut pendataan dari SSGI stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

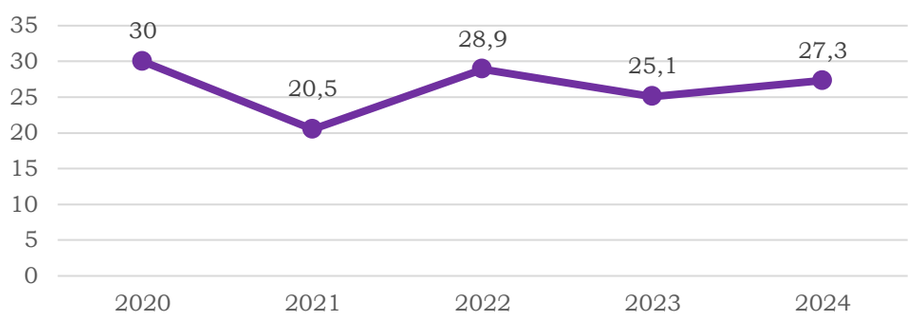

Sumber: Survey Status Gizi Indonesia, 2025

Gambar 2.39
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Prevalensi stunting balita di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif. Angka yang fluktuatif pada stunting dikarenakan stunting

memiliki banyak faktor yang mempengaruhi antara lain: pola asuh balita yang kurang optimal, kekurangan asupan gizi yang memadai, adanya infeksi dan penyakit pada bayi dan balita, anemia dan gizi kurang pada ibu hamil, sanitasi yang buruk dll. Dalam intervensi penanganannya, stunting membutuhkan waktu yang cukup lama dan berkelanjutan yaitu mencakup sikus hidup (remaja hingga balita atau 1000 hari kelahiran hidup). Penanganan stunting juga membutuhkan intervensi yang spesifik dan sensitif serta dukungan dan keterlibatan dari berbagai sektor.

Di Kabupaten Temanggung dalam penanganan stunting telah dilakukan upaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal pada ibu hamil KEK, dan balita yang memiliki masalah gizi, telah dilaksanakan pula kegiatan pengamatan dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin melalui Posyandu serta pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan tumbuh kembang balita melalui aplikasi e-PPGBM stunting. Selain itu telah dilaksanakan monitoring oleh Dinas Kesehatan terhadap Puskesmas terkait kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di lapangan secara rutin.

6) Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik yang Cukup

Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup merupakan persentase penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (≥150 menit) selama jangka waktu tertentu (1 minggu) terhadap penduduk berusia ≥10 tahun pada jangka waktu yang sama. Indikator ini merupakan indikator baru di dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 pada bidang urusan kesehatan.

7) Persentase Penduduk dengan Literasi Kesehatan Cukup

Persentase penduduk dengan literasi kesehatan cukup merupakan indikator baru yang mulai digunakan untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan secara tepat. Indikator ini menjadi penting karena literasi kesehatan yang baik sangat berperan dalam pengambilan keputusan yang mendukung perilaku hidup sehat. Dengan meningkatnya literasi kesehatan, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dalam menjaga kesehatan diri dan keluarganya. Oleh karena itu, penguatan edukasi kesehatan berbasis masyarakat dan media informasi menjadi strategi kunci dalam meningkatkan indikator ini ke depan.

8) Cakupan Deteksi Dini Penyakit

Cakupan deteksi dini penyakit menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, cakupan ini telah mencapai 88% dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Pelaksanaan deteksi dini secara optimal membantu mengidentifikasi penyakit sejak awal sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

9) Proporsi Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar

Proporsi Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar merupakan indikator baru yang mencerminkan kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan di Kabupaten Temanggung. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, baik dari segi infrastruktur, peralatan medis, maupun tenaga kesehatan. Kehadiran indikator ini diharapkan mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah

10) Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan di fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit daerah. Di Kabupaten Temanggung, IKM RSUD menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan publik dalam sektor kesehatan yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Adapun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kabupaten Temanggung disajikan pada gambar 2.40

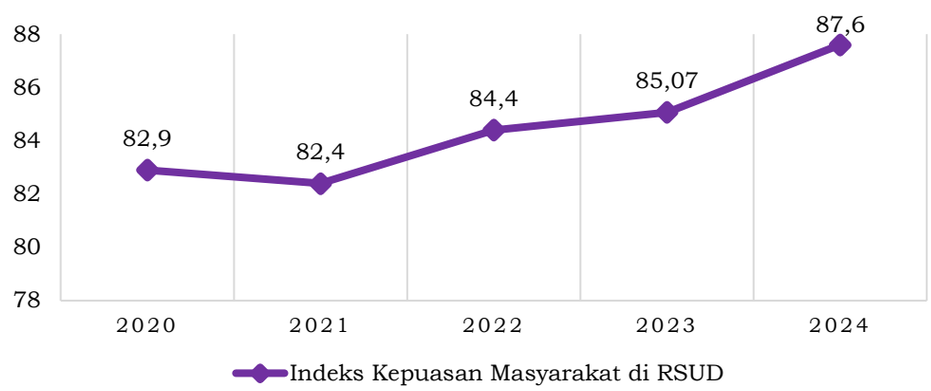

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.40
Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai IKM tercatat sebesar 82,9% dan sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 82,4% pada tahun 2021. Namun, sejak 2022 terjadi peningkatan berkelanjutan, mencapai 84,4% di 2022, naik lagi menjadi 85,07% di 2023, dan mencapai puncaknya sebesar 87,6% pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan kualitas pelayanan rumah sakit, baik dari aspek medis, administratif, maupun kenyamanan fasilitas. Kenaikan IKM ini mencerminkan bahwa RSUD semakin mampu menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan yang prima dan manusiawi.

11) Cakupan Kepesertaan JKN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk. Cakupan kepesertaan JKN menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terstandar dan terjangkau. Adapun cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada Gambar 2.41.

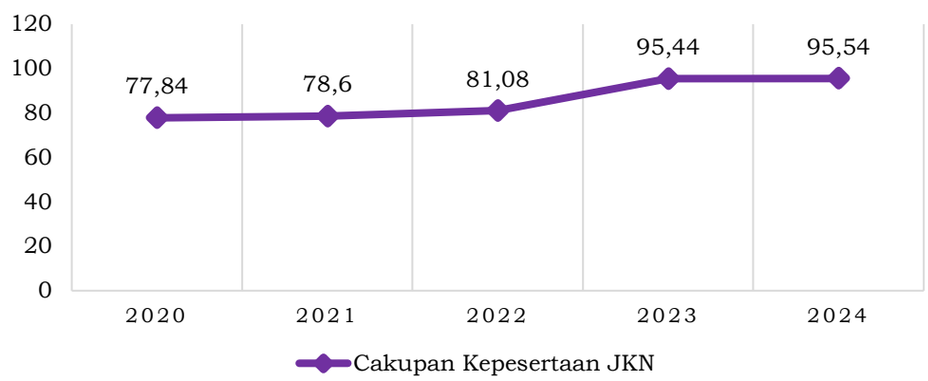

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.41
Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, cakupan JKN masih berada di angka 77,84%, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 81,08% pada tahun 2022. Lonjakan besar terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 95,44%, dan meningkat sedikit menjadi

95,54% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk, termasuk upaya integrasi data kependudukan dengan sistem JKN. Capaian tersebut juga mendukung target pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di tingkat kabupaten.

12) Cakupan Desa/Kelurahan Sehat

Cakupan Desa/Kelurahan Sehat merupakan indikator baru yang mengukur persentase desa atau kelurahan yang memenuhi standar kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Indikator ini penting untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan berbasis komunitas di tingkat desa atau kelurahan. Dengan meningkatnya cakupan desa/kelurahan sehat, diharapkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut juga meningkat secara signifikan. Upaya peningkatan cakupan ini melibatkan berbagai sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan, sanitasi, serta pemenuhan fasilitas kesehatan dasar.

Adapun gambaran capaian indikator kinerja program urusan kesehatan di Kabupaten Temanggung periode Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.79

Tabel 2.79
Gambaran Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100
2	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	12,65	12,72	13,23	13,04	11,84
4	Angka kematian neonatal	per 1000 kelahiran hidup	NA	9,44	9.15	9,21	8,42
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	99,09	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	80,40	81,64	92,95	100	96
7	Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	30,95	84,92	82,05	100	98,8

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	%	51,81	69,25	89,07	100	99,21
9	Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar	%	62,64	69,25	83,22	100	94,61
10	Prevalensi *wasting* balita*	%	NA	NA	NA	NA	NA
11	Insiden Stunting balita (kasus baru)*	%	NA	NA	NA	NA	NA
12	Persentase anemia pada ibu hamil*	%	13,67	13,75	13,82	11,41	11,44
13	Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat*	%	NA	NA	NA	NA	NA
14	Persentase tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja*	%	NA	NA	4,6	16,2	11,6
15	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	38,19	67,88	95,65	100	100
16	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	74,42	73,49	87,03	100	96,28
17	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	77,37	92,50	100	100	100
18	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	19,99	30,97	84,78	100	90,03
19	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	83,06	100	100	100	100
20	Prevalensi obesitas*	Angka	NA	NA	NA	NA	NA
21	Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas*	%	100	100	100	100	100
22	Cakupan imunisasi bayi lengkap*	%	93,6	79,1	100	100	100
23	Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah*	%	NA	NA	NA	NA	100
24	Persentase penduduk yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup*	%	NA	NA	NA	NA	NA
25	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar*	%	NA	NA	NA	NA	NA
26	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar*	%	100	100	100	90	100
27	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA
28	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN*	%	NA	NA	NA	NA	NA

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
29	Proporsi fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna*	%	NA	NA	NA	NA	NA
30	Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif*	%	NA	NA	NA	NA	71,07
31	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan*	%	NA	NA	NA	Na	22,13
32	Cakupan desa/kelurahan STBM	%	12,1	24,9	92,99	98,62	98,62
33	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan*	%	81,5	79,6	73,56	83,62	83,81
34	Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit*	%	100	100	100	100	100
35	Persentase capaian pengembangan rumah sakit*	%	NA	NA	NA	NA	NA
36	Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan*	%	100	100	100	100	100
37	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi*	%	2	2,3	2,6	2,4	2,5
38	Persentase pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar*	%	NA	NA	NA	NA	NA
39	Puskesmas dengan KLB keracunan pangan <5*	%	100	100	100	100	100
40	Persentase posyandu aktif bidang kesehatan*	%	NA	NA	NA	96,2	97,4
41	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit*	Nilai	NA	NA	NA	NA	Paripurna nilai 91,2
42	Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD*	Nilai	NA	NA	NA	NA	Peringkat AA nilai 93
43	Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target*	%	NA	NA	NA	NA	NA
44	Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target*	%	NA	NA	NA	NA	NA
45	Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target*	%	NA	NA	NA	NA	NA
46	Persentase kecukupan SDMK sesuai standar*	%	92,31	100	100	100	88,56
47	Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar*	%	NA	NA	NA	NA	NA
48	Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan*	%	1,13	1,93	2,59	7,33	18,55
49	Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional*	%	NA	NA	NA	NA	NA

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
50	Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target*	%	NA	NA	NA	NA	NA
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berbagai indikator seperti cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta upaya promotif dan preventif, menjadi tolok ukur keberhasilan program kesehatan. Banyak indikator menunjukkan tren positif dan terdapat beberapa indikator baru dalam rangka mengukur kinerja pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Indikator baru tersebut sebagaimana pada tabel 2.79. Sedangkan Gambaran pencapaian indikator kinerja bidang kesehatan yang telah dilaksanakan periode 2020 – 2024 dijelaskan sebagai berikut.

1) Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 6 kali (K6) selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga hingga persalinan yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter spesialis kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP/SIPB). Berdasarkan definisi tersebut, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.80.

Tabel 2.80
Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan K4	10.677	10.740	10.388	12.146	8.422
2	Jumlah sasaran ibu hamil	10.677	10.740	10.388	12.146	8.422
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan Tabel II.X, selama periode 2020 hingga 2024, cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar

konsisten di angka 100%. Hal ini menunjukkan sistem pelayanan kesehatan ibu hamil telah berjalan optimal. Capaian yang baik dalam indikator kesehatan ibu hamil tidak terlepas dari upaya Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pendampingan terhadap ibu hamil yang memiliki faktor risiko kehamilan, serta pemberian pelayanan antenatal (ANC) hingga masa nifas sesuai standar. Selain itu, kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di fasilitas pelayanan kesehatan juga semakin meningkat. Dinas Kesehatan turut mengembangkan berbagai inovasi, seperti pelatihan kader kesehatan untuk mendampingi dan mendeteksi ibu hamil dengan masalah kesehatan. Sosialisasi perencanaan kehamilan sehat kepada masyarakat pun terus dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai upaya ini terintegrasi dalam rangkaian kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) seperti kelas ibu hamil, kunjungan ANC, dan kegiatan posyandu yang menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu.

2) Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Setiap ibu bersalin berhak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan dilakukan oleh bidan dan/atau dokter spesialis kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Adapun persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.81

Tabel 2.81
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	10.446	9.792	9.300	8.914	8.222
2	Jumlah sasaran ibu bersalin	10.446	9.792	9.300	8.914	8.222
3	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

sebagaimana pada tabel 2.81, cakupan ibu bersalin yang memperoleh pelayanan sesuai standar mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh ibu bersalin yang menjadi sasaran berhasil mendapatkan layanan persalinan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Konsistensi ini mencerminkan keberhasilan sistem pelayanan kesehatan di daerah, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas yang memadai, serta sistem rujukan yang berjalan dengan baik. Capaian ini juga menunjukkan bahwa program peningkatan mutu pelayanan kesehatan maternal berjalan efektif dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

3) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0–11 bulan, termasuk masa neonatal, di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. AKB menjadi salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Indikator AKB di Kabupaten Temanggung menjadi salah satu fokus perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan karena mencerminkan efektivitas pelayanan kesehatan sejak masa kehamilan hingga pasca persalinan. Adapun AKB di Kabupaten Temanggung ditampilkan pada tabel 2.82

Tabel 2.82
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus kematian bayi	132	124	123	116	89
2	Jumlah Kelahiran Hidup (Jiwa)	10.435	9.749	9.294	8.897	8.196
3	Angka Kematian Bayi	12,65	12,72	13,23	13,04	11,84

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Angka kematian bayi pada setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 AKB mengalami peningkatan dari 12,65 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 13,04 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi angka kematian bayi senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program gizi masyarakat serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil. Upaya mengedepankan program-program tersebut berhasil menurunkan angka kematian bayi

di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 yaitu menjadi 11,84 per 1.000 kelahiran hidup.

4) Angka Kematian Neonatal

Kematian neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari. Periode ini merupakan masa ketika bayi baru lahir beradaptasi dengan kehidupan di luar rahim. Kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada atbel 2.83.

Tabel 2.83
Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi usia 0-28 hari yang meninggal	NA	93	85	82	69
2	Jumlah Kelahiran Hidup	NA	9.749	9.294	8.897	8.196
3	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	NA	9,44	9.15	9,21	8.42

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan Tabel II.X, angka Kematian Neonatal di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan selama periode 2021 hingga 2024, dari 9,44 menjadi 8,42 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun jumlah kelahiran hidup mengalami penurunan dari tahun ke tahun, upaya Dinas Kesehatan dalam memperkuat intervensi kesehatan ibu dan bayi terbukti berdampak positif terhadap penurunan angka kematian. Namun, masih terdapat kendala seperti kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal serta pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal. Selain itu, kelengkapan sarana prasarana di Puskesmas, khususnya untuk penanganan kegawatdaruratan neonatal, belum merata dan masih memerlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani kasus darurat. Oleh karena itu, perbaikan sistem rujukan dan penguatan pelayanan pra-rujukan sangat diperlukan untuk menjaga dan menurunkan angka kematian neonatal.

5) Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Indikator cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar merupakan salah satu indikator SPM Bidang Kesehatan dengan target 100% setiap tahunnya atau dengan kata lain semua bayi baru lahir harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Adapun jumlah bayi baru lahir dan persentase bayi

baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.84.

Tabel 2.84
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.435	9.740	9.209	8786	8181
2	Jumlah sasaran bayi baru lahir	10.435	9.740	9.294	8786	8181
3	Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	99,09	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Pada tahun 2020 seluruh bayi baru lahir telah mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar. Pada Tahun 2022 angka capaiannya hanya 99,09%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti kelengkapan sarana dan prasarana penanganan kegawatdaruratan penyakit pada bayi, pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal, dan keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani kasus kegawatdaruratan. Sampai dengan tahun 2024 capaian tersebut naik menjadi 100%.

6) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Setiap balita memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai standar, dan pemenuhan hak ini menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan balita secara optimal melalui berbagai program, seperti pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, serta pelayanan gizi dan penanganan penyakit balita. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Posyandu dan Puskesmas, dengan dukungan tenaga kesehatan dan kader terlatih. Capaian pelaksanaan pelayanan kesehatan balita dapat dilihat pada tabel 2.85.

Tabel 2.85
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita usia 12-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40.441	42.083	40.199	43.520	40.033
2	Jumlah sasaran balita usia 12-59 bulan	50.297	51.545	43.250	43.520	41.699
3	Persentase balita Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	80,40	81,64	92,95	100	96,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Cakupan pelayanan balita mengalami peningkatan signifikan dari 80,40% pada tahun 2020 menjadi 100% di tahun 2023, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 96%. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah meningkatkan kesiapan Puskesmas dalam tatalaksana persalinan dan penanganan kegawatdaruratan melalui Puskesmas PONED. Pemenuhan sarana prasarana juga dilakukan untuk mendukung layanan Puskesmas Ramah Anak. Selain itu, kegiatan kelas balita digerakkan secara aktif dan berhasil menjangkau sasaran masyarakat secara luas.

7) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar

Anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar mengalami peningkatan drastis dari 30,95% (2020) menjadi 100% (2023), kemudian sedikit menurun menjadi 98,8% (2024). Pada tahun 2021, pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tidak maksimal sehingga hanya mencapai 84,92%. Pada Tahun 2022, cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sudah mencapai 82,05% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 100%. Dalam upaya peningkatan capaian Dinas kesehatan sudah mulai melaksanakan dengan pihak sekolah untuk pemantauan kesehatan secara virtual maupun offline bila memungkinkan serta sosialisasi untuk menanamkan kesadaran siswa untuk aktif mendeteksi kesehatan pribadi dan segera menghubungi pihak sekolah/tenaga kesehatan bila ada gejala.

8) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 s.d 59 Tahun) Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 hingga 59 tahun) sesuai standar mengharuskan seluruh penduduk dalam rentang usia tersebut memperoleh layanan skrining kesehatan secara menyeluruh. Skrining ini bertujuan untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit, menjaga produktivitas, serta mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Adapun cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) yang sesuai standar di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020–2024 disajikan dalam tabel 2.86

Tabel 2.86
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 s.d 59 Tahun) Sesuai Standardi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah warga negara Indonesia usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining sesuai standar	280.135	357.786	456.236	516.364	520.721
2	Jumlah warga negara Indonesia usia 15-59 tahun	540.662	516.638	512.226	516.364	524.877
3	Persentase warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	51,81	69,25	89.07	100	99,21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.86, capaian indikator ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dari 51,81% pada tahun 2020 menjadi hampir universal sebesar 99,21% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan serta meningkatnya akses dan layanan kesehatan. Rendahnya capaian pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat enggan mengunjungi fasilitas kesehatan. Sebagai bentuk intervensi, Dinas Kesehatan melaksanakan berbagai upaya inovatif seperti aktivasi kegiatan Posyandu Lansia, peningkatan kapasitas kader, serta pelibatan lintas sektor dalam mendukung kegiatan skrining kesehatan masyarakat.

9) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Warga Usia 60 Tahun Keatas Sesuai Standar

Setiap warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan

skrining usia 60 tahun keatas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Adapun cakupan warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 sebagaimana pada tabel 2.87

Tabel 2.87
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Warga Usia 60 Tahun Keatas Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah warga negara Indonesia berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan minimal 1 kali dalam satu tahun	72.733	99.987	91.826	117.293	120.976
2	Jumlah semua warga negara Indonesia berusia 60 tahun atau lebih	116.105	111.691	110.336	117.293	127.874
3	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	62,64	89.52	83.22	100	94,61

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.87, cakupan skrining lansia juga menunjukkan perkembangan yang baik, naik dari 62,64% (2020) ke puncaknya 100% (2023), dan sedikit menurun ke 94,61% (2024). Hal ini mencerminkan komitmen kuat terhadap pelayanan kesehatan lansia. Dengan populasi lansia yang terus meningkat, cakupan skrining ini menjadi sangat penting. Sebagai bentuk intervensi, Dinas Kesehatan melaksanakan berbagai upaya inovatif seperti aktivasi kegiatan Posyandu Lansia, peningkatan kapasitas kader, serta pelibatan lintas sektor dalam mendukung kegiatan skrining kesehatan masyarakat.

10) Persentase Anemia pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil merupakan salah satu masalah kesehatan yang penting untuk dipantau karena dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan janin. Persentase anemia ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program kesehatan ibu hamil. Adapun persentase anemia pada ibu hamil di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada gambar 2.42.

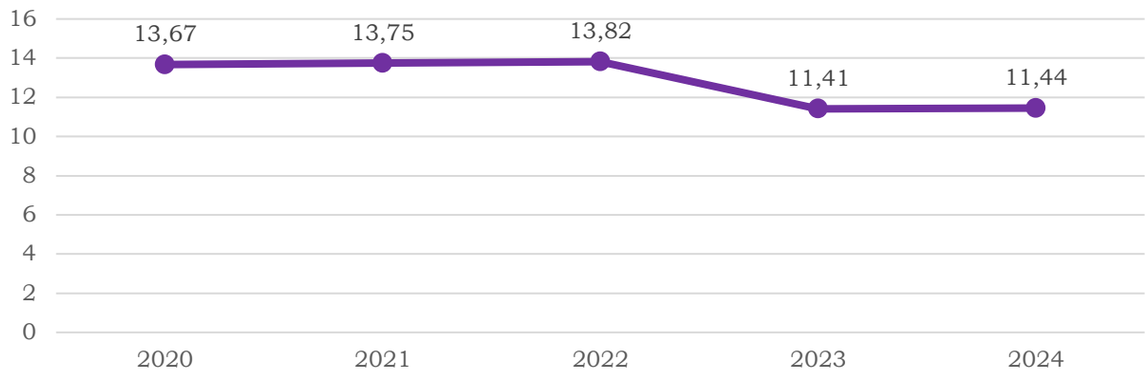

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.42
Persentase Anemia pada Ibu Hamil Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Persentase anemia pada ibu hamil di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan nilai dari 13,67% pada tahun 2020 menurun menjadi 11,44% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan dalam status gizi dan kesehatan ibu hamil selama periode tersebut. Meskipun demikian, angka anemia masih perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat ditekan lebih rendah lagi. Upaya peningkatan layanan kesehatan maternal dan suplementasi zat besi menjadi kunci penting dalam menurunkan prevalensi anemia pada ibu hamil.

11) Persentase Tempat Kerja yang Melaksanakan Kesehatan Kerja

Persentase tempat kerja yang melaksanakan program kesehatan kerja menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2021 ke 2022, yakni dari 4,6% menjadi 16,2%. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 11,6%, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam konsistensi pelaksanaan program kesehatan kerja. Untuk meningkatkan kembali persentase tersebut, diperlukan upaya penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas pengelola kesehatan kerja, dan pengawasan yang lebih ketat di tempat kerja.

12) Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dan ditularkan melalui droplet dari orang yang sudah terinfeksi. Dalam upaya pengendalian TB, pemerintah menetapkan indikator layanan pemeriksaan penunjang TB sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan. Target indikator ini adalah 100%, yang berarti

seluruh orang dengan gejala atau yang dicurigai TB wajib mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai standar untuk memastikan diagnosis dan pengobatan tepat waktu. Pelaksanaan indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan layanan kesehatan dasar. Adapun persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.88.

Tabel 2.88
Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	3.070	5.462	8.115	8.577	9.332
2	Jumlah orang terduga TBC	8.039	8.046	8.484	8.577	7.328
3	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	38,19	67,88	95.65	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada Tabel II.X, terjadi peningkatan signifikan dalam cakupan pelayanan pemeriksaan penunjang bagi orang terduga TBC di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, hanya 38,19% dari orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, namun angka ini terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2023 dan tetap dipertahankan pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang konsisten dari Dinas Kesehatan dalam memperkuat layanan deteksi dini dan diagnosis TBC. Capaian ini sangat penting mengingat deteksi dini merupakan langkah krusial dalam pengendalian dan pemutusan rantai penularan TBC di masyarakat.

13) Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel CD4, yang berperan penting dalam melawan infeksi. Jika tidak segera ditangani, HIV dapat berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*), yaitu kondisi di mana tubuh kehilangan kemampuan untuk melawan penyakit. Penularan HIV umumnya terjadi melalui hubungan seksual tanpa pengaman, penggunaan jarum suntik secara bergantian, transfusi darah yang terkontaminasi, serta dari ibu hamil yang terinfeksi kepada bayinya. Oleh karena itu,

deteksi dini dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah penyebaran virus serta meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV (ODHIV). Program deteksi dini HIV menjadi salah satu indikator penting dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, dengan target pelayanan sebesar 100% pada kelompok populasi berisiko. Adapun persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.89

Tabel 2.89
Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.352	9.338	11.086	11.230	10.406
2	Jumlah orang beresiko HIV	12.567	12.706	12.738	11.230	10.808
3	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV sesuai standar	74,42	73,49	87.03	100	96,28

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.89, cakupan pelayanan deteksi dini HIV bagi orang dengan risiko terinfeksi di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase cakupan masih berada di angka 74,42%, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 100% pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 96,28%. Capaian pelayanan deteksi dini HIV di Kabupaten Temanggung didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, keberadaan LSM Kalandara dan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Smile Plus yang aktif melakukan penjangkauan populasi kunci melalui kegiatan VCT mobile maupun rujukan statis ke puskesmas atau rumah sakit, serta adanya dukungan anggaran dari Global Fund AIDS. Selain itu, dukungan lintas sektor dan lintas program juga berperan dalam peningkatan skrining HIV/AIDS, terutama pada ibu hamil, pasien TB, dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

14) Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu Penyakit Tidak Menular (PTM) yang paling banyak diderita oleh masyarakat dan sering kali tidak menimbulkan gejala awal yang jelas. Kondisi ini berisiko menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal apabila tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Oleh karena itu, hipertensi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi termasuk dalam indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Adapun persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.90.

Tabel 2.90
Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyandang Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43.629	66.107	187.378	209.511	208.619
2	Jumlah estimasi penderita Hipertensi berdasarkan angka	218.228	213.442	221.010	209.511	231.727
3	Prevalensi Kabupaten Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19,99	30,97	84.78	100	90,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan Tabel 2.90, cakupan pelayanan untuk penderita hipertensi meningkat pesat dari 19,99% (2020) menjadi 100% (2023), lalu sedikit menurun menjadi 90,03% (2024). Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan cakupan pelayanan penderta hipertensi antara lain dengan mendorong pelaksanaan deteksi dini dan penemuan kasus hipertensi melalui kerjasama lintas program yang ada di Puskesmas; mendorong peningkatan pelayanan kasus hipertensi sesuai standar serta menghimpun data dari faskes swasta di wilayah kerja Puskesmas.

15) Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Diabetes Melitus (DM), atau yang dikenal juga sebagai penyakit kencing manis, merupakan salah satu Penyakit Tidak Menular (PTM)

yang disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah akibat gangguan pada sekresi insulin. Seiring dengan pola hidup yang kurang sehat, prevalensi penyakit DM cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sebagaimana halnya dengan hipertensi. Kondisi ini menjadikan DM sebagai salah satu fokus utama dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan bagi penderita DM ditetapkan sebagai salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Adapun persentase penderta Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel 2.91

Tabel 2.91
Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.084	9.456	13.066	13.469	12.007
2	Jumlah penyandang DM berdasarkan angka Prevalensi nasional	10.448	10.223	10.584	13.469	11.097
3	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	77,37	92,5	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.91, persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020–2024. Capaian ini meningkat dari 77,37% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2022 dan 2023, bahkan melampaui 100% pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 100%. Meskipun begitu, pada tahun 2024, jumlah penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar melebihi jumlah penyandang Diabetes Melitus berdasarkan angka prevalensi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan tidak hanya menjangkau seluruh estimasi jumlah penyandang DM berdasarkan prevalensi nasional, tetapi juga kemungkinan mencakup kasus baru yang belum terdeteksi sebelumnya atau rujukan dari wilayah lain.

16) Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2018 sesuai dengan regulasi Permenkes. Layanan ini bersifat promotif dan preventif, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik), mencegah kekambuhan, serta menghindari tindakan pemasungan. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat Puskesmas di wilayah kerjanya, melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan pelayanan meliputi edukasi, evaluasi kondisi jiwa, pemantauan kepatuhan pengobatan, peningkatan kebersihan diri, serta pelatihan aktivitas sederhana untuk mendukung fungsi sosial dan kemandirian ODGJ berat. Pelayanan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan hak-hak dasar kelompok rentan.

Tabel 2.92
Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar	1.643	2.030	2.061	2.102	2.112
2	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada	1.978	1.978	1.978	2.102	1.978
3	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	83,06	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.92, persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif dan preventif sesuai standar di Kabupaten Temanggung menunjukkan pencapaian yang signifikan. Pada tahun 2020, persentase tersebut mencapai 83,06%, namun sejak tahun 2021 hingga 2024, persentase pelayanan mencapai 100%, yang berarti bahwa seluruh ODGJ berat yang tercatat telah menerima pelayanan yang sesuai dengan standar. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan program kesehatan jiwa yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, yang berhasil meningkatkan

akses dan kualitas pelayanan bagi ODGJ berat, dengan fokus pada pendekatan promotif dan preventif guna mencegah kekambuhan dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

17) Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap

Cakupan imunisasi bayi lengkap merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Tingginya cakupan imunisasi menunjukkan upaya yang efektif dalam melindungi bayi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Adapun cakupan imunisasi bayi lengkap di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada gambar 2.43.

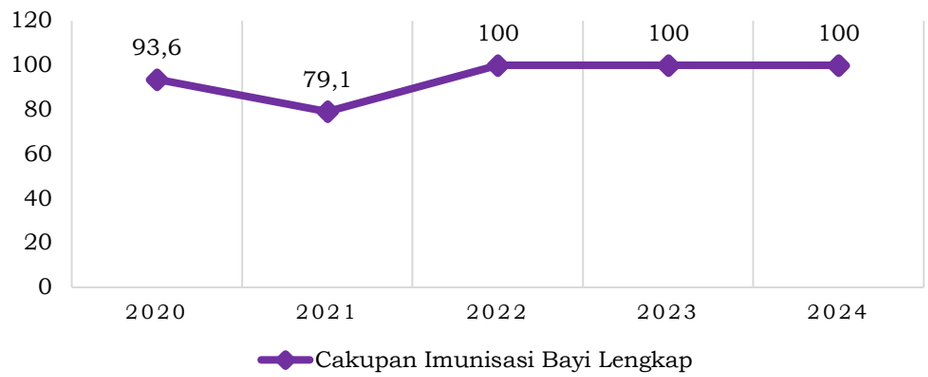

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.43
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Cakupan imunisasi bayi lengkap menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, cakupan turun drastis menjadi 79,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 93,6%. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2024, cakupan imunisasi kembali mencapai 100%, menandakan perbaikan layanan imunisasi yang sangat baik. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program imunisasi serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya imunisasi lengkap bagi bayi.

18) Cakupan Desa/Kelurahan STBM

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan nasional dalam upaya perubahan perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. Cakupan desa/kelurahan STBM menjadi indikator penting dalam mencerminkan tingkat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat komunitas. Adapun cakupan desa/keluarahan STBM di Kabupaten Temanggung disajikan pada gambar 2.44.

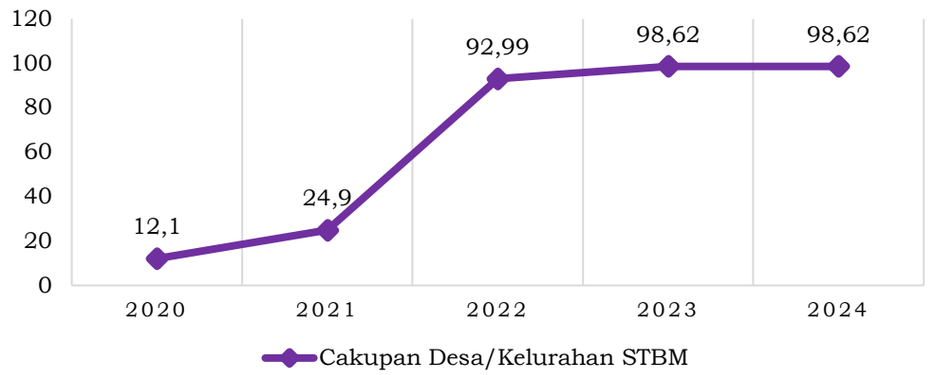

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.44
Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan STBM Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Dari 289 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung, cakupan yang menerapkan STBM meningkat drastis dari 12,1% pada tahun 2020 menjadi 98,62% pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan program sanitasi total berbasis masyarakat dalam meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal ini juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan pemerintah dalam penerapan STBM. Keberlanjutan program ini penting untuk menjaga kualitas sanitasi di wilayah tersebut.

19) Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat Kesehatan

Tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor penting dalam menjamin keamanan dan kualitas konsumsi masyarakat. Persentase ini mencerminkan efektivitas pengawasan serta kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan standar higienitas dalam proses pengolahan pangan. Adapun persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 sebagaimana pada Gambar 2.45.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.45
Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Persentase tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat kesehatan menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Setelah mengalami penurunan dari 81,5% pada tahun 2020 menjadi titik terendah 73,56% pada tahun 2022, capaian ini meningkat signifikan pada tahun 2023 dan stabil di angka 83,81% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya konsisten dalam menjaga keamanan pangan. Kualitas pengelolaan pangan yang baik sangat penting untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui makanan. Peningkatan dan pengawasan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan standar kesehatan pangan selalu terpenuhi.

20) Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi

Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2024. Setelah meningkat dari 2% pada tahun 2020 menjadi 2,6% di tahun 2022, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 2,4%, lalu kembali naik ke 2,5% di tahun 2024. Meskipun tren secara umum meningkat, perubahan yang tidak konsisten mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan ketersediaan tenaga medis yang proporsional terhadap jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan SDMK, termasuk upaya distribusi yang merata dan peningkatan retensi tenaga kesehatan di daerah.

21) Persentase Posyandu Aktif Bidang Kesehatan

Persentase posyandu aktif di bidang kesehatan meningkat dari 96,2% pada tahun 2023 menjadi 97,4% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan keberhasilan pembinaan kader serta meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar. Posyandu berperan penting dalam pelayanan preventif seperti pemantauan pertumbuhan balita, imunisasi, serta penyuluhan gizi dan kesehatan. Ke depan, perlu dilakukan pemerataan kualitas layanan antar posyandu untuk memastikan semua berjalan secara optimal.

22) Persentase Kecukupan SDMK Sesuai Standar

Persentase kecukupan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren sangat baik dengan capaian 100% selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023), meskipun sedikit menurun menjadi 88,56% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya kekosongan formasi atau peningkatan kebutuhan layanan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Secara keseluruhan, ketersediaan SDMK tetap berada pada tingkat yang tinggi dan mendekati target nasional. Diperlukan rekrutmen baru dan redistribusi tenaga kesehatan untuk kembali mencapai standar ideal.

23) Persentase SDMK Yang Mendapatkan Pelatihan

Capaian pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) terus menunjukkan peningkatan signifikan, dari hanya 1,13% pada tahun 2020 menjadi 18,55% di tahun 2024. Tren ini mencerminkan perhatian yang meningkat terhadap pengembangan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan. Pelatihan yang diberikan menjadi kunci dalam menjaga mutu layanan dan kesiapan SDMK dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat. Namun demikian, proporsi yang dilatih masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan agar seluruh tenaga kesehatan mendapatkan kesempatan pengembangan profesional secara merata.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing secara umum dibentuk dari pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dan perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dimaksud mencakup: 1) penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum; 2) penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 3) penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan perwujudan

aksesibilitas dan konektivitas wilayah dimaksud mencakup: 1) penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan; 2) dan pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi untuk memastikan pemerataan perkembangan wilayah di Kabupaten Temanggung. Adapun capaian infrastruktur kewilayahan berdaya saing dijabarkan pada tabel 2.93.

Tabel 2.93
Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**69,67**
Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan						
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	NA	NA	NA	NA	62,64
2	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	44,25	44,265	44,28	44,78	53,425
3	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	NA	NA	NA	NA	70,32
Perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah						
4	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	62,57	65,17	66,76	67,31	72,24
5	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	69,89	74,21	79,34	83,91	89,72

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.93, persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing di Kabupaten Temanggung mencapai 69,67% pada tahun 2024. Adapun gambaran indikator kinerja urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.94.

Tabel 2.94
Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					OPD Pengampu
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	%	NA	NA	NA	58,62	58,87	DPUPR
2	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	93,90	94,52	95,32	95,95	97,65	DPUPR
3	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari*	%	NA	NA	NA	NA	100	DPUPR
4	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	16,86	17,38	17,81	18,20	19,08	DPUPR

No	Indikator	Satuan	Tahun					OPD Pengampu
			2020	2021	2022	2023	2024	
5	Presentase saluran drainase kondisi baik	%	46,59	22,54	22,54	69,21	69,15	DPUPR
6	Persentase trotoar kondisi baik	%	NA	75,66	73,93	66,66	68,61	DPUPR
7	Persentase ketersediaan trotoar terhadap total 127embang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	%	NA	7,45	7,41	6,75	6,95	DPUPR
8	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik*	%	NA	NA	NA	NA	NA	DPUPR
9	Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG*	%	NA	NA	NA	NA	62,84	DPUPR
10	Persentase 127embang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota	%	83,33	89,29	88,15	89,16	88,92	DPUPR
11	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	92,28	92,88	92,88	94,36	94,36	DPUPR
12	Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	NA	NA	NA	22,48	22,59	DPUPR
13	Persentase pengembang jasa konstruksi yang dibina*	%	NA	NA	NA	NA	NA	DPUPR
14	Persentase jumlah TPS 3R	%	5,19	7,61	9,68	13,14	15,57	DPRKPLH
15	Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	NA	NA	2,50	5,22	3,11	DPRKPLH
16	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah 127embangu (SPM)	%	100	100	100	100	100	DPRKPLH
17	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang	%	NA	NA	NA	NA	90,18	DPUPR
18	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan*	%	NA	NA	NA	NA	16,67	DPUPR
Keterangan: *Indikator Baru								

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berbagai indikator yang berkaitan dengan infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya air, tata ruang, hingga sanitasi dan pengelolaan sampah mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang layak dan merata. Analisis terhadap capaian indikator tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai kemajuan yang signifikan, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan, kualitas layanan, dan keberlanjutan infrastruktur.

1) Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)

Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 masih berada dalam kategori “Kinerja Kurang”, dengan capaian sebesar 58,87%, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya

yang sebesar 58,62%. Peningkatan ini tergolong stagnan dan belum cukup signifikan untuk mendorong sistem irigasi ke kategori kinerja yang lebih baik. Rincian aspek pada Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.95.

Tabel 2.95
Rincian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 – 2024

Tahun	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)						
	Prasarana Fisik	Produktivitas	Sarana Penunjang	Organisasi Personalia	Dokumentasi	P3A/ GP3A / IP3A	Jumlah
	Nilai Maks 45%	*Nilai Maks 15%*	*Nilai Maks 10%*	*Nilai Maks 15%*	*Nilai Maks 5%*	*Nilai Maks 10%*	*Nilai Maks 100%*
2023	21,73	9,65	6,94	10,26	3,93	6,12	58,62
2024	21,98	9,68	6,92	10,24	3,93	6,12	58,866

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Salah satu penyebab utama dari belum optimalnya capaian IKSI adalah masih rendahnya kondisi prasarana fisik irigasi, yang hanya mencatat nilai 21,98% dari total bobot maksimal 45% pada tahun 2024. Aspek ini merupakan komponen terbesar dalam penilaian IKSI, sehingga kondisi prasarana yang belum layak sangat memengaruhi skor total. Berdasarkan rincian pada Tabel II.X, 128embangu besar aspek lainnya seperti produktivitas (9,68%), sarana penunjang (6,92%), organisasi personalia (10,24%), dokumentasi (3,93%), dan peran serta P3A/GP3A/IP3A (6,12%) mengalami stagnasi atau tidak mengalami perubahan berarti dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain prasarana fisik, aspek pengelolaan dan pendukung lainnya juga belum mengalami peningkatan signifikan. Dengan demikian, perlu dilakukan 128 embang strategis dan terintegrasi, khususnya pada rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi, serta penguatan kelembagaan pengelola irigasi, agar IKSI Kabupaten Temanggung dapat meningkat dan mendukung ketahanan pangan serta keberlanjutan pertanian secara optimal.

2) Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum

Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum di Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan dari 93,90% pada tahun 2020 menjadi 97,65% pada tahun 2024, sebagaimana dirinci dalam tabel 2.96.

Tabel 2.96
Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	228.998	254.563	257.570	260.833	268.376
2	Jumlah rumah tangga	243.869	269.331	270.220	271.854	274.845
3	Persentase (%)	93,90	94,52	95,32	95,95	97,65

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Capaian tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang dapat memenuhi kebutuhan air minum dari sumber yang layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini mencerminkan keberhasilan program penyediaan air minum yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan ke depan terletak pada pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, peningkatan kualitas air agar memenuhi standar kesehatan, serta pemerataan layanan khususnya di wilayah-wilayah terpencil atau yang memiliki hambatan geografis. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, penyedia layanan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pemerataan dan keberlanjutan akses air minum di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

3) Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari

Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari mencapai 100% pada tahun 2024 di Kabupaten Temanggung. Meskipun indikator ini merupakan indikator baru dan belum memiliki data tren dari tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut merupakan sinyal positif bahwa seluruh penduduk telah terlayani dalam pemenuhan kebutuhan dasar air minum. Kondisi tersebut mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat atas akses air minum.

4) Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; (2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau

di halam rumah (on premises); (3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan (4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Tabel 2.97
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggan PDAM	44.782	46.963	48.430	49.986	52.656
2	Jumlah KK Kabupaten Temanggung	265.590	270.220	271.854	274.677	276.110
3	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	16,86	17,38	17,81	18,20	19,07

Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2037 (data diolah)

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan menggunakan basis data yang bersumber dari jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebagai operator yang telah memenuhi kriteria air minum aman di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut disebabkan karena 130 embangu besar capaian akses air minum di Kabupaten Temanggung merupakan jaringan perpipaan perdesaan yang dikelola oleh KPSPAM, yang mana dalam pengelolaannya belum semua KPSPAM yang rutin dalam melakukan pengujian kualitas air minum sehingga belum dapat memenuhi kriteria Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

5) Presentase Saluran Drainase Kondisi Baik

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/405 Tahun 2018 Tentang Ruas-Ruas Jalan yang Berstatus Sebagai Jalan Kabupaten ada penyesuaian 130embang drainase. Panjang drainase yang menjadi tanggung jawab DPUPR adalah 155,363 km dengan saluran drainase kondisi baik sebagaimana pada tabel 2.98.

Tabel 2.98
Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jaringan drainase kondisi baik	303,04	146,645	104,567	107,519	107,431
2	Panjang keseluruhan jaringan drainase	650,467	650,467	151,457	155,363	155,363

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	skala kawasan/kota yang ada					
3	Persentase (%)	46,59	22,54	69,04	69,21	69,15

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.98, pada tahun 2024, saluran drainase dalam kondisi baik mencapai 69,15%, atau sepanjang 107,431 km dari total jaringan drainase yang ada. Capaian ini menunjukkan upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas drainase yang cukup konsisten dalam dua tahun terakhir. Sejak 2022, ketika terjadi lonjakan signifikan dari 22,54% menjadi 69,04%, capaian persentase kondisi baik 131embangu stabil di kisaran 69%, meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2024 dibandingkan 2023 (69,21%).

6) Persentase Trotoar Kondisi Baik

Panjang trotoar Kabupaten Temanggung tidak sama dengan keseluruhan 131embang jalan Kabupaten Temanggung karena setiap jalan kabupaten tidak selalu disertai trotoar. Hal ini menjadikan indikator persentase trotoar dalam kondisi baik menjadi penting untuk melihat sejauh mana fasilitas pejalan kaki dipelihara dan difungsikan secara optimal. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, panjang trotoar kondisi baik di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 cenderung mengalami penurunan sebagaimana pada tabel 2.99.

Tabel 2.99
Persentase Trotoar Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Trotoar Kondisi Baik (m)	NA	55.908,25	55.563,26	50,646.06	52.121,01
2	Panjang Trotoar Kabupaten (m)	NA	73.891,41	75.161,01	75,972.01	75,972.01
3	Persentase (%)	NA	75.66	73.93	66.66	68.61

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.99, persentase trotoar dalam kondisi baik di Kabupaten Temanggung mengalami tren penurunan dari tahun 2021 yang sebesar 75,66%, menjadi 68,61% pada tahun 2024. Penurunan kondisi ini dapat mengindikasikan adanya tantangan

dalam aspek pemeliharaan fasilitas trotoar, baik dari segi teknis maupun anggaran. Sebagaimana data kondisi trotoar Kabupaten Temanggung tahun 2024 pada tabel 2.99 masih terdapat 6.443,10 meter trotoar dengan kondisi rusak ringan.

Tabel 2.100
Kondisi Trotoar Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	Wilayah Kewenangan	Panjang Trotoar (m)		
		Total	Kondisi Baik	Rusak Ringan
1	UPTD Regional I Wilayah Temanggung	30,569.31	18,935.11	1,208.10
2	UPTD Regional II Wilayah Parakan	18,386.00	17,123.00	
3	UPTD Regional III Wilayah Ngadirejo	12,013.00	5,400.00	4,532.00
4	UPTD Regional IV Wilayah Kranggan	8,762.00	6,509.00	703.00
5	UPTD Regional V Wilayah Kandangan	4.541,00	2,804.00	
6	UPTD Regional VI Wilayah Tembarak	1.700,70	1,349.90	
	Total	**75,972.01**	**52,121.01**	**6,443.10**

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Dari ke enam wilayah UPTD di Kabupaten Temanggung, wilayah UPTD Regional III (Ngadirejo) menunjukkan proporsi kerusakan ringan pada trotoar yang cukup signifikan (4,532 meter). Mengingat pentingnya keberadaan trotoar untuk keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas fasilitas ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan 132embangunan infrastruktur.

7) Persentase Ketersediaan Trotoar Terhadap Total Panjang Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

Sebagaimana pada tabel 2.101, panjang jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten Temanggung sepanjang 650,476 km, jalan kewenangan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 54,46 km, dan jalan nasional sepanjang 45,18 km.

Tabel 2.101
Panjang Jalan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional Temanggung Tahun 2024

No	Keterangan	Panjang (km)
A	**Jalan Kabupaten**	**650,476**
B	**Jalan Provinsi**	**54,46**
1	Parakan-Patean/Batas Kabupaten Temanggung	23,75
2	Temanggung-Pertigaan Bulu	5,58
3	Pringsurat – Kranggan	7,79
4	Temanggung-Kaloran/Batas Kabupaten Semarang	17,34

No	Keterangan	Panjang (km)
C	**Jalan Nasional**	**45,18**
1	Batas Kabupaten Wonosobo/Temanggung – Parakan	11,18
2	Parakan – Pertigaan Bulu	1,58
3	Pertigaan Bulu – Kedu	4,84
4	Kedu – Batas Kota Temanggung	2,92
5	Jl. Hayam Wuruk	1,03
6	Jl. Gadjah Mada	1,31
7	Jl. Diponegoro	0,74
8	Jl. Suparman	0,48
9	Jl. Sudirman	2,33
10	Jl. Suwandi – Jl. Suwardi	1,23
11	Batas Kota Temanggung – Kranggan	1,62
12	Kranggan – Secang	6,7
13	Pringsurat – Batas Temanggung	9,22

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Persentase ketersediaan trotoar terhadap total 133 embang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten di Kabupaten Temanggung masih 133 embangu rendah dan mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, persentase ketersediaan mencapai 6,95%, sedikit mengalami peningkatkan dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,75%. Namun demikian, angka ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang sempat mencapai 7,45%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 133embangunan trotoar belum sepenuhnya merata di seluruh jaringan jalan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan infrastruktur untuk menciptakan ruang jalan yang lebih inklusif dan ramah pejalan kaki.

8) Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik

Persentase 133 emban pemerintah dalam kondisi baik merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2024. Indikator ini penting untuk memantau kondisi fisik aset pemerintah yang digunakan dalam pelayanan publik. Penilaian terhadap kelayakan 133 emban mencakup aspek 133 embanguna, fungsional, serta keselamatan, dan menjadi dasar bagi perencanaan pemeliharaan atau rehabilitasi bangunan.

9) Persentase Penerbitan PBG dan SLF Terhadap Pengajuan PBG dan SLF Melalui SIMBG

Sejak diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan bangunan 133emban yang

tertib dan andal khususnya dalam proses penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF).

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah dokumen perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada pemilik bangunan 134emban untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan 134emban sesuai dengan standar teknis bangunan 134emban. Sedangkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan 134 emban sebelum bangunan 134emban tersebut dimanfaatkan.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan substansi fundamental dalam proses penyelenggaraan perizinan bangunan 134 emban yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dengan terbitnya peraturan tersebut, substansi pada aplikasi SIMBG berubah dan diperlukan penyesuaian. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

SIMBG merupakan portal perizinan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Layak Fungsi, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung. SIMBG diharapkan dapat membantu pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan bangunan 134emban sehingga lebih tertib dan transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya SIMBG, diharapkan proses penyelenggaraan bangunan 134emban juga menjadi lebih efektif dan koordinasi antar perangkat daerah terkait menjadi lebih jelas.

Capaian persentase penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui SIMBG sebesar 62,84% pada tahun 2024 menunjukkan 134 embangu positif dalam upaya digitalisasi perizinan dan penataan bangunan 134emban di Kabupaten Temanggung. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong tata 134 emban perizinan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar seluruh proses perizinan bangunan

135 emban dapat sepenuhnya terintegrasi dalam sistem SIMBG, sehingga memudahkan monitoring, mempercepat layanan, dan memastikan kesesuaian 135embangunan dengan standar teknis serta ketentuan tata ruang yang berlaku.

10) Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota

Jalan kondisi permukaan mantap merupakan jalan kewenagan kabupaten yang mempunyai kondisi perkerasan mantap serta dapat berfungsi melayani transportasi dengan baik. Yang dimaksud kondisi permukaan mantap dalam indikator ini adalah ruas jalan dalam kondisi baik (kerusakan <11 %) dan sedang (kerusakan <23%). Adapun panjang jalan kondisi permukaan mantap di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.102.

Tabel 2.102
Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan kondisi mantap (kondisi baik dan kondisi sedang) (km)	542,047	580,790	573,366	579,972	578,40
2	Panjang Jalan Kabupaten (km)	650,476	650,476	650,476	650,476	650,476
3	Persentase (%)	83,33	89,29	88,15	89,16	88,92

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana pada Tabel II.X, 135 embang jalan dengan kondisi permukaan mantap di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan secara umum dalam lima tahun terakhir, dengan persentase tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 89,29%. Pada tahun 2024, jalan mantap mencapai 578,40 km atau setara dengan 88,92% dari total 135 embang jalan kabupaten sepanjang 650,476 km. Capaian ini menunjukkan kinerja pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan secara menyeluruh.

11) Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik

Yang dimaksud dengan jembatan kondisi baik yaitu jembatan kewenangan kabupaten dengan struktur atas dan struktur bawah

dalam kondisi baik sehingga secara keseluruhan jembatan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Kabupaten Temanggung memiliki 337 unit jembatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan jumlah jembatan kondisi baik pada tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.103.

Tabel 2.103
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jembatan dalam kondisi baik (unit)	313	313	313	318	318
2	Jumlah jembatan kabupaten (unit)	337	337	337	337	337
3	Persentase (%)	92,88	92,88	92,88	94,36	94,36

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data DPUPR Kabupaten Temanggung, persentase jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 – 2024 mengalami peningkatan dari 92,28% pada 2020 menjadi stabil di 94,36% sejak 2023. Hal ini menunjukkan bahwa 136embangu besar jembatan di bawah kewenangan kabupaten berada dalam kondisi 136embanguna yang baik, baik dari sisi struktur atas maupun struktur bawah, dan secara keseluruhan mampu mendukung fungsi layanan transportasi dengan optimal yang mendukung konektivitas antarwilayah.

12) Persentase Jalan dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan

Gubernur Jawa Tengah menetapkan jalan berdasarkan fungsi jalan pada kabupatn/kota di Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/12 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104
Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Temanggung Berdasarkan Fungsinya

No	Keterangan	Panjang (km)
1	Jalan Kolektor Primer-4 (JKP4)	21,63
2	Jalan Lokal Primer (JLP)	193,87
3	Jalan Lingkungan Primer (Jling-P)	2,29
4	Jalan Arteri Sekunder (JAS)	0

No	Keterangan	Panjang (km)
5	Jalan Kolektor Sekunder (JKS)	1,71
6	Jalan Lokal Sekunder (JLS)	430,52
7	Jalan Lingkungan Sekunder (Jling-S)	782,64
8	**Panjang Ruas**	**1.432,66**

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/ 12 Tahun 2023

Tabel 2.105
Jalan Kewenangan Kabupaten dengan Lebar Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Wilayah	Panjang Ruas (Km)	Panjang Ruas (Km)	
			Lebar Sudah Standar	Lebar Belum Standar
1	UPTD Regional I Wilayah Temanggung	62,992	26,727	36,265
2	UPTD Regional II Wilayah Parakan	102,9	37,166	65,734
3	UPTD Regional III Wilayah Ngadirejo	158,77	27,57	131,2
4	UPTD Regional IV Wilayah Kranggan	127,784	5,23	122,554
5	UPTD Regional V Wilayah Kandangan	127,75	40,955	86,795
6	UPTD Regional VI Wilayah Tembarak	20,28	9,285	60,995
	Jumlah	650,476	146,933	503,543
	Persentase		**22,59**	**77,41**

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data dari DPUPR Kabupaten Temanggung sebagaimana pada tabel 2.105 dari total 137 embang jalan kabupaten di Kabupaten Temanggung sepanjang 650,476 km, hanya 146,933 km atau sekitar 22,59% yang memiliki lebar jalan sesuai standar, sementara sisanya sebesar 503,543 km (77,41%) masih belum memenuhi standar lebar yang ditetapkan. Ketimpangan paling mencolok terlihat di wilayah UPTD Regional III (Ngadirejo) dan UPTD IV (Kranggan), yang memiliki 137embang ruas belum standar cukup besar, masing-masing 131,2 km dan 122,554 km. Kondisi ini menunjukkan bahwa 137embangu besar ruas jalan kabupaten masih memerlukan peningkatan lebar jalan sesuai standar untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

13) Persentase Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina

Lembaga jasa konstruksi merupakan penyedia layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Konsultansi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau 137embangu kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan

pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau 138embangu kegiatan yang meliputi 138 embangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 138embangunan 138embang suatu bangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023, kabupaten/kota mempunyai kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi termasuk di dalamnya melakukan pembinaan pengawasan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, serta pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan pembinaan pengawasan serta menjadi salah satu indikator kinerja baru yang mulai digunakan pada tahun 2024. Indikator ini penting untuk mengukur sejauh mana peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

14) Persentase Jumlah TPS 3R

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi salah satu prioritas penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Temanggung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui 138embangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.X yang memuat jumlah TPS 3R yang telah dibangun di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.106
Persentase Jumlah TPS 3R di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah TPS 3R	15	22	28	38	45
2	Jumlah Desa/Kelurahan	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	5,19	7,61	9,68	13,14	15,57

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.106 jumlah TPS 3R di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 15 unit (5,19%) pada tahun 2020 menjadi 45 unit (15,57%) pada tahun 2024. Meskipun capaian tersebut cukup rendah, namun konsisten terjadi peningkatan yang mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

15) Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)

Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher

angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan 139emban septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah 139embangu terpusat (SPALD-T). Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat. Adapun capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.107.

Tabel 2.107
Akses Sanitasi Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KK dengan akses sanitasi aman	NA	NA	5.631	14.044	8.686
2	Jumlah KK	NA	NA	225.325	269.251	274.845
3	Persentase (%)	NA	NA	2,50	5,22	3,16

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024, terjadi peningkatan dari 2,50% (2022) menjadi 5,22% (2023), capaian ini menurun menjadi 3,16% pada tahun 2024. Penurunan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung ini dikarenakan adanya penyesuaian kriteria sanitasi aman dalam pengambilan data. Jika dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga di Kabupaten Temanggung, angka ini masih kecil, mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan cakupan sanitasi aman demi terpenuhinya pelayanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.

16) Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPM)

Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah 139 embangu di Kabupaten Temanggung tercatat stabil di angka 100% sejak tahun 2020 hingga 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh penduduk telah terlayani dalam hal pengolahan air limbah 139embangu, baik melalui sistem individual maupun terpusat.

Kondisi ini merupakan pencapaian yang sangat positif dalam upaya menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak hanya menjangkau seluruh warga, tetapi juga berjalan secara efektif dan berkelanjutan, termasuk aspek pengelolaan lumpur tinja, pemeliharaan instalasi, serta kepatuhan terhadap standar teknis dan lingkungan.

17) Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang

Penataan ruang sesuai Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sesuai dengan amanat tersebut, penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dibentuk oleh dua indikator turunan yakni 1) Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan; dan 2) persentase pemanfaaatan dan pengendalian tata ruang. Adapun persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 53% sebagaimana pada tabel 2.108.

Tabel 2.108
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	NA	NA	NA	NA	16,67
2	Persentase pemanfaaatan dan pengendalian tata ruang	NA	NA	NA	NA	90,18
3	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	NA	NA	NA	NA	53

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan merupakan indikator baru, dengan capaian awal 16,67% pada 2024. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 telah diamanatkan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 6 (enam) kawasan perkotaan yang terdiri dari Kawasan Perkotaan Temanggung, Parakan, Kranggan, Pringsurat, Ngadirejo dan Candiroto. Dalam proses implementasinya, Kabupaten Temanggung sudah menerbitkan 1 (satu) dokumen RDTR

melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Temanggung Tahun 2024-2044. Sedangkan pelaksanaan Penyusunan RDTR pada kawasan perkotaan lainnya ditargetkan dapat diselesaikan pada periode RPJMD 2024-2044.

18) Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Ditetapkan

Persentase pemanfaatan ruang sesuai tata ruang merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2024, dengan capaian sebesar 90,18%. Angka ini mencerminkan 141 embang kesesuaian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (RTR) yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Temanggung secara rutin melakukan kajian dalam proses persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yang berperan penting dalam memastikan bahwa rencana pemanfaatan ruang, baik untuk kegiatan berusaha, non-berusaha telah sesuai dengan RTR yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya 141embangunan yang tertib, terarah, dan berkelanjutan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk mencapai infrastruktur perkotaan, perdesaan, dan kawasan pertumbuhan ekonomi dengan kualitas baik sehingga menciptakan infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing di Kabupaten Temanggung, maka memerlukan intervensi pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Adapun gambaran urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel 2.109.

Tabel 2.109
Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara korban bencana yang	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
	memperoleh rumah layak huni (SPM)						
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100
4	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	%	90,24	91,15	94,75	95,50	96,31
5	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	%	0	22	31	33	48,80
6	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	23,56	42,79	50,21	57,16	64,70
7	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga*	%	NA	NA	NA	NA	74,72
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Gambaran capaian kinerja program pada urusan pemerintahan wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Temanggung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di daerah.

1) Persentase Rusunawa yang Dikelola dengan Baik

Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik pada lima tahun terakhir men capai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sudah optimal dan konsisten di keenam Rusunawa di Kabupaten Temanggung. Pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan dan fasilitas hunian vertikal.

2) Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (SPM)

Setiap warga Negara yang terdampak bencana yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal berhak mendapatkan rumah layak huni yang mana merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun.

Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni di Kanbupaten Temanggung mencapai angka 100% selama lima tahun terakhir. Artinya, seluruh korban bencana selalu difasilitasi pemenuhan kebutuhan hunian layak sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini mencerminkan respons cepat pemerintah Kabupaten Temanggung dalam penanganan pascabencana.

3) Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (SPM)

Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Temanggung konsisten mencapai angka 100% selama periode 2020 – 2024. Pada tahun 2020 sebanyak 27 rumah relokasi tertangani (100%), sementara dari tahun 2021 – 2022 tidak ada rumah yang terdampak relokasi yang harus ditangani sehingga capaian indikator sebesar 100%. Pada tahun 2023 sebanyak 24 rumah relokasi tertangani (100%) melalui Program Bantuan Rumah RUSPIN oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pada tahun 2024 tidak ada kegiatan relokasi program pemerintah sehingga capaian sebesar 100%.

Indikator persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah dan memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terdampak. Dukungan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program-program pemerintah, sehingga kelangsungan program dapat berjalan dengan lebih lancar. Namun, dalam implementasinya,

terdapat beberapa faktor penghambat. Di antaranya adalah syarat bahwa warga calon penerima bantuan harus memiliki lahan yang tersedia untuk relokasi, serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai proses relokasi tersebut.

4) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan dengan memenuhi:

1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Berdasarkan kriteria tersebut, indikator persentase rumah tangga dengan akses hunian layak mencerminkan seberapa besar proporsi rumah tangga yang tinggal di hunian yang memenuhi kriteria kelayakan, baik dari aspek fisik bangunan, sanitasi, akses air bersih, hingga lingkungan sekitar. Oleh karena itu, capaian indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam menilai kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat. Adapun persentase rumah tangga dengan kases hunian layak di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.110.

Tabel 2.110
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah layak huni (unit)	177.349	179.150	206.231	208.691	211.288
2	Jumlah rumah (unit)	196.536	196.536	217.652	218.519	219.386
3	Persentase (%)	90,24	91,15	94,75	95,50	96,31

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 2.110 persentase rumah layak huni dari tahun 2020 – 2025 cenderung mengalami peningkatan dari 90,24% pada 2020 menjadi 96,31% di 2024. Sampai dengan tahun 2024

jumlah rumah layak huni sebanyak 211.288 unit dari total rumah di Kabupaten Temanggung sebanyak 219.386 unit. Pembangunan rumah layak huni dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan rumah layak huni menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten Temanggung, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI.

5) Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani

Kawasan permukiman kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria yang dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak diantaranya dengan melihat tujuh aspek kekumuhan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh antara lain: (1) Kondisi bangunan gedung; (2) Kondisi jalan lingkungan; (3) Kondisi penyediaan air minum; (4) Kondisi drainase lingkungan; (5) Kondisi pengelolaan limbah; (6) Kondisi pengelolaan persampahan; dan (7) Kondisi proteksi kebakaran.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021 luasan kawasan kumuh di Kabupaten temanggung ditetapkan sebesar 176,84 hektare. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi melalui pendekatan pemetaan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, serta berdasarkan kesepakatan bersama Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah luasan tersebut mengalami perubahan menjadi 90,54 hektare pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen dalam meningkatkan kulitas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung melalui program dan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh sehingga tercapai capaian sebagaimana pada tabel 2.111.

Tabel 2.111
Persentase Luas Kawaan Kumuh yang Tertangani Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan Kumuh Tertangani (Ha)	0	38,32	55,43	55,43	86,3
2	Luas Kawasan Kumuh Perkotaan (Ha)	176,84	138,52	121,41	121,41	90,54
3	Persentase (%)	0	22	31	33	48,80

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.111, terlihat adanya tren positif dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024. Persentase kawasan kumuh yang berhasil ditangani meningkat secara signifikan dari 0% pada tahun 2020 menjadi 48,80% pada tahun 2024. Peningkatan penanganan kawasan kumuh ini antara lain melalui kegiatan perbaikan RTLH untuk meningkatkan aspek bangunan gedung dan pembangunan infrastruktur sanitasi untuk meningkatkan aspek pengelolaan limbah, serta meningkatkan sinergitas dengan DPUPR Kabupaten Temanggung dalam upaya meningkatkan aspek lainnya. Komitmen pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh menjadi faktor kunci dalam pencapaian ini, meskipun ke depan diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target penanganan secara menyeluruh.

6) Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Permasalahan rumah tidak layak huni merupakan salah satu tantangan dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Di Kabupaten Temanggung, upaya penanganan rumah tidak layak huni menjadi bagian penting dari program peningkatan kualitas permukiman yang dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui berbagai intervensi terus berkomitmen untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 tersaji sebagaimana pada tabel 2.112.

Tabel 2.112
Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tidak layak huni (unit)	17.535	13.125	11.421	9.828	8.098
2	Jumlah rumah (unit)	196.536	196.536	217.652	218.519	219.386
3	Persentase (%)	8,12	6,05	5,25	4,5	3,69

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Data pada tabel 2.112 menunjukkan adanya penurunan yang konsisten pada jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024. Jumlah rumah tidak layak huni berkurang dari 17.535 unit pada tahun 2020 menjadi 8.098 unit pada tahun 2024, atau menurun sekitar 53,84% dalam lima tahun. Persentase rumah tidak layak huni terhadap total jumlah rumah juga menunjukkan tren menurun, dari 8,12% pada tahun 2020 menjadi 3,69% pada tahun 2024. Penanganan RTLH menjadi RLH dilaksanakan diantaranya melalui Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, Program BSPS, serta pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten. Kondisi ini memperlihatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

7) Persentase Kepemilikan Rumah Terhadap Jumlah Kepala Keluarga

Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan dan akses masyarakat terhadap hunian layak. Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak kepala keluarga yang telah memiliki tempat tinggal sendiri, yang mencerminkan kestabilan sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap rumah sewa, kontrakan, atau bahkan kondisi hunian tidak tetap, yang dapat berdampak pada kualitas hidup dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, peningkatan angka kepemilikan rumah menjadi salah satu fokus kebijakan perumahan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial. Adapun persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.113.

Tabel 2.113
Persentase Kepemilikan Rumah Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Persentase *Backlog*
2020	262.643	215.918	82,21%
2021	270.220	216.785	80,23%
2022	271.854	217.652	80,06%
2023	276.110	218.519	79,14%
2024	274.845	219.386	79,82%

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan Tabel II.X, kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga di Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024 mengalami fluktuasi. Meskipun jumlah rumah mengalami peningkatan setiap tahun, namun pertumbuhan jumlah kepala keluarga cenderung lebih cepat, sehingga menyebabkan persentase kepemilikan rumah mengalami penurunan dari 82,21% pada tahun 2020 menjadi titik terendah 79,14% pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 79,82%, kondisi ini mengindikasikan bahwa *backlog* perumahan masih menjadi tantangan, yang menunjukkan perlunya intervensi strategis dan peningkatan program penyediaan rumah layak huni, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya percepatan pembangunan rumah bersubsidi, kemitraan dengan sektor swasta, serta kebijakan insentif perumahan menjadi langkah penting untuk mengatasi kesenjangan ini.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas sosial, ketertiban wilayah, serta perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai potensi gangguan dan bencana. Di Kabupaten Temanggung, urusan ini dilaksanakan melalui peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berbagai program dan layanan telah dijalankan dalam upaya meningkatkan penegakan peraturan, kecepatan respon darurat, serta kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di tingkat masyarakat. Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan urusan ini adalah Indeks Risiko Bencana (IRB), yang menunjukkan tingkat potensi kerugian akibat bencana di suatu wilayah. Salah satu upaya mitigasinya dilakukan yaitu melalui penguatan kapasitas masyarakat

dalam menghadapi bencana dengan pengembangan *Desa Tangguh Bencana* (Destana). Indikator lain yang juga menjadi perhatian adalah *Indeks Ketahanan Daerah* (IKD), yang menggambarkan kapasitas suatu daerah dalam menghadapi, menyesuaikan diri, dan pulih dari dampak bencana. IKD mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi yang saling terkait, serta menjadi acuan penting dalam perencanaan kebijakan penanggulangan bencana yang berkelanjutan dan berbasis risiko di daerah.

1) Indeks Risiko Bencana (IRB)

Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Namun pada tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari "rawan" menjadi "risiko" menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko).

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana adalah semakin baik, sehingga penentuan ini korelasinya negatif. Tabel dibawah ini merupakan penentuan indeks risiko bencana di Kabupaten Temanggung. Adapun Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan sebagaimana pada tabel 2.114.

Tabel 2.114
Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Kriteria	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana (IRB)	134,51	121,33	110,38	116,84	105,76
Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: BNPB, 2025

Indeks Risiko Bencana menurut dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dikategorikan menjadi tiga kelas antara lain:

1. Kategori kelas risiko rendah memiliki skor sebesar <13
2. Kategori kelas risiko sedang memiliki skor sebesar 13 – 144
3. Kategori kelas risiko tinggi memiliki skor sebesar >144

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan skor Indeks Risiko Bencana, Kabupaten Temanggung termasuk dalam kategori kelas risiko sedang.

2) Cakupan Desa Tangguh Bencana (Destana)

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yangmengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Adapun cakupan Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan sebagaimana pada tabel 2.115.

Tabel 2.115
Cakupan Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Tangguh Bencana	15	18	26	26	34
2	Jumlah Desa Rawan Bencana	213	217	217	217	217
3	Cakupan Desa Tangguh Bencana	7,04	8,29	11,98	11,98	15,67

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, 2025

Pembentukan Destana dilakukan sejak tahun 2018, sampai dengan tahun 2024 terus dilakukan dan mengalami peningkatan. Data pada

Tabel II.X menunjukkan perkembangan positif dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024. Jumlah desa yang telah ditetapkan sebagai Destana meningkat dari 15 desa pada tahun 2020 menjadi 34 desa pada tahun 2024. Namun, dibandingkan dengan total desa rawan bencana yang tetap berjumlah 217 desa selama lima tahun tersebut, cakupan Destana masih relatif rendah meskipun terus meningkat, dari 7,04% pada tahun 2020 menjadi 15,67% pada tahun 2024. Peningkatan cakupan ini mengindikasikan komitmen pemerintah daerah dalam membangun kapasitas desa untuk mandiri dalam penanggulangan bencana. Meski demikian, dengan lebih dari 84% desa rawan bencana yang belum tergolong sebagai Destana, dibutuhkan percepatan program pengembangan Destana secara lebih masif dan merata agar ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat ditingkatkan secara menyeluruh.

3) Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana suatu daerah mampu menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari kejadian bencana. Nilai Indeks Ketahanan Daerah berada pada rentang nilai 0–1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah:

- Indeks ≤0,4 adalah Rendah
- Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang
- Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi

Berdasarkan hasil penilaian IKD di Kabupaten Temanggung, Indeks Ketahanan Daerah dari Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, dengan rincian sebagai pada tabel 2.116.

Tabel 2.116
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	-	0,51	0,54	0,52	0,58

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung berkisar antara 0,51 hingga 0,58, yang menunjukkan bahwa kapasitas daerah masih berada dalam kategori "sedang". Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu terus

meningkatkan kebijakan, strategi pengurangan risiko bencana, serta kualitas dan kuantitas program penanggulangan bencana guna mengurangi dampak negatif bencana.

4) Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Temanggung mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat peran aparat penegak hukum, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Berbagai upaya seperti peningkatan patroli keamanan, penyuluhan hukum, serta penanganan cepat terhadap potensi konflik telah berkontribusi secara signifikan terhadap terciptanya suasana yang kondusif di wilayah Kabupaten Temanggung sepanjang tahun 2024.

5) Persentase Penegakan Perda/Perbup

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perbup). Persentase penegakan Perda/Perbup di Kabupaten Temanggung menunjukkan konsistensi selama lima tahun terakhir yaitu mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa setiap pelanggaran yang dilaporkan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Pada tahun 2021 tim Penegakan Perda Satpol PP berhasil menutup aktifitas galian C di desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung dan permasalahan sewa penggunaan lahan Pemda di perumahan Madureso Temanggung Tahun 2021. Pada tahun 2022 strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menagani pelanggaran perda reklame sedikit berubah yaitu dengan adanya instruksi Bupati agar setiap Kecamatan membantu Satpol PP dalam menertibkan reklame yang melanggar Perda sehingga meskipun dengan keterbatasan sarana serta anggaran, semua pelanggaran Perda dapat terselesaikan (100%). Selain penegakan Perda K4/reklame juga terdapat pelanggaran Perda PGOT yaitu anak punk yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Mayoritas anak punk tersebut berasal dari luar Kabupaten Temangung.

Selain melihat indikator Indeks Risiko Bencana, Cakupan Desa Tanggap Bencana (Destana), dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terdapat indikator kinerja lain yang menggambarkan kinerja urusan

bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024. Adapun gambaran kinerja urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada ttabel 2.117

Tabel 2.117
Gambaran Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					OPD Pengampu
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Satlinmas yang terlatih	%	NA	NA	NA	NA	100	Satpol PP dan Damkar
2	Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	NA	NA	NA	NA	100	Satpol PP dan Damkar
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	55,56	76,67	60,00	49	50	Satpol PP dan Damkar
4	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	NA	47,73	43,75	39	42,72	Satpol PP dan Damkar
5	Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah*	%	NA	NA	NA	NA	NA	Satpol PP dan Damkar
6	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran							
7	Persentase bangunan/gedung/lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi*	%	NA	NA	NA	NA	2,39	Satpol PP dan Damkar
8	Cakupan penanganan bencana non kebakaran Kabupaten	%	90	100	100	100	100	Satpol PP dan Damkar
9	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	NA	100	100	100	100	BPBD
10	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	NA	100	100	100	100	BPBD
11	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	NA	100	100	100	100	BPBD
12	Persentase koordinasi penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	BPBD
13	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	BPBD

No	Indikator	Satuan	Tahun					OPD Pengampu
			2020	2021	2022	2023	2024	
Keterangan: *Indikator Baru								

Sumber: Satpol PP dan Damkar, BPBD Kabupaten Temanggung,Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.117, sejumlah indikator yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan capaian yang beragam, mulai dari konsistensi dalam penegakan peraturan hingga peningkatan cakupan layanan kebencanaan. Beberapa indikator mengalami kemajuan yang signifikan, sementara yang lain masih memerlukan penguatan data dan optimalisasi pelaksanaan.

1) Persentase Satlinmas yang Terlatih

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan akibat bencana serta membantu penanganan bencana guna mengurangi dampaknya. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan satuan yang memiliki tugas membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala Desa/Kelurahan. Untuk mendukung kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), pelatihan sangat penting karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugas dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan pelatihan bagi anggota Satlinmas untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas mereka yang dicantumkan sebagai indikator kinerja pada bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2024, 100% Satlinmas telah mengikuti pelatihan di Kabupaten Temanggung.

2) Persentase Pengaduan yang Berkaitan dengan Trantibum yang Ditindaklanjuti

Penyelesaian aduan yang berkaitan dengan Tramtibum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024, seluruh pengaduan terkait ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) ditindaklanjuti, dengan capaian 100%. Ini menunjukkan responsivitas yang optimal dari Satpol PP dan Damkar dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat.

3) Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tabel 2.118
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit	30	23	21	44	39
2	Jumlah kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK	54	30	35	90	77
3	Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) (%)	55,56	76,67	60	48,88	50,64

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.118 terlihat bahwa tingkat respons waktu (response time rate) terhadap kasus kebakaran di wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, response time rate tercatat sebesar 55,56%, dengan jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit sebanyak 30 dari 54 kasus. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan menjadi 76,67%, meskipun jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit menurun menjadi 23 kasus dari 30. Setelah itu, tingkat respons menurun pada tahun 2022 (60%) dan terus menurun pada tahun 2023 (48,88%) serta 2024 (50,64%), meskipun jumlah kasus kebakaran

yang tertangani dalam waktu 15 menit mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 dan 2024 terdapat tantangan dalam mempertahankan kecepatan respon terhadap kejadian kebakaran. Tantangan tersebut antara lain mencakup keterbatasan armada, kondisi sarana prasarana, personel, hingga aksesibilitas lokasi.

4) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara cepat sesuai tingkat waktu tanggap (*response time rate*), mencakup pemadaman, pengendalian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap warga negara yang menjadi korban atau terdampak kebakaran. Adapun persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.119.

Tabel 2.119
Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.	NA	21	28	51	45
2	Jumlah kejadian di kabupaten pada tahun X	NA	44	64	131	107
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	NA	47,73	43,75	38,93	42,05

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2025

Data pada tabel 2.119 menunjukkan bahwa persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam tingkat waktu tanggap selama periode 2021–2024 mengalami fluktuasi dengan

kecenderungan menurun. Pada tahun 2021, dari 44 kejadian kebakaran, 21 layanan berhasil dilakukan dalam waktu tanggap, menghasilkan capaian sebesar 47,73%. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, meskipun jumlah layanan meningkat menjadi 28 dan 51 kasus, lonjakan jumlah kejadian kebakaran menyebabkan persentase layanan menurun menjadi 43,75% dan 38,93%. Pada tahun 2024 terjadi sedikit perbaikan dengan persentase naik ke 42,05% dari 45 layanan terhadap 107 kejadian.

5) Persentase Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran yang Dibentuk dan/atau Dibawah Pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksakan oleh kelompok relawan Pemadam Kebakaran (Balakar, Redkar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. kelompok relawan Pemadam Kebakaran belum memberikan kontribusi dalam layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran, dengan tercatatkan angka 0 untuk jumlah layanan yang dilaksanakan. Meskipun terdapat 107 kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Temanggung pada tahun tersebut, capaian layanan yang diharapkan dari kelompok relawan ini juga tercatat 0%, yang menunjukkan bahwa kelompok relawan, seperti Balakar atau lainnya, belum berfungsi dengan maksimal dalam memberikan layanan

6) Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran

Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebararan (RISPK) Kabupaten Temanggung, kebutuhan pos pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Temanggung sejumlah 6 (enam) lokasi diantaranya Pos Mako Temanggung, Pos Pemadam Candiroto, Pos Pemadam Pringsurat, Pos Pemadam Ngadirejo, Pos Pemadam Parakan, Pos Pemadam Tembarak. Namun, kebutuhan tersebut belum dapat terpenuhi, jumlah pos pelayanan WMK di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) lokasi, sehingga jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) mencapai 60,64%.

7) Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Menjadi Prioritas Inspeksi

Pada tahun 2024, jumlah bangunan/Gedung/lingkungan yang menjadi prioriat inspeksi sebanyak 30 unit (2,39%) dari 1.170 unit bangunan yang menjadi prioritas untuk dilakukan inspeksi. Angka ini tergolong sangat rendah dan mengindikasikan masih minimnya pengawasan terhadap potensi risiko kebakaran di gedung-gedung prioritas. Kegiatan inspeksi seharusnya ditingkatkan untuk mencegah kebakaran dan kecelakaan lainnya. Rendahnya cakupan inspeksi ini disebabkan oleh keterbatasan personel atau anggaran.

8) Cakupan Penanganan Bencana Non Kebakaran Kabupaten

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran menunjukkan kinerja yang sangat baik. Jumlah penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) terus meningkat setiap tahunnya, dari 268 kasus pada tahun 2020 menjadi 682 kasus pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian, cakupan penanganan mencapai angka maksimal 100% sejak tahun 2021 hingga 2024, setelah sebelumnya berada di angka 90% pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas dan respons cepat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam menangani situasi darurat non kebakaran, yang patut diapresiasi sebagai indikator keberhasilan pelayanan publik dalam aspek keselamatan dan perlindungan masyarakat.

9) Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga

negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat penyusunan kajian risiko bencana serta komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana. Sejak tahun 2021 hingga 2024, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung berhasil dalam memberikan layanan informasi rawan bencana kepada seluruh warga (100%). Capaian 100% mencerminkan keberhasilan BPBD dalam melakukan distribusi informasi yang krusial untuk keselamatan masyarakat. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kesiapsiagaan warga menghadapi bencana.

10) Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang sangat baik dengan persentase 100% secara konsisten sejak tahun 2021 hingga 2024. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan ini terus meningkat setiap tahunnya, dari 396.318 orang pada tahun 2021 menjadi 415.181 orang pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi terkait upaya pencegahan serta kesiapsiagaan bencana kepada seluruh masyarakat.

11) Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator ini mencapai 100%, artinya dalam setiap kejadian bencana, seluruh warga terdampak memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat

darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

12) Persentase Koordinasi Penanganan Pasca Bencana

Capaian indikator ini konsisten pada angka 100% selama lima tahun, menunjukkan bahwa BPBD mampu mengkoordinasikan kegiatan pemulihan dengan baik. Artinya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Koordinasi ini juga mencerminkan peran aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat. Konsistensi ini perlu dipertahankan dengan pelibatan lebih banyak stakeholder.

13) Persentase Tertanganinya Pemulihan Sementara Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat di Kabupaten Temanggung merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2024 dan mencapai 100% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan kesiapsiagaan dan respons cepat pemerintah daerah dalam menangani dampak fisik bencana secara efektif, khususnya pada tahap tanggap darurat. Melalui koordinasi yang baik antara BPBD, instansi teknis terkait, dan partisipasi aktif masyarakat, seluruh kerusakan fisik akibat bencana seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, serta infrastruktur vital lainnya dapat segera dipulihkan sementara guna mendukung keberlanjutan aktivitas masyarakat dan mencegah risiko lanjutan. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan responsif.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan pemerintahan di bidang sosial merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, terdampak bencana, dan masyarakat miskin. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Sosial secara konsisten menjalankan berbagai program yang mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta pemberdayaan sosial terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas agar mampu hidup secara mandiri dan bermartabat. Hal ini tercermin dari capaian indikator strategis, seperti meningkatnya persentase penanganan PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi dan perlindungan sosial, serta penguatan PSKS melalui pelatihan, fasilitasi, dan jejaring kemitraan, yang secara keseluruhan mendukung efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung.

1) Persentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan Pemberdayaan Sosial Bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Persentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta Pemberdayaan Sosial bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan indikator baru yang menggambarkan upaya pemerintah dalam memastikan layanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana program-program perlindungan, pemulihan, serta pemberdayaan sosial telah menjangkau kelompok rentan dan masyarakat yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditangani

Data persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika capaian yang mencerminkan tantangan dalam konsistensi pelayanan sosial. Pada tahun 2020, persentase penanganan cukup tinggi sebesar 84,12%, bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan capaian 100%. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh respons darurat dan intensitas intervensi sosial yang meningkat selama masa pandemi COVID-19. Namun, pasca pandemi, terjadi penurunan yang cukup drastis hingga ke angka 64,3% pada 2022, dan meskipun ada tren peningkatan pada 2023 dan 2024. Rendahnya persentase penanganan ini menjadi perhatian penting mengingat kompleksitas jenis-jenis PPKS yang mencakup kelompok rentan seperti anak terlantar, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan, fakir miskin,

hingga komunitas adat terpencil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi data yang akurat, serta kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Adapun gambaran kinerja program urusan pemerintahan bidang sosial Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.120.

Tabel 2.120
Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pemberdayaan PSKS perorangan, keluarga, masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100
3	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
4	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
5	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
6	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
7	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	NA	NA	100	100	100
8	Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	%	NA	NA	63,72	100	100
9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100
10	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.120, urusan pemerintahan bidang sosial

Kabupaten Temanggung selama tahun 2020 – 2024 memiliki capaian yang sangat baik dan konsisten, terutama pada indikator-indikator yang menyangkut perlindungan dan rehabilitasi sosial, seperti anak telantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana. Seluruh indikator tersebut menunjukkan capaian 100% selama lima tahun berturut-turut, yang menandakan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam memberikan layanan sosial dasar yang merata dan menyeluruh kepada kelompok rentan. Sedangkan indikator UEP (Usaha Ekonomi Produktif), pada 2022 tercatat 63,72%, berhasil mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang didukung oleh penguatan kelembagaan dan pelatihan. Secara keseluruhan, kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam periode lima tahun ini dapat dinilai sangat baik, dengan hampir seluruh indikator mencapai target maksimal.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan daerah, karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyerapan tenaga kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif melalui berbagai program, seperti pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi penempatan kerja, serta penguatan kelembagaan ketenagakerjaan. Selain itu, peningkatan kepesertaan BPJS Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap upah minimum menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di daerah.

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.

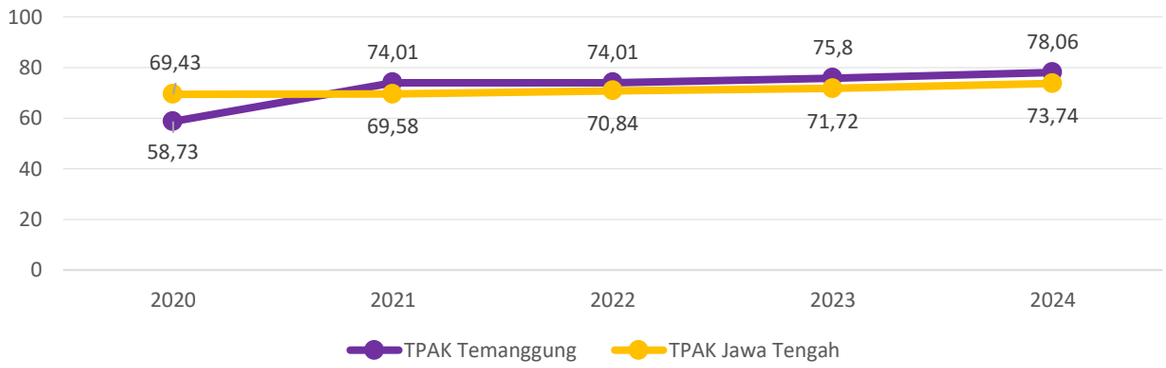

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.46
Capaian Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan data pada ggambar 2.46, dalam lima tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi, namun secara umum mengalami tren peningkatan, khususnya setelah tahun 2020 saat pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap pasar kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah, kecuali pada tahun 2020. Peningkatan TPAK sejak 2021 hingga 2024 mencerminkan meningkatnya keinginan penduduk usia kerja untuk bekerja, seiring dengan pemulihan ekonomi dan membaiknya iklim ketenagakerjaan di daerah. Namun demikian, capaian ini juga menghadapi tantangan, seperti penurunan permintaan terhadap produk kayu olahan yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja di sektor industri pengolahan kayu, yang merupakan sektor penting di Temanggung. Tingginya TPAK mengindikasikan kuatnya pasokan tenaga kerja (*labour supply*), namun belum tentu seluruhnya terserap dalam lapangan kerja formal karena masih ada dinamika seperti peralihan penduduk usia kerja menjadi ibu rumah tangga atau bertambahnya lulusan pendidikan yang belum terserap ke pasar kerja. Oleh karena itu, meskipun TPAK tinggi, diperlukan strategi peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja agar potensi ini benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah persentase pekerja yang terdaftar dan dilindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),

Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Adapum cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.47

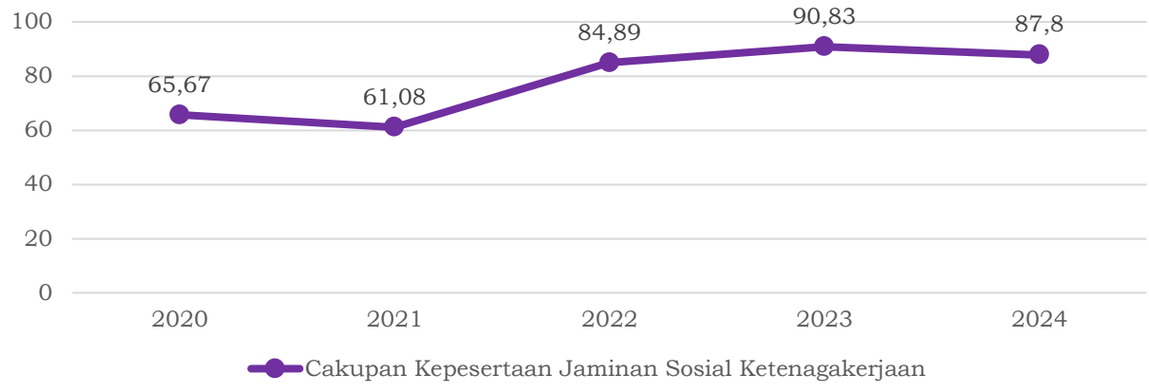

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.47
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan gambar 2.47, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Setelah menurun dari 65,67% di tahun 2020 menjadi 61,08% pada 2021, angka ini mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 90,83%, dan mengalami penurunan menjadi 87,8% pada 2024. Kenaikan signifikan ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap perlindungan ketenagakerjaan, baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang luas dan efektif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup pekerja.

3) Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten

Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan indikator penting yang mencerminkan dinamika pertumbuhan sektor usaha produktif di tingkat lokal. IKM memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, tidak hanya sebagai penyerap tenaga kerja tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan pelestari kearifan lokal. Perubahan persentase pertumbuhan jumlah IKM dari tahun ke tahun memberikan gambaran mengenai kondisi iklim usaha, kemudahan berusaha, akses terhadap permodalan, serta efektivitas kebijakan pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemantauan indikator ini sangat krusial untuk merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah yang berpihak pada penguatan sektor industri kecil dan menengah. Adapun persentase pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.48.

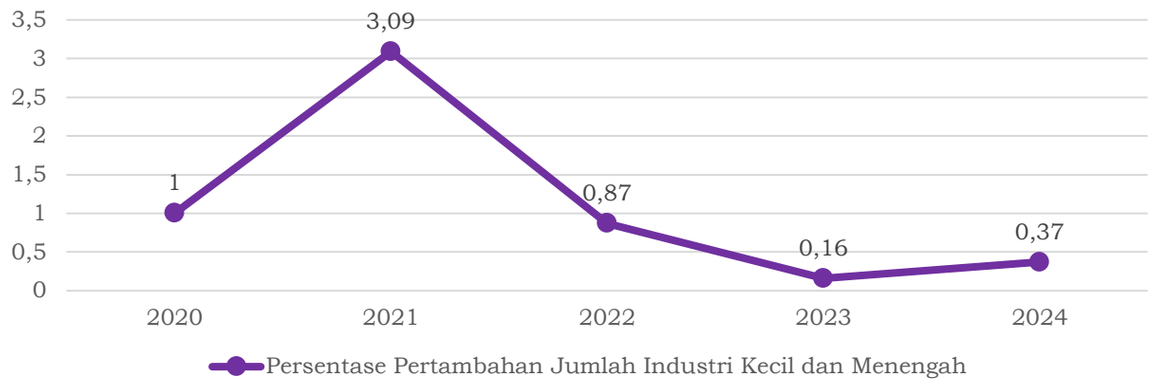

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.48
Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren yang cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Dari kenaikan sebesar 3,09% pada 2021, angka ini merosot hingga hanya 0,16% pada 2023 dan sedikit naik menjadi 0,37% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan tantangan dalam iklim usaha kecil dan menengah, baik dari sisi perizinan, akses pasar, maupun permodalan. Padahal, sektor IKM memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dan dukungan yang lebih konkret untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan sektor IKM di daerah.

4) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Adapun rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.121.

Tabel 2.121
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Tahun	Nilai PDRB ADHB Industri Pengolahan (rupiah)	Total PDRB ADHB (rupiah)	%
2020	5.920.283.830.000	21.557.077.140.000	27,46
2021	6.134.628.680.000	22.627.791.480.000	27,11
2022	6.476.561.690.000	24.726.442.720.000	26,19
2023	6.974.713.090.000	26.912.324.210.000	25,92
2024	7.384.380.000.000	28.923.600.000.000	25,53

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan tabel 2.121, rasio PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Temanggung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, dari 27,46% pada tahun 2020 menjadi 25,53% pada tahun 2024, meskipun secara nilai riil baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan sektor ini mengalami peningkatan. Penurunan rasio ini disebabkan oleh laju pertumbuhan sektor industri pengolahan yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan total PDRB. Meskipun demikian, sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Temanggung, melampaui sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini menandakan adanya proses transformasi ekonomi dari daerah agraris menuju basis industri, terutama melalui pengolahan hasil pertanian yang meningkatkan nilai tambah produk lokal. Peran strategis sektor manufaktur dalam mendorong produktivitas, menyerap tenaga kerja, serta mengadopsi teknologi menjadikannya motor utama industrialisasi daerah. Transformasi ini penting tidak hanya untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk mendiversifikasi struktur ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer, sehingga memperkuat ketahanan terhadap fluktuasi global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Adapun gambaran indikator kinerja bidang tenaga kerja di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.122.

Tabel 2.122
Gambaran Indikator Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja*	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	58,72	34,78	71,43	72,39	73,78

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina*	%	NA	NA	NA	NA	82,32
4	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	55,33	78,01	53,61	84,88	40,78
5	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan*	%	NA	NA	NA	NA	98,77
6	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan*	%	NA	NA	NA	NA	NA
7	Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur*	%	NA	NA	NA	NA	100
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	57,82	61,88	65,26	65,91	68,52
9	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan*	%	NA	NA	NA	NA	NA
10	Persentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	%	65,67	61,08	84,89	90,83	87,80
11	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	21,16	68,91	76,47	81,58	79,67
12	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja*	%	NA	NA	NA	NA	82,93
13	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	92,86	82,35	93,33	100,00	100
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Melalui berbagai kebijakan dan program strategis, Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi angkatan kerja, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Dalam lima tahun terakhir, berbagai indikator ketenagakerjaan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, seperti peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

1) Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja

Indikator ini merupakan indikator baru di Kabupaten Temanggung yang sangat penting sebagai dasar pengukuran kesesuaian pelaksanaan program ketenagakerjaan dengan perencanaan dalam dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang akan disusun. RTKD menjadi jembatan antara *supply* dan *demand* sektor ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan daerah yang berkesinambungan.

2) Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Indikator ini digunakan untuk mengukur peran pemerintah dalam memberikan pelatihan kerja terhadap animo masyarakat yang menginginkan pelatihan kerja. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.123

Tabel 2.123
Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	320	112	80	464	336
2	Jumlah pendaftar pelatihan	545	322	112	641	987
3	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	58,72	34,78	71,43	72,39	73,78

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.123, capaian indikator ini menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah turun drastis dari 58,72% pada 2020 menjadi 34,78% pada 2021 yang disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19, angkanya melonjak ke 71,43% di 2022 dan terus meningkat hingga 73,78% pada 2024. Peningkatan ini menandakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing pencari kerja.

3) Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Dibina

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina merupakan LPKS yang telah tercatat di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pembinaan yang dilakukan berupa perpanjangan masa berlaku izin LPKS yang sudah berakhir, pembinaan LPKS yang belum mendaftarkan izin melalui OSS, serta pembinaan akreditasi LPKS. Pada tahun 2024 terdapat 34 LPKS yang terdaftar di Kabupaten Temanggung dan terdapat 28 LPKS (82,32%) yang telah dibina oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar LPKS di Kabupaten Temanggung telah mendapat perhatian dan pembinaan dari pemerintah, yang sangat penting untuk menjamin kualitas pelatihan kerja yang mereka selenggarakan.

4) Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten

Penempatan pencari kerja merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas layanan ketenagakerjaan di daerah. Tingginya persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan mencerminkan kinerja yang baik dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi hubungan antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja. Selain itu, indikator ini juga mencerminkan sejauh mana pelatihan, bimbingan, dan informasi pasar kerja yang disediakan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap tren penempatan kerja menjadi penting sebagai dasar perbaikan strategi ketenagakerjaan ke depan. Persentase pencari kerja Kabupaten Temanggung yang ditempatkan tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.124

Tabel 2.124
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencari Kerja yang ditempatkan	602	1.749	773	679	661
2	Pencari Kerja terdaftar	1.088	2.242	1442	800	1.621
3	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	55,33	78,01	53,61	84,88	40,78

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.124, persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Angka penempatan meningkat dari 55,33% pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya sebesar 84,88% pada tahun 2023. Namun, terjadi penurunan yang cukup drastis pada tahun 2024, yakni hanya sebesar 40,78%. Fluktuasi ini mencerminkan adanya tantangan yang signifikan dalam proses penempatan kerja. Beberapa faktor penghambat antara lain adalah kecenderungan pencari kerja masa kini yang lebih selektif dalam memilih pekerjaan, kurangnya keaktifan dalam mengikuti proses seleksi atau rekrutmen, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, keterbatasan lowongan kerja bagi laki-laki usia di atas 30 tahun serta rendahnya daya tahan kerja pencari kerja usia muda juga turut memengaruhi capaian indikator ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif antara pemerintah,

dunia usaha, serta lembaga pelatihan untuk meningkatkan keberhasilan penempatan kerja ke depan.

5) Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

Penyuluhan dan bimbingan jabatan merupakan suatu proses awal penyampaian informasi secara sistematis, obyektif dan dinamis, tentang jabatan/pekerjaan dan dunia kerja sehingga masyarakat luas dan pencari kerja memiliki gambaran yang obyektif tentang peluang kesempatan kerja dan disertai pemahaman tentang realitas potensi dirinya (bakat, minat dan kemampuan) masing-masing sehingga mampu menentukan pilihan kariernya secara tepat. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, jumlah pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebanyak 1.601 orang (98,77%) dari jumlah total pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1.621 orang. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pencari kerja telah menerima informasi karier dan orientasi jabatan yang dapat membantu memahami potensi diri dan arah pasar kerja.

6) Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan

Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan merupakan indikator penting untuk mengukur efektivitas pasar kerja dan kebijakan ketenagakerjaan di suatu wilayah. Angka ini mencerminkan seberapa besar proporsi pencari kerja yang berhasil terserap oleh dunia usaha maupun industri dalam periode tertentu. Sebagai indikator baru, persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan memberikan dimensi tambahan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung. Indikator ini tidak hanya mengukur jumlah pencari kerja, tetapi juga memperlihatkan seberapa besar keberhasilan sistem penempatan tenaga kerja dalam menjembatani pencari kerja dengan kebutuhan pasar. Dengan hadirnya indikator ini, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam menilai dampak nyata dari berbagai program pelatihan, bimbingan kerja, dan fasilitasi penempatan yang telah dijalankan.

7) Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang Terfasilitasi Sesuai Prosedur

Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur pada tahun 2024 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh CPMI yang terdaftar, yaitu sebanyak 302 orang, telah

difasilitasi secara prosedural oleh pemerintah daerah. Capaian ini menjadi indikator positif terhadap komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada calon pekerja migran sekaligus mencerminkan keberhasilan upaya pencegahan terhadap praktik penempatan pekerja migran secara non-prosedural atau ilegal. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara lembaga terkait, termasuk dalam hal pendataan, sosialisasi, hingga fasilitasi dokumen dan pelatihan CPMI sebelum keberangkatan.

8) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan merupakan indikator yang mencerminkan keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam dunia kerja serta peran aktif mereka dalam pembangunan ekonomi. Adapun TPAK Perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.49.

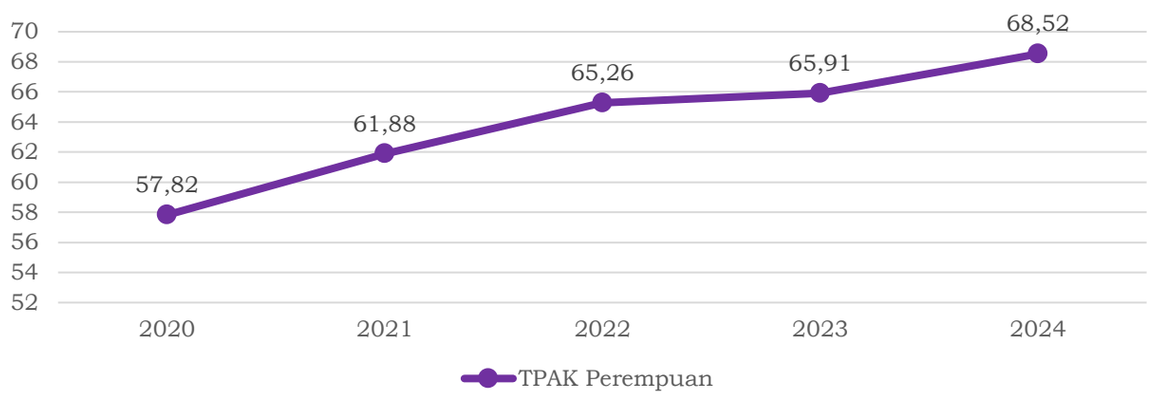

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.49
TPAK Perempuan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan gambar 2.49. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024, dari 57,82% pada tahun 2020 menjadi 68,52% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan semakin besarnya peran perempuan dalam aktivitas ekonomi, yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peluang kerja yang lebih inklusif. Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kesetaraan gender dalam

ketenagakerjaan turut mendorong peningkatan ini. Meski demikian, tantangan seperti beban ganda perempuan dalam rumah tangga dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal yang ramah gender masih perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, tren positif ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan yang berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif dan berkeadilan.

9) Persentase Perusahaan yang Menjalankan Norma Ketenagakerjaan

Persentase perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dunia usaha terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, seperti pemenuhan hak-hak pekerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan anak. Sebagai indikator baru, data ini menjadi penting untuk menilai kualitas hubungan industrial dan kondisi kerja yang layak di suatu daerah. Indikator ini digunakan untuk mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan perusahaan, serta penyusunan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan keadilan bagi tenaga kerja.

10) Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.109.690,- (dua juta seratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Besaran ini menjadi acuan standar minimum pengupahan bagi tenaga kerja yang bekerja di wilayah Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Temanggung diharapkan telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan upah kepada pekerja sesuai atau di atas ketentuan UMK tahun 2024 guna menjamin kesejahteraan pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Adapun perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam memberikan upah sesuai dengan UMK Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.125.

Tabel 2.125
Perusahaan yang Memenuhi Kewajiban dalam Memberikan Upah Sesuai UMK di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perusahaan	397	119	119	114	98
2	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan UMK	84	82	91	93	123
3	Persentase	21,16	68,91	76,47	81,58	79,67

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Temanggung berdasarkan ttabel 2.125 menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, yakni meningkat dari 21,16% menjadi 81,58%. Namun, pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 79,67%. Meski demikian, capaian ini tetap mencerminkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pengupahan. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sebagian perusahaan yang belum stabil serta masih cukup banyak pekerja yang produktivitas kerjanya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pengusaha. Ketidakseimbangan antara upah dan produktivitas ini kerap menjadi pertimbangan perusahaan dalam menerapkan upah sesuai UMK.

11) Persentase Terpenuhinya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 82,93%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah menyediakan fasilitas pendukung yang layak bagi kesejahteraan pekerja, seperti sarana kesehatan, sarana keselamatan atau seragam, tempat ibadah, ruang laktasi, serta ruang istirahat atau kantin yang memadai, toilet, tempat parkir, dan sarana yang ramah disabilitas. Fasilitas kesejahteraan ini menjadi indikator penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, serta menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja. Namun demikian, capaian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah perusahaan yang perlu didorong untuk memenuhi standar fasilitas kesejahteraan secara menyeluruh, guna memastikan hak pekerja terpenuhi dan kualitas hubungan industrial tetap terjaga dengan baik.

12) Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan bagian krusial dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan dunia kerja. Perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap produktivitas dan iklim investasi daerah. Oleh karena itu, mediasi menjadi salah satu mekanisme penyelesaian yang diutamakan karena bersifat non-litigasi, cepat, dan mengedepankan keadilan bagi kedua belah pihak. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas terkait terus mengoptimalkan fungsi mediasi untuk menyelesaikan berbagai perselisihan ketenagakerjaan secara efektif. Adapun persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.126.

Tabel 2.126
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus yang dicatatkan	14	17	14	20	8
2	Jumlah kasus yang terselesaikan melalui mediasi	13	14	15	20	8
3	Persentase	92,86	82,35	93,33	100	100

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.126, persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren positif, dengan capaian yang terus meningkat dari 92,86% pada tahun 2020 hingga mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini mencerminkan efektivitas peran mediator hubungan industrial dalam menyelesaikan berbagai konflik ketenagakerjaan secara damai, tanpa harus melalui jalur hukum yang lebih panjang dan kompleks. Capaian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi antara pekerja dan pengusaha telah terfasilitasi dengan baik, serta adanya komitmen bersama dalam menjaga iklim hubungan kerja yang harmonis.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif di Kabupaten Temanggung. Upaya ini tercermin melalui penguatan kesetaraan

gender yang diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) turut digunakan untuk mengukur sejauh mana kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dapat ditekan dalam berbagai aspek kehidupan. Perhatian terhadap perlindungan anak dan perempuan juga diwujudkan melalui pemantauan rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak, yang menjadi indikator penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan Perempuan atas perlindungan.

1) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. IPG adalah adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Adapun Gambaran IPG di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.125.

Tabel 2.127
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender	angka	95,31	95,31	95,71	96,19	96,27

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan dari 95,31 pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 96,27 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Temanggung semakin mengecil. Dengan nilai IPG yang semakin mendekati angka 100, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesetaraan gender di daerah ini mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Meski demikian, masih terdapat sedikit ketimpangan yang perlu terus

diupayakan untuk dikurangi melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender.

2) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator baru yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi. Nilai Indeks Ketimpangan Gender berkisar antara 0 – 1, semakin kecil angka IKG menunjukan semakin kecil ketimpangan gender (semakin setara). Adapun nilai Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.50.

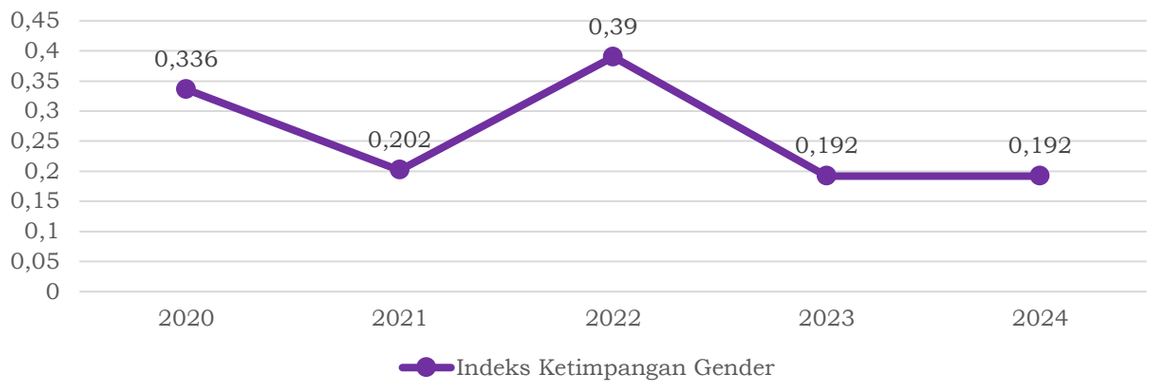

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.50
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Gambar 2.X, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, IKG berada di angka 0,336 dan sempat membaik pada 2021 menjadi 0,202, nilai ini mencerminkan berkurangnya ketimpangan gender dalam tiga dimensi utama yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi pasar kerja. Namun, terjadi lonjakan ketimpangan pada 2022 dengan indeks mencapai 0,39 dimana angka ini adalah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan kembali melemahnya kesetaraan akses dan peran antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, pada tahun 2023 dan 2024, nilai IKG kembali menurun ke angka 0,192, menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor.

3) Rasio Peningkatan Pelayanan Dampak Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) terus berkomitmen dalam menyediakan layanan yang responsif dan menyeluruh bagi korban kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas intervensi ini adalah rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak, yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merespons dan menangani kasus-kasus kekerasan melalui peningkatan akses, kualitas, dan jangkauan layanan. Adapun rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada Perempuan dan anak Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.51

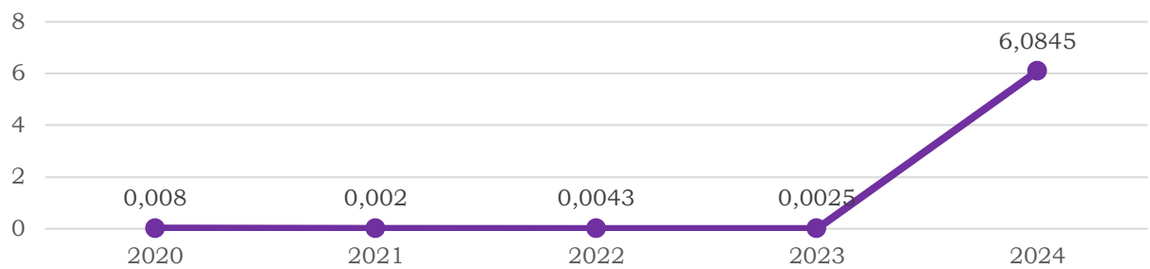

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.51
Rasio Peningkatan Pelayanan Dampak Kekerasan pada Perempuan dan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan lonjakan signifikan pada tahun terakhir. Pada tahun 2020 hingga 2023, nilai rasio relatif rendah dan cenderung stabil, mencerminkan keterbatasan peningkatan layanan atau rendahnya pelaporan dan akses terhadap layanan perlindungan. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan tajam hingga mencapai 6,0845, yang mencerminkan perbaikan signifikan dalam cakupan layanan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor, atau adanya intervensi program yang lebih masif dan terstruktur oleh pemerintah daerah.

Urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian penting dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dan inklusif di

Kabupaten Temanggung. Melalui berbagai program strategis, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kesetaraan gender, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Adapun gambaran urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Temanggun Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.128.

Tabel 2.128
Gambaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	NA	NA	NA	4,38	8,22
2	Persentase kasus kekerasan terhadap Perempuan yang melapor dan tertangani	%	0,0002	0,0013	0,003	0,0025	0,003
3	Rasio kasus kekerasan terhadap Perempuan*	angka	8,24	2,17	4,26	2,53	5,63
4	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas*	%	NA	NA	NA	53,33	65,38
5	Kabupaten Layak Anak	%	NA	NA	Madya	Madya	Nindya
6	Persentase terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) *	%	NA	NA	NA	NA	2,42
7	Persentase pernikahan usia anak*	%	NA	NA	NA	NA	0,124
8	Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	%	NA	NA	NA	NA	100
9	Rasio kasus kekerasan terhadap anak	angka	43,66	2,58	4,76	3,47	9,37
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan Tabel II.X, data capaian dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan adanya kemajuan sekaligus tantangan, baik dalam aspek pemberdayaan, penurunan angka kekerasan, peningkatan layanan ramah anak, hingga penguatan kelembagaan seperti DRPPA dan Kabupaten Layak Anak.

1) Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tercatat pada tahun 2023 dengan angka 4,38% dan meningkat menjadi 8,22% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang cukup signifikan dalam meningkatkan peran perempuan dalam berbagai sektor melalui

program pemberdayaan perempuan, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Pada tahun 2024, terdapat 46 organisasi perangkat daerah yang menyusun anggaran responsif gender. Dari total APBD, 8,22% diantaranya mendukung peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarustamaan gender atau sebesar Rp.29.502.650.562, 00. Diperlukan keberlanjutan program ini untuk memastikan bahwa pengarusutamaan gender terus berkembang.

2) Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melapor dan Tertangani

Pada tahun 2024, persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani di Kabupaten Temanggung tercatat mencapai 100%. Capaian ini membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban. Sebagai indikator kinerja baru, angka ini menjadi capaian awal yang penting dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk berani melapor dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perlindungan yang tersedia.

3) Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Tren ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Fluktuasi ini bisa mencerminkan ketidakteraturan dalam pelaporan atau pengawasan kasus, dan mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif dalam sosialisasi, pencegahan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

4) Persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas

Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 53,33% pada tahun 2023 menjadi 65,38% pada tahun 2024. Kabupaten Temanggung memiliki total 26 puskesmas yang tersebar di 20 kecamatan dengan 17 puskesmas diantaranya sudah mendukung pelayanan ramah anak pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih ramah dan mendukung kebutuhan anak di fasilitas kesehatan. Harapan kedepannya, seluruh puskesmas di Kabupaten Temanggung dapat mendukung pelayanan ramah anak sehingga akses dan kualitas layanan kesehatan untuk

anak-anak semakin baik, sehingga mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

5) Kabupaten Layak Anak

Status Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten Layak Anak mengalami peningkatan dari kategori Madya pada tahun 2022-2023 menjadi Nindya pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung hak-hak anak. Meskipun begitu, upaya untuk mencapai status lebih tinggi (Utama) harus terus didorong. Penekanan pada kebijakan dan program perlindungan anak yang lebih komprehensif akan sangat berpengaruh dalam memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan anak terlindungi dan diperhatikan dengan lebih baik.

6) Persentase Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

Pada tahun 2024, tercatat adanya 2,42% desa yang telah terbentuk sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Indikator ini mencerminkan upaya awal Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mengembangkan kebijakan dan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa. Ke depan, perlu dilakukan percepatan pembentukan DRPPA secara lebih luas melalui peningkatan kapasitas desa, pendampingan teknis, serta sinergi lintas sektor agar terbentuk lebih banyak desa yang mampu menciptakan ruang aman dan memberdayakan bagi perempuan dan anak.

7) Persentase Pernikahan Usia Anak

Pada tahun 2024, persentase pernikahan usia anak di Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 0,124%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan usia anak telah berjalan cukup efektif, dengan angka yang sangat kecil. Meskipun demikian, pernikahan usia anak tetap menjadi isu sensitif yang perlu mendapat perhatian serius karena berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak di masa depan. Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu terus mengintensifkan program edukasi, sosialisasi, serta pemberdayaan remaja dan keluarga, agar angka pernikahan usia anak dapat ditekan lebih jauh hingga mendekati nol.

8) Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Melapor dan Ditangani

Pada tahun 2024, persentase kasus kekerasan terhadap anak yang melapor dan berhasil ditangani di Kabupaten Temanggung mencapai 100%. Angka ini menunjukkan bahwa seluruh laporan kekerasan terhadap anak ditindaklanjuti dengan baik, mencerminkan responsivitas dan efektivitas sistem perlindungan anak di daerah tersebut. Pencapaian ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan anak dan mendorong lebih banyak korban atau saksi untuk melapor. Ke depan, upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat dan penguatan jejaring perlindungan anak tetap perlu ditingkatkan untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

9) Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan sosial di Kabupaten Temanggung, mengingat anak adalah aset masa depan bangsa yang perlu dijaga dan dilindungi. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi perlindungan anak di Kabupaten Temanggung adalah Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Anak. Melalui indikator ini, dapat dilihat sejauh mana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak telah dilaksanakan secara efektif. Rasio kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi dengan angka yang lebih tinggi pada 2024, yaitu 9,37, dibandingkan dengan 3,47 pada tahun 2023. Meskipun ada penurunan pada 2021 dan 2022, angka yang tinggi pada tahun 2024 menandakan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah yang memprihatinkan. Penguatan mekanisme perlindungan anak, seperti pendidikan tentang hak anak, pelatihan untuk orang tua, dan sistem pelaporan yang lebih efektif, sangat penting untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak di masa depan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan daerah karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan, kualitas hidup, dan kesehatan masyarakat. Ketahanan pangan daerah tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan produksi pangan, tetapi

juga dapat dilihat dari ketahanan pangan, asupan energi masyarakat, serta pola konsumsi pangan masyarakat.

1) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan memberikan gambaran komprehensif mengenai ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, sekaligus menilai kerentanan wilayah terhadap guncangan seperti perubahan iklim atau krisis ekonomi. Ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang pengukurannya dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional sejak Tahun 2019. Adapun kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.129.

Tabel 2.129
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	82,16	81,69	80,08	77,84	78,91

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.129, capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Temanggung mengalami tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2023, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan akibat faktor seperti perubahan iklim, gangguan pasokan, inflasi, dan krisis global. Namun, pada tahun 2024, IKP menunjukkan peningkatan sebesar 1,07 poin, mencerminkan perbaikan dalam distribusi, produksi, dan efektivitas program ketahanan pangan. Peningkatan ini didukung oleh upaya mempertahankan produksi pangan, dukungan terhadap petani, dan pelatihan pertanian berkelanjutan. Meski demikian, tantangan seperti fluktuasi harga dan dampak iklim tetap memerlukan intervensi strategis melalui diversifikasi pangan, penguatan distribusi, dan kebijakan adaptif untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan di masa mendatang.

2) *Prevalence of Undernourishment* (PoU)

Jika IKP mengukur ketahanan pangan pada tingkat kabupaten, maka ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur

oleh BPS. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi diukur untuk mengetahui proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini membantu dalam memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu. Adapun Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel 2.130

Tabel 2.130
***Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	*Prevalence of Undernourishment* (PoU)	%	16,16	18,48	14,99	10,26	11,72

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Setelah meningkat dari 16,16% pada 2020 menjadi 18,48% pada 2021 akibat dampak pandemi dan penurunan daya beli, angka ini menurun signifikan menjadi 14,99% pada 2022 dan 10,26% pada 2023, mencerminkan perbaikan dalam akses, distribusi, serta kesadaran konsumsi pangan yang lebih sehat. Namun, pada 2024 terjadi kenaikan kembali menjadi 11,72%, yang mengindikasikan penurunan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi energi minimal. Kenaikan ini dipengaruhi oleh faktor seperti fluktuasi produksi, harga pangan, dan inflasi yang mengurangi daya beli, sehingga menuntut adanya langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan dan melindungi kelompok rentan.

Pemerintah Kabupaten Temanggung secara konsisten melakukan pemantauan terhadap berbagai indikator ketahanan pangan, termasuk ketersediaan, kualitas pangan, serta penanganan kerawanan pangan. Adapun gambaran indikator kinerja program bidang pangan Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.131.

Tabel 2.131
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	78,8	79,7	80,10	93,5	89,43
2	Persentase ketersediaan pangan pokok*	Angka	NA	NA	NA	NA	100
3	Persentase penanganan kerawanan pangan*	%	NA	NA	NA	NA	100
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan segar*	%	100	100	100	100	100
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Data dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan tabel 2.131 menunjukkan dinamika yang menggambarkan tantangan dan capaian dalam mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan, aman, dan inklusif. Evaluasi terhadap indikator-indikator tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat ke depan.

1) Skor Pola Pangan Harapan

Salah satu indikator untuk mengukur ketahanan pangan adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang mencerminkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH yang tinggi menunjukkan pola konsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi, mendekati standar ideal yang dianjurkan. Kabupaten Temanggung, melalui berbagai program dan intervensi di bidang pangan, terus berupaya meningkatkan skor ini dari tahun ke tahun. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan skor berturut-turut 78,8; 79,7; 80,10; dan mencapai puncaknya pada 93,5 di tahun 2023, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 89,43 pada tahun 2024. Penurunan skor PPH pada 2024 ini disebabkan oleh berkurangnya konsumsi pada sejumlah kelompok pangan penting, yakni padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur, buah, serta kelompok pangan lain, sementara konsumsi minyak dan lemak justru meningkat. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya ketidakseimbangan dalam pola konsumsi masyarakat yang dapat berdampak terhadap kualitas gizi dan kesehatan. Meski skor masih tergolong baik, pergeseran pola pangan ini perlu diwaspadai agar tidak berlanjut pada penurunan kualitas ketahanan pangan di masa

mendatang. Upaya edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta promosi pangan lokal perlu terus diperkuat untuk menjaga dan meningkatkan skor PPH ke depannya.

2) Persentase Ketersediaan Pangan Pokok

Persentase Ketersediaan Pangan Pokok di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 berhasil mencapai 100%. Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai upaya strategis, seperti koordinasi lintas OPD yang memperkuat sinergi program, perbaikan infrastruktur irigasi untuk meningkatkan produktivitas, dan penambahan areal tanam (PAT) yang memperluas kapasitas produksi. Selain itu, peningkatan indeks pertanaman padi serta penggunaan benih unggul berlabel turut mendorong hasil pertanian yang lebih optimal. Kerjasama dengan daerah surplus beras dalam bentuk perdagangan dan peningkatan akses distribusi juga memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung telah memiliki fondasi kuat dalam menjaga ketersediaan pangan pokok yang perlu terus dipertahankan dan dikembangkan ke depan.

3) Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu Keamanan Pangan Segar

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang keamanan pangan adalah tingkat keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, secara rutin dilakukan pemeriksaan sampel pangan untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat aman, bermutu, dan tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan segar di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan angka 100% selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh sampel pangan segar yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, adapun sampel yang tidak memenuhi standar maka segera dilakukan penelusuran sumber dan penarikan dari peredaran, serta dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha pangan terkait guna mencegah terulangnya pelanggaran yang sama. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat.

4) Persentase Penanganan Kerawanan

Pada tahun 2024, Persentase Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Temanggung berhasil mencapai 100%, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat. Berdasarkan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA), meskipun terdapat 10 desa yang masuk kategori rentan rawan pangan prioritas 2 dan 3, upaya intervensi tidak hanya difokuskan pada desa tersebut, melainkan diperluas mencakup seluruh 20 kecamatan. Penanganan dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah untuk memastikan keterjangkauan dan ketersediaan pangan, serta program bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada 86.754 jiwa. Pendekatan yang luas dan menyeluruh ini menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung tidak hanya fokus mengatasi kerawanan di titik rawan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan secara umum di seluruh wilayah. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting untuk menjaga kestabilan pangan di tengah potensi tekanan ekonomi dan iklim ke depan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan pemerintahan di bidang pertanahan merupakan salah satu aspek krusial dalam mendukung tertib administrasi, kepastian hukum, serta pengelolaan ruang yang adil dan berkelanjutan. Pengelolaan pertanahan yang baik menjadi fondasi bagi pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam, serta perlindungan hak atas tanah masyarakat. Di tingkat daerah, urusan pertanahan tidak hanya mencakup pelayanan administrasi pertanahan, tetapi juga penataan, pengendalian, serta penyelesaian konflik agraria yang sering kali menjadi hambatan dalam pembangunan. Sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan pertanahan, perlu dilaksanakan fasilitasi terhadap berbagai program strategis, termasuk reforma agraria dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Fasilitasi ini bertujuan untuk mempercepat penataan dan pemerataan penguasaan tanah serta memastikan pelaksanaan pengadaan tanah berjalan dengan transparan dan berkeadilan, sehingga mendukung kepastian hukum dan kelancaran pembangunan daerah.

1) Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi

Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi merupakan indikator penting yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil mendukung pelaksanaan reforma agraria melalui proses fasilitasi penataan aset dan akses tanah bagi masyarakat. Indikator ini

mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil, sekaligus menyelesaikan konflik agraria yang menjadi hambatan pembangunan. Fasilitasi reforma agraria meliputi kegiatan pendataan, verifikasi, mediasi, serta pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan tanah dapat berlangsung secara produktif dan berkelanjutan. Peningkatan persentase fasilitasi reforma agraria menunjukkan komitmen daerah dalam memperkuat keadilan agraria dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya lokal.

2) Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum merupakan indikator yang mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses pengadaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan publik lainnya. Indikator ini menilai sejauh mana pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak masyarakat terdampak dapat terlindungi dengan baik. Fasilitasi yang optimal dalam pengadaan tanah sangat penting untuk mempercepat realisasi proyek pembangunan daerah tanpa menimbulkan konflik atau ketidakpastian hukum.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, dengan fokus utama pada upaya pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mitigasi perubahan iklim. Dalam rangka mengukur kinerja bidang ini, dua indikator penting yang menjadi perhatian adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). IKLH mencerminkan kondisi kualitas udara, air, dan tutupan lahan yang menjadi dasar bagi kelestarian ekosistem, sementara upaya penurunan emisi GRK menjadi kontribusi nyata Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Sinergi antara peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan emisi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian

alam.

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kualitas lingkungan hidup terukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan komponennya Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.132

Tabel 2.132
Capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	41,11	67,78	52,22	64,07	59,63
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,65	81,95	83,82	85,10	87,84
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	74,33	53,16	53,19	48,9	46,81
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		**65,61**	**70,32**	**65,23**	**69,27**	**68,25**

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.132, dapat diketahui bahwa nilai IKLH Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan pada tahun 2020 (65,61) hingga tahun 2023 (74,83). Namun, pada tahun 2024, IKLH menjadi 68,25 yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Temanggung.

Jika ditinjau lebih lanjut, Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung menunjukan tren positif dengan peningkatan sejak tahun 2020 (83,65) hingga 2024 (87,84). Sementara itu, Indeks Kualitas Air mengalami fluktuasi, dengan kenaikan signifikan dari 41,11 (2020) hingga mencapai 64,07 (2023), meskipun begitu terdapat penurunan menjadi 59,63 pada tahun 2024. Namun, faktor yang menyebabkan turunnya IKLH pada tahun 2024 adalah Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKL cenderung stabil pada angka 74,33, namun pada tahun 2024 menurun drastis yang menunjukkan adanya permasalahan dalam menjaga kualitas lahan di Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu,

diperlukan upaya dan penerapan kebijakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.

2) Penurunan Intensitas Emisi GRK

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Temanggung menunjukkan perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pola penggunaan lahan, perkembangan sektor industri, serta implementasi kebijakan pengurangan emisi. Pada tahun 2024 emisi GRK di Kabupaten Temanggung mencapai 468.330 Ton CO2eq, kontribusi emisi tertinggi yaitu berada di sektor energi mencapai 299.510 Ton CO2eq. Berikut ditampilkan tren emisi GRK di Kabupaten Temanggung.

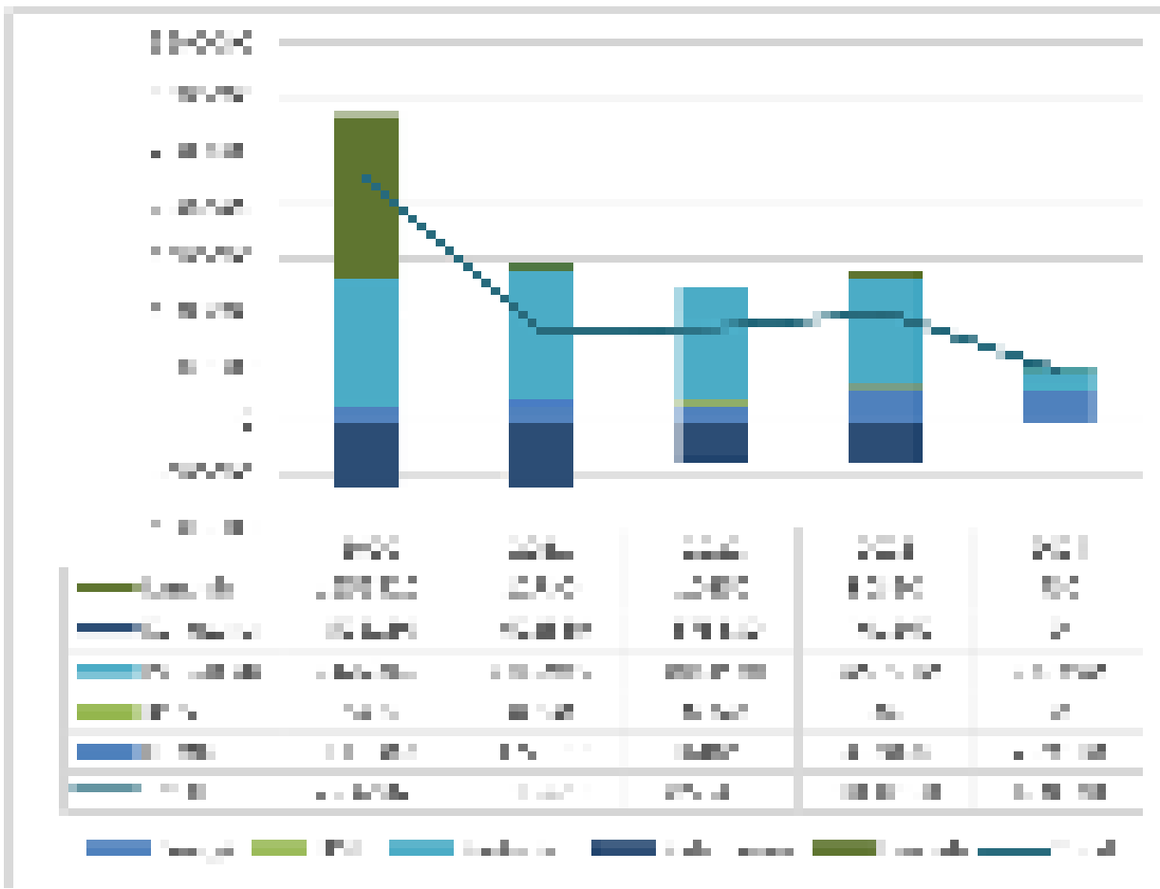

Sumber: Signsmart Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.52
Grafik Tren Emisi Gas Rumah Kaca Kab.Temanggung
Tahun 2020-2024

Kabupaten Temanggung sudah melakukan aksi mitigasi penurunan emisi yang dilaporkan dalam aplikasi AKSARA pada tahun 2020-2024 yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengelolaan limbah, pengelolaan tanaman terpadu. Secara akumulasi potensi penurunan emisi GRK di Kabupaten Temanggung mencapai 690.921,63 Ton CO2eq dengan rincian potensi penurunan terbesar berada di tahun 2021 mencapai 574.886,19 Ton CO2eq karena adanya kegiatan unit

pengolahan pupuk organik (UPPO). Dengan adanya pengolahan pupuk organik maka dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia, karena faktor emisi antara pupuk organik dan pupuk kimia berbeda. Sehingga salah satu upaya mitigasi penurunan emisi GRK di sektor pertanian diarahkan untuk penggunaan pupuk organik. Berikut ditampilkan kegiatan aksi mitigasi penurunan emisi GRK di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.133
Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Tahun 2020 – 2024

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO2eq)					Penurunan Akumulasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Lahan	6.028,02	573.838,54	97.287,77	0,00	357,71	677.512,04
1	Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Jagung	-	9,12	-	-	98,53	107,65
2	Pengembangan Ruminansia Potong	6.028,02	-	-	-	-	6.028,02
3	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul	-	30,12	-	-	57,48	87,60
4	UNIT PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK (UPPO)	-	573.799,30	97.287,77	-	-	671.087,07
5	Bantuan Bibit Kopi Robusta	-	-	-	-	25,30	25,30
6	Bantuan Bibit Kopi Arabika	-	-	-	-	15,80	15,80
7	Bantuan Bibit Mimba	-	-	-	-	160,60	160,60
B	Pengelolaan Limbah	0,00	1.047,65	4.721,07	7.498,16	142,71	13.409,59
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	937,27	3.749,08	7.498,16	142,71	12.327,22
2	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	-	110,38	73,58	0,00	0	183,96
3	Operasional Bank Sampah	-	-	898,41	0,00	0	898,41
Grand Total		**6.028,02**	**574.886,19**	**102.008,84**	**7.498,16**	**500,42**	**690.921,63**

Sumber: AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon), 2025

Pemerintah Kabupaten Temanggung secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai indikator lingkungan hidup guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan kesadaran lingkungan. Berbagai indikator kinerja, seperti pengelolaan dokumen lingkungan, pemantauan kualitas air dan udara, pengelolaan sampah,

hingga pengembangan sekolah berwawasan lingkungan, menjadi tolok ukur penting dalam mengukur efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan. Capaian indikator ini juga turut mendukung perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Temanggung. Gambaran lengkap capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.134.

Tabel 2.134
Gambaran Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	NA	100	100	100	100
2	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	NA	0	100	100	100
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	41,11	67,78	52,22	64,07	59,63
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	83,65	81,95	83,82	85,10	87,84
5	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	74,33	53,16	53,19	48,9	46,81
6	Luas lahan kritis yang tertangani*	%	NA	NA	NA	NA	NA
7	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola*	%	NA	NA	NA	NA	7,08
8	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kabupaten Temanggung*	%	NA	NA	NA	NA	NA
9	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Temanggung*	%	NA	NA	NA	NA	NA
10	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	%	100	100	100	100	73,61
11	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
12	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	NA	100	100	100	100
13	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air*	%	NA	NA	NA	NA	100
14	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara*	%	NA	NA	NA	NA	100
15	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	25,94	27,33	27,87	27,87	28,93

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
16	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	0	82,35	84,62	100	100
17	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP)	%	24,32	32	59,19	61,26	32,98
18	Persentase sampah yang terkelola	%	24,32	32	59,19	61,26	62,91
19	Cakupan pelayanan persampahan	%	45,33	53,63	61,24	68,51	74,39
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Data dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan tabel 2.134 menunjukkan dinamika yang menggambarkan berbagai tantangan sekaligus capaian dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Temanggung. Evaluasi terhadap seluruh indikator ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup di masa mendatang, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.

1) Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan konsistensi yang sangat baik sejak tahun 2021 hingga 2024 dengan capaian 100%. Pada tahun 2024, telah disahkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054. Selain itu, Kabupaten Temanggung telah menyusun dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029; Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD); dan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).

2) Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik yang berdampak penting maupun tidak, wajib memiliki persetujuan lingkungan. Persetujuan ini diperoleh melalui

dua mekanisme, yaitu penyusunan dan uji kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bagi kegiatan yang memiliki dampak penting, serta penyusunan dan pemeriksaan formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) bagi kegiatan yang dampaknya tidak signifikan. Dengan demikian, dokumen Amdal wajib dimiliki oleh kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan, sedangkan dokumen UKL-UPL diwajibkan bagi kegiatan dengan dampak yang lebih kecil, sebagai bentuk tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta keputusan kelayakan lingkungan hidup meningkat signifikan dari 0% di tahun 2021 menjadi 100% pada tahun-tahun berikutnya. Setelah tidak ada pengajuan maupun persetujuan pada tahun 2021, jumlah usaha atau kegiatan yang mengajukan persetujuan meningkat dari satu pada 2022 menjadi tiga pada 2023, dan sembilan pada 2024. Seluruh pengajuan yang masuk selama tiga tahun terakhir berhasil memperoleh persetujuan, yang tercermin dari persentase capaian sebesar 100% setiap tahunnya.

3) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu: pH, TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform. Berdasarkan hasil dari pemantauan titik kualitas air permukaan dan perhitungan Indeks Kualitas Air, maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Air di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada gambar 2.53

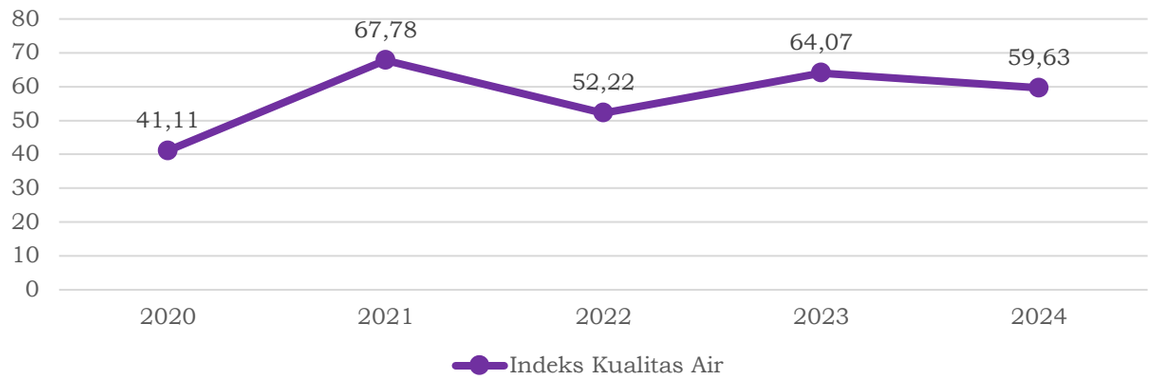

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.53
Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Nilai IKA meningkat signifikan dari 41,11 pada tahun 2020 menjadi 67,78 pada tahun 2021, namun kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2024, IKA tercatat sebesar 59,63, masih menunjukkan kualitas air yang perlu ditingkatkan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Temanggung masih menghadapi tantangan, seperti pencemaran limbah domestik dan pertanian, serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan air limbah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam menjaga kualitas air, termasuk penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber air.

4) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Udara yaitu: SO_2 dan NO_2. Adapun Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada Gambar 2.54.

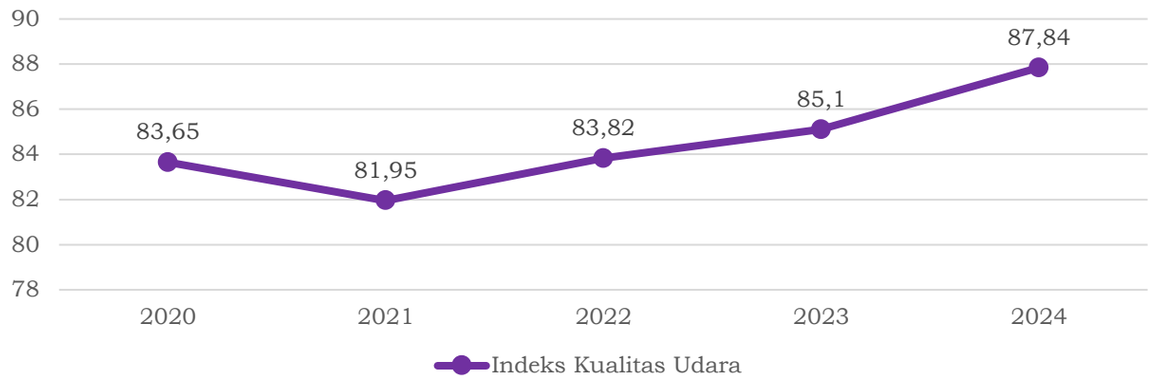

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.54
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2024

Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, IKU berada di angka 83,65 dan sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 81,95. Namun, kualitas udara terus membaik pada tahun-tahun berikutnya, dengan capaian 83,82 pada 2022, 85,10 pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 87,84 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya pengendalian pencemaran udara di wilayah Temanggung, seperti pengawasan emisi, penghijauan, serta penataan transportasi dan aktivitas industri, yang secara keseluruhan mendukung kualitas lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

5) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi kualitas lahan berdasarkan parameter seperti luas tutupan hutan, semak/belukar, semak/belukar rawa, ruang terbuka hijau, serta rehabilitasi hutan dan lahan. Penilaian IKL ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari upaya pemantauan kualitas lingkungan secara nasional. Adapun Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada Gambar 2.55.

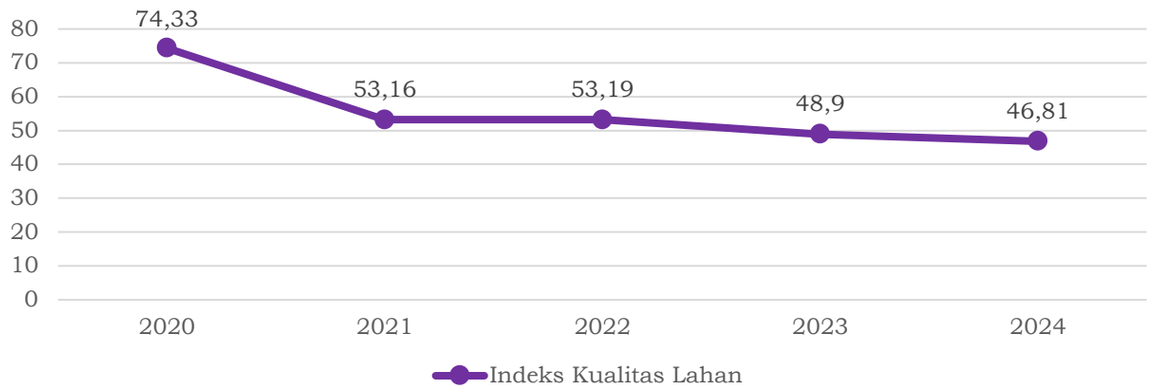

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.55
Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2024

Capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, IKL tercatat sebesar 74,33, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 menjadi 53,16 dan relatif stagnan pada tahun 2022 dengan nilai 53,19. Penurunan berlanjut hingga mencapai 48,90 pada tahun 2023 dan turun lagi menjadi 46,81 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya degradasi lahan yang dapat disebabkan oleh alih fungsi lahan, erosi, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, serta kurangnya rehabilitasi lahan kritis, sehingga diperlukan intervensi yang lebih kuat untuk menjaga dan memperbaiki kualitas lahan di Kabupaten Temanggung.

6) Luas Lahan Kritis Tertangani

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukkannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

Lahan kritis merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dapat berdampak serius terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, khususnya dalam hal konservasi tanah dan air. Penanganan lahan kritis menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana seperti

longsor dan banjir. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) terus berupaya melakukan rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis secara bertahap dari tahun ke tahun. Adapun upaya penanganan lahan kritis pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan. Luas lahan kritis yang ditangani tercatat kumulatif, dimulai dari 12,89 hektar pada tahun 2020 dan 2021, meningkat menjadi 180,275 hektar pada 2022, 253,063 hektar pada 2023, dan mencapai 317,708 hektar pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan intensifikasi dalam program rehabilitasi lahan oleh pemerintah daerah, meskipun cakupan penanganan masih perlu ditingkatkan untuk mempercepat pemulihan seluruh lahan kritis yang ada.

7) Persentase Sumber Mata Air yang Dilindungi dan Dikelola

Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,08%, yang merupakan data awal dari indikator baru dalam pengelolaan sumber daya air. Indikator ini menunjukkan bahwa isu perlindungan mata air mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Perlindungan sumber mata air sangat krusial untuk menjamin ketersediaan air bersih, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung ketahanan lingkungan, terutama mengingat Temanggung merupakan wilayah pegunungan dengan banyak mata air strategis. Capaian awal ini dapat menjadi pijakan penting untuk pengembangan program yang lebih terencana dan berkelanjutan, dengan melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kelestarian sumber air.

8) Persentase Titik Pemantauan Kualitas Air Permukaan di Kabupaten Temanggung

Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pemantauan terhadap kualitas air pada badan-badan air permukaan, seperti sungai, danau, dan waduk. Indikator ini penting untuk menilai tingkat pencemaran, menjaga kesehatan ekosistem perairan, serta menyediakan data yang akurat sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Indikator ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya sistem pemantauan

kualitas air yang andal dan berkelanjutan.

9) Persentase Titik Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Temanggung

Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan pemantauan terhadap kondisi udara. Pemantauan kualitas udara sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk dan area dekat sumber polusi seperti jalan utama dan kawasan industri. Dengan adanya pemantauan yang terukur dan berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi pencemaran lebih dini serta merumuskan kebijakan pengendalian udara ambien yang lebih efektif dan berbasis data.

10) Persentase RTH Publik Kabupaten yang Terpelihara

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan, menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan ekosistem perkotaan. Selama periode 2020 – 2024, Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya menjaga RTH publik milih pemerintah dengan capaian sebagaimana pada tabel 2.135

Tabel 2.135
Persentase RTH Publik Kabupaten Temanggung yang Terpelihara Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	100	100	100	100	73,61
2	Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani (m^2)	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.352,21
3	Luas RTH Milik Pemerintah Daerah (m^2)	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.628,3	86.232,21

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.135, persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terpelihara menunjukkan konsistensi penuh pada tahun 2020 hingga 2023 sebesar 100%, namun mengalami penurunan menjadi 73,61% pada tahun 2024. Penurunan ini bukan disebabkan oleh berkurangnya

luasan RTH yang tertangani, melainkan karena adanya penambahan luasan total RTH menjadi 86.232,21 m² akibat perpindahan aset pengelolaan. Beberapa tambahan RTH tersebut antara lain Hutan Kota Potrokasan, RTH Taman Pikatan, serta Hutan Cagar Alam/Monumen Kuda Lumping. Selain itu, perubahan fungsi sebagian RTH menjadi area non-RTH juga berkontribusi terhadap turunnya persentase RTH yang tertangani.

11) Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti

Pada tahun 2020 – 2024, seluruh pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung telah ditindaklanjuti. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat responsif terhadap keluhan masyarakat terkait isu lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong partisipasi warga dalam pelestarian lingkungan.

12) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup menunjukkan angka maksimal 100% sejak 2021 hingga 2024. Ini mengindikasikan bahwa Pemkab Temanggung tidak hanya memastikan keberadaan dokumen lingkungan, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap implementasinya.

13) Persentase Pembinaan Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Air

Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air tercatat pada tahun 2024 dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan terhadap potensi pencemaran air mulai dilakukan secara serius.

Mengingat pencemaran air memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan ekosistem, pembinaan ini menjadi langkah awal yang penting. Dengan pembinaan yang tepat, pelaku usaha dapat mengetahui standar teknis pengelolaan limbah cair yang sesuai.

14) Persentase Pembinaan Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Udara

Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara tercatat pada tahun 2024 dengan capaian 100%. Hal ini menandakan adanya komitmen baru dalam membina usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara. Pembinaan ini penting untuk mengurangi potensi gangguan kesehatan masyarakat akibat kualitas udara buruk. Melalui pendekatan preventif, pelaku usaha bisa lebih siap dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan.

15) Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan

Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Cakupan sekolah berwawasan lingkungan adalah jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung dari seluruh sekolah di Kabupaten Temanggung tingkat SD/MI, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta sebanyak 750 sekolah. Adapun Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan sebagaimana pada tabel 2.136.

Tabel 2.136
Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan Kabupaten Temanggung yang Terpelihara Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sekolah Adiwiyata	193	205	209	209	217
2	Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung	744	750	750	750	750
3	Persentase (%)	26,48	27,33	27,87	27,87	28,93

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Persentase sekolah berwawasan lingkungan atau sekolah Adiwiyata di

Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2024. Jumlah sekolah Adiwiyata secara akumulatif meningkat dari 193 sekolah pada tahun 2020 menjadi 217 sekolah pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menanamkan nilai-nilai lingkungan hidup sejak dini. Sekolah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga kelestarian alam di tingkat komunitas.

16) Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup

Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang Lingkungan Hidup. Penghargaan lingkungan hidup yang sudah diraih yaitu sekolah berwawasan lingkungan tingkat Asean, Mandiri, Nasional dan Provinsi, Kalpataru (Kelompok masyarakat/Kelompok tani/KTH) yang secara berkelanjutan melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, Proklim (RW/Kelurahan) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim. Adapun jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup tahun 2020 – 2024 di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.137.

Tabel 2.137
Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah yang mendapatkan penghargaan	NA	14	11	16	25
2	Jumlah usulan penghargaan yang diusulkan tiap tahun	NA	17	13	9	15
3	Persentase (%)		82,35	84,62	100	100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

17) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolah Sampah

Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, non organik dan residu. Sampah organik dapat dikompos menjadi pupuk organik atau kompos maupun untuk budidaya maggot BSF yang saat ini banyak dikembangkan, sampah anorganik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai

pengganti plastik belanja dan lain-lain. Adapun capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 tersaji pada tabel 2.138.

Tabel 2.138
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian s.d Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (Ton/Tahun)	8.853,15	1.938,25	34.088,15	36.300,9	46.089,71
2	Jumlah timbulan sampah (Ton/Tahun)	181.640,08	182.562,96	146.050,37	147.358,00	148.153,13
3	Persentase (%)	4,87	1,06	23,34	24,63	31,11

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Timbulan sampah di Kabupaten Temanggung meningkat pada setiap tahun yang juga menyebabkan peningkatan pada jumlah sampah yang masuk di TPA Sanggrahan. Pada tahun 2024 sampah masuk TPA sebesar 121,50 ton/hari, tahun 2023 terdapat 120,48 ton/hari yang masuk ke TPA. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebanyak 48,88 ton/hari, tahun 2020 sebesar 70,04 ton/hari, tahun 2021 sebanyak 109,87 ton/hari dan tahun 2022 sebanyak 125,35 ton/hari. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sanggrahan yang mengalami penumpukan sampah di landfill. Oleh karena itu diperlukan pengolahan sampah pada fasilitas pengolahan sampah agar sampah yang masuk ke TPA Sanggrahan berkurang.

18) Persentase Sampah yang Terkelola

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter). Kebijakan pengelolaan sampah dalam Perda di atas meliputi dua (hal), yaitu:

a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali,
b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Definisi pengelolaan sampah baik kegiatan pengurangan dan penanganan dibatasi dengan definisi yang tercantum pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa:

a. Pengurangan Sampah (*waste minimization*) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna ulang dan daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat;
b. Penanganan sampah (*waste handling*) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, non organik dan residu. Sampah organik dapat dikompos menjadi pupuk organik atau kompos maupun untuk budidaya maggot BSF yang saat ini banyak dikembangkan, sampah anorganik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plastik belanja dan lain-lain. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada depo transfer atau kontainer sampah untuk diangkut atau ditangani di TPA. Adapun persentase

sampah yang terkelola di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.139.

Tabel 2.139
Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No		Uraian	Capaian s.d Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengurangan sampah						
	1.	Jumlah Pengurangan Sampah (ton/tahun)	164,00	18.306,20	40.682,72	44.305,86	46.672,57
		a. Pengelolaan sampah di Rumah Tangga			29.210,07	32.418,7	34.168,58
		b. Pembatasan sampah di Sekolah			57,59	49,23	49,37
		c. Pembatasan sampah di Perkantoran			125,86	125,87	126,21
		d. Bank Sampah (Ton/tahun)	164,00	49,90	45,19	39,19	28,20
		e. TPSD (Ton/tahun)	-	18.256,30	6.534,27	6.893,36	6.912,24
		f. TPS3R			4.709,73	4.778,82	5.387,96
	2.	Persentase Pengurangan Sampah (%)	0,09	10,03	27,86	30,07	31,50
2	Penanganan sampah						
	1.	Jumlah sampah tertangani (Ton/tahun)	43.839,97	40.112,11	45.764,61	45.970,76	46.531,99
		a. Jumlah sampah terkelola di TPS 3R/Depo Transfer (Ton/tahun)	8.689,15	1.887,63	2.062,85	1.995,35	2.182,93
		b. Jumlah sampah tertangani di TPA (Ton)	35.150,82	38.224,48	43.701,76	43.975,41	44.349,06
	2.	a. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/hari	497,64	500,17	400,17	403,72	405,90
		b. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/tahun	181.640,08	182.562,96	146.050,37	147.358,00	148.153,13
	3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	24,23	21,97	31,33	31,20	31,41
3	Pengelolaan Sampah						
	1.	Persentase Pengelolaan Sampah (%)	24,32	32	59,19	61,26	62,91

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025
**data jumlah penduduk DKB Semester II Tahun 2023 Disdukcapil 811.798 jiwa.*
**pada tahun 2022 semester 2 asumsi timbulan sampah sebesar 0.5 kg/org/hr*

Berdasarkan Tabel II.X, jumlah sampah yang masuk di TPA Sanggrahan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2024 sampah masuk TPA sebesar 121,50 ton/hari, tahun 2023 terdapat 120,48 ton/hari yang masuk ke TPA. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebanyak 48,88 ton/hari, tahun 2020 sebesar 70,04 ton/hari, tahun 2021 sebanyak 109,87 ton/hari dan tahun 2022 sebanyak 125,35 ton/hari. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sanggrahan yang mengalami penumpukan sampah di *landfill*.

Pembatasan sampah di sekolah berupa penggunaan wadah ramah lingkungan pengganti plastik untuk bekal dan jajanan di kantin sekolah, sedangkan pada perkantoran berupa penggunaan wadah

ramah lingkungan dalam penyajian hidangan untuk tamu dan rapat. Pengelolaan sampah yang intensif baik melalui TPS 3R maupun bank sampah yang mana pengelolaan melalui bank sampah yang relatif sudah baik, akan tetapi kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditentukan.

Penanganan sampah di TPA yang mencakup 44.349,06 ton mencapai rata-rata berkisar 29,93% dari total timbulan sampah. Secara umum penanganan sampah di TPA ke depan diharapkan semakin berkurang, dan lebih banyak penanganan pada sumbernya, TPS 3R, bank sampah atau penanganan lainnya. Secara umum pemrosesan sampah di TPA meliputi pemilahan sampah plastik dan sampah organik yang berupa daun untuk kompos, sementara penanganan gas metan masih rendah.

19) Cakupan Pelayanan Persampahan

Di Kabupaten Temanggung, pelayanan persampahan terus ditingkatkan setiap tahunnya untuk mencakup lebih banyak desa dan kelurahan. Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah, baik melalui layanan langsung oleh Pemda maupun mendorong partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah secara mandiri. Adapun cakupan pelayanan persampahan Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.140.

Tabel 2.140
Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	131	155	177	198	215
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri TPA/ pengelolaan sampah mandiri	18	27	36	56	69
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda	113	128	141	142	146
2	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	45,33	53,63	61,24	68,51	74,39

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.140., cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah desa dan

kelurahan yang mendapatkan layanan pengelolaan sampah naik dari 131 (45,33%) pada tahun 2020 menjadi 215 (74,39%) pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan persampahan, baik melalui layanan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui pengelolaan mandiri atau swasta. Jumlah desa yang dilayani secara mandiri/swasta meningkat hampir empat kali lipat, dari 18 menjadi 69 desa/kelurahan, menunjukkan partisipasi masyarakat dan sektor non-pemerintah dalam pengelolaan sampah yang semakin tumbuh. Keberlanjutan peningkatan cakupan ini penting untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih menyeluruh dan ramah lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peranan yang sangat strategis dalam memastikan hak-hak sipil masyarakat Kabupaten Temanggung dapat terpenuhi secara optimal. Salah satu fokus pada urusan ini adalah peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, akurat, dan merata.

1) Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya menjadi fondasi penting dalam akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik dan program pembangunan. Melalui berbagai inovasi layanan dan penguatan sistem digitalisasi, Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya meningkatkan cakupan dan kualitas layanan adminduk bagi seluruh penduduk. Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.141.

Tabel 2.141
Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NA	NA	NA	96,68	98,52
2	Persentase kepemilkan KTP	NA	NA	NA	99,82	99,73
3	Persentase kepemilkan KK	NA	NA	NA	99,93	99,49
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 th	NA	NA	NA	99,43	99,75
5	Persentase kepemilikan akta kematian	NA	NA	NA	100	100
6	Persentase kepemilikan KIA	NA	NA	NA	84,21	93,62

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025

Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka capaian sebesar 96,68% menunjukkan tingkat penetrasi layanan administrasi kependudukan yang cukup baik, sementara pada tahun 2024, persentase ini meningkat menjadi 98,52%, menunjukkan adanya kemajuan yang konsisten dalam memenuhi kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan administrasi, baik melalui inovasi digital maupun percepatan proses pembuatan dokumen, yang pada gilirannya berkontribusi pada tercapainya layanan publik yang lebih inklusif dan efisien. Capaian ini juga mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk berbagai keperluan administratif dan sosial.

Pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan akurat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap hak-hak sipil masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan yang sah dan valid, Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai mengukur ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan sebagai indikator baru dalam penilaian kualitas layanan publik. Pengukuran ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap proses administrasi, mulai

dari perekaman data hingga penerbitan dokumen seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya, dapat diselesaikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan, sehingga memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat.

Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan memegang peran strategis dalam menjamin hak identitas setiap penduduk serta mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data kependudukan. Oleh karena itu, peningkatan cakupan kepemilikan dokumen, kualitas infrastruktur pelayanan, dan adopsi teknologi digital menjadi fokus utama dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Temanggung. Adapun gambaran indikator kinerja bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.142.

Tabel 2.142
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kepemilikan KK, KTP elektronik, KIA	%	NA	89,59	78,71	89,47	97,17
2	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	NA	99,39	99,79	99.85	99,98
3	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan administrasi kependudukan	%	NA	NA	NA	100	94,97
4	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	NA	NA	NA	18,01	31,05

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025

Indikator-indikator kinerja pada periode 2020–2024 memberikan gambaran capaian yang signifikan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan lanjutan untuk pelayanan yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

1) Cakupan Kepemilikan KK, KTP Elektronik, KIA

Indikator ini menunjukkan tren yang cukup fluktuatif, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 97,17%, naik signifikan dari 89,47% pada 2023. Meski sempat menurun drastis di tahun 2022 (78,71%), peningkatan dalam dua tahun terakhir menunjukkan keberhasilan program pelayanan kependudukan yang lebih masif, baik melalui layanan langsung maupun jemput bola. Adapun rincian kepemilikan KK, KTP Elektronik, dan KIA di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel 2.143

Tabel 2.143
Persentase Kepemilikan KK, KTP Elektronik, dan KIA Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1,	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	98,15	98,53	99,99	99.93	99,49
2	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	%	84	99,68	99,29	99,82	99,73
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	56,92	65,02	49,77	84.21	93,62

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.143 capaian kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang sangat positif. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) secara konsisten berada di atas 98%, dengan capaian tertinggi mencapai 99,99% pada tahun 2022, menunjukkan bahwa hampir seluruh keluarga telah memiliki dokumen dasar ini. Kepemilikan KTP elektronik juga mengalami peningkatan signifikan dari 84% pada 2020 menjadi stabil di atas 99% sejak 2021, mencerminkan keberhasilan layanan perekaman KTP-el secara luas. Sementara itu, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mengalami lonjakan tajam dalam dua tahun terakhir, dari 49,77% pada 2022 menjadi 93,62% di 2024, sebagai hasil dari peningkatan kesadaran dan layanan proaktif pemerintah terhadap hak identitas anak. Capaian ini menjadi indikator penting bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Temanggung kini telah memiliki dokumen kependudukan dasar, yang menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan publik lainnya.

2) Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

Capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik dan terus meningkat secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Dimulai dari 99,39% pada 2021, meningkat menjadi 99,98% pada 2024. Angka ini menunjukkan hampir seluruh peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian telah tercatat secara resmi oleh pemerintah. Keberhasilan ini mencerminkan kinerja yang solid dalam hal pencatatan sipil, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen legal untuk status hukum dan akses terhadap layanan negara. Adapun rincian kepemilikan akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian di Kabupaten Temanggung

tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel 2.144.

Tabel 2.144
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1,	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	69,37	70,02	73,74	99,43	99,94
2	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.144, apaian kepemilikan akta pencatatan sipil di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten. Kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan signifikan dari 69,37% pada tahun 2020 menjadi 99,94% pada 2024, mencerminkan keberhasilan masif dalam pencatatan kelahiran dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen tersebut. Sementara itu, kepemilikan akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian secara konsisten mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut, menandakan bahwa sistem pencatatan sipil telah berjalan sangat efektif dan merata. Capaian ini mencerminkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang optimal, serta komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh peristiwa penting dalam kehidupan warga tercatat secara legal dan sah.

3) Persentase Terpeliharanya Sarpras SIAK untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan

Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pihak penyelenggara dan instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) sebagai satu kesatuan sistem administrasi kependudukan. Untuk memberikan pelayanan administasi kependudukan kepada masyarakat,

Dindukcapil menyediakan sarana prasarana SIAK sehingga harus memastikan tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendudukung layanan administrasi kependudukan tersebut. Persentase terpeliharanya sarana prasarana SIAK pada tahun 2023 mencapai 100%, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 94,97%. Meski relatif tinggi, penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang sangat penting untuk kelancaran layanan dokumen kependudukan. Penurunan ini perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kualitas pelayanan melalui perawatan berkala.

4) Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Sebagai indikator baru yang mendukung transformasi digital layanan publik, pelaksanaan aktivasi IKD menunjukkan peningkatan dari 18,01% pada 2023 menjadi 31,05% pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan respons positif masyarakat terhadap digitalisasi dokumen identitas, meskipun cakupan masih relatif rendah. Untuk mendorong percepatan, diperlukan sosialisasi yang masif, peningkatan literasi digital masyarakat, serta integrasi IKD dengan berbagai layanan publik agar manfaatnya semakin dirasakan secara luas.

5) Persentase OPD yang Melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur tingkat integrasi dan pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Indikator ini mencerminkan komitmen OPD dalam mendukung kebijakan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan terverifikasi, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, perumusan kebijakan yang tepat sasaran, serta pengawasan yang lebih transparan. Pemanfaatan data kependudukan secara lintas sektor juga penting untuk mendorong sinergi antar OPD dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penataan layanan administrasi kependudukan yang inklusif.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Salah satu indikator keberhasilan dalam bidang ini adalah meningkatnya persentase desa mandiri, yang mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menyediakan pelayanan publik secara optimal.

1) Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Adapun persentase desa mandiri di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.145.

Tabel 2.145
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Mandiri	10	15	26	55	101
2	Jumlah Desa di Kabupaten Temanggung	266	266	266	266	266
3	Persentase Desa Mandiri	3,76	5,63	9,77	20,68	37,97

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.145, pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam persentase Desa Mandiri di Kabupaten Temanggung, dari hanya 3,76% pada tahun 2020 menjadi 37,97% pada tahun 2024. Lonjakan ini mencerminkan hasil dari berbagai intervensi dan program pemberdayaan desa yang berhasil mendorong kemandirian, baik dalam aspek tata kelola, ekonomi, maupun pelayanan publik. Kenaikan jumlah Desa Mandiri dari 10 menjadi 101 desa menunjukkan bahwa semakin banyak desa yang mampu memenuhi indikator-indikator kemandirian yang ditetapkan. Namun demikian, dengan total 266 desa, capaian ini masih menyisakan peluang besar untuk mendorong lebih banyak desa menuju status mandiri, melalui penguatan kapasitas pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung terciptanya

desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui program-program pemberdayaan, masyarakat desa didorong untuk aktif dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, sehingga mampu mengenali dan mengelola potensi lokal secara optimal. Adapun gambaran indikator kinerja bidang pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada ttabel 2.146.

Tabel 2.146
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa*	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik*	%	NA	NA	NA	NA	NA
3	Presentase penyusunan LPPD sesuai Ketentuan*	%	NA	NA	NA	99,62	100
4	Persentase laporan LKD*	%	NA	NA	NA	NA	NA
5	Persentase BUM Desa Maju dan berkembang*	%	0,88	15,18	8,91	39,53	38,34
6	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa*	%	NA	NA	NA	NA	NA
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber:Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2025

Capaian indikator dalam bidang ini menjadi cerminan sejauh mana desa telah mampu menjalankan fungsi-fungsi pembangunan yang berbasis pada partisipasi dan kemandirian masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan.

1) Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Rangka Penataan Desa

Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Rangka Penataan Desa merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur sejauh mana intervensi pemerintah dalam mendukung penataan wilayah dan tata kelola desa secara terstruktur. Indikator ini mencerminkan upaya fasilitasi yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data, serta menyesuaikan batas administratif dan pemanfaatan ruang secara legal dan berkelanjutan. Melalui fasilitasi ini, desa diharapkan mampu mengelola potensi dan sumber daya secara optimal, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat posisi dalam sistem pembangunan wilayah.

2) Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja Baik

Data untuk indikator ini belum tersedia selama periode 2020 hingga 2024 (NA) karena merupakan indikator baru yang mulai digunakan dalam rangka mendorong profesionalisme dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Ke depan, indikator ini akan menjadi penting untuk memantau efektivitas aparatur desa dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan pembangunan desa. Oleh karena itu, perlu segera dibangun mekanisme penilaian kinerja yang terstandar dan berkelanjutan agar dapat menghasilkan data yang akurat dan menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan kapasitas aparatur desa.

3) Presentase Penyusunan LPPD Sesuai Ketentuan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) menunjukkan tren positif, yaitu 99,62% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan kepatuhan desa dalam menyusun laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan indikator penting dalam aspek tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kapasitas administrasi desa dalam pelaporan kinerja tahunan. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan dijadikan standar untuk indikator tata kelola desa lainnya.

4) Persentase Laporan LKD

Data untuk indikator ini belum tersedia selama periode 2020 hingga 2024 (NA) karena merupakan indikator baru yang mulai digunakan dalam rangka mendorong akuntabilitas kepala desa kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKD) memiliki peran penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala desa atas pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran. Ke depan, diperlukan upaya penguatan kapasitas dan komitmen desa dalam menyusun LKD serta dukungan regulasi dan sistem pelaporan yang terintegrasi agar indikator ini dapat dioptimalkan sebagai bagian dari tata kelola desa yang transparan dan partisipatif.

5) Persentase BUM Desa Maju dan Berkembang

Persentase BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) yang masuk kategori maju dan berkembang menunjukkan peningkatan signifikan dari 0,88% pada 2020 menjadi 39,53% pada 2023, dan stagnan di angka

yang sama pada 2024. Lonjakan pada 2023 menunjukkan keberhasilan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi desa dalam kurun waktu tersebut, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 38,34 yang menandakan perlunya strategi baru untuk menjaga momentum. Untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut, dibutuhkan dukungan pendanaan, akses pasar, pendampingan manajemen usaha, serta inovasi produk dan layanan agar BUM Desa dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan ekonomi desa.

6) Persentase Peningkatan Kerjasama Desa

Persentase Peningkatan Kerjasama Desa merupakan indikator baru yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana desa-desa menjalin kemitraan dan kolaborasi, baik antar desa maupun dengan pihak ketiga seperti pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat. Indikator ini mencerminkan semangat gotong royong dan sinergi dalam pengelolaan sumber daya, penyediaan layanan publik, serta pengembangan potensi ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Peningkatan kerjasama desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan kawasan perdesaan, memperluas akses terhadap pendanaan dan teknologi, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran strategis dalam mewujudkan keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Temanggung, pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk menekan angka kelahiran yang tidak direncanakan, menunda usia kawin pertama, meningkatkan akses dan kualitas layanan keluarga berencana, serta memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program berbasis siklus kehidupan. Gambaran indikator kinerja selama tahun 2020–2024 menunjukkan adanya dinamika yang signifikan, baik dari sisi pencapaian prevalensi kontrasepsi modern, penurunan unmet need, hingga penguatan peran keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan. Melalui program-program seperti pelayanan Keluarga Berencana (KB), pengembangan kampung keluarga berkualitas, dan bina keluarga, pemerintah berupaya mengoptimalkan peran keluarga, dalam berbagai

aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketahanan keluarga. Selain itu, pengendalian penduduk juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memastikan ketersediaan sumber daya yang mencukupi bagi generasi mendatang.

1) Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika demografi suatu wilayah. Laju pertumbuhan yang terkendali menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, karena berdampak langsung terhadap kebutuhan akan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemantauan terhadap laju pertumbuhan penduduk perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa peningkatan jumlah penduduk tetap sejalan dengan kapasitas dan daya dukung daerah. Adapun laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada gambar 2.56.

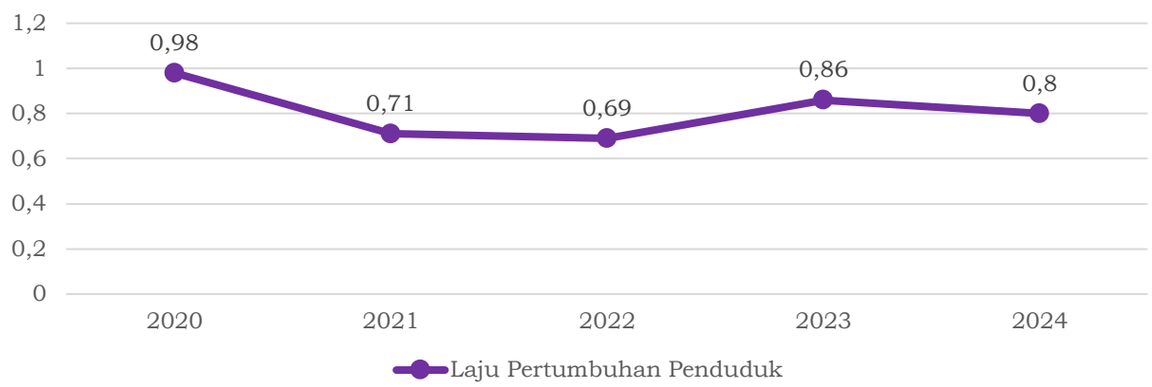

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.56
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan keberhasilan pengendalian kependudukan, sekaligus adanya pengaruh faktor eksternal. Penurunan signifikan dari 0,98% pada 2020 menjadi 0,69% pada 2022 menunjukkan dampak nyata dari program-program keluarga berencana dan edukasi masyarakat terkait perencanaan keluarga. Penurunan ini juga dapat dikaitkan dengan menurunnya angka kelahiran serta meningkatnya usia kawin pertama, yang menunda usia reproduktif perempuan. Namun, kenaikan kembali menjadi 0,86% pada 2023 mengindikasikan adanya

faktor pemicu, seperti pemulihan sosial pasca-pandemi COVID-19, peningkatan angka kelahiran yang sempat tertunda, serta arus migrasi masuk karena faktor ekonomi dan pekerjaan. Penurunan kembali pada 2024 ke angka 0,8% menunjukkan upaya stabilisasi demografis mulai menunjukkan hasil. Meskipun tetap dalam kisaran yang aman, fluktuasi ini menunjukkan pentingnya pemerintah untuk terus memperkuat sistem pemantauan dan intervensi yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan mobilitas penduduk agar pengendalian pertumbuhan tetap efektif dalam jangka panjang.

2) TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total)

TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total) merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika kependudukan, khususnya terkait dengan tingkat kelahiran di suatu wilayah. TFR mencerminkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, dengan asumsi bahwa pola kelahiran mengikuti kondisi saat ini. TFR yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ledakan penduduk, sementara TFR yang terlalu rendah berpotensi menimbulkan tantangan dalam regenerasi penduduk. Pemantauan terhadap TFR menjadi krusial dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Di Kabupaten Temanggung, data TFR menjadi acuan dalam mengevaluasi efektivitas program kependudukan dan keluarga berencana serta dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun TFR Kabupaten Temanggung selama periode 2022–2024 disajikan pada Tabel 2.147.

Tabel 2.147
***Total Fertility Rate* Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)	Angka	NA	NA	2,01	1,35	1,55

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.147, *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan angka kelahiran selama periode 2022–2024. Setelah tercatat sebesar 2,01 pada tahun 2022 yang masih berada pada tingkat penggantian (*replacement level fertility*), angka TFR menurun tajam menjadi 1,35 pada tahun 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi 1,55 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan semakin rendahnya rata-rata jumlah anak yang

dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja, keberhasilan program keluarga berencana, serta perubahan preferensi dalam struktur keluarga.

3) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indek Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: (a) iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; (b) iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70; dan (c) iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Adapun Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan sebagaimana pada tabel 2.148.

Tabel 2.148
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	NA	55,97	58,19	62,08	62,08

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 55,97 (berkembang) pada 2021 menjadi 62,08 (berkembang) pada 2023 – 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan keluarga, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Namun, masih perlu upaya tambahan untuk terus meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mendorong iBangga ke tingkat tangguh, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, penguatan peran keluarga dalam pendidikan anak, serta memperkuat kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga di berbagai sektor.

Pembangunan keluarga di Kabupaten Temanggung merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai indikator terkait kependudukan dan keluarga, seperti data mikro keluarga, penggunaan alat kontrasepsi, usia kawin pertama, hingga indeks pembangunan keluarga, menjadi ukuran keberhasilan program yang dijalankan. Adapun gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten

Temanggung periode 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.149

Tabel 2.149
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	NA	NA	NA	NA	58,8
2	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	13,76	12,99	11,47	8,62	7,60
3	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) *	angka	NA	19,8	19,6	20,5	19,8
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specifik Fertility Rates (ASFR) 15- 19 Tahun)	%	21,32	9,80	6,67	14,10	9,48
5	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	82,61	75,30	76,58	45,77	46,45
6	Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern contraceptive* (mCPR) *	%	82,61	75,3	76,58	80.14	77,5
7	Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri*	%	22,84	22,84	23,18	23,53	14,88
8	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita*	%	NA	NA	NA	NA	45,53
9	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja*	Angka	NA	NA	NA	NA	87,23
10	Indeks lansia berdaya*	Angka	NA	NA	NA	NA	57,83
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber:DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Gambaran capaian kinerja program pada urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Temanggung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam upaya membangun keluarga yang lebih sehat, mandiri, dan berkualitas di masa depan.

1) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Pada tahun 2024, IPBK Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 58,8, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan yang mempertimbangkan aspek kependudukan secara terpadu. Pencapaian ini menjadi titik awal yang penting sebagai tolok ukur efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan. Ke depan, pengukuran IPBK dapat membantu pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan kependudukan yang lebih baik.

2) Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Jumlah PUS *unmet need* mengalami penurunan dari 17.948 orang

pada tahun 2020 menjadi 9.493 orang pada tahun 2024, meskipun jumlah total PUS relatif stabil, dengan sedikit penurunan dari 130.415 pada tahun 2020 menjadi 124.978 pada tahun 2024. Berdasarkan ttabel 2.150, persentase PUS *unmet need* juga menunjukkan tren positif dengan penurunan signifikan dari 13,76% pada tahun 2020 menjadi 7,60% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan keberhasilan program keluarga berencana (KB) dalam meningkatkan akses dan pelayanan kepada PUS, sehingga lebih banyak pasangan dapat memenuhi kebutuhan KB mereka.

Tabel 2.150
Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PUS *Unmet Need*	17.948	17.012	15.084	11.059	9.493
2	Jumlah PUS	130.415	130.996	131.516	128.266	124.978
3	Presentase PUS *Unmet Need*	13,76	12,99	11,47	8,62	7,60

Sumber:DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

3) Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Median Usia Kawin Pertama (MUKP) adalah median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia 25-49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin. Median usia kawin pertama menunjukkan sebanyak 50 persen dari seluruh wanita usia 25-49 tahun sudah melakukan perkawinan pada usia tertentu. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi dari 19,8 tahun pada 2021, turun menjadi 19,6 tahun pada 2022, kemudian meningkat menjadi 20,5 tahun pada 2023, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 19,8. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia muda masih terjadi dan perlu mendapat perhatian serius melalui intervensi kebijakan yang mendorong penundaan usia kawin, khususnya melalui edukasi dan pemberdayaan remaja perempuan.

4) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specifik Fertility Rates* (ASFR) 15 – 19 Tahun)

Age Specifik Fertility Rates (ASFR) 15 – 19 Tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur 15 – 19 tahun. Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun mengalami penurunan signifikan dari 21,32% pada 2020 menjadi 6,67% pada 2022, namun meningkat kembali ke 14,10% pada 2023 dan kembali turun menjadi 9,48% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukan bahwa persentase pernikahan

dini di Kabupaten Temanggung masih tinggi. Tantangan dalam menekan angka kelahiran remaja ini membutuhkan intervensi lebih lanjut melalui program pendidikan kesehatan reproduksi dan sosialisasi perencanaan keluarga. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selalu berupaya menurunkannya dengan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui jalur sekolah (SSK/Sekolah Siaga Kependudukan) dan KIE kepada remaja melalui kegiatan di kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-Remaja), maupun Sosialisasi *Jo Kawin Bocah*.

5) Persentase Keberhasilan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang mengalami penurunan drastis dari 82,61% pada 2020 menjadi hanya 46,45% pada 2024, berbanding lurus dengan pernurunan jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepi sebagaimana ditunjukan pada ttabel 2.151. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, seperti dari sisi dukungan anggaran pencabutan implan yang rendah mengakibatkan peserta KB yang seharusnya dicabut dan ingin berKB kembali menjadi PUS DO KB, preferensi pasangan usia subur, masih rendahnya animo masyarakat dalam pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) melalui *tubektomi* dan Metode Operasi Pria (MOP) melalui *vasektomi* maupun faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi.

Tabel 2.151
Persentase Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Peserta KB MKJP	107.739	98.622	100.714	47.176	47.514
2	Jumlah (PUS) yang berKB	130.415	130.966	131.516	103.082	102.297
3	Persentase	82,61	75,30	76,58	45,77	46,45

Sumber:DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

6) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)

Prevalensi mCPR (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*) KB adalah indikator yang mengukur persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi modern dari total PUS yang ada. Kontrasepsi modern yaitu meliputi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, implan, MOW (tubektomi), dan MOP (vasektomi)) dan

metode jangka pendek (Pil KB, suntik KB, kondom, dan KB darurat). Adapun prevalensi kontrasepsi PUS di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar 2.57

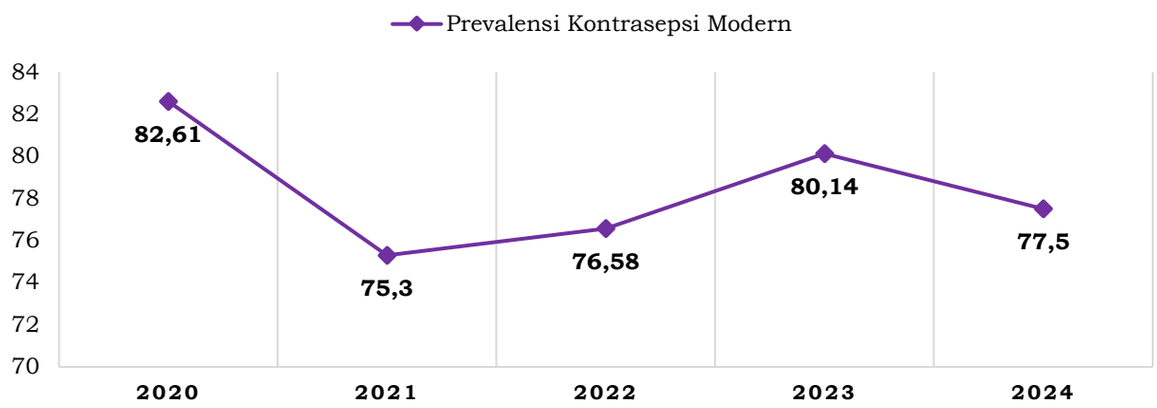

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.57
Prevalensi Kontrasepsi Modern Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan data prevalensi kontrasepsi yang diambil dari aplikasi Simantap Kon KB pada Tabel II.X, angka prevalensi kontrasepsi modern menunjukkan peningkatan dari 75,30% pada 2021 menjadi 77,5% pada 2024. Peningkatan ini terjadi disebabkan oleh faktor jumlah yang PUS DO KB yang meningkat dimana pada usia 49 ketas sudah tidak masuk kategori PUS yang berakibat juga pada menurunnya jumlah peserta KB aktif.

7) Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri

Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Persentase kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang lambat, dari 22,84% pada 2020 menjadi 23,53% pada 2024. Peningkatan yang minim ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam pengembangan kampung keluarga berkualitas mandiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan koordinasi, regulasi, dan pendanaan untuk mempercepat perkembangan Kampung KB agar lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

8) Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Bina Keluarga Balita

Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita

(BKB) di Kabupaten Temanggung tercatat mencapai 45,53% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan hampir setengah dari keluarga dengan balita telah terlibat dalam program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan yang holistik, mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan kolaboratif antara pemerintah, kader, serta lembaga masyarakat untuk mendorong keterlibatan aktif keluarga dalam BKB sebagai fondasi penting pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

9) Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja

Indeks pengasuhan keluarga dengan remaja sebesar 87,23 pada 2024 menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Temanggung relatif mampu memberikan pengasuhan yang baik kepada anak remaja, yang sangat penting untuk mencegah masalah sosial dan mendukung perkembangan remaja yang sehat. Capaian ini mencerminkan efektivitas program pembinaan keluarga serta peran aktif orang tua dalam membimbing anak pada masa transisi menuju dewasa. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengasuhan ini, diperlukan dukungan berkelanjutan melalui edukasi keluarga, peningkatan kapasitas kader, dan kolaborasi lintas sektor.

10) Indeks Lansia Berdaya

Indeks lansia berdaya sebesar 57,83 pada 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi lansia dalam keluarga dan masyarakat. Upaya peningkatan layanan dan pemberdayaan lansia perlu diperkuat agar kelompok usia lanjut ini dapat tetap produktif dan mandiri. Hal ini penting mengingat jumlah lansia yang terus meningkat dan perannya yang strategis dalam mendukung ketahanan keluarga lintas generasi.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Sektor perhubungan di Kabupaten Temanggung memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran arus barang dan jasa. Kinerja sektor ini diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan kondisi keselamatan jalan, kelengkapan infrastruktur transportasi, layanan angkutan umum, serta pengelolaan fasilitas pendukung lainnya. Dalam kurun waktu 2020 – 2024, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan perhubungan, termasuk peningkatan penerangan jalan,

penyediaan rambu lalu lintas, serta optimalisasi pengelolaan terminal dan jaringan trayek. Adapun gambaran indikator kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.152

Tabel 2.152
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Perhubungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	34,78	35,26	41,06	41,55	41,55
2	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	64,55	66,09	66,17	66,69	66,84
3	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	%	83,60	96,28	99,56	99,62	99,62
4	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	%	31,69	31,69	32,08	32,49	34,17
5	Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	NA	NA	NA	NA	63,52
6	Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	%	97,27	98,18	98,18	100	100
7	Persentase Layanan Perhubungan*	%	NA	NA	NA	NA	100
8	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	%	NA	NA	NA	NA	89,17
9	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	NA	NA	NA	NA	80
10	Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	71,43	85,71	85,71	100	100
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.152, meskipun beberapa indikator menunjukkan peningkatan signifikan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti pemerataan akses transportasi dan peningkatan standar pelayanan angkutan umum. Hal ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan sektor perhubungan agar dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi bagi seluruh masyarakat. Capaian kinerja program pada urusan bidang perhubungan Kabupaten Temanggung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam pengelolaan sektor perhubungan.

1) Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota

Indikator ini mengalami peningkatan dari 34,78% pada tahun 2020 menjadi 41,55% pada tahun 2023 dan tetap stagnan pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022, stagnasi

dalam satu tahun terakhir mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam penyediaan kelengkapan jalan agar mendekati kondisi ideal atau memadai guna meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

2) Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Persentase pemasangan rambu lalu lintas terus meningkat dari total akumulasi 1.721 unit (64,55%) pada tahun 2020 menjadi 1.782 unit (66,84%) pada tahun 2024 sebagaimana didapat dilihat pada gambar 2.58. Peningkatan yang relatif kecil setiap tahunnya menunjukkan bahwa pemasangan rambu-rambu lalu lintas dilakukan secara bertahap di Kabupaten Temanggung. Meskipun begitu, untuk mencapai kondisi ideal (2.666 unit) dan untuk mendukung keselamatan berlalu lintas, percepatan pemasangan rambu lalu lintas perlu dilakukan.

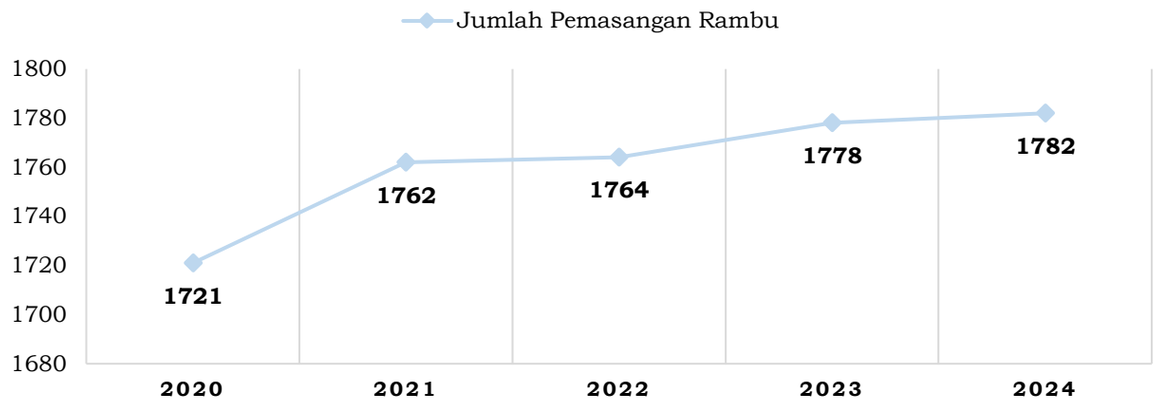

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.58
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

3) Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan

Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang wajib dilakukan uji berkala yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan. Berdasarkan definisi tersebut, persentase kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan di Kabupaten Temanggung menunjukkan

peningkatan signifikan dari 83,60% pada tahun 2020 menjadi 99,62% pada tahun 2023, yang kemudian stagnan pada tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh kendaraan yang wajib uji telah memenuhi standar kelaikan jalan, sehingga meningkatkan keselamatan transportasi darat di Kabupaten Temanggung.

4) Persentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten

Cakupan penerangan di jalan kabupaten mengalami sedikit peningkatan dari 31,69% pada tahun 2020 menjadi 34,17% pada tahun 2024. Progres cakupan penerangan jalan masih tergolong rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam pemasangan lampu penerangan jalan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, terutama di daerah yang masih minim penerangan.

5) Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung

Persentase meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kabupaten Temanggung mulai tercatat pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 63,52% atau dari 19.541 titik PJU dengan layanan listrik PLN, 12.413 diantaranya telah menerapkan sistem meterisasi KWh. Ini menandakan adanya upaya dalam mengukur konsumsi listrik penerangan jalan umum guna meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan anggaran pemerintah daerah. Ke depan, peningkatan cakupan meterisasi diharapkan dapat terus dilakukan guna mencapai efisiensi energi yang lebih maksimal di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

6) Persentase Titik Parkir yang Tertangani dan Dikelola dengan Baik

Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir yaitu mencapai 110 titik (100%) pada tahun 2023 dan 114 titik (100%) pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan manajemen parkir, baik dari segi penataan, pengawasan, maupun optimalisasi retribusi parkir. Dengan pengelolaan yang lebih baik, fasilitas parkir menjadi lebih tertata, mengurangi potensi kemacetan, serta meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain itu, pengelolaan parkir yang efektif juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur transportasi lainnya. Ke depan, keberlanjutan

pengelolaan parkir yang baik perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat serta pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan parkir di Kabupaten Temanggung.

7) Persentase Layanan Perhubungan

Persentase layanan perhubungan merupakan indikator baru yang mulai diperhitungkan dalam evaluasi kinerja sektor transportasi di Kabupaten Temanggung. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana layanan perhubungan telah memenuhi standar yang ditetapkan, baik dalam aspek infrastruktur, keamanan, maupun aksesibilitas bagi masyarakat. Selain itu, indikator ini juga menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas kebijakan transportasi yang diterapkan guna menciptakan layanan yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Ke depan, upaya peningkatan layanan perhubungan harus terus dilakukan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan regulasi untuk mendukung mobilitas masyarakat yang lebih baik.

8) Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan

Pemenuhan standar minimal pelayanan angkutan umum di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 89,17%, atau sebanyak 502 unit dari total 563 unit angkutan yang beroperasi. Standar ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2015 yang mengatur bahwa setiap penyelenggara angkutan umum wajib memastikan kelaikan kendaraan yang dioperasikan. Salah satu aspek utama dalam pemenuhan standar ini adalah kewajiban kendaraan untuk lolos uji berkala atau uji KIR, yang menjadi bukti bahwa angkutan tersebut layak jalan dan aman digunakan oleh masyarakat. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi umum.

9) Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Trayek

Sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor 551.2/395 tahun 2016 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung, jumlah jaringan trayek angkutan penumpang umum baik angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan di Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak 45 trayek. Dari 45 trayek tersebut, 36 trayek (80%) diantaranya telah terlayani angkutan umum.

Meskipun demikian, masih terdapat 20% jaringan trayek yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan angkutan umum, sehingga perlu adanya upaya optimalisasi. Optimalisasi pelayanan angkutan umum pada trayek diharapkan dapat menunjang sistem transportasi di Kabupaten Temanggung yang efektif dan merata.

10) Persentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik

Kabupaten Temanggung memiliki tujuh terminal tipe C yaitu Terminal Pingit, Terminal Kranggan, Terminal Plaza, Terminal Kerkop, Terminal Ngadirejo, Terminal Maron, dan Terminal Candiroto. Ketujuh terminal tipe C tersebut berada dalam kondisi baik, meningkat dari 71,43% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur terminal guna mendukung kelancaran sistem transportasi umum di Kabupaten Temanggung.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, serta keterjangkauan informasi bagi masyarakat. Di Kabupaten Temanggung, berbagai indikator kinerja pada bidang ini terus mengalami perkembangan, mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi.

1) Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.153.

Tabel 2.153
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,61	2,78	3,12	3,12	4,22
	Predikat	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Memuaskan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024 mencapai 4,22 dengan predikat memuaskan. Secara umum dapat digambarkan bahwa infrastruktur SPBE, layanan publik secara

elektronik, keamanan data dan infomasi di Kabupaten Temanggung dinilai baik. Dampak manfaatnya adalah masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan layanan-layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan mudah, seperti *free wifi* diarea publik, pelayanan publik berbasis elektronik yang efektif dan efisien, keamanan dan kenyamanan pengelolaan data pemerintah, serta jaminan tindak lanjut atas aduan dan keluhan masyarakat.

Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian pada evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai Domain Kebijakan Internal SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE, Domain Layanan SPBE.

2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Fokus utama evaluasi dan penilaian badan publik dengan hasil akhir adalah kepatuhan badan publik menjalankan standar pelayanan informasi publik, terutama menyangkut keterbukaan program, kegiatan, kinerja dan anggaran. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 -2024 disajikan pada tabel 2.154.

Tabel 2.154
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Sasaran	Nilai Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,50	89,56	88,33	97,38	95,86
	Kategori	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.154, bahwa pada tahun 2024 nilai KIP

Pemerintah Kabupaten Temanggung mencapai 95,86 dengan kategori Informatif. Ini merupakan capaian kedua PPID Pemkab Temanggung sebagai Badan Publik Informatif dalam pelaksanaan implementasi KIP sejak tahun 2012. Prestasi tersebut dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di Pemkab Temanggung, baik PPID Kabupaten Temanggung, seluruh PPID Pelaksana dan semua stakeholder terkait. Upaya tersebut antara lain dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) PPID Pelaksana, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pelaksana, pengembangan website dan dashboard PPID, serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

3) Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Indeks ini mencakup dua aspek utama, yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik, yang mencerminkan tingkat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mendukung transformasi digital. Adapun nilai Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.155

Tabel 2.155
Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	NA	3,5	3,5	3,63	4,46
**Data disamakan pada tahun sebelumnya karena tidak ada penilaian SPBE*							

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Capaian Indeks Layanan SPBE Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai indeks berada pada angka 3,5 yang menunjukkan kondisi awal implementasi layanan digital yang stabil, meskipun belum signifikan berkembang. Peningkatan mulai terlihat pada tahun 2023 dengan nilai 3,63, dan melonjak menjadi 4,46 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyediaan layanan digital, seperti optimalisasi aplikasi layanan publik, integrasi sistem informasi, serta peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur

teknologi informasi. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien kepada masyarakat.

4) Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah. Indeks ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain perencanaan strategis, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta efektivitas pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terpadu, transparan, efisien, dan responsif melalui penguatan tata kelola digital. Adapun nilai Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.156.

Tabel 2.156
Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	NA	2,5	*2,5	2,2	3,10
**Data disamakan pada tahun sebelumnya karena tidak ada penilaian SPBE*							

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Capaian Indeks Tata Kelola SPBE Kabupaten Temanggung dalam periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Nilai indeks tercatat sebesar 2,5 pada tahun 2021 dan tetap pada angka yang sama di tahun 2022 karena belum dilakukannya penilaian ulang. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 2,2 yang mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan SPBE, seperti koordinasi antar perangkat daerah atau kesiapan infrastruktur digital. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 3,10, menandakan adanya perbaikan dalam perencanaan, pengelolaan teknologi informasi, serta penyelenggaraan SPBE secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat ruang perbaikan, Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola digital dalam rangka memperkuat pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berbasis elektronik.

Gambaran capaian kinerja program pada urusan bidang komunikasi dan informasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.157.

Tabel 2.157
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	NA	NA	NA	NA	85,29
2	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	NA	NA	NA	NA	100
3	Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	NA	NA	NA	NA	100
4	Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik*	%	NA	NA	NA	NA	NA
5	Persentase layanan publik secara elektronik	%	NA	NA	NA	NA	50,38
6	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	%	NA	NA	NA	NA	100
7	Persentase rumah tangga dengan akses internet*	%	80,27	84,48	91,16	89,59	90,52
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Sebagaimana pada Tabel II.X, indikator kinerja program urusan bidang komunikasi dan infromasi pada tahun 2020 – 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting.

1) Persentase Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi Dinkominfo yang Aktif

Pada tahun 2024, persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif mencapai 85,29% atau dari 102 lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo, 87 diantaranya aktif. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga yang dibina dan menjadi mitra Dinkominfo aktif dalam menyebarkan informasi. Aktivitas ini penting untuk memastikan informasi yang relevan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan lembaga mitra dalam mengelola informasi publik.

2) Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik

Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non-elektronik tercatat di angka 100%. Hal ini menunjukan bahwa seluruh informasi penting sudah berhasil disebarkan melalui berbagai saluran media, baik yang berbasis teknologi (elektronik) maupun konvensional (non-elektronik). Capaian ini mengindikasikan adanya sistem penyebaran informasi yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

3) Persentase Penanganan Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan yang Dikelola Dinkominfo

Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo juga mencapai 100% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1.049 aduan yang disampaikan oleh masyarakat berhasil ditangani dengan baik oleh pemerintah. Keberhasilan ini mencerminkan responsivitas pemerintah dalam mendengarkan dan menangani berbagai keluhan publik, yang berpotensi meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

4) Persentase Badan Publik yang Memenuhi Standar Tata Kelola dan Layanan Informasi Komunikasi Publik

Pada tahun 2024, persentase badan publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik menjadi salah satu indikator kinerja baru dalam bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Temanggung. Munculnya indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi di instansi publik. Standarisasi tata kelola informasi yang baik akan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintahan.

5) Persentase Layanan Publik Secara Elektronik

Persentase layanan publik secara elektronik pada tahun 2024 tercatat sebesar 50,38% atau dari 131 layanan publik yang ditetapkan, 60 diantaranya sudah dapat diakses secara digital. Capaian ini menunjukkan masih adanya layanan yang belum terdigitalisasi, sehingga pemerintah perlu mempercepat proses digitalisasi layanan untuk mempermudah akses publik dan meningkatkan efisiensi

pelayanan.

6) Persentase Kinerja Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Baik

Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang baik tercatat sebesar 100% pada tahun 2024, yang berarti seluruh infrastruktur TIK di Kabupaten Temanggung berfungsi dengan baik. Infrastruktur TIK yang optimal ini memainkan peran penting dalam mendukung berbagai layanan digital, baik untuk kepentingan pemerintahan maupun publik, serta memastikan kelancaran operasional layanan yang berbasis teknologi informasi.

7) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Persentase rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Temanggung terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, akses internet mencapai 90,52% rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah ini telah mendapatkan akses terhadap internet, yang semakin mendukung transformasi digital pada masyarakat.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong pemerataan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Di Kabupaten Temanggung, peran sektor ini tercermin melalui Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB yang menunjukkan kontribusi koperasi terhadap aktivitas ekonomi daerah, serta Rasio Kewirausahaan Daerah yang menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan. Kedua indikator ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penguatan koperasi dan UKM, agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

1) Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara nilai usaha koperasi yang mencakup penjualan, penerimaan jasa, serta penyaluran pinjaman dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Semakin besar rasio ini, semakin besar pula kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. Adapun rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.158.

Tabel 2.158
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai Volume Usaha Koperasi	Total PDRB ADHB	%
2020	255.503.350.565	21.557.077.140.000	1,19
2021	257.702.743.506	22.627.791.480.000	1,14
2022	214.335.739.340	24.726.442.720.000	0,87
2023	275.435.735.600	26.912.324.210.000	1,02
2024	359.227.932.489	28.923.600.000.000	1,24

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2025

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024, dengan capaian tertinggi sebesar 1,24% pada tahun 2024 dan terendah 0,87% pada tahun 2022. Penurunan tajam pada tahun 2022 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengurangi aktivitas ekonomi dan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Namun, pada tahun 2023 rasio kembali meningkat menjadi 1,02%, didorong oleh membaiknya partisipasi anggota koperasi serta peningkatan kedisiplinan koperasi dalam menyampaikan laporan keuangan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Tren positif ini berlanjut hingga 2024, mencerminkan pemulihan dan penguatan kinerja koperasi sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi daerah serta kontribusinya yang semakin nyata terhadap PDRB Kabupaten Temanggung.

2) Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang berusaha dengan dibantu buruh tetap di suatu daerah dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama. Yang dimaksud dengan berusaha dibantu buruh tetap adalah kegiatan usaha yang dijalankan atas risiko sendiri dengan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang menerima upah. Sementara itu, penduduk usia angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau termasuk dalam kategori pengangguran. Keberadaan pengusaha yang berusaha dengan dibantu buruh tetap mencerminkan orientasi pertumbuhan usaha melalui penciptaan lapangan kerja tetap. Semakin besar jumlah pengusaha yang berada dalam kategori ini, semakin tinggi pula tingkat penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha di daerah tersebut. Rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.159.

Tabel 2.159
Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha dibantu buruh tetap daerah	16.579	9.208	15.100	8.482	10.117
Angkatan Kerja	455.242	357.156	454.927	472.789	482.651
Rasio Kewirausahaan Daerah	**3,64**	**2,58**	**3,32**	**1,79**	**2,10**

Sumber: Sakernas BPS

Data rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan capaian tertinggi sebesar 3,64% pada tahun 2020 dan terendah 1,79% pada tahun 2023. Penurunan signifikan pada tahun 2021 dan 2023 kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dampak lanjutan pandemi COVID-19, perubahan kondisi ekonomi, serta terbatasnya kapasitas pelaku usaha dalam mempertahankan buruh tetap. Meski demikian, terjadi peningkatan pada tahun 2022 (3,32%) dan 2024 (2,10%), yang mengindikasikan mulai pulihnya semangat kewirausahaan dan kemampuan pengusaha untuk kembali menyerap tenaga kerja tetap. Fluktuasi ini mencerminkan perlunya penguatan ekosistem kewirausahaan melalui pelatihan, fasilitasi akses permodalan, dan kemitraan usaha agar pertumbuhan wirausaha yang produktif dan berkelanjutan dapat terus meningkat di Temanggung.

Sektor koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya memperkuat ekosistem koperasi dan UMKM melalui berbagai program, seperti peningkatan kapasitas koperasi maupun fasilitasi UMKM. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan koperasi secara berkelanjutan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha, serta memberikan pendampingan dan akses pembiayaan yang lebih luas agar pelaku usaha mikro dapat berkembang dan berdaya saing di pasar lokal maupun nasional. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sekaligus meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mendorong peningkatan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan pelayanan,

kemudahan perizinan, dan pengelolaan data yang terintegrasi. Beberapa indikator pendukung seperti Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN menjadi gambaran nyata atas daya tarik daerah terhadap investor. Di samping itu, Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan dan Jumlah Jenis Layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat.

1) Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Investasi merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Temanggung secara konsisten mendorong peningkatan realisasi investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), guna memperkuat struktur ekonomi daerah. Adapun realisasi investasi Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.160.

Tabel 2.160
Realisasi Investasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun (dalam Miliyar)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai investasi tahun berjalan	1.245,66	1.496,68	1.836,0	2.046.25	2.145.092
2	Nilai investasi PMDN	1.245,66	1.486,42	1.529,1	1.326.55	1.923.290
3	Nilai investasi PMA	-	10,26	306,9	719.70	221.802

Sumber: OSS.go.id, 2025

Berdasarkan data dari Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektranik (OSS.go.id), realisasi investasi di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024, dengan nilai investasi tahun berjalan meningkat dari Rp1.245,66 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.145,09 miliar pada tahun 2024. Kontribusi utama berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang secara konsisten mendominasi, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar Rp1.326,55 miliar sebelum kembali meningkat signifikan menjadi Rp1.923,29 miliar di tahun 2024. Penanaman Modal Asing (PMA) mulai tercatat sejak tahun 2021 dan menunjukkan fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp719,70 miliar, namun menurun menjadi Rp221,80

miliar di tahun 2024. Pola ini mencerminkan potensi investasi daerah yang semakin berkembang, sekaligus menunjukkan perlunya strategi promosi dan penguatan iklim investasi yang lebih stabil untuk menarik dan mempertahankan investor asing maupun domestik.

2) Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN

Investasi tidak hanya diukur dari besar kecilnya nilai modal yang masuk, tetapi juga dari jumlah proyek yang direalisasikan sebagai wujud nyata aktivitas ekonomi. Kabupaten Temanggung terus menunjukkan perkembangan positif dalam jumlah proyek investasi sebagai indikator meningkatnya kepercayaan dan minat investor terhadap potensi daerah. Adapun jumlah proyek investasi PMA dan PMDN Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada gambar 2.59

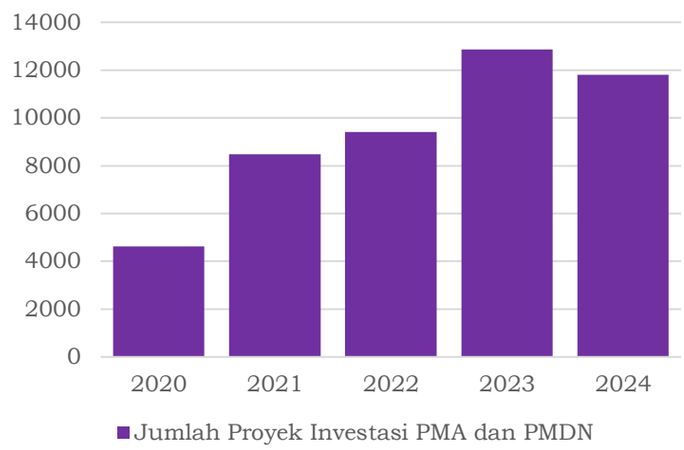

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.59
Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024, dari 4.632 proyek pada tahun 2020 menjadi 12.869 proyek pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 11.809 proyek di tahun 2024. Kenaikan jumlah proyek ini sejalan dengan peningkatan nilai realisasi investasi, yang tumbuh dari Rp1.245,66 miliar pada 2020 menjadi Rp2.145,09 miliar pada 2024, menandakan bahwa pertumbuhan investasi tidak hanya terjadi dari sisi jumlah proyek, tetapi juga dari nilai ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa selain semakin banyak investor yang menanamkan modal di Temanggung, terdapat pula kecenderungan proyek-proyek investasi bernilai besar yang masuk, khususnya terlihat dari lonjakan PMA pada tahun 2022–2023.

3) Jumlah Jenis Layanan di MPP

Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung menyediakan sebanyak 132 jenis layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP), menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap dan terintegrasi bagi masyarakat. Keberadaan berbagai jenis layanan ini memudahkan warga untuk mengakses berbagai kebutuhan administratif dan perizinan dalam satu tempat secara efisien, cepat, dan transparan. Dengan meningkatkan ragam layanan di MPP, Temanggung tidak hanya memperkuat kualitas pelayanan publik tetapi juga mendukung upaya percepatan birokrasi serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Kinerja program urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diukur melalui lima indikator utama yang mencerminkan efektivitas pelayanan, pengendalian, dan promosi investasi di daerah. Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi menggambarkan sejauh mana target investasi daerah dapat dicapai secara nyata. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal mengukur intensitas dan konsistensi upaya pemerintah dalam menarik investor melalui berbagai kegiatan promosi. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo menjadi indikator penting dalam menilai integritas dan transparansi pelayanan publik. Sementara itu, Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal menunjukkan peran pemerintah dalam memastikan investasi berjalan sesuai dengan ketentuan. Terakhir, Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal menilai sejauh mana data investasi dikelola secara digital, akurat, dan dapat diakses sebagai bagian dari sistem pengambilan keputusan berbasis informasi.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung terus menjadi perhatian dalam rangka menciptakan generasi muda yang berdaya saing serta meningkatkan kualitas fasilitas dan pembinaan olahraga.

1) Persentase Pemuda Berprestasi

Persentase pemuda berprestasi di Kabupaten Temanggung tahun 2024 mencapai 16,66%. Angka ini masih tergolong rendah, sehingga perlu strategi untuk memperluas ruang pengembangan potensi dan pemberian apresiasi bagi pemuda. Pemerintah daerah dapat meningkatkan program pembinaan, pelatihan, serta akses terhadap

kompetisi atau penghargaan. Tujuannya adalah mendorong lebih banyak pemuda berpartisipasi aktif dan berprestasi di tingkat daerah maupun nasional.

2) Persentase Atlet Berprestasi

Persentase atlet berprestasi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 83,19%. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar atlet yang terlibat aktif telah menunjukkan hasil yang membanggakan dalam berbagai kompetisi. Hal ini menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing atlet daerah. Pemerintah perlu mempertahankan dukungan terhadap sarana latihan, pelatih profesional, dan keikutsertaan dalam event olahraga.

3) Persentase Prestasi Olahraga

Persentase prestasi olahraga di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 92,86%. Capaian ini menandakan bahwa hampir seluruh program dan kegiatan olahraga yang diselenggarakan mampu menghasilkan prestasi yang signifikan. Angka ini menunjukkan tingginya efektivitas pembinaan olahraga baik di tingkat sekolah, komunitas, maupun organisasi olahraga. Ini menjadi indikasi positif dalam pengembangan olahraga sebagai salah satu sarana pembentukan karakter dan prestasi.

4) Persentase Wirausaha Muda

Persentase wirausaha muda di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 10%. Angka ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pemuda yang terlibat dalam dunia kewirausahaan. Ini mengindikasikan perlunya dorongan lebih besar dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan muda yang inklusif dan suportif. Fasilitasi akses modal, pelatihan bisnis, dan inkubasi usaha menjadi langkah penting untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda. Mendorong kewirausahaan di kalangan pemuda juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.

5) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Kemasyarakatan

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Kabupaten Temanggung mencapai 9,36%. Partisipasi pemuda dalam organisasi masih tergolong rendah, yang bisa disebabkan oleh kurangnya minat, kesempatan, atau akses terhadap wadah organisasi yang relevan. Rendahnya angka ini perlu

menjadi perhatian, mengingat organisasi merupakan ruang penting bagi pembinaan kepemimpinan, partisipasi sosial, dan pengembangan karakter. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran forum kepemudaan dan membangun kolaborasi lintas lembaga untuk menjangkau lebih banyak pemuda.

Adapun capaian kinerja program pada urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 ditunjukan sebagaimana pada tabel 2.161.

Tabel 2.161
Gambaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	96,43	93,10	93,10	93,10	84,21
3	Cakupan pelatih olahraga yang bersertifikat	%	56,06	100	96,43	96,43	72,79
4	Persentase sarana dan prasarana olahraga kabupaten dalam kondisi baik*	%	NA	NA	NA	NA	55
5	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	%	NA	80,61	100	100	97,34
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.161, capaian kinerja program pada urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Temanggung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting.

1) Persentase Pemuda yang Memperoleh Pendidikan Kewirausahaan

Indikator ini merupakan indikator baru dalam pengukuran kinerja urusan kepemudaan di Kabupaten Temanggung. Hingga tahun 2024, data mengenai persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan belum tersedia. Kehadiran indikator ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah dalam mendorong pemuda untuk memiliki keterampilan berwirausaha. Untuk ke depan, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penyelenggaraan pelatihan, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha, serta sistem monitoring yang jelas agar perkembangan pendidikan kewirausahaan bagi pemuda dapat terukur dengan baik.

2) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami tren penurunan dari 96,43% pada tahun 2020 menjadi 84,21% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam

mempertahankan keberlanjutan organisasi kepemudaan. Pada tahun 2021 – 2023, capaian indikator ini tidak mengalami kenaikan yaitu sebesar 93,10% yang disebabkan jumlah organisasi pemuda dan organisasi yang aktif yang tidak bertambah, salah satu faktornya adalah kurangnya pelibatan organisasi pemuda dan perlunya peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi penurunan akibat dari kurang maksimalnya kegiatan pendataan organisasi pemuda dan organisasi yang aktif. Perlu dilakukan perbaikan terhadap tantangan tersebut agar organisasi kepemudaan dapat tetap berperan aktif dalam pembangunan daerah.

3) Cakupan Pelatih Olahraga yang Bersertifikat

Cakupan pelatih olahraga yang bersertifikat mengalami dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2021, cakupan mencapai 100%, mencerminkan seluruh pelatih olahraga yang terdata telah memiliki sertifikasi yang masih berlaku. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan, hingga mencapai 72,79% pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berakhirnya masa berlaku banyak sertifikat pelatih dan telah dilakukan pembaruan data, yang memberikan gambaran lebih akurat mengenai kondisi aktual. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pembinaan dan perpanjangan sertifikasi yang berkelanjutan agar kompetensi pelatih tetap terjaga dan sesuai standar.

4) Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pada tahun 2024, data menunjukkan bahwa 55% sarana dan prasarana olahraga berada dalam kondisi baik. Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur olahraga yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap prestasi olahraga daerah serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Oleh karena itu, masih terdapat hampir setengah dari fasilitas yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

5) Persentase Gugus Depan Pramuka yang Aktif

Keaktifan Gugus Depan Pramuka di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan signifikan dari 80,61% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2022 dan 2023, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 97,34%. Meskipun terjadi sedikit penurunan, angka ini masih menunjukkan bahwa mayoritas Gugus Depan Pramuka tetap aktif. Keberlanjutan aktivitas Pramuka ini

menunjukkan bahwa program pembinaan kepramukaan berjalan dengan baik dan memiliki dampak positif terhadap pembentukan karakter generasi muda di Temanggung.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah, karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Gambaran indikator kinerja urusan statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.162.

Tabel 2.162
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)*	Angka	NA	NA	NA	NA	39,32
2	Ketersediaan data statistik sektoral	%	NA	NA	NA	NA	100
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data indikator kinerja urusan statistik Kabupaten Temanggung untuk tahun 2024, terdapat dua indikator yang menggambarkan capaian dalam urusan statistik. Indikator pertama adalah Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI), yang pada tahun 2024 mencapai angka 39,32. Ini menunjukkan langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data yang digunakan oleh pemerintah. Indikator kedua adalah ketersediaan data statistik sektoral, yang pada tahun 2024 mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh data statistik sektoral yang diperlukan sudah tersedia, memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif di berbagai sektor pembangunan daerah. Kedua indikator ini menggambarkan bahwa Temanggung telah mulai membangun fondasi yang baik dalam tata kelola data, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam kualitas dan integrasi data ke depannya.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Dalam menyelenggarakan tata kelola keamanan informasi, untuk mendapatkan gambaran kondisi kesiapan dan kematangan keamanan informasi dilakukan melalui evaluasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dengan tujuan mengetahui kekurangan manajemen keamanan sistem informasi di pemerintahan dan merumuskan rekomendasi perbaikannya. Hal ini terbukti dengan telah disahkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang menjadi pedoman untuk tata kelola keamanan informasi di pemerintah daerah. Adapun hasil Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.163 dan Gambar 2.60.

Tabel 2.163
Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah*	%	NA	NA	NA	NA	87,67
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.60
Hasil Penilaian Mandiri Indek KAMI Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian Indeks KAMI, maka hasil dari penilaian kategori sistem elektronik di Kabupaten Temanggung mendapatkan nilai 19 sehingga masuk dalam kategori Tinggi. Indikator penilaian sistem elektronik dilihat dari karakteristik instansi seperti nilai investadi, total anggaran operasional tahunan, kepatuhan terhadap standar/peraturan tertentu, teknik kriptografi, jumlah pengguna, data pribadi yang dikelola, tingkat kekritisan data terhadap ancaman upaya penyerangan/penerobosan keamanan informasi dalam sistem elektronik dan lain sebagainya. Sedangkan untuk nilai akhir Indeks KAMI mendapatkan nilai 263, dimana untuk kategori sistem elektronik dengan kategori Tinggi maka termasuk ke dalam klasifikasi TIDAK LAYAK. Kategori sistem elektronik dengan kategori Tinggi, untuk penilaian Indeks KAMI terdapat empat kategori antara lain Tidak Layak, Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar, Cukup Baik, dan Baik. Untuk mencapai kategori Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung minimal mendapatkan skor akhir Indeks KAMI sebanyak 273 poin.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung mencatat 1 Warisan Budaya Tak Benda, 40 kelompok kesenian, dan 18 objek Cagar Budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pendokumentasian kekayaan budaya daerah. Data ini menunjukkan langkah awal yang positif dalam pengelolaan aset budaya, baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible*. Namun, nihilnya data pelaku budaya mengindikasikan adanya celah dalam pendataan sumber daya manusia yang berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan. Untuk mendukung pelestarian budaya secara berkelanjutan, penting bagi pemerintah daerah tidak hanya memetakan objek dan kelompok, tetapi juga mengidentifikasi dan mengapresiasi peran pelaku budaya sebagai penjaga tradisi dan penggerak seni lokal.

Urusan Kebudayaan memegang peranan penting dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai lokal di Kabupaten Temanggung. Melalui berbagai program pelestarian dan pengembangan seni budaya, pemerintah daerah berupaya menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Tabel 2.164
Gambaran Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	%	2,64	2,64	6,61	7,05	7,49
2	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	18,68	28,98	31,71	41,99	44,76

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.164, persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan dari 2,64% pada tahun 2020 menjadi 7,49% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya partisipasi kelompok kesenian lokal dalam menghidupkan aktivitas budaya di masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 18,68% pada tahun 2020 menjadi 44,76% pada tahun 2024. Capaian ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberadaan dan keberlanjutan warisan budaya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, sebagai bagian penting dari identitas dan sejarah daerah.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan perpustakaan di Kabupaten Temanggung merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan literasi dan membangun budaya baca masyarakat, yang tercermin melalui beberapa indikator kinerja. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mengukur sejauh mana infrastruktur, akses, dan aktivitas literasi telah dikembangkan untuk mendorong kemampuan literasi warga. Sementara itu, Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) mencerminkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat, yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat pembelajar. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan juga menjadi indikator krusial yang menunjukkan sejauh mana fasilitas perpustakaan digunakan secara optimal oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Ketiga indikator ini saling mendukung dalam menggambarkan efektivitas pengelolaan urusan perpustakaan serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Temanggung.

1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Temanggung adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Temanggung. Pembangunan literasi mensyarakat yang diukur dalam IPLM terdiri dari 7 unsur, yaitu:

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercukupan koleksi
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari
5. Jumlah perpustakaan ber-SNP
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi
7. Anggota perpustakaan

Capaian nilai IPLM Kabupaten Temanggung 2020-2024 dapat disajikan dalam tabel 2.165.

Tabel 2.165
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	NA	NA	60,23	55,70	60,48

Sumber: Dinpusip Kabupaten Temanggung, 2025

IPLM Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori "sedang" disebabkan karena ke 7 unsur dalam penghitungan IPLM rata-rata telah memenuhi standar, terutama unsur jumlah perpustakaan ber-SNP dan unsur anggota perpustakaan. Kedua unsur tersebut merupakan faktor pendorong pembangunan literasi masyarakat Kab. Temanggung.

2) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)

Tingkat Kegemaran Membaca adalah sebuah survei yang dilakukan perpustakaan (Perpusnas RI) untuk mengetahui tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. TGM diukur berdasarkan beberapa dimensi antara lain: Frekuensi Membaca (FM), Durasi Membaca (DM), Jumlah Buku Dibaca (JB), Frekuensi Akses Internet (FAI), serta Durasi Akses Internet (DAI). Adapun Tingkat Kegemaran Membaca di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.166.

Tabel 2.166
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	NA	NA	NA	51,82	69,04

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025

Tingkat Kegemaran Membaca di Kabupaten Temanggung "sedang", hal ini disebabkan karena nilai dari kelima dimensi yang diukur rata-rata bernilai sedang. Nilai tertinggi ada pada dimensi Frekuensi akses internet. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat setiap harinya mengakses internet untuk kebutuhan informasi dan komunikasi. Pada urutan kedua adalah Frekuensi membaca. Rata-rata masyarakat membaca dalam per minggu yaitu 5-6 kali. Membaca yang dimaksud disini tidak hanya membaca di perpustakaan tetapi juga membaca melalui media lain seperti internet dan di tempat lain seperti rumah, sekolah ataupun toko buku. Rata-rata jumlah bahan bacaan yang dibaca per tiga bulan yaitu 5-6 bahan bacaan. Hal-hal yang tersebut di atas adalah faktor pendorong nilai TGM. Adapun faktor penghambat nilai TGM di Kabupaten Temanggung adalah durasi akses internet dan durasi membaca. Durasi Akses Internet untuk membaca/ mencari informasi serta durasi membaca hanya 1 jam s/d 1 jam 59 menit. Ini artinya masyarakat Kabupaten Temanggung lebih banyak menggunakan internet untuk kepentingan lain selain membaca/mencari informasi. Dari kelima dimensi TGM, Durasi Membaca memperoleh nilai terendah. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengedepankan aktivitasnya untuk membaca buku dan belum menyadari akan pentingnya membaca buku.

3) Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan

Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan adalah seberapa sering perpustakaan digunakan oleh masyarakat. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama. Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (*onsite* dan *online*) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan. Adapun tingkat pemanfaatan perpustakaan Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.167

Tabel 2.167
Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Satuan	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk	Jiwa	NA	NA	NA	811.798	817.483
2	Jumlah pengunjung per hari	Jiwa	NA	NA	NA	3.685	3.107
3	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	NA	NA	NA	0,0045	0,0038

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025

Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Temanggung merupakan indikator baru yang mulai diukur pada tahun 2023 dengan capaian awal sebesar 0,0045%, namun mengalami penurunan menjadi 0,0038% pada tahun 2024. Capaian ini masih tergolong sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan target provinsi yang ditetapkan sebesar 0,05%. Rendahnya tingkat pemanfaatan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat, antara lain keterbatasan sarana prasarana dan fasilitas perpustakaan, kurangnya koleksi buku yang relevan dan menarik, belum meratanya layanan perpustakaan di seluruh wilayah, minimnya kegiatan sosialisasi dan promosi literasi di masyarakat, kurangnya tenaga perpustakaan yang kompeten, serta tantangan dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang mengalihkan minat masyarakat dari perpustakaan konvensional.

Adapun gambaran kinerja perpustakaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 disajikan sebagaimana pada tabel 2.168.

Tabel 2.168
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengunjung di perpustakaan*	%	NA	NA	NA	NA	0,29
2	Persentase perpustakaan yang aktif	%	39,41	39,46	97,68	56,68	55,18
3	Persentase penelusuran naskah kuno	%	NA	0,039	99,12	100	100
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.168, capaian kinerja program pada urusan bidang perpustakaan Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting.

1) Persentase Pengunjung di Perpustakaan

Persentase pengunjung perpustakaan merupakan indikator baru yang mulai tercatat pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 0,29%. Angka 0,29% tergolong sangat rendah, menandakan bahwa tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih minim. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya minat baca, kurangnya promosi, atau fasilitas yang belum memadai. ke depan, diperlukan strategi yang lebih agresif untuk meningkatkan kunjungan.

2) Persentase Perpustakaan yang Aktif

Persentase perpustakaan yang aktif di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi signifikan sepanjang 2020–2024. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase masih rendah di angka sekitar 39%, namun melonjak tajam pada 2022 mencapai 97,68%. Angka ini kembali menurun pada 2023 dan 2024 menjadi sekitar 56%. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan aktivitas perpustakaan. Konsistensi program pembinaan dan penguatan kapasitas pengelola perpustakaan perlu menjadi perhatian utama. Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dilakukan upaya berupa sosialisasi Sistem Informasi Pendataan Perpustakaan (Si-Petak) Pemerintah Kabupaten Temanggung, pembinaan perpustakaan bagi pengelola perpustakaan, kegiatan untuk meningkatkan minat baca, mengadakan kerja sama tukar pinjam koleksi antar perpustakaan, serta melibatkan peran masyarakat di perpustakaan.

3) Persentase Penelusuran Naskah Kuno

Persentase penelusuran naskah kuno di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang sangat pesat sejak pertama kali tercatat pada tahun 2021 sebesar 0,039%. Pada tahun 2022, angka ini melonjak drastis menjadi 99,12% dan mencapai 100% pada 2023 dan 2024. Peningkatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya tertulis. Ke depan, pengelolaan hasil penelusuran ini perlu dioptimalkan melalui digitalisasi dan publikasi agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan kearsipan di Kabupaten Temanggung merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Kearsipan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan dokumen, tetapi juga menjadi sumber informasi

yang strategis dalam pengambilan keputusan. Untuk mengukur kualitas pengelolaan arsip, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Manajemen Kearsipan. Indeks ini mencerminkan tingkat kematangan, ketertiban, dan efektivitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan daerah.

1) Indeks Manajemen Kearsipan

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja urusan kearsipan diukur melalui penghitungan Indeks manajemen kearsipan yang diperoleh dari hasil audit kearsipan eksternal yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Kabupaten Temanggung dan audit kearsipan internal yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Temanggung. Gambaran capaian Indeks Manajemen Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel 2.169.

Tabel 2.169
Indeks Manajemen Kearsipan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	65,44	54,02	62,47	70,93	73,54

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan Tabel II.X, Indeks Manajemen Kearsipan Kabupaten Temanggung dalam periode 2020–2024 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 65,44 kemudian menurun cukup tajam pada 2021 menjadi 54,02. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi perbaikan signifikan dengan indeks naik menjadi 62,47 pada 2022, 70,93 pada 2023, dan mencapai 73,54 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam tata kelola kearsipan, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukung.

Secara keseluruhan gambaran capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 disajikan pada Tabel 2.170.

Tabel 2.170
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Kearsipan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	NA	NA	NA	NA	55
2	Persentase Pembinaan Kearsipan*	%	NA	NA	NA	NA	NA
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.170, capaian kinerja program pada urusan bidang kearsipan Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting.

1) Persentase Arsip yang Dialihmediakan

Persentase arsip yang dialihmediakan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 55%. Data ini baru tersedia di tahun tersebut karena indikator ini merupakan bagian dari pengukuran kinerja baru untuk perencanaan RKPD 2026. Angka 55% menunjukkan bahwa lebih dari separuh arsip telah dipindahkan ke media lain, seperti digitalisasi, untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan akses. Upaya alih media ini penting dalam menghadapi tantangan era digital dan memperpanjang umur arsip. Ke depan, perlu ditingkatkan kapasitas teknologi dan pelatihan SDM agar proses alih media berjalan lebih optimal dan menyeluruh.

2) Persentase Pembinaan Kearsipan

Persentase pembinaan kearsipan merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah daerah melakukan upaya pembinaan terhadap pengelolaan arsip di perangkat daerah. Indikator ini mencerminkan komitmen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan arsip yang baik dan sesuai standar. Indikator ini berfungsi sebagai landasan untuk evaluasi awal serta perbaikan berkelanjutan dalam sistem kearsipan, yang merupakan bagian penting dari unsur penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan terdokumentasi.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan perikanan merupakan sektor penting yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Sektor ini mencakup kegiatan penangkapan, budidaya, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Selain sebagai sumber protein hewani yang penting bagi masyarakat, perikanan juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis perikanan. Oleh karena itu, pengelolaan urusan perikanan yang baik, berbasis potensi lokal dan didukung dengan kebijakan yang tepat, menjadi kunci dalam mewujudkan sektor perikanan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1) Angka Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan merefleksikan kualitas pola makan masyarakat, karena ikan kaya protein, asam lemak esensial, dan mikronutrien penting yang berperan dalam pertumbuhan dan pencegahan stunting. Adapun Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada Gambar 2.61.

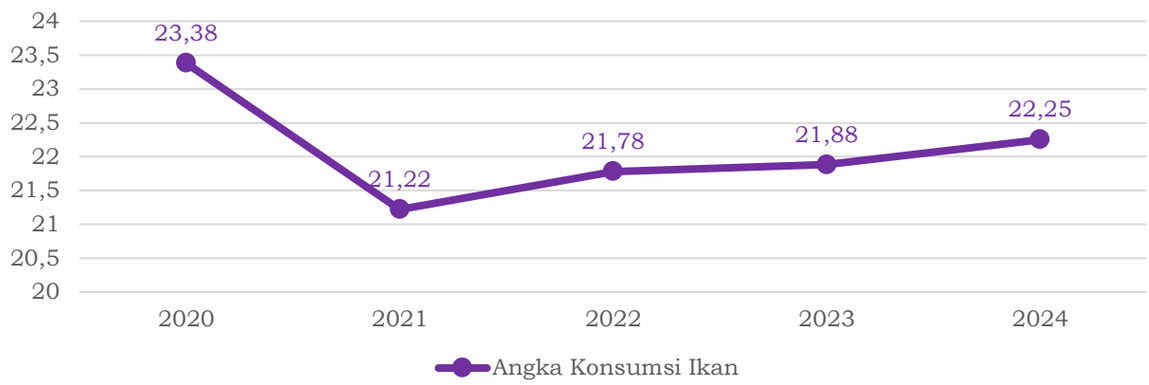

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.61
Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan gambar 2.61, Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir mengalami fluktiasi. Faktor yang sangat berpengaruh dalam perhitungan AKI adalah nilai Konsumsi dalam Rumah Tangga (KIDRT) hasil Susenas oleh BPS atau biasa disebut dengan nilai A. Penggunaan data hasil Susenas adalah tepat karena diperoleh angka konsumsi ikan secara nyata, namun data Susenas masih memiliki beberapa kelemahan, sehingga untuk mendapatkan angka yang akurat mendekati kebenaran, diperlukan angka koreksi. Angka koreksi yang digunakan adalah angka koreksi

untuk konsumsi di luar rumah tangga (nilai B) dan konsumsi tidak tercatat (nilai C).

Angka Konsumsi Ikan di kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 mencapai angka 23.38 kg/kapita/tahun, dan merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2021, nilai KIDRT hasil Susenas 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari angka 16,35 ke angka 14,84. Penurunan nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) pada tahun 2021 disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19, terutama saat gelombang kedua yang berdampak pada berbagai sektor. Namun, sejak 2022 hingga 2024, AKI mulai menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan protein hewani, khususnya ikan, serta dukungan program pemerintah dalam penanggulangan stunting. Upaya peningkatan konsumsi ikan dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan distribusi paket olahan ikan kepada masyarakat, yang selama 2021–2024 telah dilaksanakan sebanyak 8 kali dengan dukungan pendanaan dari APBD dan APBN. Diversifikasi produk olahan ikan oleh pelaku usaha seperti pempek, kripik, dan abon turut mendukung ketersediaan produk ikan yang praktis dikonsumsi. Meski demikian, kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan anggaran khusus serta kebiasaan dan budaya masyarakat yang belum terbiasa mengonsumsi ikan secara rutin karena dianggap merepotkan dalam pengolahan.

Gambaran indikator kinerja program urusan perikanan di Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam berbagai sektor perikanan sebagaimana disajikan pada tabel 2.171.

Tabel 2.171
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Perikanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah produksi perikanan tangkap*	ton	611,59	510,60	430,47	161,83	140,12
2	Jumlah produksi perikanan budidaya*	ton	13,14	12,09	11,68	10,66	10,67

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase frekuensi penebaran benih ikan di perairan umum*	%	10	20	29	28	34
4	Jumlah produksi pengolahan ikan*	ton	357,45	393,20	389,67	385,31	385,75
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.171, capaian kinerja program pada urusan bidang perikanan Kabupaten Temanggung selama periode 2020 – 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting.

1) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Sektor perikanan tangkap mengalami penurunan yang cukup tajam. Penurunan ini tampak konsisten selama empat tahun, dengan tahun 2023 menunjukkan penurunan paling drastis. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan iklim yang berpengaruh pada ketersediaan air di perairan umum dan menurunnya kualitas air sehingga mempengaruhi jumlah ikan yang dapat ditangkap. Kondisi ini menyebabkan habitat ikan semakin menyusut, yang berdampak negatif pada reproduksi dan kelangsungan hidup ikan. Selain itu, perubahan suhu air yang ekstrem dan cuaca yang tidak menentu turut memperburuk kondisi perikanan tangkap, membuat nelayan semakin sulit mendapatkan hasil tangkapan yang optimal.

2) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Sektor perikanan budidaya juga menunjukkan tren penurunan meskipun lebih stabil dibandingkan dengan sektor perikanan tangkap. Faktor menurunnya jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Temanggung dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh berbagai tantangan. Perubahan iklim telah memicu peningkatan serangan penyakit pada ikan serta meningkatkan tingkat kematian, yang pada akhirnya mengurangi jumlah panen dan produksi akhir. Selain itu, kualitas air yang menurun turut berdampak negatif pada kesehatan ikan. Faktor ekonomi juga berperan, seperti harga pakan yang fluktuatif dan cenderung naik, yang tidak sebanding dengan kenaikan harga panen, sehingga pelaku usaha budidaya menghadapi kesulitan dalam menjaga profitabilitas. Di sisi lain, penerapan Cara

Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) masih belum optimal di kalangan pelaku usaha. Keberadaan predator alami seperti lingsang, biawak, blekok, dan ikan predator juga menjadi ancaman yang menambah risiko dalam proses budidaya. Selain itu, kualitas benih yang tidak stabil dan belum sesuai standar menjadi salah satu kendala yang menyebabkan hasil produksi tidak maksimal.

3) Persentase Frekuensi Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum

Frekuensi penebaran benih ikan di perairan umum mengalami peningkatan signifikan, dari hanya 10 lokasi pada tahun 2020 menjadi 34 lokasi pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang lebih intensif dari pemerintah untuk memperkuat dan menjaga keberlanjutan ekosistem perairan umum.

4) Jumlah Produksi Pengolahan Ikan

Produksi pengolahan ikan relatif stabil selama lima tahun terakhir, dengan fluktuasi yang kecil dari 357,45 ton pada tahun 2020 hingga 385,75 ton pada tahun 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa industri pengolahan ikan tetap kuat karena didorong oleh diversifikasi produk olahan atau adanya permintaan pasar yang tetap tinggi untuk produk ikan olahan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan pemerintahan di bidang pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan desa wisata, serta penguatan subsektor ekonomi kreatif. Kabupaten Temanggung menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi pariwisata, yang tercermin dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik, bertambahnya jumlah desa wisata aktif, serta tingginya persentase subsektor ekonomi kreatif yang berkembang. Sinergi antara potensi alam, budaya, dan kreativitas lokal menjadi fondasi utama dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

1) Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)

Urusan pemerintahan di bidang pariwisata berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan destinasi. Jumlah

kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, menjadi indikator utama untuk mengukur daya tarik serta keberhasilan promosi dan pengelolaan sektor pariwisata daerah. Adapun jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada Gambar 2.62.

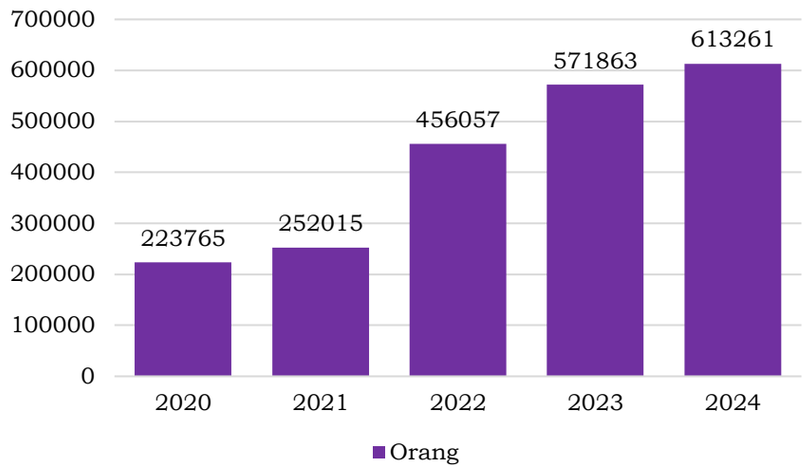

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.62
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Berdasarkan data pada Gambar 2.62, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, yakni dari 223.765 menjadi 613.261 orang. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi dan meningkatnya daya tarik destinasi wisata. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan terjadi dampak positif terhadap sektor ekonomi lokal, khususnya UMKM, kuliner, dan ekonomi kreatif.

2) Jumlah Desa Wisata Aktif

Pada tahun 2024, tercatat terdapat 20 desa wisata aktif di Kabupaten Temanggung. Keberadaan desa wisata aktif berperan penting dalam memperluas sebaran destinasi wisata sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan. Selain itu, pengembangan desa wisata juga menjadi salah satu strategi unggulan dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara secara berkelanjutan.

Urusan pemerintahan di bidang pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan dan penguatan ekosistem pariwisata secara menyeluruh. Promosi destinasi wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

jumlah pengunjung tempat bersejarah, serta fasilitasi terhadap destinasi menjadi bagian penting dalam mendorong daya tarik daerah. Selain itu, pendataan SDM usaha pariwisata, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf), dan pencatatan pelaku ekraf juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor ini secara berkelanjutan. Indikator-indikator tersebut memberikan gambaran menyeluruh terhadap dinamika dan strategi pengembangan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas. Adapun capaian kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.712.

Tabel 2.172
Gambaran Idnikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*	%	NA	NA	NA	NA	100
2	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	6.214	2.400	14.160	19.477	26.944
3	Jumlah tamu wisatawan mancanegara*	orang	40	0	56	50	1.783
4	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi*	DTW	NA	NA	NA	NA	17
5	Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata*	orang	NA	NA	NA	NA	0
6	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*	orang	NA	NA	NA	NA	NA
7	Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata*	orang	NA	NA	NA	NA	130
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data kinerja urusan pariwisata di Kabupaten Temanggung periode 2020–2024, terlihat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung telah melakukan promosi pada seluruh Destinasi Tujuan Wisata (DTW) di Kabupaten Temanggung dan melakukan fasilitasi pada 17 DTW. Ini menunjukan salah satunya dari jumlah pengunjung tempat bersejarah mengalami tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, jumlah

pengunjung tercatat 6.214 orang, namun menurun drastis pada 2021 menjadi 2.400 orang, yang disebabkan oleh pembatasan perjalanan dan penutupan tempat wisata selama pandemi COVID-19. Meskipun demikian, jumlah pengunjung kembali pulih secara signifikan pada tahun 2022 dengan 14.160 pengunjung, dan terus meningkat hingga mencapai 26.944 pengunjung pada tahun 2024.

Di sisi lain, jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan fluktuasi yang lebih kecil. Pada tahun 2020 tercatat 40 wisatawan, sementara pada tahun 2021 tidak ada wisatawan mancanegara sama sekali, yang disebabkan oleh pandemi dan perbatasan perjalanan internasional. Namun, sejak tahun 2022, jumlah wisatawan mancanegara mulai meningkat, dengan 56 wisatawan pada tahun 2022 dan 50 wisatawan pada tahun 2023. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2024, dengan 1.783 wisatawan mancanegara tercatat berkunjung. Lonjakan ini menunjukkan adanya potensi besar dalam menarik wisatawan internasional.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan dalam perekonomian daerah Kabupaten Temanggung. Peran strategis ini tercermin dalam Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian yang emenunjukkan besarnya sumbangan sektor ini terhadap total perekonomian daerah.

1) Rasio PDRB Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Kabupaten Temanggung, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Adapun rasio PDRB Pertanian Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.173.

Tabel 2.173
Rasio PDRB Pertanian Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Tahun	Nilai PDRB ADHB sektor Pertanian (rupiah)	Total PDRB ADHB (rupiah)	%
2020	5.263.682.680.000	21.557.077.140.000	24,42
2021	5.411.356.120.000	22.627.791.480.000	23,91
2022	5.791.776.360.000	24.726.442.720.000	23,42
2023	6.174.016.360.000	26.912.324.210.000	22,94
2024	6.498.190.000.000	28.923.600.000.000	22,47

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Rasio PDRB sektor pertanian Kabupaten Temanggung mengalami tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu dari 24,42% menjadi

22,47%. Meskipun nilai PDRB sektor pertanian secara absolut meningkat setiap tahunnya, pertumbuhannya tidak secepat pertumbuhan total PDRB daerah, sehingga proporsinya terhadap total PDRB cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi daerah yang mulai lebih bertumpu pada sektor-sektor lain seperti industri pengolahan atau jasa. Meski demikian, dengan kontribusi lebih dari seperlima total PDRB, sektor pertanian masih memegang peran penting dalam perekonomian daerah dan tetap perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Adapun gambaran kinerja urusan pertanian Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.174
Gambaran Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas Padi	ton/ha	5,9	5,9	6,315	6,346	6,149
2	Produktivitas jagung	ton/ha	4,9	4,5	4,61	4,6	5,76
3	Produktivitas bawang putih	ton/ha	6,58	6,51	6,92	7,14	7,30
4	Produktivitas bawang merah	ton/ha	7,36	7,14	8,1	7,67	7,65
5	Produktivitas cabai rawit	ton/ha	7,00	6,99	7,64	7,55	7,50
6	Produktivitas cabai keriting	ton/ha	NA	NA	7,90	7,70	7,65
7	Produktivitas tembakau	ton/ha	0,678	0,688	0,668	0,656	0,670
8	Produktivitas kopi robusta	ton/ha	0,679	0,715	0,693	0,653	0,744
9	Produktivitas kopi arabika	ton/ha	0,62	0,61	0,65	0,58	0,55
10	Jumlah produksi daging ternak besar*	kg	637.468	775.372	741.741	876.941	804.609
11	Jumlah produksi daging ternak kecil*	kg	239.423	235.170	260.442	251.790	267.057
12	Jumlah produksi ternak unggas*	kg	7.317.764	6.581.217	6.556.114	6.578.999	6.330.720
13	Jumlah produksi telur*	kg	8.379.405	7.706.663	7.810.151	8.329.778	8.728.620
14	Persentase kelahiran pedet	%	NA	NA	NA	NA	48,3
15	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	6,04	15,89	21,24	30,22	35,06

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
16	Persentase prasarana yang digunakan*	%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Persentase penanganan penyakit hewan	%	NA	96,68	100	97,26	97,43
18	Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	84,3	82,96	100	82,1	82,41
19	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	NA	41,2	41,45	40,62	99,23
20	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi*	%	NA	NA	NA	NA	NA
21	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	0,678	0,81	1,03	0,98	1,40
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Urusan pemerintahan di bidang pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan penguatan perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Temanggung yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani agar sektor pertanian tetap menjadi pilar utama perekonomian lokal.

1) Produktivitas Padi

Produktivitas padi di Kabupaten Temanggung merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Selama periode 2020–2024, tren produktivitas padi menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik alamiah maupun teknis. Adapun produktivitas padi di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.175.

Tabel 2.175
Produktivitas Padi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen	ha	26.458,5	20.553,80	16.784,3	18.038,8	14.802
2	Produksi	ton	156.105,7	121.262,700	105.992,7	114.471,7	91.022,2
3	Produktivitas Padi	Ton/ha	5,9	5,9	6,315	6,346	6,149

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada Tabel II.X, produktivitas padi di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi dengan tren relatif stabil, namun belum mencapai angka produktivitas tahun 2019. Pada tahun 2020, produktivitas padi tercatat sebesar 5,9 ton/ha dan tetap berada di angka yang sama pada 2021. Kemudian terjadi peningkatan pada 2022 dan 2023 masing-masing menjadi 6,315 dan 6,346 ton/ha, namun sedikit menurun kembali pada 2024 menjadi 6,149 ton/ha. Meskipun produktivitas relatif stabil, tren penurunan luas panen dan produksi secara keseluruhan cukup signifikan, terutama pada 2024, yang hanya mencatat produksi sebesar 91.022,2 ton dan luas panen 14.802 ha. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai tantangan seperti dampak El Nino yang menyebabkan keterlambatan masa tanam, serangan hama, keterbatasan sarana produksi, serta kerusakan jaringan irigasi.

2) Produktivitas Jagung

Produktivitas jagung di Kabupaten Temanggung menjadi indikator penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian petani lokal. Selama periode 2020–2024, produktivitas jagung mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi iklim, ketersediaan sarana produksi, serta praktik budidaya yang diterapkan petani. Adapun produktivitas jagung di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabl 2.176.

Tabel 2.176
Produktivitas Jagung di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen	ha	11.221,5	8.580,3	5.714,7	8.395,50	6.264
2	Produksi	ton	54.985,35	38.611,35	26.344,6	38.619,5	36.057,4
3	Produktivitas Jagung	Ton/ha	4,9	4,500	4,61	4,6	5,76

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Produktivitas jagung di Kabupaten Temanggung pada rentang 2020–2024 juga mengalami dinamika yang cukup mencolok. Setelah

menurun dari 4,9 ton/ha pada 2020 menjadi 4,5 ton/ha pada 2021, angka ini sedikit meningkat menjadi 4,61 ton/ha di tahun 2022 dan stagnan pada 4,6 ton/ha di 2023. Namun, terjadi lonjakan cukup signifikan pada 2024 dengan capaian produktivitas sebesar 5,76 ton/ha. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan teknis budidaya meskipun di tengah penurunan luas panen dan produksi. Tahun 2024 menunjukkan penurunan produksi jagung sebesar 2.562,1 ton dan pengurangan luas panen seluas 2.131,5 ha dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipicu oleh kondisi iklim yang kurang mendukung serta pergeseran minat petani ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Di sisi lain, peningkatan produktivitas pada 2024 mencerminkan hasil dari upaya peningkatan kapasitas petani melalui adopsi benih unggul dan intervensi pemerintah dalam bentuk program dukungan sarana-prasarana dan pengendalian OPT.

3) Produktivitas Bawang Putih

Bawang putih merupakan salah satu komoditas hortikultura di Kabupaten Temanggung. Produktivitas bawang putih di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Secara lebih lengkap, data produktivitas bawang putih di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.177.

Tabel 2.177
Produktivitas Bawang Putih di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen	ha	2.481	1.591	1.169,5	1469,5	1.319
2	Produksi	ton	16.335,00	10.355,3	8.088,4	10493,3	9.631,2
3	Produktivitas Bawang Putih	Ton/ha	6,58	6.51	6,916	7,141	7,302

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Pada tahun 2020, produktivitas tercatat sebesar 6,58 ton/ha, kemudian mengalami sedikit penurunan di 2021 menjadi 6,51 ton/ha. Tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 6,916 ton/ha dan terus meningkat hingga mencapai 7,302 ton/ha di tahun 2024. Peningkatan produktivitas ini mencerminkan adanya upaya perbaikan budidaya, bantuan sarana produksi, serta dukungan dari kemitraan dengan pihak swasta dalam pengembangan bawang putih. Namun demikian, penurunan luas panen dari tahun ke tahun, seperti penurunan sebesar 150,5 ha pada 2024 dibandingkan 2023, berdampak pada total produksi, meskipun produktivitas per hektar meningkat.

4) Produktivitas Bawang Merah

Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura di Kabupaten Temanggung. Produktivitas bawang merah di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Secara lebih lengkap, data produktivitas bawang merah di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.178.

Tabel 2.178
Produktivitas Bawang Putih di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen	ha	1.246	1.555	2.304	2335,5	2.779,5
2	Produksi	ton	9.171,10	11.102,1	18.662,4	17901,8	21.263,18
3	Produktivitas Bawang Merah	Ton/ha	7,36	7.14	8,1	7,67	7,65

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Produktivitas bawang merah menunjukkan tren peningkatan dari 7,36 ton/ha di tahun 2020 menjadi 8,1 ton/ha pada 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 7,65 ton/ha di tahun 2024. Kenaikan luas panen secara signifikan, dari 1.246 ha di 2020 menjadi 2.779,5 ha di 2024, turut mendongkrak volume produksi secara keseluruhan. Stabilitas harga jual, masa panen yang lebih cepat dibanding komoditas lain, serta praktik tumpang sari yang dimungkinkan dengan komoditas lain seperti hortikultura semusim dan perkebunan, menjadi faktor utama meningkatnya animo petani terhadap budidaya bawang merah. Meski demikian, harga benih yang tinggi dan ketergantungan terhadap benih dari luar masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

5) Produktivitas Cabai Rawit

Cabai rawit merupakan salah satu komoditas hortikultura di Kabupaten Temanggung. Produktivitas cabai rawit di Kabupaten Temanggung cenderung stabil selama lima tahun terakhir. Secara lebih lengkap, data produktivitas cabai rawit di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.179.

Tabel 2.179
Produktivitas Cabai Rawit di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen	ha	2622	2.977,50	5.045,5	6900	7.583,5
2	Produksi	ton	18.345,7	20.802.930	38.525,415	52095,0	56.876,2
3	Produktivitas Cabai Rawit	Ton/ha	7,00	6,987	7,636	7,55	7,5

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Produktivitas cabai rawit mengalami peningkatan yang cukup stabil dalam lima tahun terakhir. Dari 7,00 ton/ha di tahun 2020, sedikit menurun menjadi 6,987 ton/ha di 2021, namun meningkat kembali menjadi 7,5 ton/ha pada tahun 2024. Kenaikan luas panen yang signifikan, dari 2.622 ha di tahun 2020 menjadi 7.583,5 ha di 2024, menunjukkan meningkatnya minat petani terhadap komoditas ini. Harga cabai rawit yang cenderung tinggi dalam jangka waktu lama menjadi daya tarik utama. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk bantuan kawasan champion cabai juga turut mendorong produktivitas dan minat petani terhadap tanaman ini.

6) Produktivitas Cabai Keriting

Cabai keriting merupakan salah satu komoditas hortikultura di Kabupaten Temanggung. Produktivitas cabai keriting di Kabupaten Temanggung cenderung stabil selama lima tahun terakhir. Secara lebih lengkap, data produktivitas cabai keriting di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.180.

Tabel 2.180
Produktivitas Cabai Keriting di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen	ha	NA	NA	2.895,5	3.580	3.768,5
2	Produksi	ton	NA	NA	22.861,42	27.555,12	28.828,36
3	Produktivitas Cabai Rawit	Ton/ha	NA	NA	76,49	76,96	78,95

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Produktivitas cabai keriting di Kabupaten Temanggung mulai tercatat sejak tahun 2022 dengan capaian sebesar 76,49 ton per hektar, kemudian mengalami peningkatan berturut-turut pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 76,96 ton/ha dan 78,95 ton/ha. Kenaikan produktivitas ini seiring dengan peningkatan luas panen dari 2.895,5 ha pada 2022 menjadi 3.768,5 ha di tahun 2024, yang berdampak pada peningkatan total produksi dari 22.861,42 ton menjadi 28.828,36 ton. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan budidaya cabai keriting di Temanggung semakin intensif dan produktif, yang kemungkinan didorong oleh dukungan harga yang kompetitif, tersedianya sarana produksi, serta peningkatan keterampilan budidaya petani.

7) Produktivitas Tembakau

Tembakau merupakan komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Temanggung yang secara historis telah menjadi bagian dari budaya

dan mata pencaharian masyarakat. Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), produktivitas tembakau menunjukkan kestabilan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti fluktuasi iklim dan harga pasar. Adapun data produktivitas tembakau di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.180.

Tabel 2.181
Produktivitas Tembakau di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen	ha	11.598,0	18.293,08	15.801	14.764	14.088
2	Produksi	ton	17.102	12.585,639	10.562,6	9.685,73	9.438,96
3	Produktivitas Tembakau	Ton/ha	0.678	0,688	0,668	0,656	0.67

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, produktivitas tembakau di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi yang cenderung stabil di kisaran 0,656 hingga 0,688 ton per hektar. Meskipun luas panen mengalami penurunan signifikan dari 18.293,08 ha pada tahun 2021 menjadi 14.088 ha di tahun 2024, produktivitas tetap mampu dipertahankan pada angka sekitar 0,67 ton/ha di akhir periode. Penurunan produksi tembakau sebagian besar dipengaruhi oleh faktor iklim yang tidak menentu, tingginya harga saprodi, serta persoalan dalam tata niaga dan fluktuasi harga jual. Hal ini juga menyebabkan sebagian petani beralih ke komoditas hortikultura yang dinilai lebih menguntungkan. Meskipun demikian, budaya menanam tembakau yang sudah melekat kuat di masyarakat serta adanya dukungan kemitraan dengan perusahaan dan bantuan varietas unggul tetap menjadi pendorong keberlangsungan komoditas ini.

8) Produktivitas Kopi Robusta

Kopi robusta menjadi salah satu komoditas strategis di sektor perkebunan Temanggung dengan potensi ekonomi yang cukup besar. Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, produktivitas kopi robusta mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap peremajaan tanaman dan dukungan budidaya dari pemerintah. Adapun data produktivitas kopi robusta di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.182.

Tabel 2.182
Produktivitas Kopi Robusta di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen	ha	11.507	11.724,46	12.977,37	12.972,2	11.193,972
2	Produksi	ton	7.813,1	83.841,6	8.994,321	8.476,9	8.329,436
3	Produktivitas Kopi Robusta	Ton/ha	0.679	0,715	0,693	0,653	0,744

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Produktivitas kopi robusta di Temanggung mengalami tren yang cukup positif dalam lima tahun terakhir, dengan peningkatan dari 0,679 ton/ha pada 2020 menjadi 0,744 ton/ha pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam teknik budidaya dan dukungan dari berbagai pihak melalui bantuan sarana produksi dan peremajaan tanaman. Namun, tantangan seperti banyaknya tanaman kopi yang sudah tua, perubahan iklim yang memengaruhi proses pembungaan, serta meningkatnya serangan hama seperti penggerek buah kopi masih menjadi kendala serius. Meskipun demikian, minat petani tetap tinggi karena harga kopi yang kompetitif dan adanya dukungan jejaring pemasaran. Upaya pemerintah dalam peremajaan kebun dan pendampingan teknis turut mendorong peningkatan produktivitas kopi robusta secara bertahap.

9) Produktivitas Kopi Arabika

Kopi arabika memiliki potensi pengembangan di wilayah-wilayah dataran tinggi Temanggung, terutama di lereng Gunung Sumbing dan Prau. Namun, dalam rentang waktu 2020–2024, produktivitas kopi arabika justru mengalami tren penurunan akibat rendahnya kerapatan tanaman dan pola tanam tumpang sari yang belum optimal. Adapun data produktivitas kopi arabika di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.183.

Tabel 2.183
Produktivitas Kopi Arabika di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen	ha	1.369	1.564,36	1.699,95	1.724,95	1.177,33
2	Produksi	ton	848,8	955,24	1.002,97	992,434	649,288
3	Produktivitas Kopi Arabika	Ton/ha	0,62	0,611	0,65	0,575	0,551

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Produktivitas kopi arabika cenderung menurun selama periode 2020–2024, dari 0,62 ton/ha pada 2020 menjadi hanya 0,551 ton/ha pada

tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rendahnya densitas tanaman, sistem tanam tumpang sari yang membuat perawatan tidak optimal, serta terbatasnya perhatian pada pemupukan dan pemeliharaan. Selain itu, perubahan iklim dan keterbatasan teknologi budidaya juga berdampak pada capaian hasil panen. Meskipun capaian produktivitas tahun 2024 masih cukup baik, namun belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti penyediaan bibit unggul, perbaikan sistem budidaya melalui pelatihan GAP, serta peningkatan pendampingan dari penyuluh pertanian.

10) Jumlah Produksi Daging Ternak Besar

Daging ternak besar merupakan salah satu sumber protein hewani penting yang berasal dari sapi. Adapun perkembangan produksinya di Kabupaten Temanggung menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor budidaya dan permintaan pasar yang dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 2.63.

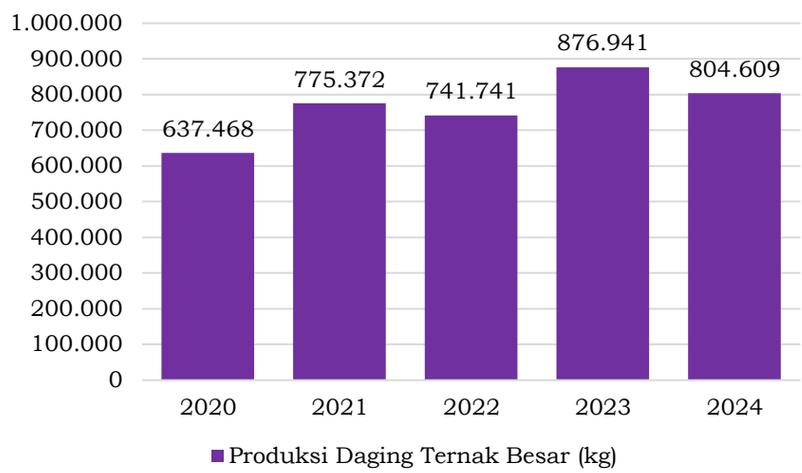

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.63
Jumlah Produksi Daging Ternak Besar Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Produksi daging ternak besar di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Setelah mengalami peningkatan signifikan dari 637.468 kg pada tahun 2020 menjadi 775.372 kg pada 2021, produksi sempat turun di tahun 2022, lalu kembali meningkat pada 2023 hingga mencapai puncaknya sebesar 876.941 kg. Namun, pada 2024 terjadi penurunan kembali menjadi 804.609 kg. Penurunan ini dipengaruhi oleh wabah penyakit seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), LSD (*Lumpy Skin Disease*), serta tingginya kasus cacingan dan

avitaminosis pada ternak. Selain itu, rendahnya bobot sapi saat dipotong dan masih maraknya pemotongan betina produktif menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan hasil produksi.

11) Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil

Ternak kecil seperti kambing dan domba memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penyediaan daging bagi masyarakat. Selama lima tahun terakhir, produksi daging ternak kecil di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuatif namun cenderung stabil. Adapun jumlah produksi daging ternak kecil di Kabupaten Temanggung disajikan pada Gambar 2.64.

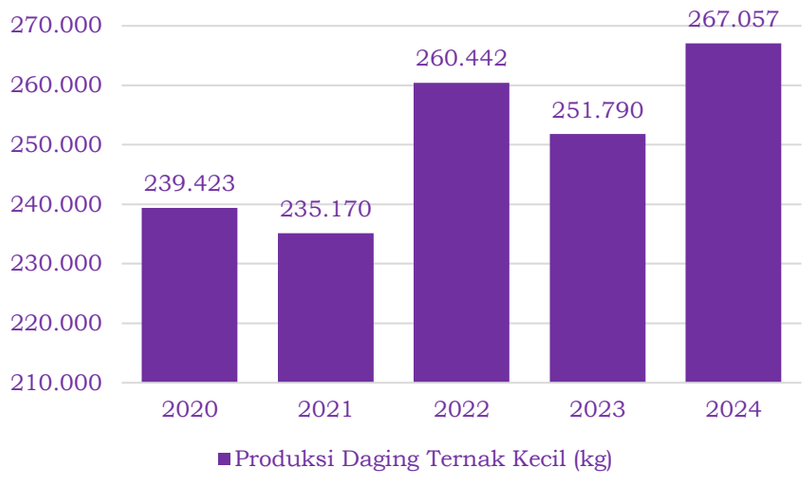

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.64
Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Produksi daging ternak kecil menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat dari 2020 sampai dengan tahun 2024. Dimulai dari 239.423 kg pada tahun 2020, produksi sempat turun sedikit pada 2021 namun kembali meningkat hingga mencapai 267.057 kg di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pemeliharaan serta perbaikan dalam kualitas ternak. Konsumsi daging kambing yang meningkat serta stabilnya harga pasar menjadi faktor pendorong, meskipun masih terdapat kendala berupa pemotongan kambing pada usia yang terlalu muda dan buruknya higiene kandang. Selain itu, peningkatan konsumsi daging domba sebagai alternatif dari daging sapi, serta kepercayaan masyarakat terhadap penanganan penyakit oleh petugas menjadi faktor pendorong capaian ini. Namun, masih banyak tantangan seperti pemotongan domba di bawah usia ideal dan tingginya paparan terhadap penyakit akibat sanitasi kandang yang belum optimal.

12) Jumlah Produksi Ternak Unggas

Daging unggas menjadi komoditas utama dalam konsumsi protein hewani masyarakat sehari-hari. Meskipun volumenya tinggi, produksi daging unggas di Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan bertahap selama periode 2020–2024 sebagaimana pada Gambar 2.65.

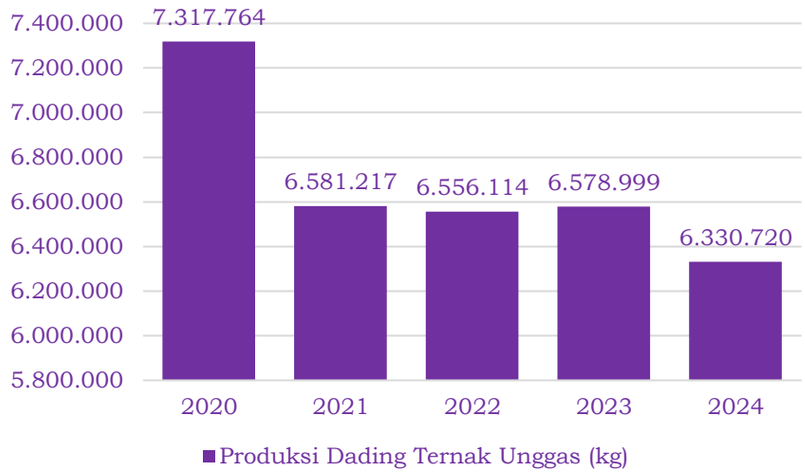

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.65
Jumlah Produksi Daging Ternak Unggas Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Produksi daging ternak unggas masih menjadi yang tertinggi dibandingkan komoditas ternak lainnya, meskipun dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2020, produksi mencapai 7.317.764 kg, namun terus menurun hingga menjadi 6.330.720 kg pada tahun 2024. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan biaya sarana produksi ternak yang mahal sehingga memengaruhi jumlah produksi daging ternah unggas.

13) Jumlah Produksi Telur

Produksi telur merupakan salah satu indikator penting dalam subsektor peternakan unggas yang mencerminkan tingkat produktivitas ayam ras petelur di suatu daerah. Di Kabupaten Temanggung, produksi telur terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir sebagaimana pada Gambar 2.66.

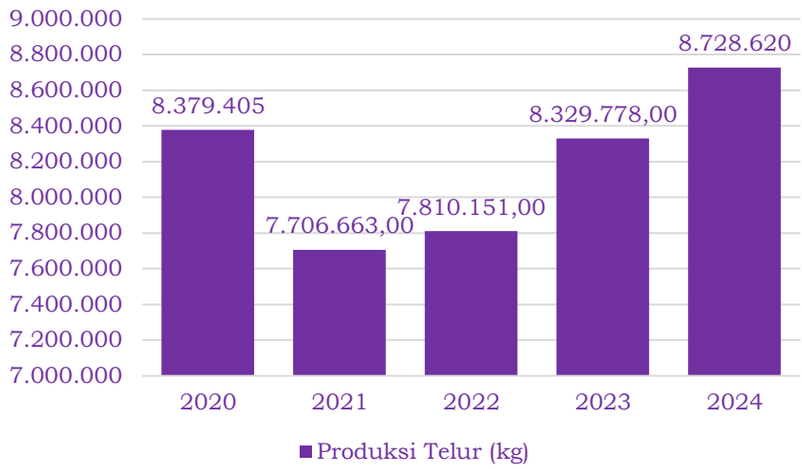

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.66
Jumlah Produksi Telur Kabupaten Temanggung
Tahun 2020–2024

Produksi telur di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir, dari 8.379.405 kg pada tahun 2020 menjadi 8.728.620 kg pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan peternakan ayam petelur yang didukung oleh berbagai faktor pendorong, seperti ketersediaan bibit unggul, penerapan higiene dan sanitasi kandang yang baik, tersedianya obat dan vaksin yang cukup, serta mutu pakan yang optimal.

14) Persentase Kelahiran Pedet

Persentase kelahiran pedet di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 48,3%, yang diperoleh dari perbandingan jumlah pedet lahir sebanyak 1.487 ekor terhadap jumlah akseptor Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 3.077 ekor. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari akseptor IB berhasil menghasilkan kelahiran, yang mencerminkan potensi wilayah Temanggung sebagai daerah pengembangan ternak sapi dengan dukungan geografis dan ketersediaan sarana-prasarana yang memadai. Namun, pencapaian tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) serta LSD (*Lumpy Skin Disease*) yang mengganggu sistem reproduksi sapi, penurunan populasi betina produktif, hingga kendala teknis seperti deteksi birahi yang tidak akurat dan keterbatasan jumlah petugas. Upaya strategis telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain melalui vaksinasi, peningkatan kapasitas petugas, edukasi peternak, serta

perbaikan sistem pelaporan kelahiran pedet guna meningkatkan efektivitas program IB ke depan.

15) Persentase Kecukupan Sarana Alat Mesin Pertanian Pangan Utama

Kecukupan alat dan mesin pertanian (alsintan) pangan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani. Indikator ini menggambarkan ketersediaan dan pemanfaatan alsintan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan budidaya tanaman pangan di tingkat petani. adapun persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 disajikan sebagaimana pada Gambar 2.67.

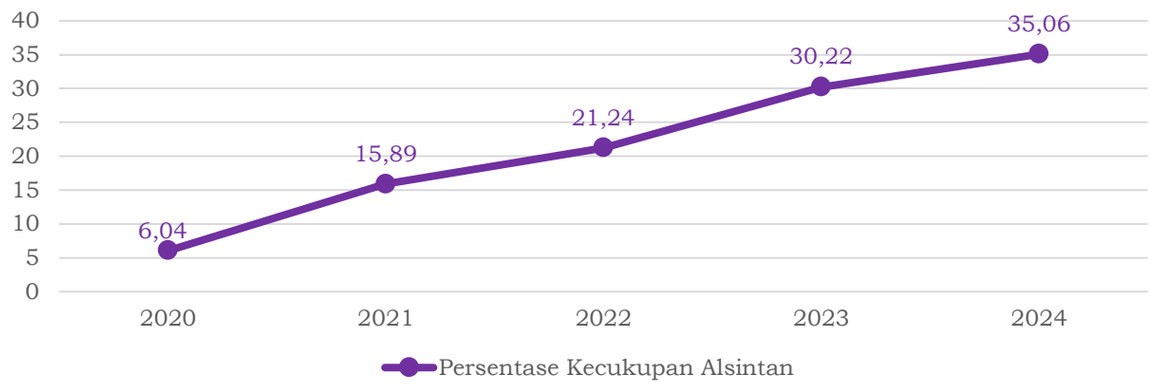

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.67
Persentase Kecukupan Sarana Alat Mesin Pertanian Pangan Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Peningkatan signifikan dari 6,04% pada 2020 menjadi 35,06% pada 2024 menunjukkan kemajuan dalam penyediaan alat mesin pertanian. Hal ini membantu efisiensi dan modernisasi pertanian. Masih ada ruang perbaikan karena capaian belum mencapai 100%. Distribusi yang merata dan pelatihan pengguna menjadi tantangan selanjutnya.

16) Persentase Prasarana yang Digunakan

Persentase penggunaan prasarana pertanian mencapai 100% secara konsisten selama lima tahun. Ini menunjukkan prasarana yang tersedia sudah dimanfaatkan dengan optimal. Namun, kualitas dan daya guna tetap perlu dievaluasi. Perlu sinergi pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur baru.

17) Persentase Penanganan Penyakit Hewan

Persentase penanganan penyakit hewan merupakan indikator penting dalam menilai respons dan efektivitas layanan kesehatan hewan terhadap berbagai kasus penyakit yang terjadi di lapangan. Indikator

ini mencerminkan sejauh mana kasus penyakit hewan yang dilaporkan dapat ditangani secara tuntas oleh petugas kesehatan hewan. Adapun persentase penanganan penyakit hewan di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada gambar 2.68

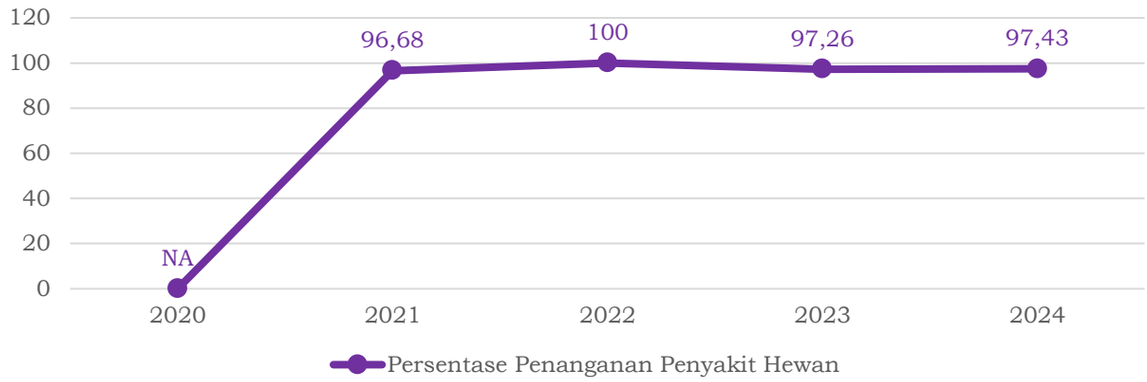

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.68
Persentase Penanganan Penyakit Hewan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, persentase penanganan penyakit hewan di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang konsisten tinggi, dengan nilai tertinggi sebesar 100% pada tahun 2022 dan sedikit menurun menjadi 97,43% pada tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat 1.050 penyakit hewan di Kabupaten Temanggung dengan 1.023 yang tertangani. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan hewan di daerah tersebut telah berjalan cukup efektif dalam merespons berbagai kasus penyakit, seperti PMK, LSD, dan gangguan reproduksi. Keberhasilan ini didukung oleh kompetensi petugas yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat medis, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Namun, tantangan masih tetap ada, seperti keterbatasan obat dan alat, proporsi petugas yang belum seimbang dengan populasi ternak, serta rendahnya pengetahuan peternak dalam mitigasi penyakit. Upaya peningkatan dilakukan melalui penyediaan sarana kesehatan hewan, edukasi peternak, penguatan surveilans, dan pengamanan lalu lintas ternak guna mencegah penyebaran penyakit dari luar wilayah.

18) Persentase Pengawasan Produk Hewan dan Bahan Asal Hewan dan Bahan Penunjang yang Memenuhi Syarat

Pengawasan terhadap produk hewan dan bahan asal hewan memiliki peran penting dalam menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari upaya kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) dalam mencegah penularan penyakit zoonosis dan

food borne disease melalui produk hewan. Adapun persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 disajikan pada Gambar 2.69.

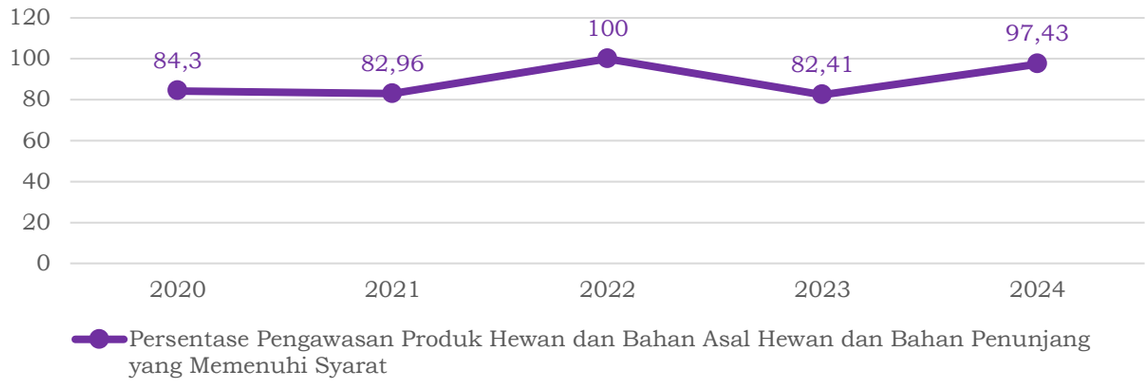

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.69
Persentase Pengawasan Produk Hewan dan Bahan Asal Hewan dan Bahan Penunjang yang Memenuhi Syarat Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Capaian persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 82,41%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 75%. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) dalam menjamin keamanan dan kelayakan konsumsi produk hewan dari aspek higiene, sanitasi, dan bebas dari penyakit zoonosis. Pengawasan dilakukan secara sampling di Rumah Potong Hewan (RPH), dan dari hasil pemeriksaan postmortem diketahui bahwa 15,54% sampel organ hati sapi terinfeksi cacing hati, sedangkan 2,04% ditemukan penyakit lainnya. Upaya pemisahan dan pemusnahan organ terinfeksi menjadi langkah penting dalam melindungi masyarakat dari risiko penyakit bawaan pangan (food borne disease). Ke depan, peningkatan cakupan dan pemerataan pengawasan melalui alokasi anggaran yang memadai sangat dibutuhkan untuk menjamin produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) di seluruh wilayah.

19) Persentase Fasilitasi Pengendalian Bencana Pertanian

Bencana di sektor pertanian dapat menimbulkan kerugian besar, baik bagi petani maupun pemerintah daerah, karena berdampak langsung pada produktivitas dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, fasilitasi pengendalian bencana pertanian menjadi langkah strategis untuk meminimalkan dampak serangan organisme pengganggu tanaman

(OPT) dan menjaga keberlangsungan usaha tani. Adapun persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian di Kabupaten Temnaggung tahun 2020–2024 disajikan pada Gambar 2.70.

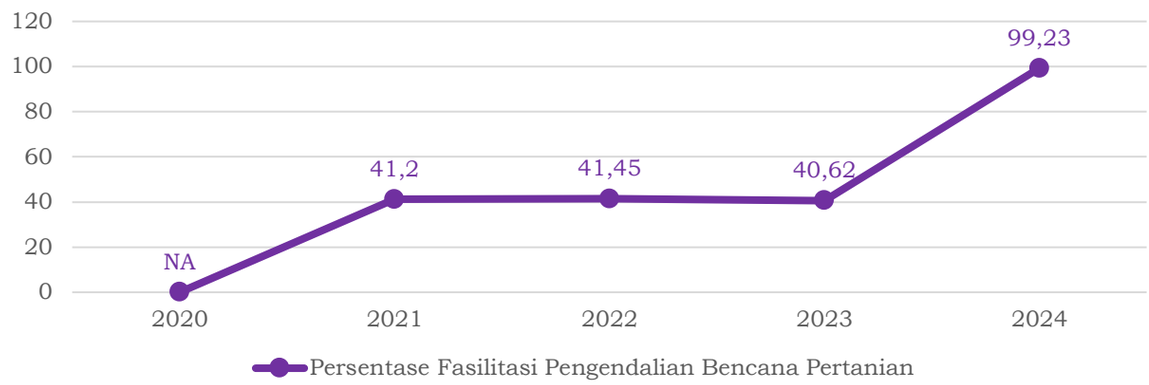

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.70
Persentase Fasilitasi Pengendalian Bencana Pertanian Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Capaian indikator fasilitasi pengendalian bencana pertanian di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren yang konsisten dan meningkat selama periode 2020–2024. Pada tahun 2021 hingga 2023, capaian berada pada angka sekitar 41%, yang berarti seluruh luasan terpapar dapat dikendalikan secara penuh meskipun luasannya relatif terbatas. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian mencapai 99,23%, menunjukkan penguatan kapasitas pengendalian bencana pertanian baik dari sisi kelembagaan, ketersediaan bahan pengendali, maupun kesiapsiagaan petugas. Keberhasilan ini ditopang oleh pelatihan PPHT, pembuatan pestisida nabati, serta kolaborasi dengan kelompok tani dan laboratorium hama tingkat provinsi. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan obat dan luasnya wilayah terpapar, dukungan petani melalui pelaporan dan gerakan swadaya serta peningkatan peran dinas dalam menyediakan bahan pengendali menjadi faktor penting dalam tercapainya kinerja ini.

20) Persentase Kelompok Tani Yang Sudah Menggunakan Teknologi

Persentase Kelompok Tani yang sudah menggunakan teknologi merupakan indikator baru yang mencerminkan sejauh mana adopsi inovasi pertanian telah dilakukan oleh kelompok tani di Kabupaten Temanggung. Penggunaan teknologi dalam sektor pertanian sangat penting untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi ketergantungan pada cara-cara tradisional, serta memperkuat daya

saing hasil pertanian. Indikator ini mencakup pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan), penggunaan aplikasi pertanian digital, sistem irigasi modern, pemupukan berbasis rekomendasi, hingga teknik budidaya yang ramah lingkungan. Peningkatan persentase kelompok tani yang mengadopsi teknologi menunjukkan keberhasilan dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian. Ke depan, indikator ini akan menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas program modernisasi pertanian dan peningkatan kapasitas petani di daerah.

21) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani

Peningkatan kelas kelompok tani merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembinaan kelembagaan petani di Kabupaten Temanggung. Indikator ini mencerminkan sejauh mana kelompok tani mampu berkembang dari sisi manajemen, teknis usahatani, dan kemandirian organisasi. Adapun persentase peningkatan kelas kelompok tani Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada Gambar 2.71.

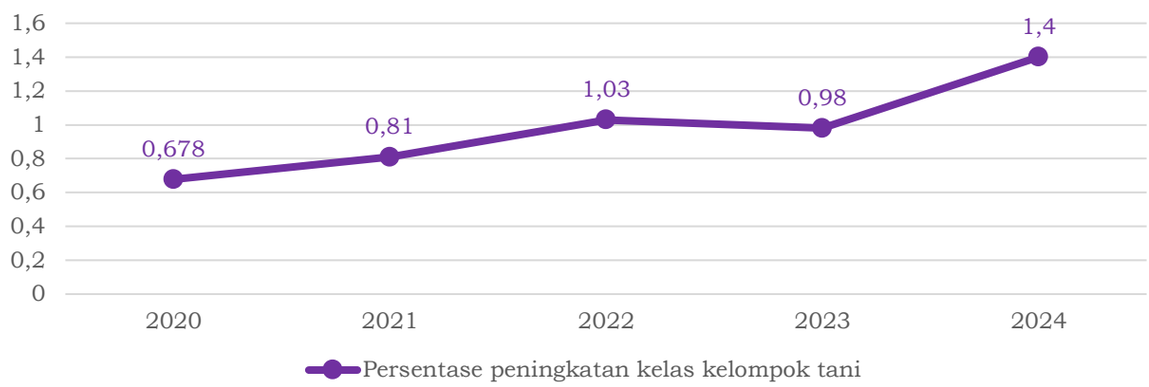

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.71
Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Persentase peningkatan kelas kelompok tani di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren positif selama periode 2020–2024, dengan capaian berturut-turut sebesar 0,678%, 0,81%, 1,03%, 0,98%, dan mencapai 1,4% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan hasil dari berbagai upaya pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas kelompok tani dalam hal manajerial dan teknis usahatani. Meskipun persentasenya masih tergolong kecil dibandingkan total jumlah kelompok yang ada, tren yang terus naik menunjukkan adanya kemajuan dalam pembinaan kelembagaan petani. Faktor pendukung seperti pelatihan, penyuluhan, serta akses

teknologi dan pemasaran menjadi kunci keberhasilan, namun masih diperlukan penguatan dari sisi permodalan, akses pelatihan merata, dan kesadaran kelompok untuk terus berkembang agar transformasi kelembagaan petani semakin optimal.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan menyumbang kontribusi terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah Kabupaten Temanggung. Peran penting sektor ini terlihat dari upaya pemerintah Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kualitas pasar, memperluas akses teknologi perdagangan digital, serta mendukung pengusaha lokal melalui fasilitasi dan promosi produk dalam negeri. Selain itu, sektor perdagangan juga berperan dalam menekan disparitas harga antarwilayah dengan memperlancar distribusi barang dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Di sisi lain, penguatan sektor ini turut mendorong peningkatan nilai ekspor komoditas unggulan daerah, yang tidak hanya memperluas pangsa pasar produk lokal ke luar daerah bahkan mancanegara, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dengan potensi besar untuk terus tumbuh, sektor perdagangan menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong perekonomian Kabupaten Temanggung dan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

1) Rasio PDRB Perdagangan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor perdagangan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor perdagangan terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor perdagangan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Adapun rasio PDRB perdagangan Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.184.

Tabel 2.184
Rasio PDRB Perdagangan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan (rupiah)	Total PDRB ADHB (rupiah)	%
2020	4.341.923.330.000	21.557.077.140.000	20,14
2021	4.730.062.110.000	22.627.791.480.000	20,90
2022	5.141.962.110.000	24.726.442.720.000	20,80
2023	5.637.462.110.000	26.912.324.210.000	20,95
2024	6.093.620.000.000	28.923.600.000.000	21,07

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan Tabel II.X, sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor, tetap stabil dalam kontribusinya terhadap PDRB, sekitar 20 hingga 21 persen selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2024 rasio PDRB dari sektor perdagangan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 21,07 persen. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan sektor perdagangan lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB yaitu 5,98 persen. Stabilitas ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi Temanggung, baik melalui distribusi produk pertanian maupun produk industri. Ini juga mencerminkan pertumbuhan konsumsi domestik yang stabil dan meningkatnya interaksi ekonomi antara Kabupaten Temanggung dengan wilayah sekitarnya.

2) Disparitas Harga

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. Tiga belas komoditas barang pokok antara lain beras medium, gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, daging sapi paha belakang, daging ayam ras, telur ayam ras, tepung terigu, kedelai impor, cabe merah keriting, cabe rawit merah, bawang merah, bawang putih kating dan ikan kembung. Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di kabupaten/kota dengan harga di provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antarwilayah. Indikator ini mulai dilakukan penghitungan di Tahun 2024, sedangkan selama kurun waktu Tahun 2020-2023 belum dilakukan penghitungan terkait disparitas harga di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data mengenai disparitas harga diperoleh dari Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Disparitas harga di Kabupaten Temanggung mencapai 1,65 persen di Tahun 2024 dengan rincian 13 (tiga belas) komoditas bahan pokok sebagai tersaji pada tabel 2.185.

Tabel 2.185
Disparitas Harga Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Komoditas	Harga Rata-rata Provinsi	Harga Rata-rata per Kabupaten/Kota	Gap	Disparitas Harga
1	Cabe Merah Keriting	37.467	42.577	-5.110	13,64%
2	Tepung Terigu	11.581	12.466	-885	7,64%
3	Bawang Merah	32.767	35.157	-2.390	7,29%
4	Bawang Putih Kating	40.977	43.904	-2.927	7,14%
5	Cabe Rawit Merah	39.944	42.011	-2.067	5,17%
6	Daging Sapi Paha Belakang	129.998	134.981	-4.984	3,83%
7	Telur Ayam Ras	27.147	27.307	-160	0,59%
8	Daging Ayam Ras	35.878	35.996	-118	0,33%
9	Minyak Goreng Premium	19.034	18.817	218	-1,14%
10	Gula Pasir	17.609	17.323	286	-1,62%
11	Ikan Kembung	33.073	32.321	751	-2,27%
12	Beras Medium	13.326	12.563	764	-5,73%
13	Kedelai Impor	12.024	10.410	1.614	-13,42%
					1,65%

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.185, perbedaan harga komoditas terbesar pada komoditas cabe merah keriting sebesar 13,64 persen. Harga cabai merah keriting di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif disebabkan ketersediaan di tingkat pasar tidak sebanding dengan permintaan yang meningkat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan cabai merah keriting diantaranya produksi cabai Temanggung sebagian dikirim ke pasar induk Jakarta, di sisi lain curah hujan tinggi menyebabkan banyak tanaman cabai terserang penyakit busuk batang, pathek, dan virus kuning sehingga produktivitas tidak maksimal. Tingginya permintaan di pasar untuk pemenuhan nataru dan tradisi nyadran di Temanggung juga mempengaruhi kenaikan harga.

Gambaran kinerja urusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Temanggung selama periode 2020-2024 menunjukkan berbagai upaya dan capaian signifikan dalam mendukung perkembangan sektor perdagangan daerah. Adapun gambaran indikator kinerja rusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.186.

Tabel 2.186
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	50	50	66,67	67	67
2	Presentase pedagang yang menggunakan transaksi digital*	%	NA	NA	NA	NA	1,55

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Presentasi pelaku usaha informal yang difasilitasi*	%	NA	NA	NA	NA	16,99
4	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan barang penting	%	66,30	69,32	98,08	100	95,08
5	Cakupan pelaku usaha yang di bina*	%	NA	NA	NA	NA	2,56
6	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	43,53	79,02	100	95,82	100
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan data urusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.186, terlihat adanya perkembangan signifikan di beberapa indikator. Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik meningkat dari 50% pada tahun 2020 menjadi 67% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan pasar, meskipun peningkatannya relatif lambat. Penggunaan transaksi digital oleh pedagang baru tercatat pada tahun 2024 dengan persentase 1,55%, yang menunjukkan bahwa adopsi digital masih rendah. Sebanyak 16,99% pelaku usaha informal telah difasilitasi pada 2024, mencerminkan upaya positif dalam memperkuat sektor informal. Ketersediaan informasi harga bahan pokok meningkat signifikan hingga 100% pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 95,08% pada 2024. Cakupan pelaku usaha yang dibina baru mencapai 2,56% pada 2024, yang masih rendah namun merupakan awal yang baik untuk program pembinaan. Sementara itu, cakupan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang meningkat pesat dari 43,53% pada 2020 hingga mencapai 100% pada 2024, mencerminkan keberhasilan dalam menjaga akurasi alat ukur di pasar.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Bidang perindustrian merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung. Bidang perindustrian merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung, khususnya melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor industri pengolahan.

1) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.

Tabel 2.187
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Tahun	Nilai PDRB ADHB Industri Pengolahan (rupiah)	Total PDRB ADHB (rupiah)	%
2020	5.920.283.830.000	21.557.077.140.000	27,46
2021	6.134.628.680.000	22.627.791.480.000	27,11
2022	6.476.561.690.000	24.726.442.720.000	26,19
2023	6.974.713.090.000	26.912.324.210.000	25,92
2024	7.384.380.000.000	28.923.600.000.000	25,53

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Kontribusi Industri pengolahan kabupaten Temanggung dalam PDRB 5 tahun terakhir tren nya mengalami penurunan. Meskipun apabila dilihat nilai riilnya dalam PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan sektor industri pengolahan lebih rendah dibanding laju pertumbuhan PDRB.

Rasio sektor industri terhadap PDRB menempati peringkat pertama penyumbang PDRB, diikuti dengan sektor pertanian dan sektor perdagangan. Hal ini mencerminkan transformasi ekonomi Kabupaten Temanggung, di mana kegiatan pengolahan hasil-hasil pertanian mulai memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong perekonomian lokal. Perkembangan industri pengolahan juga berhubungan erat dengan upaya industrialisasi di sektor pertanian, yang menciptakan nilai tambah bagi produk-produk lokal. Peningkatan PDRB di sektor industri pengolahan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong transformasi ekonomi dari daerah agraris menjadi negara atau daerah berbasis industri. Sektor manufaktur memiliki kapasitas untuk menciptakan produktivitas yang lebih tinggi dan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan sektor agraris. Ini karena sektor industri pengolahan memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih canggih, serta skala ekonomi yang lebih besar, sehingga meningkatkan daya saing global suatu negara atau daerah. Transformasi ekonomi ini terjadi ketika tenaga kerja dan sumber daya dialihkan dari sektor dengan produktivitas rendah (seperti pertanian tradisional) ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi, yaitu industri pengolahan. Sektor manufaktur memiliki peran

sentral dalam proses industrialisasi, karena kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, manufaktur sering kali berperan sebagai katalis bagi pertumbuhan ekspor, yang memberikan peluang bagi negara atau daerah untuk bersaing di pasar internasional. Pentingnya peningkatan daya saing global dari sektor manufaktur, di mana keberhasilan daerah industri dalam meningkatkan produktivitas manufaktur memungkinkan mereka untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer, seperti pertanian. Diversifikasi ekonomi ini membuat suatu daerah lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Perindustrian berperan penting dalam mengolah potensi sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana cita-cita jangka panjang pembangunan industri Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2041 yaitu mencapai stabilitas ekonomi dan kepastian berusaha, peningkatan pendapatan dan aset industri, serta berdaya saing dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan cita-cita jangka panjang tersebut salah satunya adalah melalui pengembangan sumber daya industri untuk mendukung peningkatan daya saing sektor industri baik di pasar dalam maupun luar negeri. Adapun capaian kinerja bidang perindustrian Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 antara lain sebagaimana pada tabel 2.188.

Tabel 2.188
Gambaran Urusan Perindustrian di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah*	%	NA	NA	NA	NA	44,99
2	Persentase pembinaan dan pengawasan IUI (Izin Usaha Industri) terhadap IKM*	%	NA	NA	NA	NA	NA
3	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas*	%	NA	NA	NA	NA	NA
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2025

Kinerja bidang perindustrian digambarkan berdasarkan indikator pada tabel 2.188. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja urusan perindustrian adalah sebagai berikut.

1) Persentase Industri yang Berbasis Pada Komoditas Unggulan Daerah

Pada tahun 2024, tercatat bahwa sebesar 44,99% industri di Kabupaten Temanggung berbasis pada komoditas unggulan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari pelaku industri telah mengembangkan usahanya sesuai potensi lokal yang dimiliki daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2041, komoditas unggulan tersebut meliputi tembakau, pengolahan kayu, kopi, gula aren, batik, sapu ijuk, batu bata, genteng, dan furniture. Dengan potensi sumber daya yang cukup beragam ini, menunjukkan masih besarnya potensi untuk melakukan pengembangan industri berbasis pada komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung.

2) Persentase Pembinaan dan Pengawasan IUI (Izin Usaha Industri) Terhadap Industri Kecil Menengah (IKM)

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap pertumbuhan industri serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Perizinan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi alat untuk menggerakan perkembangan dunia usaha ke bidang yang mendukung perkembangan industri. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melakukan pembinaan dan pengawasan Izin Usaha Industri (IUI). Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri. IUI memastikan legalitas perusahaan untuk beroperasi dan juga mempermudah akses ke berbagai fasilitas pemerintah seperti insentif pajak. Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.

Indikator persentase pembinaan dan pengawasan Izin Usaha Industri (IUI) terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2026 sehingga belum memiliki riwayat data. Meskipun demikian, kehadiran indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Temanggung untuk lebih serius dalam memastikan IKM memperoleh bimbingan dan pengawasan yang sesuai standar. Ke depan, indikator ini diharapkan menjadi alat ukur penting dalam mendorong pertumbuhan IKM yang taat regulasi dan berdaya saing.

3) Persentase Industri yang Terdaftar dalam SIINas

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan *platform* digital untuk mengelola data industri nasional. Data tersebut merupakan

input yang selanjutnya diolah, dianalisis, dan dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menyusun rangkaian kebijakan yang pro-industri, seperti jaminan ketersediaan pasokan bahan baku dan energi, perlindungan dari serbuan barang-barang impor, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Sebagai upaya mendukung penguatan basis data industri nasional, Pemerintah Kabupaten Temanggung didorong untuk meningkatkan partisipasi pelaku industri dalam melakukan registrasi dan pelaporan melalui SIINas. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Temanggung menggunakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2024. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat posisi industri lokal dalam perencanaan kebijakan nasional, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program fasilitasi dan dukungan dari pemerintah pusat.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Fungsi Sekretariat Daerah

Unsur pendukung urusan pemerintahan memegang peranan penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Fungsi Sekretariat Daerah sebagai pusat koordinasi dan administrasi menjadi tulang punggung dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintahan.

1) Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen pengukuran yang dirancang untuk mengevaluasi kualitas kebijakan publik melalui dimensi perencanaan, implementasi, evaluasi dan keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 48,25, menunjukkan bahwa kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan masih berada pada kategori kurang. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola kebijakan, termasuk penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam merumuskan kebijakan yang responsif.

2) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah

pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara Self Assesment oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Adapun Nilai AKIP Kabupaten Temanggung tauhn 2020–2024 disajikan pada tabel 2.189.

Tabel 2.189
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Tahun	Nilai	Kategori	Interpretasi
2020	60,16	B	Baik
2021	62,11	B	Baik
2022	63,84	B	Baik
2023	64,73	B	Baik
2024	65,17	B	Baik

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2025

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebesar 66,36 dengan predikat “B” mencerminkan implementasi sistem akuntabilitas yang sudah baik namun belum optimal. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah berjalan, tetapi masih terdapat celah yang perlu diperbaiki, terutama dalam aspek pengukuran kinerja yang hanya memperoleh nilai 17,76 dari bobot 30. Keberhasilan ini sebagian besar didorong oleh tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya, termasuk perbaikan dokumen perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama di sebagian besar perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti belum terjalinnya keterpaduan (linieritas) perencanaan kinerja dari RPJMD hingga SKP, serta adanya missing link dalam siklus perencanaan. Oleh karena itu, peningkatan integrasi sistem perencanaan dan penguatan kapasitas manajemen kinerja

menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan nilai AKIP di masa mendatang.

3) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. EPPD merupakan penilaian atas Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Adapun nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada Gambar 2.72.

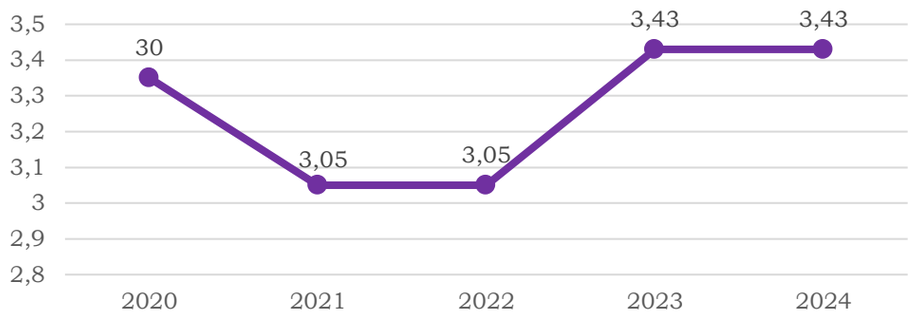

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.72
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Dilihat dari sisi nilai pada periode 2020–2024, capaian EPPD Kabupaten Temanggung mengalami dinamika yang signifikan. Pada tahun 2020, nilai EPPD tercatat sebesar 3,3453, yang masih berada pada kategori "Sangat Tinggi". Namun, pada tahun 2021 dan 2022, nilai tersebut menurun menjadi 3,05, sehingga masuk dalam kategori "Sedang", yang mencerminkan penurunan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan nilai 3,4340, yang mengangkat Temanggung ke kategori "Tinggi", menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem dan tata kelola pemerintahan. Untuk tahun 2024, penilaian masih mengacu pada nilai tahun sebelumnya (2023), karena hasil evaluasi atas LPPD 2023 belum dirilis secara resmi.

4) Indeks Reformasi Hukum

Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan signifikan dari 43,65 pada tahun 2022 menjadi 60,05 pada tahun 2023, atau naik sebesar 16,4 poin.

Kenaikan ini mencerminkan adanya komitmen dan perbaikan nyata dalam pelaksanaan reformasi hukum, terutama pada aspek kompetensi ASN sebagai legal drafter yang meningkat dari 37 menjadi 49. Namun, beberapa variabel seperti kualitas re-regulasi justru mengalami penurunan cukup tajam dari 67 menjadi 27,6, yang perlu menjadi perhatian serius. Meskipun demikian, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dan dukungan dari pimpinan melalui evaluasi dan monitoring turut mendorong perbaikan IRH secara keseluruhan. Penguatan pada variabel yang masih rendah dan keberlanjutan sinergi lintas sektor akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan skor IRH di tahun-tahun berikutnya.

5) Presentase Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spiritual

Persentase kebijakan bidang bina mental dan spiritual mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024, menandakan bahwa seluruh program dan kegiatan dalam bidang ini telah sepenuhnya difasilitasi dan dijalankan. al ini menunjukkan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung penguatan mental dan spiritual masyarakat sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. Pencapaian ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan budaya.

6) Presentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terfasilitasi

Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi menunjukkan capaian penuh sebesar 100% pada tahun 2022 dan 2023, menandakan efektivitas dalam mendukung implementasi kebijakan di sektor tersebut. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 75%, yang mengindikasikan adanya kendala atau tantangan dalam fasilitasi kebijakan selama tahun tersebut. Penurunan ini perlu menjadi perhatian untuk memastikan agar dukungan terhadap kebijakan perekonomian dan pembangunan kembali optimal dan berkelanjutan.

7) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan signifikan dari nilai 0 pada awal pengukuran hingga mencapai nilai 100 sejak tahun 2022 hingga 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan yang sangat baik dalam pengelolaan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai

dengan regulasi yang berlaku. Keberhasilan ini menjadi indikator penting dalam mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

8) Persentase AKIP Pemerintah Daerah berpredikat BB

Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB pada tahun 2024 sebesar 30,43% menunjukkan bahwa baru sebagian kecil perangkat daerah di Kabupaten Temanggung mampu mencapai tingkat akuntabilitas kinerja yang dikategorikan "Sangat Baik". Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas, meskipun secara keseluruhan masih diperlukan upaya penguatan yang lebih merata. Faktor pendorong utama pencapaian tersebut adalah penyesuaian dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD hingga SKP, yang sudah mulai diintegrasikan secara linier. Namun, masih terdapat kendala signifikan berupa kurangnya pemahaman pejabat perencana terhadap konsep linieritas serta belum adanya pohon kinerja dan cascading yang tertata dengan baik. Untuk meningkatkan persentase ini, diperlukan penguatan kapasitas SDM perencana dan penyusunan sistematika kinerja yang lebih jelas dan terintegrasi hingga ke level individu.

9) IKM Sekretariat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Indikator ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Pengukuran IKM menjadi dasar evaluasi sekaligus acuan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkup Sekretariat Daerah.

Kinerja fungsi Sekretariat Daerah digambarkan berdasarkan indikator pada tabel 2.190. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 2.190
Gambaran Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pengampu
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	NA	NA	NA	NA	80	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental
2	Persentase rumah ibadah dan sarpras	%	89,00	89,31	90,95	91,55	87,84	Bagian Kesejahteraan

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pengampu
			2020	2021	2022	2023	2024	
	pendidikan keagamaan kondisi baik							Rakyat dan Bina Mental
3	Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik	%	NA	NA	NA	NA	100	Bagian Pemerintahan
4	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	Bagian Pemerintahan
5	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	NA	NA	NA	NA	100	Bagian Hukum
6	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	59,78	82,22	100	100	73,24	Bagian Hukum
7	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100	100	100	100	Bagian Hukum
8	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	100	100	100	100	Bagian Hukum
9	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	Bagian Pembangunan
10	Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	NA	NA	NA	NA	100	Bagian Pembangunan
11	Persentase pelaporan kegiatan PD/unit kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100	Bagian Pembangunan
12	Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan	%	NA	NA	NA	NA	98	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
13	Persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	NA	18,13	96,51	100	86	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
14	Presentase Pendampingan proses PBJ	%	NA	NA	NA	NA	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
15	Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	Bagian Perekonomian
16	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	50	50	50	83,32	83,33	Bagian Perekonomian
17	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	NA	100	100	100	100	Bagian Umum
18	Persentase pemenuhan	%	NA	100	100	100	100	Bagian Umum

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pengampu
			2020	2021	2022	2023	2024	
	kebutuhan kedinasan pimpinan daerah							
19	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan pimpinan daerah	%	NA	100	100	100	100	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
20	Indeks Pelayanan Publik (PP)	Nilai	NA	NA	4,41	3,65	4,29	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
21	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen kelembagaan dan analisis jabatan	%	NA	NA	NA	NA	100	Bagian Organisasi
Keterangan: *Indikator Baru								

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2025

Gambaran capaian kinerja program pada urusan pemerintaan fungsi secretariat daerah Kabupaten Temanggung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

1) Persentase Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi

Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi merupakan indikator baru yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat. Pada tahun 2024, capaian indikator ini mencapai 80%, menandakan adanya peningkatan dukungan fasilitas terhadap kegiatan keagamaan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kerukunan dan nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat.

2) Persentase Rumah Ibadah dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kondisi Baik

Persentase rumah ibadah dan sarana prasarana pendidikan keagamaan yang berstatus kondisi baik menunjukkan tren yang relatif stabil dengan nilai tertinggi sebesar 91,55% pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 87,84% pada tahun 2024, capaian ini masih menunjukkan perhatian yang cukup baik terhadap pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas keagamaan. Upaya perawatan rutin dan pengawasan berkala menjadi kunci dalam menjaga kondisi sarana tersebut agar kualitas sarpras dapat mendukung kenyamanan serta kelancaran aktivitas keagamaan.

3) Presentase Administrasi Tata Pemerintahan yang Baik

Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik pada tahun 2024 mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh proses administrasi pemerintahan telah berjalan dengan tertib dan sesuai standar yang

ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berkualitas di masa depan.

4) Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti

Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti menunjukkan capaian 100% sejak tahun 2020 hingga 2024, menandakan bahwa seluruh kesepakatan kerjasama yang terjalin selalu direspons dengan tindakan nyata. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memaksimalkan manfaat kolaborasi dengan berbagai pihak. Konsistensi tersebut menjadi indikator keberhasilan dalam memperkuat sinergi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

5) Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi

Persentase produk hukum yang difasilitasi mencapai 100% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa seluruh proses pembuatan dan pengesahan produk hukum telah didukung secara optimal oleh pemerintah daerah. Pencapaian ini menggambarkan komitmen yang tinggi dalam memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

6) Persentase Dokumentasi Perundangan Melalui JDIH

Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 59,78% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2022 dan 2023, menandakan capaian maksimal dalam pengelolaan dan penyediaan informasi hukum. Peningkatan ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memastikan aksesibilitas dokumen perundangan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 73,24%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam pemeliharaan dan pembaruan data dokumentasi. Penurunan ini menjadi perhatian penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem JDIH agar kembali optimal. Untuk itu, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan teknologi informasi perlu diintensifkan agar dokumentasi

perundangan dapat terus terjaga dengan baik dan mendukung transparansi hukum.

7) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Secara Non Litigasi

Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi mencapai 100% secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan efektivitas pendekatan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong penyelesaian hukum yang cepat, efisien, dan minim konflik melalui mediasi, fasilitasi, atau musyawarah. Pendekatan non litigasi ini turut memperkuat stabilitas sosial dan menjaga harmonisasi hubungan antar pihak di masyarakat.

8) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Secara Litigasi

Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi yang mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut (2020–2024) menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menuntaskan permasalahan hukum melalui jalur pengadilan. Capaian ini mencerminkan responsivitas dan kesigapan dalam menangani sengketa hukum secara formal sesuai prosedur yang berlaku. Konsistensi tersebut menjadi indikator positif dalam menjaga kepastian hukum dan kredibilitas institusi pemerintah daerah.

9) Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah

Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah pada tahun 2024 mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan berhasil dilaksanakan sesuai target. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program di masing-masing perangkat daerah. Capaian ini juga menjadi indikator positif atas kinerja organisasi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

10) Presentase Dokumen Kontrak yang Diverifikasi

Pada tahun 2024, persentase dokumen kontrak yang diverifikasi mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh kontrak telah melalui proses validasi sesuai ketentuan. Hal ini mencerminkan penguatan dalam pengawasan administratif serta kepatuhan terhadap standar pengadaan. Verifikasi penuh ini juga menjadi indikator meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

11) Persentase Pelaporan Kegiatan PD/Unit Kerja Tepat Waktu

Persentase pelaporan kegiatan perangkat daerah/unit kerja yang tepat waktu menunjukkan capaian sempurna sebesar 100% selama periode 2020–2024. Konsistensi ini menandakan komitmen tinggi dari seluruh unit kerja dalam memenuhi kewajiban pelaporan secara tertib dan sesuai jadwal. Kedisiplinan ini turut mendukung kelancaran evaluasi kinerja dan perencanaan program yang berbasis data dan waktu.

12) Persentase Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa yang Terumumkan

Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada tahun 2024 mencapai 98%, menunjukkan bahwa hampir seluruh nilai anggaran pengadaan telah diumumkan secara terbuka. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Meskipun belum mencapai 100%, angka ini sudah sangat baik dan menjadi indikasi positif terhadap keterbukaan informasi publik di bidang pengadaan.

13) Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Capaian persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas pengadaan barang/jasa menunjukkan fluktuasi signifikan dari 18,13% pada 2021 menjadi 100% di 2023, lalu menurun ke 86% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan masih adanya sejumlah paket yang belum dicatatkan dalam SPSE, yang sebagian besar disebabkan oleh belum optimalnya kinerja OPD dalam melakukan pencatatan. Meskipun telah ada dorongan melalui Surat Pj. Sekda, implementasi pencatatan masih memerlukan penguatan pengawasan dan disiplin pelaporan oleh PPK di masing-masing perangkat daerah.

14) Presentase Pendampingan Proses PBJ

Pada tahun 2024, pendampingan terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) telah dilakukan secara menyeluruh dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai regulasi dan prinsip-prinsip transparansi. Pendampingan tersebut juga menjadi upaya strategis untuk meminimalkan risiko kesalahan administrasi serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengadaan di setiap perangkat daerah.

15) Persentase Laporan Permasalahan Barang Bersubsidi yang Terselesaikan

Selama lima tahun berturut-turut (2020–2024), penyelesaian permasalahan barang bersubsidi selalu mencapai 100%. Capaian ini menandakan respons cepat dan efektivitas sistem penanganan keluhan atau kendala di lapangan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program subsidi.

16) Persentase BUMD dengan Opini WTP Atas Pemeriksaan KAP

Persentase BUMD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan signifikan dari 50% pada tahun 2021-2022 menjadi 83,33% pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2024, capaian realisasi opini WTP mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 83,33%, menandakan seluruh BUMD telah memperoleh opini audit yang wajar tanpa pengecualian. Hal ini mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan BUMD yang semakin transparan dan akuntabel. Namun, masih terdapat satu BUMD yang sebelumnya mendapat opini wajar dengan pengecualian, sehingga perlu upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan standar pelaporan keuangan.

17) Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Mulai tahun 2021 hingga 2024, persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah selalu konsisten di angka 100%, menunjukkan penyediaan administrasi keuangan dan penunjang berjalan optimal. Hal ini mendukung kelancaran operasional perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan program. Konsistensi ini juga mencerminkan manajemen internal yang efektif dan efisien.

18) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Pimpinan Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan pimpinan daerah sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal dalam mendukung tugas pimpinan. Dukungan penuh terhadap kebutuhan kedinasan ini turut menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

19) Indeks Pelayanan Publik (PP)

Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Temanggung mulai tercatat pada tahun 2022 dengan nilai 4,41, kemudian mengalami penurunan menjadi 3,65 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, nilai indeks kembali meningkat menjadi 4,29, menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan publik. Fluktuasi nilai ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjaga konsistensi mutu layanan kepada masyarakat. Namun, peningkatan pada 2024 menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan kepuasan pelayanan publik yang semakin membaik.

20) Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Persentase fasilitasi penyusunan dokumen kelembagaan dan analisis jabatan pada tahun 2024 mencapai 100%, menandakan bahwa seluruh perangkat daerah telah mendapatkan pendampingan secara optimal dalam penyusunan dokumen tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Pencapaian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas organisasi serta keselarasan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

2. Fungsi Sekretariat DPRD

Unsur pendukung urusan pemerintahan pada fungsi Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif daerah. Sekretariat DPRD bertanggung jawab memberikan layanan administratif, teknis, dan operasional guna mendukung kegiatan DPRD dalam penyusunan kebijakan daerah, pengawasan, dan penganggaran. Tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi ini dapat diukur melalui indikator Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD dan Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang mencerminkan kualitas pelayanan serta efektivitas dukungan yang diberikan dalam menunjang kinerja lembaga legislatif daerah. Selain itu, terdapat indikator lain yang menjadi tolok ukur kinerja fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 sebagaimana pada tabel 2.191.

Tabel 2.191
Gambaran Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas*	%	NA	NA	NA	NA	100
2	Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana*	%	NA	NA	NA	100	100
3	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	78,86	82,16	88,14	100	100
4	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD*	%	NA	NA	NA	NA	100
5	Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan oleh DPRD*	%	NA	NA	NA	NA	NA
6	Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran*	%	NA	NA	NA	NA	NA
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, 2025

Pada tahun 2024, DPRD Kabupaten Temanggung menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 100% pada indikator kinerja seperti persentase rancangan Peraturan Daerah yang dibahas, pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai rencana, publikasi kegiatan DPRD, dan peningkatan kapasitas anggota DPRD. Indikator-indikator ini mencerminkan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif secara efektif dan transparan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Persentase laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pembahasan kebijakan anggaran merupakan indikator baru, hal ini menunjukkan upaya berkelanjutan DPRD untuk memperkuat akuntabilitas dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Urusan penunjang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan, terutama melalui perencanaan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Kualitas perencanaan daerah tercermin dalam berbagai indikator seperti Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, nilai perencanaan kinerja dalam SAKIP, serta Manajemen Risiko Indeks yang menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mengelola risiko dalam pelaksanaan program.

Peningkatan capaian pada indikator-indikator tersebut mencerminkan perencanaan yang semakin terintegrasi, inovatif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah dengan orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung menunjukkan nilai yang stabil sebesar 4,5 sejak tahun 2021 hingga 2024. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilakukan secara sistematis, partisipatif, serta berbasis data dan eviden. Namun, stagnasi nilai ini juga mengindikasikan perlunya inovasi dan penguatan lebih lanjut dalam aspek perencanaan agar indeks dapat meningkat, sejalan dengan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.

2) Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masayrakat dan meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.

Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), laporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%), dan capaian kinerja (20%). Nilai perencanaan kinerja sebagai salah satu komponen utama dalam penilaian SAKIP sangat menentukan kualitas keseluruhan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Adapun nilai perencanaan kinerja SAKIP di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel 2.192.

Tabel 2.192
Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai perencanaan kinerja SAKIP	Nilai	19,66	20,13	21	20,88	21,2

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

Nilai perencanaan kinerja SAKIP menunjukkan peningkatan bertahap dari 19,66 pada tahun 2020 menjadi 21,2 pada tahun 2024. tren ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra, RKT, dan Perjanjian Kinerja yang lebih terukur dan selaras dengan sasaran pembangunan. Nilai ini sekaligus menjadi indikator bahwa perencanaan kinerja masih perlu diperkuat agar dapat mendorong perbaikan nilai SAKIP secara keseluruhan, serta mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.

3) Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks dapat diartikan sebagai sistem pengukuran/angka yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di suatu organisasi pada waktu tertentu. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkat pemerintah daerah dapat diwakili oleh Badan Perencanaan Daerah ataupun Sekretaris Daerah atau unit kerja lain yang ditunjuk. Area penilaian MRI meliputi delapan area yaitu Kualitas Perencanaan, Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko, Aktivitas Penanganan Risiko, dan *Outcome*. Adapun angka Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Temanggung disajikan pada Gambar 2.73.

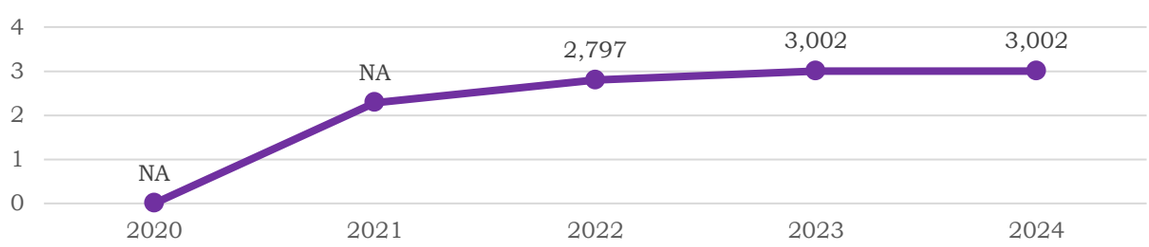

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.73
Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Berdasarkan nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kabupaten Temanggung yang meningkat dari 2,285 pada tahun 2021 menjadi 3,002 pada tahun 2023 dan bertahan pada nilai tersebut di tahun 2024, level kapabilitas manajemen risiko daerah ini berada pada transisi dari tingkat *Repeatable* ke *Defined*. Pada level *Repeatable* (2,00–2,99), pendekatan manajemen risiko masih bersifat sektoral atau *silo*, belum terintegrasi secara menyeluruh antar unit. Namun, dengan capaian nilai 3,002, Kabupaten Temanggung telah memasuki level *Defined*, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah memiliki strategi dan kebijakan manajemen risiko yang dikomunikasikan dan mulai diimplementasikan, serta adanya kesadaran organisasi terhadap pentingnya penetapan selera risiko. Meski demikian, stagnasi nilai pada 2024 menandakan perlunya peningkatan dalam konsistensi implementasi, penguatan koordinasi antar unit kerja, serta pengembangan kapasitas untuk dapat naik ke level *Managed* yang lebih komprehensif.

Kinerja program pada unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan diukur melalui sejumlah indikator yang mencerminkan sejauh mana proses perencanaan telah dilakukan secara terintegrasi, akuntabel, dan berbasis hasil. Indikator-indikator tersebut meliputi Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah, Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berbasis Risiko, serta Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah. Selain itu, keselarasan antara RKPD dan Renja Perangkat Daerah di berbagai bidang seperti pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan sumber daya alam, serta infrastruktur, juga menjadi ukuran penting yang menegaskan sinergi antar level perencanaan. Kualitas capaian pada indikator-indikator ini menunjukkan efektivitas koordinasi, ketepatan penjabaran arah kebijakan, serta kemampuan daerah dalam merumuskan perencanaan yang responsif terhadap tantangan pembangunan.

2. Keuangan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bidang keuangan memiliki peran krusial sebagai unsur penunjang yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efisien menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Kabupaten Temanggung, unsur penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan terus diperkuat melalui upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan, belanja, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) setiap tahunnya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem keuangan yang berkelanjutan, guna mendukung tercapainya target-target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun gambaran upaya pengelolaan keuangan di Kabupaten Temanggung dijabarkan sebagai berikut.

1) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Penghitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi. Nilai Indeks Pengelolaan Keungan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.193

Tabel 2.193
Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai IPKD	68,16	69,52	62,74	68,08	73,66

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Selama periode 2020-2024, nilai IPKD Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi, dengan puncaknya di tahun 2024. Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2022, pemerintah daerah berhasil melakukan perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan. Nilai IPKD pada tahun 2024 yang mencapai 73,66 menjadi bukti bahwa langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh pemerintah daerah membuahkan hasil positif dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan transparan.

2) Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (unqualified *opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*). Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel 2.194.

Tabel 2.194
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Opini LKPD (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir (2020 – 2024) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3) Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Persentase dari realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 – 2024 di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.195.

Tabel 2.195
Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Persentase
2020	307.456.823.576	1.830.815.032.558	16,79
2021	364.099.510.273	1.950.257.238.731	18,67
2022	308.726.486.721	1.849.550.699.127	16,69
2023	351.823.679.260	2.005.427.452.487	17,54
2024	384.396.905.677	2.097.018.658.739	18,33

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.195, dapat dilihat bahwa persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024, dengan puncaknya pada tahun 2021 (18,67%) dan tahun 2024 (18,33%). Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya upaya optimalisasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kontribusi PAD secara konsisten agar dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Gambaran capaian kinerja program pada urusan keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.196.

Tabel 2.196
Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* dalam APBD	%	100	100	100	100	100
2	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	85,71	100	42,86	100	100
3	Persentase penerbitan SP2D *online* yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
4	Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait*	%	NA	NA	NA	NA	100
5	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu*	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	81,55	84,52	100	100	100
7	Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	%	78,75	78,83	88,2	94,33	100
8	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	%	-11,41	24,81	52	7,44	4,57
9	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%	100	100	100	100	98,16
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Gambaran capaian kinerja program pada urusan keuangan Kabupaten Temanggung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

1) Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja *Mandatory Spending* dalam APBD

Selama periode 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Temanggung berhasil memastikan bahwa pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur dasar (25%), dan pemenuhana Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsistensi dalam pencapaian ini mencerminkan tata 304 ambar keuangan daerah yang baik serta keseriusan dalam mendukung pelayanan publik yang optimal.

2) Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Capaian ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen penganggaran mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 sebesar 42,86% dokumen disuse tepat waktu. Meskipun begitu, terjadi peningkatan 304ambara pada tahun berikutnya yang menunjukkan perbaikan dalam sistem penyusunan dokumen penganggaran.

3) Persentase Penerbitan SP2D *Online* yang Tepat Waktu

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara *online* selalu mencapai 100% selama lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pencairan dana berjalan dengan efektif dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Upaya penerbutan SP2D *online* yang tepat waktu terus dilakukan dengan meningkatan koordinasi dan konfirmasi kepada perangkat daerah sehingga dokumen SP2D dapat diproses dan tidak mengalami keterlambatan pembayaran.

4) Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas, serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D, baru mulai diukur pada tahun 2024 dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memperkuat mekanisme 304ambara dan akurasi dalam

pencatatan keuangan, sehingga mengurangi potensi ketidaksesuaian data dalam pengelolaan keuangan daerah.

5) Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu

Selama tahun 2020 – 2024, Kabupaten Temanggung selalu menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu dengan capaian 100%. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik. Ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD juga berkontribusi pada opini WTP yang secara konsisten diperoleh dalam audit BPK.

6) Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu

Penyampaian laporan daftar barang milik daerah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, capaian masih berada di angka 81,55%, namun meningkat hingga 100% sejak tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah meningkatkan efektivitas dalam pencatatan dan pelaporan aset daerah, sehingga pengelolaan aset menjadi lebih efisien.

7) Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja

Pemanfaatan aset daerah mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentasenya masih berada di angka 78,75%, namun meningkat secara bertahap hingga mencapai 100% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan penggunaan aset daerah untuk mendukung pelayanan publik dan operasional satuan kerja, sehingga aset yang tersedia dapat memberikan manfaat secara maksimal.

8) Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah

Peningkatan target pajak daerah menunjukkan tren fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, target pajak daerah justru mengalami penurunan sebesar -11,41%, namun meningkat signifikan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 24,81% dan 52%. Pada tahun 2023 dan 2024, peningkatan target pajak daerah mengalami perlambatan dengan capaian 7,44% dan 4,57%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan target penerimaan pajak, tantangan terkait pemutakhiran data objek pajak dan kepatuhan wajib pajak masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

9) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 secara konsisten mencapai 100%, kecuali pada tahun 2024 yang mengalami sedikit penurunan menjadi 98,16%. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dari berbagai sumber yang ada. Meskipun begitu, masih terdapat tantangan dimana pendaftaran dan pembayaran objek pajak Reklame dan BPHTB belum maksimal. Upaya yang terus dilakukan dengan melaksanakan intensifikasi penagihan pajak daerah sehingga realisasi melampaui target.

Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan besaran SILPA yang bervariasi, sebagaimana disajikan pada Tabel II.197

Tabel 2.197
Proporsi Besaran SILPA Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No	Tahun	APBD	SILPA	%
1	2020	1.955.541.334.850	162.448.209.105	8,31
2	2021	1.993.303.970.309	254.248.460.087	12,76
3	2022	2.163.271.983.090	180.406.907.044	8,33
4	2023	2.156.455.999.239	143.407.757.117	6,65
5	2024	2.202.443.373.410	99.533.115.228	4,52

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada Tabel II.X, besaran SILPA Kabupaten Temanggung cenderung menurun dari tahun ke tahun, dengan penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran, di mana pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan realisasi belanja untuk mendukung program-program pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Penurunan SILPA juga mencerminkan upaya yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga sisa anggaran yang tidak terserap semakin kecil setiap tahunnya.

3. Kepegawaian

Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan, bidang kepegawaian memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola aparatur sipil negara (ASN) yang efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya ini tercermin dari komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menerapkan prinsip-prinsip sistem merit sebagai dasar pengelolaan ASN, yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Sistem Merit dari tahun ke tahun. Selain itu, peningkatan Indeks Profesionalitas

ASN juga menjadi indikator penting yang menunjukkan keberhasilan dalam pembinaan kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur. Melalui penguatan regulasi, pembinaan karier berbasis kompetensi, serta digitalisasi layanan kepegawaian, Kabupaten Temanggung terus mendorong terciptanya birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan daerah.

1) Indeks Sistem Merit

Pengelolaan kepegawaian yang profesional dan berbasis sistem merit merupakan fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, responsif, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Temanggung, penguatan tata kelola aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu prioritas untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan mampu menghadapi kompleksitas tantangan pelayanan publik. Upaya tersebut tercermin dalam komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian, yang salah satunya diukur melalui capaian Indeks Sistem Merit sebagai indikator utama penerapan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan ASN. Adapun Nilai dan Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.198.

Tabel 2.198
Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020*	2021	2022	2023	2024
1	Penilaian Sistem Merit	218	113	200	258	258
2	Indeks Sistem Merit	0,52	0,259	0,482	0,62	0,62

Sumber: Aplikasi SIPINTER
*Keterangan: *Penilaian mandiri (tidak mendapatkan verifikasi penilaian dari KASN)*

Berdasarkan tabel 2.198, perkembangan Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang tahun 2020–2024. Penurunan tajam skor pada tahun 2021 dari 218 menjadi 113 (dengan indeks turun dari 0,52 ke 0,259) disebabkan oleh perbedaan metode penilaian, di mana pada tahun 2020 penilaian dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Sipinter tanpa verifikasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sementara mulai tahun 2021 penilaian dilakukan oleh KASN dengan standar yang lebih ketat. Meski sempat menurun, capaian indeks terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai skor 258 dan indeks 0,62 pada tahun 2023 dan 2024, yang termasuk dalam kategori "Baik". Hal ini mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam penerapan prinsip-prinsip sistem merit dan peningkatan kualitas tata kelola

kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2) Indeks Profesionalitas ASN

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan di era globalisasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini, diharapkan dapat bersikap lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk membangun sikap kerja profesional dalam diri ASN, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan diantaranya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (PerBKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut mewajibkan Instansi Pusat dan Daerah untuk melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sedikitnya satu kali dalam satu tahun. Adapun Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel 2.199 sebagai berikut.

Tabel 2.199
Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No.	Dimensi Pengukuran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kualifikasi	10,82	11,907	12,39	20,98	20,72
2.	Kompetensi	9,15	9,343	12,73	13,6	27,69
3.	Kinerja	25,09	25	23,01	24,97	25,09
4.	Disiplin	4,97	4,997	5	5	5
TOTAL		50,03	51,247	53,13	64,55	78,5

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel 2.199, Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan total skor dari 50,03 menjadi 78,5. Kenaikan ini utamanya didorong oleh perbaikan pada dimensi kualifikasi dan kompetensi, meskipun dimensi kompetensi yang memiliki bobot paling besar dalam pengukuran IP ASN (40%) masih menunjukkan capaian skor terendah yaitu 27,69 pada tahun 2024. Rendahnya skor kompetensi ini mencerminkan bahwa masih terdapat keterbatasan partisipasi ASN dalam kegiatan pengembangan diri seperti diklat, bimtek minimal 20 JP per tahun, maupun seminar yang relevan dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, capaian IP ASN tahun 2024 tercatat melampaui target yang direncanakan sebesar 61,75. Hal ini disebabkan oleh telah terinputnya sebagian besar data kinerja pegawai (P2KP) dan data kompetensi (sertifikat diklat) ke dalam

sistem, sehingga memberi kontribusi signifikan terhadap kenaikan skor. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya sistematis peningkatan profesionalisme ASN, meskipun masih diperlukan penguatan strategi khusus pada dimensi kompetensi agar dapat mendongkrak nilai IP ASN secara lebih optimal. Adapun gambaran indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan, bidang kepegawaian disajikan pada tabel 2.200

Tabel 2.200
Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu*	%	NA	NA	NA	NA	100
2	Persentase keterisian jabatan*	%	NA	NA	NA	NA	84,79
3	Persentase Kebutuhan ASN*	%	NA	NA	NA	NA	85,43
4	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik*	%	NA	NA	NA	NA	98,94
5	Persentase kedisiplinan ASN*	%	NA	NA	NA	NA	99,18
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2025

Gambaran unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang signifikan dalam berbagai aspek terkait manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.200, seluruh indikator merupakan indikator baru yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu telah mencapai 100%, yang mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan layanan kepegawaian dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Selain itu, keterisian jabatan mencapai 84,79%, menunjukkan bahwa sebagian besar jabatan telah terisi, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Kebutuhan ASN terpenuhi sebesar 85,43%, mencerminkan bahwa pemenuhan SDM hampir optimal. Adapun kinerja ASN juga menunjukkan hasil positif, dengan 98,94% ASN berkinerja baik atau sangat baik, serta kedisiplinan yang mencapai 99,18%. Capaian ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan disiplin ASN telah memberikan hasil yang memuaskan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, Kabupaten Temanggung telah menetapkan indikator baru terkait pengembangan potensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.201.

Tabel 2.201
Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengembangan potensi ASN*	%	NA	NA	NA	NA	18,55
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2025

Indikator ini merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur persentase pengembangan potensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Temanggung. Pengembangan potensi ASN meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kemampuan ASN dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, baik melalui pelatihan, pendidikan, maupun program pengembangan lainnya. Pada tahun 2024, persentase pengembangan potensi ASN tercatat sebesar 18,55%. Angka ini menjadi *baseline* penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas program-program pelatihan dan pendidikan yang telah dijalankan.

5. Penelitian dan Pengembangan

Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan berperan strategis dalam meningkatkan kapabilitas inovasi daerah. Melalui kegiatan litbang, pemerintah daerah dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan solusi inovatif untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.

1) Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Pilar kapabilitas inovasi terdiri dari 2 (dua) dimensi pendukung yaitu keanekaragaman dan kolaborasi serta penelitian dan pengembangan. Nilai pilar kapabilitas inovasi

Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 adalah sebesar 1,89. Capaian tersebut berada di bawah capaian rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah. Meski demikian, capaian tersebut meningkat dari tahun 2022 yang memiliki nilai pilar kapabilitas inovasi sebesar 1,05. Kapabilitas inovasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 2.202.

Tabel 2.202
Kapabilitas Inovasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Kapabilitas Inovasi	n.a	n.a	1,05	1,89	2,55

Sumber: BRIN, 2025

Berdasarkan capaian tersebut, pilar kapabilitas inovasi Kabupaten Temanggung termasuk dalam pilar dengan capaian yang rendah dibanding capaian pilar-pilar lainnya dalam komponen daya saing daerah Kabupaten Temanggung. Dilihat dari capaian tersebut, ada beberapa kelemahan yang ditemukan dalam pilar kapabilitas inovasi Kabupaten Temanggung, antara lain:

1. Jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan masih terbatas dikarenakan jumlah penulis yang berafiliasi Temanggung juga terbatas. Hal ini tidak terlepas dari kondisi dimana keberadaan universitas/perguruan tinggi di Temanggung juga belum cukup banyak.
2. Proporsi belanja riset (anggaran fungsi penelitian dan pengembangan) relatif kecil (tahun 2022 sebesar 0,01%)
3. Capaian indeks keunggulan lembaga riset juga belum dapat tercapai secara optimal, dikarenakan jumlah lembaga riset yang terbatas yang kemudian berkorelasi dengan jumlah peneliti ataupun pelaku riset yang juga terbatas.

Selain kelemahan di atas, capaian indikator pada pilar kapabilitas inovasi yang telah diraih secara positif adalah indikator terkait aplikasi kekayaan intelektual (KI). Saat ini, Kabupaten Temanggung telah memiliki KI yang didaftarkan dan tersertifikasi pada KemenkumHAM yang terdiri dari 15 KI Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional serta 4 KI Indikasi Geografis. Sedangkan pada indikator keanekaragam tenaga kerja, ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung masih didominasi oleh pekerja kerja laki-laki dibanding pekerja perempuan (1,3).

2) Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah

dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hasil pemeringkatan indeks inovasi daerah untuk Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.203.

Tabel 2.203
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Indeks Inovasi Daerah	11.700	45,58	70,92	80,87	72,42
2	Peringkat	4	28	6	10	24
3	Kategori	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

Keterangan: Ada perbedaan perhitungan pada cara menganalisis variabel di Tahun 2020 dan 2021

Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 72,42 dengan predikat Sangat Inovatif di tahun 2024. Nilai Indeks Inovasi Daerah mengalami penurunan sebesar 8,45 poin dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 80,87. Penurunan nilai indeks inovasi daerah ini disebabkan oleh penurunan hasil validasi data dukung inovasi dan nilai data dukung yang kurang maksimal. Meskipun demikian, capaian ini telah mendapatkan dukungan dari semua elemen (masyarakat, Perangkat Daerah, perguruan tinggi, sekolah) dalam menyampaikan data dukung terkait Indeks Inovasi Daerah. Diharapkan kedepannya Kabupaten Temanggung terus berupaya untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan di daerah.

Kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pada tahun 2026 diukur melalui tiga indikator program yang mencerminkan efektivitas dan relevansi kegiatan litbang terhadap pembangunan daerah. Pertama, persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana hasil litbang berkontribusi langsung terhadap arah kebijakan strategis

daerah. Kedua, persentase riset yang sesuai dengan isu strategis menunjukkan keterpaduan antara kegiatan penelitian dengan permasalahan aktual dan prioritas pembangunan, sehingga hasilnya lebih aplikatif dan tepat sasaran. Ketiga, persentase inovasi yang dimanfaatkan mencerminkan keberhasilan litbang dalam menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan oleh perangkat daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Ketiga indikator ini secara keseluruhan menggambarkan peran penting litbang sebagai penggerak berbasis ilmu pengetahuan dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di Kabupaten Temanggung.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Kabupaten Temanggung menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari korupsi, yang diukur melalui tiga indikator utama, yaitu nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi. Nilai SPIP mencerminkan sejauh mana perangkat daerah mampu menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sementara itu, nilai Kapabilitas APIP menggambarkan tingkat kemampuan Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan yang profesional, independen, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan. Adapun Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi menunjukkan dampak konkret dari upaya pengawasan terhadap penurunan potensi tindak korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Ketiga indikator ini saling melengkapi dalam menilai efektivitas peran Inspektorat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel di Kabupaten Temanggung.

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu kerangka kerja dan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola, mengawasi, dan memantau operasi serta sumber daya yang dimilikinya. SPIP dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. SPIP merupakan mekanisme yang

diterapkan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan dan tugas pemerintahan berjalan dengan baik. SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang merupakan dasar hukum bagi penerapan SPIP di berbagai entitas pemerintah, dan berisi pedoman tentang prinsip-prinsip SPIP, lingkup pengendalian intern, tata cara implementasi, serta tata cara pemantauan dan evaluasi. Penilaian SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi. Tingkat Maturitas SPIP:

1. Rintisan, Interval Skor 1,0 < skor < 2,0
2. Berkembang, Interval Skor 2,0 < skor < 3,0
3. Terdefinisi, Interval Skor 3,0 < skor < 4,0
4. Terkelola dan terukur, Interval Skor 4,0 < skor < 4,5
5. Optimum, Interval Skor > 4,5

Penilaian maturitas SPIP dilaksanakan atas unsur-unsur SPIP yang didukung oleh semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung, nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel 2.204.

Tabel 2.204
Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.045	3.045	3.008	3.000	3,077

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2025

Nilai maturitas SPIP Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Capaian maturitas SPIP Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 sebesar 3,045, tahun 2021 sebesar 3,045, tahun 2022 sebesar 3,008 tahun 2023 menurun menjadi 3.00 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 3,077 pada tahun 2024 yang menjadi nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel namun masih harus dioptimalkan dalam pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

2. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-

tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Penilaian Kapabilitas APIP menghasilkan level Kapabilitas APIP dari Level 1 s/d Level 5.

Tabel 2.205
Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	NA	NA	NA	NA	Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-353/PW11/6/2024 tanggal 23 Agustus 2024, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Temanggung, Level Kabapbilitas APIP Kabupaten Temanggung pada Level 3 (delivered). Level delivered dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi. IEPK merupakan salah satu unsur dalam penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada

Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P).

Tabel 2.206
Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	NA	NA	NA	NA	3,000

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Indeks Efektifitas Pegendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, Nomor PE.07.03/LHP-558PW11/5.1/2024 Perihal laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Indeks Efektivitas Pengenndalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi pada nilai 3,000. Capaian ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memiliki strategi dan kebijakan pengendalian korupsi yang mulai diterapkan serta dikomunikasikan di lingkungan organisasi.

Adapun gambaran keberhasilan atau capaian kinerja unsur pengawasan di Kabupaten Temanggung disajikan pada Tabel 2.207.

Tabel 2.207
Gambaran Indikator Kinerja Unsur Pengawasan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III, IV, Khusus)*	%	NA	NA	NA	NA	100
2	Presentase penyelesaian pengawasan dengan tujuan tertentu*	%	NA	NA	NA	NA	100
3	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	100	100	100	100	100
4	Presentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan*	%	NA	NA	NA	NA	NA
5	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	NA	40	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase Tindak Lanjut Aduan *Whistle Blowing*, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	NA	100	100	100	100
7	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	NA	NA	NA	NA	100
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2025

Kinerja Inspektorat digambarkan berdasarkan indikator pada Tabel 2.207. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja Inspektorat adalah sebagai berikut.

1) Persentase Pelaksanaan Pengawasan Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III, IV, Khusus)

Capaian indikator persentase pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT pada Irban (I, II, III, IV, Khusus) pada tahun 2024 mencapai 100%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang menjadi penting untuk memantau pelaksanaan pengawasan yang telah direncanakan dalam PKPT. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengawasan internal berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, mencakup berbagai bidang seperti keuangan, aset, dan kinerja perangkat daerah.

2) Presentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pada tahun 2024, capaian indikator persentase penyelaian pengawasan dengan tujuan tertentu sebesar 100%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang bertujuan untuk menilai efektivitas penyelesaian pengawasan yang dilakukan terhadap isu-isu khusus atau permasalahan yang memerlukan perhatian lebih. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat daerah atau unit tertentu yang diawasi bisa segera menindaklanjuti hasil pengawasan dan memperbaiki potensi penyimpangan yang ditemukan.

3) Persentase Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Indikator kinerja ini telah mencapai 100% secara konsisten sejak tahun 2020 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa setiap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah ditindaklanjuti secara baik dan sesuai dengan

standar yang ditetapkan. Kinerja ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan hasil pengawasan dengan maksimal.

4) Presentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang belum memiliki data historis (NA). Sebagai indikator baru, penting untuk memastikan bahwa kebijakan teknis terkait pengawasan sudah diterapkan di setiap perangkat daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terukur dalam proses pengawasan, sehingga setiap pengawasan memiliki landasan yang kuat dan dapat dijalankan dengan efisien.

5) Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Indikator ini menunjukkan peningkatan signifikan dari 40% pada tahun 2021 hingga mencapai 100% pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Semua target perangkat daerah yang diusulkan untuk masuk zona integritas WBBM/WBK telah tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perangkat daerah komitmen penuh dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

6) Persentase Tindak Lanjut Aduan *Whistle Blowing*, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi

Indikator ini juga menunjukkan kinerja yang konsisten dengan capaian 100% dari tahun 2021 hingga 2024. Setiap aduan yang masuk melalui mekanisme *whistle blowing*, laporan benturan kepentingan, maupun gratifikasi telah ditindaklanjuti dengan tepat. Hal ini menegaskan bahwa sistem pengendalian internal terkait pelaporan pelanggaran telah berjalan efektif dan responsif dalam mencegah pelanggaran etika dan integritas.

7) Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi Pengelolaan Risikonya

Pada tahun 2024, indikator ini mencapai 100%. Evaluasi pengelolaan risiko perangkat daerah merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang siap menghadapi tantangan dan risiko dalam menjalankan tugas-tugasnya. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul dan menentukan strategi mitigasi yang tepat, sehingga potensi masalah dapat diminimalisir dan kinerja pemerintahan tetap stabil.

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

1. Fungsi Kecamatan

Kabupaten Temanggung terus berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah kecamatan. Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan yang masing-masing memiliki karakteristik geografis, potensi, dan tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memperhatikan pendekatan kewilayahan guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata. Setiap kecamatan di Kabupaten Temanggung memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif di tingkat wilayah, Kabupaten Temanggung mulai menerapkan empat indikator baru pada tahun 2024 untuk mengukur kinerja kewilayahan di tingkat kecamatan. Indikator tersebut meliputi persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, persentase capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) perangkat daerah, dan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah. Keempat indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pelayanan, akuntabilitas, serta peran koordinatif kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Implementasi indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memperkuat peran strategis kecamatan sebagai simpul pelayanan publik dan pusat koordinasi pembangunan di wilayah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.

Adapun gambaran keberhasilan atau capaian kinerja pada 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung disajikan pada Tabel 2.208.

Tabel 2.208
Gambaran Indikator Kinerja pada 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan*	%	NA	NA	NA	NA	100
2	Persentase realisasi penerimaan PBB di kecamatan	%	98,78	99,19	98,72	98,68	98,21
3	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak*	%	NA	NA	NA	NA	83,5
4	Persentase jumlah lembaga	%	NA	NA	NA	NA	100

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif*						
5	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di kecamatan	%	100	100	100	100	100
6	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa di tingkat kecamatan*	%	NA	NA	NA	NA	100
7	Persentase jumlah desa di kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	%	93,64	99,2	100	100	100
8	Persentase jumlah desa di kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Kinerja pemerintah kecamatan digambarkan berdasarkan indikator pada Tabel 2.208. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja pada 20 kecamatan adalah sebagai berikut.

1) Persentase Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan telah terselesaikan. Sebagai indikator baru, data untuk tahun-tahun sebelumnya (2020-2023) belum tersedia (NA). Indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif di setiap kecamatan. Di masa depan, pencapaian indikator ini akan menjadi ukuran penting dalam evaluasi keberhasilan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Adapun capaian indikator kinerja persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 2.209.

Tabel 2.209
Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Temanggung	NA	NA	NA	NA	100
2	Tembarak	NA	NA	NA	NA	100
3	Pringsurat	NA	NA	NA	NA	100
4	Kaloran	NA	NA	NA	NA	100
5	Parakan	NA	NA	NA	NA	100
6	Bulu	NA	NA	NA	NA	100
7	Kedu	NA	NA	NA	NA	100
8	Kandangan	NA	NA	NA	NA	100
9	Candiroto	NA	NA	NA	NA	100

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
10	Ngadirejo	NA	NA	NA	NA	100
11	Jumo	NA	NA	NA	NA	100
12	Wonoboyo	NA	NA	NA	NA	100
13	Kranggan	NA	NA	NA	NA	100
14	Bejen	NA	NA	NA	NA	100
15	Kledung	NA	NA	NA	NA	100
16	Bansari	NA	NA	NA	NA	100
17	Tlogomulyo	NA	NA	NA	NA	100
18	Selopampang	NA	NA	NA	NA	100
19	Gemawang	NA	NA	NA	NA	100
20	Tretep	NA	NA	NA	NA	100
Rata-rata		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**100**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

2) Persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 98,21%, hal ini masih dalam kisaran yang cukup tinggi dan mencerminkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa diharapkan dapat mendorong capaian yang lebih optimal di masa depan. Adapun capaian kinerja realisasi penerimaan PBB pada 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 2.210.

Tabel 2.210
Capaian Indikator Kinerja Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Temanggung	93,89	93,44	93,14	91,93	90,57
2	Tembarak	100	100	99,96	99,85	97,78
3	Pringsurat	96,98	99,67	96,47	98,19	99,2
4	Kaloran	100	96,68	99,09	100	98,40
5	Parakan	91,49	97,89	97,37	98,43	96,44
6	Bulu	100	100	100	97,58	96,06
7	Kedu	100	100	100	99,53	99,91
8	Kandangan	100	99,10	95,77	96,35	100
9	Candiroto	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	97,69	100	99,23	98,28	95
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonoboyo	100	100	100	100	100
13	Kranggan	95,63	96,93	95,39	93,63	95,48
14	Bejen	100	100	100	99,89	98,29
15	Kledung	100	100	97,92	100	98,17
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	100	100	100	100	100
18	Selopampang	100	100	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	98,99
Rata-rata		**98,78**	**99,19**	**98,72**	**98,68**	**98,21**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Pada Tahun 2024 realisasi penerimaan PBB dibeberapa Kecamatan menurun dari tahun sebelumnya karena ada sebagian wajib pajak yang berdomisili diluar kecamatan sehingga menghambat dalam penagihan. SPT (identitas Wajib Pajak) yang tidak jelas karena sertifikat masih menjadi tanggungan pengembang perumahan. Selain itu di beberapa perumahan terdapat SPT yang alamatnya tidak jelas, sehingga sulit dilacak.

3) Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Layak

Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak merupakan indikator baru yang digunakan mulai tahun 2024 untuk mengukur tingkat ketersediaan dan kelayakan fasilitas fisik di wilayah kelurahan. Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung mencatat capaian sebesar 83,5%, yang mencerminkan bahwa sebagian besar kelurahan telah memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar kelayakan. Namun, masih terdapat sekitar 16,5% kelurahan yang belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut, yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih lanjut dalam perencanaan dan alokasi sumber daya guna memastikan pemerataan infrastruktur dasar di seluruh wilayah kelurahan. Hal ini penting agar pelayanan publik dapat berlangsung secara optimal dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

4) Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Terfasilitasi dan Aktif

Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif juga mulai diukur pada tahun 2024 sebagai indikator penting dalam menilai dinamika dan keberfungsian kelembagaan sosial di tingkat lokal. Capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kabupaten Temanggung telah mendapatkan fasilitasi dari pemerintah serta berfungsi secara aktif. Hal ini mencerminkan keberhasilan kecamatan dalam memberdayakan masyarakat melalui kemitraan kelembagaan yang produktif, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

5) Persentase Penanganan Laporan Kejadian, Gangguan Kamtibmas, dan Bencana Alam di Kecamatan

Sejak tahun 2020 hingga 2024, semua laporan terkait kejadian, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta

bencana alam di kecamatan ditangani 100%. Ini menunjukkan kesiapan kecamatan dalam merespons situasi darurat dan menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat. Adapun capaian kinerja persentase penanganan laporan kejadian, gangguan Kamtibmas, dan bencana alam di kecamatan tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 2.211.

Tabel 2.211
Capaian Indikator Kinerja Persentase Penanganan Laporan Kejadian, Gangguan Kamtibmas, dan Bencana Alam di Kecamatan Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Temanggung	100	95,24	100	100	100
2	Tembarak	100	100	100	100	100
3	Pringsurat	100	100	100	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	100	100	100	100	100
6	Bulu	100	100	100	100	100
7	Kedu	100	100	100	100	100
8	Kandangan	100	100	100	100	100
9	Candiroto	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	100	100	100	100	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonoboyo	100	100	100	100	100
13	Kranggan	100	100	100	100	100
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	100	100	100	100	100
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	100	100	100	100	100
18	Selopampang	100	100	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100
Rata-rata		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Capaian kinerja di 20 kecataman pada tahun 2023 tercapai 100%. Kondisi tersebut dikarenakan sudah terbentuknya desa tangguh bencana pada semua kecamatan di Kabupaten Temanggung.

6) Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan

Pada tahun 2024, capaian 100% menunjukkan bahwa semua pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa di tingkat kecamatan telah diselesaikan dengan baik. Indikator ini sebelumnya tidak tersedia (NA), namun pencapaian penuh pada tahun 2024 menandakan adanya peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin di tingkat pemerintahan desa. Adapun capaian kinerja persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa di tingkat kecamatan tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 2.212.

Tabel 2.212
Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Temanggung	NA	NA	NA	NA	100
2	Tembarak	NA	NA	NA	NA	100
3	Pringsurat	NA	NA	NA	NA	100
4	Kaloran	NA	NA	NA	NA	100
5	Parakan	NA	NA	NA	NA	100
6	Bulu	NA	NA	NA	NA	100
7	Kedu	NA	NA	NA	NA	100
8	Kandangan	NA	NA	NA	NA	100
9	Candiroto	NA	NA	NA	NA	100
10	Ngadirejo	NA	NA	NA	NA	100
11	Jumo	NA	NA	NA	NA	100
12	Wonoboyo	NA	NA	NA	NA	100
13	Kranggan	NA	NA	NA	NA	100
14	Bejen	NA	NA	NA	NA	100
15	Kledung	NA	NA	NA	NA	100
16	Bansari	NA	NA	NA	NA	100
17	Tlogomulyo	NA	NA	NA	NA	100
18	Selopampang	NA	NA	NA	NA	100
19	Gemawang	NA	NA	NA	NA	100
20	Tretep	NA	NA	NA	NA	100
Rata-rata		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**100**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

7) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, semua desa di kecamatan berhasil menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tepat waktu, dan capaian tersebut berlanjut hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan koordinasi yang baik antara kecamatan dan desa dalam perencanaan pembangunan desa. Adapun capaian kinerja persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu pada 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 2.213.

Tabel 2.213
Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Temanggung	66,67	100	100	100	100
2	Tembarak	84,62	100	100	100	100
3	Pringsurat	100	100	100	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	100	100	100	100	100
6	Bulu	100	100	100	100	100
7	Kedu	100	100	100	100	100
8	Kandangan	100	100	100	100	100

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
9	Candiroto	71,43	100	100	100	100
10	Ngadirejo	100	100	100	100	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonoboyo	100	100	100	100	100
13	Kranggan	91,67	100	100	100	100
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	100	92,31	100	100	100
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	75	91,67	100	100	100
18	Selopampang	83,33	100	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100
Rata-rata		**93,64**	**99,20**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

8) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu

Dari tahun 2020 hingga 2024, seluruh desa di kecamatan berhasil menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) tepat waktu dengan capaian 100%. Kondisi ini mencerminkan konsistensi dan disiplin administrasi pada tingkat desa. Adapun capaian kinerja persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu di 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 2.214.

Tabel 2.214
Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Temanggung	100	100	100	100	100
2	Tembarak	100	100	100	100	100
3	Pringsurat	100	100	100	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	100	100	100	100	100
6	Bulu	100	100	100	100	100
7	Kedu	100	100	100	100	100
8	Kandangan	100	100	100	100	100
9	Candiroto	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	100	100	100	100	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonoboyo	100	100	100	100	100
13	Kranggan	100	100	100	100	100
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	100	100	100	100	100
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	100	100	100	100	100
18	Selopampang	100	100	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100
Rata-rata		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Capaian kinerja pada indikator persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu di 20 kecamatan pada tahun 2020 – 2024 mencapai 100%. Keberhasilan ini didorong oleh penerapan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur tata kelola keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Selain itu, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa juga berperan penting dalam mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di tingkat desa, sehingga mendukung penyelesaian APBDes tepat waktu.

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berperan strategis dalam membina kesadaran ideologi dan kebangsaan masyarakat, serta memastikan terselenggaranya pendidikan politik yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, penguatan wawasan kebangsaan, serta mendorong partisipasi politik masyarakat yang lebih sadar dan aktif.

1) Indeks Harmoni

Indikator Indeks Harmoni belum tersedia (NA) hingga tahun 2024. Pengukuran Indeks Harmoni merupakan alat yang sangat penting dalam mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan layanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi penggunaan anggaran, partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, dan keterbukaan pemerintah dalam merespons masukan dari masyarakat. Indeks ini merupakan ukuran penting untuk menilai tingkat keharmonisan antarwarga dan kelompok di masyarakat.

2) Presentase Tertanganinya Konflik di Masyarakat

Persentase tertanganinya konflik di masyarakat Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 tercatat mencapai 100% setiap tahunnya, yang menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dan aparat terkait dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum. Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem deteksi dini, mediasi, dan penanganan konflik yang dijalankan melalui sinergi

antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga adat. Keberhasilan dalam menyelesaikan seluruh konflik yang muncul juga menjadi indikator penting dalam menciptakan iklim sosial yang kondusif bagi pembangunan daerah, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketenteraman lingkungan.

Adapun gambaran keberhasilan atau capaian indikator kinerja program pada bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Temanggung disajikan pada Tabel 2.215.

Tabel 2.215
Gambaran Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan*	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat*	%	NA	NA	NA	NA	100%
3	Persentasae ormas yang mendapat pembinaan*	%	NA	NA	NA	NA	18,18%
4	Jumlah kejadian konflik SARA*	Kejadian	NA	NA	NA	NA	NA
5	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik keamanan daerah*	%	NA	NA	NA	NA	NA
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Temanggung, 2025

Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik digambarkan berdasarkan indikator pada Tabel 2.215. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut.

1) Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Data terkait penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan belum tersedia (NA). Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan merupakan indikator kinerja baru sebagai indikator penting dalam membangun nilai-nilai kebangsaan, sehingga perlu adanya langkah konkret di tahun mendatang yang berfokus pada penguatan nilai Pancasila di masyarakat.

2) Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik kepada Masyarakat

Pada tahun 2024, pendidikan politik kepada masyarakat mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh program pendidikan

politik telah dilaksanakan secara efektif, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem demokrasi dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses politik di tingkat lokal maupun nasional.

3) Persentasae Ormas yang Mendapat Pembinaan

Pada tahun 2024, tercatat bahwa 18,18% organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Temanggung telah menerima pembinaan. Ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memberikan arahan dan penguatan kepada ormas, meskipun persentase pembinaan ini masih dapat ditingkatkan. Pembinaan ormas penting dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat harmoni, serta memastikan ormas berperan positif dalam pembangunan masyarakat.

4) Jumlah Kejadian Konflik SARA

Hingga tahun 2024, data mengenai kejadian konflik terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) belum tersedia (NA). Penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mencatat potensi konflik SARA agar dapat segera diantisipasi, dengan tujuan menjaga kerukunan sosial dan mencegah timbulnya ketegangan antar kelompok.

5) Persentase Terdeteksi dan Tertanganinya Konflik Keamanan Daerah

Data mengenai deteksi dan penanganan konflik keamanan daerah juga belum tersedia (NA) hingga tahun 2024. Mengingat pentingnya indikator ini dalam menciptakan stabilitas daerah, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik di tingkat daerah.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah mencerminkan sejauh mana wilayah mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur aspek ini adalah tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi mencerminkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi komponen utama dalam struktur pengeluaran PDRB daerah.

a) Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Per Tahun

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dalam struktur pengeluaran PDRB yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per tahun adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama satu tahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam kaluarga tersebut. Perkembangan konsumsi rumah tangga per kapita per tahun dapat menjadi indikator penting untuk melihat dinamika perekonomian daerah. Adapun rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per tahun Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.216
Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita/Tahun (Ribu Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Rata-Rata Konsumsi Per Kapita/Tahun (Ribu Rupiah)	19.757,17	20.337,37	22.036,20	23.998,73	25.568,93
Keterangan: ** Angka Sementara* *** Angka Sangat Sementara*					

Sumber: PDRB Kabupaten Temanggung Menurut Pengeluaran 2020–2024, 2025

Rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per tahun atas dasar harga berlaku di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, konsumsi per kapita tercatat sebesar Rp19,76 juta dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, hingga mencapai Rp25,57 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan daya beli masyarakat, yang dapat diindikasikan sebagai dampak dari perbaikan ekonomi daerah pascapandemi, peningkatan pendapatan, serta aktivitas ekonomi yang kembali menggeliat. Pertumbuhan konsumsi ini juga mencerminkan peranan penting konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Temanggung menurut pengeluaran.

Namun, perlu diperhatikan bahwa data tahun 2023 dan 2024 masih bersifat sementara dan sangat sementara, sehingga masih mungkin mengalami pergerakan perubahan. Meskipun begitu, pola tren yang terus meningkat menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor penggerak utama

perekonomian daerah. Peningkatan konsumsi ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, seperti pemberdayaan UMKM, pengendalian inflasi, serta perlindungan daya beli masyarakat. Selain itu, tren ini juga penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan ketimpangan konsumsi antar kelompok masyarakat agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar inklusif.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberi akses pada tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.217
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan Kabupaten (km)[1)]	650,467	650,467	650,467	650,467	650,467
Jumlah Kendaraan (unit)[2)]	299.176	317.240	329.839	338.428	352.736
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,00217	0,00205	0,00197	0,00192	0,00184
Jumlah kendaraan per 1 km (unit kendaraan/km)	460	488	507	520	542

Sumber: [1)]DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025
[2)]BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu dari 0,00217 menjadi 0,00184. Penurunan ini terjadi karena jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya. Panjang jalan yang diperhitungkan merupakan jalan kewenangan kabupaten atau belum termasuk kewenangan provinsi maupun nasional. Nilai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Sedangkan berdasarkan pelayanannya, dalam 1 km jalan kabupaten di Temanggung, jumlah kendaraan yang dilayani terus

meningkat dari 460 unit pada tahun 2020 menjadi 542 unit pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan tekanan terhadap infrastruktur jalan seiring bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahunnya. Jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya penambahan panjang jalan atau peningkatan kapasitas jalan, maka risiko terjadinya kemacetan, penurunan kualitas jalan, serta menurunnya efisiensi mobilitas masyarakat dan distribusi barang akan semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas jalan, pembangunan jalan alternatif, penguatan manajemen lalu lintas, serta kebijakan pengendalian pertumbuhan kendaraan, guna menjaga kualitas pelayanan jaringan jalan yang ada.

b) Perkembangan Pelanggan Listrik

Perkembangan pelanggan listrik merupakan indikator penting dalam mengukur kebutuhan dan pemanfaatan energi di suatu daerah. Data pelanggan dan daya terpasang mencerminkan dinamika pertumbuhan penduduk serta aktivitas ekonomi yang berdampak pada konsumsi listrik. Kebutuhan energi listrik Kabupaten Temanggung dilayani melalui Unit Layanan Pelanggan Temanggung dan Unit Layanan Pelanggan Parakan. Adapun perkembangan pelanggan listik di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.218
Perkembangan Pelanggan Listrik di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggan listrik	228.123	234.725	240.984	246.691	253.777
2	Daya Terpasang	222.063.150	238.801.400	252.583.550	258.749.350	271.234.000
3	Rata-rata Daya VA per Pelanggan	973,44	1.017,37	1.048,13	1.048,88	1.068,79

Sumber: PLN ULP Temanggung dan Parakan, 2025

Data perkembangan pelanggan listrik di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Perkembangan pelanggan listrik di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren meningkat dari 228.123 pelanggan pada tahun 2020 menjadi 253.777 pelanggan pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 11,24% dalam lima tahun.

Sejalan dengan itu, daya terpasang juga meningkat dari 222 juta VA menjadi lebih dari 271 juta VA, sementara rata-rata daya per pelanggan naik dari 973,44 VA menjadi 1.068,79 VA. Peningkatan ini mencerminkan tidak hanya bertambahnya jumlah pelanggan, tetapi juga meningkatnya konsumsi listrik per pelanggan, yang menunjukkan pertumbuhan kebutuhan energi seiring dengan dinamika aktivitas rumah tangga, ekonomi, dan sosial masyarakat. Tren ini mengindikasikan pentingnya penguatan infrastruktur kelistrikan dan perencanaan kebutuhan energi yang adaptif guna menjamin keandalan dan keberlanjutan pasokan listrik di masa mendatang.

c) Ketaatan terhadap RTRW

Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan indikator penting dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan tertib tata ruang. Tingkat kesesuaian ini mencerminkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang serta kepatuhan terhadap peraturan perencanaan wilayah di Kabupaten Temanggung. Adapun persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Tata Ruang di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.219
Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luasan ruang yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah	77.059,69	77.086,11	77.100,54	77.972,37	77.987,40
2	Luas wilayah kabupaten Temanggung	87.854,04	87.854,04	87.854,04	87.854,04	86.483,00
3	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang	89,32	88,54	88,56	89,56	90,18

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, 2025

Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024, dari 89,32% pada tahun 2020 menjadi 90,18% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan kebijakan tata ruang, yang didukung oleh pengendalian yang efektif serta implementasi perencanaan ruang yang lebih tertib. Penyesuaian luas wilayah Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 menjadi 86.483 Ha turut memengaruhi perhitungan persentase tersebut. Selain itu, hingga triwulan IV tahun 2024, terdapat penambahan luasan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW sebesar 15,03 Ha melalui penerbitan KKPR yang selaras dengan rencana tata ruang, sehingga total luasan ruang yang sesuai menjadi 77.987,4 Ha. Peningkatan ini penting dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi konflik pemanfaatan lahan, dan memastikan penggunaan ruang yang lebih efisien dan tertata.

d) Luas Wilayah Industri

Iklim investasi daerah sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan penataan ruang yang menentukan alokasi lahan untuk kegiatan ekonomi. Di Kabupaten Temanggung, kebijakan pembangunan wilayah lebih difokuskan pada penguatan sektor pertanian, yang tercermin dari proporsi kawasan industri yang sangat kecil dibandingkan luas kawasan budidaya. Adapun luas wilayah industri di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.220
Luas Wilayah Industri di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Uraian	Tahun
		2024
1	Luas Kawasan Industri (hektar)	137,20
2	Luas Kawasan Budidaya (hektar)	82.672
3	Rasio	0,0017

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2044, 2025

Luas kawasan industri di Kabupaten Temanggung sebesar 137,20 hektar, dibandingkan dengan luas kawasan budidaya yang mencapai 82.672 hektar. Rasio kawasan industri terhadap kawasan budidaya sebesar 0,0017 menunjukkan bahwa proporsi lahan untuk kegiatan industri masih sangat kecil. Kecilnya proporsi kawasan industri di Kabupaten Temanggung yang hanya sebesar 137,20 hektar dibandingkan luas kawasan budidaya sebesar 82.672 hektar, dengan rasio 0,0017, mencerminkan orientasi pembangunan wilayah yang masih kuat pada sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang diarahkan untuk mewujudkan ruang berbasis pertanian yang didukung oleh sektor industri dan pariwisata dalam satu kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu,

pengembangan kawasan industri dilakukan secara selektif dan terintegrasi untuk mendukung sektor utama tanpa mengorbankan keberlanjutan lahan budidaya dan keseimbangan lingkungan.

e) Akses Pelayanan Air Minum Kabupaten Temanggung

Pelayanan air minum di Kabupaten Temanggung diselenggarakan oleh Perumda Air Minum Tirta Agung (PDAM) untuk kawasan perkotaan, serta oleh berbagai sistem penyediaan air minum (SPAM) Non-PDAM untuk wilayah pedesaan. Berdasarkan jenis akses, air minum layak mencakup sumber seperti ledeng meteran PDAM, ledeng eceran, keran umum, hidran umum, terminal air, penjual eceran, penampungan air hujan, mata air terlindungi, sumur terlindung, dan sumur bor/pompa. Sementara itu, air minum aman harus memenuhi prinsip 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan), dengan kualitas air yang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, dan jenis akses yang diakui sebagai aman antara lain adalah pelanggan PDAM dan program Pamsimas. Pembedaan antara akses layak dan aman ini penting dalam menilai tingkat pelayanan air minum yang tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga aman untuk dikonsumsi dan berkelanjutan.

Cakupan akses air minum layak di Kabupaten Temanggung diselenggarakan melalui penyediaan air minum sampai sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan ketersediaan air dari sumur gali bagi sistem non perpipaan. Adapun capaian akses air minum layak Kabupaten Temanggung sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.221
Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak (KK)	228.998	254.563	257.570	260.833	268.376
2	Jumlah rumah tangga (KK)	243.869	269.331	270.220	271.854	274.845
3	Persentase (%)	93,90	94,52	95,32	95,95	97,65

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Capaian akses air minum layak di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 akses air minum layak sudah mencapai 97,65% yang terdiri dari persentase rumah tangga dengan akses air minum

jaringan perpipaan sebesar 79,65% dan persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan sebesar 18%. Hingga Tahun 2024, persentase rumah tangga dengan akses air minum aman di Kabupaten Temanggung menggunakan basis data yang bersumber dari jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebagai operator yang telah memenuhi kriteria air minum aman di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar capaian akses air minum di Kabupaten Temanggung merupakan jaringan perpipaan pedesaan yang dikelola oleh KPSPAM, yang mana dalam pengelolaannya belum semua KPSPAM yang rutin dalam melakukan pengujian kualitas air minum sehingga belum dapat memenuhi kriteria Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.222
Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggan PDAM (KK)	44.782	46.963	48.430	49.986	52.656
2	Jumlah KK Kabupaten Temanggung	265.590	270.220	271.854	274.677	276.110
3	Persentase (%)	16,86	17,38	17,81	18,20	19,07

Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2037 (data diolah)

Berdasarkan data hingga tahun 2024, persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Temanggung mencapai 19,07%, menunjukkan peningkatan bertahap sejak tahun 2020. Kenaikan ini didukung oleh bertambahnya jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung sebagai operator utama yang telah memenuhi kriteria air minum aman sesuai regulasi. Meskipun demikian, cakupan layanan masih tergolong rendah karena sebagian besar jaringan perpipaan berada di wilayah pedesaan dan dikelola oleh KPSPAM yang belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas air minum aman berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023.

f) Perkembangan Hotel

Perkembangan sektor perhotelan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan industri pariwisata di suatu daerah. Jumlah hotel yang tersedia mencerminkan kapasitas daerah dalam menyediakan akomodasi bagi wisatawan dan

mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Adapun perkembangan hotel di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada gambar 2.74 berikut.

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.74
Jumlah Hotel di Kabupaten Temanggung 2020–2024

Jumlah hotel di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 14 unit pada tahun 2019 menjadi 17 unit sejak tahun 2020 dan bertahan hingga 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya perkembangan sektor pariwisata dan meningkatnya kebutuhan akomodasi di daerah tersebut. Peningkatan jumlah hotel tidak hanya memperluas kapasitas penampungan wisatawan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan bertambahnya hotel, pendapatan daerah diharapkan meningkat sekaligus mendorong kemajuan industri pariwisata yang lebih berkelanjutan.

3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang kondusif di suatu daerah sangat berperan dalam meningkatkan daya saing daerah, karena mampu menarik pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Iklim investasi yang kondusif di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keamanan, regulasi perpajakan dan retribusi, serta dukungan kebijakan daerah. upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dilakukan melalui pengendalian angka kriminalitas, penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, serta penyusunan peraturan daerah (perda) yang mendukung kemudahan berusaha.

a) Angka Kriminalitas

Tabel 2.223
Angka Kriminalitas di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus Narkoba	27	26	33	29	46
2	Jumlah kasus Pembunuhan	3	2	2	0	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	6	10	6	7	3
4	Jumlah kasus Penganiayaan	17	0	6	13	13
5	Jumlah kasus Pencurian	62	30	28	34	34
6	Jumlah kasus Penipuan	4	10	9	11	19
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	1	1	0	0	
8	Total Jumlah Tindak Kriminal	-	-	-	-	30
9	Jumlah Penduduk	127	79	84	98	147
10	**Angka Kriminalitas (%)**	796.769	800.429	801.267	816.858	822.880

Sumber: 1) BNN Kabupaten Temanggung, 2025
2) Polres Temanggung, 2025
3) Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025

Angka kriminalitas di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024, dengan tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Setelah mengalami penurunan dari 127 kasus pada 2020 menjadi 79 kasus pada 2021, angka kriminalitas kembali meningkat menjadi 147 kasus pada 2024, yang merupakan jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut didominasi oleh lonjakan kasus narkoba dan penipuan. ika dilihat dari rasio terhadap jumlah penduduk, angka kriminalitas pun naik dari 12,00% pada 2023 menjadi 17,86% pada 2024, menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan yang perlu segera direspon oleh pemangku kebijakan.

b) Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi merupakan salah satu indikator penting dalam mencerminkan kapasitas fiskal serta iklim investasi di suatu wilayah. Adapun jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.224
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1)	Pajak Daerah	47.887.604.813	52.832.020.942	58.425.439.009	74.947.290.400	76.744.981.116
	Pajak Hotel	170.636.594	165.229.973	160.983.816	220.000.000	0
	Pajak Restoran	1.916.160.155	2.125.018.457	1.651.644.422	2.432.290.400	0
	Pajak Hiburan	39.936.150	14.158.750	78.310.150	75.000.000	0
	Pajak Reklame	519.430.836	832.726.326	515.450.117	750.000.000	0
	Pajak Peneranga	15.932.617.325	17.219.779.238	15.727.797.110	21.000.000.000	1.056.546.053

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	n Jalan					
	Pajak BPHTB	16.156.615.814	16.472.087.860	15.938.739.936	24.000.000.000	17.390.455.349
	Pajak Air Tanah	272.188.236	311.626.105	259.907.791	320.000.000	428.407.635
	Pajak Parkir	114.054.600	101.799.300	94.690.933	150.000.000	0
	Pajak Bumi dan Bangunan	12.765.965.103	15.589.594.933	23.997.914.734	26.000.000.000	28.257.247.150
	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-	-	-	-	29.612.324.929
	Tungakan Pajak PBB	-	-	-	-	-
2)	Retribusi Daerah	8.436.170.882	9.400.033.763	6.827.327.510	10.849.288.000	10.925.370.668
	Retribusi Jasa Umum	5.719.411.972	6.835.412.583	5.137.116.885	7.333.500.000	6.416.484.432
	Retribusi Jasa Usaha	1.162.596.760	1.077.724.500	970.705.050	1.514.200.000	2.596.430.350
	Retribusi Perizinan Tertentu	1.554.162.150	1.486.896.680	719.505.575	2.001.588.000	1.912.455.886

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar Rp47.887.604.813 naik menjadi Rp76.744.981.116,00 di tahun 2024. Pajak daerah pada tahun 2024 didominasi dari penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yaitu Pajak Makan dan/atau Minum, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan. Sementara itu, retribusi daerah juga mengalami fluktuasi, namun tetap menunjukkan tren kenaikan, terutama pada retribusi jasa usaha.

c) Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha merupakan peraturan daerah yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan usaha antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2004 tentang Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal;
4) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
5) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha;
7) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2044

Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024 disajikan pada gambar 2.74 berikut.

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.75
Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan regulasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan investasi dan kemudahan berusaha. Dengan bertambahnya Perda yang pro-investasi, diharapkan iklim usaha di Kabupaten Temanggung semakin menarik bagi pelaku bisnis dan mampu meningkatkan daya saing daerah secara keseluruhan.

4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan karena manusia sebagai objek dan subjek dalam pembangunan. Oleh karena itu, maka Pembangunan SDM diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, dan profrsional.

Disamping itu juga mempu memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan.

Kualitas SDM memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM yang mampu meningkatkan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk

a) Kualitas Tenaga Kerja

Rasio lulusan pendidikan tinggi menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar potensi daerah dalam mengembangkan sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil.

Tabel 2.225
Rasio Lulusan Perguruan Tinggi (S1/S2/S3) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lulusan perguruan tinggi (S1/S2/S3)	29.928	30.586	22.276	33.362	23.739
2	Jumlah Penduduk	796.769	800.429	801.267	816.858	822.880
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,0376	0,0382	0,0278	0,0408	0,0288

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Rasio lulusan perguruan tinggi (S1/S2/S3) di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2024, rasio lulusan perguruan tinggi (S1/S2/S3) di Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 0,0288, yang berarti hanya sekitar 2,9% dari total penduduk yang berpendidikan tinggi. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keterbatasan akses ke perguruan tinggi, maupun rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi kebijakan, seperti peningkatan ketersediaan beasiswa, kemitraan dengan perguruan tinggi, serta penguatan dukungan pendidikan untuk meningkatkan jumlah lulusan berpendidikan tinggi secara berkelanjutan.

b) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang menggambarkan tingkat beban penduduk usia

tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Indikator ini penting dalam menilai sejauh mana penduduk usia produktif mampu menopang kebutuhan hidup kelompok usia anak-anak (<15 tahun) dan lanjut usia (>64 tahun). Perubahan rasio ketergantungan mencerminkan dinamika struktur penduduk yang berdampak langsung terhadap perencanaan pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Adapun rasio ketergantuan di Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.226
Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	242.247	242.247	245.629	251.991	250.380
	• Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	177.988	177.988	166.385	176.555	167.985
	• Jumlah Penduduk usia >64 tahun	64.267	64.267	79.244	75.434	82.395
2	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	553.309	553.309	561.811	565.492	570.356
3	RasioKetergantungan (%)	43,78	43,78	43.72	44.56	43.89

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, rasio ketergantungan di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil, dengan nilai berkisar antara 43,72% hingga 44,56%. Meskipun perubahannya tidak signifikan, tren ini mengindikasikan bahwa beban penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia tidak produktif belum menunjukkan penurunan yang konsisten. Kenaikan jumlah penduduk usia di atas 64 tahun pada tahun 2024, yang mencapai 82.395 jiwa, turut memengaruhi rasio ketergantungan tersebut. Pada tahun 2024, rasio ketergantungan sebesar 43,89% berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) harus menanggung 44 penduduk usia tidak produktif, baik anak-anak maupun lansia. Jumlah penduduk usia tidak produktif tercatat sebesar 250.380 jiwa, dengan komposisi yang cukup seimbang antara kelompok usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi penduduk produktif masih cukup dominan, beban ketergantungan tetap signifikan dan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan sosial ekonomi daerah, terutama dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Untuk menjaga keseimbangan

pembangunan, kebijakan peningkatan kualitas dan partisipasi angkatan kerja produktif menjadi strategi penting guna mengurangi beban ketergantungan di masa mendatang.

2.1.5 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)

Implementasi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu data Indonesia Kabupaten Temanggung dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 atas peraturan Bupati Temanggung nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/487 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Dalam rangka tertib administrasi, tertib hukum, dan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Temanggung ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/497 Tahun 2024 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung. Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Temanggung berpedoman pada SOP diantaranya adalah :

1. SOP Analisis Data Statistik Sektoral;
2. SOP Diseminasi Data Statistik Sektoral
3. SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. SOP Forum Data;
5. SOP Penyelenggaraan SDI;
6. SOP Verval Data Statistik Sektoral
7. Dan SOP Lainnya.

Selain SOP Satu data Indonesia Kabupaten Temanggung dalam kegiatannya juga mengacu pada Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/493 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Tersedianya Data Prioritas Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang ditetapkan pada Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/494 Tahun 2024, serta Daftar Data Kabupaten Temanggung tertuang pada Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor 048/95 Tahun 2024. Dimana

Data prioritas yang relevan telah terakomodir 100% dalam daftar data daerah Kabupaten Temanggung telah memiliki akun penyelenggara SDI pada portal SDI pusat. Portal data daerah melalui data.temanggungkab.go.id telah terintegrasi dengan pada portal SDI pusat yaitu data.go.id. Pemanfaatan data pada Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, baik dalam hal pelaksanaan, evaluasi, maupun pengendalian. Pemanfaatan data SDI untuk perencanaan Pembangunan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan, memudahkan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, mendorong keterbukaan dan transparansi data, dan memungkinkan digunakan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Hasil Penilaian Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 00440/SDI/PR.10.01/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal penyampaian hasil evaluasi penyelenggaraan Satu data Indonesia tersaji pada tabel

Tabel 2.227
Nilai Domain dan Indeks SDI Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	34%	75,07
2	Domain Penyelenggaraan SDI	43%	21,63
3	Domain Data Leadership	23%	19,57
Indeks Satu Data Indonesia		100%	**39,32**

2.1.6 Penyelenggaraan Pemantauan dan Pengendalian Pemerintah Daerah

Pemantauan dan Evaluasi dan pengendalian (monevdal) pemerintah daerah dilakukan melalui berbagai forum diantaranya dengan desk capaian kinerja pembangunan yang dilaksanakan setiap Triwulanan dan forum monev yang melibatkan berbagai jabatan dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor 048/001/2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Serta untuk menurunkan kemiskinan terdapat forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 080/346 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 080/101 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan monevdal yang terintegrasi di Kabupaten Temanggung menggunakan beberapa sistem diantaranya E-Sakip, Pena Kita untuk capaian kinerja pembangunan daerah, Simpelbangda, Simwasda untuk pengendalian pengawasan, Ekinerja dan si Monev -kip. Sistem yang tersedia dapat diakses oleh internal dan *stakeholder*s terkait serta melibatkan Perangkat Daerah dalam pengisian dan pelaksanaannya. Pelaksanan monevdal dilaksanakan secara triwulan, semesteran dan tahunan oleh tim monevdal dan *stakeholders* yang terlibat.

Gambar 2.76
Pemanfaatan Sistem Montoring Evaluasi dan Pengendalian Pemerintah Dearah di Kabupaten Temanggung

Aparat pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai tupoksi berada pada Inspektorat Kabupaten Temanggung. APIP mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 700/70/2024 Tentang Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/ berkembang. Penyelenggaran sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Temanggung diperkuat dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 712/56 Tahun 2024 tentang Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Salah satu wujud pelaksanaan SPIP terintegrasi di Kabupaten Temanggung adalah penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 700/028 Tahun 2024 Tentang Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahun 2024-2026. Selain itu penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) beserta kegiatan monitoring dan evaluasinya dan pada tiap Perangkat Daerah juga menyusun dokumen RTP strategis dan RTP operasional Perangkat Daerah beserta monitoring dan evaluasinya. Regulasi yang menjadi pedoman pengendalian di Kabupaten Temanggung tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan SK SPIP di masing-masing Perangkat Daerah.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan monevdal yang akuntabel maka Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan insentif maupun disinsentif bagi perangkat daerah, diantaranya dengan

adanya Rapor Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah yang menjelaskan capaian kinerja yang diampu oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan harapan untuk tahun berikutnya akan meningkatkan kinerja pencapaian target dan disinsentif terkait pengelolaan penganggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Insentif / Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung salah satunya diambil dari pelaksanaan (penginputan data) melalui sistem monevdal daerah yang telah digunakan.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja misi pada tahun N-2, N-1 terhadap target RPD 2024-2026 dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi, Simbol penanda yang digunakan disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.228
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

2.2.1 Evaluasi Kinerja Utama

2.2.1.1 Evaluasi Analisis Realisasi Kinerja Tujuan RPD

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026, bahwa indikator tujuan merupakan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut adalah capaian kinerja 3 indikator kinerja utama sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.229
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8	10
1	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	Angka	*71,33*	71,77	71,86	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	*5,2*	5,27	5,04	95,64	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	*B*	B	B	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							**98,54**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Pada Tahun 2024 capaian indikator kinerja utama RPD sebesar 98,54% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Penjelasan terkait peningkatan kinerja dari indikator kinerja utama (3 indikator), sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

   Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana angka ini mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. IPM pada tahun 2024 sebasar 71,86 meningkat dari pada Tahun 2023 yaitu 71,33 capaian angka ini melebihi dari target yang ditetapkan pada RPD 2024. Akan tetapi, IPM Kabupaten Temanggung masih berada dibawah IPM Jawa Tengah dan Nasional.

   Pencapaian IPM ini dipengaruhi oleh 4 (empat) komponen yang memerlukan perhatian untuk dapat ditingkatkan kembali, Usia Harapan Hidup (UHH) yang berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat perlu didukung peningkatan asupan gizi yang baik serta perawatan terhadap kesehatan. Selain itu, komponen angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sangat berkaitan erat dengan peningkatan dimensi pengetahuan serta komponen Pengeluaran per Kapita yang berkaitan erat dengan dimensi hidup layak dengan ditunjukan melalui kemampuan daya

beli masyarakat atau angka konsumsi rumah tangga yang dapat menggambarkan peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Hal ini didukung dari indikator perhitungan IPM tersebut yaitu Usia Harapan Hidup di Kabupaten yang cukup baik sebesar 75,95 yang lebih tinggi daripada capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,93, capaian Harapan Lama Sekolah masih dapat tumbuh menguat dengan capaian 12,62 dan Rata-Rata Lama Sekolah dapat meningkat mencapaian angka 7,53, serta pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali menjadi 10.519 ribu rupiah/tahun).

Dalam pengukuran kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun dimana pertumbuhan IPM ini menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya, dan semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Berdasarkan masing-masing data komponen IPM, dapat disimpulkan bahwa dari capaian dimensi pengetahuan terutama pada capaian RLS yang masih harus berupaya keras untuk mencapai angka optimal.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB yang moderat tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi 5,04% yang artinya pertumbuhan sedikit lebih cepat dibandingkan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada kategori PDRB diantaranya kenaikan yang cukup signifikan pada kategori konstruksi sebesar 13,47%, kategori jasa perusahaan sebesar 11,29%, kategori jasa pendidikan sebesar 8,50%, kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 8,26%, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,01%, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 5,98%, selanjutnya kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 4,62%. Untuk kategori lain mengalami perlambatan yang masih kecil jika dibandingkan dengan kategori yang mengalami percepatan atau kenaikan.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi didasarkan atas aktivitas ekonomi pada masing-masing sektor atau lapangan usaha. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu sektor pertanian, industri

manufaktur dan perdagangan. Sementara itu faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung adalah investasi baik itu investasi fisik maupun investasi modal manusia berupa pendidikan. Pertumbuhan ekonomi bisa naik dengan meningkatkan produktivitas pada setiap sektor perekonomian di Kabupaten Temanggung.

3. Indeks Reformasi Birokrasi

   Pada Tahun 2024, capaian indeks reformasi birokrasi dengan angka 86,13 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 yaitu 69,05. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik. Pencapaian Tahun 2024 perlu ditingkatkan lagi dengan strategi peningkatan kapasitas, manajemen, dan kinerja Pemerintah Daerah serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, serta peningkatan kapaistas manajemen dan kinerja Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat.

2.2.1.2 Evaluasi Analisis Realisasi Kinerja Sasaran RPD

Evaluasi terhadap kinerja sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung diperlukan untuk mengetahui status ketercapaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 pada Tahun 2024.

Hal ini penting untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung telah dapat dicapai dan direalisasikan dengan baik atau belum. Sedangkan gambaran capaian kinerja tujuan daerah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.230
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2024.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8	10
1	**Terwujudanya masyarakat yang berkualitas dan berdaya**	**Indek Pembangunan Manusia (IPM)***	**Angka**	***71,33***	**71,77**	**71,86**	**100,00**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	*7,50*	7,85	7,53	95,92	Sangat Tinggi
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	*12,61*	12,6	12,62	100,00	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Pembangunan pemuda dan	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)*	Angka	*3,98*	4,18	3,98	95,22	Sangat Tinggi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8	10
	kebudayaan	Indeks Pembangunan Olahraga*	Angka	*2,97*	3,61	2,97	82,27	Tinggi
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	*3,31*	4,21	3,67	87,17	Tinggi
	Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	*4,5*	4,5	4,5	100,00	Sangat Tinggi
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	*75,77*	75,71	75,94	100,00	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	*95,99*	95,75	96,19	100,00	Sangat Tinggi
2	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan**	**Pertumbuhan Ekonomi***	**%**	***5***	**5,27**	**5,04**	**95,63**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Pendapatan Per kapita*	Ribu Rp	*33,43*	32,25	33,43	100,00	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Angka	*9,26*	9,25	8,67	100,00	Tinggi
		Ketimpangan Pendapatan (Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)*	Angka	*19,52*	18,8	19,52	100,00	Sangat Tinggi
		Tingkat Penganguran Terbuka (TPT)	Angka	*2,32*	2,52	2,35	100,00	Sangat Tinggi
	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	*n.a*	74,95	79,03	100,00	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	*68,08*	63,47	68,25	100,00	Sangat Tinggi
		Indeks Rasa Aman*	Angka	*4,55*	4,62	4,65	100,00	Sangat Tinggi
3	**Terwujudanya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Predikat**	***B***	**B**	**B**	**100,00**	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	Angka	*68,08*	65,5	73,83	100,00	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Indeks Merit System	angka	*0,61*	0,5	0,62	100,00	Sangat Tinggi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	8	10
	Meningkatknya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat	B/65,17	B>60-70	B/66,36	100,00	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B/84,97	76,61-88,30	B/86,91	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA TUJUAN							**98,54**	**Sangat Tinggi**
RATA-RATA SASARAN							**97,92**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator tujuan RPD pada Tahun 2024 pada 3 indikator capaian rata-rata kinerja 98,54% dengan skala penilaian Sangat Tinggi dan sasaran RPD pada Tahun 2024 pada 19 indikator capaian rata-rata kinerja sebesar 97,92% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Evaluasi kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan terdiri dari 8 indikator kinerja IKUPD dan 37 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

Tabel 2.231
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pada Tahun 2024

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	51	56,5	77,78	100	Sangat Tinggi
	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	96,97	98,16	99,13	100	Sangat Tinggi
	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	97,2	90,36	94,52	100	Sangat Tinggi
	Persentase Satuan Pendidikan Non	%	na	28	83,33	100	Sangat Tinggi

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*
	Formal terakreditasi minimal B						
Meningkatnya Akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	na	100	56,23	56,23	Rendah
	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	na	100	54,19	54,19	Rendah
	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	na	100	84,14	85,14	Tinggi
	Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	51,95	100	40,10	40,10	Sangat Rendah
RATA-RATA IKUPD						**79,46**	**Tinggi**
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	%	na	81,35	47,73	58,68	Rendah
	Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	%	40,41	42,43	51,39	100	Sangat Tinggi
	Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	%	76,6	77,17	56,73	73,52	Sedang
	Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	%	na	89,05	61,89	69,50	Sedang
	Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	%	na	100	54,18	54,18	Rendah
	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	47,47	49,14	64,97	100	Sangat Tinggi
	Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	na	100	67,20	67,20	Sedang
	Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	%	na	0,02	3,17	100	Sangat Tinggi
	Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*
	Persentase APM SD Sederajat	%	98,3	98,5	75,98	77,14	Tinggi
	Persentase APK SD Sederajat	%	105,05	104,48	136,63	100	Sangat Tinggi
	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,03	0,02	0,016	100	Sangat Tinggi
	Rasio Siswa/Guru SD	angka	na	01:28	01:14	84,09	Tinggi
	Rasio Siswa/Rombel SD	angka	na	01:28	01:20	90,91	Tinggi
	Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	na	100	99,91	99,91	Sangat Tinggi
	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	53,9	61,27	60,36	98,51	Sangat Tinggi
	Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	na	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	na	100	25,92	25,92	Sangat Rendah
	Rasio Jumlah Pengawas SD	%	na	0,1	0,03	34,56	Sangat Rendah
	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	79,5	90,49	94,92	100	Sangat Tinggi
	Persentase APM SMP Sederajat	%	88	88,5	81,98	92,63	Sangat Tinggi
	Persentase APK SMP Sederajat	%	98,59	98,7	90,28	91,47	Sangat Tinggi
	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,5	98,7	98,19	99,49	Sangat Tinggi
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	angka	0,2	0,18	0,21	84,15	Tinggi
	Rasio Siswa/Guru SMP	angka	na	1:31	01:17	83,70	Tinggi
	Rasio Siswa/Rombel SMP	angka	na	1:31	01:11	77,17	Tinggi
	Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi	%	na	100	91,09	91,09	Sangat Tinggi

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*
	Akademik minimal S1/D4						
	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	63,21	66	56,64	85,82	Tinggi
	Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	na	100	90,70	90,70	Tinggi
	Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	na	100	40,33	40,33	Sangat Rendah
	Rasio Jumlah Pengawas SMP	%	na	0,07	0,06	83,06	Tinggi
	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	95,17	95,92	94,39	98,40	Sangat Tinggi
	Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	%	na	100	77,78	77,78	Tinggi
	Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	%	na	100	96,15	96,15	Sangat Tinggi
	Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	na	100	47,62	47,62	Sangat Rendah
	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha (kesanggupan memenuhi indikator)	%	na	88	89,51	100,00	Sangat Tinggi

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*
	Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	%	na	17	51,06	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA						**83,07**	**Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian IKUPD dengan skala nilai 79,46%. dan capaian kinerja program sebesar 83,07%. Ada 3 indikator IKUPD yang capaian masih rendah dan sangat rendah dan ada 6 indikator program dengan capaian rendah dan sangat rendah, berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berskala rendah dan sangat rendah.

A. Indikator IKUPD

1) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun. Faktor penghambat yaitu pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyakat. Upaya pencapaian kinerja dengan penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal
2) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun. Faktor penghambat yaitu pelayanan pendidikan yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyakat. Upaya pencapaian kinerja dengan penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal
3) Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Faktor penghambat yaitu :
   a. Kendala Internal : rendahnya minat kemauan anak untuk bersekolah, ketidakmampuan dalam mengikuti Pelajaran, Anak terpaksa bekerja dan membantu orang tua.
   b. Kendala Eksternal : faktor ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, faktor budaya dan lokasi atau letak

geografis, kurangnya sosialisasi dan pemahaman orang tua terhadap pentingnya Pendidikan, dan faktor lingkungan (lingkungan sekolah,lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat)

B. Indikator Program :

1) Persentase APM PAUD (5-6 tahun). Faktor penghambat yaitu pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyakat. Pada Triwulan III jumlah PAUD tidak termasuk data RA usia 5-6 tahun. Upaya pencapaian kinerja dengan penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal.
2) Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi. Faktor penghambat yaitu minimnya ketersediaan SDM yang mendaftar pendidik PAUD, belum semua pendidik melakukan updating data diri pada dapodik. Upaya pencapaian kinerja dengan memfasilitasi pendidik yang belum sesuai kualifikasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan, melakukan updating data dapodik.
3) Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Faktor penghambat yaitu masih terdapat data personal yang belum dimutakhirkan, faktor sosial dimana ketersediaan SDM penjaga merupakan warga yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah. Upaya pencapaian kinerja dengan melakukan sosialisasi pemutakhiran data personal pada dapodik, mendorong pohak terkait untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kejar paket.
4) Rasio Jumlah Pengawas SD. Faktor penghambat yaitu minimnya guru yang lolos uji kompetensi, pengajuan calon pengawas yang telah lulus uji komptensi tidak mendapat Surat Rekomendasi dari Menpan RB sehingga belum bisa diangkat menjadi pengawas. Upaya pencapaian kinerja dengan memberi fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi pengawas oleh kemendikbud, mengajukan peserta calon pengawas ke Kementerian
5) Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Faktor penghambat yaitu

masih terdapat data personal yang belum dimutakhirkan, faktor sosial dimana ketersediaan SDM penjaga merupakan warga yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah. Upaya pencapaian kinerja dengan melakukan sosialisasi pemutakhiran data personal pada dapodik, mendorong pihak terkait untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kejar paket.

6) Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Faktor penghambat yaitu masih terdapat data personal yang belum dimutakhirkan, faktor sosial dimana ketersediaan SDM penjaga merupakan warga yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah. Upaya pencapaian kinerja dengan melakukan sosialisasi pemutakhiran data personal pada dapodik, mendorong pihak terkait untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kejar paket

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 31 indikator kinerja program serta di RSUD terdiri dari 1 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.222 berikut:

Tabel 2.232
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
IKUPD								
1.		Indeks Keluarga Sehat	Angka	N.A	0,13	0,197	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Faktor pendorong yaitu adanya program Integrasi Layanan Primer yang harus dilaksanakan di Kabupaten Temanggung, maka intervensi pada keluarga seharusnya menjadi lebih mudah dikarenakan dapat dilakukan bersamaan dengan kunjungan rumah.

Tabel 2.233
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
Indikator Program Perangkat Daerah								
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	44,96	73	61,01	100	Sangat Tinggi
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	13,04	13,5	11,84	100	Sangat Tinggi
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	0,31	0,5	100	100	Sangat Tinggi
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	% maksimal	11,41	13,44	11,46	100	Sangat Tinggi
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Angka Kematian Neonatal	per 1.000 KH	9,22	9,15	8,42	100	Sangat Tinggi
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	96	96	Sangat Tinggi
		Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	16,1	15,6	14,28	100	Sangat Tinggi
		Prevalensi balita gizi buruk	%	0,22	0,31	0,16	100	Sangat Tinggi
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	% maksimal	11,59	14	11,29	100	Sangat Tinggi
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	% minimal	87,42	82,5	89,09	100	Sangat Tinggi
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	99,21	99,21	Sangat Tinggi
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	98,80	98,80	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	94,61	94,61	Sangat Tinggi
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu	%	n.a	62	76,36	100	Sangat Tinggi
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	90,03	90,03	Tinggi
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	108,20	100	Sangat Tinggi
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	106,77	100	Sangat Tinggi
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	127,35	100	Sangat Tinggi
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	96,28	96,28	Sangat Tinggi
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	Maks per 100.000 penduduk	2,09	8	10,48	76,35	Tinggi
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	%	n.a	82	102,33	100	Sangat Tinggi
		Persentase rumah sehat	%	85,99	82,3	86,16	100	Sangat Tinggi
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	99,02	98,2	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	%	n.a	23,1	15,38	66,60	Sedang
		Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	100	85	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	96	84,01	97,77	100	Sangat Tinggi
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							**97,3**	Sangat

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
							5	Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja program pada Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 97,35% dengan nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Masih ada indikator dengan peringkat kinerja sedang yaitu Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar dengan faktor penghambat diantaranya adalah :

1) Belum seluruh puskesmas memenuhi standar ketenagaan
2) Belum semua puskesmas rawat inap memiliki nutrisionis sejumlah 2 orang, yaitu Puskesmas Wonoboyo, Pringsurat, Ngadirejo, Gemawang
3) Belum semua puskesmas perkotaan memiliki tenaga promkes sejumlah 2 orang, yaitu Puskesmas Bulu, Kedu, Kranggan, Temanggung
4) Puskesmas yang sudah memiliki tenaga SIK hanya sebanyak 5 puskesmas, yaitu Puskesmas Temanggung, Dharmarini, Tembarak, Selopampang, dan Jumo
5) Pada TW II terjadi penurunan dikarenakan Puskesmas Kranggan tidak memiliki tenaga ATLM dan Puskesmas Candiroto tidak memiliki dokter gigi dikarenakan pensiun

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 11 indikator kinerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 1 indikator program kinerja pada dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.234
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
IKUPD								
1.		Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	84,71	84,47	85,07	100	Sangat Tinggi
2.		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	%	89,56	89,50	90,18	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 pada indikator IKUPD dengan rata-rata 100% degan peringkat kinerja Sangat Tinggi. Pada indikator persentase infrastruktur kondisi baik faktor pendorong yaitu adanya kebutuhan masyarakat akan terbangunnya infrastruktur, dan indikator persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang dengan faktor pendorong adanya Perda RTRW, Luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang sudah disesuaikan dengan Berita Acara Kesepakatan, dan Luasan KKPR yang sesuai rencana tata ruang.

Tabel 2.235
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Periode Semester II Tahun 2024

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	59,36	59,32	59,36	100	Sangat Tinggi
		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	%	98,32	97,97	98,67	100	Sangat Tinggi
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	95,95	95,50	97,65	100	Sangat Tinggi
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase kondisi baik	%	69,21	69,04	69,15	100	Sangat Tinggi
4.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	%	66,66	73,93	68,61	92,80	Sangat Tinggi
		Persentase terbangunnya gedung pemerintah	%	n.a	100	93,42	93,42	Sangat Tinggi
5.	Program Penyelenggara Jalan	Persentase jalan Kabupaten kondisi mantap	%	89,16	89,29	88,92	99,59	Sangat Tinggi
		Persentase jembatan Kabupaten Kondisi baik	%	93,73	93,75	94,36	100	Sangat Tinggi
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	n.a	18,61	22,59	100	Sangat Tinggi
6.	Program Penyelenggaraan Penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	89,56	89,50	90,18	100	Sangat Tinggi
7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							**98,71**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 sebanyak 12 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 98,71% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja pada tabel berikut ini.

Tabel 2.236
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Periode Semseter II Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
IKUPD								
1.	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	99,12	99,02	99,34	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	64,07	52,70	59,63	100	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,10	83,82	87,84	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Tabel 2.237
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	4,50	4,46	3,69	100	Sangat Tinggi
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	94,39	88,30	95,29	100	Sangat Tinggi
2.	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	94,5	95,54	96,31	100	Sangat Tinggi
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	4,86	4,84	3,63	100	Sangat Tinggi
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada periode Tahun 2024 sebanyak 6 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 indikator kinerja IKUPD dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.238
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
IKUPD								
1.		Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2.		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kot	%	N.a	100	51,11	51,11	Rendah

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
		a						
3.		Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	Angka	N.a	310	682	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							**83,70**	Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja Program pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 83,71% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi. Masih ada indikator dengan capaian rendah yaitu indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota degan faktor penghambat diantaranya adalah :

1) Temanggung memiliki wilayah yang luas.
2) Topologi Temanggung yang pegunungan, perbukitan dan lembah.
3) Model permukiman yang Padat membuat akses jalan menjadi sempit.
4) Banyaknya masyarakat yang berkerumun mengakibatkan akses jalan terhambat.
5) Pengetahuan warga mengenai bahaya kebakaran masih rendah.

Upaya pencapaian kinerja diantaranya dengan :

1) Peningkatan sarpras
2) Peningkatan kompetensi pegawai
3) Pemberdayaan masyarakat

Tabel 2.239
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2024

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Satlinmas yang terlatih	%	100	100	3118,69	100	Sangat Tinggi
		Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	Rasio	1,42	1,62	100	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK	%	n.a	3,46	50,65	67,53	Sedang
		Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	n.a	100	42,06	42,06	Sangat Rendah
		Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	%	n.a	100	0	0	Sangat Rendah
		Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	%	n.a	3,08	2,56	83,25	Tinggi
RATA-RATA							**70,41**	**Sedang**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada Urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Tahun 2024 sebanyak 7 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 70,41% dengan nilai peringkat kinerja Sedang.

Masih ada indikator dengan nilai peringkat sedang dan sangat rendah, untuk indikator Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan faktor penghambat diantaranya :

1. Kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dalam kondisi kecepatan tinggi, berisi air dan jalan yang berliku, naik turun atau gelombang yang dapat membahayakan keselamatan orang yang ada didalam kendaraan maupun yang berada di sekitar kendaraan damkar
2. Kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian
3. Kompetensi anggota damkar khususnya penerapan strategi

pemadaman disesuaikan dengan objek yang terbakar dan lingkungan sekitarnya perlu ditingkatkan, karena setiap kebakaran memiliki strategi pemadaman yang berbeda agar proses pemadaman dapat cepat, efektif dan efisien

4. Kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, mulai dari masyarakat yang tidak memberi jalan untuk kendaraan damkar meski sudah dinyalakan sirine maupun masyarakat yg berkerumun di lokasi kebakaran untuk photo atau nonton yang menghambat pergerakan anggota dan kendaraan damkar dalam proses pemadaman
5. Kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk karena usia dan sering dipergunakan mengakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dan efisiensi contohnya, selang yang bocor di beberapa titik, nozel yg semprotannya tidak sempurna, dll.

Upaya pencapaian kinerja adalah dengan memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran.

Indikator dengan peringkat kinerja yang sangat rendah :

1. Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran, dengan faktor penghambat diantaranya: 1) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontur pegunungan, portal, jalan sempit, 2) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran; 3) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi. Dan 4) Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran.

Upaya pencapaian kinerja diantaranya 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 2) Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar. 3) Menambah Pos Pemadam Kebakaran di setiap WMK.

Urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian Kinerja Penyelenggaraana Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja IKUPD dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.240
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2024 BPBD

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
IKUPD								
1.		Indeks Resiko Bencana	Angka	236,83	142	20,92	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							**100**	Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II tahun 2024 pada BPBD dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong yaitu adanya juklak BNPB nomor 7 Tahun 2023 yang terbit pada bulan Desember 2023 dalam penentuan kejadian bencana, sehingga semua laporan kejadian bencana yang masuk belum tentu ditetapkan menjadi kejadian bencana sesuai dengan juklak BNPB yang ada.

Tabel 2.241
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		kesiapsiagaan terhadap bencana						
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada Urusan bidang penanggulangan bencana pada Tahun 2024 sebanyak 3 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial terdiri dari 1 indikator kinerja IKUPD dan 13 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.242
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Pada Tahun 2024

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
IKUPD								
1.		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	65,29	63	68,12	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II tahun 2024 pada urusan bidang sosial dengan rata-rata sebesar 100 % dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan

APBN.

Capaian kinerja program urusan bidang sosial s.d Semester II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.243
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Pada Tahun 2024

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
		diluar panti						
4.	Program perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	%	10,2	50	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48	48	51,05	100	Sangat Tinggi
5.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada Urusan bidang Sosial pada Tahun 2024 sebanyak 13 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai

peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Evaluasi kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja terdiri dari 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.244
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
IKUPD								
1.		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,8	76,15	78,06	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100 % dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong adanya keinginan masyarakat untuk bekerja di usia kerja.

Untuk capaian kinerja program pada bidang Tenag Kerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.245
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Pada Tahun 2024

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	72,39	72	73,78	100	Sangat Tinggi
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja	%	n.a	80	82,35	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Swasta yang Dibina						
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	84,88	35	40,78	100	Sangat Tinggi
		Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	%	N.a	1	3,95	100	Sangat Tinggi
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	N.a	30	98,77	100	Sangat Tinggi
		Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	N.a	90	100	100	Sangat Tinggi
3.	Program Hubungan Industrial	Persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	%	94,71	82,37	88,15	100	Sangat Tinggi
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	79,31	69,75	79,67	100	Sangat Tinggi
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	n.a	45	82,93	100	Sangat Tinggi
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Tenaga Kerja pada Tahun 2024 sebanyak 10 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 1

indikator IKUPD dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.246
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
IKUPD								
1.		Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	10,18	10,2	8,22	80,62	Tinggi
RATA-RATA							**80,62**	Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 80,62 % dengan nilai peringkat kinerja Tinggi. Dengan faktor pendorong dilaksanakanya pembekalan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Responsif Gender dalam proses perencanaan.

Untuk capaian kinerja program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.247
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,42	2,65	2,27	85,53	Tinggi
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan Renja	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2.	Program Perlindungan Perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,005	0,0029	0.0055	9,59	Sangat Rendah
		Persentase perempuan korban kekerasan	%	0,0017	0,0029	0.003	97,91	Sangat Tinggi
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	100	62,28	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	%	100	100	56,67	56,67	Rendah
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	%	Madya	Nindya	Nindya	100	Sangat Tinggi
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,0035	0,004	0.0040	99,57	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**81,16**	Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 sebanyak 8 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 81,16% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi. Masih ada 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja rendah yaitu pada indikator Persentase perempuan korban kekerasan dengan faktor penghambat kurangnya pemahaman masyarakat atas hak anak dan perlindungan anak. Upaya pencapaian kinerja dengan sosialisasi pelaporan kasus dengan aplikasi SIPESAN PERAK.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan terdiri dari 3 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.248
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Bidang Pangan Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
IKUPD								
1.		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	93,5	78,5	89,43	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong dengan adanya kesadaran masyarakat dalam hal pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Capaian kinerja program urusan pemerintahan bidang pangan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.249
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersedian pangan	%	100	100	90,20	90,20	Tinggi
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	90	98,37	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**96,70**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pangan pada Tahun 2024 sebanyak 3 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 96,70% dengan nilai

peringkat kinerja Sangat Tinggi.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, terdiri dari 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.250
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang pertanahan pada Tahun 2024 sebanyak 1 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong adanya koordinasi dengan pihak terkait penyelesaian fasilitasi pertanahan

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 13 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.251
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase persetujuan pernyataan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup						
2.	Program Pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	52,22	46	59,63	100	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Udara	Angka	83,82	86	87,84	100	Sangat Tinggi
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	2,46	0,067	3,09	100	Sangat Tinggi
		Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	%	n.a	63,90	92,02	100	Sangat Tinggi
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	27,87	28,6	28,93	100	Sangat Tinggi
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	100	166,67	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
9.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	61,26	60,21	62,91	100	Sangat Tinggi
		Cakupan layanan persampahan	%	68,51	64,71	74,39	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 sebanyak 13 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.252
Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi dan Pencatatan Sipil Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.		Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	N.a	92,06	98,52	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II tahun

2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong adanya Inovasi Loket Desa Permata (perwujudan masyarakat tertib administrasi kependudukan), Bundaku (Ibu melahirkan mendapatkan Akta, KK dan KIA Baru), Mahameru (Menikah Mendapatkan KK dan KTP Baru) dan Berkibar (Bersama kita bisa melayani masyarakat).

Sedangkan capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.253
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	89,47	87,03	97,61	100	Sangat Tinggi
2.	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,85	99,82	99,94	100	Sangat Tinggi
3.	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	%	100	94,9	99,94	100	Sangat Tinggi
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	%	18,01	0,8	31,05	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 sebanyak 4 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 1 indikator IKPUD dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.254
Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.		Persentase Desa Yang Berpredikat Mandiri	%	20,68	10,53	37,97	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan kinerja program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.255
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2023	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	%	n.a	50	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	n.a	8	100	100	Sangat Tinggi
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%	100	50	83,46	100	Sangat Tinggi
		Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase laporan pengawasan pengelolaan	%	n.a	70	71,80	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2023	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		keuangan desa oleh BPD						
		Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	n.a	37	89,42	100	Sangat Tinggi
		Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	36,84	38,34	62,41	100	Sangat Tinggi
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100	3,7	21,43	100	Sangat Tinggi
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	n.a	50	22,87	45,7	Sangat Rendah
	RATA-RATA						**93,97**	Sangat Tinggi

Sumber:BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024 sebanyak 9 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 93,97% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Masih ada 1 indikator dengan nilai peringkat kinerja sangat rendah yaitu indikator Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukun dengan faktor penghambat yaitu proses pendaftaran badan hukum melalui aplikasi www.bumdesa.kemendesa.go.id yang mana proses verifikasi dokumen kelengkapannya dilaksanakan oleh Tim Kementerian Desa.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.256
Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,65	0,63	0,8	73,02	Sedang
	RATA-RATA						**73,02**	**Sedang**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 73,02% dengan nilai peringkat kinerja Sedang, faktor penghambat adalah masih tingginya angka kelahiran (CBR) dengan faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah masih adanya kepercayaan sosial dan religius serta usia pernikahan. Upaya pencapaian kinerja dengan Peningkatan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK Baik pemerintah maupun swasta melakukan Advokasi dan bintek kepada kades dalam program KKBPK

Sedangkan kinerja program urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.257
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	8,6	10,5	7,60	100	Sangat Tinggi
		Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya	%	1,02	2	0,37	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		dibawah usia 20 tahun						
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)	%	14,1	12,6	9,13	100	Sangat Tinggi
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	80,14	75,75	90,36	100	Sangat Tinggi
		Persentase kepesertaan KB aktif	%	45,77	76,21	81,85	100	Sangat Tinggi
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	45,03	46,1	46,45	100	Sangat Tinggi
		Persentase kampung KB Berkembang dan mandiri	%	52,71	37,88	28,45	78,11	Sedang
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	%	58,19	55,98	62,08	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**89,20**	Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 sebanyak 9 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 89,20% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi. Masih ada 1 indikator dengan capaian kinerja sedang yaitu Persentase kampung KB berkembang dan Mandiri dengan faktor penghambat diantaranya 1) Potensi kader dalam mendukung Program. 2) Partisipasi masyarakat dalam mendukung kampung KB

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.258
Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.		Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	%	38,65	41,55	41.55	100	Sangat Tinggi
2.		Persentase Layanan Perhubungan	%	n.a	67,11	116,24	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat tinggi.

Sedangkan capaian kinerja program urusan perhubungan semester II disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.259
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	%	38,65	41,55	41,55	100	Sangat Tinggi
		Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	%	n.a	100	89,17	100	Sangat Tinggi
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	100	98,25	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Terminal Tipe C yang Aktif	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase	%	100	100	100	100	Sangat

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Terminal Tipe C dalam kondisi baik						Tinggi
		Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	100	99,61	99,62	100	Sangat Tinggi
		Persentase penerangan jalan di ruas jalan Kabupaten	%	14,26	33,48	34,17	100	Sangat Tinggi
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	n.a	63,58	63,52	99,91	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**99,99**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Perhubungan pada Tahun 2024 sebanyak indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 99,99% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 indikator IKUPD 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.260
Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	97,38	89,95	95,86	100	Sangat Tinggi
2.		Indeks SPBE	Angka	2,8	3,2	3,64	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian program pada urusan bidang komunikasi dan infrastruktur sampai dengan Semester II disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.261
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	30	35	85,29	100	Sangat Tinggi
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	n.a	100	140,96	100	Sangat Tinggi
		Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	80	85	100	100	Sangat Tinggi
2.	Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase layanan publik secara elektronik	%	n.a	50	50,38	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024 sebanyak 5 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 2 indikator IKUPD

dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.262
Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.		Persentase Koperasi Sehat	%	10,71	36	15,15	42,09	Sangat Rendah
2.		Persentase UMKM yang difasilitasi	%	n.a	0,92	1,39	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**71,04**	**Sedang**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 71,04% dengan nilai peringkat kinerja Sedang. Indikator dengan capaian kinerja sangat rendah yaitu persentase koperasi sehat dengan faktor penghambat diantaranya adalah 1) Ada koperasi yang tidak mengirimkan laporan keuangannya ke Dinas; dan 2) Kurangnya SDM Pengawas koperasi. Upaya pencapaian kinerja diantaranya dengan 1) Penjadwalan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang tidak mengirimkan laporannya ke Dinas. 2) Meningkatkan jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan Kesehatan.

Sedangkan capaian indikator program urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah Pada Periode Semester II disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.263
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RP s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	27,47	22	15,15	42,09	Sangat Rendah
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	%	n.a	1,74	80,65	100	Sangat Tinggi
2.	Program Pemberdayaan	Persentase koperasi tidak	%	n.a	100	0,44	0,44	Sangat Rendah

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RP s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
	dan Perlindungan Koperasi	aktif yang diusulkan untuk dibubarkan						
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	75	91,43	81,01	88,61	Tinggi
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	%	n.a	4,45	100	100	Sangat Tinggi
	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	n.a	0,92	1,15	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**71,86**	Sedang

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2024 sebanyak 6 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 71,86% dengan nilai peringkat kinerja Sedang. Masih ada 2 indikator dengan skala nilai sangat rendah diantaranya :

1) Persentase koperasi sehat dengan faktor penghambat diantaranya adalah 1) Ada koperasi yang tidak mengirimkan laporan keuangannya ke Dinas. 2) Kurangnya SDM Pengawas koperasi. Upaya pencapaian kinerja diantaranya dengan 1) Penjadwalan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang tidak mengirimkan laporannya ke Dinas. 2) Meningkatkan jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan Kesehatan.
2) Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan, dengan faktor penghambat diantaranya adalah 1) Banyak koperasi yang tidak ditemukan alamatnya dan 2) Pengurus dan pengelola koperasi yang sudah tidak ada. Upaya pencapaian kinerja dengan :
   a. Melakukan pemetaan koperasi yang tidak aktif
   b. Melakukan kunjungan ke koperasi yang tidak aktif
   c. Melakukan koordinasi dengan desa dan warga setempat

d. Mengusulkan pembubaran koperasi yang tidak aktif

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.264
Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.		Pertumbuhan realisasi investasi	%	n.a	2,5	4,83	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong diantaranya adalah kondisi sosial masyarakat kondusif dan Kabupaten Temanggung berada di lokasi yang strategis karena dekat dengan bandara dan pelabuhan.

Sedangkan capaian program urusan bidang penanaman modal s.d Semester II disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.265
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase perusahaan yang bermitra	%	n.a	50	100	100	Sangat Tinggi
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
3.	Program	Persentase	%	n.a	100	100	100	Sangat

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan secara Elektronik						Tinggi
		Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian penanaman modal	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang penanaman modal pada Tahun 2024 sebanyak 8 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 2 indikator IKUPD dan 4 indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.266
Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kemudaan dan Olahraga Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.		Persentase pemuda berprestasi	%	n.a	38	37,50	98,68	Sangat Tinggi
2.		Persentase	%	83,19	35	83,19	100	Sangat

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		atlet berprestasi						Tinggi
	RATA-RATA						**99,34**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 99,34% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian kinerja program urusan bidang kepemudaan dan olahraga s.d Semester II disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.267
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	80,76	95	93,33	98,25	Sangat Tinggi
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	35,4	96,45	96,43	99,98	Sangat Tinggi
		Persentase prestasi olah raga	%	59	60	92,86	100	Sangat Tinggi
3.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	92,89	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**99,56**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2024 sebanyak 4 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 99,56% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Statistik terdiri dari 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.268
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	%	62	73,93	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Statistik pada Tahun 2024 sebanyak 1 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong adanya sinergitas kerjasama Dinkominfo dan BPS Temanggung dan ketersedian data di tiap OPD serta data statistik dasar merupakan urusan wajib yang diselenggarakan oleh BPS sehingga data ini akan selalu update setiap tahunnya.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.269
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	%	n.a	33,3	87,67	100	Sangat Tinggi
2.		Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	%	n.a	30	113,33	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Persandian pada Tahun 2024 sebanyak 2 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 4 indikator kinerja program daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.270
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.		Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	n.a	21,05	113,63	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah.

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian indikator program Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.271
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerjaq
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	%	n.a	30	72,83	100	Sangat Tinggi
		Persentase kelompok kesenian yang produktif	%	n.a	38	184,33	100	Sangat Tinggi
		Persentase pelestarian sejarah lokal	%	6,73	38	7,49	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerjaq
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Persentase pelestarian cagar budaya	%	5,18	9,18	9,33	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Kebudayaan pada Tahun 2024 sebanyak 4 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan Bidang Perpustakaan terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.272
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan		Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
						Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	***2***	***3***	***4***		***5***	***6***	***7***	***8***	***10***
1.		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka		n.a	30,1	60,48	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA							**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah.

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian indikator program Urusan Pemerintahan Bidang perpustakaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.273
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	n.a	0,025	0,29	100	Sangat Tinggi
		Persentase peminjam di perpustakaan	%	n.a	40	40,13	100	Sangat Tinggi
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	n.a	34	55,18	100	Sangat Tinggi
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase penelusuran naskah kuno	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Perpustakaan pada Tahun 2024 sebanyak 4 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 2 indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.274
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***10***
1.		Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	70,93	68	73,54	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah.

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja

Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian indikator program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.275
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Pada Periode Semester II Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip vital konvesional yang dialih mediakan	%	n.a	55	55,29	100	Sangat Tinggi
		Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	%	n.a	66,67	66,67	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Kearsipan pada Tahun 2024 sebanyak 2 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Evaluasi kinerja urusan pemerintahan pilihan antara lain:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.276
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***10***
1.		Nilai Produksi Perikanan	Ribu Rp	n.a	349.364	248.894.213,879	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah.

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian indikator program Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.277
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	30	10	59,08	100	Sangat Tinggi
2.	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produktivitas Ikan Nila	Kg/m²	6	1,2	1,21	100	Sangat Tinggi
		Produktivitas Ikan Lele	Kg/m²	14	12,6	12,60	100	Sangat Tinggi
3.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	33	10	21,4	100	Sangat Tinggi
4.	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kapita/tahun	n.a	22,08	22,25	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang kelautan dan perikanan pada Tahun 2024 sebanyak 5 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja berikut ini.

Tabel 2.278
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Angka	n.a	2,02	1,53	75,74	Sedang
	RATA-RATA						**75,74**	**Sedang**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah.

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 75,74% dengan nilai peringkat kinerja Sedang.

Sedangkan capaian indikator program Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.279
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*5*
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	21	0,03	7	100	Sangat Tinggi
		Lama tinggal wisatawan	Hari	1	1	1	100	Sangat Tinggi
		Persentase terlaksananya pembinaan desa wisata	%	100	100	12,03	90,72	Sangat Tinggi
		Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	9,02	9,5	9,84	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**97,70**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pariwisata pada Tahun 2024 sebanyak 4 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 97,70% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terdiri dari 1 indikator IKUPD 20 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.280
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	22,94	23,38	22,94	98,12	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**98,12**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah.

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 98,12% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian indikator program urusan pemerintahan bidang pertanian sampai dengan Semester II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.281
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*5*
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	Kuintal / Ha	63,15	61,25	61,49	100	Sangat Tinggi
		Produktivitas Jagung	Kuintal / Ha	46,00	54,50	57,60	100	Sangat Tinggi
		Produktivitas Bawang Putih	Kuintal / Ha	79,60	60,50	73,02	100	Sangat Tinggi
		Produktivitas Bawang Merah	Kuintal / Ha	80,15	68,00	76,50	100	Sangat Tinggi
		Produktivitas Cabai Rawit	Kuintal / Ha	55,00	50,00	75,00	100	Sangat Tinggi
		Produktivitas Cabai Besar	Kuintal / Ha	69,50	65,00	76,00	100	Sangat Tinggi
		Produktivitas Tembakau	Kuintal /	6,80	6,20	6,70	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	5
			Ha					
		Produktivitas Kopi Robusta	Kuintal / Ha	7,25	7,10	7,44	100	Sangat Tinggi
		Produktivitas Kopi Arabika	Kuintal / Ha	7,00	6,50	5,51	84,84	Tinggi
		Produktivitas Ternak Sapi	Kg / Ekor	177,60	177,40	177,60	100	Sangat Tinggi
		Produktivitas Ternak Domba	Kg / Ekor	13,71	13,70	13,71	100	Sangat Tinggi
		Produktivitas Ternak Kambing	Kg / Ekor	13,71	13,70	13,71	100	Sangat Tinggi
		Produktivitas Ternak Ayam Ras Pedaging	Kg / Ekor	0,75	0,75	0,75	100	Sangat Tinggi
		ProduktivitasTernak Ayam Petelur	Kg / Ekor	10,88	10,88	10,88	100	Sangat Tinggi
		Persentase Kelahiran Pedet	%	n.a	55,5	48,3	87	Tinggi
2.	Program Penyedian dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan penyakit hewan	%	90	85	97,43	100	Sangat Tinggi
		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70	75	82,41	100	Sangat Tinggi
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	n.a	41,00	99,23	100	Sangat Tinggi
5.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,98	1,3	1,40	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**98,60**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang pertanian pada Tahun 2024 sebanyak 20 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 98,60% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan terdiri dari 1 indikator IKUPAD dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.282
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	n.a	20,79	20,95	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah.

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong UMK Temanggung menarik peminat Pelaku Usaha Eksportir untuk Pengembangan Usaha di Kabupaten Temanggung.

Sedangkan capaian indikator program urusan pemerintahan bidang perdagangan sampai dengan Semester II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.283
Capaian Kinerja Program Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pada Periode Semester II Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase fasilitasi pelaku usaha informal	%	na	13,71	17	100	Sangat Tinggi
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67	67	66,67	99,50	Sangat Tinggi
		Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	na	1,5	1,55	100	Sangat Tinggi
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	70	75	75,04	100	Sangat Tinggi
2.	Program Stabilisasi Harga Barang	Persentase Ketersediaan informasi	%	68,41	70	74,86	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Harga Bahan Pokok dan Barang Penting						
3.	Program Pengembangan ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	%	na	1,15	2,56	100	Sangat Tinggi
4.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera ulang	%	95	98,37	101,10	100	Sangat Tinggi
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	%	na	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**99,94**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang perdagangan pada Tahun 2024 sebanyak 8 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 99,94% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perindustrian terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.284
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perindutrian Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	25,92	27,2	25,92	95,29	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**95,29**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah.

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 95,29% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian s.d Semester II Tahun 2024 disajikan pada tebel berikut.

Tabel 2.285
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Pada Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	70,46	71,62	82,19	100	Sangat Tinggi
2.	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	%	12,29	15,3	15,47	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang perindustrian pada Tahun 2024 sebanyak 2 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.5 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Evaluasi kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan antara lain:

1. Fungsi Sekretariat Daerah

   Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan fungsi Sekretariat Daerah diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah dengan 1 indikator kinerja IKUPD dan 22 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.286
Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Angka	3,434	3,44	3,434	99,83	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**99,83**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah.

Capaian kinerja IKUPD pada Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yaitu 99,83% dengan kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan capaian kinerja program fungsi Sekretariat Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.287
Capaian Kinerja Indikator Program Penyelenggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB	%	26,09	17,39	30,43	100	Sangat Tinggi
5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	100	85	88	100	Sangat Tinggi
6		Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	n.a	60	80	100	Sangat Tinggi
7	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
8		Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
		tepat Waktu						
9		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
10		Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	n.a	85	100	100	Sangat Tinggi
11		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	73,24	73,24	Sedang
12		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
13		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
14		Persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	%	99,81	100	95,54	95,54	Sangat Tinggi
15		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100	97,09	97,09	Sangat Tinggi
16		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	97,76	98	Sangat Tinggi
17	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
18		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
19		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	83,33	100	Sangat Tinggi
20		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%	100	100	98	98	Sangat Tinggi
21		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
22		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	100	97	85,72	88,37	Tinggi
	RATA-RATA						**97,74**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian kinerja program pada fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 97,74% dengan skala nilai kinerja Sangat Tinggi.

Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

a. Pada indikator sasaran yaitu indikator Nilai Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD, faktor penghambatnya adalah adanya Surat Edaran dan Petunjuk Teknis terkait penyusunan LPPD tahun 2023 memiliki 2 versi yang dikeluarkan Kemendagri pada awal januari dan februari sehingga perlu ada penyesuaian rumus kembali sesuai dengan pedoman terbaru dan terdapat beberapa perubahan rumus Indikator Kinerja Kunci karena menyesuakan dengan SE dan juknis terbaru, sehingga membutuhkan waktu untu perbaikan data Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah melakukan koordinasi dengan Bappeda, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, melakukan koordinasi dengan OPD untuk melakukan pengumpulan data dukung lebih awal.

b. Pada indikator program yaitu indikator Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH yang diampu oleh Bagian Hukum dengan faktor penghambat lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari sarpras yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal. Upaya pencapaian kinerja dengan optimalisasi pendokumentasian produk hukum daerah ke JDIH sesuai dengan jumlah produk hukum yang ditetapkan pada tahun berjalan.

2. Fungsi Sekertariat DPRD

Kinerja penyelenggaran Sekretariat DPRD yang diimplementasikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 1 indikator kinerja IKUPD dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.288
Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1.		Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong yaitu Penyusunan Rencana Kerja DPRD yang tepat dan penyusunan Agenda Kegiatan setiap bulan melalui Rapat Bamus dilaksanakan tepat waktu.

Sedangkan Capaian kinerja program Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.289
Capaian Kinerja Program Penyelenggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	na	90	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	95	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	58	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	na	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja program Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Evaluasi kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan antara lain:

1. Perencanaan

   Kinerja penyelenggaran fungsi penunjang perencanaan pembangunan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 2 indikator kinerja IKUPD, dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.290
Capaian Kinerja IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,5	4,5	4,5	100	Sangat Tinggi
		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Angka	Level 2	Level 3	Level 3	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA IKUPD						**100**	Sangat Tinggi
1.	Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	100	95	100	100	Sangat Tinggi
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	%	90	90	100	100	Sangat Tinggi
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	90	90	96,46	100	Sangat Tinggi
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	90	90	95,31	100	Sangat Tinggi
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	%	90	90	97,96	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator IKUPD RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 100% dengan skala nilai peringkat Sangat Tinggi. Capaian kinerja program RKPD dan RPD Tahun 2024 sebesar 100% dengan status Sangat Tinggi.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaran Fungsi penunjang keuangan diimplementasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan 2 indikator kinerja IKUPD, dan 11 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.291
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	16,59	100	Sangat Tinggi
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah)	%	15	15,5	18,52	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	%	89,96	91	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Penerbitan SP2D Online yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Cakupan Rekonsiliasi	%	na	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
		Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	%	na	100	100	100	Sangat Tinggi
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu	%	na	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	%	99,1	80	91,1	100	Sangat Tinggi
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	na	8	4,57	57,10	Rendah
		Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%	na	95	98,16	100	Sangat Tinggi
		Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**96,10**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator IKUPD pada kinerja keuangan RKPD dan RPD tahun 2024 yaitu 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian kinerja program RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 96,10% berstatus Sangat Tinggi.

Pada indikator program yaitu Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah, faktor penghambat dikarenakan masih terdapat data objek pajak yang belum termutakhir dan kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru. Selain itu beberapa pajak daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor dan berbagai pihak sehingga penerimaan pajak tidak bisa

dipastikan. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah target pajak daerah. Upaya pencapaian kinerja dengan Melaksanakan pendataan objek pajak baru secara intensif, melakukan pemutakhiran data objek pajak, melaksanakan sosialisasi pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek dan pelatihan kapasitas SDM petugas untuk kegiatan pendataan baru serta intensifikasi pendataan objek pajak daerah.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran kepegawaian diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 1 indikator kinerja IKUPD dan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.292
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 202 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
IKUPD								
1.	Terwujudnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	50	53,18	78,50	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM								
1.	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	40,29	41,39	123,60	100	Sangat Tinggi
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	%	86,41	86,41	50,50	58,38	Rendah
	RATA-RATA						**79,19**	**Sedang**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator IKPD RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian kinerja program RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 79,19% dengan nilai peringkat kinerja Sedang.

Ada 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja rendah yaitu indikator Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur dengan faktor penghambat kurangnya

pemahaman ASN yang akan mengusulkan kenaikan pangkat tentang persyaratan sesuai peraturan yang berlaku sehingga masih terdapat dokumen usulan yang tidak disetujui BKN karena tidak memenuhi syarat (TMS).

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran pendidikan dan pelatihan diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.293
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	%	96,17	96,13	82,75	85,30	Tinggi
	RATA-RATA						**85,30**	Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian kinerja program RKPD dan RPD Tahun 2024 sebesar 85,30% dengan nilai peringkat kinerja tinggi. Faktor Penghambat Cakupan Pembinaan SDM Aparatur adalah keterbatasan SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan strukturalKeterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial, teknis dan fungsional (BPSDMD Prov. Jateng) dan keterbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan diklat.

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 1 indikator IKUPD dan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.294
Capaian Kinerja IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Angka	Sangat Inovatif/80,87	Sangat Inovatif/60,01-100	Sangat Inovatif/72,42	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian kinerja IKUPD RKPD dan RPD Tahun 2024 sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong yaitu peningkatan sosialisasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan pengetahuan terhadap metode penilaian inovasi.

Sedangkan capaian kinerja program pada urusan penelitian dan pengembangan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.295
Capaian Kinerja Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian kinerja Program sampai dengan Semester II Tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kinerja pengawasan diimplementasikan oleh Inspektorat dengan 1 satu indikator kinerja IKUPD dan 9 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 2.286 berikut

Tabel 2.296
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1.	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan	Persentase Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	%	na	93,7	96	100	Sangat tinggi
		Maturitas SPIP	Nilai	3	3,009	3,077	100	Sangat tinggi
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	na	2,92	3	100	Sangat tinggi
		Kapabilitas APIP	level	na	3	3	100	Sangat tinggi
	RATA-RATA						**100**	**Sangat Tinggi**
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	100	61	81	100	Sangat tinggi
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	100	48	59	100	Sangat tinggi
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	%	100	63	120	100	Sangat tinggi
		Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100	100	Sangat tinggi
		Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100	100	100	100	Sangat tinggi
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
	Dan Asistensi	integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK						
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	60	100	100	Sangat tinggi
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	100	100	100	100	Sangat tinggi
		Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	level	na	3	3	100	Sangat tinggi
	RATA-RATA						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator sasaran kinerja IKUPD urusan Pengawasan RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 100% dengan skala nilai Peringkat Kinerja Sangat Tinggi. Capaian kinerja program RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 100 % skala nilai Peringkat Kinerja Sangat Tinggi.

2.2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan

Capaian Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Kecamatan diimplementasikan Kecamatan dengan 1 indikator kinerja IKUPD dan 9 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.297
Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Fungsi Kecamatan Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1.	Meningkatnya	Indeks Kepuasan Masyarakat						

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
	kualitas pelayanan publik	Kecamatan Temanggung	%	85,98	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	%	88,01	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Pringsurat	%	85,78	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	%	84	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	84,02	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	%	86,88	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	%	88,7	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	%	86,97	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candiroto	%	84,28	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	85,99	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	%	87,36	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonoboyo	%	84,44	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	82,08	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	%	86,2	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kledung	%	82,55	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bansari	%	84,22	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	%	84,76	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Selopampang	%	88,41	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	%	79,28	B	B	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	%	85,3	B	B	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA IKPD							**100**	**Sangat Tinggi**
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	**Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan**						
		Kecamatan Temanggung	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Pringsurat	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
		Kecamatan Kandangan	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candiroto	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonoboyo	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kledung	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bansari	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Selopampang	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		RATA-RATA					**100**	**Sangat Tinggi**
		Persentase realisasi penerimaan PBB						
		Kecamatan Temanggung	%	91,93	95	90,57	95,34	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	%	99,85	95	97,78	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Pringsurat	%	96,21	95	99,20	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	%	100	95	98,40	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	96,21	95	96,44	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	%	96,21	95	96,06	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	%	96,21	95	99,91	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	%	96,21	95	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candiroto	%	100	95	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	96,21	95	97,70	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	%	96,21	95	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonoboyo	%	96,21	95	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	96,21	95	95,48	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	%	96,21	95	98,29	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kledung	%	96,21	95	98,17	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
		Kecamatan Bansari	%	100	95	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	%	96,21	95	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Selopampang	%	100	95	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	%	96,21	95	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	%	96,21	95	98,99	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							**99,77**	**Sangat Tinggi**
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak**						
		Kecamatan Temanggung	%	90,79	79	84,01	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	97,18	79	95,83	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	90,79	79	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	90,79	79	90,79	100	Sangat Tinggi
		RATA-RATA					**100**	**Sangat Tinggi**
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif						
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		RATA-RATA					**100**	**Sangat Tinggi**
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam						
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
		Kecamatan Candiroto	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonoboyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		RATA-RATA					**100**	**Sangat Tinggi**
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa						
		Kecamatan Temanggung	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Pringsurat	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candiroto	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonoboyo	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kledung	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
		Kecamatan Bansari	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Selopampang	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		RATA-RATA					**100**	**Sangat Tinggi**
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu						
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candiroto	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonoboyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		RATA-RATA					**100**	**Sangat Tinggi**
	TOTAL RATA-RATA INDIKATOR PROGRAM						**99,97**	**Sangat Tinggi**

Sumber:BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator Kinerja IKUPD unsur kewilayahan pada

RKPD dan RPD 2024 sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Capaian kinerja program RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 99,97% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu : pada indikator program yaitu indikator Persentase realisasi penerimaan PBB, faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja program tersebut antara lain (1) Wajib Pajak terbiasa membayar menjelang jatuh tempo; (2) Masih adanya SPPT yang bermasalah, adanya keterlambatan penyampaian SPPT karena Wajib Pajak berada di luar kota, dan Wajib Pajak tidak ditemukan. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan tertib administrasi PBB dengan melakukan monitoring secara berkala ke desa-desa dan sosialisasi kepada warga masyarakat.

2.2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Capaian Kinerja pemerintahan Umum diimplementasikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 1 indikator kinerja IKUPD, dan 5 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.298
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
1	Menurunnya konflik di masyarakat konflik di masyarakat	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	Angka	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA IKUPD						**100**	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	n.a	80	92,86	100	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	n.a	80	70	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2024	Realisasi s.d Semester II		
	Etika serta Budaya Politik							
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	n.a	13,33	18,18	100	Sangat Tinggi
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA PROGRAM						**100**	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Capaian indikator kinerja IKUPD RKPD dan RPD tahun 2024 sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi dengan faktor pendorong terbina sinergitas yang baik dalam mencegah dan menangani konflik. Dan kinerja program dengan rata-rata 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.10 Ringkasan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hasil rekapitulasi hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung RPD Tahun 2024-2026 pada periode Semester II Tahun 2024 dengan Jumlah seluruh indikator RPD periode Semester II Tahun 2024 dengan total 532 indikator dengan rincian 3 indikator tujuan, 19 indikator sasaran, 78 indikator IKUPD dan 432 indikator program dengan masing-masing capaian dalam prosentase skala penilaian kinerja sebagaimana pada gambar berikut.

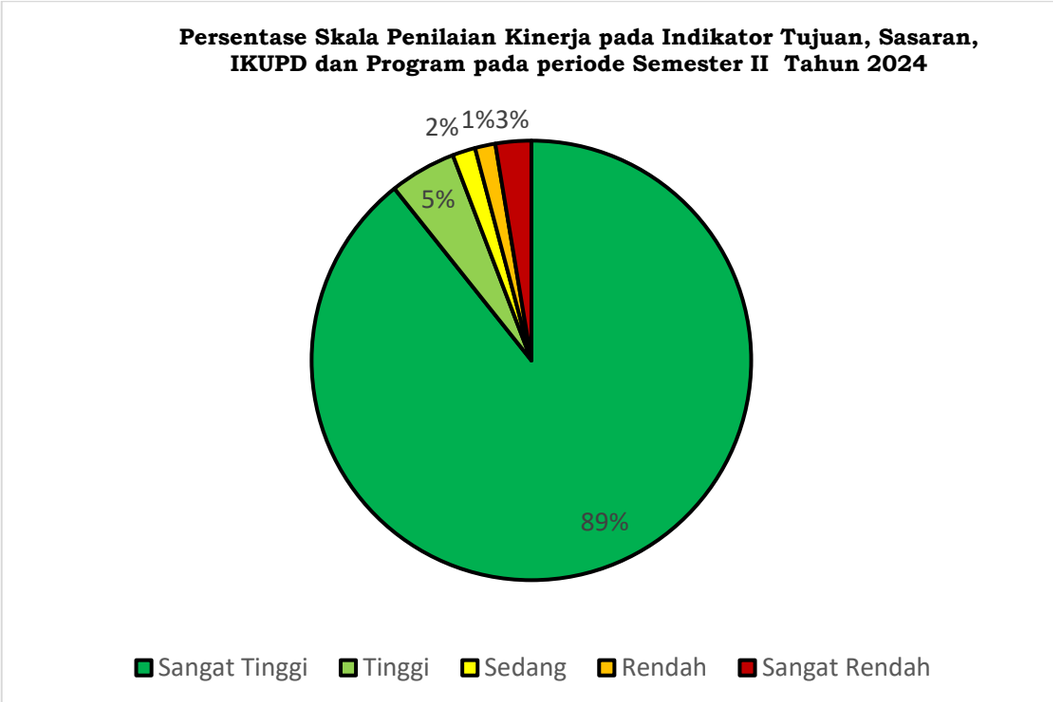

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.77
Persentase Skala Penilaian Kinerja Indikator Tujuan, Sasaran, IKUPD dan Program pada periode Semester II Tahun 2024

Sedangkan capaian menurut jumlah indikator skala nilai peringkat kinerja pada indikator tujuan, sasaran, IKUPD dan Program sebagaimana pada gambar berikut.

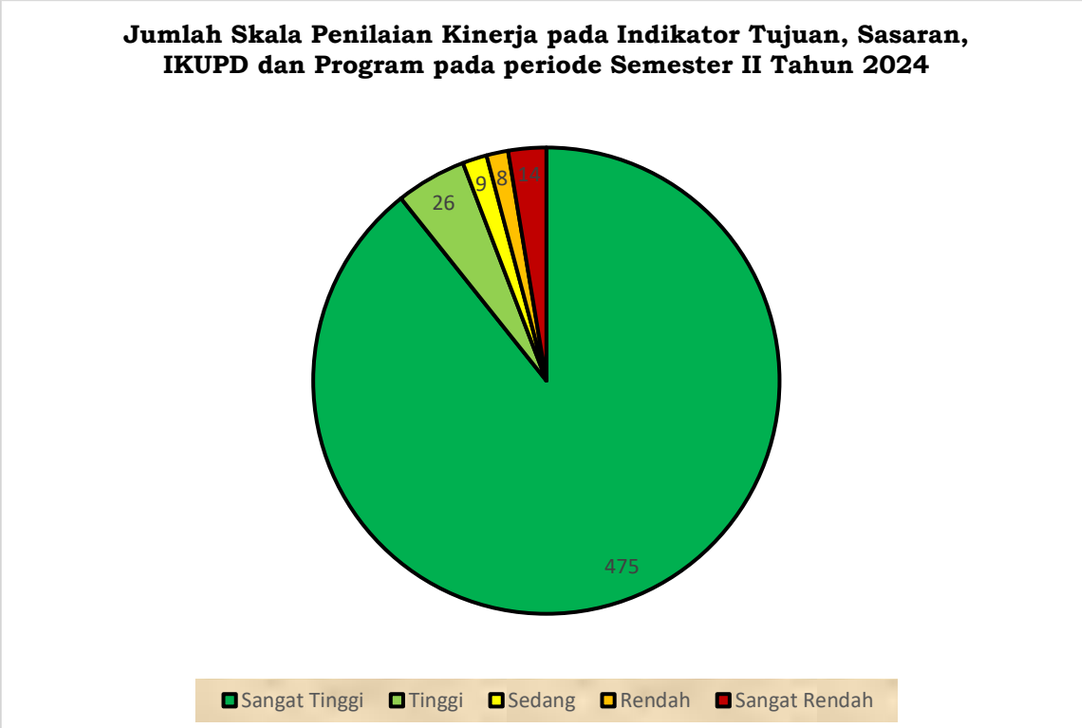

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.78
Jumlah Skala Penilaian Kinerja pada Indikator Tujuan, Sasaran, IKUPD dan Program pada periode Semester II Tahun 2024

1. Indikator Tujuan

   Indikator tujuan terdiri dari 3 indikator yang masing-masing

indikator telah mencapai skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Jumlah skala penilaian kinerja pada indikator tujuan disajikan pada gambar berikut.

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.79
Jumlah skala penilaian kinerja pada indikator Tujuan

2. Indikator Sasaran

Capaian indikator sasaran Tahun 2024 s.d. Semester II ada 19 indikator sasaran, dengan capaian rata-rata sebesar 97,69% dengan nilai peringkat kinerja 17 Sangat Tinggi dan 2 Indikator dengan predikat Tinggi, persentase skala penilaian kinerja Sasaran dan jumlah skala penilaian kinerja pada indikator sasaran sebagaimana pada Tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.299
Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja Sasaran

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	95,54	1	0	0	0	0
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	100	1	0	0	0	0
3	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	95,22	1	0	0	0	0
4	Indeks Pembangunan Olahrga	82,27	0	1	0	0	0
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	95,49	0	1	0	0	0
6	Indeks Toleransi	100	1	0	0	0	0
7	Angka Harapan Hidup (AHH)	100	1	0	0	0	0
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100	1	0	0	0	0
9	Pendapatan per Kapita	100	1	0	0	0	0
10	Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank	100	1	0	0	0	0

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
	Dunia						
11	Angka Kemiskinan	100	1	0	0	0	0
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	100	1	0	0	0	0
13	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	100	1	0	0	0	0
14	Indeks Pembangunan Infrastruktur	100	1	0	0	0	0
15	Indeks Rasa Aman	100	1	0	0	0	0
16	IPKD	100	1	0	0	0	0
17	Indeks Merit System	100	1	0	0	0	0
18	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	100	1	0	0	0	0
19	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	1	0	0	0	0
JUMLAH		**98,34**	**17**	**2**	**0**	**0**	**0**

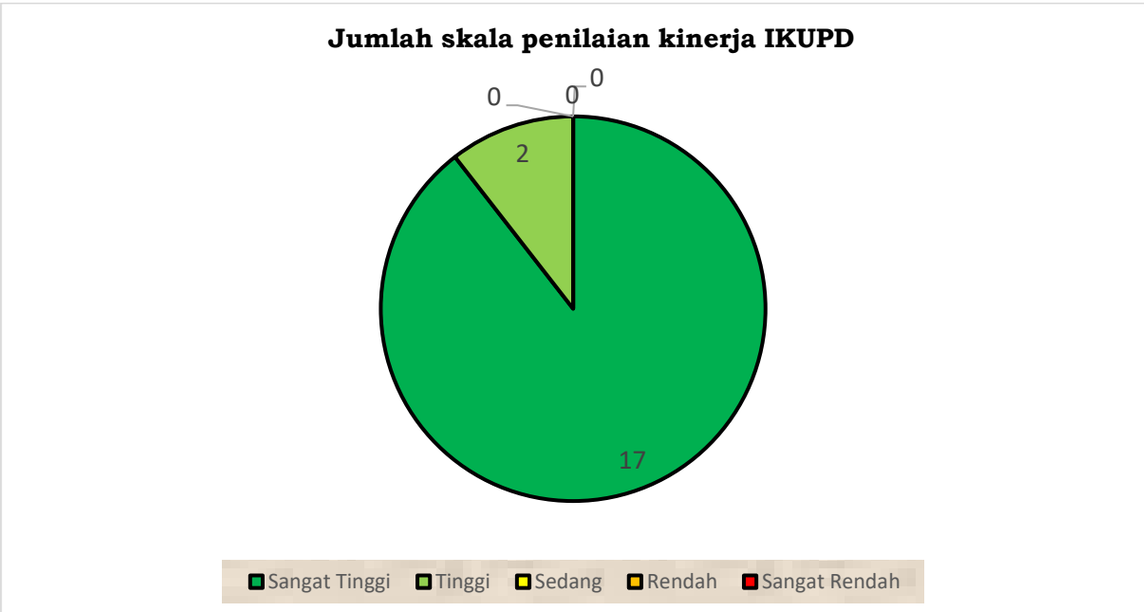

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.80
Jumlah skala penilaian kinerja pada indikator Sasaran

3. Indikator Kinerja IKUPD dan Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Rincian capaian indikator IKUPD perbidang sebagaimana pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.300
Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	Bidang Pendidikan	79,46	4	1	0	2	1	8
2	Bidang Kesehatan – Dinkes	100,00	1	0	0	0	0	1
3	Bidang Kesehatan - RSUD	0	0	0	0	0	0	0

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
4	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	2	0	0	0	0	2
5	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	3	0	0	0	0	3
6	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – Satpol PP Damkar	83,70	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3
7	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – BPBD	100,00	1	0	0	0	0	1
8	Bidang Sosial	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Jumlah		**94,74**	**14**	**1**	**0**	**3**	**1**	**19**

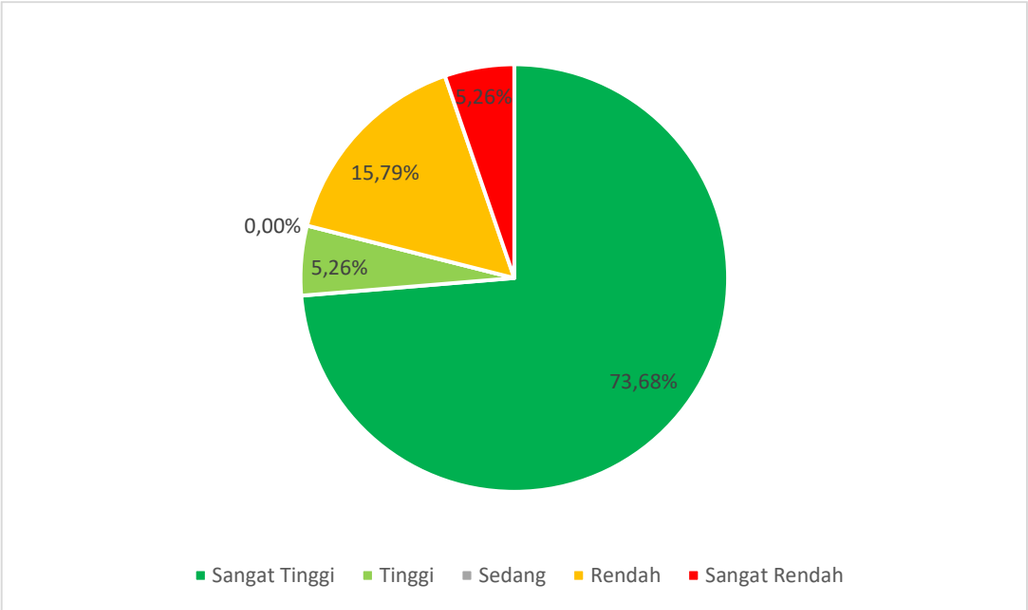

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.81
Persentase skala penilaian kinerja pada indikator IKUPD urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian yaitu 94,74% dengan skala penilaian kinerja Sangat tinggi (14) atau 73,68%, Tinggi (1) atau 5,26%, Sedang (0), Rendah (3) atau 15,79% dan Sangat Rendah (1) 5,26%.

Sedangkan Rincian capaian program Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.301
Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	Bidang Pendidikan	83	18	10	3	2	4	37
2	Bidang Kesehatan – Dinkes	97	28	2	1	0	0	31
3	Bidang Kesehatan - RSUD	100	1	0	0	0	0	1
4	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99	11	0	0	0	0	11
5	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	6	0	0	0	0	6
6	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – Satpol PP Damkar	70	3	1	1	0	2	7
7	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – BPBD	100	3	0	0	0	0	3
8	Bidang Sosial	100	13	0	0	0	0	13
Jumlah		**93,69**	**83**	**13**	**5**	**2**	**6**	**109**

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah

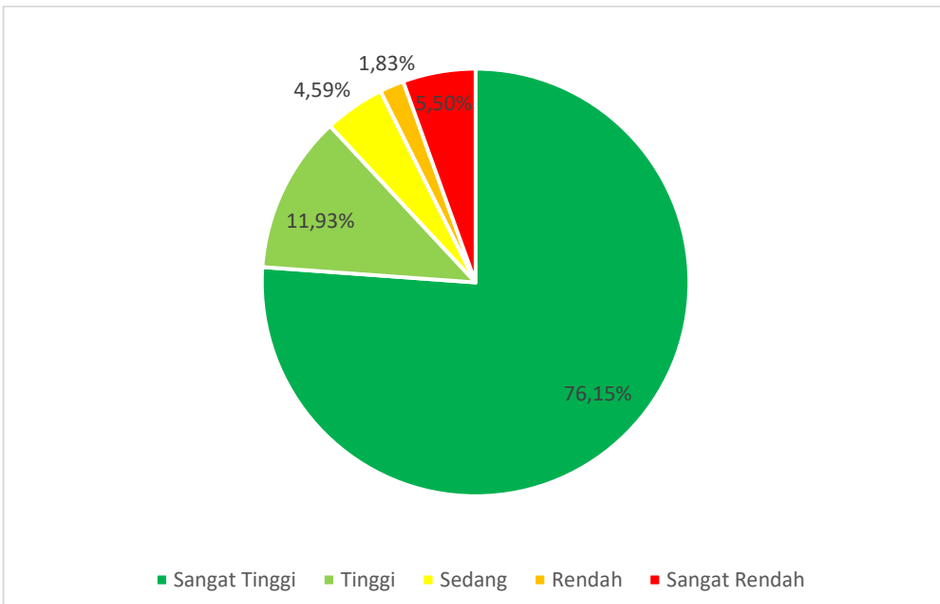

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.82
Persentase skala penilaian kinerja pada indikator Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Indikator Program urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 rata-rata capaian yaitu 93,69% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (83) atau 76,15%, Tinggi (13) atau 11,93%, Sedang (5) atau 4,59%, Rendah (2) atau 1,83%, dan Sangat Rendah (6)atau 5,5%.

4. Indikator Kinerja IKUPD dan Program Urusan Pemerintahan

Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Rincian capaian indikator IKUPD perbidang sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.302
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	Bidang Tenaga Kerja	100	1	0	0	0	0	1
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	76,82	0	1	1	0	0	2
3	Bidang Pangan	100	1	0	0	0	0	1
4	Bidang Pertanahan	0	0	0	0	0	0	0
5	Bidang Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0	0
6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	1	0	0	0	0	1
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	1	0	0	0	0	1
8	Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	73,02	0	0	1	0	0	1
9	Bidang Perhubungan	100	2	0	0	0	0	2
10	Bidang Komunikasi dan Informatika	100	2	0	0	0	0	2
11	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	71,04	1	0	0	0	1	2
12	Bidang Penanaman Modal	100	1	0	0	0	0	1
13	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	99,34	2	0	0	0	0	2
14	Bidang Statistik	0	0	0	0	0	0	0
15	Bidang Persandian	0	0	0	0	0	0	0
16	Bidang Kebudayaan	100	1	0	0	0	0	1
17	Bidang Perpustakaan	100	1	0	0	0	0	1
18	Bidang Kearsipan	100	1	0	0	0	0	1
JUMLAH		**73,35**	**15**	**1**	**2**	**0**	**1**	**19**

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah

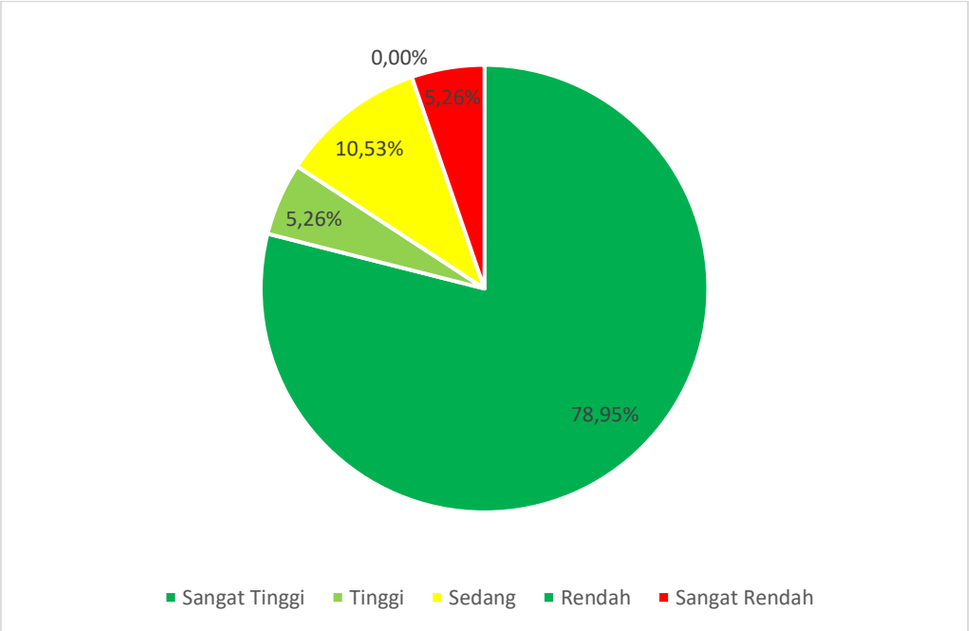

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.83
Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator IKUPD Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 rata-rata capaian yaitu 73,35% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (15) atau 78,95%, Tinggi (1) atau 5,26% , Sedang (2) atau 10,53%, Rendah (0), dan Sangat Rendah (1) atau 5,26%.

Sedangkan rincian capaian program urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.303
Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Wajib Non Pelayanan Dasar								
1	Bidang Tenaga Kerja	100	10	0	0	0	0	10
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	81,16	5	1	0	1	1	8
3	Bidang Pangan	96,74	3	0	0	0	0	3
4	Bidang Pertanahan	100	1	0	0	0	0	1
5	Bidang Lingkungan Hidup	100	13	0	0	0	0	13
6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	4	0	0	0	0	4
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	93,97	8	0	0	0	1	9
8	Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	89,2	13	1	1	1	1	17
9	Bidang Perhubungan	99,99	8	0	0	0	0	8

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
10	Bidang Komunikasi dan Informatika	100	5	0	0	0	0	5
11	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	71,86	3	1	0	0	2	6
12	Bidang Penanaman Modal	100	8	0	0	0	0	8
13	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	99,56	4	0	0	0	0	4
14	Bidang Statistik	100	1	0	0	0	0	1
15	Bidang Persandian	100	2	0	0	0	0	2
16	Bidang Kebudayaan	100	4	0	0	0	0	4
17	Bidang Perpustakaan	100	3	0	0	0	0	3
18	Bidang Kearsipan	100	2	0	0	0	0	2
JUMLAH		**96,25**	**97**	**3**	**1**	**2**	**5**	**108**

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah

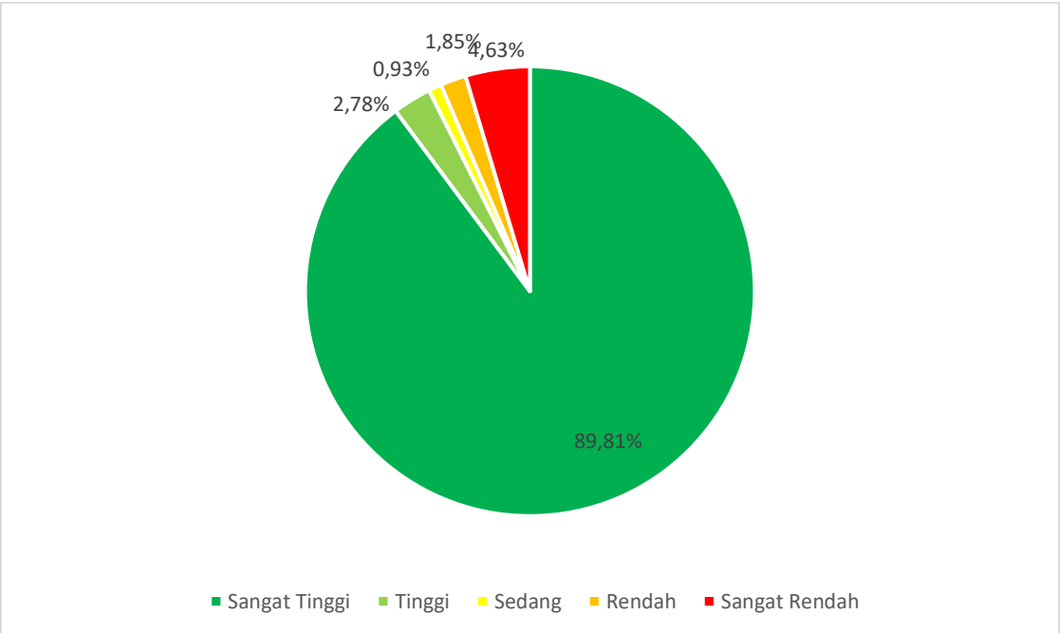

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.84
Persentase skala penilaian kinerja pada indikator Program Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Program urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 rata-rata capaian yaitu 96,25% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (97) atau 89,81%, Tinggi (3) atau 2,78% , Sedang (1) atau 0,93%, Rendah (2) atau 1,85%, dan Sangat Rendah (5)atau 4,63%.

5. Indikator Kinerja IKUPD dan Program yang mendukung urusan pemerintahan pilihan.

Rincian capaian indikator IKUPD perbidang sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.304
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	100	1	0	0	0	0	1
2	Bidang Pariwisata	75,74	0	0	1	0	0	1
3	Bidang Pertanian	98,12	1	0	0	0	0	1
4	Bidang Perdagangan	100	1	0	0	0	0	1
5	Bidang Perindustrian	95,29	1	0	0	0	0	1
JUMLAH		**93,83**	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	**5**

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah

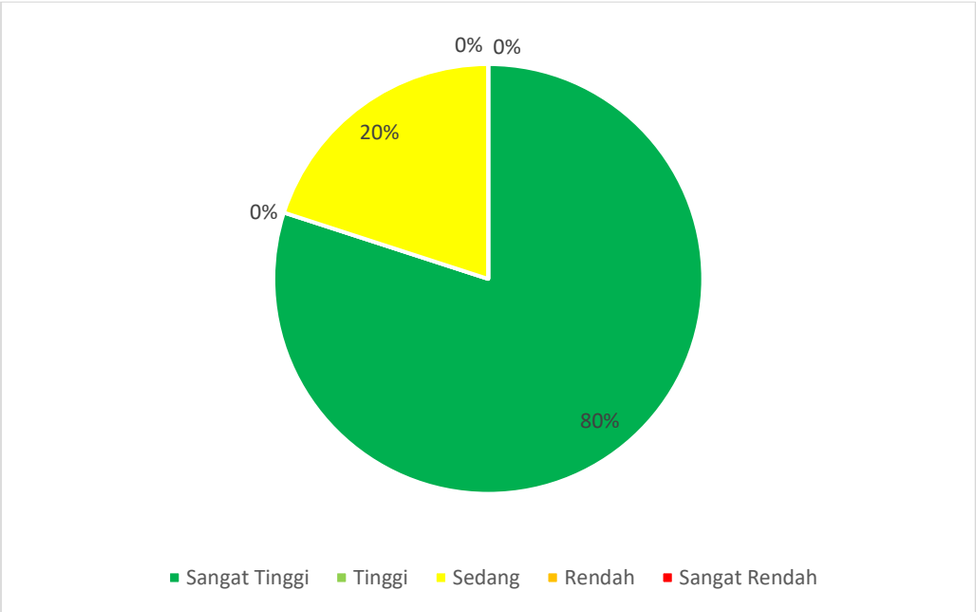

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.85
Persentase skala penilaian kinerja pada indikator IKUPD Urusan Pemerintahan Pilihan

Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 93,83% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (4) atau 80%, Tinggi (0), Sedang (1) atau 20%, Rendah (0), dan Sangat Rendah (0).

Rincian capaian indikator Program Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.305
Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja Program Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	100	5	0	0	0	0	5

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
2	Bidang Pariwisata	97,68	3	1	0	0	0	4
3	Bidang Pertanian	98,60	18	2	0	0	0	20
4	Bidang Perdagangan	99,94	8	0	0	0	0	8
5	Bidang Perindustrian	100	2	0	0	0	0	2
JUMLAH		**99,24**	**36**	**3**	**0**	**0**	**0**	**39**

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah

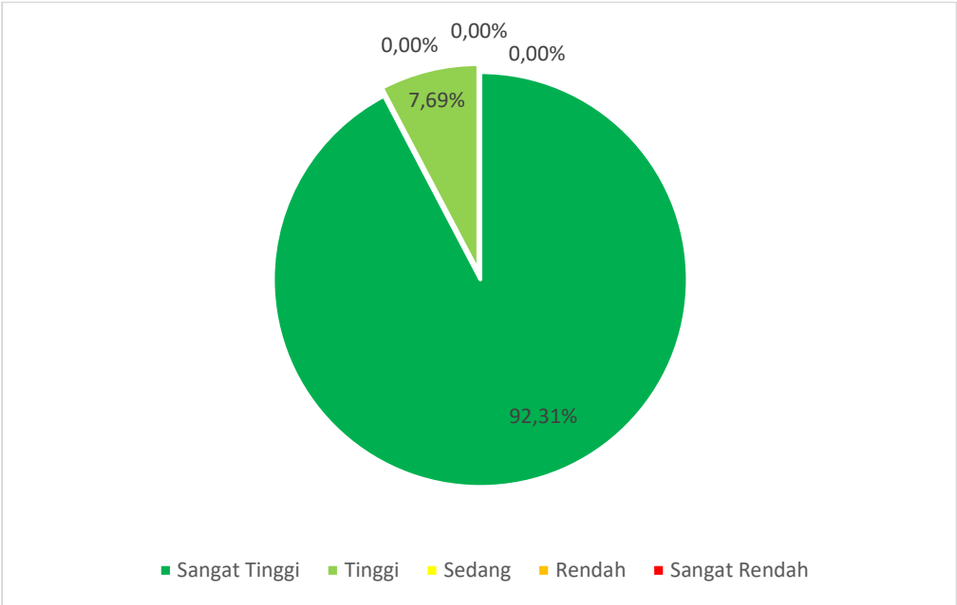

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.86
Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator Program Urusan Pemerintahan Pilihan

Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 99,24% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (36) atau 92,31%, Tinggi (3) atau 7,69%, Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0).

6. Indikator Kinerja IKUPD dan Program Unsur pendukung urusan pemerintahan

Rincian capaian indikator IKUPD perbidang Unsur pendukung urusan pemerintahan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.306
Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja IKUPD Unsur pendukung urusan pemerintahan

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Unsur pendukung urusan pemerintahan								
1	Sekretariat Daerah	99,83	1	0	0	0	0	1
2	Sekretariat DPRD	100	1	0	0	0	0	1
JUMLAH		**99,91**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah

Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 99,91% dengan

skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (2) atau 100%, Tinggi (0), Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0).

Sedangkan Rincian capaian indikator Program perbidang Unsur pendukung urusan pemerintahan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.307
Rata-rata capaian kinerja dan skala penilaian kinerja Program Unsur pendukung urusan pemerintahan

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Unsur pendukung urusan pemerintahan								
1	Sekretariat Daerah	97,74	20	1	1	0	0	22
2	Sekretariat DPRD	100	4	0	0	0	0	4
JUMLAH		**98,87**	**24**	**1**	**1**	**0**	**0**	**26**

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah

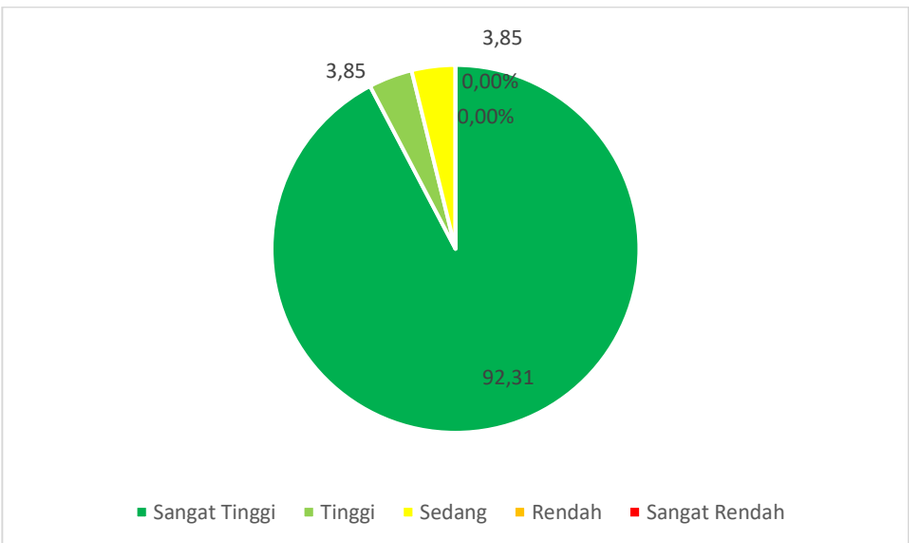

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.87
Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator Program Unsur pendukung urusan pemerintahan

Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 98,87% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (24) atau 92,31%, Tinggi (1) atau 3,85%, Sedang (1) atau 3,85%, Rendah (0), dan Sangat Rendah (0).

7. Indikator Kinerja IKUPD dan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Rincian capaian indikator IKUPD perbidang Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.308
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Unsur penunjang urusan pemerintahan								
1	Perencanaan	100	3	0	0	0	0	3
2	Keuangan	100	1	1	0	0	0	2
3	Kepegawaian	100	1	0	0	0	0	1
4	Pendidikan dan Pelatihan	100	0	0	0	0	0	0
5	Penelitian dan Pengembangan	100	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		**100**	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**6**

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah

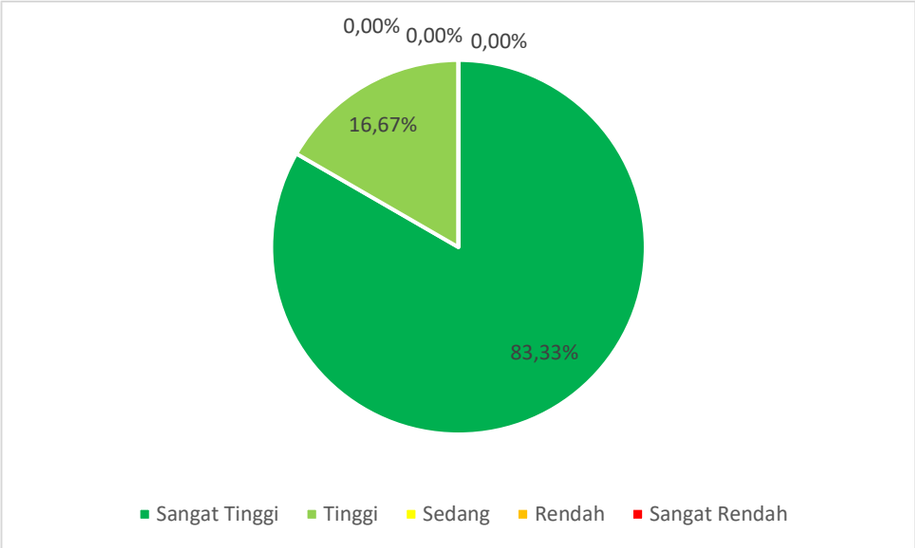

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.88
Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator IKUPD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (5) atau 83,33%, Tinggi (1) atau 16,67, Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0).

Sedangkan Rincian capaian indikator Program perbidang sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.309
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Unsur penunjang urusan pemerintahan								
1	Perencanaan	100	6	0	0	0	0	6
2	Keuangan	96,10	9	1	0	1	0	11
3	Kepegawaian	79,19	1	0	0	1	0	2
4	Pendidikan dan Pelatihan	85,30	0	1	0	0	0	1
5	Penelitian dan Pengembangan	100	2	0	0	0	0	2

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
JUMLAH		92,12	18	2	0	2	0	22

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah

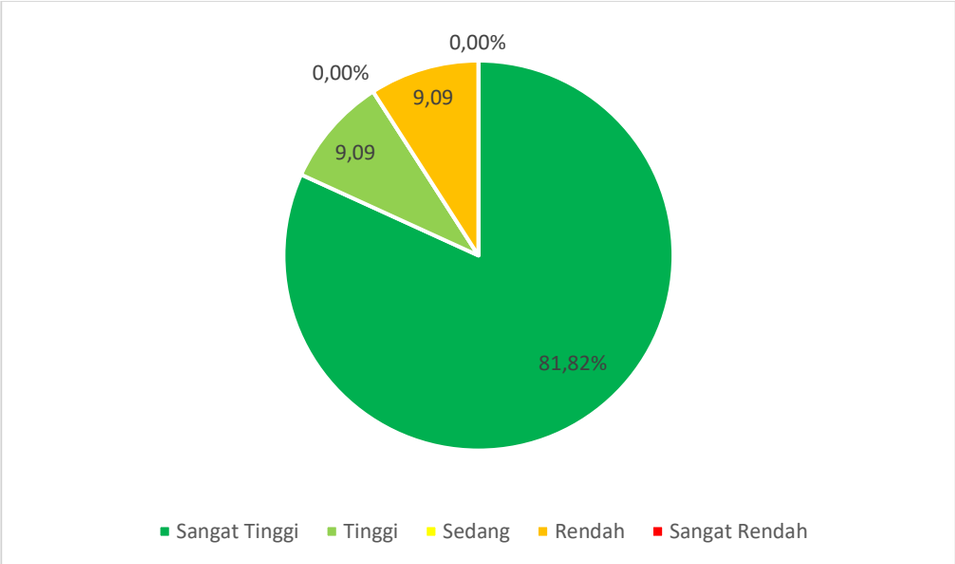

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.89
Persentase Skala Penilaian Kinerja Pada Indikator Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 92,12% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (18) atau 81,82%, Tinggi (2) atau 9,09%, Sedang (0), Rendah (2) atau 9,09%, dan Sangat Rendah (0).

8. Indikator Kinerja IKUPD dan Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rincian capaian indikator IKUPD perbidang Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.310
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Unsur pengawasan urusan pemerintahan							
Inspektorat Daerah	100	4	0	0	0	0	4
JUMLAH	**100**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah

Rata-rata capaian kinerja IKUPD urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (4) atau 100%, Tinggi (0), Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0).

Sedangkan Rincian capaian indikator Program perbidang sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.311
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Unsur pengawasan urusan pemerintahan							
Inspektorat Daerah	100	9	0	0	0	0	9
JUMLAH	**100**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah

Rata-rata capaian kinerja Program urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (9) atau 100%, Tinggi (0), Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0).

9. Indikator Kinerja IKUPD dan Program Unsur Pemerintahan Umum

Rincian capaian indikator IKUPD perbidang sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.312
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Unsur Pemerintahan Umum

Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Unsur Pemerintahan Umum							
Fungsi Lainnya - Kesatuan Bangsa Politik	100	1	0	0	0	0	1
JUMLAH	**100**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	1

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah

Rata-rata capaian kinerja Program urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (1) atau 100%, Tinggi (0), Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0).

Sedangkan Rincian capaian indikator Program perbidang sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.313
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum

Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Unsur Pemerintahan Umum							
Fungsi Lainnya - Kesatuan Bangsa Politik	100	5	0	0	0	0	5
JUMLAH	**100**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Rata-rata capaian kinerja Program urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (5) atau 100%, Tinggi (0), Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0).

10. Indikator Kinerja IKUPD dan Program Kewilayahan

Rincian capaian indikator IKUPD perbidang Kewilayahan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.314
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Kewilayahan

Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Kewilayahan							
Kecamatan	100	20	0	0	0	0	20
JUMLAH	**100**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	20

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah

Rata-rata capaian kinerja Program urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (20) atau 100%, Tinggi (0), Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0).

Sedangkan Rincian capaian indikator Program perbidang sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.315
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja Program Kewilyahan

Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah Total
Kewilayahan							
Kecamatan	99,97	108	0	0	0	0	108
JUMLAH	**99,97**	**108**	**0**	**0**	**0**	**0**	108

Sumber: BAPPEDA KabupatenTemanggung, 2024 data diolah

Rata-rata capaian kinerja Program urusan pemerintahan pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi (108) atau 100%, Tinggi (0), Sedang (0), Rendah (0), dan Sangat Rendah (0).

Pengendalian dan evaluasi pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil program daerah dari seluruh aspek demi menjamin pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengendalian dan evaluasi juga bertujuan untuk memberikan informasi dan justifikasi atas rencana, implementasi, dan hasil perencanaan yang telah dilakukan. Informasi tersebut dapat menjadi umpan balik dan

pertimbangan bagi pemerintah dalam perumusan dokumen perencanaan selanjutnya.

2.2.11 Evaluasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.316
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	PENDIDIKAN	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	98,36	92,88	95,55	100	100
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	91,17	81,35	94,74	100	100
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	35,42	25,52	27,48	100	100
Capaian SPM Bidang Pendidikan				**74,98**	**66,58**	**72,59**	**100**	**100**
2.	KESEHATAN	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antanental sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	99,09	100	100
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	80,4	81,64	92,95	100	96
		Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	6,19	84,92	82,05	100	98,80
		Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	51,81	69,25	89,07	100	99,21
		Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	62,64	89,52	83,22	100	94,61
		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	19,99	30,97	84,78	100	90,03
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	77,37	92,5	100	100	100
		Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	83,06	100	104	100	100
		Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	%	38,19	67,88	95,65	100	100
		Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	74,42	73,49	87,03	100	100
Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan				**62,37**	**79,05**	**94,64**	**100,00**	**90,37**
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	93,9	94,52	95,32	100	97,65
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	n.a	92,38	100	100	100
Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**93,9**	**93,45**	**97,66**	**100**	**98,83**
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	n.a	100	100	100	100
		Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperolah fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100
Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman				**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	n.a	100	100	100	100
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	n.a	100	100	99,19	99,19
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	n.a	100	100	100	100
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakusi korban bencana	%	n.a	100	100	100	100
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	n.a	47,73	43,75	98,25	100

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				**n.a**	**89,55**	**88,75**	**99,49**	**99,84**
6	SOSIAL	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100
Capaian SPM Bidang Urusan Sosial				**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah

2.2.12 Evaluasi Kinerja Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Laporan capaian SDGs disusun tiap tahun dengan Desk per semester yang melibatkan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait. Berikut ini laporan SDGs Tahun 2024 Kabupaten Temanggung sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.317
Capaian Indikator SDGs Tahun 2024

NO	PILAR	GOAL		JUMLAH			PERANGKAT DAERAH	STATUS CAPAIAN		
				INDIKATOR	TERISI	N.A.				
1	I. PILAR SOSIAL	1	Mengurangi Kemiskinan	26	22	4	BPS, DINKES, DINSOS, DISNAKER, BPBD	4	15	3
		2	Tanpa Kelaparan	4	4	0	DINKES, DKPPP, DPRKPLH, DPUPR	3	0	1
		3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	14	13	1	DINKES, BPS	7	2	4
		4	Pendidikan yang Berkualitas	19	18	1	DINDIKPORA, BPS	6	3	9
		5	Kesetaraan Gender	4	4	0	SETWAN, BKPSDM, DPPPAPPKB, BPS	2	1	1
		JUMLAH		**67**	**61**	**6**		**22**	**21**	**18**
2	II. PILAR EKONOMI	7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	2	0	BPS	0	2	0
		8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	3	3	0	BPS	0	1	2
		9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	3	0	DPUPR, DISHUB, BPS	1	0	2
		10	Berkurangnya Kesenjangan	5	4	1	BPS, DINPERMADES, BAG. HUKUM, DISNAKER	3	0	1
		17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	5	5	0	BPAPKAD, BPS, BAPPEDA	2	1	2
		JUMLAH		**18**	**17**	**1**		**6**	**4**	**7**
3	III. PILAR LINGKUNGAN	6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	6	2	4	BPS, DPRKPLH	0	2	0
		11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	5	4	1	BPBD, BPS, DPRKPLH, DPUPR	2	1	1
		12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	4	4	0	DPRKPLH	2	1	1
		13	Penanganan Perubahan Iklim	1	1	0	BPBD	0	0	1
		14	Ekosistem Lautan	0	0	0	-	0	0	0
		15	Ekosistem Daratan	0	0	0	-	0	0	0
		JUMLAH		**16**	**11**	**5**		**4**	**4**	**3**
4	IV. PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16	15	1	POLRES, BAG. HUKUM, INSPEKTORAT, BAG. ORGANISASI, SETWAN, BKPSDM, DINDUKCAPIL, BPS, DISKOMINFO	10	1	4
		JUMLAH		**16**	**15**	**1**		**10**	**1**	**4**

NO	PILAR	GOAL	JUMLAH			PERANGKAT DAERAH	STATUS CAPAIAN		
			INDIKATOR	TERISI	N.A.				
JUMLAH INDIKATOR			117	104	13		42	30	32

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Ditinjau dari keterkaitan permasalahan pembangunan dengan hasil evaluasi, seluruh permasalahan hasil evaluasi menjadi permasalahan pembangunan. Adapun hasil identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Beberapa identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di antaranya:

1. Masih tingginya angka kemiskinan;
2. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah;
3. Masih tingginya angka stunting;
4. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia;
5. Masih adanya kasus gizi buruk;
6. Masih tingginya kasus kematian ibu;
7. Masih adanya kasus kematian bayi dan balita;
8. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal;
9. Belum optimalnya pengelolaan sampah;
10. Masih rendahnya akses air minum aman;
11. Masih rendahnya akses sanitasi aman;
12. Belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis;
13. Perlunya peningkatan konservasi lingkungan hidup;
14. Belum optimalnya mitigasi terhadap perubahan iklim;
15. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

2.3.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan

Dasar

1) Bidang Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan mempunyai pengaruh penting terhadap kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung masih mempunyai permasalahan dan tantangan untuk penanganannya, di antaranya:

a) Belum tercapainya angka rata-rata lama sekolah sesuai Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 13 tahun. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Temanggung tahun 2024 yaitu sebesar 7,53 tahun.
b) Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 16,62 tahun.
c) Masih terdapat angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat. Berdasarkan data Kemdikbud yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dindikpora Kabupaten Temanggung pada November 2024 terdapat sebanyak 4.688 anak tidak sekolah.
d) Masih terdapat fasilitas pendidikan ruang kelas dalam kondisi kurang baik.
e) Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM).
f) Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS).
g) Masih rendahnya warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
h) Rendahnya persentase APK PAUD pada usia 4-6 tahun dan 5-6 tahun.
i) Masih rendahnya persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi.
j) Masih rendahnya jumlah pendidik kesetaraan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu
k) Masih rendahnya jumlah pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik
l) Masih rendahnya persentase tenaga penunjang lain yang

memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat di SD, SMP dan satuan pendidikan non formal.

m) Rendahnya rasio jumlah pengawas SD. Permasalahannya yaitu minimnya guru yang lolos uji kompetensi, pengajuan calon pengawas yang telah lulus uji kompetensi tidak mendapat Surat Rekomendasi dari Menpan RB sehingga belum bisa diangkat menjadi pengawas.

n) Masih rendahnya jumlah Kepala Satuan PAUD dan SMP yang berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.

o) Masih rendahnya rasio siswa/guru SD dan SMP serta rasio siswa/rombel SD dan SMP

p) Masih rendahnya rasio jumlah pengawas SD dan SMP

2) Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan memiliki faktor strategis dalam pembangunan manusia yang berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan tersebut sesuai siklus kehidupan manusia. Upaya peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Temanggung masih menemui berbagai permasalahan dan tantangan diantaranya:

a) Masih ditemukan kasus kematian ibu pada tahun 2024 yaitu sebesar 61,01/100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 5 kasus kematian ibu.

b) Masih ditemukan kasus kematian bayi pada tahun 2024 yaitu sebesar 11,84 per 1000 kelahiran hidup.

c) Masih ditemukan kasus kematian neonatal pada tahun 2024 yaitu sebesar 8,42 per 1000 kelahiran hidup.

d) Masih ditemukan kasus kematian balita pada tahun 2024 yaitu sebesar 14,28/1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 117 kasus.

e) Masih ditemukan balita dengan kasus stunting dan gizi buruk.

f) Masih kurangnya kepesertaan dan rendahnya keaktifan peserta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

g) Belum optimalnya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB). Pada tahun 2024 capaian penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB) sebesar 64,48% yang

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

h) Belum optimalnya keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TB). Pada tahun 2024 capaian keberhasilan pengobatan tuberkulosis mencapai 81%.

i) Masih ditemukannya kasus Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

j) Belum semua fasyankes memenuhi standar mutu.

k) Masih rendahnya persentase puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan dan tantangan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

a) Jalan Kabupaten dengan kondisi mantap (baik dan sedang) baru tercapai 88,92% di tahun 2024. Hal ini berarti masih ada 148 ruas jalan dari total 207 ruas jalan kabupaten atau sepanjang 578,40 km dari 650,476 km total panjang jalan kabupaten yang belum memenuhi geometri dan lebar sesuai dengan standar lebar minimal jalan kabupaten.

b) Masih adanya resiko kerusakan jalan karena masih banyaknya genangan pada musim penghujan yang juga berkaitan dengan masih kurangnya drainase jalan yang dibangun. Pada tahun 2024, baru 69,15% jalan kabupaten yang dilengkapi drainase.

c) Masih diperlukan upaya untuk menjaga trotoar dalam kondisi baik. Hingga Tahun 2024 capaian trotoar dalam kondisi baik baru 68,61%.

d) Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman. Hingga tahun 2024, akses air minum baru dihitung menggunakan akses layak dengan capaian 97,65%.

e) Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kewenangan Kabupaten Temanggung masih berada pada kategori Kinerja *Kurang dan Perlu Perhatian*. Adapun penyebab yang membuat capaian IKSI di Kabupaten Temanggung belum optimal dikarenakan masih rendahnya kondisi prasarana fisik dari saluran irigasi yang ada dan belum optimalnya kelembagaan yang ada. Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Temanggung tahun 2024 adalah 58,866%.

f) Pada tahun 2024, baru terdapat 1 (satu) unit IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Kabupaten Temanggung yaitu IPLT Sanggrahan dengan kapasitas yang sangat terbatas yaitu 10 m3/hari sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pengolahan lumpur tinja dalam skala kabupaten. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh kurangnya jumlah truk tinja serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyedot lumpur tinja di sistem pengolahan air limbah domestik yang ada.

4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang perlu diatasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman diantaranya :

a) Masih adanya RTLH di Kabupaten Temanggung sampai akhir tahun 2024 sebanyak 8.098 unit atau 3,69% dari total 219.386 unit rumah;

b) Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju akses sanitasi aman. Hingga Tahun 2024, sanitasi baru dihitung menggunakan akses layak dengan capaian 95,29%.

5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan di Kabupaten Temanggung masih terdapat permasalahan yang perlu perhatian di antaranya:

a) Masih adanya pelanggaran Perda/Perbup. Pada tahun 2024 pelanggaran Perda/Perbup di Kabupaten Temanggung sebanyak 1.707 kasus.

b) Meningkatnya kejadian kebakaran di rumah/permukiman. Pada tahun 2024 kejadian kebakaran di rumah/permukiman sebesar 48 kejadian kebakaran, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023.

c) Belum optimalnya pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota. Pada tahun 2024, cakupan pelayanan bencana kebakaran baru mencapai 51,11%. Permasalahannya yaitu luasnya wilayah Kabupaten Temanggung dengan topologi Temanggung berupa pegunungan, perbukitan, dan lembah. Selain itu, model permukiman yang padat membuat akses jalan menjadi sempit. Kemudian, banyak masyarakat yang berkerumun

sehingga mengakibatkan akses jalan terhambat serta pengetahuan warga mengenai bahaya kebakaran masih rendah.

d) Belum terpenuhinya Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan permasalahan diantaranya kondisi kendaraan Damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran, kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil sehingga menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian, kompetensi anggota Damkar khususnya penerapan strategi pemadaman disesuaikan dengan objek yg terbakar dan lingkungan sekitarnya perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, kondisi peralatan pemadam kebakaran yang sudah tua dan lapuk karena usia dan sering dipergunakan mengakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dan efisien.

e) Masih rendahnya persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh relawan kebakaran, dengan permasalahan diantaranya wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontur pegunungan, portal, jalan sempit, lokasi pos pemadam kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran, luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah pos pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi. Selain itu kendala yang dihadapi meliputi terbatasnya sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran.

6) Bidang Sosial

Pembangunan di bidang sosial untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup manusia maupun masyarakat melalui upaya-upaya menuju kesejahteraan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang menjadi tantangan untuk diperhatikan yaitu:

a) Masih tingginya angka kemiskinan Kabupaten Temanggung

tahun 2024 berdasarkan data dari BPS mencapai angka sebesar 8,67%;

b) Belum optimalnya persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mana pada tahun 2024 baru mencapai angka 68,12%.

7) Bidang Penanggulangan Bencana

Kabupaten Temanggung memiliki tingkat kerentanan wilayah yang tinggi, namun belum memiliki kajian daerah rawan bencana yang komprehensif. Banyak masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, tetapi masih terkendala dalam mendapatkan informasi kebencanaan, terutama di daerah dengan sinyal internet dan radio yang lemah. Selain itu, belum semua kawasan rawan bencana mendapatkan layanan pelatihan kebencanaan, dan beberapa Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang telah terbentuk tidak berjalan secara optimal karena kurangnya keterlibatan personil. Di sisi lain, sarana dan prasarana penanganan bencana masih belum sepenuhnya tersedia, hal ini dapat memperbesar risiko terhadap bencana.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

Pembangunan di bidang tenaga kerja menjadi hal yang krusial karena pentingnya perhatian terhadap penduduk usia kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Oleh karena itu, Kabupaten Temanggung berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan antara lain:

a) Masih adanya pengangguran yang ditunjukkan dengan angka TPT sebesar 2,35% pada tahun 2024, mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya 2,32%. Hal ini disebabkan adanya pemutusan hubungan kerja serta menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di sektor ini, dimana industri pengolahan kayu menjadi salah satu sektor industri yang penting di Kabupaten Temanggung.

b) Masih adanya tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan karena terbatasnya skill yang dimiliki. Persentase pencari kerja yang mendapatkan

pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2024 adalah 73,78%, meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi masih belum mencakup seluruh pencari kerja yang membutuhkan.

c) Masih adanya tenaga kerja terdaftar yang belum ditempatkan. Pada tahun 2024, hanya 40,78% pencari kerja yang terdaftar berhasil ditempatkan di pekerjaan, turun drastis dari 84,88% pada tahun 2023. Meskipun jumlah pencari kerja yang terdaftar meningkat dari 800 orang pada tahun 2023 menjadi 1.621 orang pada tahun 2024, jumlah yang berhasil ditempatkan justru menurun.

d) Masih ditemui perusahaan yang belum membayarkan upah sesuai UMK. Hanya 79,67% perusahaan yang membayar upah sesuai UMK pada tahun 2024, turun dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 81,58%.

e) Masih kurangnya peluang kerja formal di Kabupaten Temanggung. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 78,06%. Namun, sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor informal dan pertanian tradisional, yang memiliki pendapatan tidak tetap dan kurang memiliki akses terhadap jaminan sosial.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pada bidang pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, sedangkan pembangunan pada bidang perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, dimana pembangunan ini sinergi dengan seluruh pihak, Namun demikian, masih ditemukan permasalahan dan tantangan sebagai berikut:

a) Belum optimalnya pemberdayaan terhadap perempuan karena keterbatasan perempuan dalam memahami potensi diri yang ada dan kuatnya budaya patriarki yang memiliki pandangan laki laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan.

b) Masih perlunya peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender melalui Anggaran Responsif

Gender (ARG) pada OPD.

c) Masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan pada anak pada tahun 2024 sebesar 0,004% atau sebanyak 9 kasus yang melapor.

d) Belum semua rumah sakit dan Puskesmas menerapkan pelayanan ramah anak.

3) Bidang Pangan

Terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan menjadi tujuan dalam pembangunan di bidang pangan. Dalam mewujudkan hal tersebut, masih terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu

a) Masih diperlukan upaya-upaya untuk tetap mencukupi ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung karena ada jeda masa panen sehingga perlu penyimpanan hasil panen di gudang cadangan pangan;

b) Diversifikasi pangan masih banyak menemui masalah karena masyarakat sudah terbiasa makan makanan yang berasal dari beras sehingga diperlukan pemahaman yang terus menerus kepada masyarakat terkait pentingnya diversifikasi pangan termasuk dibutuhkan sentuhan inovasi teknologi yang mampu menghasilkan bahan pangan lokal tertentu. Capaian Skor PPH Kabupaten Temanggung mengalami penurunan pada tahun 2024. Skor PPH Kabupaten Temanggung tahun 2024 adalah sebesar 89,43 atau menurun sebesar 4,07 poin jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 93,5.

4) Bidang Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang penting dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan, di mana dalam pelaksanaan pembangunannya terdapat beberapa permasalahan di antaranya:

a) Masih tingginya lahan potensial kritis yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung yaitu seluas 10.280 Ha pada Tahun 2024 dengan penanganan yang baru mencapai 3,09% dari luas lahan kritis yang ada, hal ini disebabkan tingginya alih fungsi lahan yang tidak semestinya (lahan tanaman keras ditanami tanaman semusim).

b) Adanya fenomena perubahan iklim yang berpotensi memberikan dampak merugikan tidak hanya pada sektor lingkungan tetapi juga sektor lainnya seperti kesehatan, bencana, kebakaran, polusi, penurunan debit mata air, penurunan kualitas dan produktivitas pertanian, dan lain sebagainya.

c) Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH Kabupaten Temanggung adalah sebesar 68,25 pada akhir 2024, yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pembentuk yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 59,63, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 87,84 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 46,81. Pada tahun 2024, IKLH menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

d) Perlunya peningkatan pada pengelolaan persampahan. Dari total 148.153 ton sampah pada tahun 2024, baru 93.204 ton yang telah terkelola.

e) Masih adanya sekolah yang belum berwawasan lingkungan.

5) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain masih ada penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Meskipun pada tahun 2024 capaian sudah mencapai 98,52% tetapi masih terdapat 1,48% penduduk yang belum memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, belum semua penduduk wajib KTP-El telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa yang turut berperan dalam pembangunan daerah, namun demikian masih ada permasalahan yang dihadapi antara lain:

a) Diperlukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada dikarenakan desa memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini sumber daya pengelola yang masih rendah serta potensi desa masih dipandang rendah dan belum mampu menopang hidup sehingga pengembangan unit-unit usaha di desa masih perlu

upaya keras agar menarik untuk dikembangkan.

b) Belum seluruh desa berpredikat mandiri dengan capaian Tahun 2024 baru sebesar 37,97%.

c) Masih rendahnya persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang berbadan hukum, kendalanya yaitu proses pendaftaran badan hukum melalui aplikasi bumdesa.kemendesa.go.id yang mana proses verifikasi dokumen kelengkapannya dilaksanakan oleh Tim Kementerian Desa.

7) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain:

a) Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk. Permasalahannya adalah masih tingginya angka kelahiran (CBR) dengan faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah masih adanya kepercayaan sosial dan religius serta usia pernikahan. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 sebesar 0,8 dan angka ini masih diatas target yang ditentukan yaitu sebesar 0,63.

b) Masih adanya sasaran *unmetneed* pada tahun 2024 yaitu sebesar 7,60% atau 9.493 pasangan dari jumlah total 124.978 pasangan usia subur yang disebabkan karena kurangnya penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya keluarga berencana.

c) Masih rendahnya persentase kampung KB pada desa berkembang dan mandiri. Pada tahun 2024 tercapai sebesar 28,45% atau hanya 68 kampung KB dari 239 desa berkembang dan mandiri. Hal ini disebabkan karena potensi kader dalam mendukung program masih belum maksimal dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kampung KB.

d) Pembangunan kualitas keluarga masih dalam kategori cukup baik karena capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 63,17.

8) Bidang Perhubungan

Bidang perhubungan juga mempunyai peranan penting dalam

pembangunan daerah, namun masih ditemukan beberapa permasalahan pada bidang perhubungan di antaranya:

a) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan karena terlalu banyaknya lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Permasalahan terkait sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Temanggung yaitu masih banyak ruas jalan kabupaten yang belum didukung perlengkapan jalan seperti Lampu Penerangan Jalan Umum, rambu lalu lintas, guardrail atau pagar pengaman jalan yang memadai terutama di ruas jalan akses menuju tempat pariwisata.
b) Masih tingginya tingkat kejadian laka lantas yang salah satunya potensi disebabkan dengan adanya kendaraan bermotor yang tidak layak jalan.
c) Masih adanya angkutan umum yang belum memenuhi standar minimal pelayanan. Jumlah angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada tahun 2024 adalah sejumlah 502 unit kendaraan atau sebesar 89,17%.

9) Bidang Komunikasi dan Informatika

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika perlu ditingkatkan dalam rangka pembangunan daerah, meskipun demikian, usaha tersebut masih menemui tantangan dan permasalahan di antaranya:

a) Masih diperlukan optimalisasi pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat karena masih ada *blank spot* di wilayah Kabupaten Temanggung;
b) Jumlah layanan publik elektronik pada tahun 2024 (66 layanan) masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan total layanan publik yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (131 layanan).

10) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan koperasi dan UKM mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta pendistribusian hasil pembangunan. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan beserta tantangan yang dihadapi Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a) Masih rendahnya persentase koperasi sehat dengan

permasalahan diantaranya adalah terdapat koperasi yang tidak mengirimkan laporan keuangannya ke dinas serta kurangnya SDM pengawas koperasi.

b) Masih terdapat koperasi tidak sehat yang memerlukan pengawasan;

c) Terdapat banyak Usaha Kecil dan Menengah muncul namun tidak naik kelas karena standar omset yang meningkat berdasarkan UU Cipta Kerja dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;

d) Masih diperlukan penguatan dalam pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif;

e) Perlunya peningkatan pemberian dukungan fasilitasi pengembangan usaha bagi usaha mikro.

f) Masih rendahnya persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan, dengan permasalahan diantaranya adalah terdapat koperasi yang tidak ditemukan alamatnya serta pengurus dan pengelola koperasi sudah tidak ada.

11) Bidang Penanaman Modal

Beberapa permasalahan dan tantangan yang masih ditemukan pada pembangunan di bidang penanaman modal yaitu masih rendahnya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) karena rendahnya minat terhadap lokasi yang ditawarkan.

12) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kualitas dan kapasitas kepemudaan memiliki pengaruh yang cukup penting bagi pembangunan serta meningkatkan prestasi keolahragaan, meski demikian beberapa permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah masih minimnya prestasi bidang kepemudaan dan olahraga karena kurangnya kapasitas SDM, keterbatasan sarpras yang sesuai dengan standar minimal dan pelatih yang berkompeten, serta tidak terdatanya atlet temanggung yang mengikuti lomba atau event yang diikuti. Pada tahun 2024 dari 8 peserta yang dikirim ada 3 peserta yang meraih juara pada posisi juara II dan III.

13) Bidang Statistik

Permasalahan pembangunan di bidang statistik berkaitan erat dengan cakupan ketersediaan data makro daerah, di antaranya:

a) Masih adanya dualisme data statistik yang berasal dari kegiatan sektoral yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan data statistik yang sama yang dikelola BPS dari kegiatan statistik dasar;
b) Perlu peningkatan pengelolaan data statistik sektoral;
c) Perlu peningkatan validitas data produsen;
d) Perlunya peningkatan koordinasi dalam pengumpulan data dari produsen data di luar Pemkab Temanggung (karena keterbatasan kewenangan produsen data dalam diseminasi data statistik).

14) Bidang Persandian

Permasalahan pembangunan di bidang persandian, antara lain :

a) Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah yang disebabkan karena masih adanya keterbatasan kemampuan SDM di bidang persandian dan keamanan informasi dalam menjalankan program serta kegiatan uji penetrasi/*pentest* terhadap sistem atau aplikasi Pemerintah Daerah;
b) Belum maksimalnya jumlah sistem informasi yang telah dilakukan pengujian kerentanan.

15) Bidang Kebudayaan

Pembangunan pada bidang kebudayaan dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut:

a) Masih rendahnya Indeks Pembangunan Kebudayaan.
b) Perkembangan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya belum berbanding lurus dengan penyelenggaraan event seni dan budaya.
c) Belum semua kelompok seni/budaya mendaftarkan ke register kebudayaan.
d) Masih belum optimalnya pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung karena penggalian dan pendokumentasian sejarah lokal di Kabupaten belum terlaksana dengan baik serta semakin berkurangnya narasumber yang dapat menggali sejarah lokal Temanggung.
e) Masih terdapat cagar budaya yang belum dilestarikan. Dari total 193 cagar budaya yang terinventarisir, baru 18 cagar budaya yang telah dilestarikan pada tahun 2024.

16) Bidang Perpustakaan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan di bidang perpustakaan diantaranya:

a) Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 60,48 masuk dalam kategori "sedang".
b) Masih kurangnya upaya pembudayaan Gemar Membaca di kalangan masyarakat. Capaian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kabupaten Temanggung tahun 2024 berdasarkan hasil survei Perpustakaan Nasional RI masih cukup rendah yaitu sebesar 69,04.
c) Masih terdapat perpustakaan yang kurang aktif. Pemanfaatan perpustakaan di Kabupaten Temanggung sebesar 0,0038% pada tahun 2024 atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,0045%. Jumlah pengunjung per hari pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3.107 jiwa.
d) Perlu adanya peningkatan upaya pelestarian koleksi nasional dan koleksi naskah kuno di Kabupaten Temanggung.

17) Bidang Kearsipan

Dalam penyelenggaraan kearsipan masih ditemukan permasalahan yaitu belum optimalnya manajemen kearsipan di Kabupaten Temanggung dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 73,54. Diperlukan peningkatan perbaikan dalam pengelolaan arsip dengan melakukan audit internal kearsipan pada OPD serta peningkatan sarana prasarana kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Pembangunan di bidang perikanan masih mempunyai permasalahan yang masih dihadapi yaitu:

a) Perlu peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum. Produksi perikanan, khususnya budidaya ikan nila dan lele, mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Produktivitas ikan nila menurun dari 6,20 kg/m² pada 2023 menjadi 1,21 kg/m² pada 2024. Produktivitas ikan lele menurun dari 13,80 kg/m² menjadi 12,6 kg/m².
b) Masih rendahnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Kabupaten Temanggung, hanya mencapai 22,25 kg/kapita/tahun pada

2024

c) Masih perlunya peningkatan swasembada pada ikan konsumsi

d) Masih perlunya peningkatan pembinaan nelayan perairan umum. Jumlah nelayan perairan umum di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan dari 1.090 orang pada tahun sebelumnya menjadi 980 orang pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, hanya 579 nelayan yang telah mendapatkan pembinaan terkait metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan

2) Bidang Pertanian

Pembangunan di bidang pertanian mempunyai peranan penting karena sebagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi pada bidang pertanian:

a) Terjadi penurunan luas panen tanaman pangan yang disebabkan adanya peralihan komoditas dan peralihan peruntukan lahan.

b) Terjadi penurunan produksi tanaman pangan yang disebabkan karena penurunan luas panen, perubahan iklim yang ekstrem, serta serangan hama dan penyakit tanaman.

c) Terjadi penurunan produktivitas tanaman pangan yang berbanding lurus dengan berkurangnya jumlah produksi dan luas panen.

d) Adanya penurunan produktivitas hasil peternakan;

e) Masih rendahnya persentase kelompok tani yang naik kelas, capaian tahun 2024 hanya 1,40%, atau baru 45 kelompok tani yang naik kelas dari total 3.205 kelompok.

f) Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT mengakibatkan ketidakmampuan dalam pengendalian bencana pertanian.

3) Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, menjadi sumber pendapatan daerah, pemberdayaan UKM, dan upaya penyediaan lapangan pekerjaan. Namun demikian, pembangunan pada bidang pariwisata masih dihadapkan dengan permasalahan di antaranya:

a) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap

PDRB, yaitu baru mencapai nilai 2%.

b) Kurangnya perencanaan pada saat pembangunan maupun pengembangan destinasi yang menyebabkan perkembangan objek wisata kurang optimal;

c) Masih rendahnya ketertarikan dan pemahaman desa untuk membentuk desa wisata yang disebabkan karena kurangnya pembinaan serta pendampingan dimulai dari perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata, serta kurangnya peningkatan intensitas pembinaan atau pendampingan desa wisata;

d) Masih rendahnya sumber daya pelaku wisata dan ekonomi kreatif pendukung wisata serta keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pendataan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dan belum tersedia aturan secara detail yang mengatur tentang pelaku ekraf.

e) Masih rendahnya lama tinggal wisatawan

4) Bidang Perdagangan

Permasalahan yang masih dihadapi di bidang perdagangan di antaranya:

a) Kualitas sarana dan prasarana pasar belum kompetitif untuk bersaing dengan pasar modern karena masih dalam kondisi kurang baik.

g) Ketertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan masih kurang karena kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati zona dagang. Hanya 75% pedagang yang mengikuti aturan zonasi pasar, artinya masih ada sekitar 25% pedagang yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

b) Diperlukan perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan Dinas.

c) Masih rendahnya jumlah pedagang yang menggunakan transaksi digital. Baru 1,5% pedagang yang menggunakan transaksi digital, menunjukkan adopsi teknologi masih sangat rendah.

d) Masih rendahnya jumlah jumlah pelaku usaha informal yang mendapat fasilitasi. Hanya 16,99% pelaku usaha informal yang mendapatkan fasilitasi, padahal jumlah pedagang

informal cukup besar.

e) Masih rendahnya jumlah pelaku usaha eksportir yang di bina.

5) Bidang Perindustrian

Pembangunan di bidang perindustrian masih dihadapkan oleh beberapa permasalahan dan tantangan antara lain:

a) Masih terdapat IKM unggulan daerah yang belum mendapatkan fasilitasi. Kabupaten Temanggung memiliki 365 IKM berbasis komoditas unggulan, namun hanya 82,19% yang telah mendapatkan fasilitasi pengembangan.

b) Belum optimalnya pembinaan industri penghasil cukai dikarenakan adanya penyesuaian terhadap landasan hukum terkait anggaran DBHCHT.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Fungsi Sekretariat Daerah

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada fungsi sekretariat daerah antara lain:

a) Masih terdapat Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;

b) Dokumentasi perundangan melalui JDIH belum berjalan dengan efektif;

c) Masih diperlukan peningkatan dalam upaya implementasi Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi belum terinternalisasi dengan baik dan menyeluruh di seluruh tataran unit kerja dan individu pegawai;

d) Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah;

e) Diperlukan perbaikan dan peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung;

f) Masih terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang terhambat sehingga tidak selesai tepat waktu;

g) Masih terdapat BUMD yang belum mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan KAP;

h) Diperlukan optimalisasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mempersiapkan secara baik perencanaan yang berasal dari OPD serta penguatan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam

pelaksanaan kegiatan;

i) Diperlukan optimalisasi dalam penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan;

j) Perlunya peningkatan pencatatan non-tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

2) Fungsi Sekretariat DPRD

Beberapa permasalahan yang ada pada fungsi Sekretariat DPRD antara lain:

a) Pengesahan Raperda yang tepat waktu cenderung menurun karena membutuhkan waktu penyusunan yang lebih lama termasuk dalam proses pembahasan dan harmonisasi;

b) Masih rendahnya jumlah Perda Inisiatif dibandingkan dengan Raperda yang diusulkan oleh eksekutif;

c) Diperlukan pengoptimalan pelaksanaan kegiatan aspirasi sesuai dengan yang direncanakan.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan yang baik akan menjamin terlaksananya pembangunan secara menyeluruh yang terarah dan terpadu. Dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

a) Belum optimalnya ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Kinerja pembangunan yang kurang optimal seringkali dimulai dari perencanaan yang tidak berbasis pada data yang akurat dan relevan.

b) Perlunya peningkatan konsistensi kegiatan rencana pembangunan;

c) Perlu adanya peningkatan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

2) Keuangan

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain:

a) Perlu peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IKPD). Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja Perangkat Daerah di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan. Masih adanya ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar perangkat daerah serta terdapat perubahan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan yang tidak terduga;

b) Masih rendahnya persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah;

c) Perlu peningkatan anggaran dan kapasitas SDM untuk pendataan baru dan intensifikasi pendataan objek pajak daerah;

d) Perlunya peningkatan pemahaman SDM dalam pemanfaatan aset daerah.

3) Kepegawaian

Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan di bidang kepegawaian antara lain:

a) Perlu penerapan sistem merit secara optimal dalam pengelolaan kepegawaian.

b) Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas sehingga belum bisa merumuskan kesenjangan antara kompetensi dan kualifikasi.

c) Perlunya optimalisasi pelaksanaan updating data kepegawaian.

d) Belum optimalnya peningkatan pendayagunaan aparatur dan layanan aparatur. Pemahaman ASN terkait persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengusulan kenaikan pangkat masih kurang, sehingga masih terdapat dokumen usulan yang tidak disetujui BKN karena tidak memenuhi syarat (TMS).

4) Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang ditemukan pada bidang pendidikan dan pelatihan yaitu masih banyak ASN yang belum melaksanakan diklat, serta rendahnya jumlah ASN yang disetujui untuk mendapatkan penghargaan (satya lencana).

5) Penelitian dan Pengembangan.

Pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan dihadapkan dengan permasalahan

a) Keterbatasan pada infrastruktur dan fasilitas riset serta sumber daya manusia riset dan inovasi khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan.

b) Pemanfaatan hasil riset dan inovasi di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya mewarnai perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan dikarenakan pemanfaatan hasil dan inovasi membutuhkan inkubasi yang berkelanjutan serta belum optimal.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

   1) Fungsi Inspektorat Daerah

      Penerapan sistem pengawasan masih dihadapkan permasalahan antara lain:

      a) Diperlukan upaya peningkatan indeks persepsi anti korupsi;
      b) Perlu peningkatan optimalisasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
      c) Perlu peningkatan pengawasan baik perencanaan, keuangan maupun penyelenggaraan kinerja.

7. Unsur Kewilayahan

   Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait unsur kewilayahan (Kecamatan), antara lain :

   a) Masih terdapat sarana dan prasarana lokal kelurahan di kecamatan dalam kondisi kurang baik;
   b) Perlu optimalisasi kualitas layanan publik di kecamatan;
   c) Perlunya upaya untuk mendorong masyarakat melakukan pembayaran PBB tepat waktu.

8. Kesatuan Bangsa dan Politik

   Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terkait Kesatuan Bangsa dan Politik di antaranya masih rendahnya ormas yang mendapatkan pembinaan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 18,18% atau baru 26 dari 143 ormas yang mendapat pembinaan. Selain itu, perhitungan indeks toleransi juga mengalami kendala karena perhitungan tahun lalu dilakukan oleh pihak ketiga. Terdapat kesulitan dalam menganalisis tingkat toleransi.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah sebuah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat sangat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Sumber perumusan isu strategis Kabupaten

Temanggung Tahun 2026 disusun berdasarkan:

1) Permasalahan pembangunan dalam RPD
2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD
3) Arah kebijakan RPD, dan
4) Arah kebijakan RKP

Adapun isu-isu strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Konektivitas dan Aksesibilitas

   Peningkatan konektivitas wilayah mencakup pembangunan infrastruktur pada jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, air, sanitasi, kesehatan dan pendidikan. Pengembangan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk pemenuhan sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan serta sarana dan prasarana transportasi umum. Diperlukan pemerataan sarana dan prasarana transportasi umum serta pemenuhan sistem jaringan jalan yang memenuhi aspek aman, aspek nyaman dan aspek selamat.

   Sarana transportasi umum dan barang yang harus dipenuhi adalah angkutan umum dan barang dengan jumlah mencukupi dan dalam kondisi layak, serta peningkatan prasarana terminal, halte dan simpul transportasi lainnya. Sarana dan prasarana transportasi umum dan barang yang memadai akan memberikan kemudahan pelayanan perpindahan manusia dan barang yang ada di Kabupaten Temanggung. Selain sarana dan prasarana transportasi dibutuhkan juga untuk timbulnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

   Sistem jaringan jalan yang memenuhi aspek aman, aspek nyaman dan aspek selamat juga akan memberikan dampak terhadap kemudahan distribusi dan perpindahan berbagai komoditas ekonomi yang ada di Kabupaten Temanggung. Sistem jaringan jalan yang ada harus dikelola dengan baik dengan membuat sistem manajemen perkerasan jalan terintegrasi mulai dari status kewenangan pengelolaan terendah yaitu jalan desa dan jalan lingkungan sampai dengan status kewenangan pengelolaan tertinggi yaitu jalan nasional, termasuk juga pemenuhan kelengkapan keselamatan jalan.

2. Ketahanan Pangan

   Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung yang pengukurannya dilakukan oleh Badan

Ketahanan Pangan Nasional menunjukkan perkembangan yang positif pada tahun 2024 ditunjukkan dengan peningkatan nilai IKP sebesar 1,07 poin pada tahun 2024 atau sebesar 78,91 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 77,84. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Temanggung. Faktor yang mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung diantaranya mempertahankan produksi pangan, penguatan distribusi pangan, efektivitas program yang menunjang ketahanan pangan serta dukungan terhadap petani melalui subsidi serta pelatihan pertanian berkelanjutan yang turut memperkuat ketahanan pangan. Meski mengalami peningkatan, untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim yang berdampak pada produksi pertanian serta fluktuasi harga pangan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung.

3. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

   a. Pembangunan Pertanian

      Pembangunan pertanian merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam meningkatkan pendapatan dan ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat akan memacu berkembangnya sektor industri dan jasa serta mempercepat transformasi struktur perekonomian daerah. Ketangguhan sektor industri akan semakin kokoh apabila didukung oleh berkembangnya sektor pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya untuk membangun pertanian yang efektif, efisien dan bernilai ekonomi tinggi.

      Pertanian yang efektif adalah pola usaha tani yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta berkelanjutan bagi lingkungan. Pengukuran efisiensi pertanian lazimnya menggunakan perhitungan efisiensi berorientasi input, dimana mengukur efisiensi dari minimisasi biaya penggunaan input dalam usahatani untuk mencapai output tertentu. Seorang petani dikatakan efisien secara teknis dalam usaha taninya jika petani tersebut mampu menghasilkan

output yang sama, tetapi dengan jumlah penggunaan kombinasi input yang lebih sedikit. Keuntungan petani menjadi semakin besar jika produk hasil usaha taninya bernilai ekonomi tinggi.

b. Kemudahan Investasi

Kemudahan dalam berinvenstasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat, karena investasi akan menciptakan lapangan kerja, mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi, meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong pemerataan ekonomi. Berapa wilayah di Jawa Tengah dianggap seksi untuk investasi. Dengan adanya exit toll Kabupaten Temanggung akan menjadi lokasi yang menarik bagi investor. Tetapi menarik saja tidak cukup bagi para investor, kemudahan investasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi faktor pendorong berkembangnya investasi di daerah.Kemudahan investasi juga sangat diperlukan bagi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.

4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Hidup dan Sumber Daya Manusia

Kualitas hidup dan sumber daya manusia (SDM) merupakan kemampuan dan keadaan individu untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Kualitas hidup dan SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas, inovasi dan kemandirian. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing daerah dan keberlanjutan pembangunan. Aspek yang berkaitan dengan kualitas hidup dan sumber daya manusia SDM antara lain kualitas pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat, budaya literasi masyarakat, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, kesetaraan gender, kualitas daya saing pemuda dan olahraga, dan terciptanya rasa aman masyarakat.

b. Penanganan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang menjadi prioritas pertama dalam SDGs. Selain itu kemiskinan merupakan salah satu kerangka pikir yang digunakan dalam Trisula Pembangunan Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Temanggung selalu mengalami

penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya, tetapi secara angka absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung masih cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung per Maret tahun 2024 sebanyak 68,77 ribu jiwa atau 8,67% terhadap total jumlah penduduk. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka penanganan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi yakni pemerataan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, serta peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat miskin. Untuk melaksanakan ketiga strategi tersebut, perlu adanya kemitraan, baik antara Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah/Swasta/Masyarakat atau Komunitas Peduli, maupun sinergi kebijakan.

5. Kelestarian Lingkungan

Isu strategis dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung adalah penanganan isu polusi, isu perubahan iklim, isu persampahan, dan isu menurunnya kualitas sumber daya alam. Ketika lingkungan mengalami kerusakan, maka yang akan terjadi adalah, lingkungan akan kehilangan kualitasnya dan memengaruhi kualitas hidup manusia di masa yang akan datang. Selain itu, permasalahan lingkungan menjadikan tidak seimbangnya ekosistem antara alam dan manusia. Habitat dari makhluk hidup akan rusak bahkan bisa kehilangan tempat tinggal.

Penyebab dari permasalahan lingkungan yaitu karena faktor alam dan ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan. Permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam, terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan karena kemarau panjang.

6. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pelayanan publik yang berkualitas memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi secara efektif, adil, dan efisien. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang

baik memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang mengarah pada kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Isu strategis daerah juga menjadi acuan dan prioritas pembangunan pada janji tahunan kepala daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD, di mana dalam penyusunan rencana pembangunannya seiring dengan tahapan perencanaan pembangunan dan berdasarkan permasalahan yang ada, pelibatan Kepala Daerah dan DPRD ada dalam tahapan perencanaan pembangunan sehingga perlu mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

2.4 KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.4.1 Kinerja terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP 2025 di Daerah

Tabel 2.318
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Daerah dengan Nasional

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
1	**PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia**									
	S.1.1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia									
	1.1. Indeks Demokrasi Indonesia	74,12	80,41	79,51	79,51	-	-	-	-	-
	1.2. Indeks Hak Asasi Manusia			2,70	2,70	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah

Tabel 2.319
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru di Daerah dengan Nasional

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
2	**PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**									
	S.2.1. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan									
	1.1. Asia Power Index (*Military Capability*)				15,7	Bukan Kewenangan Daerah				
	1.2. Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)				65,6	Bukan Kewenangan Daerah				
	1.3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	62,8 (2020)	62,8 (2020)	62,8 (2020)	Indeks Rasa Aman	4,48	4,55	4,55	4,65
	1.4. *Global Cybersecurity Index*	94,88	94,88		100	Indeks KAMI (Kemanaan Informasi)	n.a	n.a	n.a	263 (self assesment)
	1.5. Indeks Keamanan Laut Nasional				59	Bukan Kewenangan Daerah				
	S.2.2. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)									
	2.1. Indeks Ketahanan Pangan				71,2	Rasio Ketersediaan Pangan	100	100	100	90,2
	2.2. Pertumbuhan PDB Pertanian,			1,30	1,30					

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
	Kehutanan, dan Perikanan (%)									
	S.2.3. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam mcmcnuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)									
	3.1. Indeks Ketahanan Energi				6,64					
	3.2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	12,2	12,3	13,2	13,2	-	-	-	-	-
	S.2.4. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekaten Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)									
	4.1. lndeks Ketahanan Air Nasional		3,48	3,48	3,48					
	4.2. Kapasitas tampungan air (m3/kapita)				59,59					
	4.3. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)				24 (2020)	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	94,52	95,32	95,95	97,65
	4.4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)			10,21	10,21	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	82,68	88,11	94,39	95,29
	S.2.5. Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif inklusif, dan berkelanjutan									
	5.1. Posisi ekonomi syariah lndonesia di tingkat global (peringkat)			3	3					
	5.2. Indonesia Blue Economy lndex (IBEI)			34,25	34,25					
	5.3. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)			45	45	Indeks Daya Saing Daerah	3,420 (assesment provinsi Laporan IDSD 2022)	2,92	3,26	3,65
	S.2.6. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau									
	6.1. lndeks Ekonomi Hijau			60,08	60,08					
	6.2. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15	15	15	15 (13 terdaur ulang 2022)	Persentase sampah yang tertangani	32	59,19	61,26	62,91
	6.3. Persentaae Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	27,07	26,87	17,02	17,02	-	-	-	-	-
	6.4. Persentaae Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	32,97	26,7	23,48	23,48	-	-	-	-	-
	6.5. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35	0,35	0,35	0,35 (2020)					
	6.6. lndeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,45	72,42	72,54	72,54	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,51	69,86	74,83	68,25
	lndeks Kualitas Udara			88,67		lndeks Kualitas Udara	80,89	83,82	85,10	87,84
	lndeks Kualitas Air			54,59		lndeks Kualitas Air	54,45	52,22	64,07	59,63
	lndeks Kualitas Lahan				61,79	lndeks Kualitas Lahan	74,33	74,33	74,33	46,81
	lndeks Kualitas Air Laut				78,84	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah

Tabel 2.320
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi di Daerah dengan Nasional

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
3	**PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi**									
	S.3.1. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan									
	1.1. Stok lnfrastruktur terhadap PDB (%)				43 (2019)					
	S.3.2. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB									
	2.1. Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)			17,05		-	-	-	-	-
	2.2. Aset Perbankan/PDB (%)			57,2						
	2.3. Aset Dana Pensiun/PDB (%)			7,3						
	2.4. Aset Asuransi/PDB (%)			9,0						
	2.5. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)			55,9						
	2.6. Total Kredit/PDB (%)			33,9						
	2.7. Inklusi Keuangan (%)			88,7						
	S.3.3. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas									
	3.1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)				23,96	Persentase Tenaga Kerja Formal	24,17	29,3	24,81	
	3.2. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,07								
	3.3. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)				3,06	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	n.a	n.a	n.a	100
	3.4. Rasio Kewirausahaan (%)	2,89	2,86	3,04	3,08	Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	18,46	64,62	70,46	82,19
	S.3.4. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata									
	4.1. Rasio PDB Pariwisata (%)	2,4	3,6	3,6	3,6	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	1,53	1,53	1,53	1,53
	4.2. Devisa Pariwisata (Miliar USD)	0,55	7,04	14,0	14,0	-	-	-	-	-
	S.3.5. Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif									
	5.1. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)			6,77						

Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah

Tabel 2.321
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas di Daerah dengan Nasional

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
4	**PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**									
	S.4.1 Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata									
	1.1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas l5 tahun (tahun)	8,97	9,08		9,22	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,25	7,41	7,5	7,53
	1.2. Harapan lama sekolah (tahun)	13,08	13,1	13,21	13,21	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,32	12,55	12,61	12,62
	1.3. Rata-rata nilai PISA					-	-	-	-	-
	(a) Membaca		359			-	-	-	-	-
	(b) Matematika		366			-	-	-	-	-
	(c) Sains		383			-	-	-	-	-
	1.4. Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional									
	(a) Literasi Membaca			60,89						
	(b) Numerasi			51,36						
	1.5. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)			31,45		-	-	-	-	-
	1.6. Proporsi penduduk berusia l5 tahun ke ataa yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)			10,15						
	1.7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	40,39	40,49	66,30	66,30	Persentase Tenaga Kerja formal	24,17	29,3	24,81	
	S.4.2. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua									
	2.1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)			72,13		Angka Harapan Hidup (AHH)			75,77	75,94

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
	2.2. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur I5-49 tahun)	2,24	2,14	2,14	2,14	-	-	-	-	-
	2.3. Angka kematian lbu (per 100.000 kelahiran hidup)	189	n.a	n.a.	n.a	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	174,38	75,32	44,96	61,01
	2.4. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	24,1	24,37	21,50	21,50	Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	13,13	13,03	11,59	11,29
	2.5. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	301	354	387	387	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	67,88	95,65	100	100
	2.6. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)				98,42					
	S.4.3. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat lnklusif									
	3.1. Indeks Pembangunan Keluarga	54,01	56,07	69,51	69,51	Indeks Pembangunan Keluarga	55,97	55,97	58,19	62,08
	3.2. Indeks Perlindungan Anak	61,38	69,87	68,29	68,29	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	80	80	80	
	3.3. Indeks Pembangunan Pemuda	51	53,33	60,59	60,59	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,78	3,98	3,98	3,98
	3.4. lndeks Ketimpangan Gender			0,447						
	3.5. lndeks Pembangunan Gender	91,27	91,63	91,85	91,85	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,31	95,71	95,99	96,19
	3.6. Mobilitas Penduduk lanjut Usia (%)			92,94						
	3.7. Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)			68,42						
	S.4.4. Menguatnya lptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja									
	4.1. Peringkat lndeks Inovasi Global	87	75		54	Indeks Inovasi Daerah	Sangat inovatif/ 72,42	Inovatif	Sangat inovatif/ 72,42	Sangat inovatif/ 72,42
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				4,91	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,62	2,54	2,32	2,35
	b. Pengeluaran lPTEK dan Inovasi (% PDB)	0,28								
	c. Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan (%)				56,42					
	S.4.5. Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat									
	5.1. Jumlah Perolehan Medali Emas pada *Olympic Games*				2					
	5.2. Jumlah Perolehan Medali Emas pada *Paralympic Games*				1					
	5.3. Peringkat pada *Asian Games*			13						
	5.4. Peringkat pada *Asian Para Games*			6						
	5.5. Peringkat pada *Sea Games*			3						
	5.6. Peringkat pada *Asean Para Games*			1						
	5.7. Persentase penduduk berumur 10 tahun yang aktif berolahraga				9,04					

Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah

Tabel 2.322
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri pada Nasional dan Daerah

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
5	**PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**									
	S.5.1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan									
	1.1. Rasio PDB lndustri Pengolahan (%)	19,24	18,34	18,67	18,67	Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB	27,47	27,47	26,19	25,92
	S.5.2. Terwujudnya Peningkatan lntegrasi Ekonomi Domcstik dan Global									
	2.1. Biaya Logistik (% PDB)		14,29							
	2.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)			29,3						
	2.3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)			21,7						

Sumber : Bappeda Tahun 2024, data diolah

Tabel 2.323
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan di Nasional dan Daerah

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
6	**PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**									
	S.6.1. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan									
	1.1. Tingkat kemiskinan (%)				9,03	Tingkat kemiskinan (%)			9,33	8,67
	1.2. Tingkat kemiskinan ekstrem (%)				1,47	Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	2,07	0,96	0,33	n.a.
	1.3. Proporsi penduduk kelas menengah (%)				17,13					
	1.4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)				29,77					
	1.5. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)			9,07						
	S.6.2. Meningkatkan akscs hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan									
	2.1. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	60,9	60,66		65,25	Persentase rumah layak huni	91,15	94,75	95,5	96,31
	S.6.3. Mewujudkan pcmbangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan									
	3.1. Persentase desa mandiri (%)				22,85	Persentase Desa yang berpredikat Mandiri	5,63	9,77	20,68	37,96
	S.6.4. Perkotaan sebagai pusat penumbuhan ekonomi									
	4.1. Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)		56,56							
	4.2. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)		44,13							

Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah

Tabel 2.324
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan di Nasional dan Daerah

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
7	**PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**									
	S.7.1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional									
	1.1. Indeks Pembangunan Hukum	0,6	0,56	0,68	0,68	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,06	83,41	84,97	86,91
	1.2. Indeks Persepsi Korupsi			34		Indeks Efektifitas Pengenda-lian Korupsi	n.a	n.a	n.a	3,0
	1.3. Indeks Materi Hukum			0,60						
	1.4. Indeks Integritas Nasional			70,97		SPI	78,71	77,37	76,09	76,91
	1.5. Indeks Integritas Partai Politik				62,83					
	S.7.2. Terrvujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani									

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
	2.1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional				69,98	Indeks Reformasi Birokrasi	63,42	64,61	69,05	69,05
	2.2. Indeks Pelayanan Publik	3,79	3,93	3,78	3,78	-	-	-	-	-
	2.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			2,79		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,78	2,78	2,78	2,78
	2.4. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri				93					
	S.7.3. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba									
	3.1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika			1,73						
	S.7.4. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan									
	4.1. *Return on Asset* (ROA) BUMN (%)			3,14						-
	S.7.5. Tercapainya Peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan									
	5.1. Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)				12,82	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah	18,66	16,69	17,54	18,35
	5.2. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	9,12	10,39	9,12	10,07	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100	100	100	98,16
	S.7.6. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan									
	6.1. Tingkat Inflasi (%)	1,87	5,51	2,61	1,57	Inflasi	2,18	5,63	2,89	

Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah

Tabel 2.325
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur di Nasional dan Daerah

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
8	**PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatal Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**									
	S.8.1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju									
	1.1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85								
	1.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	51,9	59,71	57,13		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	n.a	3,31	3,67	3,67
	1.3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,39	73,09	76,02	76,47	Indeks Toleransi	0,83	4,33	4,33	4,33
	S.8.2. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim									
	2.1. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)		0,140							

2.4.2 Intervensi Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

a. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Perekonomian Indonesia mampu bertahan dengan baik dan stabil ditengah tantangan ekonomi global yang cukup kuat seperti

perlambatan ekonomi, inflasi yang tinggi dan ketidak pastian geopolitik. Hal tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam mendukung kebijakan tersebut, Kabupaten Temanggung menerapkan ekonomi yang berbasis potensi lokal dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan yang merata serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya. Intervensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal sebagai beikut:

Tabel 2.326
Intervensi Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
1	"BUMI MUTIARA" yaitu singkatan dari "Bersatu Membangun Ekonomi, Masyarakat Unggul, Petani Sejahtera dan Berkelanjutan" dengan harapan terwujudnya optimalisasi komoditas kopi dan domba berbasis ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan	DKPPP	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.180.000.000	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) : - 2023 : 33,29 - 2024 : 35,49 PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rupiah) : - 2023 : 5.637,46 - 2024 : 6.093,62 PDRB Sektor Pertanian (Miliar Rupiah) : - 2023 : 6.174,02 - 2024 : 6.498,19
		Dinpermades	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	175.000.000	
		Dinperinaker	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	11.000.000	
JUMLAH				**1.366.000.000**	

Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah

b. Penurunan Kemiskinan

Kebijakan Tranformasi ekonomi yang inklusif diharapkan mampu memberikan manfaat aktivitas ekonomi dan pembangunan bagi setiap lapisan masyarakat , termasuk kelompok rentan. Selain itu penurunan kemiskinan diharapkan tidak hanya sekedar menurunkan angka kemiskinan akan tetapi juga dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan sebagai salah stau langkah dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dan kesejahteraan yang merata. Hal tersebut dapat berhasil, apabila dalam implementasinya terjadi kerjasama dan kolaborasi yang konsisten oleh semua stakeholder terkait termasuk pemerintah daerah. Berikut intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dalam penurunan kemiskinan.

Tabel 2.327
Intervensi Daerah dalam Mendukung Penurunan Kemiskinan

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
2	Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan sebagai langkah peningkatkan kualitas hidup	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan	17.778.054.000	TPT : - 2023 : 2,32

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
	yang lebih baik dan kesejahteraan yang merata	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.405.383.000	- 2024 : 2,35 Angka Kemiskinan : - 2023 : 9,26 - 2024 : 8,67
		DPUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	275.000.000	
		DPRKPLH	Program Pengembangan Perumahan	330.000.000	
			Program Kawasan Permukiman	2.134.000.000	
		Dinsos	Program Rehabilitasi Sosial	978.000.000	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.214.134.475	
JUMLAH				**24.114.571.475**	

Sumber : Bappeda Tahun 2025, data diolah

c. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Untuk mendukung ketercapaian pertumbuhan ekonomi ysng inklusif dan berkelanjutan salah satunya adalah dengan peningkatan sumber daya manusian. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga menjadikan kualitas Sumber daya menjadi prioritas pertma dengan harapan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk mendukung transformasi dengan beinovasi dan beradaptasi pada perubahan global untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, berpendidikan dan berdaya. Berikut adalah intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia :

Tabel 2.328
Intervensi Daerah dalam Mendukung Peningkatan Sumber Daya Berkualitas

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
3	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas berkarakter dan berdaya	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan	17.778.054.000	UHH: -2022 : 75,70 - 2023 : 75,77 - 2024 : 75,94 RLS - 2022 : 12,55 - 2023 : 12,61 - 2024: 12,62 TPT : - 2022: 2,54 - 2023 : 2,32 - 2024 : 2,35
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	65.000.000	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.660.000.000	
		Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.405.383.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.000.000	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	40.000.000	

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
		DPUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	275.000.000	
		DPRKPLH	Program Kawasan Permukiman	2.134.000.000	
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	220.000.000	
		Dinsos	Program Pemberdayaan Sosial	160.000.000	
			Program Rehabilitasi Sosial	978.000.000	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.214.134.475	
		BPBD	Program Penanganan Bencana	174.000.000	
		DPPAPPKB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	30.000.000	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	85.881.650	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	251.100.000	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	20.000.000	
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	30.000.000	
			Program Perlindungan Perempuan	68.900.000	
			Program Perlindungan Khusus Anak	80.000.000	
		Dindukcapil	Program Pendaftaran Penduduk	500.000.000	
		Dinpermades	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	175.000.000	
		Dinhub	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.689.821.400	
		Dinkominfo	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	530.000.000	
		Dinbudpar	Program Pengembangan Kebudayaan	101.000.000	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.000.000	
		Dinpusip	Program Pembinaan Perpustakaan	10.644.713	
		Dinperinaker	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	11.000.000	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	60.250.000	
		Dinkopdag	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	80.000.000	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	1.874.278.750	
		Bappeda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	260.000.000	
		BKPSDM	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	514.375.000	
	JUMLAH			**45.615.822.988**	

Sumber : Bappeda Tahun 2024, data diolah

2.5 INOVASI DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH

2.5.1 Inovasi Daerah

Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas

pelayanan berorientasi untuk kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Inovasi dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan inovasi terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan inovasi dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang inovasinya berhasil diterapkan. Inisiatif inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, DPRD, ASN, Perangkat Daerah maupun masyarakat.

Pemerintahan pada era saat ini memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan kebijakan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui inovasi, mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perkembangan inovasi di Kabupaten Temanggung dalam mendukung program-program pemerintah maupun mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi di masyarakat, Untuk mendukung terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, diterbitkanlah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang mempunyai inovasi-inovasi terbaiknya melalui ajang lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova). Selanjutnya para pemenang lomba krenova tingkat Kabupaten akan mengikuti lomba Krenova tingkat

Provinsi dan mendapatkan uang pembinaan serta fasilitasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual berupa paten, hak cipta).

Melalui kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Temanggung berhasil menghimpun dan melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah sehingga memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Sangat Inovatif, dengan nilai Indeks Inovasi daerah 72,42

Penerapan inovasi dari masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dicantumkan di dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Program dan Kegiatan. Kreativitas dan inovasi (krenova) yang tercatat dalam dokumen RKPD sampai dengan bulan Maret 2025, berjumlah 997 krenova yang terdiri dari 343 krenova yang berasal dari masyarakat, 632 krenova yang berasal dari Perangkat Daerah, dan 22 krenova berasal dari penjaringan masyarakat.

Tabel 2.329
Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
1	IKAT RAJUT (Inovasi Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Berkelanjutan) RKPD Tahun 2020	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam ikut berpatisipasi penangulangan kemiskinan Semua Elemen masyarakan, pemerintah dan Stakeholder dapat bekerja bersama dalam menyelesaiakan permasalahan kemiskinan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung	Penurunan Kemiskinan dapat teratasi lebih cepat Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung dapat berjalan sesuai dengan harapan	Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial
2	MUSTIKA DESA (Masyarakat Unggul Sejahtera dengan Tani Pekarangan, Konservasi dan Desa Bebas Sampah) RKPD Tahun 2021	Tumbuhnya Petani Pekarang di Semua Desa dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung Terjadinya gerakan pelestarian lingkunan dengan penghijauan Sabuk Gunung Adanya Gerakan Masyaarakat Pengelolaan Sampah Didesa dan Kecamatan	Peningkatan Ekonomi masyarakat Tumbuhnya UMKM Penurunan lahan Kritis dan penurunan Lahan Longsor Lingkungan Desa sampai Kota terbentuk pengelola Sampah Terjadinya Penurunan kemiskinan	Inventor : BAPPEDA DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR
3	KABAR PENTING DESAKU (Kerja Bareng Penanggulangan Stunting, Desa Bebas Sampah dan Konservasi Lingkungan Hidup) RKPD Tahun 2022	Penanganan stunting dapat dilaksanakan secara bersama-sama Terjadinya Peningkatan gerakan pelestarian lingkunan dengan penghijauan Sabuk Gunung Adanya Gerakan Masyaarakat Pengelolaan Sampah Didesa dan Kecamatan	Terjadi Penurunan angka Stunting Penurunan lahan Kritis dan penurunan Lahan Longsor Lingkungan Desa sampai Kota terbentuk pengelola Sampah Terjadinya Penurunan kemiskinan	Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR
4	GERBANG EMAS (Gerakan Pembangunan untuk Peningkatan Kesehatan , Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Ekonomi Masyrakat) RKPD Tahun 2023	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Terbukanya lapangan kerja baru Tertanganinya Lahan Kritis Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pelestarian lingkungan Peningkatan kesehatan masyarakat	Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR
5	PASARKU GANDEM	Peningkatan produktifitas pasar Digitalisasi pelayanan Pelayanan publik di pasar Penerapan pasar pintar Pengembangan pasar solidaritas	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan pelayanan publik	Inventor; BAPPEDA DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas,

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
				Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR
6	BUMI MUTIARA RKPD Tahun 2024	menggerakkan pengembangan sektor Pertanian, perdagangan, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dengan menciptakan akses serta kesempatan luas sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	Meningkatan produksi pertanian komoditas kopi Peningkatan Ekonomi Masyarakat	DKPPP,FTJLS, Mitra Usaha

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel 2.330
KRENOVA dan Penjaringan Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 2024

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
1.	Sistem Absensi Perangkat Desa (SAPD)	1. Mengurangi waktu dan meningkatkan akurasi dalam pengelolaan kehadiran pegawai 2. Memungkinkan pemantauan kehadiran secara real-time 3. Meningkatkan transparansi 4. Terintegrasi dengan sistem digital lainnya, seperti manajemen surat-menyurat, layanan kependudukan, atau pelaporan keuangan	1. Meningkatkan Kedisiplinan Perangkat Desa 2. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan	DINPERMADES
2.	Diskusi Seputar Layanan Publik Pemkab Temanggung "RUBRIK DIGITAL"	1. Memfasilitasi Pelayanan Publik Bagi Pemerintah dan Masyarakat Temanggung 2. Memperluas Informasi Kapada masyarakat.	1. Meningkatnya Komunikasi 2 arah antara Pemerintah dan Masyarakat 2. Masyarakat lebih mudah dalam mendapat informasi 3. Jangkaun informasi lebih luas, cepat dan murah	DINKOMINFO
3.	Layanan Laporan dan Aduan Masyarakat WAGE (Whatsapp Gateway)Caranya, ketik WAGE kirim ke nomor WA: 085878600900,	1. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan, informasi dan pertanyaan seputar layanan publik Pemkab Temanggung, disampaikan melalui WAGE (Whatsapp Gateway),	Masyarakat lebih mudah dalam mengajukan pengaduan, informasi dan layanan dan cepat mendapat penanganan tindak lanjut.	DINKOMINFO

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		2. Masyarkat dapat memantau aduan, pertanyaan dan laporan yang dulur kirimkan di wage.		
4.	Sarana Informasi Interaktif Dinkominfo dan Layanan Publik Pemkab Temanggung RuDiMas (Ruang Digital Masyarakat)	Masyarakat dapat mendapatkan informasi, pelayanan, pelatihan dalam pengembangan SDM dengan mudah dan gratis Pemerintah Desa, Mahasiswa, siswa/siswi sekolah dan masyarakat dapat meningkatkan SDM dengan mudah	Meningkatkan SDM Masyarkat Kabupaten Temanggung	DINKOMINFO
5.	(Geographic Information System) GIS Terintegrasi Kab Temanggung	Dapat membantu dapat membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pemantauan. SIG dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti lingkungan, transportasi, dan pengelolaan proyek.	Mempermudah dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemantauan Lingkungan, Penanganan Bencana, Transportasi dan Logistik di Kabupaten Temanggung.	DINKOMINFO
6.	Sistem Tanda Tangan Elektronik Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Sertifikat Elektronik BsRE	1. Mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat di Desa dan Kelurahan 2. Meminimalisasi pemalsuan dokumen 3. Efisiensi anggaran	Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah	DINKOMINFO
7.	Analisis Media Sosial Kabupaten Temanggung	1. Mengetahui performa dari konten instagram yang diunggah 2. Sebagai bahan pengambilan keputusan strategis yang real time.	Mempermudah Pemerintah dalam evaluasi dan pengambilan keputusan strategis	DINKOMINFO
8.	Inovasi 0 Kilometer 0 Rupiah	Mengkatkan pelayanan masyarakat dari rumah tanpa biaya	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa	DINDUKCAPIL
9.	Teman Alula “Tempat Jualan Alumni Pelatihan” Dinperinaker Temanggung	Sebagai media mempromosikan dan memasarkan produk-produk alumni pelatihan Dinperinaker Kabupaten Temanggung, baik produk makanan, minuman, jasa dll.	Meningkatkan Penjualan Produk-produk alumi Dinperinakaer	DINPERINAKER
10.	Tanya Auditor Online	Fasilitasi Pelayanan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa secara online	Pemerintah Desa Dapat Melaksanakan Konsultasi Kepada Inspektorat Setiap Saat tanpa harus datang ke Kantor.	INSPEKTORAT
11.	QR CODE PBG Bangunan Gedung	1. Mempermudah Pendataan/inventarisasi aset Bangunan Gedung	Inventarisasi Gedung lebih akurat	DPMPTSP

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		2. Memudahkan Pengawasan Bangunan Gedung		
12.	KARPAK (Kartu Parkir)	Meningkatkan kepercayaan dan keamanan Pengunjung DPMPTSP	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan	DPMPTSP
13.	NGOBRAS (Ngobrol Santai)	1. Meningkatkan interaksi sosial 2. Memperkuat komitmen bersama 3. Meningkatkan Kinerja Pegawai	Meningkatkan Kepercayaan Pelayanan Publik DPMPTSP	DPMPTSP
14.	CAKITAS (Catatan kaki Integritas)	Meningkatkan pelayanan tanpa memungut biaya/gratifikasi	DPMPTSP menuju WBK/bebas KKN	DPMPTSP
15.	SIBARENG (Sistem Informasi Pembayaran Retribusi Bangunan Gedung)	1. Meningkatkan transparasi retribusi bagunan gedung 2. Membudahkan sistem pembayaaran	1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat 2. Pembayaran aman, tepat waktu, sesuai aturan	DPMPTSP
16.	TUAN KAMI (Waktu Anda Kami Hargai)	Pelayanan Khusus UMK lebih mudah dan cepat	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	DPMPTSP
17.	LAPOR BUI (Layanan Pendampingan OSS RBA Badan Usaha)	1. Mempermudah pengurusan perizinan berusaha 2. Memudahkan pelaku usaha dalam pelaporan dan pemecahan masalah perizinan 3. Membantu pelaku usaha menghemat waktu dan biaya dalam mengurus perizinan 4. Membantu pelaku usaha mendapatkan izin usaha dengan lebih efektif, sederhana, cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan	1. Meningkatnya kepercayaan para pelaku usaha 2. Meningkatnya pelayanan Masyarakat	DPMPTSP
18.	LAZOOM (Layanan Via Zoom)	Meningkatkan Pelayanan secara mudah, efektif dan efisien	Meningkatnya masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan DPMPTSP	DPMPTSP
19.	BOSUKMA (Barcode Survey Kepuasan Masyarakat)	1. Mengukur tingkat kepuasan 2. Mengetahui kebutuhan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas pelayanan 4. Mempermudah masyarakat memberikan penilaian	1. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepuasan masyarakat 2. Membantu dalam menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan	DPMPTSP
20.	24/7 Pelayanan Selain Jam Kerja Via Whatsapp	Melaksanakan pelayanan diluar jam kerja	Meningkatkan pelayanan Masyarakat	DPMPTSP

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
21.	PELAYANAN MULTIHELIX (Layanan Permohonan Izin tanpa turun dari kendaraan)	Melayani permohonan izin tanpa turun dari kendaraan	Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di DPMPTSP	DPMPTSP
22.	Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui "JEMPOL BOSS" Di Dpmptsp Kabupaten Temanggung	Meningkatkan Pelayanan NIB diluar Kec. Temanggung Mempermudah Masyarakat mengajukan NIB	Meningkatnya Masyarakat yang mengajukan NIB untuk Usah Meningkatkan ekonomi masyarakat	DPMPTSP
23.	SIAP PAKDE	Mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke Kantor	Meningkatkan Pembayaran Wajib Pajak Tepat Waktu	BPKPAD
24.	Ngobrol Sore (Sobat Perencana)	1. Meningkatkan Publikasi Program-program BAPPEDA 2. Meningkatkan Sering kegiatan Kolaborasi 3. Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatnya pengetahauan masyarkat terhadap program dan kegiatan BAPPEDA	BAPPEDA
25.	Sistem Informasi Jagateman (Jaringan Irigasi Temanggung)	Meningkatkan Aksesibilitas Data Irigasi Guna Mendukung Kebutuhan Masyarakat di Kabupaten Temanggung	Penanganan Permasalah Air Irigasi cepat ditangani	DPUPR
26.	Stek Berakar Tanaman Kopi	Menyediakan Bibit Kopi berkualitas yang cepat produksi.	Petani dapat panen lebih cepat dan produksi tinggi	DKPPP
27.	KANGAROO MOTHER CARE (KMC)	Bayi Prematur dapat ditangani dengan lebih baik, skin-to-skin contact	Bayi prematur tumbuh dan berkembang dengan baik, terjaga kesehatanya.	RSUD Temanggung
28.	SIMAPUT (Siaga Mantap Antar Jemput) Kegawatdaruratan Medis	Pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah dan cepat	Pasien merasa lebih nyaman segera dapat tertangani	PSC 119 DINKES
29.	Gerakan Sadar Deteksi Dini Penyakit Kanker Leher Rahim dengan Inspeksi Visual Asam Asetat Test (GESID PARASIT)	1. Menurunkan risiko terkena kanker leher rahim 2. Menemukan lesi pra-kanker sedini mungkin, 3. Mengurangi morbiditas penyakit dengan pengobatan dini,	1. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan diri 2. Menyelamatkan banyak wanita,	Puskesmas Dharmarini
30.	"TEMAN SUZI" (Temui Dampingi Dengan Asuhan Gizi)	1. Meningkatkan status gizi anak-anak	Meningkatnya Kesehatan Anak di Kabupaten Temanggung	Puskesmas Tlogomulyo

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		2. Membantu anak-anak tumbuh secara optimal 3. Meminimalkan risiko masalah kesehatan jangka panjang 4. Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang gizi		
31.	Optimalisasi Pemeriksaan Tripel Eliminasi untuk Menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Puskesmas Bejen Kabupaten Temanggung	1. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, 2. Mengurangi angka kesakitan dan kematian, 3. Membantu ibu hamil menjalankan proses kehamilan sampai persalinan yang aman dan sehat 4. Memberikan edukasi kesehatan selama kehamilan	Menurunnya angka kemaatian Ibu dan anak.	Puskesmas Bejen
32.	PEPPY PEL	1. Meningkatkan Pemberdayaan Dukun Bayi 2. Pemanfaat Tanaman Toga untuk bahan pembuatan cairan pembersih lantai	Meningkatkan SDM dan Kesejahteraan Dukun Bayi	Puskesmas Selopampang
33.	TUKU TAS JIMAT (Petugas Dukung Keluarga Pantau Pasien Jiwa Minum Obat)	Terpantaunya ketersediaan obat dan pasien minum obat tepat waktu	1. Pasien tidak menimbulkan masalah negatif 2. Meningkatnya pasien Sembuh dari sakit jiwa	Puskesmas Gemawang
34.	"PRINGSURAT NGANGENI"	1. Meningkatkan Potensi Unggulan Kecamatan Pringsurat 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pringsurat Semakin Dikenal secara luas 2. Meningkatan ekonomi masyarakat	Kecamatan Pringsurat
35.	SARBON (Pasar Kebon)	1. Media Pemasaran Produk PKH 2. Membuka Peluang Usaha Baru	Meningkatkan Ekonomi Keluarga PKH	Kecamatan Kranggan
36.	Sistem Gerbong			Kecamatan Temanggung
37.	Sepeda Lurah	Mengakomodir sistem infomasi dana kelurahan yang meliputi pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Mengkatnya akuntabilitas kinerja dan transparansi anggaran serta mendorong percepatan kegiatan	Kecamatan Temanggung
38.	BRIKKIN (Briket Kulit Kopi Ketitang)	Meningkatkan Nilai Tambah Tanaman Kopi	Meningkatkan ekonomi petani kopi	Desa Ketitang
39.	JAKABA (Jamur Keberuntungan Abadi) untuk	Pupuk Alternatif Organik	Meningkatkan ekonomi petani	Desa Campursari

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
	Pupuk Organik Cair (POC)			
40.	SIKURTOMAT (Sirup Kurma Tomat)	1. Diversifikasi Buah Tomat 2. Meningkatkan Nilai ekonomi buah tomat	1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 2. Meningkatkan ekonomi petani	Desa Ngabeyan
41.	SUMUK (Semprotan Anti Nyamuk Organik)	1. Meningkatkan nilai ekonomi kulit jeruk 2. Pemberdayaan Masyarakat	Diperoleh alternatif Antik Nyamuk Organik	Desa Morobongo
42.	Katalog Flora & Fauna Digital Gununggempol	1. Mempurmudah Pendataan Flora Fauna di Desa Gunung Gempol 2. Dapat meninigkatkan literasi flora fauna	Masyarakat mudah mengenal flaura dan Fauna di Desa Gunung Gempol	Desa Gununggempol
43.	POC dari Limbah Rumah Tangga	1. Mengurangi pencemaran lingkungan 2. Meningkatkan nilai ekonomi limbah rumah tangga	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 2. Mendapatkan pupuk organik dengan mudah 3. Meningkatkan ekonomi masyarakat	Desa Gandurejo
44.	Instalasi Penerangan Otomatis Menggunakan Sensor Cahaya Guna Meningkatkan Efisiensi Energi Listrik	Mengembangkan teknologi penerangan jalan	Meningkatkan kualitas penerangan jalan	Desa Wonotirto
45.	CHIPOW (Chili Powder Asli Sukomarto)	1. Diversifikasi Olahan Cabe 2. Meningkatkan nilai ekonomi cabe	Meningkatkan ekonomi masyarakat	Desa Sukomarto
46.	Pemanfaatan Akar Bambu Sebagai (PGPR) Plant Growth Promoting Rhizobacteria	1. Meningkatkan kesuburan tanah 2. Mengendalikan beberapa jenis patogen 3. Meningkatkan pertumbuhan tanaman	Meningkaatkan pemanfaatan pupuk organik mudah dan murah	Desa Kundisari
47.	Bank Botol	Menaggulangi limbah plastik	Meningkatkan nilai ekonomi limbah botol	Desa Kentengsari
48.	Wedang Pring	Melancarkan air seni	Meningkatkan kesehatan	Desa Ngadimulyo
49.	Cookies Daun Kelor Cegah Stunting	Meningkatkan kesehatan masyarakat	Meningkatkan ekonomi	Desa Bojonegoro
50.	Sabun Cuci Piring dari Minyak Jelantah	Mengurangi pencemaran limbah keluarga	Mendapatkan sabun cuci piring yang ekonomis	Desa Nglondong
51.	Mini UPS (*Backup* Daya Efektif Untuk Situasi Darurat)	1. Mencegah kerusakan perangkat elektronik akibat pemadaman listrik 2. Meningkatkan efisiensi kerja dan menanggulangi bahaya kebakaran	Meningkatkan keamanan gangguan listrik	Desa Rejosari
52.	UMKM Maju Bersama Masyarakat	Meningkatkan Penguatan UMKM di Masyarakat Meningkatkan Kualitas Produk	Mempermudah pemesaran dan meningkatkan ekonomi pelaku UMKM	Desa Tegallurung

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Meningkatkan jejaring kerjasama		
53.	Sabun Cuci Piring dengan Ekstrak Jeruk Nipis	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan ekonomi masyarakat	Desa Bulu
54.	Diversifikasi Produk Komoditas Cabai Menjadi Bubuk Cabai	1. Meningkatkan Pemberdayaan Petani Cabe 2. Meningkatkan nilai ekonomi cabe 3. Meningkatkan daya tahan produk	Meningkatkan ekonomi petani cabe	Desa Malangsari
55.	Revitalisasi POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dalam Pemasaran Desa Wisata	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Diperoleh kelembaggan Wisata yang sesuai dengan harapan masyarakat	Desa Wonosari
56.	Festival Harmoni Kesenian Desa Tegalrejo	Sarana komunikasi dan sebagai media pelestarian budaya.	Meningkatkan Kebersamaan dan kerukunan warga	Desa Tegalrejo
57.	Pemanfaatan Limbah Kulit Kopi menjadi Bricket sebagai Alternatif Bahan Bakar Terbarukan serta Meningkatkan Perekononomian Petani Kopi Desa Ketitang	Meningkatkan nilai ekonomi limbah kopi	Adanya alternative bahan bakar dari limbah kulit kopi	Desa Ketitang
58.	*Eco Enzyme* untuk Mengatasi Pencemaran Sampah Organik	Menangulangi pencemaran lingkungan	Lingkungan menjadi aman dan limbah organik tidak beraroma busuk	Desa Jamusan
59.	Pengembangan Peternakan Domba Berbasis *Integrated Farming System* dan *Low External Input Sustainable Agriculture*	meningkatkan produktivitas peternakan dan pertanian secara berkelanjutan	1. Meningkatnya produk pertanian organik 2. Mengurangi Punggunaan Pupuk Kimia 3. Meningkatkan ekonomi petani	Desa Gedongsari
60.	Optimalisasi Pertanian Berkelanjutan Melalui Metode Vertikultur di Desa Sidoharjo	Memanfaatkan lahan pekarangan bernilai ekonomi	Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Desa Sidoharjo
61.	Pemberdayaan Wanita: Edukasi dan Pelatihan Pembuatan Selai Kopi sebagai Bentuk Inovasi Produk dan Peningkatan Nilai Tambah	Pengembangan Diservikasi olahan kopi Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Desa Batursari
62.	Pengolahan Menu Makanan Sehat sebagai Upaya	Pengembangan produk alternatif makanan sehat untuk pencegahan stunting	Membantu menurunkan angka setanting	Desa Mento

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
	Pencegahan Stunting berupa Puding Daun Kelor			
63.	KULIPI (Kulit Pisang Inovatif): Pembuatan Pupuk Cair dari Limbah Organik Untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan	Meningkatkan nilai ekonomi kulit pisang	1. Mengurangi limbah kulit pisang 2. Meningkatkan ekonomi masyarakat	Desa Mojotengah
64.	GreenCoy (Pembuatan Hidroponik Tanaman Sawi Pakcoy Guna Pengenalan dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tanpa Media Tanah)	Edukasi pengembangan teknologi pertanian hidroponik	Meningkatkan ekonomi pertanian	Desa Kutoanyar
65.	CoKelaT: Cookies Daun Kelor Sehat untuk Cegah Stunting	Diservikasi makanan kesehatan untuk mencegah stunting	Produk makanan yang disukai anak-anak	Desa Bojonegoro
66.	Produk Olahan Cabai Sambal Rabuk	Diservikasi olahan cabe	Meningkatkan ekonomi petani cabe	Desa Purbosari
67.	Pembiakan Fungisida Trichoderma Untuk Pencegahan Layu Fusarium pada Cabai dan Tembakau	Pengembangan obat pertanian hayati untuk tanaman cabe	Tanaman cabe tumbuh sehat produksi tinggi	Desa Giripurno
68.	Pembuatan Kokedama Sebagai Ide Usaha Kreatif	mengurangi polusi udara berbahaya yang disebabkan oleh cat rumah, AC, dan tindakan penghematan energi lainnya di rumah. Meredakan stres dan membantu ketenangan	Meningkatkan ekonomi	Desa Karanggedong
69.	Pengembangan Alen-Alen Melalui Inovasi Pengemasan dan Pemasaran serta Edukasi Pembuatan Akun E-Commerce	Meningkatkan produktifitas dan pemasaran alen-alen	Meningkatkan ekonomi	Desa Medari
70.	Peningkatan Nilai Ekonomis Kacang Merah Melalui Pengembangan Produk Tempe	Pengembangan produk lokal Meningkatkan nilai ekonomi kacang merah	Meningkatkan ekonomi masyarakat (peteni kacang merah)	Desa Tanurejo
71.	Alat Linting Kayu	Mempermudah dan mempercepat produksi rokok	Meningkatkan ekonomi masyarakat	Masyarakat

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
72.	Pelestarian Kerajinan Kuda Kepang Desa Barang Kecamatan Jumo	Mendukung ketersediaan properti jaran kepang temanggungan	Meningkatkan ekonomi pengrajin jaran kepang	Masyarakat
73.	Merti Dusun Kirap Sesaji Puji Jagat Lamuk Legok Warga Legok Sari Gelar Sesaji Puji Jagad	Melestarikan budaya lokal Meningkatkatkan kerukunan dan kebersamaan warga	Masyarakat Hidup rukun, harmonis aman dan nyaman	Masyarakat
74.	Arang Kayu	Menyediakan bahan bakar non gas	Meningkatkan ekonomi masyarakat	Masyarakat
75.	Desain Tas Kayu dengan Metode Sulam Kristik	1. Meningkatkan nilai jual limbah kayu 2. Meningkatkan Kreatifitas Masayarat	Meningkatkan ekonomi masyarakat	Masyarakat
76.	Nyadran Suro Desa Tlogopucang	1. Melestarikan Budaya 2. Meningkatkan Kebersamaan masyarkat	1. Terciptanya kerukunan Masyarakat 2. Budaya nyadran suro tetap lestari	Masyarakat
77.	Kontes Kejuaraan Domba Tlilir	1. Meningkatkan Pemberdayaan Peternak Domba 2. Terpilihnya Domba Lokal Berkualitas	1. Meningkatkan Harga Domba 2. Diperoleh domba2 yang berkualitas 3. Menjadi edukasi wisata ternak	Masyarakat
78.	Festival Sastra Progo	Mempromosikan buku-buku penulis dan menumbuhkan kecintaan terhadap sastra.	Masyarakat semakin gemar menulis dan mencintai sastra	Masyarakat
79.	1200 Penari Semarakan Nyadran Jaran Kepang	1. Melestarikan seni budaya lokal, 2. Meningkatkan pariwisata budaya, Meningkatkan pariwisata budaya, 3. Mempererat tali persaudaraan, Meningkatkan kerukunan, 4. Menjaga keharmonisan masyarakat	1. Kesenian Jaran Kepang Temanggung semakin dikenal dikhalayak umum, 2. Meningkatnya Kerukunan, Ketentraman dan keharmonisan di Kabupaten Temanggung	Masyarakat
80.	Ritual Ngguyang Jaran Kepang	1. Memanjatkan doa untuk keselamatan anggota dan keluarga Paguyuban Jaran Kepang 2. Wujud Rasa Syukur dan Kerukunan sesama warga.	Terciptanya kehidupan bermasarakat yang rukun, nyaman dan saling toleransi	Masyarakat
81.	Limbah Kayu Menjadi Kreasi Bernilai Tinggi (Radio Kayuki)	1. Diversifikasi olahan kayu yang bernilai ekonomi tinggi 2. Meningkatkan SDM	1. Meningkatnya Harga Jual Produk Kayu 2. Meningkatkan ekonomi pengrajin	Masyarakat
82.	Grebeg Jogo Tonggo, Kb Khodijah Tembarak Peduli Hasil Bumi	1. Meningkatkan Kepedulian terhadap tetangga yang kekurangan pangan, 2. Meningkatkan Gotong-Royong	Meningkatkan Kebersamaan dan persatuan sesama warga utamanya dalam saling berbagi akan kebutuhan pokok keluarga	Masyarakat

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
83.	Lomba Nyekar Jawi Puri Jenggolo Fest	Melestarikan Budaya Tembang Jawa Meningkatan masyarakat nyekar jawi	Budaya nyekar jawi tetap terjaga dan lestari ditengah-tengah peradaban modern.	Masyarakat
84.	Kerajinan *Handmade* yang Hits di Temanggung	1. Meningkatkan produk kerajinan 2. Meningkatkan kreatifitas masyarakat	Meningkatkan ekonomi masyarakat	Masyarakat
85.	Tradisi Punggahan Pasar Legi parakan	1. Nguri-uri budaya 2. Menjaga persatuan dan kesatuan antar pedagang pasar legi	Terjaganya kerukunan dan kebersamaan antar pedagang pasar	Masyarakat
86.	Metode Hitung Jari Takukaba	Meningkatkan Siswa/siswi gemar berhitung	Siswa mudah dan cepat dalam belajar menghitung	Masyarakat
87.	Sampah Daun Nanas Menjadi Kapas dan Benang untuk Kebutuhan Tekstil Masa Depan (*Zero Waste Fashion*)	Meningkatkan nilai ekonomi serat nanas, Diserfikasi produk serat nanas sebagai alternatif bahan tekstil bebas sampah	Meningkatkan ekonomi Masyarkat Pengembangan industri tekstil masa depan	Masyarakat
88.	Efektivitas Alat 'SITATO' Berbasis Aplikasi Blynk dalam Pemanfaatan Limbah Air Wudu melalui Metode *Storage* Dam	Limbah Air Wundu dapat digunakan untuk menyiram tanaman dan perikanan	Limbah air wundu berdampak ekonomis	Masyarakat
89.	Coolcoff (Minuman Kulit Kopi)	1. Meningkatkan Nilai Ekonomi Kulit Kopi 2. Kulit Kopi dapat untuk meningkatkan kesehatan	Harga Jual kulit kopi meningkat, dapat menambah peningkatan pendapatan petani kopi	Masyarakat
90.	TESAMO (Tempat Sampah Otomatis)	1. Mempermudah membuang sampah tanpa harus menyentuh tempat sampah 2. Mengurangi kontak langsung dengan tempat sampah, sehingga lebih higienis 3. Membantu mengurangi penumpukan sampah 4. Membantu petugas kebersihan memantau kapasitas tempat sampah	Mengurangi pencemaran lingkungan	Masyarakat
91.	Tinta Cocograph, Pemanfaatan Arang Tempurung Kelapa Sebagai Bahan Baku Tinta Organik	Bahan Baku Tinta Alternative	Meningkatkan Nilai ekonomi Tempurung Kelapa	Masyarakat
92.	Budidaya Kopi Robusta dengan memanfaatkan Batang Kopi Excelsa	1. Meningkatkan Produksi Tanaman Kopi 2. Tanaman kopi lebih kuat dan tahan penyakit	Meningkatkan pendapatan petani	Masyarakat

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
93.	Karya Seni Limbah Kardus	Meningkatkan nilai ekonomis limbah kardus Meningkatkan kreatifitas masyarakat	Meningkatkan ekonomi masyarakat	Masyarakat
94.	Pemberdayaan Kelompok Tani dan Pengenalan Alat Komposter sebagai Pengurai Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik Padat dan Cair	1. Mengurangi volume sampah yang dibuang 2. Menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi 3. Mengurangi kebutuhan pupuk kimia 4. Meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman	1. Meningkatkan SDM Kelompok Tani, 2. Meningkatkan ekonomi Petani	Masyarakat
95.	Preservasi dan Konservasi Manuskrip Kuno (Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan)	Menjaga dan melestarian informasi obyek budaya agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang	Obyek kebudayaan tetap terjaga dan lestari	Masyarakat

Sumber: Litbang BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

2.4.2 Program Unggulan Daerah

Berdasakan Tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional tahun 2026 yaitu Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif dan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yaitu "Temanggung untuk Semua" (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, dan Aman).

Untuk mendorong percepatan tercapainya tujuan Pembanagunan Kabupaten Temanggung tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Temanggung membuat sebuah terobosan inovasi **"MAHKOTA TRIANCALA" MA**syarakat Seja**H**tera, E**KO**nomi **TA**ngguh, Peles**T**a**RI**an Lingkung**AN** Peren**CA**naan Berke**LA**njutan, dengan program prioritas pembangunan berbasis kearifan lokal ***"One Village One Superior Product"*** **(Satu Desa Satu Produk Unggulan)**. Adapun ruang lingkup inovasi tersebut meliputi peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan komoditas unggulan hulu-hilir. Inovasi ***"One Village One Superior Product"*** berfokus pada pengembangan potensi desa dalam mendukung percepatan tercapainya Program Pemerintah Kabupaten Temanggung dibidang Peningkatan Sumberdaya Manusia dan peningkatan ekonomi masyarakat. Produk unggulan yang diangkat diharapkan mampu memecahkan permasalahan di desa, diutamakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun jenis produk unggulan dapat meliputi; Pengembangan Desa Wisata, Pengembangan Home Industri, Pengembangan UMKM, Pengembangan Produk Pertanian (Perikanan, Peternakan dan Perkebunan), Pelestarian Lingkungan, Digitalisasi, dan lain-lain.

Dengan adanya inovasi tersebut setiap desa fokus pada produk prioritas dari hulu-hilir sehingga produk tersebut benar-benar mampu menjadi solusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adapun pemerintah kecamatan memfasilitasi pembinaan dan mengelompokan jenis-jenis produk ditingkat kecamatan untuk dapat ditindaklanjuti di Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten melakukan fasilitasi pembinaan dan mengelompokan jenis-jenis produk untuk bisa di tindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan. Selanjutnya dari hasil monitoring dan evaluasi dapat ditentukan produk-produk yang dapat diangkat menjadi produk unggulan daerah untuk dapat ditindaklanjuti menjadi branding produk daerah yang mempunyai daya saing tinggi.

Inovasi ***"One Village One Superior Product"*** melibatkan berbagai

pihak baik unsur pemerintah, pengusaha, komunitas, akademisi dan masyarakat. Didalam mempermudah pelaksanaan inovasi tersebut diperlukan adanya tim tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kabupaten Temunggung berada di wilayah yang sangat strategis yaitu terletak di bagian tengah Pulau Jawa dikenal jarak 0 km pulau jawa, dan berada di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan utara ke selatan sekitar 46,8 Km dan timur ke barat sekitar 43 Km. Berada di antara 3 (piramida) yaitu Candi Borobudur Kabupaten Magelang peninggalan Mataram Kuno Dinasti Syailendra ke selatan 43 Km, Candi Gedong Songo Kabupaten Semarang peninggalan kerajaan Mataram Kuno Dinasti Sanjaya ke utara 45 Km , dan Candi Dieng Kabupaten Wonosobo merupakan candi hindu tertua Mataram Kuno Dinasti Sanjaya ke arah barat 44,5 Km. Berada di 3 (tiga) lintas jalur perekonomian Jogjakarta, Semarang dan Purwokerto.

Keberadaan wilayahnya yang berada diantara 3 (tiga) Gunung Sumbing, Sindoro dengan ketinggian dan Prahu, membuat Kabupaten Temanggung dikenal dengan daerah yang sejuk antara suhu 18°C sd 30°C, panorama yang indah apalagi ketika kita bisa berada di puncak-puncak gunung, Gunung Sumbing dengan ketinggian 3.371m dpl, Sindoro dengan ketinggian 3.153m dpl, dan Gunung Prahu dengan ketinggian 2.565m dpl, membuat manusia semakin rendah diri dan senatiasa memuji kebesaran atas keagungan sang pencipta bumi dan langit, betapa indahnya taman-taman yang diciptakan-NYA begitu memukau seraya berada di alam kayangan diantara bayang-bayang matahari kembar, yaitu matahari mulai menampakan keperkasaanya (sunrise) dan matahari mulai meninggalkan jejak-jejak kenangan romantis (sunset), membuat pengalaman yang takan pernah terlupakan.

Dukungan curah hujan yang relaif tinggi di kabupaten Temanggung berkisar antara 1000 hingga 3100 mm per tahun, memberi kontribusi terhadap kesuburan tanah yang memanjakan masyarakat Kabupaten Temanggung sebagian besar matapencahariannya bertani yaitu sejumlah 173.992 orang atau 42,48% dari jumlah penduduk Temanggung yang bekerja yaitu 409.555 orang (Buku Statistik Kabupaten Temanggung, 2024), yang didukung dengan luas lahan

pertanian mencapai 57.682,41 ha (66,69%) dari luas wilayah Kabupaten Temanggung yaitu 86.483, 41 ha, yang terdiri dari kawasan holtikultura (14.140,38 Ha), Kawasan perkebunan (25.871,49 Ha) dan Kawasan Tanaman Pangan (17.670,54 Ha).

Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 (ST2023), menunjukkan bahwa lima subsektor terbesar di Kabupaten Temanggung berdasarkan jumlah rumah tangga usaha pertanian adalah perkebunan 90.330 unit, hortikultura 80.744 unit, peternakan 58.621 unit, tanaman pangan 45.588 unit, dan kehutanan 37.858 unit. Rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang memelihara/ menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar sehingga masing-masing subsektor berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi lokal (BPS Kab.Temanggung, 2024). Adapun produk primadona dari lima sub sektor tersebut adalah Tembakau, Cabe, Bawang, Kopi, Gula Aren, Domba, Ayam Kedu dan Kayu Albasia.

Masyarakat Kabupaten Temanggung terkenal dengan gaya hidup pekerja keras dan mandiri, hal ini dibuktikan dengan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif kecil 2,35% dan terdokumentasi terendah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024, dan terdapat 28.500 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM (DINKOPDAG), yang mencakup berbagai sektor seperti kuliner, fashion, agribisnis, kerajinan, dan perdagangan.

Untuk meningkatkan daya tarik para tourism ke Kabupaten Temanggung guna mercepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah mendorong terhadap pembangunan kepariwisataan, baik yang dikelola oleh Pemerintah, Desa dan Swasta. Ada 28 (dua puluh delapan) desa yang telah ditetapkan oleh Bupati Temanggung sebagai Desa Wisata dan ada setidaknya 24 (dua puluh empat) destinasi wisata yang telah dipersiapan untuk bisa dikunjungi berbagai acara, liburan, edukasi, refresing, meningmati jajanan kuliner, dll. Jumlah kunjungan wisata tahun 2024 mencapai 606.000 orang, mengalami peningkatan dari target 500 orang yang ditetapkan ditahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 5,04%. Perekonomian Temanggung pada tahun 2024 mencapai 28.923,60 miliar rupiah atas dasar harga berlaku dan 17.855,60 miliar rupiah atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan

ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,01%. dan lebih tinggi daripada pertumbuhan Ekonomi tingkat jawa Tengah sebesar 4,95%, serta lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Nasional 5,03%.

Potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Temanggung ternyata belum memberikan dampak yang optimal terkait dengan peningkatan kesejahteran masyarakat, hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, ditahun 2024 hanya mengalami kenaikan 0,03%. Selain itu Angka stunting di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 27,3 persen, meningkat dari 25,1 persen pada tahun 2023. Ini menempatkan Temanggung pada peringkat pertama daerah dengan kasus stunting tertinggi di Jawa Tengah. Sedangkan Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,67%. berkisar 68 ribu jiwa penduduk Kabupaten Temanggung tergolong miskin berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung.

Kabupaten Temanggung **memiliki 266 desa dan 23 kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014** memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri. **Desa bukan lagi sebagai objek tapi sebagai subyek dalam pembangunan,** desa memiliki hak dan kewajiban untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. **Masyarakat** desa dilibatkan **secara aktif** untuk **berpartisipasi** dalam **proses pembangunan**, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan. Sedangkan **Pemerintah daerah** dan **pusat** berperan sebagai **fasilitator, supervisor**, dan **pendukung** bagi desa dalam melaksanakan **pembangunan**.

Produk unggulan desa berdaya saing bukan hanya tentang menghasilkan barang berkualitas, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan **lima pilar pengembangan: skala ekonomi, akses pasar, pemutusan jalur distribusi, sarana pasca panen, dan permodalan yang mudah**, desa dapat menciptakan produk yang kompetitif di pasar global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa yang berdaya saing adalah desa yang mampu mengoptimalkan potensinya, menjaga

identitas lokal, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

Berdasakan Tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional tahun 2026 yaitu **Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif** dan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yaitu "**Temanggung untuk Semua "(Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, dan Aman)"**.

Dengan melihat kondisi tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Temanggung membuat strategi untuk melaksankan Percepatan Pembangunan Kabupaten Temanggung di tahun 2026 melalui Program Unggulan Daerah **"MAHKOTA TRIANCALA" MA**syarakat Seja**H**tera, E**KO**nomi **TA**ngguh, Peles**T**a**RI**an Lingkung**AN** Peren**CA**naan Berke**LA**njutan, dengan program prioritas pembangunan berbasis kearifan lokal ***"One Village One Superior Product"* (Satu Desa Satu Produk Unggulan)**. Adapun **ruang lingkup inovasi** tersebut meliputi **peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan komoditas unggulan hulu-hilir**. Inovasi "***One Village One Superior Product"*** berfokus pada **pengembangan potensi desa** dalam mendukung **percepatan tercapainya** Program Pemerintah Kabupaten Temanggung dibidang **Peningkatan Sumberdaya Manusia dan peningkatan ekonomi masyarakat**. Pada dasarnya program ini sudah dilaksakan tahun-tahun sebelumnya namun pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan harpan sehingga masih perlu didorong kembali, karena program ini masih selaras dengan Program Pemerintah Pusat terkait dengan Asta Cita Poin 3 (tiga) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur dan Poin 6 (enam) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, sekaligus mendukung suksesnya program **Koperasi Merah Putih**.

Dengan pengelolaan desa yang tepat tentunya setiap desa akan melahirkan produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. setiap desa memiliki potensi untuk mengembangkan produk unggulan yang khas dan bernilai. Produk unggulan ini dapat menjadi daya tarik desa, meningkatkan perekonomian, dan memberdayakan masyarakat setempat.

Untuk mendapatkan produk unggulan yang sesuai harapan

diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu;

1. Identifikasi Potensi: Melakukan riset dan analisis potensi desa untuk menemukan produk yang tepat.
2. Pengembangan Produk: Memastikan kualitas, keunikan, dan daya saing produk.
3. Pemasaran: Membangun merek, kemasan, dan strategi pemasaran yang kuat.
4. Kemitraan: Bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Untuk mendukung terlaksananya Program Produk Unggulan Daerah dengan baik dan sesuai harpan, pemerintah daerah bersama stakeholders terkait melakukan perencanaan penentuan dan pengembangan produk, peningkatan kapasitas SDM dan manajemen usaha, penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan nilai produk, pemasaran yang efektif, pemanfaatan teknologi dan kemitraan/kolaborasi.

B. Keterkaitan Program Unggulan dengan Tema Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan

Melalui **Program Unggulan Daerah "MAHKOTA TRIANCALA"** **MA**syarakat Seja**H**tera, E**KO**nom**i TA**ngguh**,** Peles**T**a**RI**an Lingkung**AN** Peren**CA**naan Berke**LA**njutan, dengan program prioritas pembangunan berbasis kearifan lokal **"*One Village One Superior Product*" (Satu Desa Satu Produk Unggulan)**. Melalui peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan komoditas unggulan hulu-hilir. Dapat memfasilitasi dan memberikan harapan besar bagi desa-desa untuk lebih cepat berkembang dan maju dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, penurunan angka stanting dan penurunan kemiskinan di desa masing-masing. Dengan adanya produk unggulan dimasing-masing desa yang mempunyai prospek terhadap pasar tinggi akan meningkatkan lapangan kerja dan ekonomi berkelanjutan.

Pengelolaan Produk Unggulan Desa dari hulu-hilir akan mempermudah Pemerintah Desa dalam membranding produk yang mampu membuka pasar yang lebih luas.

Program unggulan tersebut direncanakan secara berkesinambungan dan tercantum dalam dokumen perencanaan Kabupaten Temanggung, dan secara eksplisit mendukung pertumbuhan

tinggi berkelanjutan, yaitu sebagai berikut :

1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

   Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten berupa pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan.

2) RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045

   Arah kebijakan "Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor ekonomi", dengan tahapan pada tahun 2025-2029 adalah penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Temanggung, di mana pemerintah daerah memastikan pengelolaan sumber daya dengan efisien, meminimalkan risiko, dan mengoptimalkan hasil ekonomi untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan daerah berkelanjutan

3) RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

   Strategi "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan"

4) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

   Prioritas daerah : Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan

5) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

   Prioritas daerah : Pemulihan ekonomi

6) RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

   Prioritas daerah : Percepatan pertumbuhan ekonomi

C. Relevansi dengan Konsep Perencanaan Berbasis THIS

Pendekatan THIS diimplementasikan dalam perencanaan program unggulan sehingga terwujud perencanaan dan pelaksanaan program unggulan secara lebih terarah, komprehensif, dan berkelanjutan. Secara rinci sebagai berikut :

1) **Tematik**, perencanaan program unggulan berbasis tematik, yaitu pada prioritas pembangunan daerah, salah satunya adalah Satu Desa Satu Produk Unggulan;

2) **Holistik**, perencanaan program unggulan memperhatikan berbagai sektor secara menyeluruh, antara lain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan (mengurangi pencemaran lingkungan, menjaga kualitas tanah/air/ekosistem, dan meningkatkan keanekaragaman hayati), perekonomian (meningkatkan produksi

dan kualitas hasil pertanian), dan sosial (meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan kohesi sosial, dan memperkuat ketahanan pangan).

3) **Integratif**, perencanaan program unggulan dilakukan dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga sehingga terwujud kolaborasi.

4) **Spasial**, perencanaan program unggulan mempertimbangkan kondisi geografis yang berupa dataran tinggi dan pegunungan serta iklim yang cocok untuk sektor pertanian yaitu kopi dan domba, serta memperhatikan RTRW dan peta tematik sebaran domba dan kopi.

D. Tujuan dan Sasaran

1. **Meningkatkan Ekonomi Desa**: Produk unggulan dapat menjadi sumber pendapatan bagi desa dan masyarakat, serta menarik investasi.
2. **Menciptakan Lapangan Kerja**: Pengembangan produk unggulan dapat membuka lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran.
3. **Membangun Identitas Desa**: Produk unggulan dapat menjadi ciri khas desa dan meningkatkan citra positif desa.
4. **Mendorong Pemberdayaan Masyarak**at: Pengembangan produk unggulan melibatkan masyarakat dalam proses produksi dan pemasaran, sehingga meningkatkan kemampuan dan rasa memiliki.
5. **Membangun Identidas Kecamatan**; Produk unggulan tiap desa dapat membranding dan meningkatkan produk unggulan di tingkat kecamatan.
6. **Meningkatkan Daya Saing Daerah**; Pemerintah Daerah dapat memetakan produk-produk unggulan yang dapat untuk dikembangkan secara **Regional, Nasional dan Internasional.**

7. Ruang Lingkup Program Unggulan

Ruang lingkup substansi program unggulan adalah Mencakup pengembangan produk unggulan yang ada di seluruh Desa di wilayah Kabupaten Temanggung.

8. Muatan Program Unggulan dalam Dokumen Perencanaan

Program unggulan tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RKPDes, RKPD Kabupaten Temanggung maupun Renja Perangkat Daerah terkait.

2. Kerangka Program Unggulan

A. Permasalahan

1) Anggaran Pemerintah Kabupaten Terbatas;
2) Penangangan Prioritas Pembangunan Desa/Kelurahan belum Tertangani secara Optimal;
3) Keterbatasan SDM di Desa;
4) asaran Pembangunan ada di Desa;
5) Fasilitasi Perangkat Daerah belum Optimal

B. Input

1) Potensi Desa:

a) Kearifan Lokal: Identifikasi nilai-nilai budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal yang unik pada suatu desa.
b) Sumber Daya Alam: Potensi sumber daya alam yang melimpah dan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi.
c) Keterampilan Masyarakat: Keahlian dan keterampilan yang dimiliki masyarakat dalam bidang tertentu, misalnya kerajinan tangan atau pengolahan makanan

2) Produk Unggulan:

a) Produk Berbasis Lokal: Produk yang dihasilkan harus berasal dari bahan baku lokal dan memiliki ciri khas daerah.
b) Kualitas dan Keunikan: Produk harus memiliki kualitas yang baik dan memiliki ciri khas yang membedakannya dari produk lain.
c) Potensi Pasar: Produk memiliki potensi untuk dipasarkan baik di pasar domestik maupun internasional.

3) Dukungan:

a) **Pemerintah**: Dukungan kebijakan, pendampingan, pelatihan, akses permodalan, serta promosi produk.
b) **Masyarakat**: Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses produksi, pemasaran, dan pengembangan produk.
c) **Infrastruktur**: Ketersediaan infrastruktur yang mendukung produksi dan pemasaran produk, seperti jalan, listrik, dan akses informasi.

4) Sumber Anggaran

APBDes, APBD Kab., APBD Prov. APBN, Perbanksn, Investor, TJSlP, Mitra Kerja.

5) Kelembagaan

Terdapat Tim Pelaksana mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

6) **Inisiator dan Penanggung Jawab Pelaksana**

Inisiator program unggulan adalah perangkat daerah yaitu Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan, sedangkan penanggung jawab pelaksana program unggulan adalah Bupati Temanggung

7) **Institusi/*stakeholders* lain yang terlibat**

Pemerintah, Masyarakat/komunitas, Pelaku usaha, Akademisi, Media

8) **Pemanfaatan teknologi**

Teknologi yang dimanfaatkan antara lain *smart farming,* stek berakar kopi, teknik pemuliaan mutu genetik ternak, alat agrikultur dan produksi/hilirisasi, *market place*, jaringan internet desa dan pemanfaatan media elektronik.

9) **Sarana dan prasarana yang diperlukan**

Rumah produksi, Rumah Singgah Produksi Unggulan, dan alat pengolahan, Sarana publikasi dan alat transportasi.

C. Proses

1) Sosialisasi; Mengadakan sosialisasi One Village One Superior Produk;
2) Menentukan Program; Membuat Program yang Efektif dan Efisien;
3) Mempersiapkan SDM; Meningkatkan kualitas SDM Desa untuk mampu Menyusun Program Unggulan Secara Sistematik dan lebih baik;
4) Menentukan Produk Unggulan; Mendorong Produk yang sudah berjalan dan berpotensi untuk dikembangkan, dan Membuat Klaster-Klaster Produk yang mempunyai Kesamaan dan beririsan;
5) Fasilitator; Menentukan Koordinator Tim Fasilitasi dan Pembinaan Serta Pendampingan Hulu-Hilir secara intensif;
6) Barnding Produk; Menentukan Produk yang mampu untuk diangkat menjadi Branding Daerah, Gelar Produk Unggulan di Tingkat Kecamatan, Memberikan Penghargaan Kepada Produk Unggulan Tingkat Kecamatan;
7) PENGHARGAAN; Memberikan Penghargaan Kepada Desa/Kelompok Terbaik yang berkontribusi terhadap Produk terbaik dan Penghargaan Kapada Kecamatan Terbaik dalam fasilitasi Produk Unggulan.

D. Output

Diperolehnya produk-produk unggulan dari desa/kelurahan yang memiliki ciri khas, kualitas baik, dan berpotensi untuk dipasarkan secara luas, baik domestik maupun global.

1) Produk Unggulan:
   Produk-produk yang dihasilkan unik, memiliki ciri khas daerah, dan berkualitas tinggi. Produk ini bisa berupa makanan, kerajinan tangan, tekstil, Jasa, Pertanian, Destinasi Wisata, atau produk lain yang memanfaatkan sumber daya lokal.
2) Peningkatan Pendapatan UMKM:
   UMKM di desa/kelurahan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui penjualan produk unggulan.
3) Pengembangan Ekonomi Lokal:
   Berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk, dan menarik minat investasi.
4) Perluasan Pasar:
   Produk Unggulan didorong untuk menembus pasar yang lebih luas, baik pasar domestik maupun internasional.
5) Pemberdayaan Masyarakat:
   Melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan produk, sehingga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi mereka.
6) Pelestarian Kearifan Lokal:
   Menekankan penggunaan bahan baku lokal dan menjaga kearifan lokal dalam proses produksi.
7) Peningkatan Kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia:
   Peningkatan kualitas produk melalui pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha.

E. *Outcome* dan Dampak

1) Outcome: Terjadinya peningkatan pendapatan pelaku usaha, perluasan pasar, peningkatan kualitas produk, pengembangan potensi daerah dan kearifan lokal, serta peningkatan daya saing daaerah.
2) Dampak: Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal, berkembangnya industri kreatif di desa, berkembangnya pelestarian budaya lokal, Peningkatan partisipasi aktif masyarakat, Peningkatan kualitas Hidup, Jaringan

pasar semakin luas, Peningkatan citra produk dan Peningkatan kontribusi terhadap PDRB

3. **Keberlanjutan dan Potensi Replikasi ke Wilayah Lain**

   Adanya event promo produk unggulan desa di setiap Kecamatan satu kali dalam satu masa tahun anggaran.

   1) Kecamatan Pringsurat ; Pringsurat Ngangeni
   2) Kecamatan Bansari : Eling Bansari
   3) Kecamatan Ngadirjo : Ngadirjo Rejeh
   4) Kecamatan Kledung : Kledung Pesona Alam
   5) Kecamatan Parakan : Kota Pusaka Parakan

2.5 PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN TEMANGGUNG

Kabupaten Temanggung mempunyai prestasi dan menerima banyak penghargaan baik skala provinsi, nasional maupun internasional dari berbagai bidang lomba/kompetisi. Pencapaian tersebut merupakan apresiasi sekaligus memberikan semangat untuk berkarya dan berprestasi yang lebih baik di masa mendatang. Berikut penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2019-2024.

Tabel 2.331
Jumlah Penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2024

No	Tahun	Jumlah Penghargaan		
		Regional	Nasional	Internasional
1.	2019	10	26	5
2.	2020	8	17	6
3.	2021	15	20	2
4.	2022	34	19	3
5.	2023	38	35	5
6.	2024	8	13	2

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Daftar penghargaan yang yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.332
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	***Internasional* GACC** Open di Malaysia	Federasi Catur Malaysia (MAS)	Internasional	Dindikpora
2	**Kejuaraan Renang *Internasional*** Thailand Sport School Games	Kementrian Pariwisata dan Olahraga Thailand	Internasional	Dindikpora
3	**Kejuaraan Karate**	Rektor Universitas	Internasional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Internasional di Surakarta (*South East Asean University Karate Championship*) Juara II	Sebelas Maret		
4	***Internasional*** Kejuaraan Sepatu Roda di Surakarta	Walikota Surakarta	Internasional	Dindikpora
5	**Kejuaraan Karate *Internasional*** di Surakarta (*South East Asean University Karate Championship*) Juara III	Rektor Universitas Sebelas Maret	Internasional	Dindikpora
6	Juara II Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Nasional	Bappeda
7	Juara Harapan I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II Tahun 2019	Menteri Dalam Negeri	Nasional	Dinpermades
8	Kabupaten Stop BABS/ODF	Menteri Kesehatan	Nasional	Dinas Kesehatan
9	STBM Berkelanjutan Tahun 2019	Menteri Kesehatan	Nasional	Dinas Kesehatan
10	Sanitarian Puskesmas Terbaik Kabupaten SBS (ODF) 100% Tahun 2019	Dirjen Kesmas Kemenkes RI	Nasional	Dinas Kesehatan
11	Penghargaan Kabupaten Terbaik Pendataan ERDKK dan Implementasi Kartu Tani 2019 (Kriteria Kecepatan,Komunikasi,&Koordinasi,Kerjasama,Realisasi Penggunaan kartu Tani)	Kementerian Pertanian	Nasional	Dintanpangan
12	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3	Deputi Kepala BKPK Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Nasional	Inspektorat
13	Pengembangan Hilirisasi dan Kewirausahaan Bidang Perkebunan	Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian	Nasional	Dintanpangan
14	Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama Tahun 2019	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPKBPPA
15	BUMD Terbaik di Indonesia Tahun 2019	Top Business	Nasional	PD Bank Pasar Temanggung
16	Top Pembina BUMD 2019	Top Business	Nasional	Bupati Temanggung
17	Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil 2019	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	Kabupaten Temanggung
18	Juara I Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinpermades
19	Peringkat II kategori Pembina Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara Provinsi Jawa Tengah 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinas Pertanian
20	Juara I Kabupaten Kota Bertransaksi Kartu Tani Terbanyak	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dintanpangan
21	Duta Lingkungan Sehat STBM Kategori Anak Sekolah	Gubernur Jawa Tengah	Regional Peringkat I	Dinas Kesehatan
22	Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi di Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional Peringkat II	Dinas Kesehatan
23	Pelaksana Terbaik PHBS Tk	Gubernur Jawa	Regional (Juara	Dinas

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Provinsi Jawa tengah	Tengah	Harapan III)	Kesehatan
24	Juara II Stand Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DinPerindag Kop dan UMKM
25	Juara III Pesona Produk Kriya Dekranasda Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DinPerindag Kop dan UMKM
26	Juara III Penghargaan *Central Java's Potensial Investment Challenge (CJPIC)*	Keris Jateng	Regional	DPMPTSP
27	***Nasional*** Catur Piala Ketua DPR RI di Jakarta	Ketua DPR Republik Indonesia	Nasional	Dindikpora
28	***Kejurnas*** Atletik di Cibinong Bogor Juara I	PB PASI (Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)	Nasional	Dindikpora
29	**Nasional** Kejuaraan Renang Terbuka se Indonesia di Yogyakarta Juara I	Walikota Yogyakarta	Nasional	Dindikpora
30	***Nasional*** Wushu Junior di Pangkalpinang	Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia	Nasional	Dindikpora
31	***Nasional*** Wushu Junior di Semarang Juara I	Rektor Universitas Negeri Semarang	Nasional	Dindikpora
32	***Nasional*** Wushu Championsip di Yogyakarta	Asosiasi Pemersatu Orangtua Siswa Sasana Wushu Indonesia Sinduadi (APASI)	Nasional	Dindikpora
33	**Nasional** Kemah Budaya di Jakarta	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Nasional	Dindikpora
34	**Nasional** Kejuaraan Renang terbuka se Indonesia di Yogyakarta Juara II	Walikota Yogyakarta	Nasional	Dindikpora
35	***Nasional*** Wushu Junior di Semarang Juara II	Rektor Universitas Negeri Semarang	Nasional	Dindikpora
36	Nasional Lomba O2SN Tingkat Nasional di Semarang	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Nasional	Dindikpora
37	***Nasional*** Lemkari Piala Menpora di Jakarta	Menteri Pemudan dan Olahraga	Nasional	Dindikpora
38	***Kejurnas*** Atletik di Cibinong Bogor Juara II	PB PASI (Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)	Nasional	Dindikpora
39	***Nasional*** Championship BMX di Temanggung	Gubernur Jawa Tengah	Nasional	Dindikpora
40	***Nasional*** Kejuaraan Renang Antar Sekolah dan Mahasiswa di Yogyakarta	Gubernur AAU Cup	Nasional	Dindikpora
41	Tari Konceran, Juara I Festival Tari Tingkat Provinsi Jateng	Gubernur Jateng	Regional	Dinas Pariwisata

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 (data diolah)

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.333
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara I Perencanaan Pembangunan Daerah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bappeda

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	tingkat Provinsi Jawa Tengah			
2	Juara I Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Nasional	Bappeda
3	IGA (Inovation Government Awaard) Nominasi 10 besar Kabupaten Terfavorit Tingkat Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Nasional	Bappeda
4,	Juara Utama (Drone Semprot Pertanian Otomatis) dan Juara Favorit (Hidroponik Organik) Krenova masyarakat Tingkat Provinsi	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bappeda
5	Juara III Kategori Pasar Anugerah IDSD Tingkat Prov, Jateng	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bappeda
6	Pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DPPAPPKB
7	Pemilihan kelompok Bina Keluarga Remaja Mutiara Kasih juara terbaik II	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DPPAPPKB
8	OPINI WTP yang ke 7	BPK RI	Nasional	BPPKAD
9	OPINI WTP yang ke 8	BPK RI	Nasional	BPPKAD
10	Juara I Kategori Desa Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinpermades
11	Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Pelayanan Masyarakat Tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Satpol
12	Juara 1 Nasional Wushu Online (7 medali emas)	Wushu Indonesia Provinsi Bali	Internasional	Dindikpora
13	Nasional Taekwondo Poomsae virtual juara 1	Taekwondo Indonesia Provinsi Banten	Internasional	Dindikpora
14	Juara 2 Nasional Wushu Online Se Indonesia (3 medali perak)	Wushu Indonesia Provinsi Bali	Internasional	Dindikpora
15	Juara 1 dan 2 Balap sepeda Internasional Sirkuit BMX di Banyuwangi (2 medali emas dan 3 medali perak)	Banyuwangi Internasional BMX	Internasional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
16	Juara 2 Balap Sepeda tingkat Nasional pada PON	PB PON	Nasional	Dindikpora
17	Juara 1 Balap Sepeda pada International Sirkuit BMX di Jakarta	DISPORA Provinsi DKI	Internasional	Dindikpora
18	Juara 3 Wushu pada Wushu Tournamen	Brunei Wushu Federation	Internasional	Dindikpora
19	Juara 3 Sepakbola Putri	Special Olympics Indonesia	Nasional	Dindikpora
20	Juara 1 Renang tingkat Nasional	Akademi angkatan Udara	Nasional	Dindikpora
21	Juara 1 menembak	Yon Armed 13 Kostrad Sukabumi	Nasional	Dindikpora
22	Juara 1 Wushu	UNNES	Nasional	Dindikpora
23	Juara 1 Renang	PARASWIM Indonesia	Nasional	Dindikpora
24	Juara 1 Pencak silat	IPSI Yogyakarta	Nasional	Dindikpora
25	Juara 1 Tenis	PELTI kabupaten Bogor, Jabar	Nasional	Dindikpora
26	Juara 1 Tenis	PELTI kabupaten Pati, Jateng	Nasional	Dindikpora

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2020 (data diolah)

Pada tahun 2019 Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 2 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional untuk kategori Kabupaten Terbaik, Prestasi ini berlanjut pada tahun 2020, Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional, Pengumuman disampaikan oleh Kepala Bappenas bersamaaan dengan pelaksanaan Musrebangnas Tahun 2020 secara virtual pada hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020.

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.334
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara I Lomba Penerapan Hygiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan oleh CV, Sumber Gizi Desa Kedu Kec, Kedu tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Juara II Tingkat Pengangguran Terbuka	Sekda Provinsi Jawa Tengah	Regional	Diperinaker

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	(TPT) terendah tingkat Provinsi Jawa Tengah			
3	Kategori Kabupaten Inovatif	Kemendagri	Nasional	Bappeda
4	Kota Layak Anak Kategori Madya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional	BKPBPPPA
5	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional	BKPBPPPA
6	OPINI WTP yang ke 9	BPK RI	Nasional	BPKPAD
7	Shibiru Pewarna Alam dari tanaman Stobilantes Cusia,	Juara 2 (dua) tingkat Provinsi Jateng	Regional	Bappeda
8	Lift Cor Beton Ekonomis (LCBE)	10 besar tingkat Provinsi Jawa Tengah	Regional	Bappeda
9	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (SBM)	Terbaik Pertama di Tingkat Nasional	Nasional	DKK
10	Sekolah Adiwiyata Nasional kepada SMP N 1 Kandangan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	Dindikpora
11	Medali Perak bidang Lomba Matematika pada kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SMP tingkat Nasional	Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Nasional	Dindikpora
12	juara 1 (emas) kejuaran Nasional Championship Karate	Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)	Nasional	Dindikpora
13	juara 1 (emas) Open virtual Wushu Tournament 2021 Putra	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora
14	juara 1 (emas) Open virtual Wushu Tournament 2021 Putri	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora
15	Juara 1 (emas) Taekwondo Championship Menpora Cup	Pengurus Besar Taekwondo Indonesia	Nasional	Dindikpora
16	Juara 2 (perak) Open Virtual Wushu Tournament 2021	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora
17	Juara 2 (perak) tenis lapangan Walikota Tegal Cup XIII tahun 2021	Pengkab PELTI (Persatuan Lawn Tenis Indonesia) Kabupaten Tegal	Nasional	Dindikpora
18	Juara 3 (perunggu) Open Virtual Wushu Tournament 2021	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 (data diolah)

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 sebagaimana

disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.335
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	eRTe FM Raih Penghargaan Terbaik Radio Ramah Anak dalam Indonesia Persada,ID Award III Tahun 2022	Wakil Ketua Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Indonesia Persada	Nasional	KOMINFO
2	Temanggung Menerima Penghargaan Indikiasi Geografis Terbanyak se Indoensia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	Nasional	BAPPEDA
3	Temanggung Raih penghargaan atlet taekwondo SEA Games	PANITIA SEA GAMES	Nasional	DINDIKPORA
4	KPU Temanggung Dapat Penghargaan Menuju Informatif	Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng	Nasional	KPU
5	Artikel ini telah tayang di TribunJogja,com dengan judul PROFIL Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq, Penerima Penghargaan Tribun Inspiring Award	Tribun Inspiring Award	Nasional	KOMINFO
6	Ketiga Kalinya Temanggung Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA)	Nasional	DPPPAPPKB
7	DINDA PUTRI LESTARI, ATLET TAEKWONDO TEMANGGUNG RAIH MEDALI EMAS PON XX PAPUA	Penyelenggara PON XX PAPUA	Nasional	DINDIKPORA
8	Wahyu Jati Atlet Paralympic Asal Temanggung Kejuaraan Dunia Cabang Atletik	Ketua Nasional Paralympic Committe Indonesia	Nasional	DINDIKPORA
9	Lomba Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Taruna se-Jawa Tengah	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Taruna se-Jawa Tengah Bupati Batang Cup 2022	Regional	DINDIKPORA
10	Kontingen Kabupaten Temanggung Raih 3 Medali Dalam Pospeda Tingkat Provinsi Jawa Tengah	POSPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	Regional	DINDIKPORA
11	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Wali Kota Magelang Cup 2022	Wali Kota Magelang Cup 2022	Regional	DINDIKPORA
12	Empat Santri Ponpes Al Mu'min Raih Prestasi Tingkat Nasional	Penyelenggara Olympiade Ahmad Dahlan (OlympicAD) dan Pekan Taaruf Seni Budaya dan	Nasional	DINDIKPORA

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
		Olahraga (Pentasbora) ke V		
13	Temanggung raih Olimpiade Sains Nasional 2022	Penyelenggara Olimpiade Sains	Nasional	DINDIKPORA
14	Kompetisi Bahasa Arab Nasional, Chilya `Ainul Jamilah berhasil menjadi Juara Harapan II sebagai wakil Jawa Tengah ke tingkat Nasional	Penyelenggara Olimpiade Bahasa Arab Tingkat Nasional	Regional	DINDIKPORA
15	Bela Rahma Sayida, warga Kabupaten Temanggung berhasil meraih prestasi di tingkat nasional, Ia menjadi juara kedua di ajang Duta Maritim Indonesia 2022	Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo)	Nasional	DINDIKPORA
16	Kontingen dari Kabupaten Temanggung berhasil meraih Juara Umum Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI) SMP X Tingkat Jawa	Penyelenggara MAPSI Jateng	Regional	DINDIKPORA
17	Alhamdulillah kontingen Kabupaten Temanggung dapat meraih peringkat VII se-Provinsi Jawa Tengah	Penyelenggara Gelaran MTQ XXIX	Regional	DINDIKPORA
18	MTs Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung kembali meraih juara, Kali ini kejuaraan datang dari cabang olahraga (cabor) Panahan Perorangan Putra	Penyelenggara OlympiapicAD dan Pentasbora	Regional	DINDIKPORA
19	MTs Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak meraih penghargaancabang olahraga (cabor) Judo	Penyelenggara OlympiapicAD dan Pentasbora	Regional	DINDIKPORA
20	RSUD Temanggung Memperoleh Piagam Penghargaan dari BPJS Cabang Magelang Sebagai Juara 1 Lomba Pelayanan Prima	BPJS Jateng	Regional	DINKES
21	Paduan Suara Dewasa Campuran	PESPARAWI Jawa Tengah	Regional	DINDIKPORA
22	Olimpiade Ma arif Tingkat Provinsi	Penyelenggara Olimpiade Makarif Jawa Tengah	Regional	DINDIKPORA
23	Siswa SMP Ngadirjo Juara Lari Atletik Lari	Popda Jateng	Regional	DINDIKPORA

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
24	ASN Terinovative (Dwi Sukarmei, ST,,MT,)	JAWA POS	Regional	BAPPEDA
25	Ketiga Kalinya Temanggung Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA),	Nasional	DPPPAPPKB
26	Sertifikat Warisan Tak Benda	KEMENDIKBUD	Nasional	DINBUDPAR
27	Kampoeng Pro Iklim Utama Nasional	Kementrian LHK	Nasional	DPRKPLH
28	Inovasi Rasa Mesra Mendapat Penghargaan Human Raights In Southeasty Asia	Human Raights In Southeasty Asia	Nasional	BAPPEDA
29	Ammar Amrullah merupakan salah satu atlit Wushu MI Negeri 1 Temanggung yang meraih medali Emas pada lomba yang dilaksanakan secara virtual oleh Pusaka Tantra pada tanggal 10-15 Mei 2021, Sebagai Juara 1 GS PA Group 5 tingkat nasional	Pusaka Tantra	Nasional	DINDIKPORA
30	Kepala daerah Yang Berkontriutif Nominasi LPM Award	penghargaan oleh LPM Award 2022	Nasional	DINPERMADES
31	Penghargaan Anugrah PDSD Juara 1 Ekosistem Inovasi Jawa Tengah	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
32	Penghargaan Anugrah Innovation Government Award 2022 Kabupaten Temanggung Terinovatif	Kementrian Dalam Negeri	Nasional	BAPPEDA
33	Penghargaan Krenova Minyak Kopi Herbal 10 besar Utama Tingkat Jawa Tengah	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
34	PPID Pemkab Temanggung Raih Penghargaan pada KIP Award	KIP Award	Nasional	KOMINFO
35	Bela Rahma Sayida,juara ke dua di ajang Duta Wisata Indonesia tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo),	Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo),	Nasional	DINBUDPAR

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
36	Kurnia Setyo Wulandari Kabupaten Temanggung berhasil meraih Juara I Lomba Baca Puisi Kreatif (LBPK) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Gaperto Jepara,	Yayasan Gaperto Jepara,	Nasional	DINDIKPORA

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (data diolah)

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.336
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara 2 Piala Presiden Kontes Kambing PE th 2023 tk Nasional Kelas Pejantan (Kelompok ternak cabe Farm Desa Tretep kecamatan Tretep)	Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI)	Nasional	DKP3
2	Juara 3 piala Presiden Kontes Kambing PE th 2021 tingkat Nasional kelas anakan indukan- Kelompok ternak Jalu Farm Desa Kertosari Kecamatan Jumo	Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI)	Nasional	DKP3
3	Juara 1 Tembakau varietas Kemloko 4 Festival Tembakau Lembutan Kategori Gunung pada Soropadan Agro Festival II tahun 2023(Bapak Chadik Mubarok) desa Bansari Kecamatan Bansari	Soropadan Agro Expo Festival II tahun 2023	Regional	DKP3
4	Juara 1 Kelompok Tani Ternak Berprestasi tingkat Provinsi Jawa tengah- KTT Taruna Karya Mudha	Provinsi Jawa Tengah	Regional	DKP3
5	Juara 1 Tingkat Nasional Penghargaan Mitra Bhakti Usaha -perusahaan yg telah melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)- PT Shoenary Javanesia Inc Kab Temanggung	Direktorat Jendral Masyarakat Kementrian RI	Nasional	PT Shoenary Javanesia Inc/ Dinkes/ Puskesmas Pare
6	Peringkat ke 4 tingkat Nasional Penghargaan Profil Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2023	Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan RI	Nasional	Dinkes

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
7	Sertifikasi Akreditasi Paripurna Puskesmas Parakan	Kementrian Kesehatan Republik Indonesia	Nasional	Dinkes/ Puskesmas Parakan
8	Sertifikat Bebas Frambusia-Apresiasi Kepala Daerah berhasil menangani penyebaran Neglected Tropical Disease (NTD)	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	Dinkes
9	Penghargaan kategori Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas terstandarisasi dan sebagai rujukan Nasional tahun 2022- Puskesmas Temanggung	DKPPPAPPKB Provinsi Jateng	Regional	DKPPPAPPKB Tmg/ Dinkes Tmg/ Puskesmas Tmg
10	Sekolah Adiwiyata Mandiri – SMP 6 Temanggung	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
11	Sekolah adiwiyata Nasional – SDN 3 Tuksongo	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
12	Sekolah Adiwiyata Provinsi - SD Muhammadiyah Parakan, MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak, SMP N 1 Kaloran, MTs Ma'arif Jumo	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Regional	DPRKPLH
13	Green Leadership Nirwasita Tantra-Pemerintah Daerah dan Ketua DPRD untuk Kategori Kabupaten Sedang	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
14	Green Leadership Nirwasita Tantra-Ketua DPRD untuk Kategori Kabupaten Sedang	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
15	Lomba Habitat Tingkat Provinsi Jawa Tengah-Juara 4 (Kel. Manggong Kec. Ngadirejo)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
16	LOMBA WANA LESTARI-terbaik I Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Nasional dan Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Provinsi (An. R. Gravita Eka Purnama)	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
17	Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Utama- 1. Desa Ketitang Kec. Jumo 2. Desa Batursari Kec. Kledung	Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan kebakaran hutan dan lahan wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	Nasional	DPRKPLH

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
18	Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya- Desa Petarangan Kec. Kledung	Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan kebakaran hutan dan lahan wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	Nasional	DPRKPLH
19	Nominator Penghargaan Kalpataru Nasional- Fatah Syaifur Rochman	Kementrian Lingkungan Hidup	Nasional	DPRKPLH
20	Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Perintis Lingkungan Hidup- Fatah Syaifur Rochman	Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
21	Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup- Bank Sampah Bumi Asri, Desa Banaran Kecamatan Tembarak	Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
22	Juara 1 Kategori Pelestarian Lingkungan Hidup dalam acara Anugerah Penyuluh Agama Islam Award tingkat Jawa Tengah- An Al Imron	Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
23	Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 11 atas Laporan Keuangan tahun 2022 Pemerintah Daerah Kab Temanggung	Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI	Nasional	BPKPAD
24	Kabupaten Terbaik 1 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Nasional tahun 2023	Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	Nasional	Bappeda
25	Kabupaten Terbaik 1 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	Gubernur Jawa Tengah	Nasional	Bappeda
26	Juara terbaik III tingkat Nasional SDG's award	Menteri PPN/ Bappenas	Nasional	Bappeda
27	Juara 1 Tingkat Nasional kategori News Anchor Anugerah Persada. Id Award ke IV – Lembaga penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Erte FM	Persada.Id (Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia)	Nasional	Radio Erte FM/ Dinkominfo
28	Juara 1 dalam Lomba Pertunjukan Rakyat (Petunra) FK Metra Tingkat Jawa tengah	FK Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional)/ Dinkominfo Provinsi Jateng	Regional	Dinkominfo
29	Desa Anti Korupsi dengan Predikat Istimewa- Desa Tanurejo Kecamatan Bansari	Provinsi Jateng	Regional	Inspektorat/ Dinpermades/ Dinkominfo

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
30	Opini Kualitas tinggi pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022	Ombudsman Republik Indonesia	Nasional	Ortala
31	Peringkat 4 Penilaian Evaluasi Smart City se Indonesia tahun 2022	Kementrian Kominfo	Nasional	Dinkominfo
32	Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bagian Hukum
33	Medali Emas Cabor Balap Sepeda BMX di ajang Asian Games 2023 di Hangzhou, China (amellya Nur Sifa)	Asian Games	Internasional	KONI/ Dindikpora
34	Medali Emas Cabor Catur tingkat Asia di Paragames Kamboja An. Farah Yumna Budiati (2 emas P dan 2 emas B)	Paragames Kamboja	Internasional	Dindikpora
35	Medali Perak Cabor Atletik tingkat Asia di Paragames Kamboja An. Slamet Wahyu Jati (1 Perak P dan 1 Perak B)	Paragames Kamboja	Internasional	Dindikpora
36	Medali Perak Cabor Wushu kejuaran Asia di Macau China An. Intan Anindya	Macau Cina	Internasional	Dindikpora
37	Medali Perunggu Cabor Wushu kejuaran Asia di Macau China An. Genta Ganda Prakoso	Macau Cina	Internasional	Dindikpora
38	Medali Emas Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Intan Anindya	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
39	Medali Emas Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Genta Ganda Prakoso	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
40	Medali Perak Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Pandu Dian Saputra	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
41	Medali Perak Cabor Kempo di POPNAS Palembang An. Talin Nabilla Putri	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
42	Medali Emas Cabor Atletik di Lari Trail Run Gunung Gajah An. Diva Setiyawan	Turnamen Jawa Tengah	Regional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
43	Medali Emas Cabor Lompat jauh di PEPARPEDA Surakarta An Nicholas Arya Naufal putra	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
44	Medali Emas Cabor Lompat jauh di PEPARPEDA Surakarta An. Diva Setiyawan	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
45	Medali Emas Cabor Atletik tuna runggu di PEPARPEDA Surakarta An. Navilla Ardiana	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
46	Medali Emas Cabor Atletik tuna runggu di PEPARPEDA Surakarta An. Zulaika	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
47	Medali Emas Cabor Judo di POPDA Provinsi An. Dwike Hepto	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
48	Medali Emas Cabor Kempo di POPDA Provinsi (7)	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
49	Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Pandu Dian Saputra	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
50	Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Intan Anindya	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
51	Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Intan Anindya	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
52	Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. Intan Anindya	O2SN Provinsi	Regional	Dindikpora
53	Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. M. Attar Pandu Affandi	O2SN Provinsi	Regional	Dindikpora
54	Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. Indira Ferinza Jasmine	O2SN Provinsi	Regional	Dindikpora
55	Medali Emas Cabor Atletik 100 M lari gawang putra di PORPROV XVI Jateng An. Ayub Kabri	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
56	Medali Emas Cabor Atletik sapta putra di PORPROV XVI Jateng An. Ayub Kabri	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
57	Medali Emas Cabor catur beregu di PORPROV XVI Jateng An. Abdul jalil, M Fidyan, Oka satria	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
58	Medali Emas Cabor judo di PORPROV XVI Jateng An. Dwikie Hepto Januartika	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
59	Medali Emas Cabor kick boxing full contact putri di PORPROV XVI Jateng An. Siska Ayu VAlentina	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
60	Medali Emas Cabor Tarung drajat di PORPROV XVI Jateng An. Deni Cahya N	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
61	Medali Emas Cabor Taekwondo di PORPROV XVI Jateng An. Dinda putri lestari	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
62	Medali Emas Cabor Tenis lapangan di PORPROV XVI Jateng An. M Hilmy Abdulrahman	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
63	Medali Emas Cabor Gita Ariesta di PORPROV XVI Jateng An. Gita Ariesta	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
64	RSUD Temanggung penghargaan dalam bidang keselamatan dan keamanan nuklir kegiatan Radiologi Diagnostik dan Intervensional - Anugerah BAPETEN 2023	BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)	Nasional	RSUD Tmg
65	RSUD Temanggung sertifikat Akreditasi Rumah Sakit status paripurna	Direktur Utama Lembaga Akreditasi Rumah sakit DHP (LARS-DHP)	Nasional	RSUD Temanggung
66	Krenova Provinsi-Ijuk Ulir Ranjau Binatang- juara Harapan	Bappeda Provinsi Jateng	Regional	Bappeda
67	Olimpiade sains nasional tingkat provinsi (osn-p) jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (smp/mts) tahun 2023 An. M Ridwan Damarjati Wijaya (SMP2 Temanggung)	Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Regional	Dindikpora
68	Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) atau Swasti Saba Kategori Padapa Tahun 2023	Kementrian Kesehatan Republik Indonesia	Nasional	Dinkes
69	Kabupaten Terinovatif Tingkat Nasional Innovation Government Award (IGA) Tahun 2023	Kementrian Dalam Negeri	Nasional	Bappeda
70	Penghargaan atas tercapainya angka jaminan kesehatan masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95,44 % di	BPJS kesehatan	Regional	Dinkes/ Pemkab Temanggung

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Kabupaten Temanggung tahun 2023			
71	Anugerah Meritokrasi 2023	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Nasional	BKPSDM
72	Pemenuhan Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Regional	PBJ
73	Penghargaan Anugrah PDSD dengan kategori Sangat Tinggi (3,952)	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
74	Penghargaan Anugrah PDSD untuk Dokumen Evaluasi PDSD Terbaik I Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
75	Juara I Medali Emas Olimpiade Pendidikan Agama Isalam Nasional ke 2 Zona Jawa Tengah An Husna Dzakiyyah (SDN I Jampiroso)	DPP AGPAII (Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia)	Regional	Dindikpora
76	Badan Publik Informatif kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Keterbukaan Informasi Award 2023 Jawa Tengah	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
77	Badan Publik Pemerintah desa di Provinsi Jawa Tengah kategori informatif (Desa Gilingsari, Kec. Temanggung dalam Keterbukaan Informasi Award 2023 Jawa Tengah	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
78	Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Juara 1 dalam Kompetisi Nugraha Karya Desa BRILian Tahun 2023	BRI	Nasional	Pemdes Bansari

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (data diolah)

Pada tahun 2023 Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Jawa Tengah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Prestasi ini berlanjut pada tingkat Nasional, Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Pada tahun yang sama Kabupaten Temanggung juga dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif Tingkat Nasional pada *Innovation Government Award* (IGA) Tahun 2023.

Daftar penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.337
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Bappeda Provinsi Jawa Tengah	Regional	Bappeda
2.	Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Nasional Tahun 2024	Bappenas	Nasional	Bappeda
3.	Penghargaan Perpamsi Jateng Award 2024 kategori Platinum Peringkat III Perumda Air Minum Kabupaten Temanggung	Perpamsi Jateng	Regional	PDAM Temanggung
4.	Baznas Award 2024 kategori Kepala Daerah yang Mendukung Pengelolaan Zakat Terbaik	Baznas	Nasional	Pemkab Temanggung
5.	Prima Award kategori Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Tertinggi Tahun 2024 Wilayah Indonesia Barat	Ditjen Dukcapil Kemendagri	Nasional	Dindukcapil
6.	Juara Harapan II Tingkat Nasional Firefighter Skill Competition 2024	Kemendagri	Nasional	Satpol PP-Damkar
7.	Penghargaan dari Kemendikbud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mendukung Pemerintah Daerah Mencapai Level Melembaga pada 4 Kategori	Kemendikbud	Nasional	Dindikpora dan Dinbudpar
8.	Juara I Lomba Pawai dalam rangka HUT Satpol, Linmas, dan Damkar di Surakarta	Pemprov Jawa Tengah	Regional	Satpol PP-Damkar/Pemkab Temanggung
9.	Penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mendapatkan Opini WTP 12 Kali	BPK Republik Indonesia	Nasional	Pemkab Temanggung
10.	Penandatanganan Naskah Kerja Sama antara Ombudsman RI dengan Pemda dan Perguruan Tinggi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	Ombudsman RI	Nasional	Bagian Organisasi
11.	Pemenang Kategori Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Peduli Anak Terbaik Tingkat Nasional pada Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2024	Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI)	Nasional	Dinkominfo
12.	Penghargaan Anugerah ASN 2023 dan ASN Talent 2024	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	Nasional	BKPSDM

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Tingkat Nasional kategori Best Employee	Birkorasi (KemenPAN-RB)		
13.	Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Baik Tingkat Kabupaten se-Indonesia	Indonesian Institute of Public Governance (IIPG)	Nasional	Bagian Organisasi/Pemkab Temanggung
14.	Penghargaan Juara III Jawa Tengah Inspiring *Economic Effort Awards* kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Jawa Tengah	Pemprov Jawa Tengah	Regional	Pemkab Temanggung
15.	Penghargaan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jawa Tengah Tahun 2024 oleh Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah	Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
16.	Juara I kategori B dalam Festival Dalang Anak Jawa Tengah Tahun 2024	Disporapar Jawa Tengah	Regional	Dinbudpar
17.	Penghargaan dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta atas Penyelesaian Disparitas Data ASN dengan Prosentase Terbanyak	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Regional	BKPSDM
18.	Penghargaan Inovasi Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi Kabupaten Tertinggi yang Memberikan Jaminan Tenaga Kerja Non-Formal	BPJS Ketenagakerjaan	Nasional	Dinas Sosial
19.	Penghargaan 3 Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 1 Sekolah Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	DPRKPLH
20.	Penghargaan dari Ditjen PAUD Dikdasmen kepada SDN Kalirejo Kecamatan Kledung dalam rangka Aksi Nyata Sadar Literasi Numerasi	Ditjen PAUD Dikdasmen	Nasional	SDN Kalirejo
21.	Medali Perunggu pada Kompetisi IMEC and JEO Olympiad di Amity College Prestons Campus Sydney Australia a.n Anantacetta Reugra Abiraya	Amity College Prestons Campus Sydney	Internasional	Dindikpora
22.	Medali Perunggu pada Kompetisi International Round di Royal Lotus Hotel Da Nang Vietnam a.n	International Round	Internasional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Anantacetta Reugra Abiraya			
23.	Pemenang Utama Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah	Regional	Pemkab Temanggung

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (data diolah)

Pada tahun 2024 Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Jawa Tengah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Prestasi ini berlanjut pada tingkat Nasional, Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Pengumuman disampaikan oleh Kepala Bappenas bersamaaan dengan pelaksanaan Musrebangnas Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024. Pada tahun yang sama Kabupaten Temanggung juga mendapatkan penghargaan yaitu sebagai pemenang utama pada lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah.

DOKUMENTASI KOMPETISI DAN PIAGAM PENGHARGAAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Temanggung yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global, sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2026.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah serta mengacu arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta sesuai arah dan kebijakan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada tahun 2024, Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 cukup baik yaitu tumbuh sebesar 5,03 persen, sedikit melambat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Prospek perekonomian Indonesia cenderung meningkat meskipun tantangan global masih akan mempengaruhi. Pemulihan ekonomi yang kuat pada tahun 2024 memberikan dasar yang baik untuk melanjutkan pertumbuhan pada tahun 2025 ditengah pertumbuhan ekonomi dunia yang meningkat dan ketidakpastian pasar keuangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tetap tinggi ditopang oleh permintaaan domestik yang kuat, stabilitas perekonomian yang terjaga, neraca pembayaran yang baik, stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, sektor ekspor yang beragam, transformasi digital dan sektor tenologi serta inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran.

Tantangan dan kondisi yang mewarnai ekonomi global tahun 2024 serta berpotensi masih akan terjadi di Tahun 2025 yang menjadi perhatian antara lain:

1. Konflik geopolitik (perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, konflik Semenanjung Korea, tensi AS-Tiongkok-Taiwan, perang dagang Amerika-Tiongkok) yang mempengaruhi rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga komoditas;
2. Pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan disertai melebarnya divergensi pertumbuhan antar negara (*slower and divergent growth*);
3. Penurunan inflasi yang melambat (*gradual disinflation*);
4. Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama (*higher interest for longer*);
5. Arus modal keluar karena lonjakan yield USD mendorong capital *outflow* dari *Emerging Market*;
6. Nilai tukar Dollar AS tetap kuat (*strong dollar*);
7. Peningkatan kebijakan perdagangan dan industri yang proteksionis (*Geoeconomic fragmentation*);
8. Perubahan iklim (cuaca ekstrem dan bencana);
9. Transformasi Teknologi dan Ketimpangan Ekonomi;
10. Digitalisasi Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi baik dari *International Monetary Fund* (IMF), World Bank (WB), *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan Asian Development Bank (ADB) menunjukkan pelemahan. IMF (rilis Januari 2025) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 Global/Dunia tumbuh sebesar 3,3 persen, negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,4 persen, Negara Eropa tumbuh sebesar 1,1 persen, Jepang tumbuh sebesar 1,2 persen, Tiongkok tumbuh sebesar 4,4 persen, India tumbuh sebesar 6,6 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen.

World Bank (WB) (rilis Januari 2025) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 Global/Dunia tumbuh sebesar 2,7 persen, negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,3 persen, negara Eropa tumbuh sebesar 1,0 persen, Jepang tumbuh sebesar 1,0 persen, Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen, India tumbuh sebesar 6,7 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen.

Meskipun terdapat perlambatan ekonomi global, masih terdapat harapan terjadinya perbaikan ekonomi global di Tahun 2025. Tanda-tanda membaik (*upside risks*) dapat dilihat dari: (1) Tekanan inflasi telah mereda

namun melambat penurunannya; (2) Perlambatan laju pengetatan moneter; (3) Potensi sumber pertumbuhan baru (ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru). Disisi lain terdapat beberapa resiko (downside risk) antara lain: (1) Peningkatan tensi geopolitik; (2) Geo-economic fragmentation; (3) Pelemahan ekonomi Tiongkok; (4) Terbatasnya *policy space* (fiskal); (5) Peningkatan resiko *debt distress*; (6) Shock akibat perubahan iklim.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69 persen, kemudian diikuti sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi kedua yaitu 8,56 persen karena ada event berskala nasional dan internasional baik event pertemuan (MICE), musik dan olahraga. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen.Kontributor yang penting dalam mendukung kuatnya ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang masih terjaga tumbuh di 4,94 persen dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 4,64 persen dari sisi produksi. Aktivitas konsumsi yang tetap kuat ini didukung oleh inflasi yang terkendali dan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat.

Selain angka pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, gambaran membaiknya kondisi kualitas ekonomi nasional juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan, angka kemiskinan dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dan 5,32 persen pada tahun 2023. Sedangkan angka kemiskinan nasional pada September 2024 sebesar 8,57 persen, turun dibandingkan Maret 2023 sebesar 9,36 persen. Tingkat Ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,388 pada Maret 2023 menjadi 0,381 pada September 2024.

Inflasi selama tahun 2024 menurun dan berada dala proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di negara AS. eropa, jepang, tiongkok, india, indonesia berdasarkan woerd bank (WB) dan data tersebut rilis pada?rentang sasaran 2,5±1 persen. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap sebesar 1,57 peresen lebih baik dari capaian Tahun 2023 sebesar 2,61 persen

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi

Indonesia Tahun 2024 sebesar 5,03 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 sebesar 5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi, serta selesainya proyek infrastruktur yang dimulai oleh pemerintah sebelumnya.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, sementara sektor industri pengolahan menunjukkan kontribusi signifikan terhadap PDB. Pada tahun 2024, industri pengolahan menyumbang 19,13% terhadap total PDB, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 4,89%.

Selain itu, sektor manufaktur berkontribusi sebesar 18,98% terhadap PDB pada tahun 2024, meningkat dari 18,67% pada tahun 2023. Meskipun ada pelambatan kecil dalam pertumbuhan ekonomi, sektor industri pengolahan dan manufaktur terus menunjukkan ketahanan dan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional

Pada tahun 2024, ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi tetap menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Beberapa kondisi yang mencirikan perlambatan global dan ketidakpastian tinggi tersebut seperti: (1) Pertumbuhan ekonomi global yang melemah; (2) Penurunan inflasi global yang melambat; (3) Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama; (4) Perdagangan global tumbuh negatif yang utamanya disebabkan penurunan nilai perdagangan barang, harga komoditas unggulan perdagangan Indonesia (Kelapa Sawit, Batubara, Nikel, Gas Alam, Minyak Mentah) nilainya mengalami penurunan; (5) Prompt Manufacturing Index (PMI) atau Indeks Manufaktur Global masih berada di zona ekspansi, (6) Risiko Keuangan Global; (7) Krisis Enegi dan Pasokan.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dari 5,32 persen pada tahun 2023. Sementara, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, turun dibandingkan Maret 2024 sebesar 9,03 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini menurun dari sebelumnya 0,388 pada Maret 2023, menjadi 0,379 pada Maret 2024. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta

program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 mencapai 5,03 persen (c-to-c). Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 1,57 persen (yoy) pada tahun 2024. PDB Perkapita 2024 meningkat sebesar 78,62 juta jiwa. Dengan mempertimbangkan berbagai resiko, game changers transformasi ekonomi (Industrialisasi, Transisi Energi, Integrasi Infrastruktur Konektivitas, Super Platform, Pembangunan IKN, dan Anggaran IPTEKIN) dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, target indikator makro nasional Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.
Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional
Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 – 6,3
2	Inflasi	%	2,5 ± 1,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44-4,96
4	Angka Kemiskinan	%	6,5-7,5
5	Rasio Gini	Angka	0,377 – 0,380
6	Indeks Modal Manusia	Angka	0,57

Sumber: Kementerian Bappenas (Permen PPN Ka Bappenas Nomor 3 Tahun 2025)

3.1.3. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 4,95 persen (c-to-c), sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,98 persen (c-to-c). Hal tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 4,92% (c-to-c), namun lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 5,03% (c-to-c). Dari sisi pangsa, Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.

Struktur Perekonomian Jawa Tengah didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mendominasi adalah Industri Pengolahan sebesar 33,84 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,49 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,03 persen; dan Konstruksi sebesar

11,39 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 71,75 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah yaitu sebesar 61,29 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 39,22 persen; komponen PMTB sebesar 30,53 persen; Komponen PK-P sebesar 6,25 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,39 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,68 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 39,36 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,78 persen pada Agustus 2024 dibandingkan pada Agustus 2023 sebesar 5,13 persen. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,77 persen pada Maret 2023, turun menjadi 9,58 persen pada September 2024. Sementara Inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 1,67 persen (y-o-y), turun dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 2,89 persen (y-o-y). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,369 pada tahun 2023 turun menjadi 0,367 pada tahun 2024.

Salah satu upaya meningkatkan pemerataan ekonomi adalah melalui pengembangan investasi di wilayah selatan, guna mengurangi ketimpangan pembangunan dengan wilayah utara. Selain itu, pentingnya menarik investor, baik dalam negeri maupun asing, untuk berinvestasi di sektor industri, pelabuhan, manufaktur, dan energi. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan wilayah selatan dan utara harus terus digencarkan guna meningkatkan daya saing ekonomi. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa agar pembangunan berjalan optimal. Dengan strategi ini, Jawa Tengah diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berdaya saing tinggi.

3.1.4. Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,00 – 6,00 persen. Sementara inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5 – 3,5 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2026, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 8,70 – 8,53 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,71 – 4,27 persen. Di sisi lain, PDRB per Kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 52,0 – 55,0 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan Angka Kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,360 – 0,365 di tahun 2026.

Tabel 3.2.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah
Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 – 6,00
2	PDRB per kapita	Juta Rp	52,0 – 55,0
3	Inflasi	%	1,5 – 3,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,71 – 4,27
5	Angka Kemiskinan	%	8,70 – 8,53
6	Rasio Gini	Angka	0,360 – 0,365

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada "Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah,

didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;

2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

3.1.5. Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 tumbuh melambat sebesar 5,01 persen, namun mengalami peningkatan pada Tahun 2024 menjadi sebesar 5,04 persen. Kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan kondisi Jawa Tengah maupun Indonesia yang melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Struktur Perekonomian Kabupaten Temanggung didukung oleh sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Kontribusi sektor unggulan industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Temanggung sebesar 25,53 persen, sektor pertanian sebesar 22,47 persen dan sektor perdagangan sebesar 21,07 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung meningkat menjadi 2,35 persen pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 2,32 persen. Namun demikian, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung masih lebih baik dibandingkan dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Angka kemiskinan konsisten mengalami penurunan dari sebelumnya 9,26 persen di tahun 2023 menjadi 8,67 persen pada tahun 2024. Mengukur inflasi di Kabupaten Temanggung, yang bukan merupakan daerah survei biaya hidup (SBH) untuk perhitungan inflasi di Jawa Tengah, memerlukan pendekatan alternatif. Penghitungan inflasi Kabupaten Temanggung di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menggunakan angka inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,89 persen (y-o-y). Sedangkan penghitungan inflasi tahun 2024 menggunakan angka inflasi dari Kabupaten Wonosobo sebesar 1,52 persen (y-o-y). Menggunakan data inflasi dari Kabupaten Wonosobo dapat menjadi proksi representatif untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Temanggung, mengingat kedua Kabupaten ini yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang serupa. Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Temanggung yang diukur menggunakan angka indeks gini atau gini rasio meningkat, dari sebelumnya 0,359 pada tahun 2023 naik menjadi 0,383 pada tahun 2024.

3.1.6 Proyeksi dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung diarahkan pada perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan yang difokuskan pada peningkatan potensi produk unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri pengolahan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan, gini

rasio, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mendasarkan pada kondisi-kondisi di atas, maka perekonomian Kabupaten Temanggung tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,10 - 5,50 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,50 - 2,50 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, gini rasio dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Kabupaten Temanggung. Tahun 2026, tingkat kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 7,90-7,85 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 2,20 - 2,00 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,30 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 39,31 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks gini/gini rasio sebesar 0,370-0,360 di tahun 2026.

Keberhasilan pencapaian target pembangunan ke depan diharapkan dapat menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka menuju angka proyeksi 2,20 - 2,00 persen di tahun 2026, hal ini didukung oleh beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tingkat pengangguran, diantaranya:

a. Penciptaan kesempatan kerja baru melalui penumbuhan industri padat karya maupun pengembangan UMKM;
b. Perluasan kerja di sektor informal;
c. Peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja;
d. Meningkatkan kemauan berwirausaha masyarakat melalui pelatihan kerja serta kemudahan akses permodalan;
e. Memperkuat sistem informasi pasar kerja; dan
f. Perlindungan sosial bagi pekerja.

3.1.6.1. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 berada pada kisaran 5,80 – 6,30 persen. Hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan baik di

dalam negeri maupun luar negeri, misalnya mulai adanya pemulihan ekonomi global, meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor terutama dari sektor manufaktur, meningkatnya mobilisasi penduduk, serta peningkatan konsumsi masyarakat. Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi 5,00 – 5,80 persen.

Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional, maka terbaca adanya optimisme bahwa pada 2026 ekonomi akan tumbuh. Optimisme inilah yang menjadi dasar bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2026, meskipun harus mempertimbangkan beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan besaran pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi proyeksi pemerintah pusat maupun provinsi.

Faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung berupa investasi fisik maupun investasi modal manusia yaitu pendidikan. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak mengutamakan sisi konsumsi namun lebih ke sisi produksi yaitu peningkatan dalam jumlah maupun kualitas produksi barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat naik dengan meningkatkan produktivitas di setiap sektor perekonomian.

Tabel 3.3.
Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2026

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2020	-2,13	-2,65	-2,07
2021	3,34	3,33	3,70
2022	5,20	5,31	5,31
2023	5,01	4,97	5,05
2024	5,04	4,95	5,03
2025	4,75 - 5,28	4,90-5,60	5,30
2026	5,10 - 5,50	5,00-6,00	5,80 – 6,30

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir menunjukan kondisi yang fluktuatif. Pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, perkembangan ekonomi sudah semakin membaik pasca pandemi Covid-19, dimana capaian Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,20 persen, meningkat dari capaian Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,34 persen. Sementara itu, pada Tahun 2023,

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sebesar 5,01 persen yang mengalami perlambatan dibanding Tahun 2022. Namun, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 5,04 persen.

Berdasarkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa kecenderungan perubahan pertumbuhan ekonomi pada periode Tahun 2020 memiliki persamaan yakni menurun pada posisi <0 sebagai akibat dari pandemi covid-19. Sedangkan setelah pandemi dan kondisi terkini, perubahan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan ke arah positif (>0) yang mana perubahan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 meningkat sebesar 0,03 sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional melambat. Beberapa upaya yang akan dilakukan guna memastikan pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan lebih baik lagi diantaranya peningkatan produktivitas sektor kearifan lokal seperti pertanian yang dapat ditingkatkan dengan cara:

a. Mendorong minat berusaha di bidang pertanian;
b. Peningkatan teknologi pertanian;
c. Mendorong persaingan yang sehat dalam jual beli sektor pertanian;
d. Pengembangan jenis komoditas agar berhasil guna;
e. Membuka peluang eskpor ke daerah lain;
f. Mendorong ekonomi kreatif semakin berkembang
g. Digitalisasi usaha produk pertanian, dan lain-lain.

3.1.6.2. Struktur Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga konstan selama jangka waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pergerakan dan pergeseran di beberapa sub sektor. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK Tahun 2020-2024

	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,86	0,86	2,92	1,28	1,27
B	Pertambangan dan Penggalian	2,11	6,75	-3,94	3,12	4,56
C	Industri Pengolahan	-0,62	2,00	1,09	4,32	3,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,87	4,84	5,26	5,86	8,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,02	5,62	0,22	4,36	0,96
F	Konstruksi	-2,01	7,54	3,72	7,89	13,47

	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,79	7,40	4,30	5,82	5,98
H	Transportasi dan Pergudangan	-30,59	2,37	65,39	7,90	5,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,81	6,03	15,04	12,49	10,16
J	Informasi dan Komunikasi	14,14	5,98	2,24	11,25	9,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,01	3,42	0,51	2,91	4,62
L	Real Estate	-0,10	2,32	5,80	8,36	7,70
M,N	Jasa Perusahaan	-6,32	3,01	5,65	8,82	11,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,61	-0,26	1,60	5,11	8,01
P	Jasa Pendidikan	-0,19	0,54	1,63	6,96	8,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,70	0,59	2,59	8,32	8,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	-6,22	0,98	10,95	8,83	6,76
	PDRB	**-2,13**	**3,34**	**5,20**	**5,01**	**5,04**

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pendukung utama. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Meskipun 3 sektor tersebut adalah penggerak utama perekonomian Kabupaten Temanggung, akan tetapi 3 sektor tersebut tidak memiliki pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya.

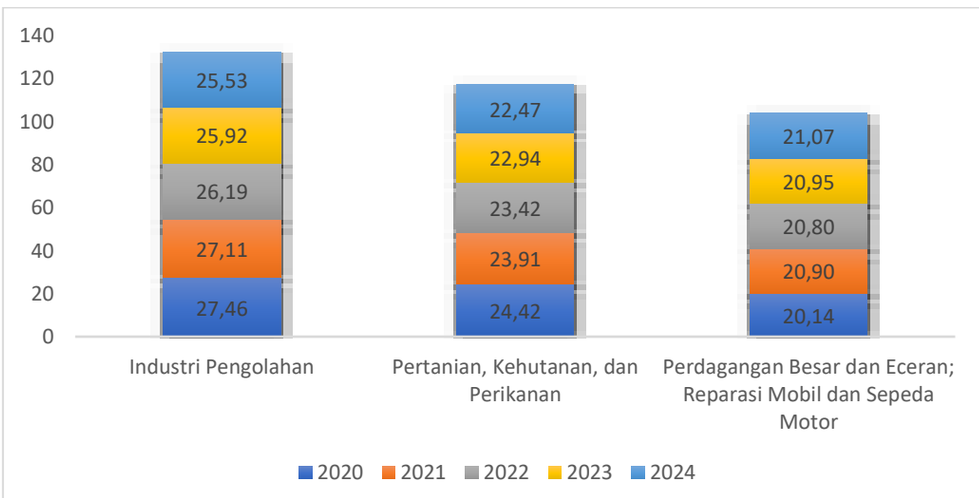

Sumber: BPS Kab Temanggung 2025

Gambar 3.1.
Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

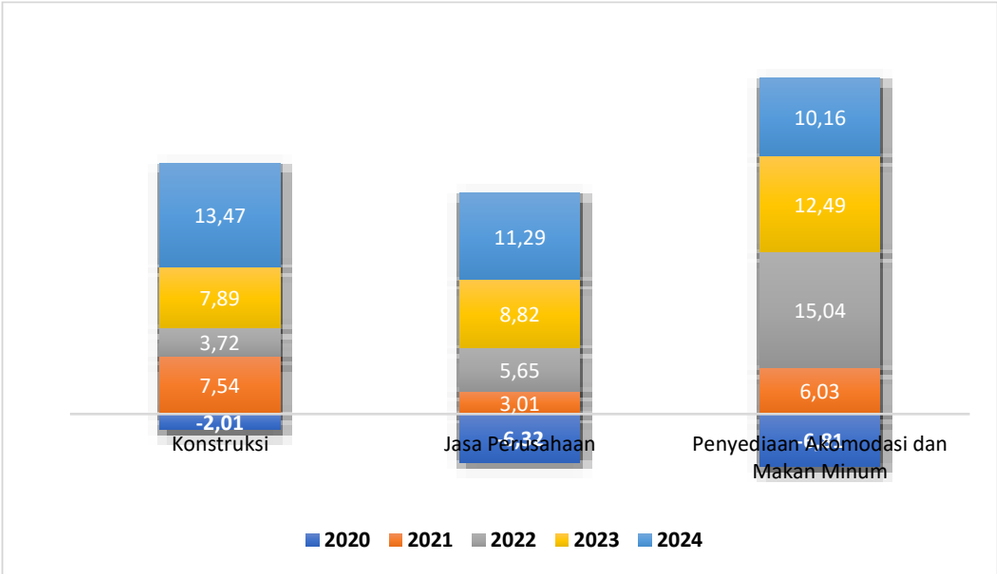

Sumber: BPS Kab Temanggung 2025

Gambar 3.2.
Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai bergeser dari lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha industri pengolahan. Hal tersebut dicerminkan dari besarnya distribusi lapangan usaha kategori Industri Pengolahan yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal ini mencerminkan transformasi ekonomi Kabupaten Temanggung, di mana kegiatan pengolahan hasil-hasil pertanian mulai memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong perekonomian lokal. Perkembangan industri pengolahan juga berhubungan erat dengan upaya industrialisasi di sektor pertanian, yang menciptakan nilai tambah bagi produk-produk lokal. Peningkatan PDRB di sektor industri pengolahan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong transformasi ekonomi dari daerah agraris menjadi daerah berbasis industri. Sektor manufaktur memiliki kapasitas untuk menciptakan produktivitas yang lebih tinggi dan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan sektor agraris. Ini karena sektor industri pengolahan memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih canggih, serta skala ekonomi yang lebih besar, sehingga meningkatkan daya saing global suatu negara atau daerah. Transformasi ekonomi ini terjadi ketika tenaga kerja dan sumber daya dialihkan dari sektor dengan produktivitas rendah (seperti pertanian tradisional) ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi, yaitu industri pengolahan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional

juga mendorong perkembangan industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Temanggung.

3.1.6.3. PDRB per Kapita

PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum dapat dilakukan, karena belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten atau kota. Namun demikian PDRB Perkapita masih cukup relevan untuk menggambarkan apakah secara rata-rata, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak.

Tabel 3.5.
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

TAHUN	NILAI (Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	27.326.000	-3,01
2021	28.462.000	4,16
2022	30.837.000	8,34
2023	33.289.000	7,95
2024	35.494.000	6,62

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Nilai PDRB perkapita selalu naik hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/ dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada yang dimiliki/ dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

Pada tahun 2024 PDRB Perkapita mengalami peningkatan.

Peningkatan pendapatan perkapita dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

a. Menaikkan investasi berdasarkan potensi daerah sampai kepada komoditas;
b. Meningkatkan program kewirausahaan / pengembangan UMKM / pengembangan ekonomi kreatif;

c. Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri maupun sektor penggerak perekonomian;
d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan keterampilan; dan
e. Meningkatkan produksi bagi sektor potensial daerah.

3.1.6.4. Inflasi

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Sejak tahun 2020 BPS hanya berwenang menghitung laju inflasi sampai level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah sampel, sedangkan Kabupaten Temanggung tidak masuk ke dalam daerah sampel sehingga angka inflasi Temanggung mengikuti inflasi Jawa Tengah. Mengukur inflasi di Kabupaten Temanggung, yang bukan merupakan daerah survei biaya hidup (SBH) untuk perhitungan inflasi di Jawa Tengah, memerlukan pendekatan alternatif. Penghitungan inflasi Kabupaten Temanggung di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menggunakan angka inflasi Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penghitungan inflasi tahun 2024 menggunakan angka inflasi dari Kabupaten Wonosobo. Menggunakan data inflasi dari Kabupaten Wonosobo dapat menjadi proksi representatif untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Temanggung, mengingat kedua Kabupaten ini yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang serupa.

Tabel 3.6.
Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional

LOKASI	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Temanggung	1,56	1,70	5,63	2,89	1,52	1,50-2,50	1,50-2,50
Jawa Tengah	1,56	1,70	5,63	2,89	1,67	1,50-3,50	1,50-3,50
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57	2,5±1,0	2,5±1,0

Keterangan : Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Laju inflasi di Kabupaten Temanggung tahun 2020-2023 cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi salah satunya dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan ketersediaan atau

stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja. Pada tahun 2024 inflasi di Tingkat Kabupaten Temanggung, Provinsi dan Nasional mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2023. Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.

Dengan mendasarkan atas data kondisi ekonomi Kabupaten Temanggung di atas, maka arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah:

1) Pengembangan ekonomi lokal yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi;
2) Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM;
3) Optimalisasi pemakaian produk dalam negeri guna menguatkan potensi produk lokal unggulan daerah;
4) Penekanan laju inflasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
5) Pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan

dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2025-2029. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, di mana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan serta penguatan ekonomi daerah, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi;
b. Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD;
c. Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional;
d. Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional;
e. Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat mengoptimalkan dan menguatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan

daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Memperhatikan berbagai kondisi obyektif masyarakat, aspirasi yang berkembang dan mensinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang mengusung tema "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif". Akselerasi Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif dengan 8 arah kebijakan prioritas yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kebijakan keuangan daerah yang erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah serta mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2026 yaitu "**Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi"**, yang akan dilakukan melalui upaya :

1. Peningkatan kelembagaan sehingga lebih efektif dan akuntabel

2. Penyempurnaan prosedur kerja, sistem informasi, dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan publik.
3. Penguatan SDM aparatur negara melalui peningkatan kompetensi, pengembangan karier yang profesional dan berintegritas
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
5. Pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
6. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas.
7. Peningkatan investasi sektor strategis, dengan memberikan kemudahan perizinan dan promosi peluang investasi kepada investor.
8. Pengembangan usaha mikro melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, serta digitalisasi usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas.
9. Peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti jalan, irigasi, dan jaringan internet, untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta memperluas akses pasar.

Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJMD tahun 2026 melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Penerimaan Pendapatan Daerah di tahun 2026 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan penerimaan pendapatan tahun 2025. Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan. Kemampuan untuk menghimpun PAD dipengaruhi oleh beberapa hal, namun yang paling krusial adalah seberapa besar pertumbuhan sektor konsumsi, khususnya untuk barang kena Pajak Daerah. Pendapatan Transfer merupakan penyaluran pendapatan dari Pemerintah yang sifatnya sangat dinamis artinya memperhatikan penerimaan Pendapatan Negara, serta pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah. Pendapatan

Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber selain dari PAD.

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2026 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dari pada pertumbuhan yang agresif, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan memertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Optimalisasi pemungutan PAD merupakan prioritas, yang terdiri atas 4 jenis dan memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:

(1) pajak daerah;

(2) retribusi daerah;

(3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

(4) lain-lain PAD yang sah,

dari ke-4 sumber PAD tersebut sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD Kabupaten Temanggung selain Pendapatan BLUD.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Proyeksi Penerimaan dari Pendapatan Transfer sepenuhnya tergantung pada Pemerintah Pusat, karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk pemerintah daerah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Keuangan, sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi. Sedangkan untuk pemetaan potensi objek pajak tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah fungsinya hanya melaksanakan pencocokan atau rekonsiliasi kas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Beberapa asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dikatakan belum proporsional, karena prosentase proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah masing sangat rendah. Kontributor terbesar PAD berasal dari sektor Lain-lain PAD yang Sah yaitu Pendapatan BLUD. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan PAD

pada RKPD Tahun 2026 adalah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing jenis pungutan, yaitu sebagai berikut:

a. Pertumbuhan objek pajak daerah yang terdiri dari pajak reklame, pajak air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperkirakan sama atau sedikit lebih tinggi dari tahun 2025;
b. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah. Digitalisasi penerimaan pendapatan retribusi yang terus digalakkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan transaksi pembayaran dan pengawasan realisasi pendapatan khususnya pada pendapatan retribusi Los/Kios Pasar;
c. Optimalisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu dengan meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat menghasilkan Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
d. Optimalisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu dengan Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.

2. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer diproyeksikan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Desa dan Insentif Fiskal diperkirakan sama dengan Tahun Anggaran 2025, DBH dan DAU diperkirakan sama atau naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2025, sedangkan DAK (Fisik dan Non Fisik) yang bersifat in out diperkirakan sama atau naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2025;
   b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperkirakan naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2025, namun untuk Bantuan Keuangan yang besifat in out dianggarkan sesuai dengan usulan/hasil verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini belum dapat diproyeksikan dikarenakan:
   a. Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada Tahun Anggaran 2025 karena pengalokasian pendapatan ini

berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pihak Ketiga. Pendapatan hibah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga juga belum dapat dipastikan karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pihak Ketiga.

b. Dana Darurat selama ini Pemerintah Kabupaten Temanggung belum pernah mendapatkan;

c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak bisa diprediksi karena merupakan dana dari pemerintah yang bersifat insidesial.

Pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi, diantaranya:

1. Kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional;
2. Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah diantaranya alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM;
3. Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; dan
4. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Perbandingan Pendapatan daerah Kabupaten Temanggung berupa realisasi dari Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun anggaran 2025, dan Proyeksi Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 dapat terlihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan 2020-2025, dan Proyeksi Pendapatan 2026 Kabupaten Temanggung

URAIAN			TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2026
			REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	APBD Penetapan 2025	
PENDAPATAN DAERAH			**1.830.846.293.347**	**1.971.005.990.029**	**1.915.197.142.714**	**2.003.870.332.664**	**2,099,479,855,788**	**2,017,622,369,083**	**1,942,885,528,728**
1	**Pendapatan Asli Daerah**		**307.488.084.365**	**363.128.342.571**	**308.693.982.914**	**350.283.014.437**	**388,858,102,726**	**379,485,855,146**	**409,932,332,351**
	a.	Pajak Daerah	47.887.604.813	52.832.020.942	74.191.559.232	79.677.967.921	76,926,746,042	138,418,634,896	138,418,634,896
	b.	Retribusi Daerah	8.436.169.882	9.400.033.763	9.643.158.066	11.496.721.044	10,925,370,668	198,471,211,768	239,424,185,891
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.800.858.165	19.633.082.917	21.426.146.839	21.311.076.903	22,645,578,254	21,298,004,241	21,838,440,564
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	232.363.451.505	281.263.204.949	203.433.118.777	237.797.248.569	278,360,407,762	21,298,004,241	10,251,071,000
2	**Pendapatan Transfer**		**1.451.579.818.982**	**1.537.846.595.458**	**1.585.778.027.969**	**1.653.587.318.227**	**1,710,621,753,062**	**1,638,136,513,937**	**1,532,953,196,377**
	a.	Transfer Pemerintah Pusat	**1.350.758.939.773**	**1.385.928.637.379**	**1.472.041.917.200**	**1.517.163.835.087**	**1,525,673,694,150**	**1,556,822,184,000**	**1,451,638,866,440**
		1) Dana Insentif Daerah	56.311.496.000	17.149.213.000	2.438.134.000	29.383.259.000	0	0	0
		2) Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0
		3) Dana Keistimewaan	0	0	0	0	0	0	0
		4) Dana Desa	247.881.825.000	247.881.825.000	245.879.771.000	242.462.582.000	246,690,892,000	238,898,620,000	238,898,620,000
		5) Insentif Fiskal					28,501,104,000	9,002,280,000	0
		6) DBH	52.880.696.555	66.832.564.275	50.975.465.200	75.150.038.079	69,727,710,589	80,200,387,000	80,200,387,000
		7) DAU	762.027.309.000	753.140.119.000	753.174.275.000	791.039.886.585	843,895,369,956	845,234,730,000	789,563,477,000.00

URAIAN			TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2026
			REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	APBD Penetapan 2025	
		8) DAK	231.657.613.218	300.924.916.104	419.574.272.000	379.128.069.423	336.858.617.605	383.486.167.000	342.976.382.440
		a) DAK Fisik	*55.578.330.000*	*131.534.286.845*	*153.727.447.000*	*109.544.079.906*	*67,587,633,850*	*81,787,260,000*	*40,629,956,040.00*
		b) DAK Non Fisik	*176.079.283.218*	*169.390.629.259*	*265.846.825.000*	*269.583.989.517*	*269,270,983,755*	*301,698,907,000*	*302,346,426,400.00*
	b.	Transfer antar Daerah	**100.820.879.209**	**151.917.958.079**	**136.990.809.634**	**136.423.483.140**	**184,948,058,912**	**81,314,329,937**	**81,314,329,937**
		1) Pendapatan Bagi Hasil	94.165.118.971	114.087.366.818	117.486.242.600	123.749.375.637	125,426,694,912	81,314,329,937	81,314,329,937
		2) Bantuan Keuangan	6.655.760.238	37.830.591.261	15.975.000.000	12.674.107.503	59,521,364,000	0	0
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**		71.778.390.000	70.031.052.000	1.000.000.000	0	0	0	0
	a.	Hibah	0	571.300.000	1.000.000.000	0	0	0	0
	b.	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0
	c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	71.778.390.000	69.459.752.000	0	0	0	0	0

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Dari gambar 3.7 terlihat bahwa komponen pembentuk pendapatan daerah terbesar bersumber dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan daerah yaitu rata-rata sebesar 80,72%, kemudian dari sektor PAD rata-rata sebesar 18,20% dan sisanya berupa Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 1,08%. Pada tahun 2024 realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan, baik di sektor Pendapatan Asli Daerah maupun dari sektor Pendapatan Transfer. Peningkatan yang tinggi pada proyeksi pendapatan Tahun Anggaran 2024 di komponen pajak daerah adalah adanya pendapatan opsen PKB dan opsen BBNKB. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Sedangkan peningkatan sektor Retribusi Daerah disebabkan pengalihan pencatatan pendapatan pelayanan kesehatan BLUD yang semula pada rekening Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ke rekening Retribusi Daerah.

Dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, maka ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi pendapatan asli daerah dengan;
    a. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik yang terkait dengan pemungutan PAD.
    b. Menyempurnakan sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan serta pelayanan pendapatan asli daerah agar lebih efektif, efisien, dan transparan dengan mengoptimalkan pelaksanaan sesuai dengan SOP.
    c. Mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah sebagai sumber pendapatan.
    d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, baik petugas pemungut maupun pengelola PAD, melalui pelatihan dan pendampingan.
    e. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang melibatkan pihak lain, agar lebih transparan dan akuntabel dengan mengoptimalkan transaksi non tunai.

2. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan:
   a. Pendataan individual dan pemutakhiran atas permohonan wajib pajak, memberlakukan perubahan otomatis SPPT berdasarkan BPHTB tervalidasi
   b. Melakukan review atas regulasi yang mengatur pendapatan asli daerah serta melakukan kajian untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
   c. Mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, pemberian penghargaan kepada wajib pajak taat, serta penegakan sanksi administratif bagi yang tidak patuh.
   d. Meningkatkan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
   e. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah yang menangani pendapatan daerah.
3. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khusus terkait dengan pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan:
   a. Penegakan Kepatuhan dengan operasi gabungan kendaraan bermotor;
   b. Bersinergi dengan kecamatan dan desa melakukan distribusi STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah);

Mengingat kemampuan pendapatan asli daerah yang sangat terbatas, maka pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Temanggung seperti mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, badan- badan sosial, komunitas, dan organisasi yang ada di Kabupaten Temanggung termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan daerah, serta sumber pembiayaan lain.

3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dan disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi, merupakan merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Prioritas kebijakan belanja operasi pada RKPD Tahun 2026 ini fokus pada:

a. belanja rutin Perangkat Daerah seperti belanja gaji pegawai dan belanja barang dan jasa operasional pada program penunjang urusan perangkat daerah;
b. belanja hibah kepada kelompok yang menunjang Prioritas Nasional dan capaian kinerja yang masih dalam status upaya keras seperti belanja hibah bibit tanaman produktif, bibit ikan, bibit ternak, dan peralatan pengolahan hasil pertanian;
c. belanja bantuan sosial melalui bantuan sosial jaminan kesehatan masyarakat miskin, bantuan sosial kepada KUBE, dan Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni

2. Belanja Modal, adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset lainnya dan aset tak berwujud. Prioritas kebijakan belanja modal pada RKPD Tahun 2026 ini fokus pada:
   a. Belanja modal jalan yang mendukung Pengembangan Wilayah gelangmanggung;
   b. Belanja modal jaringan dan irigasi yang mendukung pemerataan insfrastruktur wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keungan Daerah dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Prioritas kebijakan belanja transfer pada RKPD Tahun 2026 ini fokus pada:

a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BPJS Perangkat Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan pemberian insentif bagi Ketua RT/RW;
b. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan insfrastruktur perdesaan.

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah adalah untuk mendukun Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah **TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN**) sedangkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui lima Misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas;
2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil;
3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan;
4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan; dan
5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif

Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025 2029 tersebut, maka Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah pada Tahun 2026 adalah **Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi.**

Penguatan reformasi birokrasi dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dan kepuasan masyarakat. Reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh baik aspek

kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Penguatan reformasi birokrasi akan dilakukan melalui upaya:

1. Peningkatan kelembagaan sehingga lebih efektif dan akuntabel;
2. Penyempurnaan prosedur kerja, sistem informasi, dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan publik;
3. Penguatan SDM aparatur negara melalui peningkatan kompetensi, pengembangan karier yang profesional dan berintegritas;
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;
5. Pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
6. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas.

Penguatan pertumbuhan ekonomi dilakukan pada tahun pertama karena sangat penting dan memberikan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penguatan pertumbuhan ekonomi akan dilakukan melalui upaya:

1. Peningkatan investasi sektor strategis, dengan memberikan kemudahan perizinan dan promosi peluang investasi kepada investor;
2. Pengembangan usaha mikro melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, serta digitalisasi usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas;
3. Peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti jalan, irigasi, dan jaringan internet, untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta memperluas akses pasar;
4. Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional;
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan, agar tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi;

6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi, agar proses bisnis lebih efisien, transparan, dan mendukung iklim usaha yang sehat;
7. Penguatan kerja sama antar daerah dan kawasan, untuk membangun konektivitas ekonomi dan memperkuat rantai pasok antarwilayah;
8. Perluasan akses pembiayaan inklusif, termasuk penguatan peran lembaga keuangan mikro, koperasi untuk mendukung produktivitas ekonomi masyarakat; dan
9. Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, melalui program padat karya, dan pemberdayaan komunitas lokal berbasis potensi wilayah.

Target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024, APBD 2025, dan proyeksi Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara lengkap terinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 3.8
Target dan Realisasi Tahun 2022 - 2024, APBD 2025 dan Proyeksi Tahun 2026
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

URAIAN			TAHUN ANGGARAN							PROYEKSI 2026
			TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	APBD 2025 Penetapan	
BELANJA DAERAH			**2.163.271.983.090**	**1.958.748.409.806**	**2.156.455.999.239**	**2.042.295.812.083**	**2.150.008.472.410**	**2.082.224.159.824**	**2.124.690.575.218**	**2,330,929,130,615.00**
1	**Belanja Operasi**		**1.455.371.245.698**	**1.295.686.749.508**	**1.545.029.674.070**	**1.460.421.030.081**	**1.565.313.945.783**	**1.512.987.691.753**	**1.595.817.398.614**	**1,668,425,609,077.00**
	a.	Belanja Pegawai	785.276.004.360	710.731.632.791	803.840.649.421	889.665.000.241	851.323.591.147	835.414.435.528	977.338.529.883	1,032,782,297,058.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	575.681.578.758	492.943.591.757	584.018.730.999	500.030.196.074	589.905.506.383	555.355.516.548	489.112.324.831	471,290,491,319.00
	c.	Belanja Bunga	0	0	-	-	-	-	-	-
	d.	Belanja Subsidi	0	0	-	-	-	-	-	-
	e.	Belanja Hibah	86.988.194.080	85.102.866.541	152.954.275.650	147.097.157.985	113.120.840.253	111.467.431.677	125.467.412.900	158,201,189,700.00
	f.	Belanja Bantuan Sosial	7.425.468.500	6.908.658.419	4.216.018.000	12.772.580.000	10.964.008.000	10.750.308.000	3.899.131.000	6,151,631,000.00
2	**Belanja Modal**		**287.510.501.396**	**247.089.139.440**	**202.902.736.362**	**174.714.127.567**	**178.154.179.502**	**164.561.497.546**	**133.570.669.730**	**253,886,824,638.00**
	a.	Tanah	9.000.000.000	3.908.713.890	1.028.850.000	-	-	-	-	160,000,000.00
	b.	Peralatan dan Mesin	115.562.797.305	95.059.501.590	61.726.992.797	39.043.136.469	84.985.660.884	77.286.656.183	63.172.098.728	41,013,566,238.00
	c.	Bangunan dan Gedung	114.551.721.981	102.564.048.329	54.577.028.997	46.317.439.145	40.775.159.380	37.465.772.157	14.970.671.400	188,920,400,400.00
	d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.260.159.121	39.768.985.023	77.837.411.000	28.446.629.250	44.433.046.542	41.954.115.310	50.360.754.000	23,792,858,000.00
	e.	Aset tetap lainnya	6.113.272.989	5.766.890.608	7.691.853.568	3.279.550.391	7.892.317.696	7.796.173.009	4.971.395.602	-
	f.	Aset lainnya	22.550.000	21.000.000	40.600.000	97.150.000	67.995.000	58.780.887	95.750.000	-
3	**Belanja Tidak Terduga**		**2.000.000.000**	**-**	**800.000.000**	**-**	**1.150.000.000**	**-**	**1.000.000.000**	**1,000,000,000.00**
4	**Belanja Transfer**		**418.390.235.996**	**415.972.520.858**	**397.911.846.807**	**407.160.654.435**	**397.781.031.125**	**404.674.970.525**	**394.302.506.874**	**407,616,696,900.00**
	a.	Belanja Bagi Hasil	7.951.000.000	7.936.684.862	7.997.804.000	14.988.600.364	8.777.498.770	8.753.922.170	8.800.736.874	13,712,594,000.00
	b.	Belanja Bantuan Keuangan	410.439.235.996	408.035.835.996	389.914.042.807	392.152.666.000	389.003.532.355	395.921.048.355	385.501.770.000	393,904,102,900.00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dilihat perbandingan data target dengan realisasi belanja daerah Tahun 2022-2024. Realisasi belanja mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena atas pertimbangan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan rutin, kegiatan prioritas penyelesaian permasalahan pembangunan, penyelesaian kegiatan yang mendukung capaian kinerja yang masih dalam status Upaya keras, dan kegiatan yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi belanja Tahun 2026 terbesar pada belanja operasi di mana belanja pegawai menjadi salah satu penyebabnya. Besaran proyeksi belanja pegawai terhadap total belanja operasi tahun 2026 sebesar 71,58 %, hal ini disebabkan karena ada tambahan beban belanja pegawai dari penerimaan CPNS sebanyak 71 orang dan PPPK sebanyak 261 orang pada tahun 2025. Belanja modal dan belanja transfer juga mengalami kenaikan. Belanja modal terjadi kenaikan pada belanja bangunan dan gedung serta Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan karena menyesuaikan pada belanja DAK fisik. Untuk belanja transfer kenaikan terjadi karena penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga masih sama dengan tahun sebelumnya.

3.2.2.1 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Persentase realisasi belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Temanggung dari tahun 2022–2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Persentase
2022	1,295,686,749,508	1,958,748,409,806	66.15
2023	1,460,421,030,081	2,042,295,812,083	71.51
2024	1,565,313,945,783	2,042,295,812,083	76.64
2025	1,595,817,398,614	2,124,690,575,218	75.11
2026	1,668,425,609,077	2,330,929,130,615	71.58

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Proporsi belanja operasional Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah rata-rata adalah 72,20%. Persentase belanja operasi tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2024 yaitu sebesar 76,64% dan terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 66,15%.

3.2.2.2 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Tabel 3.10
Persentase Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Persentase
2022	247,089,139,440.00	1,958,748,409,806	12.61
2023	174,714,127,567.00	2,042,295,812,083	8.55
2024	164,561,497,546.00	2,042,295,812,083	8.06
2025	133,570,669,730.00	2,124,690,575,218	6.29
2026	253,886,824,638.00	2,330,929,130,615	10.89

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Proporsi belanja modal Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata- rata sebesar 9,28%. Persentase belanja modal tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2022 yaitu sebesar 12,61 % dan terendah pada tahun 2025 yaitu sebesar 6,29 %.

3.2.2.3 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 3.11
Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Transfer	Belanja Daerah	Persentase
2022	415,972,520,858.00	1,958,748,409,806	21.24
2023	407,160,654,435.00	2,042,295,812,083	19.94
2024	404,674,970,525.00	2,042,295,812,083	19.81
2025	394,302,506,874.00	2,124,690,575,218	18.56
2026	407,616,696,900.00	2,330,929,130,615	17.49

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Proporsi belanja transfer Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata- rata sebesar 19,41%. Persentase belanja transfer tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2022 yaitu sebesar 21,24% dan terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 18,56%.

3.2.2.4 Persentase Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.12
Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Tidak Terduga	Belanja Daerah	Persentase
2022	-	1,958,748,409,806	0.00
2023	-	2,042,295,812,083	0.00
2024	-	2,042,295,812,083	0.00
2025	1,000,000,000.00	2,124,690,575,218	0.05
2026	1,000,000,000.00	2,330,929,130,615	0.04

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Proporsi belanja tidak terduga Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata- rata sebesar 0,02%.

3.2.2.5 Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja Seluruh Perangkat Daerah

Konsistensi rencana belanja daerah dengan total belanja seluruh perangkat daerah adalah konsistensi antara belanja pada dokumen RKPD dengan total belanja yang ada di APBD.

Tabel 3.13
Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja

Tahun	Rencana Belanja	Total Belanja	Persentase
2022	2,163,271,983,090	1,958,748,409,806	90.55
2023	2,156,455,999,239	2,042,295,812,083	94.71
2024	2,150,008,472,410	2,042,295,812,083	94.99
2025	2,124,690,575,218	2,124,690,575,218	100.00
2026	2,330,929,130,615	2,330,929,130,615	100.00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Konsistensi rencana belanja daerah dengan total belanja dari tahun 2022 sampai tahun 2024 tidak lebih dari 100%. Ini berarti bahwa total belanja yang dimuat dalam penetapan APBD tidak semua direalisasikan dalam proses realisasi pelaksanaannya.

3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan

Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

2. Penerimaan pinjaman daerah dilakukan manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman ini dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun dari pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Penerimaan Pembiayaan ini dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Dana Cadangan

   Pembentukan Dana Cadangan dilakukan dalam rangka mencukupi anggaran untuk pembangunan poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung.
2. Penyertaan modal pemerintah daerah;

   Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
3. Pembayaran pokok hutang;

Pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.

4. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

   Merupakan pengeluaran pembiayaan berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.14
Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2020 s.d 2025 dan Proyeksi 2026 Kabupaten Temanggung

URAIAN			TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2026
			REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	APBD 2025	
PEMBIAYAAN DAERAH			**114.804.704.856**	**161.211.637.352**	**243.671.402.772**	**180.203.716.352**	**137.543.103.766**	**119.451.731.278**	**307.683.363.278,50**
1	**Penerimaan Pembiayaan**		**124.692.881.503**	**162.455.516.962**	**254.301.081.892**	**182.011.130.352**	**137.543.103.766**	**139.451.731.278**	**307.683.363.278,50**
	a.	SiLPA	123.395.072.830	162.448.209.105	254.248.460.087	180.406.907.044	134.088.073.766	139.392.477.970	177.683.363.278,50
	b.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	50.489.211	7.307.857,00	52.621.805	59.253.308	0	59.253.308	0
	c.	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.247.319.462	0	0	0	0	0	0
	d.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	1.544.970.000	3.455.030.000	0	130.000.000.000,00
2	**Pengeluaran Pembiayaan**		**9.888.176.647**	**1.243.879.610**	**10.629.679.120**	**1.807.414.000**	**0**	**20.000.000.000**	**0**
	a.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	5.000.000.000	0	0	20.000.000.000	0
	b.	Penyertaan Modal Daerah	4.171.840.542	0	0	1.807.414.000	0	0	0
	c.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.716.336.105	1.243.879.610	5.629.679.120	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO				**114.804.704.856**	**161.211.637.352**	**243.671.402.772**	**180.203.716.352**	**137.543.103.766**	**307.683.363.278,50**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa proyeksi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2026 memproyeksikan besaran SiLPA tahun sebelumnnya adalah sebesar Rp177.683.363.278,50 lebih besar dibandingkan besaran SiLPA pada APBD Tahun Anggaran 2025. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 hanya terdiri dari 1 komponen yaitu Pembentukan Dana Cadangan Daerah. Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk rencana pembangunan gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung.

Informasi dan data sebagai suatu sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah tertuang dan telah dilaksanakan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Kerangka pendanaan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana table berikut.

Tabel 3.17
Kerangka Pendanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2026

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2026
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**409.932.332.351,00**
4.1.01	Pajak Daerah	138.418.634.896,00
4.1.02	Retribusi Daerah	239.424.185.891,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.838.440.564,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.251.071.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.613.172.117.937,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.531.857.788.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	238.898.620.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil	80.200.387.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	869.782.398.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	342.976.383.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.314.329.937,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	81.314.329.937,00

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2026
1	2	3
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00
	Jumlah Pendapatan	**2.023.104.450.288,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5,1	**BELANJA OPERASI**	**1.668.284.292.028,50**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.032.724.857.760,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.206.613.568,00
5.1.05	Belanja Hibah	158.201.189.700,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.151.631.000,00
5,2	**BELANJA MODAL**	**253.886.824.638,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	160.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.013.566.238,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	188.920.400.400,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.792.858.000,00
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**407.616.696.900,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.712.594.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	393.904.102.900,00
	Jumlah Belanja	**2.330.787.813.566,50**
	Total Surplus/(Defisit)	**-307.683.363.278,50**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**307.683.363.278,50**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	177.683.363.278,50
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	130.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**307.683.363.278,50**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**307.683.363.278,50**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0,00**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

3.3 Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan prestasi yang bagus karena memperoleh WTP sebanyak 13 kali pada tahun 2012-2024.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Visi dan misi ini telah disampaikan dalam masa kampanye yang kemudian menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Visi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah:

Temanggung untuk Semua
(Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman)

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera	:	Masyarakat yang sehat, terpelajar dan berkecukupan
Berkelanjutan	:	Pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan tidak meningkatkan ketimpangan sosial
Mudah	:	Kemudahan infrastruktur transportasi, pelayanan administrasi publik, dan ketersediaan akses infrastruktur digital
Inklusif	:	Komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya pembangunan
Aman	:	Terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat untuk tinggal dan berkegiatan

Visi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Misi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan suatu kabupaten, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan

menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan pariwisata, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.

2. **Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil**

   Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

3. **Pemberdayaan melalui Pendidikan dan Kesehatan**

   Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

4. **Mempromosikan Kelestarian Lingkungan**

Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

5. **Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif**

Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang.

Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya telah dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan ditingkat nasional, provinsi maupun daerah. Sinkronisasi Visi dan Misi Kabupaten Temanggung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Nasional dan Provinsi Tahun 2025-2029 terdapat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Sinkronisasi Visi dan Misi RPJP/RPJM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

	NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
	RPJP Nasional 2025-2045	**RPJM Nasional 2025-2029**	**RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045**	**RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029**	**RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045**	**RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029**
Visi	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan	Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang Maju, Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045	Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045	TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman)
Misi	1. Transformasi Sosial	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1. Transformasi Sosial	1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif, dan berwawasan global	1. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya	1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas
	2. Transformasi Ekonomi	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Transformasi Ekonomi	2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan	2. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas	2. Diversifikasi perekonomian untuk penghidupan yang stabil

	NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
	RPJP Nasional 2025-2045	**RPJM Nasional 2025-2029**	**RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045**	**RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029**	**RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045**	**RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029**
	3. Transformasi Tata Kelola	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	3. Transformasi Tata Kelola	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas	3. Mewujudkan lingkungan yang memiliki daya dukung memadai, berketahanan dan berkelanjutan	3. Pemberdayaan melalui pendidikan dan kesehatan
	4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	4. Mewujudukan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif	4. Mewujudkan perekonomian yang produktif, adaptif dan berdaya saing	4. Mempromosikan kelestarian lingkungan
	5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	5. Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	5. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan	5. Mengembangkan pemanfaatan kemajuan teknologi digital dan peningkatan konektivitas wilayah	5. Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif

	NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
	RPJP Nasional 2025-2045	**RPJM Nasional 2025-2029**	**RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045**	**RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029**	**RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045**	**RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029**
	6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	6. Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan	6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan pembagunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.	6. Mewujudkan masyarakat sejahtera	
	7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkobo, judi dan penyelundupan	7. Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan			
	8. Kesinambungan Pembangunan	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	8. Kesinambungan Pembangunan			

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

4.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SERTA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Perumusan **tujuan** pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, yaitu **Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman.** Guna mengetahui pencapaian tujuan pembangunan daerah digunakan indikator kinerja yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan sebagai keberhasilan masyarakat sejahtera, indek kepuasan masyarakat sebagai keberhasilan kelestarian lingkungan, keberhasilan kemudahan akses infrastruktur, pelayanan publik, partisipasi, kesetaraan dan rasa aman.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ditetapkan **sasaran** pembangunan daerah yaitu:

1. **Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan**

   Dalam rangka menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengedepankan peningkatan produktivitas sektor PDRB, perwujudan stabilitas ekonomi daerah dan perwujudan ketahanan pangan. Selain itu juga menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan dengan mengedepankan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesehatan), penurunan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan budi pekerti dan keagamaan. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka, PDRB perkapita dan indeks pembangunan manusia.

2. **Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan**

Dalam rangka melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, meningkatkan kesehatan masyarakat, keberlanjutan pembangunan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berketahanan iklim, dan penurunan resiko bencana. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup.

3. **Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik**

   Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta menjamin keadilan sosial dengan mengedepankan pemerataan kualitas infrastruktur di perkotaan, perdesaan dan kawasan pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyelenggaraan konektivitas wilayah serta penataan ruang kewilayahan yang berkualitas. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing. Selain itu juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan peningkatan reformasi birokrasi, perwujudan kohesi sosial, peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan peningkatan profesionalitas ASN. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi dan indeks integritas nasional.

4. **Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan**

   Dalam rangka mewujudkan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi maka dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, selain itu juga pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta pemenuhan hak anak. Indeks gini memperlihatkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan yang berhasil bisa dikatakan apabila sebagian besar masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan secara merata atau ketimpangan

minimal. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks pembangunan gender dan indeks gini.

5. **Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.**

   Kondisi dimana masyarakat tanpa rasa takut atau khawatir dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perlindungan rasa aman melibatkan berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindakan kriminal, yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks harmoni.

Berdasarkan penjelasan masing-masing tujuan dan sasaran, maka disajikan keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah diukur dengan indikator tujuan dan sasaran, dimana untuk target indikator kinerja RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 mempertimbangkan proyeksi target dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026 yang secara rinci dijabarkan pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026
Visi: TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman) Misi: 1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas 2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang yang Stabil 3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan 4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan 5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif	Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,10 - 5,50
			Tingkat Kemiskinan	%	7,90-7,85
			Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	87,56
		1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	PDRB Perkapita (Rupiah)	juta rupiah	39,31
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,20 - 2,00
			Indeks Pembangunan Manusia	angka	73,3
		2. Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	75,5
		3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	%	74,99
			Indeks Integritas Nasional	angka	78,00
			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	75,60
		4. Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini	angka	0,370 – 0,360
			Indeks Pembangunan Gender	angka	97,13
		5. Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	angka	6,79

Sumber: Rankhirl RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, 2025

4.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, maka dirumuskan penyesuaian strategi dan arah kebijakan. Strategi untuk mencapai misi dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan misi **Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas,** adalah:
   a. Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan
   b. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah
2. Strategi untuk mewujudkan misi **Diversifikasi Perekonomian Untuk Penghidupan yang Stabil,** adalah:
   a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian
   b. Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian
3. Strategi untuk mewujudkan misi **Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan,** adalah:
   a. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan
   b. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan kesehatan
   c. Peningkatan pembangunan literasi masyarakat
   d. Peningkatan daya saing pemuda dan olah raga
   e. Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin
   f. Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin
   g. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin
   h. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak
   i. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
   j. Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, agama dan keluarga berencana)
4. Strategi untuk mewujudkan misi **Mempromosikan Kelestarian Lingkungan,** adalah meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap iklim dan bencana melalui: peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim.
5. Strategi untuk mewujudkan misi **Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif**, adalah:
   a. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
   b. Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat

c. Peningkatan keterbukaan informasi publik
d. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik
e. Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi
f. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik
g. Peningkatan pendapatan asli daerah
h. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
i. Peningkatan kebijakan dan manajemen ASN

Sementara itu, arah kebijakan untuk menjabarkan strategi dari masing-masing misi dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)	1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas	Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman **Sasaran:** 1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan 2. Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan 3. Terwujudnya	1.1	Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan	1.1.1	penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	✓	✓	✓	✓	✓
						1.1.2	penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	✓	✓	✓	✓	✓
						1.1.3	penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓
				1.2	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	1.2.1	penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	✓	✓	✓	✓	✓
						1.2.2	pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi	✓	✓	✓	✓	✓
	2	Diversifikasi Perekonomian Untuk Penghidupan Yang Stabil		2.1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian	2.1.1	Peningkatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi	✓	✓	✓	✓	✓
						2.1.2	Peningkatan nilai usaha perdagangan	✓	✓	✓	✓	✓
						2.1.3	Peningkatan kinerja koperasi dan UMKM	✓	✓	✓	✓	✓
						2.1.4	peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	✓	✓	✓	✓	✓
						2.1.5	Peningkatan produksi pertanian	✓	✓	✓	✓	✓

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
			peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik 4. Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan 5. Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya									
				2.2.	Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian	2.2.1	Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja	✓	✓	✓	✓	✓
						2.2.2	Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan	✓	✓	✓	✓	✓
						2.2.3	Peningkatan produksi perikanan	✓	✓	✓	✓	✓
						2.2.4	peningkatan pemajuan kebudayaan	✓	✓	✓	✓	✓
						2.2.5	Peningkatan investasi	✓	✓	✓	✓	✓
						2.2.6	Peningkatan jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan)	✓	✓	✓	✓	✓
	3	Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan		3.1.	Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan	3.1.1	Peningkatan mutu layanan pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓
						3.1.2	Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	✓	✓	✓	✓	✓
						3.1.3	Peningkatan capaian SPM bidang pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓
						3.1.4	Penguatan pendidikan karakter, peningkatan	✓	✓	✓	✓	✓

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
							kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi/kearifan lokal					
						3.1.5	Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	✓	✓	✓	✓	✓
						3.1.6	Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal	✓	✓	✓	✓	✓
						3.1.7	Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan cakupan literasi serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan	✓	✓	✓	✓	✓
				3.2.	Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan Kesehatan	3.2.1	Peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓
						3.2.2	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan jiwa	✓	✓	✓	✓	✓
						3.2.3	Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat	✓	✓	✓	✓	✓
						3.2.4	Penguatan kualitas pelayanan kesehatan primer	✓	✓	✓	✓	✓

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
							dan lanjutin serta pembiayaan kesehatan					
						3.2.5	Peningkatan kesehatan lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓
						3.2.6	Peningkatan kemajuan teknologi kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
						3.2.7	Peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
				3.3.	Peningkatan pembangunan literasi masyarakat	3.3.1	Peningkatan pemanfaatan perpustakaan	✓	✓	✓	✓	✓
						3.3.2	Peningkatan minat gemar membaca baik dalam keluarga maupun masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
				3.4.	Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga	3.4.1	Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda	✓	✓	✓	✓	✓
						3.4.2	Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga	✓	✓	✓	✓	✓
						3.4.3	Peningkatan pembudayaan olahraga	✓	✓	✓	✓	✓
				3.5.	Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin	3.5.1	Peningkatan kualitas hunian masyarakat miskin	✓	✓	✓	✓	✓
						3.5.2	Fasilitasi pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin	✓	✓	✓	✓	✓
				3.6.	Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin	3.6.1	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	✓	✓	✓	✓	✓
						3.6.2	Penyediaan data yang akurat sebagai dasar	✓	✓	✓	✓	✓

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
							penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran					
						3.6.3	Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	✓	✓	✓	✓	✓
				3.7.	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	3.7.1	Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif dan multisektor	✓	✓	✓	✓	✓
				3.8.	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	3.8.1	Peningkatan pemenuhan hak anak	✓	✓	✓	✓	✓
						3.8.2	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan	✓	✓	✓	✓	✓
						3.8.3	Peningkatan perlindungan khusus anak	✓	✓	✓	✓	✓
						3.8.4	Pencegahan perkawinan anak	✓	✓	✓	✓	✓
				3.9.	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	3.9.1	Peningkatan pengarusutamaan gender	✓	✓	✓	✓	✓
						3.9.2	Peningkatan pemberdayaan perempuan	✓	✓	✓	✓	✓
				3.10.	Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, keagamaan, dan keluarga berencana	3.10.1	Peningkatan kualitas pembangunan keluarga	✓	✓	✓	✓	✓
						3.10.2	Peningkatan pengendalian penduduk	✓	✓	✓	✓	✓
						3.10.3	Peningkatan pembinaan keluarga berencana	✓	✓	✓	✓	✓
						3.10.4	Penguatan pendidikan budi pekerti dan keagamaan	✓	✓	✓	✓	✓

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
	4	Mempromosikan kelestarian lingkungan		4.1	Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap iklim dan bencana melalui: peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	4.1.1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	✓	✓	✓	✓	✓
						4.1.2	Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana	✓	✓	✓	✓	✓
	5	Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif		5.1.	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	5.1.1	Peningkatan kualitas kebijakan	✓	✓	✓	✓	✓
						5.1.2	Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah	✓	✓	✓	✓	✓
						5.1.3	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	✓	✓	✓	✓	✓
						5.1.4	Peningkatan tata kelola kearsipan	✓	✓	✓	✓	✓
						5.1.5	Peningkatan tata kelola Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓
				5.2.	Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat	5.2.1	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	✓	✓	✓	✓	✓
						5.2.2	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	✓	✓	✓	✓	✓
						5.2.3	Peningkatan kerukunan umat beragama	✓	✓	✓	✓	✓

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
						5.2.4	Pemberdayaan organisasi masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
				5.3.	Peningkatan keterbukaan informasi publik	5.3.1	Peningkatan layanan pengaduan dan konsultasi	✓	✓	✓	✓	✓
						5.3.2	Peningkatan tata kelola dan layanan informasi public	✓	✓	✓	✓	✓
				5.4.	Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik	5.4.1	Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	✓
						5.4.2	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	✓
				5.5.	Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	5.5.1	Peningkatan infrastruktur pendukung TIK	✓	✓	✓	✓	✓
						5.5.2	Peningkatan ketersediaan jaringan internet ke seluruh rumah tangga	✓	✓	✓	✓	✓
						5.5.3	Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi	✓	✓	✓	✓	✓
				5.6.	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik	5.6.1	Peningkatan digitalisasi pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	✓
				5.7.	Peningkatan pendapatan asli daerah	5.7.1	Peningkatan pengelolaan pajak yang akuntabel	✓	✓	✓	✓	✓
						5.7.	Pemenuhan target pajak	✓	✓	✓	✓	✓

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
				5.8.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	5.8.1	Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah	✓	✓	✓	✓	✓
						5.8.2	Peningkatan kualitas perbendaharaan akuntansi dan pelaporan	✓	✓	✓	✓	✓
				5.9.	Peningkatan kebijakan dan manajemen ASN	5.9.1	Peningkatan pelayanaan kepegawaian	✓	✓	✓	✓	✓
						5.9.2	Peningkatan kualitas ASN	✓	✓	✓	✓	✓
						5.9.3	Peningkatan ketepatan penempatan ASN	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber : Rankhir RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, 2025

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dirumuskan pentahapan RPJMD, dimana pada tahun 2026 yaitu **Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi**. Penguatan reformasi birokrasi dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dan kepuasan masyarakat. Reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh baik aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Penguatan pertumbuhan ekonomi dilakukan pada tahun pertama karena sangat penting dan memberikan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah. Untuk itu perlu penyelarasan kebijakan antara RKPD tahun 2026 dengan RPJPD Tahun 2025-2045. Arah kebijakan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 sebagaimana tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026
Penguatan nilai budaya di dalam aktivitas kehidupan masyarakat	Penguatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi
Pemerataan dan penguatan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung pelayanan publik	
Penguatan kualitas pelayanan lingkungan, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim	
Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor ekonomi	
Penguatan akses dan konektivitas wilayah untuk menunjang sistem keterkaitan wilayah	
Penguatan dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial	

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

4.3. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026

4.3.1. Tema Pembangunan Tahun 2026

Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 bersumber dari tema pembangunan/arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu "Penguatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi". Adapun keselarasan antara tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan RKP Nasional Tahun 2026 tercantum pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Tema RKP Nasional Tahun 2026	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026
Kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif	Penguatan perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, ketahanan sumber daya alam, dan lingkungan hidup serta tata kelola pemerintahan yang dinamis	Penguatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 4.5, tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 selaras dengan tema pembangunan baik RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. **Tema RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2026** bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPJMD 2025-2029 yaitu "**Penguatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi**."

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dilakukan dengan menerapkan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tematik dalam hal ini ditunjukkan dengan proses perumusan prioritas yang memperhatikan tema pembangunan tahun berkenaan. Selanjutnya, penjabaran tema pembangunan menjadi program dan kegiatan pembangunan dalam rangkaian proses perencanaan serta penyelarasan dengan penganggaran menunjukkan penerapan pendekatan Holistik dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 melibatkan berbagai pemangku kepentingan meliputi Pemerintah Daerah, Akademisi, Masyarakat, Dunia Usaha serta Media (*pentahelix*) yang menggambarkan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung juga menerapkan pendekatan Integratif. Sedangkan pendekatan Spasial

ditunjukkan dengan adanya lokasi program prioritas yang telah ditetapkan secara jelas.

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 4.1
Konsep THIS dalam Kebijakan Pembangunan Kabupaten Temanggung

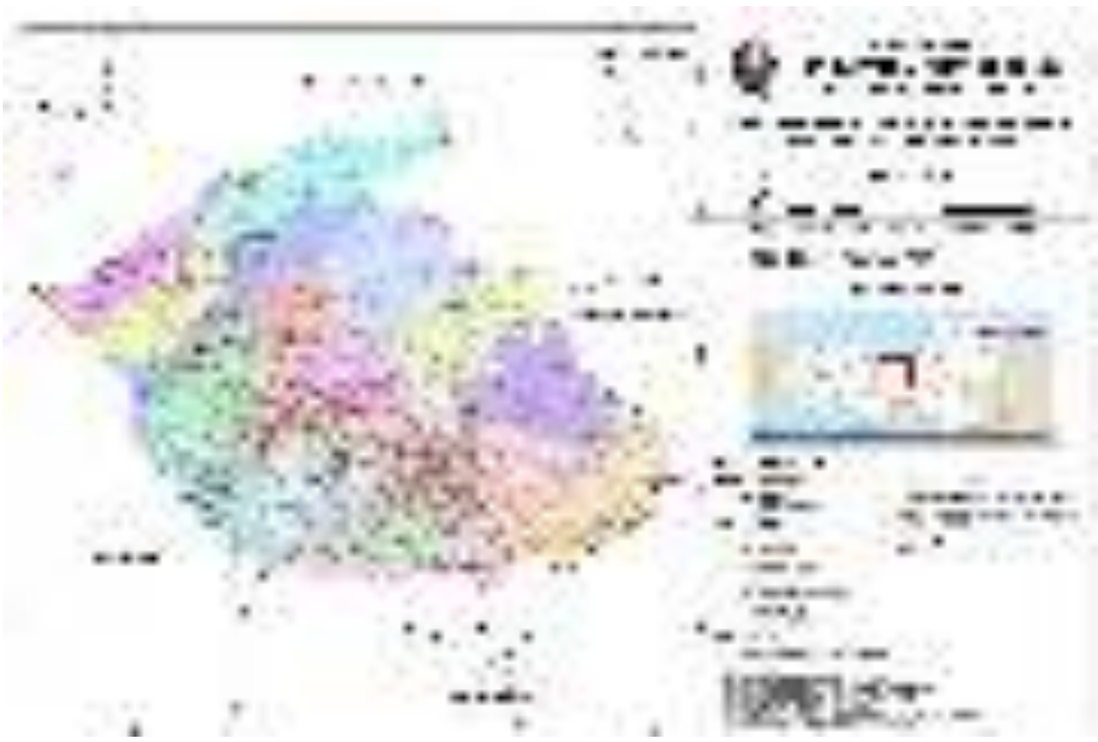

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 4.2
Contoh Implementasi Konsep THIS dalam Kebijakan Pembangunan

Oleh karena itu, pembangunan tahun 2026 ditujukan untuk penguatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas dan fokus pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tema/Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2026

No	Tema/Arah Kebijakan	No	Fokus Pembangunan
1	Penguatan Reformasi Birokrasi	1	Peningkatan kelembagaan sehingga lebih efektif dan akuntabel
		2	Penyempurnaan prosedur kerja, sistem informasi, dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan publik
		3	Penguatan SDM aparatur negara melalui peningkatan kompetensi, pengembangan karier yang profesional dan berintegritas
		4	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
		5	Pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
		6	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas
2	Pertumbuhan Ekonomi	1	Peningkatan investasi sektor strategis, dengan memberikan kemudahan perizinan dan promosi peluang investasi kepada investor
		2	Pengembangan usaha mikro melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, serta digitalisasi usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas
		3	Peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti jalan, irigasi, dan jaringan internet, untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta memperluas akses pasar
		4	Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional
		5	Penguatan pendidikan dan pelatihan, agar tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi
		6	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi, agar proses bisnis lebih efisien, transparan, dan mendukung iklim usaha yang sehat
		7	Penguatan kerja sama antar daerah dan kawasan, untuk membangun konektivitas ekonomi dan memperkuat rantai pasok antarwilayah
		8	Perluasan akses pembiayaan inklusif, termasuk penguatan peran lembaga keuangan mikro, koperasi untuk mendukung produktivitas ekonomi masyarakat
		9	Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, melalui program padat karya, dan pemberdayaan komunitas lokal berbasis potensi wilayah

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

4.3.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2026

A. Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 terdapat 8 prioritas nasional pembangunan (Asta Cita) dengan uraian sebagai berikut.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif

Adapun Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dalam Wilayah Pengembangan Gelangmanggung adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan TPST Regional Magelang dalam rangka mendukung KSPN Borobudur;
2. Layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) penghubung Kutoarjo-Purworejo-Borobudur;
3. Pengembangan wisata berbasis global and cultural heritage kawasan Borobudur;
4. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani;
5. Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, dan horti (tembakau, kopi, aren, panili, cabai)
6. Pengembangan industri pengolahan perkebunan dan pertanian;
7. Pengendalian fungsi lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Program delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 35 program/kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, antara lain:

1. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center);
2. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional;
3. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK;
4. Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa;
5. Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta;
6. Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan;
7. Membangun 1.000 Desa/Kampung wisata baru;

8. BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng);
9. Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat;
10. Cek Kesehatan Gratis;
11. Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu;
12. Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government dan Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa;
13. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak;
14. Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru;
15. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;
16. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
17. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis;
18. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
19. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
20. Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hydro, maupun tenaga surya;
21. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;
22. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata;
23. Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM;
24. Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau;
25. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa;
26. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;

27. Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan;
28. Peningkatan operasional kader Posyandu;
29. Peningkatan kualitas hidup lansia;
30. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;
31. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;
32. Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga;
33. Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan;
34. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.

C. Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Pembangunan daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 diwujudkan dalam program prioritas sebagai berikut:

1. Penataan garis imajiner, dengan program aksi:
   - Pembangunan *city walk* Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprapto, Jl M.T. Haryono
   - Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman
   - Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun-alun
   - Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Pala
   - Revitalisasi Taman Kartini
   - Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala
   - Pembangunan *citywalk* Parakan (Jln Diponegoro dan Jl Brigjen Katamso)
   - Pembangunan *Citywalk* Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)
   - Revitalisasi Pasar Kliwon
2. Penataan kapasitas dan kinerja birokrasi, dengan program aksi:
   - Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi
   - Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik
   - Penerapan *merit system* dan *talent poll*

- Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi
- Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati
- Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, Amanah)
- Peningkatan kesejahteraan ketua RT dan RW
- Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (tata kelola kelurahan)

3. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan, dengan program aksi:
   - Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan
   - Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian
   - Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk
   - Regenerasi petani
   - Penyediaan bibit ternak dan ikan
   - Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan
   - Pembangunan *greenhouse*
4. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan, dengan program aksi:
   - Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten
   - Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi
   - Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)
   - Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik
   - Penyediaan air bersih dan sanitasi
   - Penyediaan rumah layak huni
5. Optimalisasi pasar daerah, dengan program aksi:
   - Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif
   - Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional
6. Penguatan dan pelestarian seni budaya, dengan program aksi:
   - Pembentukan dewan kesenian
   - Pertemuan pegiat seni dan budaya
   - Penghargaan pada seniman dan budayawan
   - Pentas seni di ruang publik
   - Pelaku seni dan budaya lokal go to school
   - Pemakaian baju adat khas Temanggung

- Festival seni dan budaya tahunan Temanggung
- Informasi dan promosi pariwisata
- Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif
- Rebranding Temanggung

7. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dengan program aksi:
   - Pembentukan Satgas PPA
   - Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan
   - Pembentukan desa ramah perempuan dan anak
   - Pemberdayaan ekonomi perempuan
   - Penyediaan *hotline/panic button*
8. Pelayanan dasar bidang pendidikan, dengan program aksi:
   - Akses pendidikan untuk semua warga
   - Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru
   - Pimpinan daerah sambang sekolah
   - Penguatan database pendidikan
   - Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan
   - Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK
   - Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP
   - Pemberdayaaan PAUD
   - Insentif kepada Guru Keagamaan
   - Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah
   - Peningkatan literasi membaca melalui perpustakaan daerah
9. Pelayanan dasar bidang kesehatan, dengan program aksi:
   - Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan
   - Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)
   - Pemeriksaan kesehatan gratis
   - Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa
   - Peningkatan kualitas layanan RSUD
   - Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Jamak
   - Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonoboyo
10. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan, dengan program aksi:
    - Penataan data program perlindungan sosial
    - Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang
    - Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal

- Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat

11. Pelayanan perijinan dan administrasi, dengan program aksi:
    - Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik
12. Integrasi data, dengan program aksi:
    - Penyepakatan protokol *interoperobilitas* data antar PD
    - Sinkronisasi dan integrasi data
13. Pencegahan dan mitigasi bencana alam, dengan program aksi:
    - Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana
    - Pembentukan desa tangguh bencana
    - Peningkatan kapasitas relawan destana
    - Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam
    - Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana
    - Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan
    - Penyediaan *early warning system*
    - Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten
14. Digitalisasi dan *smart city,* dengan program aksi:
    - Digitalisasi dan integrasi layanan digital
    - Lapor Bupati
    - Penyediaan dan peningkatan SDM
    - Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa
    - Pembuatan *superapps mobile*
    - Penyediaan infrastruktur jaringan internet di perdesaan
    - Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis
15. Pelestarian lingkungan hidup, dengan program aksi:
    - Perlindungan sumber mata air
    - Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air
    - Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat
    - Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah
    - Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST
    - Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas
    - Aksi bersih lingkungan
    - Penghijauan di lokasi lahan kritis

- Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis
- Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis

16. Pembangunan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi, dengan program aksi:
    - Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
    - Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
    - Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
    - Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
    - BUMD Sehat
17. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah, dengan program aksi:
    - Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah
    - Pembinaan dan pemberdayaan ormas
18. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga, dengan program aksi:
    - Pemajuan cabang olahraga unggulan
    - kesejahteraan dan profesionalitas atlet
    - Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional
19. Peningkatan kualitas tenaga kerja, dengan program aksi:
    - Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
    - Peningkatan hubungan industri

Perumusan prioritas pembangunan/program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan konsistensi/keselarasan/keterkaitan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, strategi dan arah kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2026

   Permasalahan pembangunan Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kabupaten Temanggung

memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan isu strategis yang ada.

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah mulai dilibatkan sejak awal, yaitu adanya penggalian masalah dan isu strategis dalam Murenbang RKPD di kelurahan, kecamatan dan kabupaten dengan menghadirkan masyaarakat secara langsung. Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung juga memanfaatkan media informasi kreatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desiminasi inofrmasi dan aspirasi masyarakat bisa dilakukan melalui media tersebut. Bentuk media yang digunakan antara lain melalui media sosial, yang menampilkan link materi , link saran masukan dan lain sebagainya melaui aplikasi Lintang Asmara (https://linktr.ee/lintangasmarabappedatmg) termasuk aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui link tersebut.

Adapun permasalahan pembangunan/isu strategis telah tertuang pada bab II RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Selanjutnya, permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan kembali menurut masing-masing isu strategis yang ada guna pemetaan konsistensi terhadap prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan, sebagaimana tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan/Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2026

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
1	Konektivitas dan aksesibilitas	• Masih rendahnya akses air minum aman • Masih rendahnya akses sanitasi aman • Jalan Kabupaten dengan kondisi mantap (baik dan sedang) baru tercapai 88,92%. • Masih adanya resiko kerusakan jalan karena masih banyaknya genangan pada musim penghujan yang juga berkaitan dengan masih kurangnya drainase jalan yang dibangun • Masih diperlukan upaya untuk menjaga trotoar dalam kondisi baik • Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman • Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kewenangan Kabupaten Temanggung masih berada pada kategori Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian • Baru terdapat 1 (satu) unit IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Kabupaten Temanggung yaitu IPLT Sanggrahan dengan kapasitas yang sangat terbatas yaitu 10 m3/hari sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pengolahan lumpur tinja dalam skala kabupaten • Masih adanya RTLH • Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju akses sanitasi aman	1. Penataan garis imajiner 2. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan	1. Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum 2. Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 3. Penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas
		• Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan		Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	1. Penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Masih tingginya tingkat kejadian laka lantas • Masih adanya angkutan umum yang belum memenuhi standar minimal pelayanan			2. Pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi
2	Ketahanan pangan	• Masih diperlukan upaya untuk mencukupi ketersediaan pangan • Diversifikasi pangan masih banyak menemui masalah karena masyarakat sudah terbiasa makan makanan dari beras • Perlu peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum • Masih rendahnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) • Masih perlunya peningkatan swasembada pada ikan konsumsi • Masih perlunya peningkatan pembinaan nelayan perairan umum • Terjadi penurunan luas panen tanaman pangan yang disebabkan adanya peralihan komoditas dan peralihan peruntukan lahan • Terjadi penurunan produksi tanaman pangan yang disebabkan karena penurunan luas panen, perubahan iklim yang ekstrem, serta serangan hama dan penyakit tanaman • Terjadi penurunan produktivitas tanaman pangan yang berbanding lurus dengan berkurangnya jumlah produksi dan luas panen • Adanya penurunan produktivitas hasil peternakan • Masih rendahnya persentase kelompok tani yang naik kelas	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian	1. Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan 2. Peningkatan produksi perikanan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT			
3	Diverfisikasi perekonomian untuk penghidupan stabil	• Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal	1. Optimalisasi pasar daerah 2. Penguatan dan pelestarian seni budaya 3. Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi 4. Pelayanan perijinan dan administrasi 5. Peningkatan kualitas tenaga kerja	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian	1. Peningkatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi 2. Peningkatan nilai usaha perdagangan 3. Peningkatan kinerja koperasi dan UMKM 4. Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 5. Peningkatan produksi pertanian
		• Masih adanya pengangguran • Masih adanya tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan • Masih adanya tenaga kerja terdaftar yang belum ditempatkan • Masih ditemui perusahaan yang belum membayarkan upah sesuai UMK • Masih kurangnya peluang kerja formal di Kabupaten Temanggung • Masih rendahnya persentase koperasi sehat • Masih terdapat koperasi tidak sehat yang memerlukan pengawasan • Terdapat banyak Usaha Kecil dan Menengah muncul namun tidak naik kelas • Masih diperlukan penguatan dalam pembinaan, pendidikan dan pelatihan		Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian	1. Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja 2. Peningkatan pemajuan kebudayaan 3. Peningkatan investasi 4. Peningkatan jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan)

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif • Perlunya peningkatan pemberian dukungan fasilitasi pengembangan usaha bagi usaha mikro • Masih rendahnya persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan • Masih rendahnya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) • Masih rendahnya Indeks Pembangunan Kebudayaan • Perkembangan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya belum berbanding lurus dengan penyelenggaraan event seni dan budaya • Belum semua kelompok seni/budaya mendaftarkan ke register kebudayaan • Masih belum optimalnya pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung • Masih terdapat cagar budaya yang belum dilestarikan • Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB • Kurangnya perencanaan pada saat pembangunan maupun pengembangan destinasi yang menyebabkan perkembangan objek wisata kurang optimal • Masih rendahnya ketertarikan dan pemahaman desa untuk membentuk desa wisata • Masih rendahnya sumber daya pelaku wisata dan ekonomi kreatif pendukung wisata serta keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pendataan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dan belum			

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		tersedia aturan secara detail yang mengatur tentang pelaku ekraf • Masih rendahnya lama tinggal wisatawan • Kualitas sarana dan prasarana pasar belum kompetitif untuk bersaing dengan pasar modern karena masih dalam kondisi kurang baik • Ketertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan masih kurang • Diperlukan perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan Dinas • Masih rendahnya jumlah pedagang yang menggunakan transaksi digital • Masih rendahnya jumlah jumlah pelaku usaha informal yang mendapat fasilitasi • Masih rendahnya jumlah pelaku usaha eksportir yang di bina • Masih terdapat IKM unggulan daerah yang belum mendapatkan fasilitasi • Belum optimalnya pembinaan industri penghasil cukai			
4	Pemberdayaan sumber daya manusia	• Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia	1. Pelayanan dasar bidang pendidikan 2. Pelayanan dasar bidang kesehatan 3. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan 4. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak 5. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga		

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Masih tingginya angka kemiskinan • Belum optimalnya persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin	1. Peningkatan kualitas hunian masyarakat miskin 2. Fasilitasi pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin
				Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin	1. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial 2. Penyediaan data yang akurat sebagai dasar penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran 3. Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
				Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	1. Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif dan multisektoral
		• Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah • Belum tercapainya angka rata-rata lama sekolah sesuai Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 13 tahun • Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah (HLS) • Masih terdapat angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat • Masih terdapat fasilitas pendidikan ruang kelas dalam kondisi kurang baik • Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM). • Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) • Masih rendahnya warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan	1. Peningkatan mutu layanan pendidikan 2. Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal 3. Peningkatan capaian SPM bidang pendidikan 4. Penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi/kearifan lokal 5. Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) 6. Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal 7. Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Rendahnya persentase APK PAUD pada usia 4-6 tahun dan 5-6 tahun • Masih rendahnya persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi • Masih rendahnya jumlah pendidik kesetaraan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu • Masih rendahnya jumlah pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik • Masih rendahnya persentase tenaga penunjang lain yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat di SD, SMP dan satuan pendidikan non formal • Rendahnya rasio jumlah pengawas SD • Masih rendahnya jumlah Kepala Satuan PAUD dan SMP yang berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak • Masih rendahnya rasio siswa/guru SD dan SMP serta rasio siswa/rombel SD dan SMP • Masih rendahnya rasio jumlah pengawas SD dan SMP			cakupan literasi serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan
		• Masih tingginya angka stunting • Masih adanya kasus gizi buruk • Masih tingginya kasus kematian ibu • Masih adanya kasus kematian bayi dan balita • Masih ditemukan kasus kematian neonatal		Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan	1. Peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas 1. Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan jiwa 2. Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Masih ditemukan kasus kematian balita • Masih ditemukan balita • Masih kurangnya kepesertaan dan rendahnya keaktifan peserta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) • Belum optimalnya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB) • Belum optimalnya keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TB) • Masih ditemukannya kasus Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular • Belum semua fasyankes memenuhi standar mutu • Masih rendahnya persentase puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar			3. Penguatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan serta pembiayaan kesehatan 4. Peningkatan kesehatan lingkungan 5. Peningkatan kemajuan teknologi kesehatan 6. Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan
		• Belum optimalnya pemberdayaan terhadap perempuan • Masih perlunya peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender • Masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak • Belum semua rumah sakit dan Puskesmas menerapkan pelayanan ramah anak		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	1. Peningkatan pemenuhan hak anak 2. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan 3. Peningkatan perlindungan khusus anak 4. Pencegahan perkawinan anak
				Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1. Peningkatan pengarusutamaan gender 2. Peningkatan pemberdayaan perempuan
		• Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk • Masih adanya sasaran unmetneed pada tahun 2024 • Masih rendahnya persentase kampung KB pada desa berkembang dan mandiri • Pembangunan kualitas keluarga masih dalam kategori cukup baik		Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, keagamaan, dan keluarga berencana)	1. Peningkatan kualitas pembangunan keluarga 2. Peningkatan pengendalian penduduk 3. Peningkatan pembinaan keluarga berencana 4. Penguatan pendidikan budi pekerti dan keagamaan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Masih minimnya prestasi bidang kepemudaan dan olahraga karena kurangnya kapasitas SDM, keterbatasan sarpras yang sesuai dengan standar minimal dan pelatih yang berkompeten, serta tidak terdatanya atlet temanggung yang mengikuti lomba atau event yang diikuti • Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat • Masih kurangnya upaya pembudayaan Gemar Membaca di kalangan masyarakat • Masih terdapat perpustakaan yang kurang aktif • Perlu adanya peningkatan upaya pelestarian koleksi nasional dan koleksi naskah kuno di Kabupaten Temanggung		Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga Peningkatan pembangunan literasi masyarakat	1. Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda 2. Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga 3. Peningkatan pembudayaan olahraga 1. Peningkatan pemanfaatan perpustakaan 2. Peningkatan minat gemar membaca baik dalam keluarga maupun masyarakat
5	Kelestarian lingkungan	• Belum optimalnya pengelolaan sampah • Belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis • Perlunya peningkatan konservasi lingkungan hidup • Belum optimalnya mitigasi terhadap perubahan iklim • Masih tingginya lahan potensial kritis • Adanya fenomena perubahan iklim • Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) • Perlunya peningkatan pada pengelolaan persampahan • Masih adanya sekolah yang belum berwawasan lingkungan • Tingkat kerentanan wilayah yang tinggi • Banyak masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana	1. Pelestarian lingkungan hidup 2. Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap iklim dan bencana	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim 2. Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Belum semua kawasan rawan bencana mendapatkan layanan pelatihan kebencanaan • Beberapa Desa Tangguh Bencana (Destana) tidak berjalan secara optimal • Sarana dan prasarana penanganan bencana masih belum sepenuhnya tersedia			
6	Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik • Masih terdapat Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati • Dokumentasi perundangan melalui JDIH belum berjalan dengan efektif • Masih diperlukan peningkatan dalam upaya implementasi Reformasi Birokrasi • Diperlukan peningkatkan kualitas pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah • Diperlukan perbaikan dan peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung • Masih terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang terhambat sehingga tidak selesai tepat waktu	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi 2. Integrasi Data 3. Digitalisasi dan smart city 4. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	1. Peningaktan kualitas kebijakan 2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah 4. Peningkatan tata kelola kearsipan 5. Peningkatan tata kelola pemerintah desa

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Masih terdapat BUMD yang belum mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan KAP • Diperlukan optimalisasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa • Diperlukan optimalisasi dalam penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan • Perlunya peningkatan pencatatan non-tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa • Pengesahan Raperda yang tepat waktu cenderung menurun • Masih rendahnya jumlah Perda Inisiatif dibandingkan dengan Raperda yang diusulkan oleh eksekutif • Diperlukan pengoptimalan pelaksanaan kegiatan aspirasi sesuai dengan yang direncanakan • Belum optimalnya ketercapaian kinerja pembangunan daerah • Perlunya peningkatan konsistensi kegiatan rencana pembangunan • Perlu adanya peningkatan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan • Keterbatasan pada infrastruktur dan fasilitas riset serta sumber daya manusia riset dan inovasi khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan • Pemanfaatan hasil riset dan inovasi di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya mewarnai perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan			

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Diperlukan upaya peningkatan indeks persepsi anti korupsi • Perlu peningkatan optimalisasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Perlu peningkatan pengawasan baik perencanaan, keuangan maupun penyelenggaraan kinerja • Belum optimalnya manajemen kearsipan di Kabupaten Temanggung • Diperlukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada • Belum seluruh desa berpredikat mandiri • Masih rendahnya persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang berbadan hukum • Masih ada penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil • Masih terdapat sarana dan prasarana lokal kelurahan di kecamatan dalam kondisi kurang baik • Perlu optimalisasi kualitas layanan publik di kecamatan • Perlunya upaya untuk mendorong masyarakat melakukan pembayaran PBB tepat waktu • Masih diperlukan optimalisasi pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat karena masih ada blank spot • Jumlah layanan publik elektronik (66 layanan) masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan total layanan publik yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (131 layanan)		Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	1. Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik Peningkatan digitalisasi pelayanan publik 1. Peningkatan infrastruktur pendukung TIK 2. Peningkatan ketersediaan jaringan internet ke seluruh rumah tangga 3. Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Masih adanya dualisme data statistik yang berasal dari kegiatan sektoral yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan data statistik yang sama yang dikelola BPS dari kegiatan statistik dasar • Perlu peningkatan pengelolaan data statistik sektoral • Perlu peningkatan validitas data produsen • Perlunya peningkatan koordinasi dalam pengumpulan data dari produsen data di luar Pemkab Temanggung (karena keterbatasan kewenangan produsen data dalam diseminasi data statistik) • Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah • Belum maksimalnya jumlah sistem informasi yang telah dilakukan pengujian kerentanan			
		• Perlu peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IKPD) • Masih rendahnya persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah • Perlu peningkatan anggaran dan kapasitas SDM untuk pendataan baru dan intensifikasi pendataan objek pajak daerah • Perlunya peningkatan pemahaman SDM dalam pemanfaatan aset daerah		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Peningkatan kualitas perbendaharaan akuntansi dan pelaporan
				Peningkatan pendapatan asli daerah	1. Peningkatan pengelolaan pajak yang akuntabel 2. Pemenuhan target pajak
		• Perlu penerapan sistem merit secara optimal dalam pengelolaan kepegawaian • Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas sehingga belum bisa merumuskan		Peningkatan kebijakan dan manajeman ASN	1. Peningkatan pelayanan kepegawaian 2. Peningkatan kualitas ASN 3. Peningkatan ketepatan penempatan ASN

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		kesenjangan antara kompetensi dan kualifikasi • Perlunya optimalisasi pelaksanaan updating data kepegawaian • Belum optimalnya peningkatan pendayagunaan aparatur dan layanan aparatur • masih banyak ASN yang belum melaksanakan diklat, serta rendahnya jumlah ASN yang disetujui untuk mendapatkan penghargaan (satya lencana) • masih rendahnya ormas yang mendapatkan pembinaan • perhitungan indeks toleransi juga mengalami kendala • Masih adanya pelanggaran Perda/Perbup • Meningkatnya kejadian kebakaran di rumah/permukiman • Belum optimalnya pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota • Belum terpenuhinya Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) • Masih rendahnya persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh relawan kebakaran		Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat	1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 2. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan 3. Peningkatan kerukunan umat beragama 4. Pemberdayaan organisasi masyarakat

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

2. Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2026

Berdasarkan amanat Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, selanjutnya hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan. Adapun keterkaitan isu strategis, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2026 sebagaimana tabel 4.8:

Tabel 4.8
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2026

No.	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD
1.	Konektivitas dan aksesibilitas	• Penataan garis imajiner • Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	1. Meningkatkan kualitas SDM untuk percepatan peningkatan IPM dan pemenuhan SPM pelayanan dasar (1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agar SPM pendidikan segera tuntas melalui: a) Pemenuhan standarisasi infrastruktur pendidikan memenuhi SPM b) Peningkatan upaya agar partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar meningkat sesuai SPM c) Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional d) Menggiatkan kembali pendidikan kesetaraan agar penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang
2.	Ketahanan pangan	• Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	
3.	Diversifikasi perekonomian untuk penghidupan yang stabil	• Optimalisasi pasar daerah • Penguatan dan pelestarian seni budaya • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Pelayanan perijinan dan administrasi • Peningkatan kualitas tenaga kerja	
4.	Pemberdayaan sumber daya manusia	• Pelayanan dasar bidang pendidikan • Pelayanan dasar bidang kesehatan	

No.	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD
		• Pelayanan sosial dan bidang keagamaan • Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak • Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan e) Meningkatkan rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional f) Peningkatan bantuan teknis kepada PAUD agar jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD meningkat (2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, agar Indeks Kesehatan meningkat dan SPM kesehatan tuntas, dengan memastikan bahwa a) Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar b) Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar c) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar d) Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar e) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar f) Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar g) Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar h) Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar i) Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar j) Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar k) Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar l) Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (3) Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah memenuhi SPM, melalui:
5.	Kelestarian lingkungan	• Pencegahan dan mitigasi bencana alam • Pelestarian lingkungan hidup	
6.	Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	• Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Integrasi data • Digitalisasi dan smart city • Pengembangan kerjaasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	

No.	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD
			a) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari b) Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari c) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik agar jumlah warga negara yang memperoleh pengolahan air limbah untuk limbah domestik d) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana e) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan industri pengolahan, agar lapangan kerja lebih luas dan kemiskinan serta pengangguran berkurang 3. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian dan pelayanan dasar agar ketimpangan antar wilayah turun 4. Peningkatan kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah agar Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah terus meningkat 5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dengan indikator Nilai SAKIP Daerah, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terus meningkat lebih baik

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung dan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026, 2025

3. Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Prioritas Nasional

Sebagaimana penjelasan terkait arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2026 secara nasional dituangkan ke dalam 8 Prioritas Nasional yang secara rinci dijabarkan di sasaran pada masing-masing PN. Dalam perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 perlu memperhatikan keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dengan prioritas nasional RPJMN Tahun 2025-2029. Keselarasan antara sasaran pembangunan daerah RPJMD

dengan prioritas nasional RPJMN dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9
Persandingan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional RKP 2026

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
1	PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM Indikator: • Indeks Demokrasi Indonesia • Indeks HAM	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	6,79	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah
2	PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2	Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan Indikator: • Asia Power Index (Military Capability) • Asia Power Index (Diplomatic Influence) • Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya • *Global Cybersecurity Index* • Indeks Keamanan Laut Nasional	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	6,79	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah
		3	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
			Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*) Indikator: • Indeks Ketahanan Pangan • Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan • Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini	0,370 – 0,360	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
		4	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*) Indikator: • Indeks Ketahanan Energi • Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	-	-	-	-
		5	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*) Indikator: • Indeks Ketahanan Air Nasional • Kapasitas Tampungan Air • Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	74,99%	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
			• Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman				
		6	Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan Indikator: • Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global • *Indonesia Blue Economy Index* (IBEI) • Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	• Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Optimalisasi pasar daerah
				Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini	0,370 – 0,360	• Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Optimalisasi pasar daerah
		7	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau Indikator: • Indeks ekonomi hijau • Indeks kualitas pengelolaan sampah (IKPS) • Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah • Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif • Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan • Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati • Indeks kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks kualitas lingkungan hidup	75,5	Pelestarian lingkungan hidup
3	PN 3: Melanjutkan pengembangan	8	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	74,99%	Penataan garis imajiner

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		Indikator: • Stok infrastruktur terhadap PDB	antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik			
		9	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB Indikator: • Total aset sektor keuangan/PDB • Aset perbankan/PDB • Aset dana pension/PDB • Aset asuransi/PDB • Kapitalisasi pasar modal/PDB • Total kredit/PDB • Inklusi keuangan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	• Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Optimalisasi pasar daerah
				Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini	0,370 – 0,360	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
		10	Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas Indikator: • Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal • Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB • Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah • Rasio kewirausahaan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,20-2,00	• Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Peningkatan kualitas tenaga kerja
				Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini	0,370 – 0,360	Peningkatan kualitas ternaga kerja
		11	Meningkatnya nilai tambah pariwisata Indikator: • Rasio PDB pariwisata • Devisa pariwisata	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	Penguatan dan pelestarian seni budaya

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
		12	Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif Indikator: • Proporsi PDB ekonomi kreatif	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
				Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini	0,370 – 0,360	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
4	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	13	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata Indikator: • Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun • Harapan Lama Sekolah • Rata-rata nilai PISA : membaca, matematika, sains • Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional : literasi membaca numerasi • Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi • Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi • Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	73,30	Pelayanan dasar bidang pendidikan

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
		14	Terwujudnya kesehatan untuk semua Indikator: • Usia Harapan Hidup • Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun) • Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) • Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita • Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk) • Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	73,30	Pelayanan dasar bidang kesehatan
		15	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif Indikator: • Indeks pembangunan kualitas keluarga • Indeks perlindungan anak • Indeks pembangunan pemuda • Indeks ketimpangan gender • Indeks pembangunan gender • Mobilitas penduduk lanjut usia • Mobilitas penduduk penyandang disabilitas	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	97,13	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
		16	Menguatnya iptek, inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,20-2,00	Peningkatan kualitas tenaga kerja

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
			Indikator: • Peringkat indeks inovasi global • Tingkat pengangguran terbuka • Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB) • Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan			
		17	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat Indikator: • Peringkat pada Asian Games • Peringkat pada Asian Para Games • Peringkat pada ASEAN Para Games • Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	73,30	Pengembangan atlet dan prestasi olahraga
5	PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	18	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan Indikator: • Rasio PDB industri pengolahan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
		19	Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global Indikator: • Biaya logistik	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
			• Pembentukan modal tetap bruto (%PDB) • Ekspor barang dan jasa (%PDB)				
6	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	20	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan Indikator: • Tingkat kemiskinan • Tingkat kemiskinan ekstrem • Proporsi penduduk kelas menengah • Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan • Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	73,30	Pelayanan sosial dan bidang keagamaan
					PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
				Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini	0,370-0,360	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
					Tingkat Pengangguran Terbuka	2,20-2,00	Peningkatan kualitas tenaga kerja
		21	Meningkatkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan Indikator: • Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	74,99%	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
		22	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Indikator: • Persentase desa mandiri	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	75,60	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
		23	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indikator: • Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional • Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDB nasional	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	• Optimalisasi pasar daerah • Pelayanan perijinan dan administrasi • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
7	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	24	Terwujunya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional Indikator: • Indeks pembangunan hukum • Indeks persepsi korupsi • Indeks integritas partai politik	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Indeks integritas nasional	78,00	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
		25	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani Indikator: • Indeks reformasi birokrasi nasional • Indeks pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	75,60	• Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Integrasi data • Digitalisasi dan *smart city*
		26	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba Indikator: • Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Indeks integritas nasional	78,00	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
		27	Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Indikator: • *Return on asset (RoA)* BUMN	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
		28	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan Indikator: • Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB • Rasio Perpajakan terhadap PDB	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	• Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Pelayanan perijinan dan administrasi
		29	Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Indikator: • Tingkat inflasi	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	39,31 juta rupiah	• Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Optimalisasi pasar daerah
8	PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	30	Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju Indikator: • Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) • Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	6,79	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2026	Prioritas Pembangunan
	antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur		• Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)				
		31	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim Indikator: • Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks kualitas lingkungan hidup	75,5	Pencegahan dan mitigasi bencana alam
Jumlah Sasaran PN					**31**		
Jumlah Sasaran Pembangunan Daerah					**5**		

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung dan Rancangan RKP Tahun 2026, 2025

Berdasarkan tabel 4.9, dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Temanggung 2026 dengan sasaran prioritas nasional RKP 2026, akan tetapi terdapat 1 (satu) sasaran prioritas nasional yang tidak bisa ada keterkaitan secara langsung oleh sasaran dan prioritas pembangunan daerah dikarenakan urusan energi tidak menjadi kewenangan kabupaten yaitu Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan *Nexus* Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*).

Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan prioritas nasional RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10
Persandingan antara Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung 2025-2029

No	Prioritas Nasional RPJMN	Prioritas Pembangunan Daerah
1	PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
2	PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	• Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan • Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Optimalisasi pasar daerah • Pelestarian lingkungan hidup
3	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	• Penataan garis imajiner • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Optimalisasi pasar daerah • Peningkatan kualitas tenaga kerja • Penguatan dan pelestarian seni budaya • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
4	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	• Pelayanan dasar bidang pendidikan • Pelayanan dasar bidang kesehatan • Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak • Peningkatan kualitas tenaga kerja • Pengembangan atlet dan prestasi olahraga
5	PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
6	PN 6:	• Pelayanan sosial dan bidang keagamaan • Peningkatan kualitas tenaga kerja

No	Prioritas Nasional RPJMN	Prioritas Pembangunan Daerah
	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	• Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan • Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Optimalisasi pasar daerah • Pelayanan perijinan dan administrasi • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
7	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	• Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Integrasi data • Digitalisasi dan *smart city* • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Pelayanan perijinan dan administrasi • Optimalisasi pasar daerah
8	PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	• Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah • Pencegahan dan mitigasi bencana alam

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Sementara itu, keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2026 dengan sasaran Prioritas Nasional 2026 dapat dijelaskan sebagaimana tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11

Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	angka	73,30	Pelayanan dasar bidang pendidikan	1. Akses pendidikan untuk semua warga 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru 3. Pimpinan daerah sambang sekolah 4. Penguatan database pendidikan 5. Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan 6. Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK 7. Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP 8. Pemberdayaaan PAUD 9. Insentif kepada Guru Keagamaan 10. Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah 11. Peningkatan Literasi membaca melalui perpustakaan daerah	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun 2. Harapan Lama Sekolah 3. Rata-rata nilai PISA : membaca, matematika, sains 4. Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional : literasi membaca numerasi 5. Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi 6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi 7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi
				Pelayanan dasar bidang kesehatan	1. Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas) 3. Pemeriksaan kesehatan gratis 4. Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa 5. Peningkatan kualitas layanan RSUD 6. Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Jamak 7. Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonoboyo		Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup 2. Angka Kelahiran Total (Total 3. Fertility Rate) (rata-rata 4. kelahiran per wanita usia 5. subur 15–49 tahun) 6. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 7. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 8. Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk) 9. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
				Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	1. Pemajuan cabang olahraga unggulan 2. Kesejahteraan dan profesionalitas atlet 1. Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional		Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat	1. Peringkat pada Asian Games 2. Peringkat pada Asian Para Games 3. Peringkat pada ASEAN Para Games 1. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga
	PDRB Perkapita	Juta rupiah	39,31	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan Perkebunan 2. Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian 3. Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk 4. Regenerasi petani 5. Penyediaan bibit ternak dan ikan 6. Peningkatan kapasitas peternak dan petani ikan 7. Pembangunan *greenhouse*	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	1. Indeks Ketahanan Pangan 2. Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan 3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan	1. Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global 2. Indonesia *Blue Economy Index* (IBEI) 3. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional			
				Pengembangan kerjasama	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan	PN 3:		1. Total aset sektor keuangan/PDB

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
				pembangunan dan peningkatan investasi	2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	2. Aset perbankan/PDB 3. Aset dana pension/PDB 4. Aset asuransi/PDB 5. Kapitalisasi pasar modal/PDB 6. Total kredit/PDB 7. Inklusi keuangan
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional			
				Penguatan dan pelestarian seni budaya	1. Pembentukan dewan kesenian 2. Pertemuan pegiat seni dan budaya 3. Penghargaan pada seniman dan budayawan 4. Pentas seni di ruang publik 5. Pelaku seni dan budaya lokal go to school 6. Pemakaian baju adat khas Temanggung 7. Festival seni dan budaya tahunan Temanggung 8. Informasi dan promosi pariwisata 9. Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif 10. Rebranding Temanggung		Meningkatnya nilai tambah pariwisata	1. Rasio PDB pariwisata 2. Devisa pariwisata
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala		Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi PDB ekonomi kreatif

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	Rasio PDB industri pengolahan
							Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	1. Biaya logistik 2. Pembentukan modal tetap bruto (%PDB) 3. Ekspor barang dan jasa (%PDB)
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	1. Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional 2. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDB nasional
				Pelayanan perijinan dan administrasi	Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat			
				Pengembangan kerjasama	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan		Mempercepat pengurangan kemiskinan	1. Tingkat kemiskinan 2. Tingkat kemiskinan ekstrem

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
				pembangunan dan peningkatan investasi	2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		dan peningkatan pemerataan	3. Proporsi penduduk kelas menengah 4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 5. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan	*Return on asset* (RoA) BUMN
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	1. Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB 2. Rasio Perpajakan terhadap PDB
				Pelayanan perijinan dan administrasi	Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik			

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Tingkat inflasi
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional			
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,20-2,00	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 2. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB 3. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah 4. Rasio kewirausahaan
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri			

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 2. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB 3. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah 4. Rasio kewirausahaan
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri			
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Menguatnya iptek, inovasi dan produktivitas tenaga kerja	1. Peringkat indeks inovasi global 2. Tingkat pengangguran terbuka 3. Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB) 4. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	1. Tingkat kemiskinan 2. Tingkat kemiskinan ekstrem 3. Proporsi penduduk kelas menengah 4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 2. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	75,50	Pelestarian lingkungan hidup	1. Perlindungan sumber mata air 2. Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air 3. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat 4. Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah 5. Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST 6. Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas 7. Aksi bersih lingkungan 8. Penghijauan di lokasi lahan kritis 9. Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis 10. Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	1. Indeks ekonomi hijau 2. Indeks kualitas pengelolaan sampah (IKPS) 3. Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah 4. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif 5. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan 6. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati 7. Indeks kualitas lingkungan hidup
				Pencegahan dan mitigasi bencana alam	1. Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana 2. Pembentukan desa tangguh bencana 3. Peningkatan kapasitas relawan destana 4. Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam 5. Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana 6. Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan 7. Penyediaan early warning system 8. Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten	PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	%	74,99	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	1. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten 2. Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi 3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung) 4. Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik 5. Penyediaan air bersih dan sanitasi 6. Penyediaan rumah layak huni	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW *Nexus*)	1. Indeks Ketahanan Air Nasional 2. Kapasitas Tampungan Air 3. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
				Penataan garis imajiner	1. Pembangunan *city walk* Jalanl Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprapto, Jl M.T. Haryono 2. Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman 3. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun-alun 4. Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Phala 5. Revitalisasi Taman Kartini 6. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala 7. Pembangunan citywalk Parakan (Jln Diponegoro dan Jl Brigjen Katamso) 8. Pembangunan Citywalk Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo) 9. Revitalisasi Pasar Kliwon	PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Stok infrastruktur terhadap PDB

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
				Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	1. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten 2. Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi 3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung) 4. Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik 5. Penyediaan air bersih dan sanitasi 6. Penyediaan rumah layak huni	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
	Indeks Integritas Nasional	angka	78	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	1. Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi 2. Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik 3. Penerapan merit system dan talent poll 4. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi 5. Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati 6. Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah) 7. Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW 7. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Terwujunya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	1. Indeks pembangunan hukum 2. Indeks persepsi korupsi 3. Indeks integritas partai politik
							Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	76,45	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	1. Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi 2. Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik 3. Penerapan merit system dan talent poll 4. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi 5. Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati 6. Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah) 7. Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW 8. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Persentase desa mandiri
				Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	1. Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi 2. Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik 3. Penerapan merit system dan talent poll 4. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi 5. Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	1. Indeks reformasi birokrasi nasional 2. Indeks pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					6. Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah) 7. Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW 9. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)			
				Integrasi data	1. Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana 2. Pembentukan desa tangguh bencana 3. Peningkatan kapasitas relawan destana 4. Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam 5. Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana 6. Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan 7. Penyediaan early warning system 8. Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten			
				Digitalisasi dan *smart city*	1. Digitalisasi dan integrasi layanan digital 2. Lapor Bupati 3. Penyediaan dan peningkatan SDM 4. Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa 5. Pembuatan superapps mobile 6. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di perdesaan			

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					7. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis			
Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini	angka	0,370-0,360	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan Perkebunan 2. Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian 3. Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk 4. Regenerasi petani 5. Penyediaan bibit ternak dan ikan 6. Peningkatan kapasitas peternak dan petani ikan 7. Pembangunan *greenhouse*	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	1. Indeks Ketahanan Pangan 2. Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan 3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan	1. Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global 2. Indonesia *Blue Economy Index* (IBEI) 3. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	1. Total aset sektor keuangan/PDB 2. Aset perbankan/PDB 3. Aset dana pension/PDB 4. Aset asuransi/PDB 5. Kapitalisasi pasar modal/PDB 6. Total kredit/PDB 7. Inklusi keuangan

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional	produksi melalui peran aktif koperasi		
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri		Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 2. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB 3. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah 4. Rasio kewirausahaan
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi PDB ekonomi kreatif
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	1. Tingkat kemiskinan 2. Tingkat kemiskinan ekstrem 3. Proporsi penduduk kelas menengah 4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 5. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal
	Indeks Pembangunan Gender	Angka	97,13	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	1. Pembentukan Satgas PPA 2. Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan 3. Pembentukan desa ramah perempuan dan anak	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1. Indeks pembangunan kualitas keluarga 2. Indeks perlindungan anak 3. Indeks pembangunan pemuda 4. Indeks ketimpangan gender

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					4. Pemberdayaan ekonomi perempuan 12. Penyediaan *hotline/panic button*	Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		5. Indeks pembangunan gender 6. Mobilitas penduduk lanjut usia 7. Mobilitas penduduk penyandang disabilitas
				Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	1. Penataan data program perlindungan sosial 2. Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang 3. Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	1. Tingkat kemiskinan 2. Tingkat kemiskinan ekstrem 3. Proporsi penduduk kelas menengah 4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 8. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal
Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	angka	6,79	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	1. Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah 2. Pembinaan dan pemberdayaan ormas	PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
						PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	1. Indeks Demokrasi Indonesia 2. Indeks HAM
						PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital,	Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan	1. Asia Power Index (Military Capability) 2. Asia Power Index (Diplomatic Influence) 3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
						ekonomi hijau, dan ekonomi biru		4. *Global Cybersecurity Index* 5. Indeks Keamanan Laut Nasional

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 4.11 terdapat konsistensi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan sasaran Prioritas Nasional (termasuk ke dalam indikator kinerjanya). Selain itu, dapat dilihat bahwa indikator dampak digunakan sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Selain itu, keseluruhan program prioritas mempunyai indikator kinerja di mana indikator tersebut menggunakan indikator hasil.

4. Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas daerah

Perumusan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan konsistensi dengan program prioritas, sebagaimana tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12
Konsistensi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1.	Penataan garis imajiner	Pembangunan *city walk* Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprapto, Jl M.T. Haryono	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
		Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DPRKPLH
		Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun-alun	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum SETDA
		Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Phala	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
		Revitalisasi Taman Kartini	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR
		Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
		Pembangunan *city walk* Parakan (Jln Diponegoro dan Jl Brigjen Katamso)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
		Pembangunan *Citywalk* Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
		Revitalisasi Pasar Kliwon	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
2.	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Peningkatan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi SETDA
		Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi SETDA

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Penerapan *merit system* dan *talent poll*	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi	• Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Penelitian dan Pengembangan • Program Riset dan Inovasi --- • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan --- • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi --- • Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah --- • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Program Perekonomian dan Pembangunan • Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota --- • Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	• BAPPEDA --- • DINDUKCAPIL --- • INSPEKTORAT --- • BPKPAD --- • Bagian Pembangunan SETDA • Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA • Bagian Organisasi SETDA • Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA • Bagian Kesra dan Bina Mental SETDA --- • KECAMATAN
		Fasilitasi antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Desa Ceria (pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, Amanah)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES
		Peningkatan kesejahteraan ketua RT dan RW	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DINPERMADES
		Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (tata kelola Kelurahan)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan SETDA
3.	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan	• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian • Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	• DKPPP • DKPPP • DKPPP • DKPPP • DKPPP • DKPPP
		Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian	• Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	• DINKOPDAG • DINPERINAKER
		Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk	• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	• DKPPP • DINKOPDAG • DKPPP
		Regenerasi petani	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
		Penyediaan bibit ternak dan ikan	• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	• DKPPP • DKPPP

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			• Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyrakat Veteriner • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	• DKPPP • DKPPP
		Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan	• Program Penyuluhan Pertanian • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	• DKPPP • DKPPP
		Pembangunan *greenhouse*	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
4.	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
		Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
		Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan air bersih dan sanitasi	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	• DPUPR • DPRKPLH
		Penyediaan rumah layak huni	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
5.	Optimalisasi pasar daerah	Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
		Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
6.	Penguatan dan pelestarian seni budaya	Pembentukan dewan kesenian	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
		Pertemuan pegiat seni dan budayawan	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
		Penghargaan pada seniman dan budayawan	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
		Pentas seni di ruang publik	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Pelaku seni dan budaya lokal *go to school*	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DINBUDPAR
		Pemakaian baju adat khas Temanggung	program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
		Festival seni dan budaya tahunan Temanggung	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
		Informasi dan promosi pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
		Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR
		Rebranding Temanggung		DINBUDPAR
7.	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Pembentukan satgas PPA	Program Perlindungan Perempuan	DPPPAPPKB
		Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan	Program Pemenuhan Hak Anak	DPPPAPPKB
		Pembentukan desa ramah perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB
		Pemberdayaan ekonomi perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
		Penyediaan *hotline/panic button*	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB
8.	Pelayanan dasar bidang pendidikan	Akses pendidikan untuk semua warga	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Pimpinan daerah sambang sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Penguatan database pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Fasilitasi usulan pembangunan Gedung SMA/SMK	-	DINDIKPORA
		Rehabilitasi ruang kelas dan Gedung sekolah SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Pemberdayaan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Insentif kepada Guru Keagamaan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Peningkatan literasi membaca melalui perpustakaan daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	DINPUSIP
9.	Pelayanan dasar bidang kesehatan	Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Peningkatan pelayanan Posyandu di tingkat desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Peningkatan kualitas layanan RSUD	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD
		Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
		Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonoboyo	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
10.	Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	Penataan data program perlindungan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
		Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang	Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL
		Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL
		Fasilitasi penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat	-	DINAS SOSIAL
11.	Pelayanan perijinan dan administrasi	Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di Mall Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
12.	Integrasi data	Penyepakatan protokol interoperobilitas data antar PD	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
		Sinkronisasi dan integrasi data	• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	• DINKOMINFO • DINDUKCAPIL
13.	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Pembentukan desa tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Peningkatan kapasitas relawan destana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		penanganan bencana alam dan non alam	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Penyediaan *early warning system*	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Pencegahan longsor pada ruas jalan Kabupaten	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
14.	Digitalisasi dan smart city	Digitalisasi dan integrasi layanan digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
		Lapor Bupati	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
		Penyediaan dan peningkatan SDM	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
		Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
		Pembuatan *superapps mobile*	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
		Penyediaan infrastruktur jaringan internet di pedesaan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
		Penyediaan infrastruktur jaringan internet di ruang public strategis	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
15.	Pelestarian lingkungan hidup	Perlindungan sumber mata air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
		Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
		Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH
		Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH
		Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST	Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
		Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas	Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Aksi bersih lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
		Penghijauan di lokasi lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
		Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
		Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
16.	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
		Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi		
		BUMD Sehat	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian SETDA
17.	Pengembangan kerjaasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Peningkatan optimalisasi peran dan ormas dalam pembangunan daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	BANKESBANGPOL
		Pembinaan dan pemberdayaan ormas	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BANKESBANGPOL
18.	Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	Pemajuan cabang olahraga unggulan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
		Kesejahteraan dan profesionalitas atlet	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
		Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara professional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
19.	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja	• DINPERINAKER • DINPERINAKER
		Peningkatan hubungan industri	Program Hubungan Industrial	DINPERINAKER

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

5. Keselarasan prioritas pembangunan dengan prioritas nasional RPJMN 2025-2029

   Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13

Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RKP Tahun 2026

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
1	PN 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	
	Sasaran 1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.
	Indikator	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Harmoni
		Indeks Hak Asasi Manusia	
2	PN 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	
	Sasaran 1	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.
	Indikator	Asia Power Index (Military Capability)	Indeks Harmoni
		Asia Power Index (Diplomatic Influence)	
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	
		Global Cybersecurity Index	
		Indeks Keamanan Laut Nasional	
	Sasaran 2	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Indeks Ketahanan Pangan	PDRB per kapita
		Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	
	Sasaran 3	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	-
	Indikator	Indeks Ketahanan Energi	--
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	
	Sasaran 4	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Indeks Ketahanan Air Nasional	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
		Kapasitas tampungan air (m3/kapita))	
		Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	
	Sasaran 5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	PDRB per kapita
		Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	
		Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	
	Sasaran 6	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan
	Indikator	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks kualitas lingkungan hidup
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	
		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		Indeks Kualitas Udara	
		Indeks Kualitas Air	
		Indeks Kualitas Lahan	
		Indeks Kualitas Air Laut	
3	PN 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
	Sasaran 1	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing
	Sasaran 2	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	PDRB per kapita

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
		Aset Perbankan/PDB (%)	
		Aset Dana Pensiun/PDB (%)	
		Aset Asuransi/PDB (%)	
		Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	
		Total Kredit/PDB (%)	
		Inklusi Keuangan (%)	
	Sasaran 3	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	
		Rasio Kewirausahaan (%)	
	Sasaran 4	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Rasio PDB Pariwisata (%)	PDRB per kapita
		Devisa Pariwisata (Miliar USD)	
	Sasaran 5	Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	• Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan • Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan
	Indikator	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	PDRB per kapita Indeks Gini
4	PN 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	
	Sasaran 1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
	Indikator	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Indeks Pembangunan Manusia
		Harapan lama sekolah (tahun)	
		Rata-rata nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains	
		Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca (b) Numerasi	
		Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	
		Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	
		Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	
	Sasaran 2	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Indeks Pembangunan Manusia
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	
		Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	
		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)c	
	Sasaran 3	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan
	Indikator	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Gender
		Indeks Perlindungan Anak	
		Indeks Pembangunan Pemuda	
		Indeks Ketimpangan Gender	
		Indeks Pembangunan Gender	
		Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
		Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	
	Sasaran 4	Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Peringkat Indeks Inovasi Global	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
		Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	
	Sasaran 5	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	Indeks Pembangunan Manusia
		Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games	
		Peringkat pada Asian Games	
		Peringkat pada Asian Para Games	
		Peringkat pada SEA Games	
		Peringkat pada ASEAN Para Games	
		Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	
5	PN 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	
	Sasaran 1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	PDRB per kapita
		Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
	Sasaran 2	Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Biaya Logistik (% PDB)	PDRB per kapita
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	
6	PN 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
	Sasaran 1	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	• Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan • Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan
	Indikator	Tingkat kemiskinan (%)	Indeks Pembangunan Manusia PDRB per kapita Tingkat pengangguran terbuka Indeks Gini
		Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	
		Proporsi penduduk kelas menengah (%)	
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	
		Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	
	Sasaran 2	Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing
	Sasaran 3	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Persentase desa mandiri (%)	Indeks Reformasi Birokrasi
	Sasaran 4	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)	PDRB per kapita
		Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	
7	PN 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkobo, judi dan penyelundupan	
	Sasaran 1	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
	Indikator	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks integritas nasional
		Indeks Persepsi Korupsi	
		Indeks Materi Hukum	
		Indeks Integritas Nasional	
		Indeks Integritas Partai Politik	
	Sasaran 2	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	Indeks Reformasi Birokrasi
		Indeks Pelayanan Publik	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
		Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	
	Sasaran 3	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	Indeks integritas nasional
	Sasaran 4	Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	PDRB per kapita
	Sasaran 4	Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	PDRB per kapita
		Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	
	Sasaran 5	Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Tingkat Inflasi (%)	PDRB per kapita

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
8	PN 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
	Sasaran 1	Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya
	Indikator	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks Harmoni
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	
	Sasaran 2	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan
	Indikator	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Indeks kualitas lingkungan hidup

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Persandingan antara program prioritas dan program nomenklatur sebagaimana tabel 4.14 berikut

Tabel 4.14

Persandingan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan Program Nomenklatur

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
1	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		• Indeks Pembangunan Manusia (angka) • Tingkat Pengangguran Terbuka • PDRB Perkapita (Juta Rupiah)			
				Pelayanan dasar bidang pendidikan		
		1) Tidak adanya pungutan yang dibebankan pada peserta didik 2) Meningkatnya akses pendidikan anak usia sekolah SD dan SMP (partisipasi murni) sebesar 100%.	- Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun - Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun - Harapan Lama Sekolah		Akses pendidikan untuk semua warga	Program Pengelolaan Pendidikan
		1) Meningkatnya kualitas pendidikan guru. Misal strata pendidikan S1 2) Meningkatnya Jumlah guru yg sdh bersertifikasi (persentasenya dilihat dari baseline terakhir) 3) Meningkatnya kapasitas guru dalam menggunakan metode pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan kapasitas tumbuh kembang anak	- persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik - Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3		Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatnya kedekatan antara siswa dan pimpinan daerah, terutama dalam penyampaian gagasan pembangunan	- Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan		Pimpinan daerah sambang sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
		1) Data pendidikan yang akurat, terpilah, akuntabel, dan andal 2) Meningkatnya Pemanfaatan data oleh PD dalam mendorong pengembangan pendidikan maupun non pendidikan	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik		Penguatan database pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		1) Sistem informasi yang terbarukan dan mudah diakses	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik		Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		oleh siswa 2) Meningkatnya jumlah siswa yang menerima beasiswa dari pemerintah maupun non pemerintah	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik			
		1) Adanya usulan dan pengawalan usulan pembangunan SMA pada pemerintah provinsi 2) Terbangunnya SMA/SMK di kecamatan yang belum ada sekolahnya; Adanya pembangunan SMKI 1 unit, atau SMK yang memiliki pelatihan khusus.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun		Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK	
		1) Berkurangnya jumlah ruang kelas pada SD & SMP yang rusak atau tidak layak digunakan 2) Meningkatnya kualitas infrastruktur pendidikan pada tingkat SD dan SMP	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik		Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatnya kelembagaan PAUD	- Proporsi PAUD terakreditasi minimal B - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik - Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik - Rasio Siswa/Guru PAUD - APM PAUD (5-6 tahun) - Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD (Mendukung Wajar Dikdas 13 Tahun)		Pemberdayaan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan
		Tersedianya anggaran untuk pembayaran pengajar keagamaan	- Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan		Insentif kepada Guru Keagamaan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Tersedianya air bersih dan sanitasi di Satuan Pendidikan	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik		Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Meningkatnya literasi membaca melalui perpustakaan daerah	- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat - Tingkat Kegemaran Membaca - Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan		Peningkatan Literasi Membaca melalui perpustakaan daerah	Program Pembinaan Perpustakaan
				Pengembangan atlet dan prestasi olahraga		
		- Kompetisi Rutin Olahraga Unggulan yang tidak hanya mencetak atlet tetapi juga menarik kunjungan wisatawan- Meningkatnya kerjasama dengan multipihak yg terkait dengan pengembangan cabang olahraga unggulan	- Persentase Atlet Unggulan- Persentase Cabang Olah Raga Unggulan- Cakupan pelatih yang bersertifikat- Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik		Pemajuan cabang olahraga unggulan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		- Pemberian Insentif & Pembinaan untuk Atlet Berprestasi secara berkelanjutan - Fasilitas/peralatan olahraga unggulan yang memenuhi standar nasiona			kesejahteraan dan profesionalitas atlet	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		- Manajemen klub olahraga unggulan yang profesional dan mandiri - Temanggung dipercaya untuk menyelenggarakan event olahraga unggulan ditingkat provinsi			Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				Pelayanan dasar bidang kesehatan		
		Meningkatnya kepesertaan BPJS dan akses layanan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional		Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup		Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Cakupan Penduduk Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis		Pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Meningkatnya pelayanan posyandu di tingkat desa	Persentase Posyandu aktif bidang kesehatan		Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit		Peningkatan kualitas layanan RSUD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten temanggung	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Proporsi fasilitas kesehatan sesuai standar		Penambahan fasilitas rawat inap puskesmas wonoboyo	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Tersedianya lokasi tanah untuk Sekolah Rakyat	-		Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat	-
				Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan		
		Meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertaniann serta peningkatan efisiensi produksi pertanian	Produktivitas Padi		Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Produktivitas jagung			
			Produktivitas bawang putih			
			Produktivitas bawang merah			
			Produktivitas cabai rawit			
			Produktivitas cabai keriting			
			Produktivitas tembakau			
			Produktivitas kopi robusta			
			Produktivitas kopi arabika			
			Jumlah produksi daging ternak besar			
			jumlah produksi daging ternak kecil			
			jumlah produksi ternak unggas			
			jumlah produksi telur			
			Persentase kelahiran pedet			

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
			Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama			
		Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian yang sesuai dengan fungsinya	Persentase Prasarana yang digunakan			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Meningkatnya fasilitasi pengendalian dan penanggunlan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM petani dan penyuluh	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi			Program Penyuluhan Pertanian
			Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas			
		Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangans	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		Meningkatnya promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	- Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri - Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota		Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Meningkatnya industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	- Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten - Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktivitas Padi		Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Produktivitas jagung			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Produktivitas bawang putih			
			Produktivitas bawang merah			
			Produktivitas cabai rawit			
			Produktivitas cabai keriting			
			Produktivitas tembakau			

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
			Produktivitas kopi robusta			
			Produktivitas kopi arabika			
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Meningkatnya penyuluhan pertaninan	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi		Regenerasi petani	Program Penyuluhan Pertanian
			Persentase Peningkatan kelas kelp tani			
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah produksi daging ternak besar		Penyediaan bibit ternak dan ikan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			jumlah produksi daging ternak kecil			
			jumlah produksi ternak unggas			
			jumlah produksi telur			
			Persentase kelahiran pedet			
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan			Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyrakat veteriner
			Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat			
		Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Meningkatnya penyuluhan pertaninan	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi		Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan	Program Penyuluhan Pertanian
			Persentase Peningkatan kelas kelp tani			
		Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan		Pembangunan greenhouse	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Optimalisasi Pasar Daerah		

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Meningkatnya Pemerataan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian	Persentase pedagang yang menggunakan transaksi digital		Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Persentase pelaku usaha informal yang difasilitasi			
			Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik		Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Penguatan dan pelestarian seni budaya		
		Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pelaku Budaya		Pembentukan dewan kesenian	Program Pengembangan Kebudayaan
			Jumlah Kelompok kesenian		Pertemuan pegiat seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan		Penghargaan pada seniman dan budayawan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dan dipelihara		Pentas seni di ruang publik	Program Pengembangan Kebudayaan
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Daya tarik Wisata		Pelaku seni dan budaya lokal go to school	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Jumlah Fasilitasi destinasi pariwisata		Pemakaian baju adat khas Temanggung	program Pengembangan Kebudayaan
					Festival seni dan budaya tahunan Temanggung	Program Pengembangan Kebudayaan
		Meningkatnya pemasaran pariwisata	Jumlah destinasi tujuan wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinbudpar		Informasi dan promosi pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
		Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Ekonomi Kreatif yang berpotensi mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi		Rebranding Temanggung	
				Peningkatan kualitas tenaga kerja		
		Tersedianya tenaga kerja terampil dan siap kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	- Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi - Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan - Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan - Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar		Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja2. Program Penempatan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
			negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten			
2	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
				Pencegahan dan mitigasi bencana alam		
		Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Pembentukan desa tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Peningkatan kapasitas relawan destana	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Meningkatnya layanan pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar		Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Meningkatnya jumlah Pos Pemadam Kebakaran dan SDM untuk respon bencana	Meningkatnya luas wilayah manajemen kebakaran		Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Tersedianya sumber air untuk penanganan kebencanaan	Meningkatnya layanan pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar		Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Penyediaan early warning system	Program Penanggulangan Bencana

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Meningkatnya layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	Persentase layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana		Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten	Program Penanggulangan Bencana
				Pelestarian lingkungan hidup		
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola		Perlindungan sumber mata air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola		Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R		Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R		Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan		Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST	Program Pengelolaan Persampahan
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan		Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas	Program Pengelolaan Persampahan
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan		Aksi bersih lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase luas lahan kritis tertangani		Penghijauan di lokasi lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase luas lahan kritis tertangani		Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase luas lahan kritis tertangani		Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		- Persentase Infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing - Indeks Integritas Nasional - Indeks Reformasi Birokrasi			
				Penataan Garis Imajiner		
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik		Pembangunan city walk Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprapto, Jl M.T. Haryono	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara		Rehabilitasi dan penataan kawasan alon-alon dan pendopo pengayoman	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun	Jumlah Produk Hukum Kelembagaan Pengelolaan Alun-alun		Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alon-alon	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya keteraturan tata ruang kota yang inklusif	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik		Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Pala	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Fasilitasi Destinasi Pariwisata		Revitalisasi Taman Kartini	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Meningkatnya keteraturan tata ruang kota yang inklusif	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik		Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Pala	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik		Pembangunan city walk Parakan (Jln Diponegoro dan Jl Brigjen Katamso)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik		Pembangunan Citywalk Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian	Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik		Revitalisasi Pasar Kliwon	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota		Peningkatan dan pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik		Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian yang sesuai dengan fungsinya	Persentase prasarana yang digunakan		Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan		Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
		Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan		Penyediaan air bersih dan sanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman - Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Meningkatnya Kawasan Permukiman	- Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak - Persentase penanganan rumah tidak layak huni		Penyediaan rumah layak huni	Program Kawasan Permukiman
				Pelayanan perijinan dan administrasi		
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik	Program Promosi Penanaman Modal
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi		
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal		Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Terlaksananya kemitraan Usaha antara UMKM dengan perusahaan berskala besar	Jumlah fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan Perusahaan perskala besar		Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal yang terintegrasi		Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala	Program Promosi Penanaman Modal
		Meningkatnya jangkauan dan Strategi promosi penanaman modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal		Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi	Program Promosi Penanaman Modal
		Meningkatnya BUMD dengan opini WTP	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP		BUMD Sehat	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat	- Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (IUP)- Persentase perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan- Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK - Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja - Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi		Peningkatan hubungan industrial	Program Hubungan Industrial
				Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daeah	Persentase AKIP Perangkat Daearah berpredikat BB		Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Kepegawaian yang adil sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar belakang dari ASN	Indeks Sistem Merit		Penerapan merit system dan talent poll	Program Kepegawaian Daerah
		1. Meningkatnya Pelayanan pendaftaran penduduk 2. Meningkatnya pelayanan Pencatatan Sipil 3. Meningkatnya penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat		Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3. Program Penelitian Dan Pengembangan 4. Program Riset Dan Inovasi
						1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Meningkatnya Kepuasan Obyek Pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan Inspektorat				1. Program penyelenggaraan pengawasan 2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
		Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah				1. Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualiatas Kinerja Pelayanan Birokrasi				1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perekonomian dan Pembangunan 3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Fungsi Dprd Secara Optimal				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
		Meningkatnya kinerja kecamatan dan kepuasan masyarakat				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Terwujudnya fasilitasi antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Desa	Presentase penyusunan dokumen perencanaan Desa tepat waktu		Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Terwujudnya pelayanan di desa yang nyaman dan memuaskan masyarakat	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik		Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah)	Program Administrasi Pemerintahan Desa

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Terwujudnya SDM (RT dan RW) yang mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa	Presentase laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,PKK,Posyandu, LPMD dan Karang Taruna)		Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat
		Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)		Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Integrasi Data		
		Terwujudnya keselarasan dan keterpaduan pertukaran data antar PD guna mendukung efisiensi layanan publik berbasis data	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik		Penyepakatan protokol interoperobilitas data antar PD	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		Terciptanya satu sumber data terintegrasi yang akurat dan dapat diakses lintas instansi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making)	Persentase layanan publik secara elektronik		Sinkronisasi dan integrasi data	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Terwujudnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Digitalisasi dan Smart City		
		Peningkatan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan	Persentase layanan publik secara elektronik		Digitalisasi dan integrasi layanan digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Terselenggaranya sistem pelaporan masyarakat yang responsif dan transparan, serta meningkatnya partisipasi warga dalam pengawasan dan pembangunan daerah berbasis digital	Persentase layanan publik secara elektronik		Lapor Bupati	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Meningkatnya kompetensi SDM di lingkungan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan	Persentase layanan publik secara elektronik		Penyediaan dan peningkatan SDM	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		dan pengelolaan inisiatif digital dan smart city secara berkelanjutan				
		Meningkatnya akses masyarakat desa terhadap layanan internet yang andal untuk mendukung layanan publik secara digital	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik		Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Tersedianya satu platform digital terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan secara cepat, efisien, dan user-friendly	Persentase layanan publik secara elektronik		Pembuatan superapps mobile	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Meningkatnya akses masyarakat desa terhadap layanan internet yang andal untuk mendukung layanan publik secara digital	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik		Penyediaan infrastruktur jaringan internet di pedesaan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Tersedianya akses internet gratis dan merata di ruang publik strategis guna memperluas inklusi digital dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik		Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan		Indeks Gini Indeks Pembangunan Gender			
				Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak		
		Meningkatnya Akses terhadap Layanan Perlindungan perempuan dan anak	- Rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani - Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan - Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani - Rasio kasus kekerasan terhadap anak		Pembentukan Satgas PPA	Program Perlindungan Perempuan
		Tersedianya Tempat Perlindungan yang Aman dan Layak bagi korban kekerasan	- Kabupaten Layak Anak - Prosentase terbentuknya DRPPA		Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan	Program Pemenuhan Hak Anak

No	Sasaran	Outcome	Indikator		Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dlm Kewirausahaan yg Berperspektif Gender 2) Meningkatnya Peran Ibu & Keluarga dlm Pendidikan/Pengasuhan Anak 3) Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan & Anak	- Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender - Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas		Pembentukan desa ramah perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perempuan	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender		Pemberdayaan ekonomi perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Meningkatnya Akses Korban terhadap Bantuan Darurat	- Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani - Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas		Penyediaan hotline/panic button	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				Pelayanan sosial dan bidang keagamaan		
		Meningkatnya pelayanan rehabsos PPKS	Tersedianya rumah singgah pasien rujukan dari kabupaten		Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang	Program: Rehabilitasi Sosial
		- Meningkatnya pelayanan rehabsos PPKS - Meningkatnya pelayanan perlindungan dan jaminan soial bagi PPKS	- Meningkatnya kualitas data Fakir Miskin - Meningkatnya kualitas hidup lansia		Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal	Program: Rehabilitasi Sosial Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Meningkatnya pelayanan perlindungan dan jaminan soial bagi PPKS	Meningkatnya kualitas data Fakir Miskin		Penataan data program perlindungan sosial	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial
5	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.		Indeks Harmoni			
				Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah		
		Meningkatnya ormas yang berdaya	Persentasae ormas yang mendapat pembinaan		Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya
					Pembinaan dan pemberdayaan ormas	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

4.4. DUKUNGAN SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH

4.4.1. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur dalam beberapa regulasi, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selain sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Daerah, implementasi SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memperoleh pelayanan yang layak dan merata sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat 6 jenis SPM yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah sasaran dan prioritas daerah. Prioritas daerah dalam mendukung pencapaian SPM diarahkan pada pemenuhan layanan dasar tidak hanya dalam hal jenis tetapi juga mutu pelayanan. Secara lebih rinci, sasaran dan prioritas daerah Kabupaten Temanggung dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2026

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antanental sesuai standar	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
		Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita DM	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis	Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	• Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan • Pelestarian lingkungan hidup	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
				Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Kawasan Permukiman.
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperolah fasilitas penyediaan rumah yang layak huni			
5	Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	• Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Program Penanggulangan Bencana
		Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada			
		Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakusi korban bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
		evakuasi korban kebakaran				
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	• Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak • Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	• Program Pemberdayaan Sosial • Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Penanganan Bencana
		Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial			

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

4.4.2. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2026

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional dan menjadi salah satu tahapan dalam proses perencanaan sekaligus instrumen yang penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 juga telah memperhatikan hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Adapun hasil Musrenbang untuk perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang
RKPD Kabupaten Temanggung 2026

No.	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
1.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Mungseng – Tlogomulyo	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	DPUPR	Tlogomulyo
2.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Muntung - Jumprit	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	DPUPR	Candiroto
3.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Pelebaran Jalan Ruas Rowoseneng-Tlogopucang	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	DPUPR	Kandangan
4.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Ruas Jalan Gatak - Ngaditirto	Panjang jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Selopampang

No.	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
5.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Pembangunan Senderan/Talud Jalan Mudal – Legoksari	Panjang jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Tembarak
6.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Pembangunan Jalan Aspal Dusun Kebonsari-Pugeran (Rekonstruksi Jalan Ngabeyan-Kebonsari)	Panjang jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Wonoboyo
7.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penataan Bangunan	Pembangunan Pavingisasi Trotoar Jalan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	DPUPR	Kledung
8.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Pelebaran Peningkatan Jalan Ruas Lempuyang - Tretep	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	DPUPR	Tretep
9.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase Tertutup Jl. Ky. Subechi	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	DPUPR	Parakan

No.	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
		merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik						
10.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Peningkatan Jalan Ruas Wanutengah - Bulu	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	DPUPR	Bulu
11.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Bejen - Prangkokan	Panjang jalan yang direkonstruksi	DPUPR	Bejen
12.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaran Jalan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Ruas Jalan Dlimoyo - Kentengsari	Panjang Jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Ngadirejo
13.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Senderan Jalan dan Pelebaran Jalan (Ruas Jalan Kebraman-Gemawang)	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	DPUPR	Gemawang

No.	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
14.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Kawasan Permukiman	Pembangunan RTLH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	DPRKPLH	Kranggan
15.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Kawasan Permukiman	RTLH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	DPRKPLH	Kaloran
16.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Kawasan Permukiman	Pembangunan Rehabilitasi RTLH	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	DPRKPLH	Kedu
17.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan Lampu Peringatan Jalan Kabupaten	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Bansari
18.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan Lampu Jalan Di Ruas Jalan Kabupaten (Jalan Kedu Tegong)	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumo

No.	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
		merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik						
19.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Optimalisasi pasar daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rehab gedung UMKM dan sarana prasarana digital	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Pringsurat
20.	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Optimalisasi pasar daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembangunan kios UMKM Kelurahan Jurang	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Temanggung

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD 2026 sebagaimana tabel di atas, terlihat bahwa terdapat keselarasan antara arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program dengan usulan kegiatan Musrenbang. Hasil Musrenbang tersebut selanjutnya menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.

4.4.3. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Ekstrem yang menargetkan angka kemiskinan 0% maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan 3 strategi yaitu:

a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan seperti Bantuan Sosial Reguler (PKH dan Sembako), Bantuan Sosial Khusus (BLT DD, BST, *top up* bansos regular), PBI JKN, Bantuan Siswa Miskin, Iuran Jaminan Sosial, Kartu Jateng Sejahtera, RTLH dan jamban, instalasi dan subsidi listrik, bantuan dan rehabilitasi kelompok berkebutuhan khusus.
b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat seperti program padat karya, program vokasi dan pelatihan, peningkatan akses aset produktif, akses modal dan akses penggunaan lahan, peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pemberian modal usaha pada UEP dan KUBE.
c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti jambanisasi, air minum, dan sanitasi layak, peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Strategi tersebut dilakukan dengan peningkatan validitas data yang memanfaatkan infrastruktur teknologi komunikasi dan pendataan secara bottom up untuk menjadi dasar intervensi yang akan dilakukan. Intervensi berbasis individu dan kewilayahan yang dilakukan secara kolaboratif, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada. Fokus intervensi yang dilakukan adalah pemberian bantuan secara tepat sasaran, peningkatan akses layanan dan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia

serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan pengembangan wisata dan pemberdayaan produk lokal.

Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan, hal tersebut ditunjukan dengan arah kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2026 yang juga sebagai penerapan dari 3 strategi percepatan penghapusan kemiskinan.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.17
Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Pelaksana
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DINHUB
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
4.	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengembangan Perumahan	
5.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
6.			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
7.			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
8.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui	Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Pelaksana
	pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			
9.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
10.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Optimalisasi pasar daerah	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	DINKOPDAG
11.			Program Pengembangan UMKM	
12.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
13.			Program Penempatan Tenaga Kerja	
14.			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
15.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
16.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Penguatan dan pelestarian seni budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
17.	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
18.			Program Pemberdayaan Sosial	
19.			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
20.			Program Penanganan Bencana	
21.	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPPAPPKB

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Pelaksana
	dalam seluruh aspek pembangunan		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
22.	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
23.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL
24.			Program Pendaftaran Penduduk	DINDUKCAPIL
25.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Penataan Desa	DINPERMADES
26.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Pemerintah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten bersinergi dengan berbagai pihak seperti lembaga amal zakat, CSR dan TJSLP dalam membantu intervensi percepatan penghapusan kemiskinan.

4.4.4. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung

Pemerintah telah menetapkan stunting menjadi isu prioritas nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada tahun 2023 prevalensi stunting Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tercapai sebesar 25,1%. Capaian tersebut masih jauh

dari target nasional yang telah ditetapkan sebesar 14%. Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Berikut merupakan sasaran, prioritas daerah, dan program dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Temanggung, sebagaimana dalam tabel 4.18 berikut.

Tabel 4.18
Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Penanganan Stunting

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Pelaksana
1	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
2	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
3			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
4	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DPPPAPPKB
5			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
6			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
7			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
8	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
9	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
10			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
11	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
12	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan	Optimalisasi produksi pertanian dan perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Pelaksana
	ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

4.4.5.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya tujuan SDGs sejumlah 17 tujuan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung. Ada satu tujuan yaitu tujuan 10 yang tidak secara langsung berkontribusi karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat.

Tabel 4.19
Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
			Optimalisasi Pasar Daerah
			Penguatan dan pelestarian seni budaya
		Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
			Pelayanan dasar bidang pendidikan
			Pelayanan dasar bidang kesehatan
			Pelayanan sosial dan bidang keagamaan
			Peningkatan kualitas tenaga kerja
		Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pencegahan dan mitigasi bencana alam
		Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
			Integrasi Data
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
		Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
		dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Pelayanan dasar bidang kesehatan
			Pelayanan sosial dan bidang keagamaan
		Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pencegahan dan mitigasi bencana alam
			Pelestarian lingkungan hidup
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Pelayanan dasar bidang kesehatan
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang pendidikan
			Pengembangan atlet dan prestasi olahraga
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing
		Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pelestarian lingkungan hidup
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern	tidak ada indikator di Pemerintah Kabupaten Temanggung karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota	
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Penataan Garis Imajiner
			Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
			Optimalisasi Pasar Daerah
			Penguatan dan pelestarian seni budaya
		Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
			Pelayanan perijinan dan administrasi
			Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
			Peningkatan kualitas tenaga kerja

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
		Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pelestarian lingkungan hidup
		Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
			Digitalisasi dan Smart City
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Penataan Garis Imajiner
			Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan perijinan dan administrasi
			Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
		Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pencegahan dan mitigasi bencana alam
			Pelestarian lingkungan hidup
		Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.	Digitalisasi dan Smart City
			Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
			Integrasi Data
			Digitalisasi dan Smart City
		Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Penataan Garis Imajiner
			Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
			Optimalisasi Pasar Daerah
			Penguatan dan pelestarian seni budaya
		Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
			Pelayanan sosial dan bidang keagamaan
			Peningkatan kualitas tenaga kerja
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Penataan Garis Imajiner
			Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
		Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian	Pencegahan dan mitigasi bencana alam

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
		lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pelestarian lingkungan hidup
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pencegahan dan mitigasi bencana alam
			Pelestarian lingkungan hidup
		Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pencegahan dan mitigasi bencana alam
			Pelestarian lingkungan hidup
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator berikut karena tidak mempunyai laut	
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator berikut karena bukan merupakan indikator di tingkat kabupaten/kota	
16	Mewujudkan Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
			Pelayanan sosial dan bidang keagamaan
		Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
			Integrasi Data
			Digitalisasi dan *Smart City*
			Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Optimalisasi Pasar Daerah
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan perijinan dan administrasi
			Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
			Peningkatan kualitas tenaga kerja
		Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
			Integrasi Data
			Digitalisasi dan *Smart City*
			Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

4.4.6. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsif gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan teknik analisis gender berupa GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*). Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.

Tabel 4.20
Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	PD Pengampu
1	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPAPPPKB
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPAPPPKB
			Program Perlindungan Perempuan	DPPAPPPKB
			Program Pengendalian Penduduk	DPPAPPPKB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana	DPPAPPPKB
		Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Program Pembinaan Perpustakaan	DINPUSIP
		Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
		Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES dan RSUD
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
		Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
			Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
		Pelayanan perijinan dan administrasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP

No	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	PD Pengampu
		Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
			Program Penempatan Tenaga Kerja	DINPERINAKER
	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program pemeliharaan Kentetraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP DAMKAR
			Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP DAMKAR
	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Pendaftaran Penduduk	DINDUKCAPIL
			Program Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
			Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
			Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
			Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPEDA
			Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BAPPEDA
			Program Riset Dan Inovasi	BAPPEDA
			Program Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat	DINPERMADES

No	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	PD Pengampu
		Digitalisasi dan *Smart City*	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
		Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BANKESBANGPOL
	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Optimalisasi Pasar Daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	DINKOPDAG
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	DINKOPDAG
		Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
		Penguatan dan pelestarian seni budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DINBUDPAR
	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Pengelolaan dan Penghembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Pengembagan Permukiman	DPRKPLH
			Pogram Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
			Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	DPRKPLH
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

4.4.7. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Tliple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju

pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary* crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Sebagai respon terhadap kondisi diatas, Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya melalui Sasaran dan Prioritas Daerah sebagaimana tabel 4.21 berikut.

Tabel 4.21
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
1	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH
			Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

4.4.8. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang, salah satu Kawasan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi di Jawa Tengah adalah Kawasan Pendukung Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Sekitarnya. Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan *Cultural Heritage Masterpiece* - Mahakarya Budaya Dunia, diharapkan menjadi magnet dan daya tarik

wisatawan manca negara. Lokasi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, berbatasan dengan DI Yogyakarta tentu harus dapat mengoptimalkan potensi lainnya yang ada di Kawasan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung.

Pengembangan kawasan Borobudur tersebut selaras dengan Kegiatan Prioritas dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan untuk meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Selain itu, berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Gelangmanggung dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur *(Cultural Heritage Tourism*) yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata DIY. Berdasarkan hal tersebut, Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur sebagaimana tabel 4.22 berikut.

Tabel 4.22
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
1	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Penataan Garis Imajiner	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DPRKPLH
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
		Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program penyelenggaraan lalu	DINHUB

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
			lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	
2	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Penguatan dan pelestarian seni budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

4.4.9. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2026

Berdasarkan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, terukur, dan strategi yang tepat dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang -Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 35 usulan program/ kegiatan di Kawasan Purwomanggung mencakup Pruworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung dengan mayoritas usulan program/ kegiatan berada pada sektor jalan/jembatan dan pariwisata. Total estimasi nilai investasi dari seluruh usulan tersebut sebesar Rp45.280,5 Miliar yang dibiayai melalui 3 (tiga) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 28 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp4.280,5 M; (2) KPBU terdiri dari 6 (enam) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp32.500 M; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) usulan program/ kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp8.500 M.

Adapun usulan program/ kegiatan dengan lokus Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 4.23 berikut ini.

Tabel 4.23
Usulan Program/ Kegiatan Kawasan Purwomanggung di Lokasi Kabupaten Temanggung Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN PERPRES 79/2019	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
1	Pembangunan prasarana konservasi SDA Sungai 'Bodri, Kab. Kendal dan Kab. Temanggung	150	APBN
2	Pembangunan Jalan Lingkar Parakan, Kab. Temanggung dan Kab. Wonosobo	350	APBN
3	Peningkatan Jalan 25,0 APBN Pringsurat - Secang - Batas Yogya, Kab. Temanggung	25	APBN
4	Pengembangan Kawasan Kopi dan Pengembangan Kawasan Agropolitan PRING KRAKAL (Pringsurat, Kranggan, Kaloran), Kab. Temanggung	100	APBN

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

Adapun sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung sebagaimana table 4.24 berikut.

Tabel 4.24
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
1	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	DINHUB
2	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

4.4.10. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2026

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung secara umum dibentuk dari pemerataan penyediaan infrastruktur dasar pada kawasan perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan dan perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dimaksud mencakup penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum, penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan

permukiman, penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dimaksud mencakupmpenyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan dan pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi untuk memastikan pemerataan perkembangan wilayah di Kabupaten Temanggung.

Selain penyediaan infrastruktur fisik sebagaimana disebutkan diatas, terdapat infrastruktur lintas sektor yang turut berperan dalam yang peningkatan kualitas kesejahteraan dan pembangunan manusia serta pengembangan wilayah melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan kesehatan, sarana prasarana pencegahan kebencanaan dan perlindungan lingkungan, serta infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan pertanian.

Adapun sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4.25 berikut.

Tabel 4.25
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
1	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	DINHUB
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
			Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
2	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
		Optimalisasi Pasar Daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
	layanan pendidikan dan kesehatan			
3	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
4	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP DAMKAR
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH
			Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
5	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Digitalisasi dan Smart City	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

4.4.11. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta

Salah satu usulan program/kegiatan yang tertuang pada Presiden Nomor 79 Tahun 2019 yaitu Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Kabupaten Magelang sepanjang 71 km. Kabupaten Temanggung yang posisinya dilalui oleh ruas tersebut direncanakan akan menjadi salah satu lokasi pintu tol yang berada di Kecamatan Pringsurat. Dukungan dalam implementasi pintu tol Bawen-Yogyakarta tersebut dituangkan dalam sasaran dan prioritas daerah sebagaimana tabel 4.26 berikut.

Tabel 4.26
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
1	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	DINHUB
2	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DINKOPDAG
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINPERINAKER
3	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
			Program Penempatan Tenaga Kerja	DINPERINAKER
			Program Hubungan Industrial	DINPERINAKER

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

4.4.12. Penyelenggaran Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 sebagai landasan bagi instansi pemerintah untuk menyusun, mengelola, dan berbagi data secara lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dengan standar yang telah ditetapkan, data yang dihasilkan akan memiliki format yang seragam, meta data yang jelas, serta dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan Peraturan Presiden

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Temanggung ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung serta SK Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, di mana Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas sebagai Wali Data yang bertanggung jawab mengadakan Forum Satu Data, termasuk menyelenggarakan forum pengumpulan data statistik sektoral pada tahun 2023 dengan mengundang BPS Kabupaten Temanggung dan perangkat daerah sebagai produsen data. Portal data daerah Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dapat diakses melalui laman https://data.temanggungkab.go.id/ dan telah terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia dengan kode akun yaitu 330562.

Dalam rangka mengintegrasikan kebijakan pusat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024, Kabupaten Temanggung telah menyusun Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung yang ditetapkan melalui SK Bupati Temanggung Nomor 050/291 Tahun 2023. Di sisi lain, dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Wali Data berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Temanggung sebagai pembina data, menetapkan data prioritas, standar data, dan meta data. Hal ini dituangkan dalam SK Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor 050/004.1/2023 tentang Data Prioritas Statistik Sektoral, Standar Data, dan Metadata Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung memiliki kemanfaatan besar untuk berbagai kepentingan dan pihak, salah satunya dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang efektif harus didasarkan pada data yang akurat, valid, dan terintegrasi. Pemanfaatan Satu Data Indonesia dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung salah satunya terlihat dari penggunaan portal https://gis.temanggungkab.go.id/ yang merupakan portal Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menyediakan data-data

sektoral. Dengan ketersediaan data yang akurat, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran serta menentukan prioritas pembangunan sebagai acuan dalam mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien.

4.4.13. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah

Pengendalian pemerintahan daerah merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, serta prinsip tata kelola yang baik. Dengan sistem pengendalian yang efektif, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kinerja, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada sistem pengendalian pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung didukung dengan adanya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Keberadaan dan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menjalankan fungsi pengawasan internal didukung oleh Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/363 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Program ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Program tersebut juga menjadi acuan dan pedoman dalam pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024. Selain APIP, keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki peran yang juga penting dalam mendukung penyelenggaraan pengendalian pemerintahan di Kabupaten Temanggung. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPIP secara berkelanjutan, diperlukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP. Hal ini didukung dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 712/0000825 Tahun 2023 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang memiliki tugas untuk menilai dan memastikan kualitas penyelenggaraan SPIP.

Dalam rangka memperkuat penerapan SPIP dan mencapai tujuan pemerintahan daerah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di

lingkungan pemerintah. Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung selanjutnya menjadi acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dalam mengelola risiko, sehingga manajemen risiko dapat dijalankan secara efektif dan sistematis.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 RENCANA KERJA DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 serta selaras dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah. RKPD disusun dengan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran melalui tiga langkah yaitu pertama, melanjutkan implementasi *money follows program*, dengan cara mengintegrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Ketiga, memperkuat kendali program dengan melakukan pengendalian, monitoring serta evaluasi.

Tahapan penyusunan program merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Seiring dengan RKP 2026 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 menyelaraskan programnya sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas dalam RKP 2026.

5.1.1 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 Kabupaten Temanggung Terhadap Prioritas Nasional (PN)

5.1.1.1 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Arah Kebijakan RKP Tahun 2026

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung terhadap 8 Prioritas Pemerintah Pusat yang tercantum dalam RKP 2026 melalui dukungan beberapa program beserta anggarannya. Dukungan program beserta anggaran tersebut juga mendukung tema RKP 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”.

Dukungan program dan anggaran dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. 1
Rekapitulasi Dukungan Program Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2026

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2026	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	13	24.442.004.775	Bankesbangpol
				Dinsos
				DPPPAPPKB
				Dinkominfo
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	20	61.534.880.557	Dinkominfo
				DKPPP
				DPUPR
				DPRKPLH
				Dinkopdag
				Dinperinaker
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	10	447.813.682.775	DPUPR
				Dinperinaker
				Dinkopdag
				BPKPAD
				DPUPR
				DINKOMINFO
				DINHUB
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	15	224.471.914.728	DINDIKPORA
				BAPPEDA
				DINPUSIP
				DINKES
				DPPAPPKB
				BANKESBANGPOL
				DINSOS
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	13	44.014.071.400	Dinperinaker
				DINKOMINFO
				DPUPR
				DINHUB
				DPMPTSP
				Dinkopdag
				Dinperinaker
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	13	30.740.702.748	Dinpermades
				DPRKPLH
				Dinkopdag
				Dinsos
				DINDUKCAPIL
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	14	427.263.096.369	Bankesbangpol
				Sekretariat Daerah
				INSPEKTORAT
				BKPSDM
				DINKOMINFO
				BPKPAD
				DINKOPDAG

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2026	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
	korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan			SATPOL PP DAMKAR
8	memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	12	25.002.718.750	Bankesbangpol
				Dinbudpar
				BPBD
				Satpol PP dan Damkar
				DPRKPLH
JUMLAH			**1.285.283.072.102**	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah

5.1.1.1.1 Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Tabel 5. 2
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
1	**Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia**							
	Program Pembangunan 1.1. Memperkokoh Ideologi Pancasila Kegiatan Pembangunan 1.1. 1. Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 2. Aktualisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	535.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
	Program Pembangunan 1.2. Penguatan Demokrasi Kegiatan Pembangunan 1.2. 1. Penguatan Kebebasan dan Kesetaraan Masyarakat 2. Penguatan Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	100	%	1.827.819.500		
	Program Pembangunan 1.3 Pemantapan Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi	71	%	505.000.000	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO
	Kegiatan Pembangunan 1.3 1. Penguatan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik 2. Pembangunan Media Massa yang		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media	32	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Bertanggung jawab, Edukatif , Jujur, Objektif dan Sehat Industri		elektronik dan non elektronik					
			Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	15	%			
			Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan					
	Program Pembangunan 1.4 Kepemimpinan Nasional yang Berdasarkan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	20	%	40.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
	Kegiatan Pembangunan 1.4 1. Peningkatan Kualitas kader pemimpin di Tingkat Pusat hingga Daerah 2. Peningkatan Semangat Persatuan , Kesatuan dan Kebagsaan pada Generasi Muda	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah kejadian konflik SARA	8	%	200.000.000		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	536.213.000		
	Program Pembangunan 1.5 Transformasi Akses terhadap Keadilan dan Pengarustamaan HAM	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan	100	%	310.000.000	Sosial	DINAS SOSIAL

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			dalam usaha kesejahteraan sosial					
	Kegiatan Pembangunan 1.51. Transformasi Pengarustamaan HAM 2. Transformasi Layanan Akses Terhadap Keadilan yang Subtansial Terutama dan Tidak Terbatas bagi kelompok rentan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	%	12.000.000		
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	1.328.000.000		
			Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%			
			Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%			
			Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			dasar tuna sosial diluar panti					
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100	%	20.319.578.775		
			Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	100	%			
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	9,7	%	30.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPAPPKB
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	Kategori	80.000.000		
			Prosentase terbentuknya DRPPA	30,1	%			
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pernikahan usia anak	0,092	%	10.000.000		
			Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	100	%			
			Rasio kasus kekerasan terhadap anak	8,48	angka			
JUMLAH						**24.442.004.775**		

5.1.1.1.2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Tabel 5.3
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 2:
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
2	**Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru**							
	Program Pembangunan 2.1 Penguatan Pertahanan Negara							
	Kegiatan Pembangunan 2.1 1. Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan Optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI 2. Memperkuat komponen cadangan 3. Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara 4. Memperkuat kapabilitas Badan Pertahanan Siber 5. Melanjutkan proggram penguatan postur pertahanan dengan konsep Optimum Essential Force dalam rangka meningkatkan Efektivitas menjaga kedaulatan NKRI 6. Meningkatkan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar 7. Memperkuat Instrumen Pertahanan dalam Rangka Sinergi Antarinstrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme 8. Peningkatan Profesionalisme dan							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kesejahteraan Prajurit 9. Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista Strategis							
	Program Pembangunan 2.2. Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan							
	Kegiatan Pembangunan 2.2 1. Mempercepat Peningkatan Kemampuan Industri Strategis Nasional dalam Memenuhi Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri 2. Meningkatkan Komitmen untuk Menggunakan Produk-Produk Industri Strategis Nasional dan Mendayagunakan Sebesar Mungkin Kapasitas Industri Strategis Dalam Negeri 3. Pembentukan Ekosistem Industri Pertahanan 4. Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Spend To Invest 5. Kolaborasi Penelitian dan Pengembangan Alpalhankam							
	Program Pembangunan 2.3. Penguatan Sistem Keamanan Negara							
	Kegiatan Pembangunan 2.3. 1. Melakukan Sinergi Pendekatan Sejarah, Budaya, Kearifan Lokal, dan Sosial Ekonomi, serta Paham Kebhinekaan di Daerah-Daerah yang Rawan Konflik serta Rentan Isu Separatisme 2. Meningkatkan Sistem Deteksi Dini untuk Memperkuat Sistem Keamanan Negara 3. Memperkuat Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara bagi Seluruh Rakyat Indonesia 4. Memperkuat Instrumen Keamanan dalam Rangka Sinergi Antarinstrumen Pertahanan dan Keamanan dalam							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme 5. Penguatan Sistem Keamanan Negara di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar 6. Pencegahan, Penanganan, dan Deradikalisasi Terorisme							
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	536.213.000,00	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
	Program Pembangunan 2.4. Profesionalisme Pelayanan Kepolisian							
	Kegiatan Pembangunan 2.4. 1. Memperkuat Polisi dalam Rangka Sinergi antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme 2. Peningkatan Jumlah dan Proporsi Polwan 3. Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 4. Penguatan Kapabilitas Polri dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum, Pemeliharaan Keamanan, dan Penanganan Kriminalitas 5. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personil Polri							
	Program Pembangunan 2.5. Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi							
	Kegiatan Pembangunan 2.5 1. Memperkuat Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI 2. Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut 3. Kolaborasi Pengawasan dan							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, Alki, dan Choke Point 5. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personil Lembaga Keamanan Laut 6. Pemetaan Batimetri dan Alur Laut							
	Program Pembangunan 2.6 Keamanan Siber, sandi, dan sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	91,00	%	334.999.600	Persandian	DINKOMINFO
	Program Pembangunan 2.7 Diplomasi Ekonomi							
	Kegiatan Pembangunan 2.7 1. Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional 2. Diplomasi Ekonomi yang Adaptif 3. Diplomasi Ekonomi Strategis dengan Mitra Utama 4. Diplomasi Ekonomi dengan Negara Tetangga Perbatasan, Regional, dan Subregional 5. Proses Aksesi Indonesia ke OECD							
	Program Pembangunan 2.8 Hubungan Internasional yang Kondusif							
	Kegiatan Pembangunan 2.8 1. Intensifikasi Penyelesaian Batas Maritim dan Batas Darat serta Penguatan Diplomasi Kedaulatan 2. Penguatan Supremasi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Fora dan Organisasi Internasional 3. Peningkatan Peran Aktif Indonesia dalam Mendorong Perdamaian Dunia 4. Intensifikasi Diplomasi Publik dan Budaya, serta Memperjuangkan Warisan Budaya Nasional menjadi Warisan Budaya Dunia 5. Intensifikasi Diplomasi Publik dan Budaya, Serta Memperjuangkan							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Warisan Budaya Nasional menjadi Warisan Budaya Dunia							
	Program Pembangunan 2.9 Swasembada Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya	10672,00761	ton	250.000.000	Pangan	DKPPP
	Kegiatan Pembangunan 2.9 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Sumatera Selatan3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Nusa Tenggara Timur4. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan(KSPP) Papua5. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Papua Selatan 6. Pengembangan Lumbung Pangan Nasional 7. Penguatan Cadangan Pangan8. Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)9. Pengembangan Pangan Hewani10. Pengembangan Pangan Nabati11. Penganekaragaman Konsumsi Pangan 12. Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan 13. Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan14. Penguatan Pangan Lokal15. Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi16. Penguatan Satu Data Pangan 17. Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan18. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan19. One Health20. Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis / Unggulan21. Pengembangan Korporasi Petani, Nelayan, Pembudi Daya lkan, Petambak Garam (KPN)22. Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian yang Adaptif dan Inklusif23. Penguatan Regenerasi Petani24. Pendayagunaan Praktik Pertanian Berkelanjutan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan ikan	395.758	%	260.000.000,00		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	6,16	ton/ha	20.147.681.407		
			Produktivitas jagung	5,55	ton/ha			
			Produktivitas bawang putih	6,15	ton/ha			
			Produktivitas bawang merah	7,10	ton/ha			
			Produktivitas cabai rawit	7,01	ton/ha			
			Produktivitas cabai keriting	7,01	ton/ha			
			Produktivitas tembakau	0,643	ton/ha			
			Produktivitas kopi robusta	0,7025	ton/ha			
			Produktivitas kopi arabika	0,410	ton/ha			
			Jumlah produksi daging ternak besar	807.654	kg			
			jumlah produksi daging ternak kecil	268.110	kg			
			jumlah produksi ternak unggas	6.243.337	kg			
			jumlah produksi telur	6.867.846	kg			
			Persentase kelahiran pedet	48	%			
			Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	37,13	%			
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan	100	%	5.625.000.000,00		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	86	%	647.300.000		
			Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	76	%			
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	58	%	3.517.520.000,00		
			Persentase Peningkatan kelas kelp tani	1,30				
		Program Penanganan Kerawananan Pangan	Presentase penanganan kerawanan pangan	100	%	50.000.000,00		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	90%		20.000.000		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan ikan	395.758	%	260.000.000,00		
	Program Pembangunan 2. 10 Swasembada Energi							
	Kegiatan Pembangunan 2.10 1. Peningkatan Penyediaan Energi 2. Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi 3. Penguatan Implementasi Transisi Energi							
	Program Pembangunan 2.11 Swasembada Air	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	97,67	%	275.000.000	Pekerjaan dan Penataan Ruang	DPUPR
	Kegiatan Pembangunan 2.11 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Air 2. Penyediaan Pasokan Air Berkelanjutan 3. Pengelolaan Risiko Daya Rusak Air 4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%			
	Program Pembangunan 2.12 Pemenuhan Akses Air Minum Aman			31,13	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.12 1. Pengembangan Spam Terintegrasi Hulu ke Hilir2. Pengamanan dan Pengawasan Kualitas Air Minum3. Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan SPAM4. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemenuhan Air Minum		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan					
	Program Pembangunan 2.13 Percepatan Pemenuhan Akses Sanitasi Aman untuk Masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	100	%	829.999.550	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPRKPLH
	Kegiatan Pembangunan 2.13 1. Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim 2. Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Sanitasi yang Berorientasi pada Keberlanjutan dan Ketahanan Iklim 3. Pengembangan Ekosistem Berbasis Inovasi Penyelenggaraan Sanitasi 4. Penguatan Peran Masyarakat dalam Penyediaan dan Penyelenggaraan Sanitasi yang Aman		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%			
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%			
	Program Pembangunan 2.14 Ekonomi Syariah	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	126276147	US$	200.000.000	Perdagangan	DINKOPDAG
	Kegiatan Pembangunan 2.14 1. lndustri Halal 2. Ekspor Halal dan Kerja Sama Ekonomi Syariah Internasional 3. Ekosistem UMKM Halal 4. Keuangan Syariah 5. Dana Sosial Syariah							
	Program Pembangunan 2.15 Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik secara elektronik	75,00	%	1.780.719.000	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO
	Kegiatan Pembangunan 2.15 1. Penguatan Ekosistem Infrastruktur Ekonomi Digital 2. Penguatan Ekosistem Industri Digital Lingkup Ekonomi		Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	37,68	%			
			Persentase rumah tangga dengan akses internet	91,50				

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67,00	%	1.936.000.000,00	Perdagangan	DINKOPDAG
			Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2,00	%			
			Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	1,71	%			
	Program Pembangunan 2.16 Ekonomi Sirkular Industri	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	10.000.000		DPRKPLH
	Kegiatan Pembangunan 2.16 1. Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Perpanjangan Daya Guna 2. Pengembangan Produk Ramah Lingkungan 3. Penguatan Ekosistem Daur Ulang		Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	101	%			
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	102	%			
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	3,33	%	9.050.198.000	Pekerjaan dan Penataan Ruang	
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	%			
	Prioritas Pembangunan 2.17 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	80	%	7.330.000.000		DPRKPLH
	Kegiatan Pembangunan 2.17 1. Penguatan Pengelolaan Area Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi2. Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi3. Pengurangan Status Keterancaman Spesies dan Ekosistem4. Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati5. Peningkatan Pemanfaatan Jasa Ekosistem secara Berkelanjutan6.							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Pengembangan Bioprospeksi Serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik7. Pengelolaan Bioteknologi dan Keamanan Hayati (Biosafety)							
	Prioritas Pembangunan 2.18 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	74,27	angka	220.000.000	Lingkungan Hidup	DPRKPLH
	Kegiatan Pembangunan 2.18 1. Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air di Sungai dan Danau 2. Peningkatan Pengelolaan Kualitas Udara di Kab/Kota di Indonesia 3. Peningkatan Pengelolaan Kualitas dan Kesehatan Air Laut 4. Peningkatan Kualitas Laban 5. Penurunan Laju Deforestasi 6. Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut 7. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 8. Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9. Pengendalian dan Penertiban Penyelesaian Kasus Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemanfaatan Ruang 10. Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Kelembagaan dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan di Pusat dan Daerah serta Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang 11. Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12. Penguatan Instrumen Pencegahan dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,01	angka			
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	60,03	angka			
			Luas Lahan kritis tertangani	4	Ha			
			Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	7,40	%			
			Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	23,3	%			
			Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	15,7	%			
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	30,93	%	10.000.000		
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	%	45.000.000		
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%			
	Program Pembangunan 2.19 Penerapan Ekonomi Sirkular dari Sumber Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah	34,14	%	6.828.000.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Rumah Tangga secara Partisipatif (Hulu)							
	Kegiatan Pembangunan 2.19 1. Pengurangan dan Pemilahan Sampah di Sumber serta Pengumpulan dan Pengangkutan Terpilah Terjadwal 2. Penyediaan dan Optimalisasi Fasilitas Pengolahan Sampah		Persentase sampah yang terkelola	64,07	%			
	Program Pembangunan 2.20 Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Hilir)		Cakupan Pelayanan persampahan	77,85				
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	74,27	angka	220.000.000		
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,01	angka			
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	60,03	angka			
			Luas Lahan kritis tertangani	4	Ha			
			Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	7,40	%			
			Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	23,3	%			
			Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	15,7	%			
	Program Pembangunan 2.21 Pembangunan Rendah Karbon							
	Kegiatan Pembangunan 2.211. Penurunan Emisi GRK Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral2. Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan3. Pencegahan Pengurangan dan Peningkatan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan4. Implementasi Praktik Pertanian yang Rendah Karbon5. Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru6. Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri7. Penguatan Aksi Penurunan							
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	30,93	%	20.000.000	Lingkungan Hidup	DPRKPLH

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Emisi GRK di Sektor Pengelolaan Limbah8. Tata Kelola dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Penurunan Emisi GRK							
	Program Pembangunan 2.22 Tenaga Kerja Hijau	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,56	%	611.000.000	Tenaga Kerja	DINPERINAKER
	Kegiatan Pembangunan 2.22 1. Pengembangan Ekosistem Tenaga Kerja Hijau 2. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau 3. Penguatan Peran Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau dan Tenaga Kerja Hijau		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%			
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	37,00	%	400.250.000		
			Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	32,00	%			
			Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	37,00	%			
			Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	94,00	%			
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	68,83				
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	42,52	%	120.000.000		
			Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	75,00	%			
			Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	47,00	%			
			Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	100,00	%			
	Program Pembangunan 2.23 Pengelolaan Hutan Lestari							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.23 1. Peningkatan Produktivitas Hutan 2. Pengembangan Produk Bioekonomi Hutan Melalui Agroforestri 3. Penguatan Pengelolaan Hutan Lestari 4. Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari 5. Peningkatan Fungsi Sosial Kawasan Hutan							
	Program Pembangunan 2.24 Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru							
	Kegiatan Pembangunan 2.241. Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru2. Peningkatan Pengelolaan Ekosistem, Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir3. Pengembangan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam Perikanan dan Kelautan yang Modern, Terintegrasi, dan Berkelanjutan4. Penguatan Industri Manufaktur Perkapalan dan Bahan Baku Perkapalan5. Penguatan Sistem Logistik, Transportasi, dan Perdagangan Jalur Perairan6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau serta Pemanfaatan Jasa Kelautan Berkelanjutan7. Peningkatan Kapasitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi Biru serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Maritim							
JUMLAH						**61.534.880.557**		

5.1.1.1.3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Tabel 5.4
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 3:
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro-Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	**Prioritas Nasional: 03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**							
	Program Pembangunan 3.1 Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	41,55	%	10.689.821.400	Perhubungan	DINHUB
	Kegiatan Pembangunan 3.1. 1. Penguatan Konektivitas Jalan 2. Penguatan Konektivitas Kereta Api 3. Penguatan Konektivitas Laut 4. Penguatan Konektivitas Udara 5. Penguatan Konektivitas Darat 6. Pengembangan Transportasi Perkotaan 7. Peningkatan Sumber Daya Manusia Transportasi		Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	66,84				
			Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	99,62	%			
			Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	34,17	%			
			Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63,52	%			
			Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	100,00	%			
			Persentase Layanan Perhubungan	100,00	%			
			Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	89,17	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	80,00	%			
			Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100,00				
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap	89,5	%	20.060.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
			Persentase Jembatan dalam kondisi baik	94	%			
			Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	89,51	%			
	Program Pembangunan 3.2. Penguatan Konektivitas dan Transisi Energi Listrik							
	Kegiatan Pembangunan 3.2 1. Dekarbonisasi dan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Termasuk Terbarukan 2. Peningkatan Konektivitas dan Digitalisasi Tenaga Listrik 3. Peningkatan Pemanfaatan Tenaga Listrik 4. Pengembangan Ekosistem Pendorong Transisi Energi Listrik							
	Program Pembangunan 3.3. Penguatan Konektivitas dan Ekosistem Digital	Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	1.780.719.000	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO
	Kegiatan Pembangunan 3.3. 1. Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran 2. Pengelolaan Sumber Daya TIK 3. Peningkatan Kondusivitas Ruang Digital		Persentase layanan publik secara elektronik	100	%			
	Program Pembangunan 3.4. Pengembangan Pengairan dan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,37	%	3.063.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
	Kegiatan Pembangunan 3.4 1. Pengembangan Irigasi 2. Pembangunan Bendungan		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	97,97	%			
	Program Pembangunan 3.5Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	6,67	%	1.874.278.750	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	DINKOPDAG

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 3.5 1. Pengembangan Koperasi Sektor Produksi 2. Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif 3. Pengembangan Kewirausahaan	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	48	%	25.000.000		
	Program Pembangunan 3.6 Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	100	%	408.945.974.500	Keuangan	BPKPAD
	Kegiatan Pembangunan 3.6 1. Penguatan Peran Perbankan 2. Penguatan Peran Sektor Keuangan Nonbank 3. Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%			
			Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%			
			Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	100	%			
			Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%			
	Program Pembangunan 3.7 Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,04	%	100.000.000	Pariwisata	DINBUDPAR
	Kegiatan Pembangunan 3.7 1. Penguatan Destinasi Regeneratif Bali 2. Penguatan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau 3. Penguatan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta 4. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena 5. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang 6. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung 7. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba		Lama Tinggal Wisatawan	1	Hari			
			Persentase Peningkatan Desa Wisata	14,76	%			
			Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	10	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	8. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta• Prambanan 9. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat 10. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo 11. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi 12. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru 13. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai							
	Program Pembangunan 3.8Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual							
	Kegiatan Pembangunan 3.8 1. Penguatan Ekosistem Pemampu Ekonomi Kreatif 2. Penguatan Ekosistem Film, Animasi, dan Video 3. Penguatan Ekosistem Fesyen dan Kriya 4. Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim 5. Penguatan Ekosistem Kuliner							
JUMLAH						**447.813.682.775**		

5.1.1.1.4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Tabel 5.5
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 4:
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
4	**PRIORITAS NASIONAL: 04-MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS**							
	Program Pembangunan 4.1 Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD Sederajat	99,71	%	120.654.381.040	Pendidikan	DINDIKPORA
	Kegiatan Pembangunan 4.1 1. Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 3. Penyaluran Bantuan Pendidikan 4. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah 5. Revitalisasi Pendidikan Nonformal 6. Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren yang Berkualitas dan Pendidikan Keagamaan Lainnya 7. Pembangunan Sekolah Unggul Terintegrasi		APK SMP Sederajat	100	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
	8. Makan Bergizi di Sekolah dan Pesantren							
	Program Pembangunan 4.2. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		APM PAUD (5-6)	85,95	%			
	Kegiatan Pembangunan 4.2 1. Penerapan Kurikulum yang Berfokus pada Kompetensi Esensial, Adaptif, dan Kontekstual 2. Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK) 3. Pemantapan Sistem Asesmen Komprehensif 4. Penciptaan Ekosistem Satuan Pendidikan yang Mendukung Penguatan Karakter dan Wellbeing Peserta Didik dan Pendidik 5.Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 6.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-lntegratif (PAUD-HI)		APM SD Sederajat	93,11	%			
	Program Pembangunan 4.3 Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas		APM SMP Sederajat	86,65	%			
	Kegiatan Pembangunan 4.3 1. Reformasi LPTK dan Penguatan PPG 2. Restrukturisasi Kewenangan Pengangkatan dan Distribusi Guru 3. Peningkatan Kompentesi Guru dan Tenaga Kependidikan		Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	28,57	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 4.4 Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan		Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	72	%			
	Kegiatan Pembangunan 4.4 1. Penguatan Manajemen Kepemimpinan Lembaga Pendidikan 2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan 3. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	70	%			
			Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	62,23	%			
			Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	30	%			
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	266	angka			
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	777	angka			
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	620	angka			
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	2379	angka			
			Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	220	angka			
			Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	255	angka			
			Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	100	%			
			Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	45	%			
			Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	60,17	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
			Rasio Guru/Siswa PAUD	01:15	angka			
			Rasio Guru/Siswa SD	01:28	angka			
			Rasio Guru/Siswa SMP	01:32	angka			
			Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	100	%			
			Iklim Iklusivitas SD	63,69	Angka			
			Iklim Iklusivitas SMP	65,04	Angka			
			Iklim Keamanan SD	76,95	Angka			
			Iklim Keamanan SMP	75,02	Angka			
			Iklim Kebhinekaan SD	75,97	Angka			
			Iklim Kebhinekaan SMP	75,05	Angka			
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	86,15	%			
	Program Pembangunan 4.7 Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	Program penelitian dan pengembangan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	60	%	53.000.000	Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA
	Program Pembangunan 4.9 Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengunjung di perpustakaan	25,00	%	1.276.042.213	Perpustakaan	DINPUSIP
	Kegiatan Pembangunan 4.9 1. Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan 2. Peningkatan Budaya Kegemaran Membaca		Persentase perpustakaan yang aktif	36	%			
	Program Pembangunan 4.10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%	57.928.636.400	Kesehatan	DINKES

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	ibu hamil sesuai standar					
	Kegiatan Pembangunan 4.10 1. Penurunan Kematian Ibu dan Anak 2. Pencegahan dan Penurunan Stunting Dan Bantuan Pangan Bergizi bagi Ibu Hamil dan Balita 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	%			
	Program Pembangunan 4.11 Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat		Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH			
	Kegiatan Pembangunan 4.11 1. Penuntasan TBC 2. Pengendalian Penyakit Menular Lainnya 3. Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta dan Schistosomiasis) 4. Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan Lainnya 5. Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Peningkatan Upaya Kesehatan Jiwa 6. Pembudayaan Hidup Sehat, Penyehatan Lingkungan dan Olahraga		Angka kematian neonatal	8,42	Per 1.000 KH			
	Program Pembangunan 4.12 Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
	Kegiatan Pembangunan 4.12 1. Penguatan Surveilans,		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
	Laboratorium, Pos Pintu Masuk Negara, Pengendalian KLB / wabah dan Penanganan Bencana 2. Pemenuhan dan Kemandirian Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 3. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi							
	Program Pembangunan 4.13 Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola		Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%			
	Kegiatan Pembangunan 4.13 1. Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 2. Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 3. Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 4. Penguatan JKN dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 5. Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Data, Informasi dan Inovasi Teknologi Kesehatan		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar	100	%			
			Prevalensi wasting balita	8	%			
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	14,9	%			
			Persentase anemia pada ibu hamil	11,4	%			
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	19	%			
			Persentase tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja	10	%			
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%			
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
			mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%			
			Prevalensi obesitas	23	angka			
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	100	%			
			Cakupan imunisasi bayi lengkap	100	%			
			Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	100	%			
			Persentase penduduk yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup	25	%			
			Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	75	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	100	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
			dengan SPA sesuai standar					
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	50	%			
			Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	30	%			
			Proporsi fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna	30	%			
			Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	73	%			
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	20	%			
			Cakupan desa/kelurahan STBM	25	%			
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	85	%			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit	100	%	1.183.781.000		
			Persentase capaian pengembangan rumah sakit					
			Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan					
		Program Sediaan Farmasi, Alat	Persentase pelayanan kefarmasian yang	30	%	245.937.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
		Kesehatan Dan Makanan Minuman	melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar					
			Persentase Puskesmas dengan jumlah KLB Keracunan Pangan < 5 kejadian	100	%			
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	46,95	%	7.494.989.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DPPAPPKB
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	77,80	%			
			Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	15,91	%			
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	45,75	%	4.264.081.650		
			Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	87,40				
			Indeks lansia berdaya	58,00				
	Program Pembangunan 4.15 Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	kategori	80.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Kegiatan Pembangunan 4.15 1. Pemenuhan Hak Anak Secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak 2. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya		Prosentase terbentuknya DRPPA	30,1	%			
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	84,62	%	320.000.000		
		Program Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	58,8	angka	493.800.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak	7,58	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
			terpenuhi (unmetneed)					
			Median usia kawin pertama (MUKP)	20,10	angka			
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	9,22	%			
	Program Pembangunan 4.16 Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	7,5	%	87.500.000	Kepemudaan dan Olahraga	DINDIKPORA
	Kegiatan Pembangunan 4.16 1. Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, dan Pencegahan Perilaku Berisiko 2. Peningkatan Partisipasi Aktif Pemuda dalam Ketenagakerjaan 3. Peningkatan Partisipasi Aktif dan Kepemimpinan Pemuda di Bidang Sosial dan Politik		Persentase organisasi pemuda yang aktif	87	%			
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	100	%	1.827.819.500	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
	Program Pembangunan 4.17Penguatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	9,70	%	30.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPAPPKB
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	100	%	10.000.000		
			Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	5,15	angka			
	Program Pembangunan 4.18 Peningkatan Kesetaraan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan	100	%	20.319.578.775	Sosial	DINSOS

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
	Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia		pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan					
	Kegiatan Pembangunan 4.18 1. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia 2. Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Proses Pembangunan		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	86	%			
	Program Pembangunan 4.19 Peningkatan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	78	%	6.990.960.200	Kepemudaan dan Olahraga	DINDIKPORA
	Kegiatan Pembangunan 4.19 1. Pengembangan Budaya Olahraga 2. Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Talenta Unggul 3. Pengembangan Tenaga dan Organisasi Olahraga Berstandar Intemasional 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Intemasional yang Ramah Disabilitas 5. Peningkatan Partisipasi dan Penyelenggaraan Event/ Festival/Kompetisi Olahraga		Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	63	%			
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	100	%	500.000.000	Kepemudaan dan Olahraga	
	TOTAL					**224.471.914.728**		

5.1.1.1.5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Tabel 5.6
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
3	**PRIORITAS NASIONAL: 05-MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI**							
	Program Pembangunan 5.1 Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67,00	%	1.936.000.000	Perdagangan	DINKOPDAG
	Kegiatan Pembangunan 5.1. 1. Hilirisasi Industri Berbasis Mineral Penting (Nikel, Tembaga, Bauksit) 2. Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Hayati (Sawit, Kelapa, Rumput Laut) 3. Pengembangan Industri Medium-High Technology (Alat Angkut, Elektronik dan Digital, Kimia dan Farmasi) 4. Penguatan Produktivitas Industri Padat Karya Terampil (Makanan Minuman, TPT, dan Alas Kaki) 5. Penguatan Industri Dasar (Kimia Dasar dan Logam Dasar)		Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2,00	%			
			Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	1,71	%			
	Program Pembangunan 5.2. Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	42,52	%	120.000.000	Perindustrian	DINPERINAKER
	Kegiatan Pembangunan 5.2 1. Perencanaan, Perizinan dan Tata Ruang KI/KEK Prioritas 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam dan Luar KI/KEK Prioritas 3. Penyiapan Sumber Daya Manusia untuk KI/KEK Prioritas 4. Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok untuk KI/KEK Prioritas		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	75,00	%			
			Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	47,00	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
			Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	100,00	%			
		Program penataan bangunan gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	80,25	%	2.245.000.000,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
			Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	64,64	%			
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik	68,63	%	4.733.000.000		
			Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	10,13	%			
	Program Pembangunan 5.3. Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50,00	%	611.000.000	Tenaga Kerja	DINPERINAKER
	Kegiatan Pembangunan 5.3. 1. Penguatan Layanan Konektivitas Backbone Integrasi Ekonomi 2. Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Sarana Penunjang Logistik 3. Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik 4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	82,00	%			
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam	37,00	%	400.250.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
			wilayah Kabupaten					
			Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	32,00	%			
			Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	37,00	%			
			Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	94,00	%			
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	68,83				
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	85,75	%	505.000.000	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO
			Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100,00	%			
			Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	100	%			
			Persentase Badan Publik yang memenuhi	17,50				

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
			standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik					
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	89,85	%	20.060.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
			Persentase Jembatan dalam kondisi baik	94,37	%			
			Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	22,62	%			
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	42,03	%	10.689.821.400	Perhubungan	DINHUB
			Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	67,14	%			
			Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	99,66	%			
			Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	36,63	%			
			Persentase Meterisasi KWh	65,11	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
			Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung					
			Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	100,00	%			
			Persentase Layanan Perhubungan	100,00	%			
			Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	89,39	%			
			Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	86,67				
			Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100,00				
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase saluran drainase kondisi baik	69,25	%	1.088.000.000,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
	Program Pembangunan 5.4. Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	92	%	100.000.000,00	Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	92	%	700.000.000,00		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	92	%	212.000.000,00		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	92	%	99.000.000,00		
	Program Pembangunan 5.5 Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	126276147	%	200.000.000	Perdagangan	DINKOPDAG
	Kegiatan Pembangunan 5.5 1. Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global 2. Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi 3. Peningkatan Ekspor Produk lndustri Penyerap Tenaga Kerja Tinggi 4. Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA 5. Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif 6. Peningkatan Ekspor Produk UMKM dan Integrasi UMKM dalam Rantai Nilai Global 7. Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif Termasuk Electric Vehicle (EV) 8. Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global 9. Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Konsumen	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	48,27	%	315.000.000,00	Perindustrian	DINPERINAKER
JUMLAH						**44.014.071.400**		

5.1.1.1.6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Tabel 5.7
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 6:
Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
6	**PRIORITAS NASIONAL: 06-MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN**							
	Program Pembangunan 6.1 Pembangunan Wilayah Metropolitan							
	Kegiatan Pembangunan 6.1. 1. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Medan 2. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang 3. Pemantapan Wilayah Metropolitan Jakarta 4. Pemantapan Wilayah Metropolitan Bandung 5. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang 6. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Surabaya 7. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar 8. Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin 9. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Makassar 10. Pengembangan Wilayah Metropolitan Manado							
	Program Pembangunan 6.2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara							
	Kegiatan Pembangunan 6.2 1. Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara 2. Pembangunan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara 3. Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia Ibu Kota Nusantara							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
	4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara 5. Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara 6. Pemindahan dan Penyelenggaraan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara 7. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Nusantara							
	Program Pembangunan 6.3. Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	96,43	%	3.394.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPRKPLH
	Kegiatan Pembangunan 6.3. 1. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU 2. Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu 3. Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan 4. Penguatan Ekosistem Perumahan 5. Peremajaan dan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terpadu		Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	48,81	%			
			Persentase penanganan rumah tidak layak huni	69,06	%			
			Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	80,03	%			
	Program Pembangunan 6.4. Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan	Program Penataan Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	100	%	10.000.000	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DINPERMADES
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik	90	%	4.558.862.748		
			Presentase penyusunan LPPD sesuai Ketentuan	100				
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD	8,33	%	160.000.000		
			Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	40,60	%			
			Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	100	%	15.000.000		
	Program Pembangunan 6.5 Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	97,20	%	500.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL
	Kegiatan Pembangunan 6.5 1. Pengembangan Tata Kelola Registrasi Sosial Ekonomi 2. Penguatan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi 3. Sinkronisasi Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati dengan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99,98	%	6.000.000		
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi	71,00	%	97.261.225		
			Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	32,00	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
			Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	15,00	%			
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	50,00	%	30.000.000	Statistik	Dinkominfo
			Ketersediaan data statistik sektoral	100				
	Program Pembangunan 6.6 Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	310.000.000	Sosial	DINSOS
	Kegiatan Pembangunan 6.6 1. Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional secara Inklusif 2. Penguatan Program dan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional							
	Program Pembangunan 6.7 Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	%	12.000.000		
	Kegiatan Pembangunan 6. 1. Pengembangan dan Sinkronisasi Pendanaan yang Berbasis Risiko 2. Penerapan Graduasi Bantuan Sosial dan Penguatan Kemandirian Masyarakat melalui Kartu Usaha 3. Penyaluran Bantuan Sosial yang Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan 4. Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria 5. Penguatan Pendamping Pembangunan							
	Program Pembangunan 6.8 Pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Economy) untuk Perluasan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100	%	20.319.578.775		
	Kegiatan Pembangunan 6.81. Penyediaan Layanan Pengasuhan bagi Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Rentan Lain2. Pengembangan PendanaanPerawatan/ Pengasuhan3. Penguatan Kapasitas Perawatan Masyarakat		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	86	%			
	Program Pembangunan 6.9 Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan Kelompok Rentan	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang	100	%	1.328.000.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
			memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti					
	Kegiatan Pembangunan 6.9 1. Penjangkauan Pendataan Kelompok Rentan 2. Akses yang Setara terhadap Perekonomian, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi Sosial untuk Kelompok Rentan		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%			
			Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%			
			Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%			
JUMLAH						**30.740.702.748**		

5.1.1.1.7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Tabel 5.8
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 7:
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan

No	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
3	**PRIORITAS NASIONAL: 07-MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN**						
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	100	%	1.827.819.500	Kesatuan bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	20	%	40.000.000		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Presentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan	100	%	3.750.000.000	Pengawasan	INSPEKTORAT
		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%			
		Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	100	%			
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%			
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	60	%	912.000.000		SETDA
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	89	%			
		Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik	100	%			
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	100	%			
		Persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%			

No	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%			
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%			
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%			
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III,IV, Khusus)	100	%	5.050.000.000	Pengawasan	INSPEKTORAT
		Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	%			
		Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	100	%			
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	535.000.000	Kesatuan bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi			514.375.000,00	Kepegawaian	BKPSDM
	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik secara elektronik	75,00	%	1.780.719.000	Komunikasi	DINKOMINFO
		Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	37,68	%			
		Persentase rumah tangga dengan akses internet	91,50				
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dialihmediakan	65	%	9.000.000	Kearsipan	DINPUSIP
		Persentase pembinaan kearsipan	75,55	%	20.000.000		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	92	%	99.000.000,00	Penanaman Modal	DPMPTSP
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	4,57	%	522.219.244	Keuangan	BPKPAD
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	98,29	%			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	75	%	408.945.974.500		BPKPAD
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%			
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%			

No	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100	%			
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%			
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah		%	68.303.400		SETDA
		Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi	100	%			
		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%			
		Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	100	%			
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan banrg/jasa	95	%			
		Presentase Pendampingan proses PBJ	100	%			
		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%			
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	%			
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	90,00	%	80.000.000,00	Perdagangan	DINKOPDAG
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	95,00	%	35.000.000,00		
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas yang terlatih	0,200	%	250.800.000	Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP DAMKAR
		Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%			
		Persentase penegakan Perda/Perbup	100	%			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik keamanan daerah	100	%	536.213.000,00	Kesatuan bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
JUMLAH					**427.263.096.369**		

5.1.1.1.8. Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

Tabel 5.9
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 8:
Memperkuat Penyelenggaraan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Adil Dan Makmur

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
8	**PRIORITAS NASIONAL: 08-MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA, SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR**							
	Program Pembangunan 8.1 Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah kejadian konflik SARA	8	kejadian	200.000.000,00	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
	Kegiatan Pembangunan 8.1. 1. Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan 2. Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis 3. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan 5. Transformasi Layanan Kua yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif 6. Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman 7. Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 8. Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	20	%	40.000.000		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	536.213.000,00		
	Program Pembangunan 8.2. Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	1	Obyek	7.375.500.000	Kebudayaan	DINBUDPAR

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 8.2 1. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Berdasarkan Pancasila 2. Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya 3. Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan 4. Jaminan Hak Berkebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 5. Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia 6. Pengembangan Budaya Bahari dan Revitalisasi Jalur Rempah 7. Transformasi Layanan Kearsipan untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa		Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	10	Kelompok			
			Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	10	Orang			
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	535.000.000,00	Kesatuan Bangsa dan Politik	BANKESBANGPOL
	Program Pembangunan 8.3. Pembangunan Berketahanan Iklim Kegiatan Pembangunan 8.3. 1. Peningkatan Ketahanan Pesisir dan Laut 2. Pembangunan dan Konservasi Sumber Daya Air 3. Pengembangan dan Implementasi Pertanian Ramah Iklim 4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sensitif Iklim 5. Tata Kelola dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Pembangunan Berketahanan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	74,27	angka	220.000.000	Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,01	angka			
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	60,03	angka			
			Luas Lahan kritis tertangani	4	Ha			
			Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	7,40	%			
			Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	23,3	%			
			Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	15,7	%			
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	80	%	7.330.000.000		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	10.000.000		
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	100	%			
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	100	%			
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	%	10.000.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah	34,14	%	6.828.000.000		
			Persentase sampah yang terkelola	64,07	%			
			Cakupan Pelayanan persampahan	77,85				
	Program Pembangunan 8.4. Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	1.054.828.000	Ketentraman dan Ketertiban Umum	BPBD
	Kegiatan Pembangunan 8.4 1.Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi 2. Peningkatan Layanan Peringatan Dini dan Penanganan Kedaruratan Bencana 3. Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana 4. Peningkatan Resiliensi Masyarakat terhadap Bencana 5. Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%			
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%			
			Persentase koordinasi penanganan pasca bencana	100	%			
			Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%			
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	%	863.177.750		SATPOL PP DAMKAR
			Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100	%			
			Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	100	%			
			Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	61,05	%			
			Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi	6,15	%			
			Cakupan penanganan bencana non kebakaran Kabupaten	100	%			
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	174.000.000,00	Sosial	DINSOS
			JUMLAH			**25.002.718.750**		

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dukungan program daerah dalam RPD 2025-2026 dan dukungan program daerah RKPD 2025 untuk mendukung program prioritas/kegiatan prioritas pada PN RKP Tahun 2025 yang secara rekapitulasi dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.10
Dukungan Program Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN RKP Tahun 2026

No	Jumlah Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2026			Dukungan Program Daerah RPD/ RKPD Tahun 2026			
	Prioritas Nasional	Program Pembangunan	Kegiatan Prioritas	RPJMD Tahun 2025-2029		RKPD Tahun 2026	
				Program Daerah	Persentase	Program Daerah	Persentase
1	PN 1	5	10	14	100%	13	100%
2	PN 2	24	143	37	100%	24	100%
3	PN 3	8	36	8	100%	9	100%
4	PN 4	19	70	16	100%	18	100%
5	PN 5	5	23	18	100%	15	100%
6	PN 6	9	44	11	100%	13	100%
7	PN 7	14	36	20	100%	17	100%
8	PN 8	4	25	16	100%	13	100%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

5.1.1.2. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pembangunan berkolaborasi dengan semua unsur baik pemerintah maupun non-pemerintah yang berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Non-Pemerintah, Akademisi, media massa, perusahaan, komunitas, dan masyarakat.

Kebijakan pembangunan daerah menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam mendukung prioritas pembangunan yang fokus pada penguatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5.11
Rekapitulasi Dan Penjabaran Dukungan Program dan Anggaran Terahadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2026

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PD PENANGGUNGJAWAB
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.560.006.393	SATPOL PP DAN DAMKAR
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	863.177.750	SATPOL PP DAN DAMKAR
3	Program Penanggulangan Bencana	1.054.828.000,00	BPBD
4	Program Pendafataran Penduduk	693,500,000	DINDUKCAPIL
5	Program Pencatatan Sipil	6.000.000,00	DINDUKCAPIL
6	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	97.261.225	DINDUKCAPIL
7	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	505.000.000,00	DINKOMINFO
8	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	22,000,000	DINKOMINFO
9	Program Pelayanan Penanaman Modal	212.000.000	DPMPTSP
10	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	99,000,000	DPMPTSP
11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	75,000,000	DINKOMINFO
12	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	334.999.600	DINKOMINFO
13	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	912.000.000	SETDA
14	Program Perekonomian Dan Pembangunan	68.303.400	SETDA
15	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	16.860.356.663	SEKRETARIAT DPRD
16	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pembangunan Daerah	487.472.000,00	BAPPEDA
17	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	408.945.974.500	BPKPAD
18	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	423.000.000	BPKPAD
19	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	522.219.244	BPKPAD
20	Program Kepegawaian Daerah	586.977.500	BKPSDM
21	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	514.375.000	BKPSDM
22	Program Penelitian dan Pengembangan	53.000.000,00	BAPPEDA
23	Program Riset dan Inovasi	207.000.000,00	BAPPEDA
24	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.050.000.000,00	BAPPEDA
25	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	3.750.000.000,00	BANKESBANGPOL
26	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	535,000,000	BANKESBANGPOL
27	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.827.819.500	BANKESBANGPOL
28	Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	40,000,000	BANKESBANGPOL
29	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	200,000,000	BANKESBANGPOL
30	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	536.213.000	BANKESBANGPOL
	JUMLAH	**11.415.300.000**	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.063.000.000	DPUPR
2	Program Penyelenggaraan Jalan	20.060.000.000,00	DPUPR
3	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	20.319.578.775	DINAS SOSIAL
4	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	611.000.000	DINPERINAKER
5	Program Penempatan Tenaga Kerja	400.250.000	DINPERINAKER
6	Program Hubungan Industrial	120,000,000	DINPERINAKER
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	160.000.000	DINPERMADES
8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.689.821.400,00	DINHUB
9	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	25,000,000	DINKOPDAG UKM
10	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	50,000,000	DINKOPDAG UKM
11	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.874.278.750	DINKOPDAG UKM

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PD PENANGGUNGJAWAB
12	Program Pengembangan UMKM	50,000,000	DINKOPDAG UKM
13	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100,000,000	DPMPTSP
14	Program Promosi Penanaman Modal	700,000,000	DPMPTSP
15	Program Pelayanan Penanaman Modal	212,000,000	DPMPTSP
16	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	55,000,000	DPMPTSP
17	Program Pengembangan Kebudayaan	7.375.500.000	DINBUDPAR
18	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	45.000.000,00	DINBUDPAR
19	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	250,000,000	DKPPP
20	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	50.000.000	DKPPP
21	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	260.000.000,00	DKPPP
22	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.000,000	DINBUDPAR
23	Program Pemasaran Pariwisata	325.250.000	DINBUDPAR
24	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	20.000.000	DINBUDPAR
25	Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	30.000.000	DINBUDPAR
26	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	20.147.681.407	DKPPP
27	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.625.000.000	DKPPP
28	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	150,000,000	DKPPP
29	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	50,000,000	DKPPP
30	Program Penyuluhan Pertanian	3.517.520.000	DKPPP
31	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.936.000.000	DINKOPDAGUKM
32	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	80,000,000	DINKOPDAGUKM
33	Program Pengembangan Ekspor	200,000,000	DINKOPDAGUKM
34	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	35,000,000	DINKOPDAGUKM
	Total	**53.087.752.807**	

Tabel 5.12
Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung : Penguatan Reformasi

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	PD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas yang terlatih	0,2	%	1.560.006.393	SATPOL PP DAN DAMKAR	
		Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%			
		Persentase penegakan Perda/Perbup	100	%			
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap *(Respon Time Rate)* dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	%	863.177.750	SATPOL PP DAN DAMKAR	
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100				
		Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	100	%			
		Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	61,05				
		Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi	6,15				
		Cakupan penanganan bencana non kebakaran Kabupaten	100	%			
3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00	%	1.054.828.000	BPBD	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	%			
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	%			
		Persentase koordinasi penanganan pasca bencana	100,00	%			
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100,00	%			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	PD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00	%			
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	%			
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	%			
		Persentase koordinasi penanganan pasca bencana	100,00	%			
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100,00	%			
4	Program Pendafataran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	97,20%	%	500,000,000	DINDUKCAPIL	
5	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99,98%	%	6,000,000	DINDUKCAPIL	
6	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi	71,00		97.261.225	DINDUKCAPIL	
		Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	32,00	%			
7		Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	15,00	%			
8	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	85,75	%	505,000,000	DINKOMINFO	
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100,00	%			
		Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	100	%			
		Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik	17,50	%			
9	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik secara elektronik	75,00	%	1.780.719.000	DINKOMINFO	
		Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	37,68				
		Persentase rumah tangga dengan akses internet	91,50	%			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	PD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
10	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	92	%	212,000,000	DPMPTSP	
11	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	92	%	99,000,000		
12	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	50	%	30,000,000	DINKOMINFO	
		Ketersediaan data statistik sektoral	100	%			
13	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	91	%	334.999.600	DINKOMINFO	
14	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dialihmediakan	65	%	9,000,000	DINPUSIP	
		Persentase pembinaan kearsipan	75,55	%			
15	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	60	%	912.000.000	Bagian Kesra dan Bina Mental	
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	89	%			
		Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik	100	%			
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	100	%			
		Persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%			
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%			
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%			
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%			
16	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah		%	68.303.400	Bagian Pembangunan	
		Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi	100	%			
		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%			
		Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	100	%			
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan banrg/jasa	95	%			
17	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Presentase Pendampingan proses PBJ	100	%	47.390.100		
		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100				

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	PD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33				
18	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	158.687.500		
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%			
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	100	%			
		Persentase AKIP Perangkat daerah berpredikat BB	34,78	%			
		Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	100	%			
19	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	100	%	16.860.356.663	SEKRETARIAT DPRD	
		Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	100	%			
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	%			
		Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	100	%			
		Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan oleh DPRD		%			
		Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran		%			
20	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencaaan Pembangunan Daerah	90	%	350.000.000	BAPPEDA	
		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	55	%			
		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	75	%			
21	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* dalam APBD	75	%	408.945.974.500	BPKPAD	
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%			
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%			
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100	%			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	PD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%			
22	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100	%	423.000.000	BPKPAD	
		Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	98,25	%			
23	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100	%	522.219.244	BPKPAD	
		Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	98.25	%			
		Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	4,57	%			
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	98,29	%			
24	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu	100,00	%	586.977.500	BKPSDM	
		Persentase keterisian jabatan	91	%			
		Persentase Kebutuhan ASN	100,00	%		BKPSDM	
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	99,18	%		BKPSDM	
		Persentase kedisiplinan ASN	99,43	%		BKPSDM	
25	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Persentase pengembangan potensi ASN	24,73	%	514.375.000	BKPSDM	
26	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	60	%	53.000.000	BAPPEDA	
27	Program Riset dan Inovasi	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	50,0	%	207.000.000		
		Persentase inovasi yang dimanfaatkan	60,0	%			
28	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III,IV, Khusus)	100%	%	5.050.000.000	INSPEKTORAT	
		Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	%		INSPEKTORAT	
		Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	100%	%		INSPEKTORAT	
29	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Presentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan			3.750.000.000		
			100%	%		INSPEKTORAT	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	PD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100%	%		INSPEKTORAT	
		Terwujudnya respon terhadap aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100%	%		INSPEKTORAT	
		Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	100%	%		INSPEKTORAT	
30	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	%	535,000,000	BANKESBANGPOL	
31	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	100%	%	1.827.819.500	BANKESBANGPOL	
32	Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentasae ormas yang mendapat pembinaan	20%	%	40,000,000	BANKESBANGPOL	
33	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Jumlah kejadian konflik SARA	8	Angka	200,000,000	BANKESBANGPOL	
		Indeks Harmoni		Angka		BANKESBANGPOL	
34	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik keamanan daerah	100%	%	536.213.000	BANKESBANGPOL	
	JUMLAH				**39.731.687.766**		

Tabel 5.13

Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung : Pertumbuhan Ekonomi

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	PD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	59,26	Angka	3.063.000.000	DPUPR	
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	89,85	%	20.060.000.000		
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	94,37	%			
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	22,62	%			
3	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100,00	%	20.319.578.775	DINAS SOSIAL	
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	86,00	%			
4	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0,50	%	611.000.000	DINPERINAKER	
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	0,82	%			
5	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	37,00	%	400.250.000		
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	32,00	%			
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	37,00	%			
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	94,00	%			
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	68,83				
6	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	42,52	%	120.000.000		
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	75,00	%			
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	47,00	%			
		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	100,00	%			
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD	8,33	%	160.000.000	DINPERMADES	
		Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	40,60	%			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	PD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	42,03	%	10.689.821.400	DINHUB	
		Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	67,14	%			
		Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	99,66				
		Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	36,63	%			
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	65,11	%			
		Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	100,00	%			
		Persentase Layanan Perhubungan	100,00	%			
		Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	89,39	%			
		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	86,67	%			
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100,00	%			
9	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	12,25	%	25,000,000	DINKOPDAG UKM	
11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	4,54	%	50,000,000		
12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	0,25	%	1.874.278.750		
14	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	92,00	%	100.000,000	DPMPTSP	
15	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	92,00	%	700,000,000		
16	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	92,00	%	212,000,000		
17	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	92,00	%	99,000,000		
18	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	1,00	Obyek	7.375.500.000	DINBUDPAR	
		Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	10,00	Kelompok			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	PD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
		Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	10,00	Orang			
19	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan	3,00	Obyek	250.000.000		
20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya	10672,01	Ton	250.000.000	DKPPP	
21	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	140,20	Ton	50.000.000		
22	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan ikan	395,75	Ton	260.000.000		
23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	17,00	DTW	100.000.000	DINBUDPAR	
		Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	598,00	orang			
24	Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100,00	%	325.250.000		
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	707,00	orang			
		Jumlah pengunjung tempat bersejarah	27025,00	orang			
25	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	130,00	orang	20.000.000		
26	Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata	130,00	orang	30.000.000		
27	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	6,16	ton/ha	20.147.681.407	DKPPP	
		Produktivitas jagung	5,55	ton/ha			
		Produktivitas bawang putih	6,15	ton/ha			
		Produktivitas bawang merah	7,10	ton/ha			
		Produktivitas cabai rawit	7,01	ton/ha			
		Produktivitas cabai keriting	7,01	ton/ha			
		Produktivitas tembakau	0,643	ton/ha			
		Produktivitas kopi robusta	0,7025	ton/ha			
		Produktivitas kopi arabika	0,410	ton/ha			
		Jumlah produksi daging ternak besar	807.654	kg			
		jumlah produksi daging ternak kecil	268.110	kg			
		jumlah produksi ternak unggas	6.243.337	kg			
		jumlah produksi telur	6.867.845	kg			
		Persentase kelahiran pedet	48,00	%			
		Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	37,13	%			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	PD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
28	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan	100,00	%	5.625.000.000		
29	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	86,00	%	647.300.000		
		Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	76,00	%			
30	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	78,00	%	50,000,000		
31	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	58,00	%	1,000,000,000		
		Persentase Peningkatan kelas kelp tani	1,30				
32	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67,00	%	1.936.000.000	DINKOPDAGUKM	
		Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2,00	%			
		Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	1,71	%			
33	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	90,00	%	80,000,000		
34	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	126276147,00	US$	200,000,000		
36	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	95,00	%	35,000,000		
		JUMLAH			**52.327.752.807**		

5.1.2 Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep tematik,holistik, integratif dan spasial dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Konsep Tematik

Penerapan konsep tematik telah diterapkan dalam pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari adanya prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan sesuai dengan arah kebijakan daerah.

Konsep tematik juga diwujudkan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung, pada tahun 2026 adalah : tema pembangunan

Konsep Holistik

Tingkat penerapan konsep holistik terkait perencanaan yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep holistik yaitu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, antara lain gerakan penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, gerakan penanganan kemiskinan, dan gerakan penanganan stunting.

Konsep Integratif

Penerapan konsep integratif juga dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kebijakan pembangunan daerah yang melibatkan semua perangkat daerah, antara lain kegiatan penanganan kemiskinan melalui 1 perangkat daerah 1 desa dampingan, penanganan stunting yang melibatkan semua perangkat daerah, kegiatan SDGs yang didukung banyak program dan anggaran di semua perangkat daerah.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung berkolaborasi dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, pelaksanaan kabupaten sehat, TMMD dan masih banyak lainnya. Penerapan konsep integratif terkait pelibatan *stakeholders* di luar OPD di daerah Kabupaten Temanggung diantaranya aktor non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, lembaga amil zakat, BAZNAS, komunitas tertentu, kelompok masyarakat, media massa, TJLSP dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat pula pemanfaatan media informasi kreatif dalam proses perencanaan dengan melibatkan media sosial/media massa.

Konsep Spasial

Penerapan konsep Spasial juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan dan infrastruktur yang dilaksanakan di semua kecamatan dengan salah satu tujuannya tidak ada kesenjangan antar wilayah, dan hasilnya pemetaan juga dapat dilihat dalam bentuk peta/spasial.

Tabel 5.14
Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2026 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2026: PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI				
1	Penguatan Reformasi Birokrasi	1. Program Kepegawaian Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM
			Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM
			Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM
			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM
			Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM
			Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM
		2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM
		3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Bappeda
		4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat
			Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat
			Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat
			Pengawasan Desa	Inspektorat
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
		5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat
		6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		7. Program Koordinasi dan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
		Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
		8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPAD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPAD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPAD
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPAD
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPAD
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPAD
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPAD
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPAD
		9. Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Dinkominfo
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinkominfo
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Dinkominfo
		10.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diseminasi Informasi	Dinkominfo
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinkominfo

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
		11.Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinkominfo
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		12.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Dinkominfo
		13.Program Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dindukcapil
		14.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindukcapil
		15.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikkan Melalui Pendidikkan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol
		16.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP
		17.Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP
		18.Program Pelayanan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPM
		19.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPM
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPM
			Pengawasan Penanaman Modal	DPM
		20.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Prokompim
			Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Prokompim
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bagian Prokompim
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Prokompim
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian PBJ
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian PBJ
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian PBJ

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
		21.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesra
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesra
		22.Program Pengelolaan Arsip	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dinpusip
		23.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Sekretariat DPRD
			Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD
			Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD
			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRD
			Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD
		24.Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP Damkar
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satpol PP Damkar
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP Damkar

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP Damkar
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satpol PP Damkar
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP Damkar
		25.Program Pencegahan Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP Damkar
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP Damkar
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP Damkar
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP Damkar
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Satpol PP Damkar
		26.Program Penanggulangan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	BPBD
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	BPBD
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	BPBD
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	BPBD
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	BPBD
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
		27.Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian
2	Pertumbuhan Ekonomi	1. Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos
		2. Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	Dinsos
			Penyediaan Sandang	Dinsos
			Penyediaan Alat Bantu	Dinsos
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinsos
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinsos
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinsos
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinsos

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinsos
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinsos
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinsos
			Pemberian Layanan Rujukan	Dinsos
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos
			Penyediaan Permakanan	Dinsos
		3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dinsos
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	Dinsos
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinsos
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinsos
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos
		4. Program Penanganan Bencana	Penyediaan Makanan	Dinsos
			Penyediaan Sandang	Dinsos
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dinsos
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Dinsos
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dinsos
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinsos
		5. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinperinaker
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinperinaker
		6. Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja	Dinperinaker
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinperinaker
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Dinperinaker
			Perluasan Kesempatan Kerja	Dinperinaker
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinperinaker
		7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
		8. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinkopdag
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dinkopdag
		9.Program pemberdayaan usaha menengahh, usaha kecil dan usaha mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinkopdag
			Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Dinkopdag
		10.Program Pengembangan Ekspor	Pameran Dagang Nasional	Dinkopdag
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Dinkopdag
		11.Program Standardisasi dan Perlindungan konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinkopdag
		12.Program Perencanaan dan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinperinaker

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
		Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinperinaker
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinperinaker
		13.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda
		14.Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
		15.Program Pemasaran Pariwisata	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
		16.Program Pengendalian Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DPPPAPPKB
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DPPPAPPKB
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPPAPPKB
		17.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	DPPPAPPKB
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DPPPAPPKB
			Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DPPPAPPKB
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPPPAPPKB
			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DPPPAPPKB

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DPPPAPPKB
			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DPPPAPPKB
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPPAPPKB
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPPAPPKB
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DPPPAPPKB
			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	DPPPAPPKB
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
		19.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	DPPPAPPKB
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DPPPAPPKB
			Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	DPPPAPPKB
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	DPPPAPPKB
			Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	DPPPAPPKB
		20.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	DPUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	DPUPR
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPUPR
			Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	DPUPR
		21.Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPRKPLH
		22.Program Penanggulangan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	BPBD
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	BPBD
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	BPBD
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	BPBD
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	BPBD
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	BPBD
		23.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	DinasKesehatan
		24.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	DKPPP
		25.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DKPPP
		26.Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	DKPPP
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	DKPPP
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DKPPP
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	DKPPP
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	DKPPP
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	DKPPP
		27.Program Perekonomian dan Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian
		28.Program Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dinpermades
		29.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP
		32.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
		34.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
		35.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DKPPP
		36.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DKPPP
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DKPPP
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	DKPPP
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	DKPPP
		37.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	DKPPP
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	DKPPP
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DKPPP
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	DKPPP
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	DKPPP
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	DKPPP
		38.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	DKPPP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
		39.Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DKPPP
			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	DKPPP
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	DKPPP
		40.Program Penanggulangan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	BPBD
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	BPBD
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	BPBD
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	BPBD
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	BPBD
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	BPBD

Sumber : Bappeda, data diolah, 2025.

5.1.2. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah

1. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 5.15
Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung SPM Tahun 2026

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pengelolaan Pendidikan	120.654.381.040	DINDIKPORA
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.928.636.400	DINKES
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.183.781.000	DINKES
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	275.000.000	DPUPR
5	Program Kawasan Permukiman	3.394.000.000	DPRKPLH
6	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.560.006.393	SATPOL PP dan DAMKAR
7	Program Penanggulangan Bencana	1.054.828.000	BPBD
8	Program Pemberdayaan Sosial	310.000.000	DINSOS

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
9	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	12.000.000	DINSOS
10	Program Rehabilitasi Sosial	690.871.300	DINSOS
11	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.328.000.000	DINSOS
12	Program Penanganan Bencana	174.000.000	DINSOS

Sumber : Bappeda, data diolah, 2025.

2. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2026

Tabel 5.16
Sasaran dan Prirotas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2026

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	PD PENGAMPU	KECAMATAN
1	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Mungseng – Tlogomulyo	377,000,000	DPUPR	TLOGOMULYO
2	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Muntung – Jumprit	634,000,000	DPUPR	CANDIROTO
3	Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Jalan Ruas Rowoseneng-Tlogopucang	882,000,000	DPUPR	KANDANGAN
4	Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Ruas Jalan Gatak – Ngaditirto	336,000,000	DPUPR	SELOPAMPANG
5	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Senderan/Talud Jalan Mudal – Legoksari	538,000,000	DPUPR	TEMBARAK
6	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan Aspal Dusun Kebonsari-Pugeran (Rekonstruksi Jalan Ngabeyan-Kebonsari)	516,000,000	DPUPR	WONOBOYO
7	Program Penataan Bangunan	Pembangunan Pavingisasi Trotoar Jalan	433,000,000	DPUPR	KLEDUNG
8	Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Peningkatan Jalan Ruas Lempuyang - Tretep	366,000,000	DPUPR	TRETEP
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase Tertutup Jl. Ky. Subechi	688,000,000	DPUPR	PARAKAN
10	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jalan Ruas Wanutengah – Bulu	723,000,000	DPUPR	BULU
11	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Bejen - Prangkokan	561,000,000	DPUPR	BEJEN
12	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan/Rehab ilitasi/Peningkatan Ruas Jalan Dlimoyo - Kentengsari	868,000,000	DPUPR	NGADIREJO
13	Penyelenggaraan	Peningkatan Senderan Jalan	559,000,000	DPUPR	GEMAWANG

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	Jalan	dan Pelebaran Jalan (Ruas Jalan Kebraman-Gemawang)			
14	Program Kawasan Permukiman	Pembangunan RTLH	611,000,000	DPRKPLH	KRANGGAN
15	Program Kawasan Permukiman	RTLH	685,000,000	DPRKPLH	KALORAN
16	Program Kawasan Permukiman	Pembangunan Rehabilitasi RTLH	748,000,000	DPRKPLH	KEDU
17	Program Penyelengga Raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan Lampu Peringatan Jalan Kabupaten	349,000,000	Dinas Perhubungan	BANSARI
18	Program Penyelengga Raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan Lampu Jalan Di Ruas Jalan Kabupaten (Jalan Kedu Tegong)	477,000,000	Dinas Perhubungan	JUMO
19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rehab gedung UMKM dan Sarana prasarana digital	737,000,000	Dinkopdag	PRINGSURAT
20	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembangunan kios UMKM kelurahan jurang	926,000,000	Dinkopdag	TEMANGGUNG
	TOTAL		**12,014,000,00**		

Sumber : Bappeda, data diolah, 2025.

3. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan

Komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.17
Program Daerah yang Mendukung Penanganan Kemiskinan

Program	Indikator Program	Satuan	Target 2026	Anggaran
Program Pengelolaan Pendidikan				**120,654,381,040**
	APK SD Sederajat	%	99,71	
	APK SMP Sederajat	%	100	
	APM PAUD (5-6)	%	85,95	
	APM SD Sederajat	%	93,11	
	APM SMP Sederajat	%	86,65	
	Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	%	28,57	
	Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	%	72	
	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	70	

Program	Indikator Program	Satuan	Target 2026	Anggaran
	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	62,23	
	Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	%	30	
	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	angka	266	
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	angka	777	
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	angka	620	
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	angka	2379	
	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	angka	220	
	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	angka	255	
	Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	%	100	
	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	%	45	
	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	%	60,17	
	Rasio Guru/Siswa PAUD	angka	1:15	
	Rasio Guru/Siswa SD	angka	1:28	
	Rasio Guru/Siswa SMP	angka	1:32	
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	
	Iklim Iklusivitas SD	Angka	63,69	
	Iklim Iklusivitas SMP	Angka	65,04	
	Iklim Keamanan SD	Angka	76,95	
	Iklim Keamanan SMP	Angka	75,02	
	Iklim Kebhinekaan SD	Angka	75,97	
	Iklim Kebhinekaan SMP	Angka	75,05	
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	86,15	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				**57.928.636.400**
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	
	Angka kematian bayi	Per 1.000 KH	11,84	

Program	Indikator Program	Satuan	Target 2026	Anggaran
	Angka kematian neonatal	Per 1.000 KH	8,42	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	%	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar	%	100	
	Prevalensi wasting balita	%	8	
	Insiden Stunting balita (kasus baru)	%	14,9	
	Persentase anemia pada ibu hamil	%	11,4	
	Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	%	19	
	Persentase tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja	%	10	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	
	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	
	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	
	Prevalensi obesitas	angka	23	
	Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	%	100	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	100	
	Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	%	100	
	Persentase penduduk yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup	%	25	

Program	Indikator Program	Satuan	Target 2026	Anggaran
	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	75	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	%	100	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	50	
	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	%	30	
	Proporsi fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna	%	30	
	Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	%	73	
	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	%	20	
	Cakupan desa/kelurahan STBM	%	25	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	%	85	
	Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit	%	100	
	Persentase capaian pengembangan rumah sakit			
	Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				**1,183,781,000**
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi			
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				**338,360,000**
	Persentase posyandu aktif bidang kesehatan	%	98	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				**245,937,000**
	Persentase pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	30	
	Persentase Puskesmas dengan jumlah KLB Keracunan Pangan < 5 kejadian	%	100	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLUD)				**175,000,000,000**

Program	Indikator Program	Satuan	Target 2026	Anggaran
	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Saki	nilai	Paripurna Nilai 92	
	Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD	nilai	Peringkat AA Nilai 94	
	Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target	%	80	
	Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target	%	80	
	Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target	%	82	
	Persentase kecukupan SDMK sesuai standar	%	75	
	Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar	%	80	
	Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan	%	75	
	Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	70	
	Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target	%	80	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

4. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2022 Kabupaten Temanggung menjadi kabupaten percontohan penanganan perkawinan anak usia dini dan pencegahan stunting oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah 1) Rapat Koordinasi; 2) Sosialisasi dan 3) *Forum Group Discussion* (FGD) Selain itu juga dilakukan penelitian secara khusus oleh Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc dan tim di Desa Wadas Kecamatan Kandangan sebagai desa dengan kasus stunting

tertinggi dan Desa Tanurejo Kecamatan Bansari sebagai desa dengan kasus stunting rendah. Universitas Diponegoro Semarang juga melakukan penelitian tentang indeks resiko stunting dan determinan penurunan kejadian stunting tahun 2018- 2021 di Kabupaten Temanggung. Guna menunjang kegiatan sebagaimana di maksud, maka dukungan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.18
Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2026

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	57.928.636.400	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.264.081.650	DPPPAPPKB
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000	DPUPR
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	7.494.989.000	DPPPAPPKB
6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320000000	DPPPAPPKB
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000	DPPPAPPKB
		JUMLAH	**70.362.707.050**	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

5. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen dalam mendukun keberhasilan program pembangunan berkelanjutan/SDGS, pengarusutamaan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender dan didukung oleh sebagian besar perangkat daerah berserta lembaga non pemerintah. Program daerah yang mendukung pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender sebagaimana tercantun dalam tabel berikut:

Tabel 5.19
Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
I	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	tujuan 1	V	V
		tujuan 2		
		tujuan 4		
II	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	tujuan 1	V	V
		tujuan 2		
		tujuan 3		
		tujuan 6		
		tujuan 13		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	tujuan 3	V	V
3	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	tujuan 3	V	V
III	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	tujuan 6	V	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	tujuan 1		V
		tujuan 6		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan	tujuan 1	V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
	Sistem Air Limbah			
4	Program Pengembangan Permukiman	tujuan 1	V	V
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Tujuan 9	V	
6	Program Penyelenggaraan Jalan	tujuan 9	V	
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tujuan 9	V	
		Tujuan 11		
		Tujuan 13		
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tujuan 9	V	
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tujuan 9	V	
IV	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**			
1	Program Pengembangan Perumahan	tujuan 1		V
		tujuan 6		
2	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	tujuan 1		V
		tujuan 6		
		tujuan 11		
V	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**			
1	Program Penanggulangan Bencana	tujuan 1	V	
		tujuan 11		
		tujuan 13		
2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			V
3	Program Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum			V
VI	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**			
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	tujuan 1	V	V
		tujuan 2		
		tujuan 3		
2	Program Rehabilitasi Sosial	tujuan 3	V	
3	Program Pemberdayaan Sosial			V
VII	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**			
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	tujuan 1	V	V
		tujuan 8		
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	tujuan 8	V	V
3	Program Hubungan Industrial	tujuan 8	V	
		tujuan 10		
VIII	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**			
1	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	tujuan 5	V	V
		tujuan 16		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
2	Program Perlindungan Perempuan	tujuan 16	V	V
		tujuan 5		
		tujuan 10		
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	tujuan 3		V
4	Program Pemenuhan Hak Anak	tujuan 16	V	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	tujuan 10	V	
IX	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	tujuan 2	V	
		tujuan 13		
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	tujuan 2	V	
		tujuan 8		
		tujuan 13		
X	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**			
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	tujuan 6	V	
		tujuan 9		
		tujuan 12		
		tujuan 13		
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	tujuan 13	V	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	tujuan 6	V	
		tujuan 11		
		tujuan 13		
		tujuan 15		
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	tujuan 6	V	
		tujuan 12		
		tujuan 13		
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tujuan 6	V	
6	Program Pengelolaan Persampahan	tujuan 1	V	V
		tujuan 12		
		tujuan 11		
		tujuan 13		
XI	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**			
1	Program Pencatatan Sipil	tujuan 1	V	V
		tujuan 16		
		tujuan 17		
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	tujuan 16	V	V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
3	Program Pendaftaran Penduduk	tujuan 16	V	V
XII	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**			
1	Program Penataan Desa	tujuan 10	V	
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	tujuan 10	V	
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	tujuan 10	V	
4	Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa			V
5	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat			V
XIII	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**			
1	Program Pengendalian Penduduk	tujuan 1		V
		tujuan 3		
		tujuan 5		
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	tujuan 1		V
		tujuan 3		
		tujuan 5		
3	Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	tujuan 3	V	V
XIV	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**			
1	Program Pengembangn Iklim Penanaman Modal	tujuan 8	V	
		tujuan 9		
2	Program Pengembangan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	tujuan 8	V	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal			V
XV	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Publik**			
1	Program nformasi dan Komunikasi Publik	tujuan 16	V	V
2	Program Aplikasi Informatika	tujuan 4	V	V
		Tujuan 9		
XVI	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tujuan 3	V	
		Tujuan 11		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
XVII	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi**			
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Tujuan 8		V
XVIII	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**			
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	tujuan 1	V	
		tujuan 4		
		tujuan 8		
XIX	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**			
1	Program Pengembangan Kebudayaan	tujuan 8	V	
2	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Tujuan 11	V	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		V	
4	Program Pembinaan Perpustakaan			V
XX	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**			
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	tujuan 2	V	
		tujuan 8		
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tujuan 8	V	
XXI	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**			
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	tujuan 8	V	
2	Program Pemasaran Pariwisata	tujuan 8	V	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	tujuan 8	V	
XXII	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**			
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	tujuan 2	V	
		tujuan 13		
2	Program Penyedian dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tujuan 13	V	
3	Program Pengendalian bencana Pertanian	Tujuan 13	V	
4	Program Penyuluhan Pertanian	Tujuan 13	V	
XXIII	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**			
1	Program Pengembangan Ekspor	tujuan 17	V	
2	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Tujuan 12	V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			V
XXIV	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**			
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	tujuan 8		V
XXV	**Sekretariat Daerah**			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tujuan 1	V	
		tujuan 4		
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tujuan 12	V	V
		tujuan 16		
		tujuan 17		
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	tujuan 16	V	V
		tujuan 8		
4	Program Administrasi Umum	tujuan 16	V	
XXVI	**Perencanaan**			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tujuan 11	V	V
2	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tujuan 1	V	V
		tujuan 11		
		tujuan 17		
3	Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam			V
XXVII	**Keuangan**			
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	tujuan 16	V	
		tujuan 17		
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tujuan 16	V	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tujuan 16	V	
		Tujuan 17		
XXVIII	**Kepegawaian**			
1	Program Kepegawaian Daerah		V	
XXIX	**Pendidikan Dan Pelatihan**			
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	tujuan 5	V	V
		tujuan 16		
XXX	**Penelitian Dan Pengembangan**			
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	tujuan 1	V	
		tujuan 9		
XXXI	**Inspektorat Daerah**			
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan		V	V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		V	
XXXII	**Kecamatan**			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		V	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		V	
XXXIII	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	tujuan 5		V
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	Tujuan 3	V	

Berdasarkan pemetaan Indikator SDG's dalam dokumen perencanaan daerah terdapat indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program, dan indikator yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Beberapa indikator SDG's yang bukan merupakan kewenangan daerah otomatis tidak ada dukungannya di Renja maupun RKPD. Hasil pemetaan indikator SDG's sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.20
Pemetaan Indikator SDG's dalam Dokumen Perencanaan Daerah

No	Spesifikasi Indikator	Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola	Jumlah Indikator
1	Indikator Kinerja Tujuan	2	1	0	0	3
2	Indikator Kinerja Sasaran	0	4	0	3	7
3	Indikator Kinerja Program	24	7	16	10	57
4	Indikator Pada Renstra PD	34	3	0	2	39
5	Indikator Bukan Kewenangan	7	3	0	1	11
Jumlah		67	18	16	16	117

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

6. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarustamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di KabupatenTemanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsive gender pada semua program dan kegiatan sescara bertahap sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ada menggunakan Teknik analisis gender berupa GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*). Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.

Tabel 5.21
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarustamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	320.000.000,00	DPPAPPPKB
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	30.000.000,00	DPPAPPPKB
3	Program Perlindungan Perempuan	10.000.000,00	DPPAPPPKB
4	Program Pengendalian Penduduk	493.800.000,00	DPPAPPPKB
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.494.989.000,00	DPPAPPPKB
6	Program Pendaftaran Penduduk	500.000.000,00	DINDUKCAPIL
7	Program Pencatatan Sipil	6.000.000,00	DINDUKCAPIL
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.936.000.000,00	DINKOPDAG
9	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	35.000.000,00	DINKOPDAG
10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.874.278.750,00	DINKOPDAG
11	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	611.000.000,00	DINPERINAKER
12	Program PemerintahAN dan Kesejahteraan Rakyat	912.000.000,00	SETDA
13	Program Perekonomian dan Pembangunan	68.303.400,00	SETDA
14	Program Pembinaan Perpustakaan	1.276.042.213,00	DINPUSIP
15	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	514.375.000,00	BKPSDM
16	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.050.000.000,00	INSPEKTORAT
17	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	350.000.000,00	BAPPEDA
18	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	350.000.000,00	BAPPEDA
19	Program Pelayanan Penanaman Modal	212.000.000,00	DPMPTSP
20	Program Pemberdayaan Sosial	310.000.000,00	DINSOS
21	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	505.000.000,00	DINKOMINFO
22	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	505.000.000,00	SATPOL PP DAMKAR
23	Program Pengelolaan Pendidikan	120.654.381.040,00	DINDIKPORA
24	Program Pemenuhan Upaya		DINKES, RSUD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	264.131.312.400,00	
25	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	275.000.000,00	DPUPR
26	Program Kawasan Permukiman	3.394.000.000,00	DPUPR
27	Program Pengembangan Perumahan	829.999.550,00	DPRKPLH
	TOTAL	412.648.481.353,00	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

7. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.22
Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	264.131.312.400,00	DINKES
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	20.147.681.407,00	DKPPP
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.625.000.000,00	DKPPP
4	Program Penyuluhan Pertanian	3.517.520.000,00	DKPPP
5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	45.000.000,00	DPRKPLH
6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	220.000.000,00	DPRKPLH
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	7.330.000.000,00	DPRKPLH
8	Program Pengelolaan Persampahan	6.828.000.000,00	DPRKPLH
Jumlah Total		**307.844.513.807,00**	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

8. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Priwisata Super Prioritas Brobudur

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur. Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat mendukung kegiatan tersebut dan mengalokasikan program kegiatan terhadap pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di kawasan pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5.23
Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur Tahun 2026

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	136,278,750	Dinkopdag
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	321,000,000	Dinbudpar
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1,480,119,000	Dinkominfo
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200,000,000	DPUPR
5	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2,800,000,000	DKPPP
6	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	1,798,000,000	DPRKPLH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
			TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		
7	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan rehabilitasi	90,000,000	DPRKPLH
8	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70,000,000	Bappeda
JUMLAH				**6,895,397,750**	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Pengembangan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas selain mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, juga membutuhkan dukungan dari daerah sekitarnya, salah satunya adalah Kabupaten Temanggung. Potensi yang mendukung pengembangan Borobudur yang berada di Kabupaten Temanggung salah satunya adalah event yang dilaksanakan secara rutin di Kawasan Borobudur yaitu pengambilan air suci, persemayaman air suci di Candi Mendut dan perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Sejumlah Biksu yang berasal dari 11 majelis agama Buddha di Indonesia, mengikuti ritual pengambilan air suci (berkah) untuk perayaan Hari Raya Waisak di Mata Air Jumprit Temanggung persisnya di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Air berkah tersebut akan disemayamkan di Candi Mendut dan akan digunakan dalam perayaan detik-detik Waisak di Candi Borobudur. Air di Umbul Jumprit memang bukan air biasa. Bagi Umat Budha, air Umbul Jumprit dianggap sebagai air suci pembersih jiwa

manusia. Harapan pengambilan air suci ini untuk seluruh manusia di dunia agar sadar bahwa jiwa ini bagaikan jiwa Sang Buddha. Penuh cinta kasih tanpa memandang aliran dan agama. Salah seorang Wakil Bhikkhu, Dwi Virya, mengatakan dalam agama Buddha air suci mempunyai makna filosofis yang sangat tinggi.

9. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang– Salatiga–Demak–Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang– Temanggung dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang. Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.24
Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

No	Program	Anggaran	Pelaksana
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.063.000.000	DPUPR
2	Program Penyelenggaraan Jalan	20.060.000.000	DPUPR
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	20.147.681.407	DKPPP
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.625.000.000	DKPPP
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.874.278.750	DINKOPDAG
7	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.000.000	DINBUDPAR
8	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	611.000.000	DINPERINAKER
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	400.250.000	DINPERINAKER
10	Program Hubungan Industrial	120.000.000	DINPERINAKER
11	Program Perekonomian Dan Pembangunan	68.303.400	BAG PEMBANGUNAN, BAG PBJ, BAG PEREKONOMIAN
	TOTAL	**21.027.606.100**	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

10. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Pada Tahun 2026

Program pembangunan infrastruktur pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 difokuskan untuk mendukung terwujudnya program prioritas bupati yaitu "Penataan Garis Imajiner". Garis Imajiner perkotaan diharapkan akan memberikan kemudahan akses dan meningkatkan konektivitas bagi masyarakat.

Tabel 5.25
Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Pembangunan Infrastruktur Tahun 2026

No	Program	Anggaran	Pelaksana
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	264.131.312.400	DINKES
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.063.000.000	DPUPR
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	275.000.000	DPUPR
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.088.000.000	DPUPR
5	Program Penataan Bangunan Gedung	2.245.000.000	DPUPR
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	4.733.000.000	DPUPR
7	Program Penyelenggaraan Jalan	20.060.000.000	DPUPR
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	950.000.000	DPUPR
9	Program Pengembangan Perumahan	829.999.550	DPRKPLH
10	Program Kawasan Permukiman	3.394.000.000	DPRKPLH
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.050.198.000	DPRKPLH
12	Program Pengelolaan Persampahan	6.828.000.000	DPRKPLH
13	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.689.821.400	DINHUB
14	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.780.719.000	DINKOMINFO
15	Program Pengelolaan Pendidikan	120.654.381.040	DINDIKPORA
16	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.625.000.000	DKPPP
	TOTAL	**455.397.431.390**	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

11. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Pintu Tol Bawen - Yogyakarta

Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah memiliki agenda pembangunan jalan tol ruas Bawen-Yogyakarta denganpintu tol di Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Peluang tersebut ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui kegiatan penataan ruang yaitu peninjauan kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2011-2031 agar keberadaan pintu tol ini memungkinkan tumbuhnya ekonomi baru serta mendukung pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Harapannya Kabupaten Temanggung tidak sebatas dilewati tetapi bisa menjadi daerah tujuan.

5.1.3. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Terhadap Satu Data Indonesia

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.26
Program Daerah yang Mendukung Satu Data Indonesia

No	Program	Anggaran	Pelaksana
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	505.000.000	Dinkominfo
2	Program pengelolaan aplikasi informatika	1.780.719.000	Dinkominfo
3	Program penyelenggaraan statistik Sektoral	30.000.000	Dinkominfo
4	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	350.000.000	Bappeda
Jumlah total		**2.665.719.000**	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

5.2 PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2026 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan

pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung disusun dalam rangka memenuhi sasaran dan arah kebijakan RPD Kabupaten Temanggung tahun 2025- 2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2026 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetetif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu juga berdasarkan permasalahan dan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah.

5.2.1 Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. **Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan**
   a. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**
      1) **Bidang Pendidikan**
         - Program Pengelolaan Pendidikan

         Program ini diprioritaskan pada beberapa capaian Bidang Pendidikan yang belum sesuai target yang ditetapkan oleh Pusat dan hasil Rakortek Provinsi mengenai arahan Kemendikbud untuk pencapaian SPM Pendidikan yang tertuang dalam Rapor Pendidikan sebagaimana Surat Kemdikbudristekdikti Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/ 2024

Tanggal 16 Februari 2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota yaitu melalui kegiatan peningkatan angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, angka partisipasi sekolah 7-15 tahun dan angka partisipasi sekolah 7-18 tahun, peningkatan satuan PAUD terakreditasi minimal B, peningkatan kemampuan numerasi dan literasi SD dan SMP. Terkait implementasi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan karakter juga menjadi perhatian semua pihak baik perangkat daerah terkait, sekolah, Lembaga terkait Pendidikan dan masyarakat.

Identifikasi pemetaan dan kebutuhan guru juga secara berkala dilakukan dan dikoordinasikan dengan BKPSDM terkait formasi dan pengadaannya.

PAUD juga menjadi salah satu prioritas karena menjadi pijakan dasar terkait SDM generasi masa depan, yaitu melalui peningkatan kualitas dalam perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, adanya layanan pendampingan sehingga mampu mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi. Tidak hanya PAUD, berdasarkan data masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah maka juga

diprioritaskan untuk peningkatan kualitas layanan Pendidikan kesetaraan melalui perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, adanya layanan pendampingan sehingga mampu mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi.

Berdasarkan hasil evaluasi, program di bidang Pendidikan juga diarahkan pada kegiatan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, pengurangan angka putus sekolah SD dan SMP sederajat, peningkatan kondisi fasilitas pendidikan ruang kelas, pencapaian target SMP dengan akreditasi minimal, pencapaian target kelulusan peserta pendidikan kesetaraan, peningkatan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, pengurangan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dan peningkatan APK PAUD.

2) **Bidang Kesehatan**

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

  Program ini diarahkan pada kegiatan penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian balita; penurunan angka kematian neonatal,; dan penurunan jumlah rumah tidak sehat.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
  Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
  Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan akreditasi utama fasilitas kesehatan tingkat pertama
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program ini diarahkan pada kegiatan keamanan pangan sebagai langkah untuk peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor serta peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

  Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembangunan bendung dan jaringan irigasi.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai upaya meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman.
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan penambahan jalan kabupaten yang dilengkapi dengan Drainase agar meminimalisir resiko kerusakan jalan.

- Program Penataan Bangunan Gedung

  Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung serta rehabilitasi bangunan gedung.

- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

  Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas trotoar di sejumlah titik di Temanggung.

- Program Penyelenggaraan Jalan

  Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di sejumlah titik di Temanggung.

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

  Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR),penyusunan dokumen pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah serta dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.

4) **Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- Program Pengembangan Perumahan

  Progam ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan rumah susun. Program

ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rumah susun yang bersih, sehat dan layak huni sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

- Program Kawasan Permukiman

  Program ini diarahkan pada kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan akses sanitasi layak

5) **Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program ini diarahkan pada penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan; penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; serta penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

  Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran agar sesuai dengan jangkauan wilayah.
- Program Penanggulangan Bencana

  Program ini diarahkan pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dalam upaya meningkatkan kinerja dalam merespon laporan kejadian bencana pada saat waktu tanggap.

6) **Bidang Sosial**

- Program Pemberdayaan Sosial

  Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan fasilitasi program-program kegiatan PSM.

- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

  Program ini diarahkan pada penjemputan masyarakat yang termasuk warga migrant korban tindak kekerasan dan pemberian stimulan bagi korban.

- Program Rehabilitasi Sosial

  Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sosial pada masyarakat yang membutuhkan

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

  Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan pelayanan pemerlu jaminan dan perlindungan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.

- Program Penanganan Bencana

  Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial bagi masyarakat korban bencana alam dan sosial dan peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait siap siaga jika terjadi bencana.

- Program Pengelolaan Taman Makam

Pahlawan
Program ini diarahkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

b. **Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar**

1) **Bidang Tenaga Kerja**

- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini diarahkan pada kegiatan beberapa pelatihan untuk memperkaya skill bagi tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga mampu bersaing dalam mencari lapangan kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
  Program ini diarahkan pada kegiatan penyuluhan dan bimibingan serta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja guna ikut serta menekan angka TPT.
- Program Hubungan Industrial
  Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan mediasi apabila ada perselisihan hubungan industrial dan pembinaan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2) **Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  Program ini diarahkan pada kegiatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten untuk menggaungkan

potensi perempuan dan mengurangi paham atau budaya patriarki, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan

- Program Perlindungan Perempuan
  Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan dan mediasi bagi perempuan korban kekerasan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan pelayanan, pengaduan dan penjangkauan korban.
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  Program ini diarahkan pada kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga guna meningkatkan ketahanan keluarga.
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  Program ini diarahkan pada penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak serta pemenuhan ha kana sesuai dengan kebutuhannya baik secara fisik maupun psikis.
- Program Perlindungan Khusus Anak
  Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak dengan sosialisasi dan advokasi upaya pencegahan kekeran terhadap anak.

3) **Bidang Pangan**

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
  Program ini diarahkan pada kegiatan

penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan seperti lumbung pangan, lantai jemur dan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya, pemanfaatan teknologi pangan serta diversivikasi pangan

- Program Penanganan Kerawanan Pangan

  Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan informasi terkait kerentanan dan ketahanan pangan, serta dan mencuupi ketersediaan pangan

- Program Pengawasan Keamanan Pangan

  Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kelembagaan keamanan pangan serta peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan.

4) **Bidang Lingkungan Hidup**

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup

  Program ini difokuskan untuk kegiatan penyusunan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan sesuai dengan fungsinya sehingga sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

  Program ini difokuskan pada kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup yang meliputi media tanah, air dan udara kemudian hasilnya akan dituangkan dalam dokumen hasil uji yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan

arah kebijakan terutama dalam penanganan lahan kritis, mitigasi adanya fenomena perubahan iklim, serta menjaga kualitas lingkungan hidup

- Program PengelolaanKeanekaragaman Hayati (KEHATI)

  Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan hutan kota , taman kota, dan terpenuhinya RTH

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi izin penyimpanan sementara limbah B3 sehingga mencegah pencemaran lingkungan

- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

  Program ini difokuskan untuk pengawasan terhadap usaha yang harus memiliki Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi sehingga tidak merusak lingkungan dan mencegah sengketa lingkungan

- Program Peningktan Pendidikan, Pelatihan

  Program ini difokuskan pada kegiatan yang penjagaan kkelestraian lingkungan hidup oleh berbagai staeholders serta fasilitasi sarana prasarana kegiatan adiwiyata (tempat sampah, biopori, tanaman)

- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program ini difokuskan pada kegiatan penilaian terhadap kinerja stakeholders yang berperan dalan pelestarian lingkungan hidup
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program ini difokuskan pada kegiatan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap PPLH
- Program Pengelolaan Persampahan Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kinerja pengelola persampahan, dan pemilahan sampah yang selanjutnya akan diolah.

5) **Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

- Program Pendaftaran Penduduk Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi penerbitan KTP dan KIA di Kabupaten Temanggung.
- Program Pencatatan Sipil Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program ini difokuskan untuk meningkatkan kepemilikan masyarakat terhadap dokumen kependuduan dan catatan

sipil.

6) **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

- Program Penataan Desa
  Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan desa sehingga terwujud desa berpredikat mandiri
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
  Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
  Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan serta peningkatan kapasitas sumber daya pengelola/lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) guna identifikasi potensi desa swasembada dalam rangka pembangunan desa.

7) **Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

- Program Pengendalian Penduduk
  Program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta data-data dan pelayanannya terhadap masyarakat

- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

  Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB serta batasan PUS melalui pemberian advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta publikasi dan promoso program melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang

- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

  Program ini difokuskan pada kegiatan pengadaan BIB KIT pada 20 locus stunting serta Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR.

8) **Bidang Perhubungan**

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

  Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sosialisasi SOP berkendara dan peningkatan sarana prasarana serta pengelolaan terminal tipe C.

9) **Bidang Komunikasi Dan Informatika**

- Program Informasi dan Komunikasi Publik

  Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat, fasilitasi akses internet di area publik yang ada, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku PPID.

- Program Aplikasi Informatika

  Program ini difokuskan pada kegiatan Pembangunan jaringan fiber optik antar kecamatan, pengelolaan pusat data pemerintah daerah, dan pengembangan aplikasi.

10) **Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi

  Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan koperasi terutama koperasi yang tidak sehat.

- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

  Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi melalui pendidikan dan latihan koperasi.

- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pembiayaan serta pemasaran usaha koperasi.

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

  Program ini difokuskan pada kegiatan pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan kelas UMKM melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, pemasaran dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro.

- Program Pengembangan UMKM

  Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pengembangan UMKM sehingga terwujud peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

11) **Bidang Penanaman Modal**

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

  Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal.

- Program Promosi Penanaman Modal

  Program ini difokuskan pada kegiatan menginformasikan tentang potensi dan peluang investasi penanaman modal yang ada pada daerah guna menarik investor.

- Program Pelayanan Penanaman Modal

  Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem yang terintegrasi.

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal

12) **Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

  Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan pembinaan pemuda sehingga terwujud peningkatan kapasitas pemuda

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

  Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan olahraga, pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif , pembinaan cabang olah raga dan sistem informasi pendataan keolahragaan dan kepemudaan.

- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

  Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan yang adaptif terhadap perkembangan jaman

13) **Bidang Statistik**

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

  Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengelolaan data statistik sektoral, peningkatan validitas data produsen, dan fasilitasi koordinasi pemerintah daerah dan

BPS guna sinkronisasi data.

14) **Bidang Persandian**

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

  Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengamanan sistem informasi supaya terwujud kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah sesuai standar dan meningkatkan jumlah sistem elektronik sudah teruji keamanannya

15) **Bidang Kebudayaan**

- Program Pengembangan Kebudayaan

  Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya yang produktif melalui pengembangan kualitas SDM, serta kegiatan pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung melalui penggalian sejarah lokal temanggung melalui narasumber ahli.

16) **Bidang Perpustakaan**

- Program Pembinaan Perpustakaan

  Program ini difokuskan pada kegiatan pembudayaan gemar membaca di kalangan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan perpustakaan daerah untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan peminjam di perpustakaan.

- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Program ini difokuskan pada kegiatan

monitoring dalam rangka pengumpulan naskah kuno penambahan koleksi nasional di wilayah Kabupaten Temanggung.

17) **Bidang Kearsipan**

- Program Pengelolaan Arsip
  Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dalam pengelolaan arsip untuk meningkatkan indeks manajemen kearsipan.

c. **Urusan Pemerintahan Pilihan**

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  Program ini difokuskan pada kegiatan swasembada pada ikan konsumsi, pengembangan kapasitas kelompok pembudi daya ikan kecil, dan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan.
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program ini difokuskan pada penyusunan dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di dilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah Kabupaten Temanggung.
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program ini difokuskan pada kegiatanpenyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha

dan risiko, penyediaan ikan untuk konsumsi dan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil.

2) Bidang Pariwisata

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program ini difokuskan pada kegiatan perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan destinasi wisata dan kegiatan pembinaan atau pendampingan desa wisata serta peningkatan kapasitas pelaku wisata

3) Bidang Pertanian

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

  Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, penyediaan peta lahan LP2B dan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya.
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, kegiatan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner untuk meningkatkan produktivitas hasil peternakan.

- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  Program ini difokuskan pada kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) penyebab bencana pertanian.
- Program Penyuluhan Pertanian
  Program inidifokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDMdan lembagapenyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dan pembentukan sekolah lapang kelompok tani.

4) Bidang Perdagangan

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana di pasar daerah, perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pa sar dengan dinas dan penertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan.

- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

  Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah dan penyusunan laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, kegiatan pengendalian pengawasan pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga/inflasi bahan pokok di masyarakat serta pelaksanaan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

- Program Pengembangan Ekspor

  Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan pelaku usaha produk ekspor unggulan.

- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program ini difokuskan pada kegiatan metrologi legal berupa tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan.

5) Bidang Perindustrian

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

  Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pembinaan IKM unggulan daerah, pameran produk IKM, dan pembinaan industri penghasil cukai.

d. **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

1) **Sekretariat Daerah**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

  Program ini difokuskan pada kegiatan penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi agar lebih berorientasi hasil dan memiliki indikator yang relevan maupun terukur sehingga ada keselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level Kabupaten, Perangkat Daerah, hingga individu dan penyusunan SAKIP.

- Program Pemerintahandan Kesejahteraan Rakyat

  Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pendokumentasian perundangan di JDIH secara tepat waktu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah, dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memenuhi standar.

- Program Perekonomian dan Pembangunan

  Program ini difokuskan pada kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mempersiapkan secara baik perencanaan dari OPD serta kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan, pengoptimalan dalam penggunaan *e-*

procurement terhadap belanja pengadaan, pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu, kerjasama yang efektif dengan dewan pengawas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD.

2) **Sekretariat DPRD**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan kesejahteraan anggota DPRD, serta pemenuhan kegiatan tertib administrasi.
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program ini difokuskan pada kegiatan percepatan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, optimalisasi kegiatan aspirasi DPRD, serta fasilitasi Tugas DPRD.

e. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

1) **Perencanaan**

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi ketercapaian kinerja pembangunan daerah, kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah, serta fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

  Program ini difokuskan pada kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di semua perangkat daerah agar terwujud konsistensi perencanaan pembangunan.

2) **Penelitian dan Pengembangan**

- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

  Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM penelitian dan pengembangan, kegiatan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah, kegiatan penjaringan dan fasilitasi serta pemanfaatan hasil kreaativitas dan inovasi, serta kegiatan pemetaan daya saing daerah, serta penguatan kelembagaan kelitbangan

3) **Keuangan**

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah

  Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan IKPD, kegiatan penyusunan dan pengelolaan keuangan serta perbendaharaan daerah sehingga dokumen penganggaran tepat waktu, serta kegiatan koordinsi dan komunikasi dengan perangkat daerah terkait dalam mewujudkan konsistensi

penganggaran dengan perencanaan.

- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
  Program ini difokuskan pada kegiatan inventarisasi dan penataan barang milik daerah.
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
  Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dan kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah.

4) **Kepegawaian**

- Program Kepegawaian Daerah
  Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan terhadap kebutuhan dan kesejahteraan pegawai di semua perangkat daerah, kegiatan fasilitasi dan motivasi pegawai perempuan dalam beberapa jabatan struktural, kegiatan optimalisasi updating pegawai secara mandiri, dan kegiatan fasilitasi sistem merit di lingkungan pegawai.

5) **Pendidikan dan Pelatihan**

- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
  Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kepesertaan pegawai dalam pengembangan kompetensi manajerial dan non manjerial

f. **Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan**

1) **Inspektorat Daerah**

- Program Penyelenggaraan Pengawasan
  Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pemerintah

dan kegiatan pencegahan korupsi

- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
  Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan dan asistensi terhadap semua pelaksana program pemerintah

g. **Unsur Kewilayahan**

1) **Kecamatan**

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi pelayana publik di kecamatan, pengadaaan sarana dan prasarana kecamatan, serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM kecamatan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Programini difokuskan pada kegiatan penguatan kelembagaan desa, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kelurahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program ini difokuskan pada kegiatan penegakan Perda, dan kegiatan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan KPT-Elektronik dan pembayaran PBB.

h. **Pemerintahan Umum**

1) **Kesatuan Bangsa dan Politik**

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

  Program ini difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan pengembangan wawasan kebangsaaan pada masyarakat semua elemen.

- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

  Program ini difokuskan pada kegiatan pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula.

- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

  Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengaawasan organisasi kemasyarakatan.

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

  Program ini difokuskan pada kegiatan pencegahan perkembangan aliran sesat, kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, kegiatan pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan, kegiatan monitoring dan evaluasi

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

  Program ini difokuskan pada kegiatan

pembinaan dan penanganan konflik sosial.

5.2.2 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Berikut adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program berdasarkan urusannya di RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Secara rinci untuk penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagunya dituangkan dalam lampiran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Tabel 5.27
Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**633.019.062.908**
1	PENDIDIKAN	120.654.381.040
2	KESEHATAN	440.912.993.400
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	41.526.698.000
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.223.999.550
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.478.012.143
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	22.222.978.775
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**66.868.080.286**
1	TENAGA KERJA	1.131.250.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	450.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	470.000.000
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	14.473.000.000
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	603.261.225
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.728.862.748
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.252.870.650
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10.689.821.400
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.285.719.000

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.949.278.750
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.111.000.000
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.578.460.200
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	30.000.000
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	334.999.600
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.420.500.000
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.350.056.713
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	9.000.000
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**33.663.751.407**
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	610.000.000
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	475.250.000
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	29.987.501.407
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.251.000.000
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	340.000.000
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**80.573.969.429**
1	SEKRETARIAT DAERAH	63.713.612.766
2	SEKRETARIAT DPRD	16.860.356.663
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**412.003.150.244**
1	PERENCANAAN	750.604.000
2	KEUANGAN	409.891.193.744
3	KEPEGAWAIAN	586.977.500
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	514.375.000
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	260.000.000
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**8.800.000.000**
1	INSPEKTORAT DAERAH	8.800.000.000
VII	**UNSUR KEWILAYAHAN**	14.597.893.805
1	KECAMATAN	14.597.893.805
VIII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	3.139.032.500
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.139.032.500
IX	**NON URUSAN**	**1.078.264.190.036,50**
Jumlah Total		**2.330.929.130.616**

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Tabel 5.28
Rencana Pembiayaan Per Urusan dan Program

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**633.019.062.908,00**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**120.654.381.040,00**	
	Program Pengelolaan Pendidikan				120.654.381.040,00	**DINDIKPORA**
		APK SD Sederajat	%	99,71		
		APK SMP Sederajat	%	100		
		APM PAUD (5-6)	%	85,95		
		APM SD Sederajat	%	93,11		
		APM SMP Sederajat	%	86,65		
		Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	%	28,57		
		Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	%	72		
		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	70		
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	62,23		
		Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	%	30		
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	angka	266		
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	angka	777		
		Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	angka	620		
		Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	angka	2379		
		Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	angka	220		
		Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	angka	255		
		Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	%	100		
		Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	%	45		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
		Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	%	60,17		
		Rasio Guru/Siswa PAUD	angka	01:15		
		Rasio Guru/Siswa SD	angka	01:28		
		Rasio Guru/Siswa SMP	angka	01:32		
		Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100		
		Iklim Iklusivitas SD	Angka	63,69		
		Iklim Iklusivitas SMP	Angka	65,04		
		Iklim Keamanan SD	Angka	76,95		
		Iklim Keamanan SMP	Angka	75,02		
		Iklim Kebhinekaan SD	Angka	75,97		
		Iklim Kebhinekaan SMP	Angka	75,05		
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	86,15		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**440.912.993.400**	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				264.131.312.400,00	**Dinas Kesehatan**
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100		
		Angka kematian bayi	Per 1.000 KH	11,84		
		Angka kematian neonatal	Per 1.000 KH	8,42		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	%	100		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
		Prevalensi wasting balita	%	8		
		Insiden Stunting balita (kasus baru)	%	14,9		
		Persentase anemia pada ibu hamil	%	11,4		
		Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	%	19		
		Persentase tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja	%	10		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		
		Prevalensi obesitas	angka	23		
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	%	100		
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	100		
		Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	%	100		
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup	%	25		
		Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	75		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	%	100		
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	50		
		Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	%	30		
		Proporsi fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna	%	30		
		Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	%	73		
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	%	20		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
		Cakupan desa/kelurahan STBM	%	25		
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	%	85		
		Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit	%	100		**RSUD**
		Persentase capaian pengembangan rumah sakit				**RSUD**
		Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan				**RSUD**
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				1.183.781.000,00	**Dinas Kesehatan**
						Dinas Kesehatan
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				351.963.000,00	**Dinas Kesehatan**
						Dinas Kesehatan
		Persentase posyandu aktif bidang kesehatan	%	98		
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				245.937.000,00	
		Persentase pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	30		
		Persentase Puskesmas dengan jumlah KLB Keracunan Pangan < 5 kejadian	%	100		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLUD)				175.000.000.000	RSUD
		Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Saki	nilai	Paripurna Nilai 92		
		Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD	nilai	Peringkat AA Nilai 94		
		Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target	%	80		
		Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target	%	80		
		Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target	%	82		
		Persentase kecukupan SDMK sesuai standar	%	75		
		Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar	%	80		
		Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan	%	75		
		Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	70		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
		Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target	%	80		
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**41.526.698.000,00**	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				3.063.000.000,00	**DPUPR**
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Angka	59,26		
	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				275.000.000,00	**DPUPR**
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	97,67		
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	100		
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	31,13		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				1.088.000.000,00	**DPUPR**
		Presentase saluran drainase kondisi baik	%	69,25		
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya				4.733.000.000,00	**DPUPR**
		Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	68,63		
		Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	%	10,13		
	Program penataan bangunan gedung				2.245.000.000,00	**DPUPR**
		Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	80,25		
		Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	%	64,64		
	Program Penyelenggaraan Jalan				20.060.000.000,00	**DPUPR**
		Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	89,85		
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	94,37		
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	22,62		
	Program Pengembangan Jasa konstruksi				62.500.000,00	**DPUPR**
		Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	%	100		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				9.050.198.000,00	**DPRKPLH**
		Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,33		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100		
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				950.000.000,00	**DPUPR**
		Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang	%	90,38		
		Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	%	50,01		
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**4.223.999.550,00**	
	Program Pengembangan Perumahan				829.999.550,00	**DPRKPLH**
		Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100		
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100		
	Program Kawasan Permukiman				3.394.000.000,00	**DPRKPLH**
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,43		
		Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,81		
		Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	69,06		
		Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	80,03		
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**3.478.012.143,00**	
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1.560.006.393,00	**SATPOL PP DAN DAMKAR**
						SATPOL PP DAN DAMKAR
		Persentase Satlinmas yang terlatih	%	0,200		
		Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	100		
		Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100		
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				863.177.750,00	**SATPOL PP DAN DAMKAR**

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
		Tingkat Waktu Tanggap *(Respon Time Rate)* dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100		
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100		
		Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	%	100		
		Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	%	61,05		
		Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi	%	6,15		
		Cakupan penanganan bencana non kebakaran Kabupaten	%	100		
	Program Penanggulangan Bencana				1.054.828.000,00	**BPBD**
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		
		Persentase koordinasi penanganan pasca bencana	%	100		
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100		
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**22.222.978.775,00**	
	Program Pemberdayaan Sosial				310.000.000,00	**DINAS SOSIAL**
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100		
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan				12.000.000,00	**DINAS SOSIAL**
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100		
	Program Rehabilitasi Sosial				1.328.000.000,00	
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100		
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100		
		Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				20.319.578.775,00	**DINAS SOSIAL**
						DINAS SOSIAL
		Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100		
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	%	86		
	Program Penanganan Bencana				174.000.000,00	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100		
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				79.400.000,00	**DINAS SOSIAL**
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**66.868.080.286,00**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**1.131.250.000,00**	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				611.000.000,00	**DINPERINAKER**
						DINPERINAKER
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50,00		
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	82,00		
	Program Penempatan Tenaga Kerja				400.250.000,00	**DINPERINAKER**
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	37,00		
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	32,00		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	37,00		
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	94,00		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	%	68,83		
	Program Hubungan Industrial				120.000.000,00	**DINPERINAKER**
		Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	%	42,52		
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	75,00		
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	47,00		
		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100,00		
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**450.000.000,00**	
	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				30.000.000,00	**DPPPAPPKB**
		Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	9,70		
	Program Perlindungan Perempuan				10.000.000,00	**DPPPAPPKB**
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100		
		Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	angka	5,15		
	Program Peningkatan kualitas Keluarga				320.000.000,00	**DPPPAPPKB**
		Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	%	84,62		
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)				80.000.000,00	**DPPPAPPKB**
		Kabupaten Layak Anak	kategori	Nindya		
		Prosentase terbentuknya DRPPA	%	30,10		
	Program Perlindungan Khusus Anak				10.000.000,00	**DPPPAPPKB**
		Persentase pernikahan usia anak	%	0,092		
		Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	%	100		
		Rasio kasus kekerasan terhadap anak	angka	8,48		
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**470.000.000,00**	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat				350.000.000,00	**DKPPP**
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	90,03		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				50.000.000,00	**DKPPP**
		Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	%	100		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan				50.000.000,00	**DKPPP**
		Presentase penanganan kerawanan pangan	%	100,00		
	Program Pengawasan Keamanan Pangan				20.000.000,00	**DKPPP**
		Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	%	100		
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**14.473.000.000,00**	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				45.000.000,00	**DPRKPLH**
		Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100		
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100		
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				220.000.000,00	**DPRKPLH**
		Indeks Kualitas Air (IKA)	angka	74,27		
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	angka	85,01		
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	angka	60,03		
		Luas Lahan kritis tertangani	Ha	4		
		Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	7,40		
		Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	23,3		
		Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	15,7		-
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				7.330.000.000,00	**DPRKPLH**
		Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	%	80		
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				10.000.000,00	**DPRKPLH**
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				10.000.000,00	**DPRKPLH**
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100		
		Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100		
		Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100		
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				20.000.000,00	**DPRKPLH**
		Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	30,93		
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				10.000.000,00	**DPRKPLH**
		Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100		
	Program Pengelolaan Persampahan				6.828.000.000,00	**DPRKPLH**
		Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah	%	34,14		
		Persentase sampah yang terkelola	%	64,07		
		Cakupan Pelayanan persampahan	%	77,85		
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**603.261.225,00**	
	Program Pendaftaran Penduduk				500.000.000,00	**DINDUKCAPIL**
		Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	97,20		
	Program Pencatatan Sipil				6.000.000,00	**DINDUKCAPIL**
		Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,98		
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				97.261.225,00	**DINDUKCAPIL**
		Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi	%	71,00		
		Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	32,00		
		Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	15,00		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**4.728.862.748,00**	
	Program Penataan Desa				10.000.000,00	**DINPERMADES**
		Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	%	100		
	Program Administrasi Pemerintahan Desa				4.558.862.748,00	**DINPERMADES**
		Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik	%	90		
		Presentase penyusunan LPPD sesuai Ketentuan	%	100		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				160.000.000,00	**DINPERMADES**
		Persentase laporan LKD	%	8,33		
		Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	%	40,60		
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**12.252.870.650,00**	
	Program Pengendalian Penduduk				493.800.000,00	**DPPPAPPKB**
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	58,8		
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {unmetneed)	%	7,58		
		Median usia kawin pertama (MUKP)	angka	20,10		
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	%	9,22		
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				7.494.989.000,00	**DPPPAPPKB**
						DPPPAPPKB
						DPPPAPPKB
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	46,95		
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	%	77,80		
		Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	%	15,91		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				4.264.081.650,00	**DPPPAPPKB**
						DPPPAPPKB
		Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	%	45,75		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
		Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	87,40		
		Indeks lansia berdaya	angka	58,00		
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**10.689.821.400,00**	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				10.689.821.400,00	**DINHUB**
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	%	42,03		
		Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	67,14		
		Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	%	99,66		
		Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	%	36,63		
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	65,11		
		Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	%	100,00		
		Persentase Layanan Perhubungan	%	100,00		
		Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	%	89,39		
		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	86,67		
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100,00		
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**2.285.719.000,00**	
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik				505.000.000,00	**DINKOMINFO**
		Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	85,75		
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	100,00		
		Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	100		
		Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik	%	17,50		
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				1.780.719.000,00	**DINKOMINFO**

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
		Persentase layanan publik secara elektronik	%	75,00		
		Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	%	37,68		
		Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	91,50		
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**1.949.278.750,00**	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi				25.000.000,00	**DINKOPDAG UKM**
		Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	%	12,25		
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian				50.000.000,00	**DINKOPDAG UKM**
		Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	%	4,54		
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)				1.874.278.750,00	**DINKOPDAG UKM**
		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	%	0,25		
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**1.111.000.000,00**	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				100.000.000,00	**DPMPTSP**
		Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	%	92		
	Program Promosi Penanaman Modal				700.000.000,00	**DPMPTSP**
		Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	92		
	Program Pelayanan Penanaman Modal				212.000.000,00	**DPMPTSP**
		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	%	92		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				99.000.000,00	**DPMPTSP**
		Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	%	92		
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**7.578.460.200,00**	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				87.500.000,00	**Dindikpora**

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
		Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	%	7,5		
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	87		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				6.990.960.200,00	
		Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	%	78		
		Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	%	63		
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				500.000.000,00	
		Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	%	100		
2.20	**BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**30.000.000,00**	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				30.000.000,00	**DINKOMINFO**
		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	angka	50,00		
		Ketersediaan data statistik sektoral	%	100		
2.21	**BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**334.999.600,00**	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				334.999.600,00	**DINKOMINFO**
		Persentase Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	91,00		
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**7.420.500.000,00**	
	Program Pengembangan Kebudayaan				7.375.500.000,00	**DINBUDPAR**
		Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	Obyek	1		
		Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	Kelompok	10		
		Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	Orang	10		
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				45.000.000,00	**DINBUDPAR**
		Jumlah Cagar Budaya	Obyek	3,00		
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**1.350.056.713,00**	
	Program Pembinaan Perpustakaan				1.276.042.213,00	**DINPUSIP**
		Persentase pengunjung di perpustakaan	%	25,00		
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	36		
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno				74.014.500,00	**DINPUSIP**
		Persentase penelusuran naskah kuno	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**9.000.000,00**	
	Program Pengelolaan Arsip				9.000.000,00	**DINPUSIP**
		Persentase arsip yang dialihmediakan	%	65		
		Persentase pembinaan kearsipan	%	75,55		
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**33.663.751.407,00**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**610.000.000,00**	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				50.000.000,00	**DKPPP**
		Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	140,20		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				250.000.000,00	**DKPPP**
		jumlah produksi perikanan budidaya	ton	10.672,01		
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				50.000.000,00	**DKPPP**
		Persentase Frekwensi penebaran benih ikan diperairan umum	%	60		
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				260.000.000,00	**DKPPP**
		Jumlah produksi pengolahan ikan	kg	395,758		
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**475.250.000,00**	
	Program Pemasaran Pariwisata				325.250.000,00	**DINBUDPAR**
		Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	100		
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	orang	707		
		Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	27.025		
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				100.000.000,00	**DINBUDPAR**
		Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	DTW	17		
		Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	orang	598		
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				20.000.000,00	**DINBUDPAR**
		Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	orang	130		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				30.000.000,00	**DINBUDPAR**
		Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata	orang	130		
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PERTANIAN**				**29.987.501.407,00**	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				20.147.681.407,00	**DKPPP**
		Produktivitas Padi	ton/ha	6,16		
		Produktivitas jagung	ton/ha	5,55		
		Produktivitas bawang putih	ton/ha	6,15		
		Produktivitas bawang merah	ton/ha	7,10		
		Produktivitas cabai rawit	ton/ha	7,01		
		Produktivitas cabai keriting	ton/ha	7,01		
		Produktivitas tembakau	ton/ha	0,643		
		Produktivitas kopi robusta	ton/ha	0,7025		
		Produktivitas kopi arabika	ton/ha	0,410		
		Jumlah produksi daging ternak besar	kg	807.654		
		jumlah produksi daging ternak kecil	kg	268.110		
		jumlah produksi ternak unggas	kg	6.243.337		
		jumlah produksi telur	kg	6.867.846		
		Persentase kelahiran pedet	%	48		
		Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	37,13		
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				5.625.000.000,00	**DKPPP**
		Persentase Prasarana yang digunakan	%	100		
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				647.300.000,00	**DKPPP**
		Persentase penanganan penyakit hewan	%	86		
		Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	76		
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian				50.000.000,00	**DKPPP**
		Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	78		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
	Program Penyuluhan Pertanian				3.517.520.000,00	**DKPPP**
						DKPPP
		Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	%	58		
		Persentase Peningkatan kelas kelp tani	%	1,30		
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**2.251.000.000,00**	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				1.936.000.000,00	**DINKOPDAGUKM**
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67,00		
		Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	2,00		
		Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	%	1,71		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				80.000.000,00	**DINKOPDAGUKM**
		Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	90,00		
	Program Pengembangan Ekspor				200.000.000,00	**DINKOPDAGUKM**
		Nilai Ekspor	US$	126.276.147,00		
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen				35.000.000,00	**DINKOPDAGUKM**
		Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	95,00		
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**340.000.000,00**	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				315.000.000,00	**DINPERINAKER**
						DINPERINAKER
		Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	48,27		
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				25.000.000,00	**DINPERINAKER**
		Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	%	2,00		
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**80.573.969.429,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**63.713.612.766,00**	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				30.144.130.000,00	
		Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	60		BAG. KESRA DAN BINA MENTAL

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	89		BAG. KESRA DAN BINA MENTAL
		Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik	%	100		BAG. PEMERINTAHAN
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100		BAG. PEMERINTAHAN
		Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100		BAG. HUKUM
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100		BAG. HUKUM
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100		BAG. HUKUM
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				868.193.500,00	
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%			Bagian Pembangunan
		Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100		
		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100		
		Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	%	100		
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan banrg/jasa	%	95		Bagian PBJ
		Presentase Pendampingan proses PBJ	%	100		
		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan		100		
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP		83,33		Bagian Perekonomian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				32.701.289.266,00	
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100		
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100		BAG. UMUM
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	%	100		BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		Persentase AKIP Perangkat daerah berpredikat BB	%	34,78		BAG. ORGANISASI
		Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	%	100		BAG. ORGANISASI
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**16.860.356.663,00**	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd				16.860.356.663,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	100		
		Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	%	100		
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100		
		Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	%	100		
		Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan oleh DPRD	%			
		Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran	%			
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**412.003.150.244,00**	
5.01	**PERENCANAAN**				**750.604.000,00**	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				350.000.000,00	**BAPPEDA**
		Persentase Keselarasan Perencaaan Pembangunan Daerah	**%**	90		
		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	**%**	55		
		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	75		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				400.604.000,00	**BAPPEDA**
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemeritahan dan pembangunan manusia	%	88		
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA	%	88		
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur	%	88		
5.02	**KEUANGAN**				**409.891.193.744,00**	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				408.945.974.500,00	**BPKPAD**
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* dalam APBD	%	75		
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100		
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100		
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	%	100		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				423.000.000,00	**BPKPAD**
		Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	100		
		Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	%	98.25		
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				522.219.244,00	**BPKPAD**
		Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	%	4,57		
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	%	98,29		
5.03	**BIDANG KEPEGAWAIAN**				**586.977.500,00**	
	Program Kepegawaian Daerah				586.977.500,00	**BKPSDM**
		Persentase layanan kepegawaian tepat waktu	%	100,00		
		Persentase keterisian jabatan	%	91		
		Persentase Kebutuhan ASN	%	100,00		
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	99,18		
		Persentase kedisiplinan ASN	%	99,43		
5.04	**BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**514.375.000,00**	
	Program Pengembangan Sumber daya Manusia				514.375.000,00	**BKPSDM**
		Persentase pengembangan potensi ASN	%	24,73		
5.05	**PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN**				**260.000.000,00**	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				53.000.000,00	**BAPPEDA**
		Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	%	60		
	Program Riset dan Inovasi Daerah				207.000.000,00	
		Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	%	50,0		
		Persentase inovasi yang dimanfaatkan	%	60,0		
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**8.800.000.000,00**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**8.800.000.000,00**	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan				5.050.000.000,00	**INSPEKTORAT**
		Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III,IV, Khusus)	%	100		
		Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
		Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	100		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				3.750.000.000,00	**INSPEKTORAT**
		Presentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan	%	100		
		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100		
		Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	100		
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100		
VII	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**14.597.893.805,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**14.597.893.805,00**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				2.013.700.710,00	
		Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan	%	100		Kecamatan Temanggung
			%	100		Kecamatan Tembarak
			%	100		Kecamatan Pringsurat
			%	100		Kecamatan Kaloran
			%	100		Kecamatan Parakan
			%	100		Kecamatan Bulu
			%	95		Kecamatan Kedu
			%	100		Kecamatan Kandangan
			%	100		Kecamatan Candiroto
			%	100		Kecamatan Ngadirejo
			%	100		Kecamatan Jumo
			%	100		Kecamatan Wonoboyo
			%	100		Kecamatan Kranggan
			%	95		Kecamatan Bejen
			%	100		Kecamatan Kledung
			%	100		Kecamatan Bansari
			%	100		Kecamatan Tlogomulyo
			%	100		Kecamatan Selopampang
			%	100		Kecamatan Gemawang
			%	100		Kecamatan Tretep
		Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan	%			
			%	**95,5**		Kecamatan Temanggung

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
			%	**97,8**		Kecamatan Tembarak
			%	95,25		Kecamatan Pringsurat
			%	**98,52**		Kecamatan Kaloran
			%	**95**		Kecamatan Parakan
			%	**95,07**		Kecamatan Bulu
			%	**95,5**		Kecamatan Kedu
			%	**96,5**		Kecamatan Kandangan
			%	**95**		Kecamatan Candiroto
			%	**97,72**		Kecamatan Ngadirejo
			%	**100**		Kecamatan Jumo
			%	**100**		Kecamatan Wonoboyo
			%	**96,25**		Kecamatan Kranggan
			%	**95,25**		Kecamatan Bejen
			%	**96,5**		Kecamatan Kledung
			%	**96,5**		Kecamatan Bansari
			%	**100**		Kecamatan Tlogomulyo
			%	**100**		Kecamatan Selopampang
			%	**100**		Kecamatan Gemawang
			%	**96**		Kecamatan Tretep
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				11.846.614.000,00	
		Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	%			SEMUA KELURAHAN
			%	84		Kecamatan Temanggung
			%	84,5		Kecamatan Parakan
			%	100		Kecamatan Ngadirejo
			%	100		Kecamatan Kranggan
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	%			SEMUA KELURAHAN
			%	**100**		Kecamatan Temanggung
			%	100		Kecamatan Parakan
			%	**100**		Kecamatan Ngadirejo
			%	**100**		Kecamatan Kranggan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				250.800.000,00	**SEMUA KECAMATAN**
		Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan	%			
			%	**100**		Kecamatan Temanggung
			%	**100**		Kecamatan Tembarak
			%	100		Kecamatan Pringsurat
			%	**100**		Kecamatan Kaloran
			%	100		Kecamatan Parakan
			%	**100**		Kecamatan Bulu

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
			%	100		Kecamatan Kedu
			%	100		Kecamatan Kandangan
			%	100		Kecamatan Candiroto
			%	100		Kecamatan Ngadirejo
			%	100		Kecamatan Jumo
			%	100		Kecamatan Wonoboyo
			%	100		Kecamatan Kranggan
			%	100		Kecamatan Bejen
			%	100		Kecamatan Kledung
			%	100		Kecamatan Bansari
			%	100		Kecamatan Tlogomulyo
			%	100		Kecamatan Selopampang
			%	100		Kecamatan Gemawang
			%	100		Kecamatan Tretep
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				486.779.095,00	**SEMUA KECAMATAN**
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan	%			
			%	100		Kecamatan Temanggung
			%	100		Kecamatan Tembarak
			%	100		Kecamatan Pringsurat
			%	100		Kecamatan Kaloran
			%	100		Kecamatan Parakan
			%	100		Kecamatan Bulu
			%	100		Kecamatan Kedu
			%	100		Kecamatan Kandangan
			%	100		Kecamatan Candiroto
			%	100		Kecamatan Ngadirejo
			%	100		Kecamatan Jumo
			%	100		Kecamatan Wonoboyo
			%	100		Kecamatan Kranggan
			%	100		Kecamatan Bejen
			%	100		Kecamatan Kledung
			%	100		Kecamatan Bansari
			%	100		Kecamatan Tlogomulyo
			%	100		Kecamatan Selopampang
			%	100		Kecamatan Gemawang
			%	100		Kecamatan Tretep
		Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	%			
			%	100		Kecamatan Temanggung

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
			%	100		Kecamatan Tembarak
			%	100		Kecamatan Pringsurat
			%	100		Kecamatan Kaloran
			%	100		Kecamatan Parakan
			%	100		Kecamatan Bulu
			%	100		Kecamatan Kedu
			%	100		Kecamatan Kandangan
			%	100		Kecamatan Candiroto
			%	100		Kecamatan Ngadirejo
			%	100		Kecamatan Jumo
			%	100		Kecamatan Wonoboyo
			%	100		Kecamatan Kranggan
			%	100		Kecamatan Bejen
			%	100		Kecamatan Kledung
			%	100		Kecamatan Bansari
			%	100		Kecamatan Tlogomulyo
			%	100		Kecamatan Selopampang
			%	100		Kecamatan Gemawang
			%	100		Kecamatan Tretep
		Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%			
			%	100		Kecamatan Temanggung
			%	100		Kecamatan Tembarak
			%	100		Kecamatan Pringsurat
			%	100		Kecamatan Kaloran
			%			Kecamatan Parakan
			%	100		Kecamatan Bulu
			%	100		Kecamatan Kedu
			%	100		Kecamatan Kandangan
			%	100		Kecamatan Candiroto
			%	100		Kecamatan Ngadirejo
			%	100		Kecamatan Jumo
			%	100		Kecamatan Wonoboyo
			%	100		Kecamatan Kranggan
			%	100		Kecamatan Bejen
			%	100		Kecamatan Kledung
			%	100		Kecamatan Bansari
			%	100		Kecamatan Tlogomulyo
			%	100		Kecamatan Selopampang
			%	100		Kecamatan Gemawang
			%	100		Kecamatan Tretep
VIII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**3.139.032.500,00**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**3.139.032.500,00**	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PD PENANGGUNGJAWAB
				TARGET		
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				535.000.000,00	**BANKESBANGPOL**
		Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100		
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				1.827.819.500,00	**BANKESBANGPOL**
		Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	%	100,00		
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				40.000.000,00	**BANKESBANGPOL**
		Persentasae ormas yang mendapat pembinaan	%	20,00		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				200.000.000,00	**BANKESBANGPOL**
		Jumlah kejadian konflik SARA	kejadian	8,00		
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				536.213.000,00	**BANKESBANGPOL**
		Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik keamanan daerah	%	100,00		
XX	**NON URUSAN**				**1.078.264.190.036,50**	
xx	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**				1.078.264.190.036,50	**Semua Perangkat Daerah**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100		
					2.330.929.130.615,50	

Selain itu, juga terdapat dukungan pembiayaan non APBD yang mendukung program prioritas pemerintah daerah diantaranya USAID IUWASH Tangguh, Baznas, APBN, dll. Sebagai contoh, Kabupaten Temanggung mendapatkan Program USAID IUWASH Tangguh Tahun 2022 - 2027 (5 Tahun). Program tersebut bertujuan untuk mencapai target air minum dan sanitasi aman serta perubahan perilaku hygiene. Untuk mencapai tujuan tersebut sampai dengan Maret 2025 sudah dilakukan beberapa kegiatan antara lain (1) Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2022-2027, (2) Penyusunan Raperbup Pengelolaan Air Limbah Domestik, (3) Penyusunan Governance Index dan Sanitation Index Tahun 2022-2027, (4) Rangkaian kegiatan bersama masyarakat untuk perubahan perilaku hygiene dan peningkatan akses air minum sanitasi di lokasi percontohan Kabupaten Temanggung, (5) Workshop kesadaran bagi pemangku kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Air mengenai Adaptasi Perubahan Iklim, (6) Workshop operasional dan pemeliharaan bagi penerima manfaat SPALDS/T, (7) Training enumerator dan survei Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) : Penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM, Penyusunan Rencana Bisnis oleh PDAM, Kajian Delineasi Mata Air yang digunakan oleh PDAM baru dilakukan di satu lokasi yaitu mata air Tuk Mulyo, Pandemulyo, Training pemicuan untuk kader di lokasi percontohan dan Training pembuatan jamban untuk KSM yang mendapat DAK.

Selain itu, dalam mendukung pembangunan daerah juga melibatkan stakeholders diluar Perangkat Daerah (OPD) karena dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang terdiri dari Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Lembaga Sosial lainnya. Khusus untuk TJSLP Kabupaten Temanggung telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. TJSLP dan Lembaga Sosial lainnya sudah mendukung pembangunan daerah dan

perannya dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di berbagai bidang. Pemerintah Kabupaten Temanggung mengapresiasi kebijakan Forum TJSLP dan Lembaga sosial lainnya yang telah berperan aktif mendukung pembangunan di Kabupaten Temanggung di berbagai bidang. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung bersama Forum TJLSP melaksanakan kegiatan pertemuan bersama membahas agenda kegiatan pembangunan daerah yang memerlukan kerjasama dengan TJSLP secara rutin tiap tiga bulan sekali. TJSLP di Kabupaten Temanggung berkomitmen sebagian laba untuk program pembangunan daerah, dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu dapat menyalurkan sendiri atau dikumpulkan melalui Forum TJSLP. Pemerintah Daerah berfungsi menyediakan *database* baik berupa program/kegiatan, lokus, dan calon penerima manfaat.

Forum TJSLP merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya, melainkan sebagai sarana meraih keuntungan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Temanggung, sehingga dapat mewujudkan kesamaan persepsi, komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung serta mampu mewujudkan program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Temanggung.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang dibentuk untuk mengetahui keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dari suatu organisasi yang berfungsi untuk memperoleh informasi kinerja yang dinilai penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja serta ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis (Permen PAN, 2007). Kedua fungsi tersebut dapat digunakan untuk evaluasi dalam rangka memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Aspek akuntabilitas kinerja ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan khususnya di Kabupaten Temanggung. Pengimplementasian indeks kinerja utama di Kabupaten Temanggung dalam perencanaan akan menghasilkan dampak secara simultan baik positif maupun negatif.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran pada tahun 2026. Penyajian Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada bab ini meliputi: indikator kinerja, satuan, dan penetapan target kinerja Tahun 2026.

6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk memberikan Gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada akhir periode perencanaan pembangunan. Adapun Indikator Kinerja Utama Daerah dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	KET
1	Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing	%	74,99	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	KET
2	Laju pertumbuhan ekonomi	%	5,10-5,50	
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,20-2,00	
4	Indeks Gini/Gini Rasio	Angka	0,370-0,360	
5	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	39,31	
6	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	73,30	
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,90-7,85	
8	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,5	
9	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	87,56	
10	Indeks Integritas Nasional	Angka	78	
11	Indek Reformasi Birokrasi	Angka	75,60	
12	Indeks Pembangunan Gender	Angka	97,13	
13	Indeks Harmoni	Angka	6,79	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Penentuan target indikator utama kinerja daerah (IKD) adalah langkah penting dalam perencanaan dan pengelolaan kinerja pemerintahan daerah. IKD digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah tercapai. Selain itu dalam penentuan target IKD juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan lokal, serta dapat diukur secara transparan dan akuntabel. Dengan begitu, pemerintahan Kabupaten Temanggung dapat lebih efektif dalam merencanakan dan mengevaluasi kinerja pembangunan.

6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro Pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Prevalensi Ketidakcukupan	%	10,6	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
	Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)			
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	31,13	IUP
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	22,3	IUP
4	Disparitas Harga	%	±10	IUP
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,5	IKU
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	1.129.065,77	IUP
7	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,33	IUP
8	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah	%	34,14	IUP
9	Cakupan pelayanan persampahan	%	77,85	
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	101,48	IUP
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,61	
12	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	79,63	IUP
13	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	90,03	
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,78	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	Tingkat kemiskinan	%	7,85-7,90	IKU & IUP
2	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	73,3	IKU
3	Usia Harapan Hidup	tahun	76,45	IUP
4	Angka kematian ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup	60,99	
5	Jumlah kasus kematian ibu	kasus	≤4	IUP
6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	21	IUP
7	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	21,22	IUP
8	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90 (1160 kasus)	IUP
9	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90	IUP
10	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,75	IUP
11	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,59	
12	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,16	IUP
13	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun	Tahun	8,04	IUP
	Kemampuan Literasi/Numerasi			
15	Literasi SD/Sederajat	Angka	61,11	
16	Literasi SMP/Sederajat	Angka	71,01	
17	Numerasi SD/Sederajat	Angka	49,53	
18	Numerasi SMP/Sederajat	Angka	63,78	
	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang): (%)			IUP
19	Literasi SD/Sederajat	%	77,23	
20	Literasi SMP/Sederajat	%	76,47	
21	Numerasi SD/Sederajat	%	71,67	
22	Numerasi SMP/Sederajat	%	72,46	
23	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,27	IUP
24	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	93,56	IUP Penentuan target berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025
24	Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun	%	989	
25	Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	52,4	
26	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	IUP
27	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	60,73	
28	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,15	IUP
29	Jumlah kejadian konflik SARA (IUP)	kejadian	8	IUP
30	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	64,79	IUP
31	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	42,55	IUP
32	Rasio kasus kekerasan terhadap anak	angka	8,48	
33	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,10 - 5,50	IKU
34	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,19	IUP
35	Indeks Pembangunan Gender	%	97,13	
36	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	39,31	IKU IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
37	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	2,20 - 2,00	IKU IUP
38	Indeks Gini/ Gini Rasio	Angka	0,370-0,360	IKU
III	**ASPEK DAYA SAING**			
1	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	2,65	IUP
2	Return on Aset (ROA) BUMD	%	4,29	IUP
3	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	2,24	IUP
4	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,63	IUP
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	69,59	IUP
6	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,65	IUP
7	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	73,5	
8	Jumlah realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rupiah	2.152.000.000.000	
9	Nilai Ekspor	US $	126.276.147	
10	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	89,85	IUP
11	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	42,03	IUP
12	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	angka	59,26	IUP
13	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,43	IUP
14	Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	91,5	IUP
15	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	%	74,99	IKU
16	Persentase desa mandiri	%	41,35	IUP
17	Tingkat Inflasi (%)	%	1,50 - 2,50	
18	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	90	IUP
19	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	%	49,35	IUP
20	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan	%	20,7	IUP
21	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	29.706	IUP
22	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	25,44	IUP
23	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,91	IUP
24	Rasio PDRB Perdagangan	%	21	
25	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	22,35	
26	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	Persen	2,7	IUP
27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	%	78,42-78,80	
28	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	17,87	IUP
29	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,48	IUP
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98	IUP
2	Indeks Integritas Nasional	Angka	78	IKU IUP
3	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektron	nilai	3,75	IUP
4	Indeks pelayanan publik	angka	3,8	IUP
5	Indeks reformasi birokrasi	angka	75,6	IKU IUP
6	Indeks kualitas kebijakan	angka	66	
7	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	~~%~~	100	
V	**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**			
	Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar			
1	**Pendidikan**			
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	tahun	8,04	Dindikpora
2	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun	Tahun	7,59	Dindikpora
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,16	Dindikpora
4	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	6,27	Dindikpora

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
5	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SD/sederajat	%	77,23	Dindikpora
6	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SMP/sederajat	%	76,47	Dindikpora
7	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SD/sederajat	%	71,67	Dindikpora
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SMP/sederajat	%	72,46	Dindikpora
8	Skor literasi membaca SD/sederajat	angka	61,11	Dindikpora
9	Skor literasi membaca SMP/sederajat	angka	71,01	Dindikpora
10	Skor numerasi SD/sederajat	angka	49,53	Dindikpora
11	Skor numerasi SMP/sederajat	angka	63,78	Dindikpora
12	Proporsi PAUD terakreditasi minimal B	%	82	Dindikpora
13	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	100	Dindikpora
14	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	96	Dindikpora
15	Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	76,92	Dindikpora
16	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun	%	93,56	Dindikpora
17	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun	%	99	Dindikpora
18	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	52,4	Dindikpora
2	**Kesehatan**			
1	Usia Harapan Hidup	tahun	76,45	Dinkes dan/atau RSUD
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	60,99	Dinkes
3	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	14,24	Dinkes
4	Cakupan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup sesuai standar	%	100	Dinkes
5	Prevalensi stunting pada balita	%	21	Dinkes
6	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup	%	66,1	Dinkes
7	Persentase penduduk dengan literasi kesehatan cukup	%	40,3	Dinkes
8	Cakupan deteksi dini penyakit	%	90	Dinkes
9	Proporsi fasilitas kesehatan sesuai standar	angka	42	Dinkes
10	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD	angka	87	RSUD
11	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,75	Dinkes
12	Cakupan Desa / Kelurahan Sehat	%	72	Dinkes
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	%	68,29	DPUPR
2	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	%	70,2	DPUPR
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	71,5	DPRKPLH
5	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**			
1	Indeks risiko bencana	Angka	101,48	BPBD
2	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,61	BPBD
3	Persentase desa tangguh bencana	%	100	BPBD
4	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	SATPOL PP DAMKAR
5	Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	SATPOL PP DAMKAR

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
6	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota	%	100	SATPOL PP DAMKAR
6	**Sosial**			
1	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	84,5	DINAS SOSIAL
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	69	DINAS SOSIAL
	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar			
7	**Tenaga Kerja**			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK**)**	~~%~~	78,42-78,80	DINPERINAKER
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
1	Indeks Pembangunan Gender	%	97,13	DPPPAPPKB
2	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,19	DPPPAPPKB
3	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	%	100	DPPPAPPKB
9	**Pangan**			
1	Indeks Ketahanan pangan	angka	79,63	DKPPP
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)*	%	10,6	DKPPP
10	**Lingkungan Hidup**			
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	1.129.065,77	DPRKPLH
11	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
1	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	98,54	DINDUKCAPIL
2	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	%	90	DINDUKCAPIL
12	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
1	Persentase desa mandiri	%	41,35	DINPERMADES
2	Nilai Skor Indeks desa	%	92.86	DINPERMADES
13	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	64,79	DPPPAPPKB
2	TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)	angka	2,17	DPPPAPPKB
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	0,78	DPPPAPPKB
14	**Perhubungan**			
1	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	%	72,94	Dinhub
2	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	%	92,02	
15	**Komunikasi dan Informatika**			
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,75	Dinkominfo
2	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	nilai	4,6	Dinkominfo
16	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**			
1	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	2,65	DINKOPDAG
2	Rasio Kewirausahaan daerah	%	4,63	DINKOPDAG
17	**Penanaman Modal**			
1	Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN	Milyar	2.152	DPMPTSP
2	Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN	Proyek	5020	DPMPTSP
3	Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan	%	92	DPMPTSP
4	Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP	Layanan	1	DPMPTSP
18	**Kepemudaan dan Olahraga**			
1	Persentase pemuda berprestasi	%	24	Dindikpora
2	Persentase atlet berprestasi	%	83,81	Dindikpora
3	Persentase prestasi olahraga	%	94,28	Dindikpora
4	Persentase wirausaha muda	%	14	Dindikpora

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	13	Dindikpora
6	Persentase Atlet Unggulan	%	30	Dindikpora
7	Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	55	Dindikpora
19	**Statistik**			
1	Nilai keterbukaan informasi publik	nilai	96,5	
20	**Persandian**			
1	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	nilai	3,3	Dinkominfo
21	**Kebudayaan**			
1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan	%	20,7	DINBUDPAR
2	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	%	49,35	DINBUDPAR
22	**Perpustakaan**			
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	60,73	Dinpusip
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	69,54	Dinpusip
3	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,15	Dinpusip
23	**Kearsipan**			
1	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	73,56	Dinpusip
2	Nilai pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten	Angka	59,59	Dinpusip
	Urusan Pemerintahan Pilihan			
24	**Kelautan dan Perikanan**			
1	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	22,3	DKPPP
25	**Pariwisata**			
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,91	DINBUDPAR
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	orang	610.271	DINBUDPAR
3	Jumlah Desa Wisata Aktif	desa	31	DINBUDPAR
4	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	%	90	DINBUDPAR
26	**Pertanian**			
	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	22,35	DKPPP
27	**Perdagangan**			
	Rasio PDRB sektor perdagangan	%	21	DINKOPDAG
	Disparitas Harga	%	±10	DINKOPDAG
28	**Perindustrian**			
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	25,44	DINPERINAKER
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
29	**Sekretariat Daerah**			
1	Indeks kualitas kebijakan	angka	66	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	67,5	
3	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	angka	3,46	
4	Indeks reformasi hukum	angka	97,08	
5	Persentase kebijakan bidang bina mental dan spiritual	%	100	
6	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	%	100	
7	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	angka	85,5	
8	Persentase AKIP Sekretariat Daerah berpredikat BB	%	74	
	IKM Sekretariat Daerah	Angka	81,25	
30	**Sekretariat DPRD**			
1	Persentase kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	%	86	
2	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	83	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
31	**Perencanaan**			
1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Angka	4,9	
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Indeks	3,01	
3	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai	21,4	
4	Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai	87	
32	**Keuangan**			

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	angka	73,9	
2	Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	20,17	
3	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	
33	**Kepegawaian**			
	Indeks Sistem Merit	angka	0,69	
34	**Pendidikan dan Pelatihan**			
	Indeks Profesionalitas ASN	angka	80,5	
35	**Penelitian dan Pengembangan**			
	Indeks Inovasi Daerah	nilai	72,5	
	Kapabilitas Inovasi	angka	2,65	
	Unsur Pengawasan Pemerintahan			
36	**Inspektorat Daerah**			
1	Maturitas SPIP	level	3,125	
2	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,003	
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3,003	
	Unsur Kewilayahan			
37	**Kecamatan**			
	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			
1		%	85	Kecamatan Temanggung
2		%	84,01	Kecamatan Tembarak
3		%	84,42	Kecamatan Pringsurat
4		%	84,15	Kecamatan Kaloran
5		%	85	Kecamatan Parakan
6		%	84,89	Kecamatan Bulu
7		%	83,25	Kecamatan Kedu
8		%	83,25	Kecamatan Kandangan
9		%	83,25	Kecamatan Candiroto
10		%	86,5	Kecamatan Ngadirejo
11		%	87,4	Kecamatan Jumo
12		%	84,16	Kecamatan Wonoboyo
13		%	82,85	Kecamatan Kranggan
14		%	83,25	Kecamatan Bejen
15		%	83,25	Kecamatan Kledung
16		%	83,25	Kecamatan Bansari
17		%	84,1	Kecamatan Tlogomulyo
18		%	84,25	Kecamatan Selopampang
19		%	83,25	Kecamatan Gemawang
20		%	83,25	Kecamatan Tretep
	Nilai capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan			
1		Angka	100	Kecamatan Temanggung
2		Angka	97,2	Kecamatan Tembarak
3		Angka	97,25	Kecamatan Pringsurat
4		Angka	98,52	Kecamatan Kaloran
5		Angka	100	Kecamatan Parakan
6		Angka	99,38	Kecamatan Bulu
7		Angka	97,25	Kecamatan Kedu
8		Angka	99,18	Kecamatan Kandangan
9		Angka	97,25	Kecamatan Candiroto
10		Angka	99,3	Kecamatan Ngadirejo
11		Angka	97,25	Kecamatan Jumo
12		Angka	96,2	Kecamatan Wonoboyo
13		Angka	96,25	Kecamatan Kranggan
14		Angka	97,75	Kecamatan Bejen
15		Angka	97,25	Kecamatan Kledung
16		Angka	97,25	Kecamatan Bansari
17		Angka	100	Kecamatan Tlogomulyo
18		Angka	97,25	Kecamatan Selopampang
19		Angka	97,25	Kecamatan Gemawang
20		Angka	97,25	Kecamatan Tretep
	Unsur Pemerintahan Umum			
38	**Kesatuan Bangsa dan Politik**			
1	Indeks Harmoni	angka	6,79	
2	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah merupakan hasil akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*). Keberhasilan capaian kinerja program Perangkat Daerah secara langsung mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Program Kabupaten Temanggung Tahun 2026

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	Program Pengelolaan Pendidikan				**DINDIKPORA**
		APK SD Sederajat	%	99,71	
		APK SMP Sederajat	%	100	
		APM PAUD (5-6)	%	85,95	
		APM SD Sederajat	%	93,11	
		APM SMP Sederajat	%	86,65	
		Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	%	28,57	
		Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	%	72	
		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	70	
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	62,23	
		Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	%	30	
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	angka	266	
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	angka	777	
		Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	angka	620	
		Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	angka	2379	
		Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	angka	220	
		Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	angka	255	
		Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	%	100	
		Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	%	45	
		Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	%	60,17	
		Rasio Guru/Siswa PAUD	angka	01:15	
		Rasio Guru/Siswa SD	angka	01:28	
		Rasio Guru/Siswa SMP	angka	01:32	
		Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	
		Iklim Iklusivitas SD	Angka	63,69	
		Iklim Iklusivitas SMP	Angka	65,04	
		Iklim Keamanan SD	Angka	76,95	
		Iklim Keamanan SMP	Angka	75,02	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
		Iklim Kebhinekaan SD	Angka	75,97	
		Iklim Kebhinekaan SMP	Angka	75,05	
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	86,15	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				**Dinas Kesehatan**
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	
		Angka kematian bayi	Per 1.000 KH	11,84	
		Angka kematian neonatal	Per 1.000 KH	8,42	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	
		Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	%	100	
		Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar	%	100	
		Prevalensi wasting balita	%	8	
		Insiden Stunting balita (kasus baru)	%	14,9	
		Persentase anemia pada ibu hamil	%	11,4	
		Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	%	19	
		Persentase tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja	%	10	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	
		Prevalensi obesitas	angka	23	
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	%	100	
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	100	
		Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	%	100	
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup	%	25	
		Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	75	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	%	100	
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	50	
		Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	%	30	
		Proporsi fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna	%	30	
		Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	%	73	
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	%	20	
		Cakupan desa/kelurahan STBM	%	25	
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	%	85	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				**RSUD**
		Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit	%	100	
		Persentase capaian pengembangan rumah sakit			

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
		Persentase capaian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				**Dinas Kesehatan**
					Dinas Kesehatan
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				**Dinas Kesehatan**
					Dinas Kesehatan
		Persentase posyandu aktif bidang kesehatan	%	98	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				
		Persentase pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	30	
		Persentase Puskesmas dengan jumlah KLB Keracunan Pangan < 5 kejadian	%	100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLUD)				RSUD
		Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Saki	nilai	Paripurna Nilai 92	
		Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD	nilai	Peringkat AA Nilai 94	
		Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target	%	80	
		Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target	%	80	
		Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target	%	82	
		Persentase kecukupan SDMK sesuai standar	%	75	
		Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar	%	80	
		Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan	%	75	
		Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	70	
		Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target	%	80	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				**DPUPR**
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Angka	59,26	
	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				**DPUPR**
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	97,67	
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	100	
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	31,13	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				**DPUPR**
		Presentase saluran drainase kondisi baik	%	69,25	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya				**DPUPR**
		Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	68,63	
		Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	%	10,13	
	Program penataan bangunan gedung				**DPUPR**
		Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	80,25	
		Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	%	64,64	
	Program Penyelenggaraan Jalan				**DPUPR**
		Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan	%	89,85	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
		Kabupaten/Kota			
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	94,37	
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	22,62	
	Program Pengembangan Jasa konstruksi				**DPUPR**
		Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	%	100	
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				**DPRKPLH**
		Persentase jumlah TPS 3R	%	17,3	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				**DPRKPLH**
		Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,33	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				**DPUPR**
		Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang	%	90,38	
		Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	%	50,01	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
	Program Pengembangan Perumahan				**DPRKPLH**
		Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	
	Program Kawasan Permukiman				**DPRKPLH**
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,43	
		Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,81	
		Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	69,06	
		Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	80,03	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				**SATPOL PP DAN DAMKAR**
					SATPOL PP DAN DAMKAR
		Persentase Satlinmas yang terlatih	%	0,2	
		Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	
		Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				**SATPOL PP DAN DAMKAR**
		Tingkat Waktu Tanggap *(Respon Time Rate)* dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	
		Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	%	100	
		Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	%	61,05	
		Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi	%	6,15	
		Cakupan penanganan bencana non	%	100	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
		kebakaran Kabupaten			
	Program Penanggulangan Bencana				**BPBD**
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	
		Persentase koordinasi penanganan pasca bencana	%	100	
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				
	Program Pemberdayaan Sosial				**DINAS SOSIAL**
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan				**DINAS SOSIAL**
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	
	Program Rehabilitasi Sosial				
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	
		Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				**DINAS SOSIAL**
					DINAS SOSIAL
		Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	%	86	
	Program Penanganan Bencana				
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				**DINAS SOSIAL**
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				
	Program Perencanaan Tenaga Kerja				**DINPERINAKER**
		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	1	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				**DINPERINAKER**
					DINPERINAKER
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50	
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	82	
	Program Penempatan Tenaga Kerja				**DINPERINAKER**

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	37	
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	32	
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	37	
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	94	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	%	68,83	
	Program Hubungan Industrial				**DINPERINAKER**
		Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	%	42,52	
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	75	
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	47	
		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				**DPPPAPPKB**
		Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	9,7	
	Program Perlindungan Perempuan				**DPPPAPPKB**
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100	
		Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	angka	5,15	
	Program Peningkatan kualitas Keluarga				**DPPPAPPKB**
		Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	%	84,62	
	Program Pemenuhan Hak Anak				**DPPPAPPKB**
		Kabupaten Layak Anak	kategori	Nindya	
		Prosentase terbentuknya DRPPA	%	30,1	
	Program Perlindungan Khusus Anak				**DPPPAPPKB**
		Persentase pernikahan usia anak	%	0,092	
		Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	%	100	
		Rasio kasus kekerasan terhadap anak	angka	8,48	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				
	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat				**DKPPP**
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	90,03	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				**DKPPP**
		Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	%	100	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan				**DKPPP**
		Presentase penanganan kerawanan pangan	%	100	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan				**DKPPP**
		Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	%	100	
2.**10**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				**DPRKPLH**
		Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	100	
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum				**DPRKPLH**
		Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				**DPRKPLH**
		Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				**DPRKPLH**
		Indeks Kualitas Air (IKA)	angka	74,27	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	angka	85,01	
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	angka	60,03	
		Luas Lahan kritis tertangani	Ha	4	
		Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	7,4	
		Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	23,3	
		Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	15,7	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				**DPRKPLH**
		Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	%	80	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				**DPRKPLH**
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				**DPRKPLH**
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	
		Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100	
		Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				**DPRKPLH**
		Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	30,93	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				**DPRKPLH**
		Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	
	Program Pengelolaan Persampahan				**DPRKPLH**
		Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah	%	34,14	
		Persentase sampah yang terkelola	%	64,07	
		Cakupan Pelayanan persampahan	%	77,85	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
	Program Pendafataran Penduduk				**DINDUKCAPIL**
		Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	97,2	
	Program Pencatatan Sipil				**DINDUKCAPIL**
		Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,98	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				**DINDUKCAPIL**
		Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi	%	71	
		Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	32	
		Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	15	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
	Program Penataan Desa				**DINPERMADES**
		Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	%	100	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Administrasi Pemerintahan Desa				**DINPERMADES**
		Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik	%	90	
		Presentase penyusunan LPPD sesuai Ketentuan	%	100	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat				**DINPERMADES**
		Persentase laporan LKD	%	8,33	
		Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	%	40,6	
	Program Peningkatan Kerjasama Desa				
		Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	%	**100**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**-**
	Program Pengendalian Penduduk				**DPPPAPPKB**
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	58,8	
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	7,58	
		Median usia kawin pertama (MUKP)	angka	20,1	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	%	9,22	
	Program Pembinaan KB				**DPPPAPPKB**
					DPPPAPPKB
					DPPPAPPKB
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	46,95	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	%	77,8	
		Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	%	15,91	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				**DPPPAPPKB**
		Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	%	45,75	
		Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	87,4	
		Indeks lansia berdaya	angka	58	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				**DINHUB**
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	%	42,03	
		Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	67,14	
		Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	%	99,66	
		Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	%	36,63	
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	65,11	
		Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	%	100	
		Persentase Layanan Perhubungan	%	100	
		Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	%	89,39	
		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	86,67	
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik				**DINKOMINFO**
		Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	85,75	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	100	
		Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	100	
		Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik	%	17,5	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				**DINKOMINFO**
		Persentase layanan publik secara elektronik	%	75	
		Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	%	37,68	
		Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	91,5	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi				**DINKOPDAG UKM**
		Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	%	12,25	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian				**DINKOPDAG UKM**
		Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	%	4,54	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)				**DINKOPDAG UKM**
		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	%	0,25	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			-	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				**DPMPTSP**
		Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	%	92	
	Program Promosi Penanaman Modal				**DPMPTSP**
		Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	92	
	Program Pelayanan Penanaman Modal				**DPMPTSP**
		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	%	92	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				**DPMPTSP**
		Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	%	92	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				**DPMPTSP**
		Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	92	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			-	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				**Dindikpora**
		Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	%	7,5	
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	87	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
		Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	%	78	
		Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	%	63	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
		Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	%	100	
2.20	**BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				**DINKOMINFO**
		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	angka	50	
		Ketersediaan data statistik sektoral	%	100	
2.21	**BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				**DINKOMINFO**
		Persentase Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	91	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				
	Program Pengembangan Kebudayaan				**DINBUDPAR**
		Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	Obyek	1	
		Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	Kelompok	10	
		Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	Orang	10	
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				**DINBUDPAR**
		Jumlah Cagar Budaya	Obyek	3	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**		-		
	Program Pembinaan Perpustakaan				**DINPUSIP**
		Persentase pengunjung di perpustakaan	%	25	
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	36	
	Program Pelestarian Koleksi Nasional & Naskah Kuno				**DINPUSIP**
		Persentase penelusuran naskah kuno	%	100	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				
	Program Pengelolaan Arsip				**DINPUSIP**
		Persentase arsip yang dialihmediakan	%	65	
		Persentase pembinaan kearsipan	%	75,55	
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				**DKPPP**
		Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	140,2	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				**DKPPP**
		jumlah produksi perikanan budidaya	ton	10.672	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				**DKPPP**
		Persentase Frekwensi penebaran benih ikan diperairan umum	%	60	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				**DKPPP**
		Jumlah produksi pengolahan ikan	kg	395.758	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				
	Program Pemasaran Pariwisata				**DINBUDPAR**
		Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan	%	100	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
		promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	orang	707	
		Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	27.025	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				**DINBUDPAR**
		Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	DTW	17	
		Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	orang	598	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual				**DINBUDPAR**
		Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	orang	130	
	Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif				**DINBUDPAR**
		Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata	orang	130	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PERTANIAN**				
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				**DKPPP**
		Produktivitas Padi	ton/ha	6,16	
		Produktivitas jagung	ton/ha	5,55	
		Produktivitas bawang putih	ton/ha	6,15	
		Produktivitas bawang merah	ton/ha	7,10	
		Produktivitas cabai rawit	ton/ha	7,01	
		Produktivitas cabai keriting	ton/ha	7,01	
		Produktivitas tembakau	ton/ha	0,643	
		Produktivitas kopi robusta	ton/ha	0,7025	
		Produktivitas kopi arabika	ton/ha	0,410	
		Jumlah produksi daging ternak besar	kg	807.654	
		jumlah produksi daging ternak kecil	kg	268.110	
		jumlah produksi ternak unggas	kg	6.243.337	
		jumlah produksi telur	kg	6.867.846	
		Persentase kelahiran pedet	%	48	
		Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	37,13	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				**DKPPP**
		Persentase Prasarana yang digunakan	%	100	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				**DKPPP**
		Persentase penanganan penyakit hewan	%	86	
		Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	76	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian				**DKPPP**
		Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	78	
	Program Penyuluhan Pertanian				**DKPPP**
		Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	%	58	
		Persentase Peningkatan kelas kelp tani	%	1,3	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				**DINKOPDAG UKM**
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67	
		Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	2	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
		Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	%	1,71	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				**DINKOPDAG** **UKM**
		Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	90	
	Program Pengembangan Ekspor				**DINKOPDAG** **UKM**
		Nilai Ekspor	US$	126.276.147,00	
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen				**DINKOPDAG** **UKM**
		Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	95	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				**DINPERINAKER**
					DINPERINAKER
		Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	48,27	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri				**DINPERINAKER**
		Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	%	0,6	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				**DINPERINAKER**
		Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	%	2	
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	60	BAG. KESRA DAN BINA MENTAL
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	89	BAG. KESRA DAN BINA MENTAL
		Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik	%	100	BAG. PEMERINTAHAN
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100	BAG. PEMERINTAHAN
		Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100	BAG. HUKUM
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	BAG. HUKUM
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	BAG. HUKUM
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Bagian Pembangunan
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%		
		Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100	
		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	
		Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	%	100	
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan banrg/jasa	%	95	
		Presentase Pendampingan proses PBJ	%	100	
		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan		100	
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP		83,33	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	BAG. UMUM
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		Persentase AKIP Perangkat daerah berpredikat BB	%	34,78	BAG. ORGANISASI

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
		Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	%	100	BAG. ORGANISASI
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd				**SEKRETARIAT DPRD**
		Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	100	
		Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	%	100	
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100	
		Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	%	100	
		Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan oleh DPRD	%		
		Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran	%		
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**				
	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pembangunan Daerah				**BAPPEDA**
		Persentase Keselarasan Perencaaan Pembangunan Daerah	**%**	90	
		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	**%**	55	
		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	75	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN				**BAPPEDA**
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemeritahan dan pembangunan manusia	%	88	
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA	%	88	
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur	%	88	
5.02	**KEUANGAN**				
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				**BPKPAD**
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* dalam APBD	%	75	
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	%	100	
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	%	100	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				**BPKPAD**
		Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	100	
		Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	%	98.25	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				**BPKPAD**
		Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	%	4,57	
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	%	98,29	
5.03	**BIDANG KEPEGAWAIAN**				
	Program Kepegawaian Daerah				**BKPSDM**
		Persentase layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	
		Persentase keterisian jabatan	%	91	
		Persentase Kebutuhan ASN	%	100	
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	99,18	
		Persentase kedisiplinan ASN	%	99,43	
5.04	**BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia				**BKPSDM**
		Persentase pengembangan potensi ASN	%	24,73	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
5.05	**PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN**				
	Program Penelitian dan Pengembangan				**BAPPEDA**
		Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	%	60	
	Program Riset dan Inovasi				
		Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	%	50	
		Persentase inovasi yang dimanfaatkan	%	60	
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				
	Program Penyelenggaraan Pengawasan				**INSPEKTORAT**
		Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III,IV, Khusus)	%	100	
		Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	100	
		Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	100	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				**INSPEKTORAT**
		Presentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan	%	100	
		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100	
		Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	100	
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	
VII	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7.01	**KECAMATAN**				
	Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik				
		Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan	%	100	Kecamatan Temanggung
			%	100	Kecamatan Tembarak
			%	100	Kecamatan Pringsurat
			%	100	Kecamatan Kaloran
			%	100	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Bulu
			%	95	Kecamatan Kedu
			%	100	Kecamatan Kandangan
			%	100	Kecamatan Candiroto
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Jumo
			%	100	Kecamatan Wonoboyo
			%	100	Kecamatan Kranggan
			%	95	Kecamatan Bejen
			%	100	Kecamatan Kledung
			%	100	Kecamatan Bansari
			%	100	Kecamatan Tlogomulyo
			%	100	Kecamatan Selopampang
			%	100	Kecamatan Gemawang
			%	100	Kecamatan Tretep
		Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan	%		
			%	95,5	Kecamatan Temanggung
			%	97,8	Kecamatan Tembarak
			%	95,25	Kecamatan Pringsurat
			%	98,52	Kecamatan Kaloran
			%	95	Kecamatan Parakan
			%	95,07	Kecamatan Bulu
			%	95,5	Kecamatan Kedu
			%	96,5	Kecamatan Kandangan
			%	95	Kecamatan Candiroto
			%	97,72	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Jumo
			%	100	Kecamatan Wonoboyo
			%	96,25	Kecamatan Kranggan
			%	95,25	Kecamatan Bejen
			%	96,5	Kecamatan Kledung
			%	96,5	Kecamatan Bansari
			%	100	Kecamatan Tlogomulyo
			%	100	Kecamatan Selopampang
			%	100	Kecamatan Gemawang
			%	96	Kecamatan Tretep

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	%		SEMUA KELURAHAN
			%	84	Kecamatan Temanggung
			%	84,5	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Kranggan
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	%		SEMUA KELURAHAN
			%	100	Kecamatan Temanggung
			%	100	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Kranggan
	Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum				**SEMUA KECAMATAN**
		Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan	%		
			%	100	Kecamatan Temanggung
			%	100	Kecamatan Tembarak
			%	100	Kecamatan Pringsurat
			%	100	Kecamatan Kaloran
			%	100	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Bulu
			%	100	Kecamatan Kedu
			%	100	Kecamatan Kandangan
			%	100	Kecamatan Candiroto
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Jumo
			%	100	Kecamatan Wonoboyo
			%	100	Kecamatan Kranggan
			%	100	Kecamatan Bejen
			%	100	Kecamatan Kledung
			%	100	Kecamatan Bansari
			%	100	Kecamatan Tlogomulyo
			%	100	Kecamatan Selopampang
			%	100	Kecamatan Gemawang
			%	100	Kecamatan Tretep
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**SEMUA KECAMATAN**
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan	%		
			%	100	Kecamatan Temanggung
			%	100	Kecamatan Tembarak
			%	100	Kecamatan Pringsurat
			%	100	Kecamatan Kaloran
			%	100	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Bulu
			%	100	Kecamatan Kedu
			%	100	Kecamatan Kandangan
			%	100	Kecamatan Candiroto
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Jumo
			%	100	Kecamatan Wonoboyo
			%	100	Kecamatan Kranggan
			%	100	Kecamatan Bejen
			%	100	Kecamatan Kledung
			%	100	Kecamatan Bansari
			%	100	Kecamatan Tlogomulyo
			%	100	Kecamatan Selopampang
			%	100	Kecamatan Gemawang
			%	100	Kecamatan Tretep
		Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	%		
			%	100	Kecamatan Temanggung
			%	100	Kecamatan Tembarak
			%	100	Kecamatan Pringsurat
			%	100	Kecamatan Kaloran
			%	100	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Bulu
			%	100	Kecamatan Kedu
			%	100	Kecamatan Kandangan
			%	100	Kecamatan Candiroto
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Jumo
			%	100	Kecamatan Wonoboyo
			%	100	Kecamatan Kranggan
			%	100	Kecamatan Bejen
			%	100	Kecamatan Kledung
			%	100	Kecamatan Bansari
			%	100	Kecamatan Tlogomulyo
			%	100	Kecamatan Selopampang
			%	100	Kecamatan Gemawang
			%	100	Kecamatan Tretep
		Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%		
			%	100	Kecamatan Temanggung
			%	100	Kecamatan Tembarak
			%	100	Kecamatan Pringsurat
			%	100	Kecamatan Kaloran
			%	100	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Bulu
			%	100	Kecamatan Kedu
			%	100	Kecamatan Kandangan
			%	100	Kecamatan Candiroto

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET 2026	PD PENANGGUNGJAWAB
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Jumo
			%	100	Kecamatan Wonoboyo
			%	100	Kecamatan Kranggan
			%	100	Kecamatan Bejen
			%	100	Kecamatan Kledung
			%	100	Kecamatan Bansari
			%	100	Kecamatan Tlogomulyo
			%	100	Kecamatan Selopampang
			%	100	Kecamatan Gemawang
			%	100	Kecamatan Tretep
VIII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				**BANKESBANGPOL**
		Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				**BANKESBANGPOL**
		Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	%	100	
	Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan				**BANKESBANGPOL**
		Persentasae ormas yang mendapat pembinaan	%	20	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya				**BANKESBANGPOL**
		Jumlah kejadian konflik SARA	kejadian	8	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				**BANKESBANGPOL**
		Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik keamanan daerah	%	100	
XX	**NON URUSAN**				
xx	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**				**Semua Perangkat Daerah**
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

BAB VII
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan daerah selama 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Dokumen RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 mengacu pada dokumen RKP Nasional Tahun 2026 serta Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yaitu "Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi".

Dokumen RKPD mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu: (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026; (2) sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2026; (3) menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan; (4) sebagai dokumen perencanaan strategis dalam pencapaian indikator kinerja daerah.

Pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Temanggung dilihat dari capaian 3 indikator kinerja utama tahun 2024 sebagai berikut:

1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** mencapai 71,86 meningkat daripada tahun 2023 (71,33). Capaian angka ini melebihi dari target yang ditetapkan pada RPD Tahun 2024.
2. **Indeks Ketahanan Daerah** mencapai 0,58 pada tahun 2024.
3. **Pertumbuhan Ekonomi** mencapai 5,04% pada tahun 2024 menunjukkan geliat perekonomian sudah mulai bangkit kembali pasca pandemi Covid-19.
4. **Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing** mencapai 65,16% pada tahun 2024.
5. **Indeks Reformasi Birokrasi** mencapai 69,05 pada tahun 2024.

Pencapaian indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja program/kegiatan dengan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas dalam penjabarannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas *pentahelix* guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi RPD Tahun 2024 rekapitulasi capaian kinerja indikator sebagai berikut:

1. Capaian **Indikator Tujuan** Kabupaten Temanggung ada 8 indikator dengan status Telah Tercapai sejumlah 6 indikator (75%) dan status Akan Tercapai sejumlah 2 indikator (25%);
2. Capaian **Indikator Sasaran** Kabupaten Temanggung antara lain:
   a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 10 indikator sasaran, dengan status Telah Tercapai sejumlah 7 indikator (70%) dan 3 indikator dengan status Akan Tercapai (30%);
   b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ada 20 indikator sasaran, dengan status telah tercapai sejumlah 12 indikator (60%) dan status Akan Tercapai ada 8 indikator (40%);
   c. Urusan pemerintahan pilihan ada 7 indikator, terdapat 5 indikator dengan status telah tercapai (71,43%) dan 2 indikator dengan status akan tercapai (28,57%);
   d. Unsur pendukung urusan pemerintahan ada 4 indikator, terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai (25%) dan 3 indikator dengan status akan tercapai (75%);
   e. Unsur penunjang urusan pemerintahan ada 8 indikator, terdapat 5 indikator dengan status telah tercapai (62,50%), 1 indikator dengan status akan tercapai (12,50%) dan 2 indikator dengan status upaya keras (25%);
   f. Unsur pengawasan urusan pemerintahan ada 1 indikator dengan status akan tercapai (100%);
   g. Unsur kewilayahan ada 1 indikator dengan status telah tercapai (100%).
   h. Unsur pemerintahan umum ada 2 indikator dengan status telah tercapai (100%).
3. Capaian **Indikator Program** Kabupaten Temanggung antara lain:
   a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 124 indikator program, terdapat 89 indikator dengan status Telah Tercapai (71,77%), 30 indikator dengan status Akan Tercapai (24,919%) dan 5 indikator dengan status perlu Upaya Keras (4,03%);
   b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ada 116 indikator program, terdapat 87 indikator

program Telah Tercapai (75%), 24 indikator Akan Tercapai (20,69%), dan 5 indikator perlu Upaya Keras (4,31%);

c. Urusan pemerintahan pilihan ada 45 indikator program, terdapat 26 indikator telah tercapai (57,78%), 16 indikator akan tercapai (35,56%) dan 1 indikator perlu upaya keras (2,22%);
d. Unsur pendukung urusan pemerintahan ada 24 indikator program, terdapat 22 indikator telah tercapai (91,67%), 1 indikator akan tercapai (4,17%) dan 1 indikator perlu upaya keras (4,17%);
e. Unsur penunjang urusan pemerintahan ada 32 indikator program, terdapat 22 indikator telah tercapai (68,75%), 8 indikator akan tercapai (25%) dan 2 indikator perlu upaya keras (6,25%);
f. Unsur pengawasan urusan pemerintahan ada 9 indikator program, terdapat 7 indikator telah tercapai (77,78%) dan 2 indikator akan tercapai (22,22%);
g. Unsur kewilayahan ada 9 indikator program, terdapat 5 indikator telah tercapai (55,56%) dan 4 indikator akan tercapai (44,44%);
h. Unsur pemerintahan umum ada 10 indikator program, dengan status telah tercapai (100%).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi pedoman dan motivasi bagi semua pihak terutama Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Temanggung,

Agus Setyawan

PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 29 TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 32 Temanggung
Telepon (0293) 491004 Faksimili (0293) 491040 491801

www.temanggungkab.go.id
bappedatemanggung
info.temanggungkab.go.id
bappeda temanggung